



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD tahun 2025-2045, adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah untuk periode 2025-2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

- a. sebagai pedoman Perangkat Daerah menyusun rencana strategis Perangkat Daerah; dan
- b. sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang bersinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Program prioritas pembangunan Bupati.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program prioritas kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memberikan acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. Visi, Misi, dan Program pembangunan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. goncangan politik;
 - d. krisis ekonomi;
 - e. konflik sosial budaya;
 - f. gangguan keamanan;
 - g. pemekaran daerah; atau
 - h. perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 terjadi perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian Sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah, pemutakhiran/perubahan peraturan perencanaan dan kebijakan di sektor keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan pengaturan dan implementasi yang terkait susunan Perangkat Daerah serta peraturan lainnya yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Setelah RPJMD Tahun 2025-2029 ini berakhir dan belum ditetapkan RPJMD baru periode berikutnya, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, RPJMN, dan rencana kerja pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (4-71/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 meliputi kedudukan RPJMD, sistematika, perubahan RPJMD, dan pengendalian evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

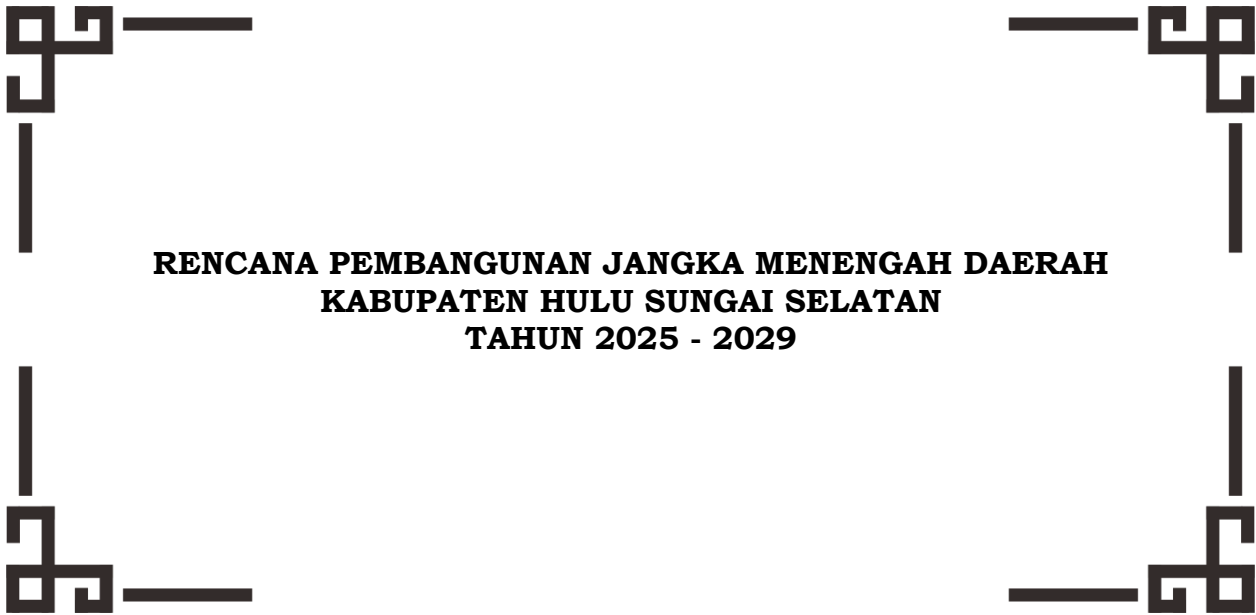
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 - 2029



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan RPJMD dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk hasil evaluasi pembangunan daerah periode sebelumnya, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta potensi yang dapat dikembangkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, RPJMD ini juga harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi agar tercipta keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan.

Penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan perkembangan global, nasional, dan regional yang mempengaruhi dinamika pembangunan daerah, termasuk agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan megatren dunia yang dapat berdampak pada kebijakan daerah. Dengan demikian, dokumen ini menjadi acuan utama dalam perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama lima tahun ke depan.

Dokumen RPJMD ini berlaku untuk masa bakti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilantik secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025, dengan periode jabatan sampai dengan tahun 2030. Seluruh visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang termuat di dalamnya merupakan penjabaran dari amanat kepemimpinan Kepala Daerah selama periode tersebut.

I.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

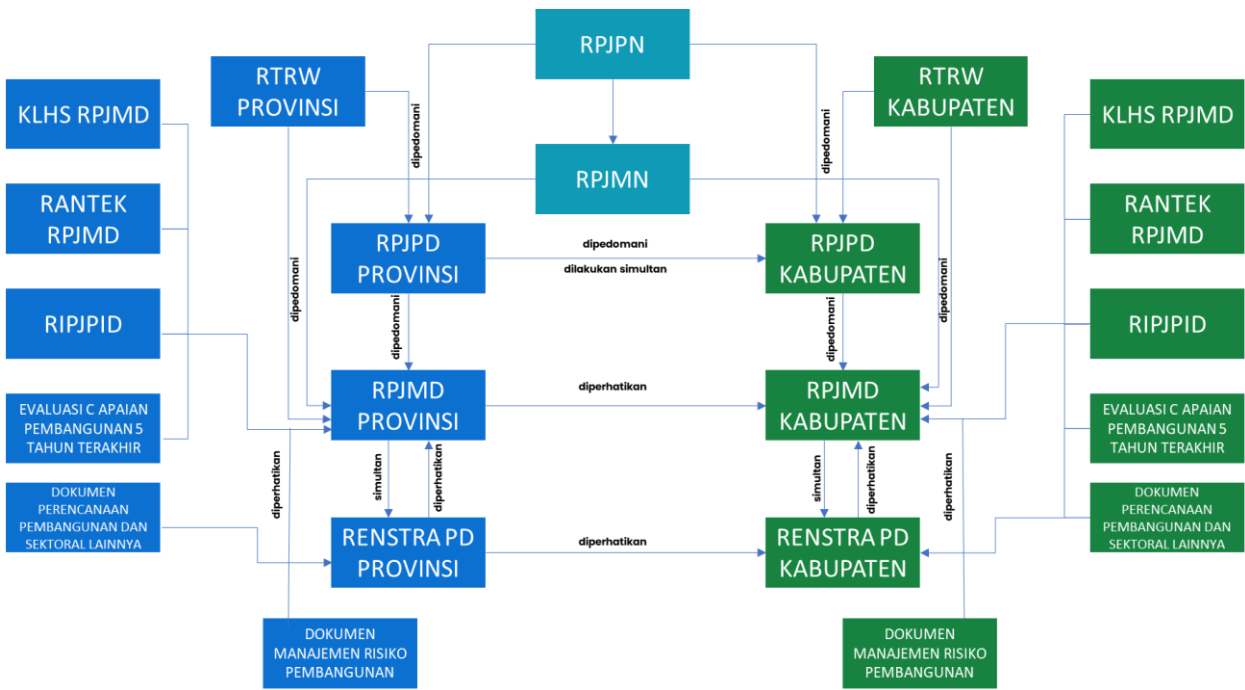
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ...);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 142);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 4).

I.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan nasional, provinsi, maupun daerah sekitarnya. Dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang erat dan saling terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJM Nasional. RPJMD berisi permasalahan dan isu strategis daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi bakal calon kepala daerah dalam merumuskan visi dan misi sesuai permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dalam RPJMD serta memperhatikan sasaran pokok dalam RPJPD. Gambar 1.1. menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dan RPJPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat. Dengan keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada tahap selanjutnya setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan

untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA-Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Perangkat Daerah. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Sinkronisasi dan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

I.3.1 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dengan RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2045, serta RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2045. Keterkaitan ini tercermin dalam keselarasan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan yang mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan tahapan operasional dalam mewujudkan visi jangka panjang daerah yang selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam menjabarkan strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan tujuan nasional.

I.3.2 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga tercipta sinergisitas antar dokumen perencanaan nasional dan daerah. Keterkaitan ini diwujudkan melalui penjabaran prioritas pembangunan nasional ke dalam kebijakan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan provinsi, sehingga arah pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan regional dan nasional. RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 juga mengintegrasikan target-target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi daerah, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, sekaligus menyesuaikan dengan konteks dan potensi lokal. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan berfungsi sebagai dokumen operasional lima tahunan yang menjembatani kebijakan pusat dan provinsi dengan kebutuhan serta karakteristik daerah, sehingga mampu memastikan kesinambungan pembangunan yang terarah, terpadu, dan mendukung pencapaian visi pembangunan nasional, provinsi, dan daerah

I.3.3 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Mengutip Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga penyusunan RPJMD harus pula memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai penetapan pola dan struktur tata ruang, penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah, agar arah kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Di samping memperhatikan RTRW, penyusunan RPJMD ini juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW dilakukan untuk menjamin bahwa penetapan tujuan,

sasaran, kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengutamakan pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta menjaga kelestarian dan mengamankan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang terdiri dari empat pilar yaitu Pilar Sosial (aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender); Pilar Ekonomi (energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi); Pilar Hukum dan Tata Kelola (langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan); serta Pilar Lingkungan Hidup (terkait isu lingkungan hidup dan perubahan iklim).

I.3.4 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 memberikan rekomendasi strategis terkait isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi yang harus diintegrasikan dalam dokumen RPJMD. Melalui proses integrasi ini, sasaran pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, keterkaitan antara RPJMD dan KLHS terwujud dalam bentuk sinkronisasi tujuan pembangunan yang berkelanjutan, mitigasi risiko lingkungan, serta penguatan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan selama periode 2025–2029 dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan."

I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 adalah untuk sebagai bahan masukan bagi calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi dan program prioritas dan sebagai bahan dasar dalam penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 akan mengacu pada tahapan dan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan peraturan lainnya tentang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Melakukan penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
3. Merumuskan gambaran keuangan daerah tahun 2025-2029;
4. Merumuskan permasalahan setiap urusan pembangunan daerah;
5. Merumuskan isu strategis daerah; serta
6. Memberikan rekomendasi arah pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam lima tahun mendatang.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Dalam bab ini akan dibahas mengenai aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek daya saing daerah; dan aspek pelayanan umum. Pada bab ini juga akan dilakukan proyeksi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029, dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal daerah.

Bab ini berisi gambaran umum keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi kinerja keuangan atau realisasi pelaksanaan APBD lima tahun terakhir (2020-2024), kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan atau proyeksi pendapatan dan belanja lima tahun ke depan (2025-2029).

Pada bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan daerah dan isu strategis daerah. Pada bab ini juga dilakukan penelaahan terhadap RPJP Nasional dan RPJM Nasional, RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJP Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045 serta kebijakan dan/atau isu regional, nasional, hingga global, yang meliputi global megatren, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan mengenai visi misi dari bupati dan wakil bupati terpilih. Pada BAB ini juga akan menguraikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama periode perencanaan.

**BAB IV KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C/17/15/3 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 Kabupaten Administratif dan 3 Swapraja. Salah satunya Afdeling Van Hoeloe Soengai dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai dengan ibukota Kandangan. Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi menjadi empat pokok dasar informasi wilayah yakni aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum yang kesemuanya merupakan “potret” terkini pembangunan daerah.

II.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 Km sebelah utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak keanekaragaman hayati yang melimpah. Tak ketinggalan pula kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang secara turun temurun dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan. Hal ini merupakan potensi pengembangan daerah yang harus digali sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

II.1.1 Kondisi Geografi Daerah

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memiliki posisi dan peran strategis dalam pembangunan daerah maupun regional Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati, kekayaan sumber daya alam, serta keberagaman budaya dan sosial, Kabupaten HSS menempati posisi penting sebagai pusat pertumbuhan berbasis agraria, konservasi, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Sentra Produksi Pangan dan Komoditas Agribisnis Kabupaten HSS merupakan wilayah yang berbasis pertanian dan perkebunan, dengan mayoritas kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Luasan lahan sawah produktif yang luas, mendukung komoditas utama seperti padi, ubi jalar, dan jagung. Sementara itu, sektor perkebunan menghasilkan komoditas unggulan

seperti karet, kelapa sawit, dan kelapa dengan tren produksi yang meningkat. Hal ini menempatkan HSS sebagai daerah lumbung pangan dan penghasil komoditas strategis di Kalimantan Selatan.

Kawasan Strategis Pariwisata dan Budaya Dengan keberadaan Pegunungan Meratus dan situs budaya Dayak Meratus, kawasan Loksado dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Beragam atraksi wisata seperti bamboo rafting, air terjun, dan rumah adat memperkuat posisi HSS sebagai destinasi ekowisata yang mendukung ekonomi lokal dan konservasi budaya.

Wilayah Konservasi dan Ekologi Strategis HSS memiliki kawasan hutan lindung, suaka alam, dan daerah rawan bencana yang berfungsi sebagai zona penyangga ekologis provinsi. Keanekaragaman hayati tinggi ditemukan di Loksado, Padang Batung, dan Daha Utara. Kabupaten ini menjadi penyangga ekosistem penting untuk regulasi iklim, air, dan habitat spesies endemik, sehingga mendukung ketahanan lingkungan di tingkat regional.

Basis Pengembangan Wilayah Agropolitan dan Minapolitan Pola pemanfaatan ruang menunjukkan arah pembangunan wilayah yang mengedepankan sektor pertanian dan perikanan berbasis kawasan. Desa-desa di Daha Selatan, Kalumpang, dan Sungai Raya berperan dalam pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan, mendukung ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan.

Titik Integrasi Ekonomi Kreatif dan Industri Kecil Menengah Produk lokal seperti dodol Kandungan, kerupuk ikan, dan anyaman purun menunjukkan potensi industri rumah tangga yang kuat. Hal ini memperkuat posisi HSS sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis potensi lokal.

Keseimbangan Pembangunan Berkelanjutan Sebagian besar wilayah HSS masih berada dalam kategori "belum terlampaui" daya dukung dan daya tampung lingkungannya, menunjukkan kapasitas ekologis yang masih tinggi. Hal ini memberikan peluang bagi pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup dan jasa ekosistem.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan daerah yang memiliki posisi strategis sebagai motor pembangunan sektor agribisnis, ekowisata, konservasi lingkungan, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan integrasi pembangunan yang berbasis potensi lokal dan keberlanjutan lingkungan, HSS siap menjadi pusat pertumbuhan wilayah selatan Kalimantan Selatan yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah Indikatif, PBW sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 adalah sebesar 1.697,224 Km2. Wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi 11 wilayah administrasi tingkat Kecamatan, 144 Desa dan 4 Kelurahan dengan pusat pemerintahan sekaligus ibukotanya yakni Kota Kandangan. Secara rinci wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel II-1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Kelurahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan			
No	Kecamatan	Luas (Km2)	Desa/Kelurahan
1	Padang Batung	207,24	17 Desa
2	Loksado	314,10	11 Desa
3	Telaga Langsat	62,05	11 Desa
4	Angkinang	56,09	11 Desa
5	Kandangan	96,83	14 Desa 4 Kelurahan
6	Sungai Raya	63,36	18 Desa
7	Simpur	92,56	11 Desa
8	Kalumpang	115,69	9 Desa
9	Daha Selatan	201,31	16 Desa
10	Daha Barat	231,82	7 Desa
11	Daha Utara	255,97	19 Desa
Jumlah		1.697,224	144 Desa 4 Kelurahan

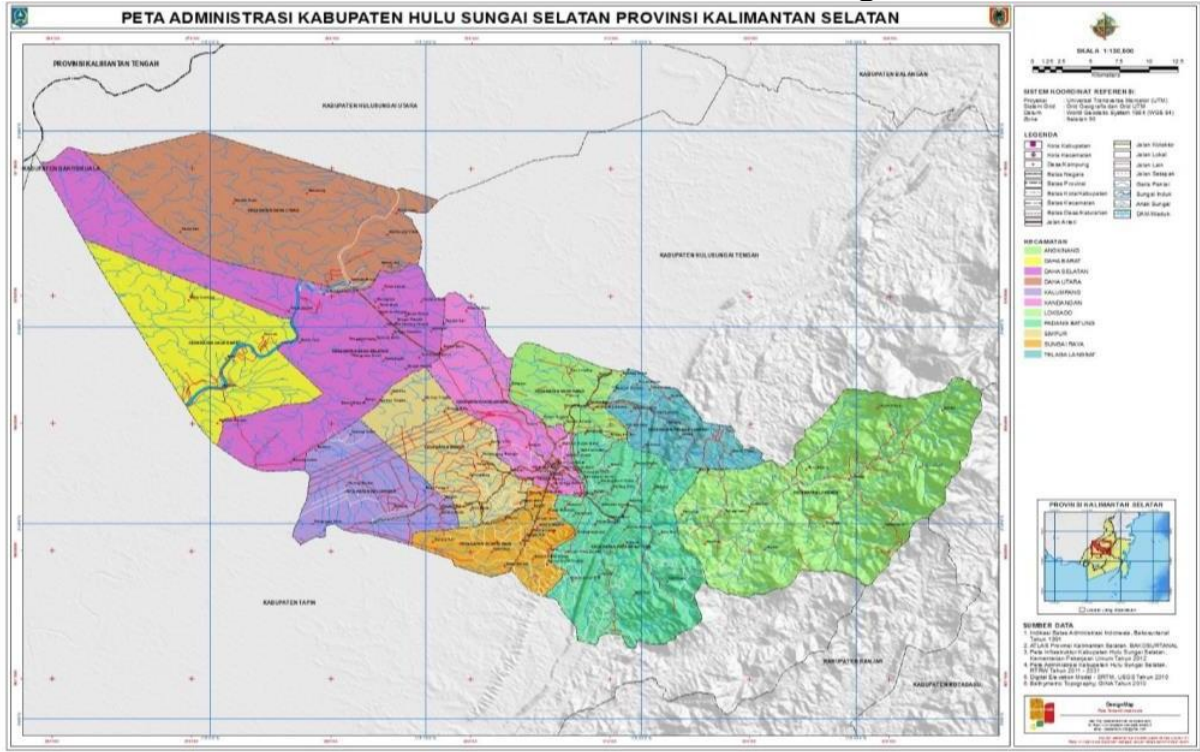
Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Letak dan Kondisi Geografi

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak diantara - 02029'59" sd -02056'10"LS dan 114051'19"BT sd 115036'19"BT. Dimana Kota Kandangan terletak 2°47'LS - 115°40'BT yang dilewati oleh Sungai Amandit, anak sungai dari Sungai Barito.

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara
- Sebelah timur : Kabupaten Banjar dan Kotabaru
- Sebelah selatan : Kabupaten Tapin
- Sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin

Gambar II-1 Peta Administasi Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Topografis

Tinggi suatu tempat adalah tinggi tersebut yang diukur dari permukaan laut. Ketinggian suatu tempat berkaitan dengan naik turunnya temperatur/suhu udara, dimana semakin tinggi suatu tempat suhunya semakin menurun. Begitu pula sebaliknya semakin rendah suatu tempat suhunya akan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena terjadinya proses pemampatan dan perenggangan udara.

Di Kabupaten Hulu Sungai selatan, daerah berbukit dengan lereng terjal (antara 25 sampai lebih dari 40%) mencapai luas hampir 12% dari total keseluruhan wilayah. Daerah perbukitan tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsat, sebagian Sungai Raya dan yang paling luas terdapat di Kecamatan Loksado. Daerah dengan lereng terjal ini merupakan bagian dari jatur Pegunungan Meratus yang sebagian difungsikan sebagai kawasan lindung.

Tabel II-2 Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Ketinggian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
Kelas Lereng (%)		
0-2	128.057	70,95
2-15	20.737	11,49
15-40	19.090	10,58
>40	12.610	6,99
Kelas Ketinggian (m)		
0-7 m	105.198	58,3
7-25 m	18.254	10,1
25-100 m	16.590	9,2

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
100-500 m	27.546	15,3
500-1.000 m	11.226	6,2
> 1.000 m	1.680	0,9

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai selatan

Geologi

Secara regional, daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian dari Cekungan Barito yang terbentuk pada Kala Eosen-Oligosen, pada kala itu terjadi penurunan daratan yang mengakibatkan genangan air laut (Transgresi). Satuan batuan yang terdapat di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dikelompokkan dalam formasi batuan dari yang paling tua ke muda adalah sebagai Berikut : batuan tertua adalah Batuan Granit yang merupakan gabungan granodiorit dan diorite berumur Kapur Awal. Berdasarkan hasil penelitian “Lembaga Penelitian Tanah” Bogor tahun 1974 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 5 (lima) jenis tanah seperti pada tabel berikut :

Tabel II-3 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Jenis Tanah					Jumlah
		I	II	III	IV	V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padang Batung	950	11.251	8.192	-	-	20.393
2	Loksado	14.750	-	19.139	-	-	33.889
3	Telaga Langsat	700	2.694	-	2.414	-	5.808
4	Angkinang	-	-	-	5.840	-	5.840
5	Kandangan	-	220	-	10.451	-	10.671
6	Sungai Raya	3.670	-	150	4.276	-	8.096
7	Simpur	-	-	-	8.235	-	8.235
8	Kalumpang	-	-	-	13.507	-	13.507
9	Daha Selatan	-	-	-	24.619	22.625	47.244
10	Daha Utara	-	-	-	18.279	8.532	26.811
11	Daha Barat	-	-	-	-	-	0
Jumlah		20.070	14.165	27.481	87.621	31.257	180.494
Persentase		11,12	7,85	15,17		17,26	100

Keterangan Jenis Tanah :
I Komplek podsolik merah kuning pegunungan
II Komplek podsolik merah kuning dataran
III Komplek podsolik merah kuning lathosol dan lithosol
IV Orgonosol gleihumus
V Alluvial

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan

Hidrologi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sistem hidrologi yang terdiri dari sungai, danau dan rawa. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan umumnya berpangkal di pegunungan Meratus dan berakhir di laut Jawa setelah bergabung dengan sungai Barito. Sungai-sungai besar yang mengalir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sungai Negara 2. Sungai Angkinang 3. Sungai Amandit 4. Sungai Kajang.

Air Permukaan

Air Permukaan yang didapatkan di daerah kajian adalah sungai besar yang mengalir di sepanjang tahun daagka kemn sungai kecil. Ada dua sungai besar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Sungai Amandit yang berhulu dari Pegunungan Meratus di sekitar Kecamatan Loksado dan Sungai Negara yang membelah Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat. Sungai lainnya umumnya merupakan sungai-sungai kecil yang semuanya bermuara di Sungai Amandit diantaranya adalah S. Haliang, Datartikang, Haruyan, Bumbuyanin, Tariban, Mentalo dan sungai Pipii. Pola aliran sungai yang ada di daerah kajian secara umum berpola dendritik.

Tabel II-4 Daftar DAS/Sub DAS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Nama DAS	Sub-Sub DAS	Luas (Ha)
1	Sub Das Amandit	Amandit (C1-B1)	31,28
2	Sub Das Amandit	Amandit (A1-A2)	18,85
3	Sub Das Amandit	Amandit (A2-A3)	25,97
4	Sub Das Amandit	Amandit (A3-A4)	11,09
5	Sub Das Amandit	Amandit (A4-A5)	11,13
6	Sub Das Amandit	Amandit (A5-A6)	29,76
7	Sub Das Amandit	Amandit (A6-A7)	20,99
8	Sub Das Amandit	Amandit (A7-A8)	18,14
9	Sub Das Amandit	Amandit (A8-A9)	67,99
10	Sub Das Amandit	Amandit (A9-A10)	59,58
11	Sub Das Nagara	Penahayan	6,20
12	Sub Das Nagara	Mangkiki	20,00
13	Sub Das Nagara	Piranim	15,70
14	Sub Das Nagara	Nii	9,80
15	Sub Das Nagara	Harayun	56,10
16	Sub Das Nagara	Tariban	35,90
17	Sub Das Nagara	Atib	5,20
18	Sub Das Nagara	Maniani	14,70
19	Sub Das Nagara	Malinau	54,90
20	Sub Das Nagara	Mandapai	28,60
21	Sub Das Nagara	Lok Bahari	35,90
22	Sub Das Nagara	Panakulan	50,70
23	Sub Das Nagara	Malutu	21,20
24	Sub Das Nagara	Bangakrung	51,10
25	Sub Das Nagara	Anjadihuma	31,30
Total			732,08

Sumber : RTRW Kab.HSS

Tabel II-5 Danau, Rawa, Situ, Telaga, dan Waduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

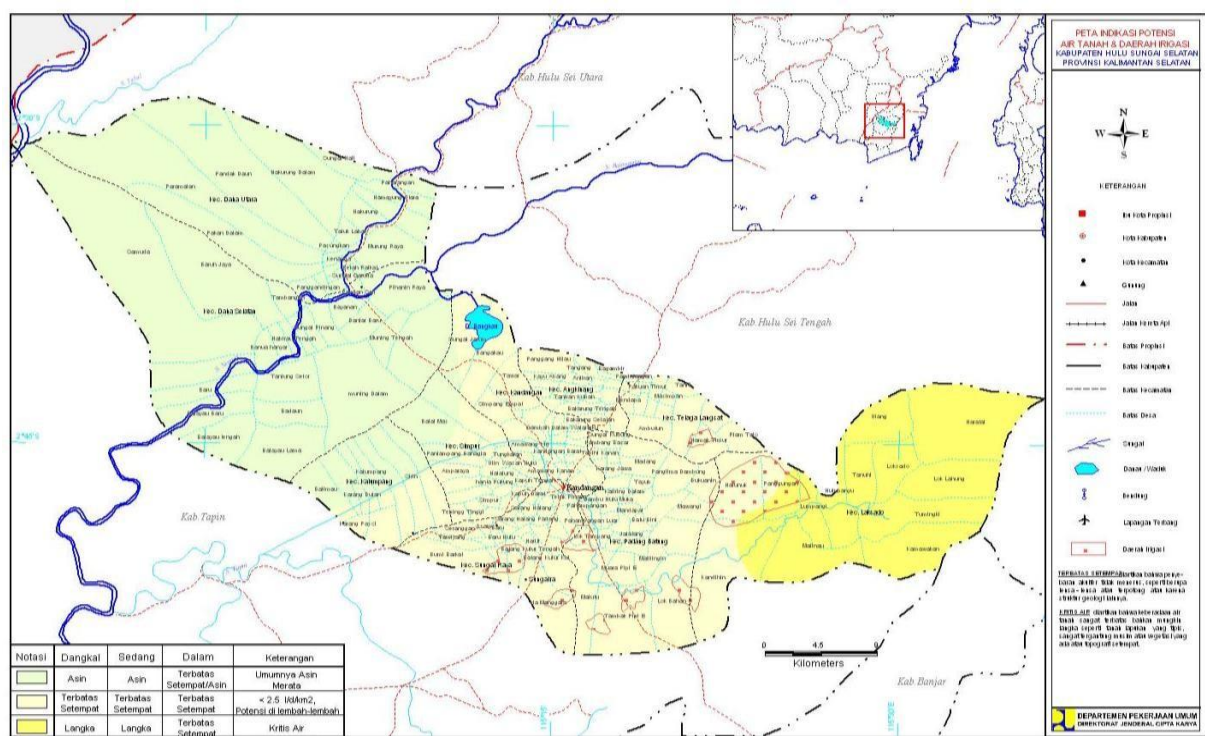
No.	Nama Perairan	Luas (Ha)	Lokasi	
			Desa	Kecamatan
1	Danau Bangkau	615	Bangkau	Kandangan
2	Danau Paharangan	8	Paharangan	Daha Utara
3	Rawa Simpurn dan Danau Pantai Ulin	5	Simpur	Simpur
4	Danau Muning Dalam	6	Muning Dalam	Daha Selatan
5	Danau Bago Tanggul	5	Bago Tanggul	Kalumpang
6	Danau Bajayau Lama	5	Bajayau	Daha Barat

Sumber : RTRW Kab.HSS Tahun 2013-2032

Air Tanah

Kedalaman muka air tanah dapat diamati dari sumur penduduk maupun sumur bor. Di daerah di Kota Kandangan, air tanah terdapat pada kedalaman 4–9 m. pada lapisan pasir lempungan berkerikil. Fluktuasi air tanah bebas pada musim kemarau dan musim hujan cukup besar yaitu sekitar 2 m. Kedalaman perangkat air tanah ditemukan pada kedalaman lebih dari 30 m terdapat pada lapisan pasir, kerikil dengan sedikit lempungan setebal 15–30 m. Kualitas air tanah rata-rata bersifat asam yaitu pH berkisar antara 4,57–5,50, hal ini menunjukkan sampel air yang diambil berlokasi di daerah yang mengandung Batu bara. Secara umum kondisi potensi air tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II-2 Peta Kondisi Air Tanah di Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : Nawasis Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Klimatologi

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan wilayah tropis dimana pada tahun 2022 memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi dengan range rata-rata antara 70,30% hingga 85,20% dan temperatur udara sekitar 27,60°C hingga 29,80°C. Selain itu, terdapat beberapa bulan yang memiliki curah hujan tinggi dan beberapa cukup rendah hingga rincian lengkap terkait kondisi iklim di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terlihat pada tabel berikut

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan wilayah tropis dimana pada tahun 2022 memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi dengan range rata-rata antara 76,20% hingga 85,20% dan temperatur udara

sekitar 27,70°C hingga 33°C. Selain itu, terdapat beberapa bulan yang memiliki curah hujan tinggi dan beberapa cukup rendah hingga rincian lengkap terkait kondisi iklim di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-6 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan dan Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Bulan	Padang Batung		Loksado		Telaga Langsat		Angkinang		Kandangan		Sungai Raya		Simpur		Kalumpang		Daha Selatan		Daha Utara	
	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
Januari	421.00	23	400.50	18	319.00	22	419.50	15	248.00	21	265.80	22	505.00	22	371.00	19	274.80	18	437.50	19
Februari	486.50	24	466.00	18	396.00	19	439.00	12	365.50	22	430.60	24	557.00	21	831.00	17	202.40	13	41.00	21
Maret	429.50	20	454.00	16	315.00	20	485.50	11	361.00	18	384.40	24	359.00	17	665.00	18	339.40	15	430.00	20
April	161.50	17	153.50	10	115.00	14	139.00	4	100.00	13	177.90	18	123.00	11	211.00	15	115.70	9	197.50	12
Mei	133.00	14	107.00	6	152.50	11	59.00	2	178.00	13	91.10	11	128.00	5	212.00	14	124.20	8	130.50	9
Juni	177.00	10	88.00	6	114.50	9	104.00	2	145.00	9	244.20	10	209.00	9	393.50	7	142.70	5	86.00	9
Juli	230.50	11	197.00	10	180.50	11	195.00	5	118.00	10	219.40	10	180.00	9	298.00	8	110.20	6	47.00	4
Agustus	1.50	8	5.40	1	25.00	2	43.00	1	43.00	2	0.50	1	46.00	2	2.50	1	-	-	-	-
September	18.50	4	21.50	4	53.50	4	26.50	2	43.00	4	34.50	3	80.00	4	41.50	4	64.80	4	106.00	5
Oktober	98.50	9	65.00	7	102.00	9	90.30	4	130.00	8	75.00	4	167.00	7	73.00	6	132.40	8	138.00	9
November	242.00	15	290.00	136	268.00	12	220.50	9	246.00	10	269.10	16	261.00	11	161.50	12	143.70	7	191.00	14
Desember	274.50	17	290.00	13	424.00	21	450.00	14	424.00	15	404.30	25	323.50	14	435.50	12	267.00	13	375.50	13

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Tabel II-7 Tabel Rata-Rata Kelembaban Udara dan Rata-Rata Temperatur Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

No	Bulan	Rata-Rata Temperatur (°C)					Rata-Rata Kelembaban Udara (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	28.14	28.59	33.00	27.60	28.20	80.00	79.88	79.00	78.40	80.80
2	Februari	28.13	28.23	27.70	27.80	27.60	78.50	79.63	76.90	80.60	82.00
3	Maret	27.96	28.90	28.20	28.20	28.40	77.63	78.88	79.70	80.30	80.60
4	April	28.40	28.65	28.60	28.20	28.80	78.13	79.00	78.60	79.10	79.80
5	Mei	28.90	26.53	28.80	28.90	29.70	75.88	80.38	78.70	78.40	77.30
6	Juni	28.92	28.74	28.90	28.50	29.00	76.50	78.00	75.00	78.90	76.50
7	Juli	28.44	28.39	28.40	28.50	28.60	73.13	77.88	76.20	76.90	76.00
8	Agustus	28.87	29.50	28.20	28.10	28.60	70.75	75.38	78.20	74.90	71.60
9	September	29.47	29.01	28.50	28.60	29.10	69.69	76.75	78.00	76.60	70.30
10	Oktober	29.20	29.33	29.00	28.60	29.80	59.13	75.75	77.90	78.80	73.30
11	November	29.22	29.08	28.70	28.70	29.40	69.25	77.50	79.80	77.00	75.10
12	Desember	27.45	28.06	28.10	28.30	29.60	81.63	83.13	85.20	83.40	82.00

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Pada Tabel II.7 dapat dilakukan beberapa analisis diantaranya adalah :

Pada Bulan Januari hingga Maret Curah hujan cukup tinggi dengan hari hujan yang juga banyak di semua kecamatan, menunjukkan bahwa awal tahun adalah musim hujan yang intens. Misalnya, di Kecamatan Padang Batung, curah hujan mencapai 421 mm pada Januari dengan 23 hari hujan. Bulan April hingga September: Curah hujan mulai menurun drastis dengan beberapa kecamatan mengalami curah hujan sangat rendah, khususnya pada bulan Agustus yang mencatat curah hujan sangat rendah atau bahkan hampir tidak ada hujan di beberapa kecamatan seperti di Padang Batung dan Telaga Langsung. Bulan Oktober hingga Desember: Curah hujan kembali meningkat, menandakan musim penghujan kembali terjadi menjelang akhir tahun. Contohnya, pada bulan Desember, curah hujan di Kecamatan Angkinang mencapai 450 mm dengan 14 hari hujan.

Kecamatan Loksado memiliki pola curah hujan yang cukup stabil sepanjang tahun, dengan peningkatan signifikan pada bulan November dan Desember (290 mm dan 290 mm). Kecamatan Kalumpang mencatat curah hujan tertinggi pada bulan Februari dengan 831 mm, meskipun hanya ada 17 hari hujan. Hal ini menunjukkan intensitas hujan yang sangat tinggi dalam periode singkat. Kecamatan Daha Utara menunjukkan variasi yang relatif lebih stabil dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan Januari (437.5 mm) dan kembali meningkat pada bulan Desember (375.5 mm).

Hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Februari di beberapa kecamatan seperti Simpur (24 hari) dan Sungai Raya (24 hari), menunjukkan distribusi hujan yang relatif konsisten sepanjang bulan. Sebaliknya, bulan April hingga September menunjukkan hari hujan yang sangat sedikit, terutama di Kecamatan Angkinang yang hanya mencatat 2 hari hujan pada bulan Mei dan Juni.

Beberapa kecamatan seperti Padang Batung dan Simpur mengalami curah hujan yang sangat rendah pada bulan Agustus (masing-masing 1.5 mm dan 0.5 mm) yang hampir tidak ada hujan, yang bisa menjadi indikasi periode kekeringan di daerah tersebut. Secara umum, Pola curah hujan di Hulu Sungai Selatan menunjukkan adanya musim hujan yang kuat pada awal dan akhir tahun, dengan periode kering yang signifikan di tengah tahun. Variasi yang cukup besar antara kecamatan menandakan bahwa distribusi curah hujan tidak merata. Hal ini dapat berdampak pada sektor pertanian, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan, di mana daerah-daerah tertentu mungkin

memerlukan strategi penanganan kekeringan yang lebih baik dan manajemen sumber daya air yang lebih efektif untuk menghadapi fluktuasi curah hujan ini.

Tabel II-8 Tabel Temperatur & Kelembaban Udara (%) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

No	Bulan	Suhu/Temperatur			Kelembaban Udara (%)		
		Min	Rata-rata	Max	Min	Rata-rata	Max
1	Januari	23.70	28.20	32.70	63.00	80.80	98.50
2	Februari	22.80	27.60	32.30	66.00	82.00	98.00
3	Maret	23.60	28.40	33.20	62.30	80.60	99.00
4	April	24.30	28.80	33.30	61.50	79.80	98.00
5	Mei	24.50	29.70	34.90	57.00	77.30	97.50
6	Juni	24.00	29.00	34.00	54.50	76.50	98.50
7	Juli	23.20	28.60	34.10	52.50	76.00	99.50
8	Agustus	22.20	28.60	35.10	44.80	71.60	98.50
9	September	22.140	29.10	36.10	42.30	70.30	98.30
10	Oktober	22.60	29.80	37.10	48.50	73.30	98.00
11	November	24.00	29.40	34.90	51.80	75.10	98.50
12	Desember	24.20	29.60	35.10	66.00	82.00	98.00

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dala Angka Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Suhu minimum terendah tercatat pada bulan Agustus dengan 22.20°C, yang menunjukkan bahwa bulan ini memiliki malam yang lebih sejuk dibandingkan bulan lainnya. Suhu minimum tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 24.20°C. Suhu rata-rata relatif stabil sepanjang tahun, dengan nilai berkisar antara 27.60°C hingga 29.80°C. Suhu rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Oktober (29.80°C) dan terendah pada bulan Februari (27.60°C). Suhu maksimum tertinggi tercatat pada bulan Oktober dengan 37.10°C, menandakan puncak musim panas. Suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Februari dengan 32.30°C, yang masih menunjukkan kondisi cuaca yang cukup panas.

Tabel II-9 Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 - 2024

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	47,62	51,35	51,10	62,90	37,86
Februari	55,88	58,82	58,90	49,10	45,71
Maret	55,80	72,60	63,10	59,60	54,92
April	73,75	71,86	82,50	59,60	67,14
Mei	68,53	79,05	66,00	71,00	83,23
Juni	62,82	70,77	76,40	66,40	72,47
Juli	73,70	59,77	63,20	55,60	69,87
Agustus	76,97	82,51	4,20	62,00	90,25
September	79,67	66,29	51,50	50,20	79,20
Oktober	79,95	74,01	61,30	53,40	74,52
November	68,97	67,39	59,40	55,30	66,67
Desember	45,50	45,79	50,50	53,30	61,20

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Data penyinaran matahari di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan setiap bulannya, mencerminkan pengaruh perubahan cuaca dan musim, dapat didapat 3 pendekatan berdasarkan hasil yang ada yaitu pendekatan analisa secara tahunan perbandingan antar tahun dan pola musiman :

Pada umumnya, bulan Januari hingga Maret cenderung memiliki tingkat penyinaran matahari yang lebih rendah dibandingkan dengan bulan lainnya. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi langit yang lebih berawan pada awal tahun. Misalnya, pada tahun 2024, tingkat penyinaran matahari pada bulan Januari adalah 37,86%, yang merupakan salah satu yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Bulan-bulan dari Mei hingga September cenderung menunjukkan peningkatan tingkat penyinaran matahari. Puncak penyinaran biasanya terjadi pada bulan Agustus atau September. Pada tahun 2024, bulan Agustus mencatat penyinaran tertinggi dengan 90,25%, menandakan cuaca cerah dan lebih sedikitnya hari berawan atau hujan pada periode ini.

Bulan Oktober hingga Desember biasanya menunjukkan fluktuasi penyinaran yang lebih besar, yang dapat dipengaruhi oleh peralihan antara musim kemarau dan musim penghujan. Pada tahun 2023, bulan Desember memiliki tingkat penyinaran sebesar 61,20%, menunjukkan peningkatan dari beberapa bulan sebelumnya, tetapi masih lebih rendah dibandingkan bulan-bulan pertengahan tahun.

Penyinaran matahari di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak selalu konsisten dari tahun ke tahun. Misalnya, pada bulan April 2024, penyinaran mencapai 67,14%, yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya tetapi lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 82,50%. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti variasi cuaca, intensitas curah hujan, dan pola awan di daerah tersebut.

Beberapa bulan menunjukkan perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya, pada bulan Agustus 2022, tingkat penyinaran sangat rendah (4,20%), yang kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrem seperti badai atau periode hujan yang tidak biasa. Sebaliknya, pada tahun 2024, penyinaran pada bulan yang sama mencapai 90,25%, mencerminkan kondisi cuaca yang lebih stabil dan cerah.

Bulan-bulan dari Mei hingga September umumnya berada di musim kemarau, yang ditandai dengan peningkatan penyinaran matahari karena lebih

sedikitnya hari hujan dan langit yang lebih cerah. Tahun 2024 mengikuti pola ini, dengan puncak penyinaran terjadi pada bulan Agustus (90,25%) dan September (79,20%).

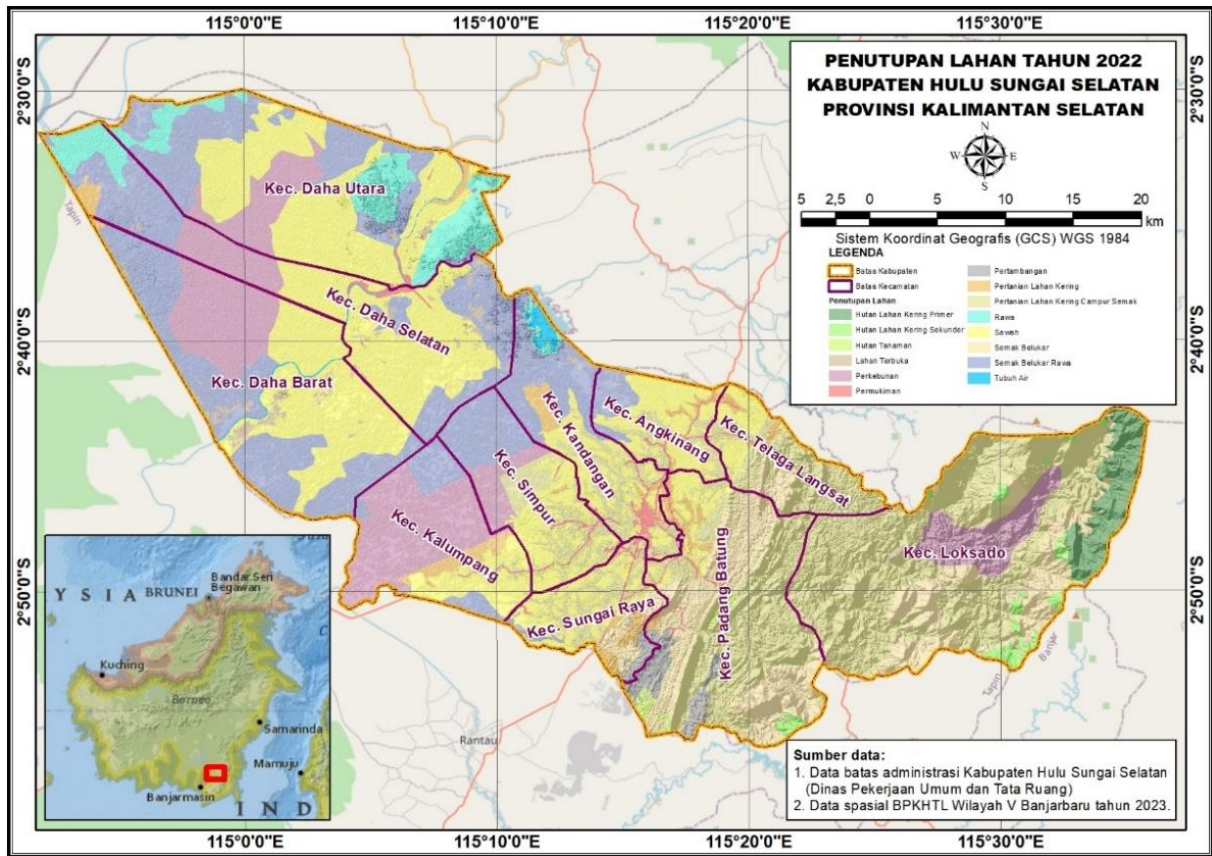
Bulan Januari hingga April dan Oktober hingga Desember biasanya merupakan bagian dari musim penghujan, di mana penyinaran matahari cenderung lebih rendah akibat curah hujan yang tinggi dan kondisi langit yang lebih berawan. Pada tahun 2024, bulan Januari memiliki penyinaran yang relatif rendah (37,86%), sesuai dengan pola musim penghujan.

Penggunaan Lahan

Perubahan tutupan hutan menjadi tutupan lahan lainnya dalam beberapa periode menyebabkan perubahan dalam pola tertentu. Pola perubahan didorong oleh berbagai faktor pemicu, baik secara langsung atau tidak langsung dan faktor-faktor yang direncanakan atau tidak direncanakan. Pertumbuhan Penduduk melalui perambahan dan pembukaan kawasan hutan menjadi perkebunan, ladang, area pertanian, dan pemukiman merupakan salah satu dari beberapa faktor pemicu secara tidak langsung.

Faktor langsung adalah konstruksi jalan yang mendukung pengembangan permukiman dan juga pengembangan sektor pariwisata dan atau ekowisata. Faktor yang direncanakan adalah kebijakan hutan untuk konversi kawasan menjadi penggunaan lain, sedangkan faktor yang tidak direncanakan adalah kebakaran hutan di wilayah yang luas (Rijal et al., 2016 dalam Khalil, Bilaluddin, 2009). (Lillesand dan Kiefer, 1993 dalam Bilaluddin Khalil, 2009) menyatakan bahwa perubahan lahan terjadi karena manusia yang mengubah lahan pada waktu yang berbeda. Pola-pola perubahan lahan terjadi akibat responnya terhadap pasar, teknologi, pertumbuhan populasi, kebijakan pemerintah, degradasi lahan, dan faktor sosial ekonomi lainnya (Meffe dan Carrol, 1994 dalam Khalil, Bilaluddin, 2009). (Menurut Darmawan, 2003 dalam Khalil, Bilaluddin, 2009) salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lahan adalah faktor sosial ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia terutama masyarakat sekitar kawasan. (Yatap, 2008 dalam Khalil, Bilaluddin, 2009) menyatakan peubah sosial ekonomi yang berpengaruh dominan terhadap perubahan penggunaan dan penutupan lahan adalah kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, luas kepemilikan lahan, perluasan pemukiman dan perluasan lahan pertanian.

Gambar II-3 Penutupan lahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022



Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, penting bagi kita untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan hati-hati agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki posisi yang vital sebagai kota penyangga dari ibukota provinsi Kalimantan Selatan, sehingga perubahan tata guna lahan dan peruntukannya menjadi hal yang sangat penting. Pertumbuhan yang cukup pesat dalam kawasan terbangun seperti perumahan, industri, pergudangan, fasilitas umum dan sebagainya, menuntut kita untuk bersikap bijak dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

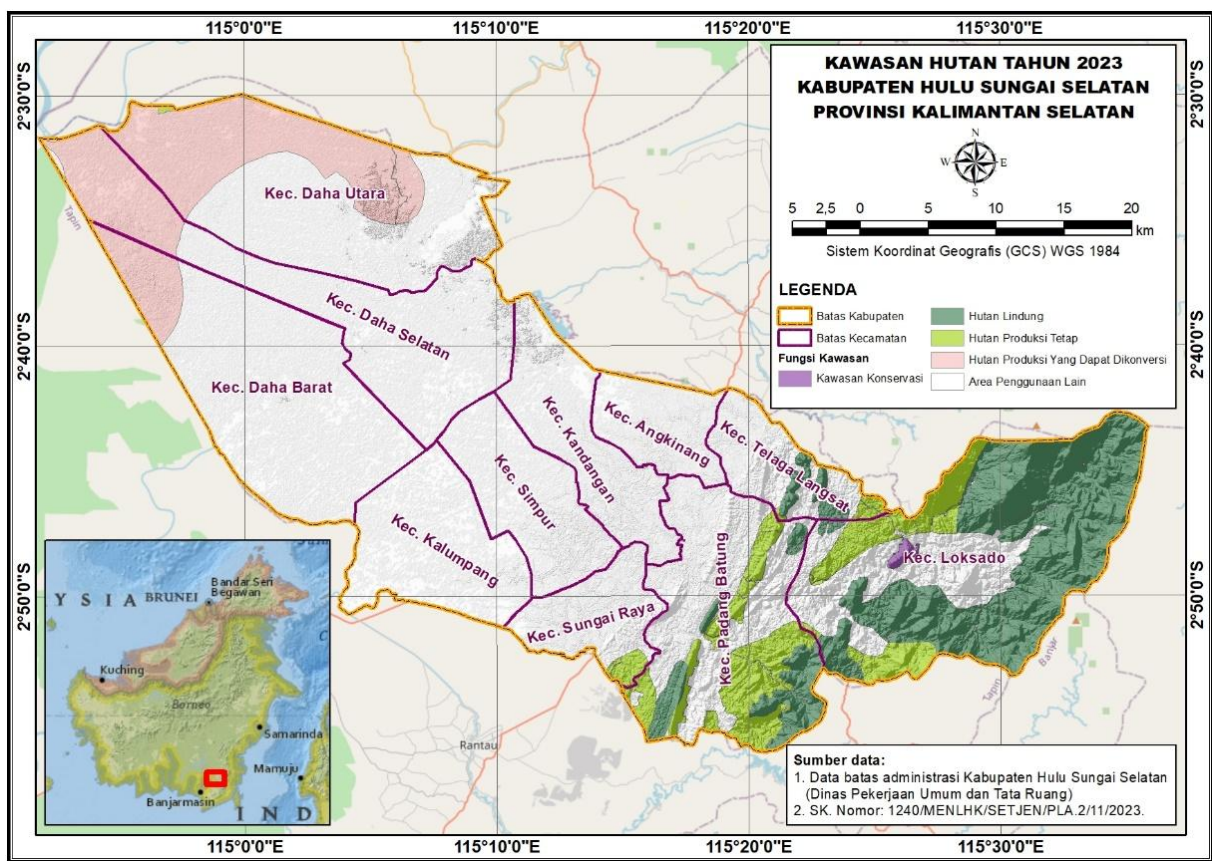
Tabel II-10 Luas Penutupan lahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Penutupan Lahan	Luas (hektare)	Persentase
1	Hutan Lahan Kering Primer	3.238,06	1,91%
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.476,12	0,87%
3	Hutan Tanaman	457,94	0,27%
4	Lahan Terbuka	1.706,37	1,01%
5	Perkebunan	20.809,61	12,26%
6	Pemukiman	1.864,88	1,10%
7	Pertambangan	1.926,75	1,14%
8	Pertanian Lahan Kering	4.028,16	2,37%
9	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	37.380,20	22,03%
10	Rawa	6.560,64	3,87%
11	Sawah	42.577,05	25,09%
12	Semak Belukar	14.983,81	8,83%
13	Semak Belukar Rawa	31.862,30	18,78%
14	Tubuh Air	820,45	0,48%
Total Hulu Sungai Selatan		169.692,33	

Sumber: Data spasial BPKHTL Wilayah V Banjarbaru

Ketersediaan lahan di wilayah perkotaan merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga perubahan tata guna lahan dari pertanian ke kawasan terbangun haruslah disikapi dengan bijak. Penting bagi kita untuk mempertahankan lahan-lahan hijau yang masih tersedia, seperti hutan, rawa, belukar, dan padang rumput. Lahan-lahan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luasan penutupan lahan pada tahun 2022 untuk berbagai jenis lahan. Informasi geospasial dan luas masing-masing kelas penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan disajikan pada Gambar 3.13 dan Tabel 3.8.

Gambar II-4 Kawasan hutan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023



Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki hutan yang cukup memprihatinkan. Dan pada kenyataannya, luasan hutan yang ada tidak sebanding dengan alokasi ruang untuk kawasan hutan. Sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.8**, **Gambar 3.13**, dan **Tabel 3.9**. Dimana pada **Tabel 3.8**, jika dijumlahkan semua jenis hutannya, totalnya hanya sekitar lima ribu hektare, atau hanya sekitar 3% dari luasan wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Akan tetapi, jika dilihat data luasan kawasan hutan pada **Tabel 3.9**, maka total luas kawasan hutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih dari 53 ribu hektar, atau sekitar 32% dari luas wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan jika diobservasi lebih jauh pada **Tabel 3.10**, akan terlihat bahwa ternyata sebagian area berhutan justru berada di luar kawasan hutan

atau di dalam Area Penggunaan Lain (APL). Hal ini menunjukkan luasnya area yang tidak berhutan di dalam kawasan hutan.

Gambar II-5 Luas kawasan hutan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023

No	Fungsi Kawasan	Luas (hektare)	Persentase
1	Area Penggunaan Lain (APL)	116.141,75	68,44%
2	Hutan Konservasi/Cagar Alam (CA)	249,34	0,15%
3	Hutan Lindung (HL)	23.454,90	13,82%
4	Hutan Produksi (HP)	11.280,77	6,65%
5	Hutan Produksi Konversi (HPK)	18.565,56	10,94%
Total		169.692,31	

Sumber: Data spasial KLHK berdasarkan SK MenLHK Nomor: SK.1240/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1240/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, maka Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki ketiga jenis kawasan hutan, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi (berupa cagar alam). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada informasi geospasial pada Gambar 3.14 dan Tabel 3.9. Dimana kawasan hutan lindung memiliki proporsi yang terluas di antara kawasan hutan lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan hutan lindung ini sebagian besarnya terletak di daerah bagian Timur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau tepatnya di Pegunungan Meratus.

Tabel II-11 Luas penutupan lahan menurut kawasan hutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Fungsi Kawasan Hutan	Penutupan Lahan	Luas (hektare)
APL	Hutan Tanaman	77,38
	Lahan Terbuka	1.556,37
	Perkebunan	19.279,46
	Permukiman	1.864,88
	Pertambangan	1.345,50
	Pertanian Lahan Kering	3.500,63
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	19.640,81
	Rawa	2.724,07
	Sawah	39.803,75
	Semak Belukar	5.025,39
	Semak Belukar Rawa	20.503,35
	Tubuh Air	820,15
CA	Lahan Terbuka	68,46

Fungsi Kawasan Hutan	Penutupan Lahan	Luas (hektare)
	Perkebunan	24,67
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	156,21
HL	Hutan Lahan Kering Primer	3.238,06
	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.387,91
	Hutan Tanaman	73,51
	Lahan Terbuka	21,26
	Perkebunan	1.030,88
	Pertambangan	7,92
	Pertanian Lahan Kering	27,05
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	10.723,91
	Semak Belukar	6.944,41
HP	Hutan Lahan Kering Sekunder	88,21
	Hutan Tanaman	307,05
	Perkebunan	203,97
	Pertambangan	573,33
	Pertanian Lahan Kering	108,16
	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	6.859,26
	Rawa	38,71
	Sawah	5,74
	Semak Belukar	3.014,01
	Semak Belukar Rawa	82,33
	Tubuh Air	0,00
HPK	Lahan Terbuka	60,28
	Perkebunan	270,64
	Pertanian Lahan Kering	392,32
	Rawa	3.797,86
	Sawah	2.767,55
	Semak Belukar Rawa	11.276,61
	Tubuh Air	0,30
Total		169.692,31

Sumber: Hasil tumpang susun data spasial kawasan hutan dan data spasial penutupan lahan

Potensi Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan pembangunan suatu negara. Ketersediaan sumber daya alam yang cukup dan terkelola dengan baik akan berdampak positif bagi kemajuan suatu negara, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik antara masyarakat dan perusahaan, serta ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan

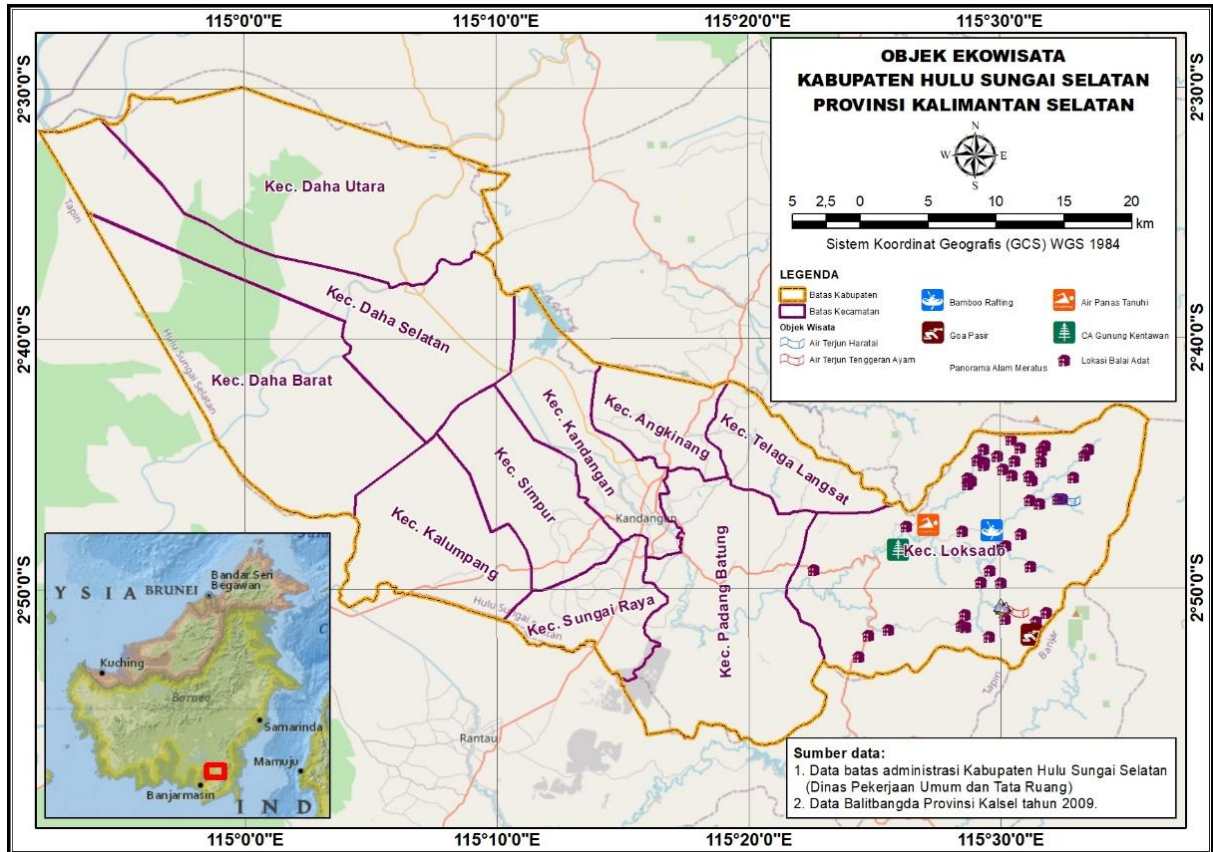
berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi saat ini dan masa depan.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di bumi Hulu Sungai Selatan baik yang tersimpan di dalam maupun dipermukaan bumi serta potensi sungai mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang yang perlu dikembangkan antara lain sektor pertanian, dengan luas lahan sawah 52.591 Ha. Potensi produksi pangan terutama dapat dilihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan daerah yang berbasis agraria. Pada tahun 2022, sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kontribusi sebesar 20,73 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini menunjukkan jika pertanian sangat penting bagi kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Komoditi tanaman padi dan palawija merupakan subsektor tanaman pangan yang menopang ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Produksi padi pada tahun 2022 sebanyak 64.534 ton padi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan untuk produksi jagung sebesar 110 ton jagung. Produksi palawija Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 didominasi oleh komoditi ubi kayu sebanyak 1.728,35 ton kemudian disusul oleh komoditi ubi kayu sebanyak 1.070,25 ton. Sedangkan komoditi yang mendominasi palawija tahun sebelumnya adalah komoditi ubi kayu sebanyak 4.438 ton. Selain produksi tanaman pangan, hasil dari subsektor perkebunan juga cukup banyak.

Pada tahun 2022, tiga komoditi unggul di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Karet, Kelapa Sawit, dan Kelapa. Produksi karet pada tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 14.118,60 ton, jika dibandingkan tahun 2021 produksi karet sebesar 12.150,63. Untuk produksi kelapa sawit tahun 2022 sebanyak 10.896,70 ton sedangkan pada tahun 2021 produksi kelapa sawit sebanyak 9.113,03 ton. Kemudian produksi kelapa pada tahun 2022 sebanyak 10.082,50 ton dimana pada tahun 2021 produksi kelapa sebanyak 8.273,80 ton. Data kelapa sawit ini belum mencakup perkebunan perusahaan swasta. Terdapat dua perkebunan kelapa sawit yang besar yaitu di Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Daha Barat. Produksi kelapa sawit mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa produksi Karet dan Kelapa sawit sebagai komoditas unggulan perkebunan.

Gambar II-6 Objek Ekowisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Kalimantan Selatan, karena secara geografis berada pada kawasan pegunungan, sungai, dan rawa. Sehingga memiliki objek wisata yang beragam dan alam yang sangat indah, seperti kawasan pegunungan Meratus yang dibawahnya mengalir sungai-sungai dengan air yang jernih, air terjun dan riam, dan sumber air panas alami. Seni budaya serta adat istiadat yang khas, beragam, dan terpelihara dengan baik. Pariwisata menjadi salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagaimana terlihat pada **Gambar 3.19**, beragam objek ekowisata dapat ditemukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Baik objek-objek alam seperti air terjun, goa, air panas, atau panorama alam Pegunungan Meratus dengan tegakan hutan hujan tropisnya, maupun objek-objek atraksi dan budaya seperti bamboo rafting di Sungai Amandit dan balai-balai adat Dayak Meratus.

Dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan melalui konsep “ecotourism” serta Diamond Triangel dalam konsep pengelompokan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP). Konsep Eco-Tourism yaitu konsep pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan mengoptimalkan dan sekaligus melestarikan potensi alam dan budaya khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkelanjutan dengan pengembangan pariwisata menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Melindungi lingkungan yang dimanfaatkan; b. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif

dalam kegiatan masyarakat; c. Menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan dan rekreasi dari nilai-nilai karakteristik (alam dan budaya lokal); d. Memberi sumbangan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah; e. Menekan sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan pariwisata.

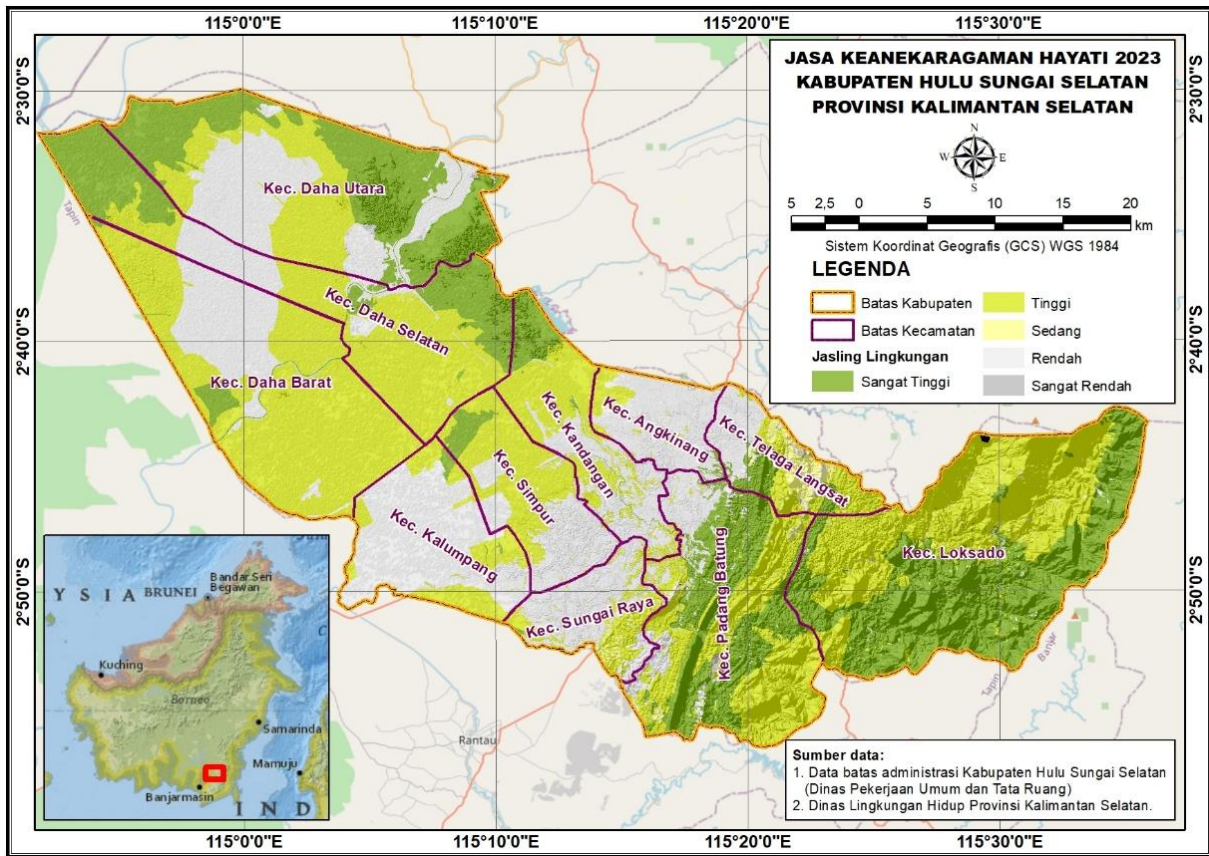
Pengembangan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga diarahkan melalui pengembangan pariwisata terpadu berbasis kawasan strategis cepat tumbuh dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Sinergitas dan pengintegrasian antar/lintas urusan dalam pemerintahan akan dimaksimalkan, khususnya dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkonsep 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi) pada wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata.

Pemanfaatan potensi SDA, SDM lokal, seni budaya dan adat khas dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan (masyarakat, pengusaha, BUMN/BUMD, pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat) secara bersinergi, terkoordinasi dan berkelanjutan.

Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah suatu ukuran untuk mengetahui keanekaragaman kehidupan yang berhubungan erat dengan jumlah jenis suatu komunitas. Keanekaragaman hayati tersebut dapat dibagi kedalam tiga taraf yang berbeda yakni keanekaragaman genetik dan keanekaragaman jenis. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan kekayaan alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup di Bumi. Banyaknya jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang ada di alam mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai kebutuhan manusia seperti pangan, obat-obatan, kayu, dan bahan bakar.

Gambar II-7 Jasa lingkungan Keanekaragaman hayati Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023



Secara geospasial, distribusi jasa lingkungan keanekaragaman hayati atau biodiversitas dapat dilihat pada **Gambar 3.26**. Dimana wilayah Pegunungan Meratus di bagian Timur Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kecamatan Loksado, Padang Batung, Daha Selatan, dan Daha Utara, merupakan kecamatan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan penutupan vegetasi alaminya masih cukup terjaga. Selengkapnya dapat dilihat pada **Gambar 3.26** dan **Tabel 3.19**. Beberapa wilayah yang memiliki biodiversitas yang rendah, seperti Kecamatan Sungai Raya, Kalumpang, dan Angkinang. Hal ini tentu sedikit mengkhawatirkan, dan sangat memerlukan tindakan-tindakan konservatif ke depannya. Selain menjaga biodiversitas yang masih tersisa, ke depannya juga perlu untuk dilakukan pengayaan kembali keanekaragaman hayati.

Tabel II-12 Luas Jasa Lingkungan Keanekaragaman Hayati Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023

Kecamatan	Jasa Lingkungan Keanekaragaman Hayati	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Angkinang	Rendah	4.632,45	83,71%
	Sangat Tinggi	117,35	2,12%
	Tinggi	784,39	14,17%
Daha Barat	Rendah	5.395,09	23,14%
	Sangat Tinggi	904,40	3,88%
	Tinggi	17.015,97	72,98%
Daha Selatan	Rendah	2.765,32	13,67%
	Sangat Tinggi	7.357,06	36,37%
	Tinggi	10.104,67	49,96%
Daha Utara	Rendah	8.032,52	31,27%

Kecamatan	Jasa Lingkungan Keanekaragaman Hayati	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
	Sangat Tinggi	11.603,07	45,17%
	Tinggi	6.051,72	23,56%
	Rendah	8.524,94	73,69%
Kalumpang	Sangat Tinggi	317,12	2,74%
	Tinggi	2.726,30	23,57%
	Rendah	3.490,04	35,84%
Kandangan	Sangat Rendah	0,25	0,00%
	Sangat Tinggi	1.530,19	15,71%
	Tinggi	4.716,86	48,44%
Loksado	Rendah	243,74	0,77%
	Sangat Rendah	18,30	0,06%
	Sangat Tinggi	16.753,23	53,20%
	Sedang	147,63	0,47%
	Tinggi	14.326,74	45,50%
Padang Batung	Rendah	3.110,69	14,95%
	Sangat Rendah	114,40	0,55%
	Sangat Tinggi	8.364,66	40,19%
	Sedang	119,55	0,57%
	Tinggi	9.102,18	43,74%
Simpur	Rendah	3.801,18	41,04%
	Sangat Tinggi	650,84	7,03%
	Tinggi	4.809,47	51,93%
Sungai Raya	Rendah	4.277,34	67,50%
	Sangat Tinggi	36,87	0,58%
	Sedang	146,29	2,31%
	Tinggi	1.875,84	29,60%
Telaga Langsat	Rendah	1.958,64	31,62%
	Sangat Rendah	75,63	1,22%
	Sangat Tinggi	1.033,47	16,68%
	Sedang	1.139,16	18,39%
	Tinggi	1.987,20	32,08%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun keanekaragaman hayati di kabupaten hulu sungai selatan di beberapa wilayah kabupaten hulu sungai selatan. Keanekaragaman jenis amfibi di Area Persawahan Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keanekaragaman jenis amfibi tentu berdampak besar bagi ekosistem dan keanekaragaman jenis lain yang hidup di habitat tersebut. Dengan menjaga kelestarian habitatnya, maka mampu bertahan terhadap gangguan-gangguan alami. Berdasarkan hasil perhitungan indeks diversitas (H1) untuk jenis Amfibi yang terdapat di Area Persawahan Muning Dalam dapat di lihat pada Tabel 3.20,.

Tabel II-13 Jenis Ordo Anura yang ada di Desa Muning Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Nama Spesies	Nama Lokal	Famili	Jumlah
1	<i>Bufo asfer</i>	Kodok puru besar	Bufonidae	12
2	<i>Rana erythraea</i>	Kongkang gading	Ranidae	25
3	<i>Fejervarya cancrivora</i>	Katak sawah	Ranidae	43

Tabel II-14 Kelimpahan Jenis Amfibi yang ada di Desa Muning Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Nama Spesies	K	KR	F	FR	NP
1	<i>Bufo asfer</i>	1.20	15.00	0.40	22.22	37.22
2	<i>Rana erythraea</i>	2.50	31.25	0.90	50.00	81.25
3	<i>Fejervarya cancrivora</i>	4.30	53.75	0.50	27.78	81.53
Jumlah		8.00	100.00	1.80	100.00	200.00

Indeks Keanekaragaman Jenis Amfibi yang di Area Persawahan Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan

hasil penelitian Jenis Amfibi yang di Area Persawahan Muning Dalam Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Untuk menentukan Kemelimpahan suatu Spesies dapat di lihat dari NP atau nilai penting yang di peroleh. Nilai Penting merupakan kerapatan antara individu atau kerapatan relatif (KR) dengan frekuensi kehadiran atau frekuensi relatif (FR), maka diperoleh nilai kemelimpahan dari tiap – tiap spesies. Selanjutnya Salah satu keanekaragaman hayati di kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah tanaman anggrek yang kini mulai banyak diminati oleh masyarakat. Desa yang banyak memiliki tanaman anggrek adalah Desa Tumingki dan Desa Malinau Kecamatan Loksado.

Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan daerah akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi main prime mover (pendorong pertumbuhan utama) antara lain , kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan pariwisata serta kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan.

Pengembangan wilayah merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan, yang didasarkan atas sumber daya yang ada dan kontribusi terhadap pembangunan. Hulu Sungai Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor tanaman pangan dengan luasan total 29.221 dan sektor hortikultura serta perkebunan dengan potensi luas lahan 32.045 Ha. Dari potensi luas tersebut secara persentase 63% lahan dimanfaatkan untuk sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan luasan sebesar 30,49% untuk sementara tidak diusahakan. Rincian dari potensi luasan lahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel II-15 Luas Lahan Sawah, Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan Tahun 2024 (ha)							
Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Total Sawah	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Sementara Tidak Diusahakan	Total
Padang Batung	876	349	1.225	327	1.420	3.351	7.548
Loksado	-	-	-	4.490	2.871	12.091	19.452
Telaga Langsung	1.172	45	1.217	153	1.097	727	4.411
Angkinang	644	3.217	3.861	146	-	279	8.147

Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Total Sawah	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Sementara Tidak Diusahakan	Total
Kandangan	18	2.474	2.492	176	-	4.266	9.426
Sungai Raya	280	2.295	2.575	759	134	900	6.943
Simpur	217	2.620	2.837	-	-	198	5.872
Kalumpang	-	1.418	1.418	180	-	2.247	5.263
Daha Selatan	-	1.936	1.936	2.407	-	5.762	12.041
Daha Barat	-	3.612	3.612	-	-	1.839	9.063
Daha Utara	-	8.048	8.048	135	-	385	16.616
Total	3.207	26.014	29.221	9.073	5.522	32.045	105.082

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2025 (diolah)

Potensi produksi pangan sangat terutama dapat dilihat dari hasil produksi tanaman pangan yang dihasilkan, namun untuk komoditas padi terus mengalami penurunan hingga 2022 diakibatkan adanya hama yang menyerang hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dan pada tahun 2023 hingga 2024 sedikit-demi sedikit produksi padi dapat meningkat dari capaian tahun sebelumnya. Rincian produksi tanaman pangan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

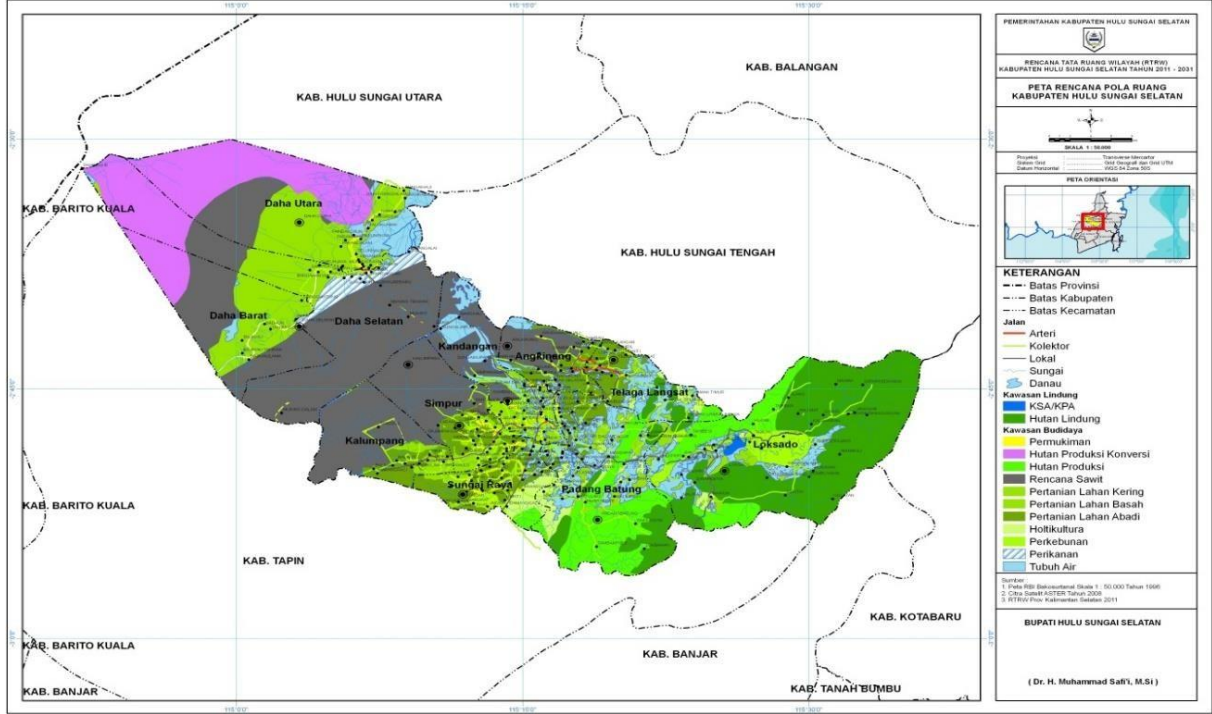
Tabel II-16 Produksi Menurut Jenis Tanaman Pangan(ton) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	113.217	97.037	58.464	85.628	93.772
Jagung	3.282	103	110	134	-
Kacang Tanah	416	302	79	93	189,30
Kacang Hijau	6	2	-	-	40
Ubi Kayu	4.438	3.885	1.728	2.109	2.966
Ubi Jalar	3.646	8.405	1.070	8.139	7.702

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, Diolah 2024, *Data Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar pada Tahun 2019 tidak ada data

Pengembangan kawasan juga dilakukan atas dasar kondisi dan potensi kawasan yang dimilikinya, berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. maka pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Tabel II-17 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber : RTRW Kab. HSS Tahun 2013 – 2032

Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Tabel II-18 Pola Ruang Kab. Hulu Sungai Selatan Kawasan Lindung

No	Fungsi	Pemanfaatan Ruang/Lokasi
A	Kawasan Lindung	
1	Kawasan Hutan lindung	Kec. Loksado Kec. Padang Batung Kec. Telaga Langsat
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya	Kec. Loksado Kec. Padang Batung Kec. Telaga Langsat
3	Kawasan perlindungan setempat	Danau Bangkau di Kec. Kandangan Danau Paharangandi Kec. Daha Utara Danau Pantai Ulin di Kec. Simpur Danau Muning Dalam di Kec. Daha Selatan Danau Bago Tanggul di Kec. Kalumpang Danau Bajayau Lama di Kec. Daha Barat
4	Ruang terbuka Hijau Kota (RTH) (Khusus untuk Kota)	RTH publik : lapangan olah raga, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, rel kereta api dan sungai RTH privat : berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan

No	Fungsi	Pemanfaatan Ruang/Lokasi
5	Kawasan suaka alam dan cagar budaya Kawasan Suaka Alam berada di Cagar Alam Gunung Kentawan Kawasan Cagar Alam Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kec. Loksado Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi di Kec. Daha Selatan Mesjid Su'ada di Kec. Simpur Benteng Madang di Kec. Padang Batung Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih Makam Tumpang Talu di Kec. Kandangan Kubur Anam di Kec. Sungai Raya Rumah Bersejarah H. Kaspul Anwar di Kec. Padang Batung Rumah Bersejarah H. Abdul Kadir di Kec. Padang Batung
6	Kawasan rawan bencana alam a. Bencana Longsor	Kec. Loksado di Desa Hulu Banyu Kec. Padang Batung di desa Batu Laki Kec. Telaga Langsat di Desa Hamak dan Hamak Utara
	b. Bencana Banjir	Kec. Kandangan : Desa Jambu Hilir Desa Baluti Desa Sungai Kupang Desa Sungai Paring Desa Lungau Kec. Kalumpang : Desa kalumpang Desa Karang Paci Desa Balanti Desa Balimau Kec. Angkinang : Desa Telaga Sili-sili Desa Sungai Hanyar Desa Angkinang Desa Angkinang selatan Desa Bakarung Kec. Sungai Raya : Desa Sungai Raya Selatan Desa Tanah Bangkang Desa Ida Manggala Kec. Padang Batung : Desa Malutu Desa Batu Laki Desa Malilingin Desa Jelatang Desa Batu Bini Desa Karang Jawa Muka Kec. Telaga Langsat : Desa Mandala Desa Lok Binuang Desa Pakuan Timur Desa Gumbil Kec. Daha Selatan Kec. Daha Utara Kec. Daha Barat
7	Kawasan lindung lainnya	Reservaat Danau Bangkai di Desa Bangkai Kec. Kandangan Reservaat Sungai Jarum di Desa Bangkai Kec. Kandangan Kawasan rawa Simpung di Tanggul Desa Pantai Ulin Kec. Simpung Kawasan Bago Tanggul di Desa Bago Tanggul Kec. Kalumpang Kawasan Bajayau Lama di Desa Bajayau Lama Kec. Daha Barat

No	Fungsi	Pemanfaatan Ruang/Lokasi
		Kawasan Muning Dalam di Desa Muning Dalam Kec. Daha Selatan

Sumber : RTRW Kab. HSS Tahun 2013 – 2032

Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Tabel II-19 Pola Ruang Kab. Hulu Sungai Selatan Kawasan Budidaya

NO.	FUNGSI/PEMANFAATAN RUANG	LOKASI
1	Kawasan Hutan produksi Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kec. Loksado Kec. Padang Batung Kec. Sungai Raya Kec. Telaga Langsat
	Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	Kec. Daha Barat Kec. Daha Selatan Kec. Daha Utara
2	Kawasan pertanian Kawasan Peruntukan pertanian tanaman pangan Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah	Kec. Sungai raya Kec. Simpur Kec. Kandangan Kec. Telaga Langsat Kec. Daha Utara Kec. Padang Batung Kec. Kalumpang Kec. Angkinang Kec. Daha Selatan Kec. Daha Barat
	Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering/tegalan	Kec. Padang Batung Kec. Sungai Raya Kec. Telaga Langsat Kec. Simpur Kec. Kalumpang
	Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura Jenis Komuditas: - Buah-buahan berupa semangka - Sayur-sayuran	Kec. Telaga Langsat Kec. Padang Batung Kec. Kandangan
		Kec. Sungai Raya Kec. Telaga Langsat Kec. Kandangan Kec. Angkinang Kec. Padang Batung Kec. Daha Selatan Kec. Daha Utara Kec. Daha Barat Kec. Kalumpang
		Kec. Telaga Langsat Kec. Padang batung Kec. Loksado Kec. Sungai raya Kec. Angkinang
3	Kawasan perkebunan Perkebunan Karet	Kec. Telaga Langsat Kec. Padang batung Kec. Loksado Kec. Sungai raya Kec. Angkinang
	Perkebunan Kelapa Sawit	Kec. Angkinang Kec. Daha Barat Kec. Daha Selatan Kec. Daha Utara Kec. Kalumpang Kec. Kandangan Kec. Simpur
	Perkebunan Kayu Manis	Kec. Loksado
	Perkebunan Kelapa	Kec. Simpur Kec. Kalumpang Kec. Sungai raya Kec. Padang Batung

NO.	FUNGSI/PEMANFAATAN RUANG	LOKASI
		Kec. Telaga Langsat Kec. Kandangan Kec. Angkinang
4	Kawasan Peternakan Ternak Sapi Potong	Daerah sentra sapi meliputi: Kec. Sungai Raya, Kec. Simpur, dan Kec. Kalumpang Daerah pengembangan meliputi: Kec. Kandangan, Kec. Padang Batung, Kec. Angkinang, Kec. Telaga Langsat dan Kec. Loksado
	Ternak Kerbau Rawa	Kec. Daha Barat Kec. Daha Utara Kec. Daha Selatan
	Ternak Kambing	di seluruh Kecamatan
	Ternak Domba	Kec. Kandangan Kec. Daha Selatan
	Ternak ayam buras dan ayam ras	di seluruh kecamatan
	Ternak Itik	Daerah sentra meliputi Kec. Daha Utara Daerah pengembangan meliputi: Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Barat, Kec. Kalumpang, Kec. Simpur, dan Kec. Angkinang.
5	Kawasan perikanan a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di sekitar sungai besar dan danau	Kec. Daha Barat Kec. Daha Selatan Kec. Daha Utara Kec. Kandangan Kec. Simpur Kec. Kalumpang Kec. Angkinang Kec. Telaga Langsat Kec. Sungai Raya
	Kawasan peruntukan budidaya perikanan	Pengembangan kawasan perikanan kolam meliputi: Kec. Kandangan, Kec. Daha Selatan, Kec. Kalumpang, Kec. Padang Batung, Kec. Loksado, Kec. Sungai Raya, Kec. Telaga Langsat, dan Kec. Simpur. Pengembangan kawasan perikanan keramba meliputi: Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara, Kec. Daha Barat, Kec. Kalumpang, dan Kec. Kandangan
	Kawasan pengolahan ikan	Kec. Daha Selatan Kec. Daha Utara Kec. Daha Barat Kec. Kandangan Kec. Kalumpang
	Kawasan peruntukan perikanan minapolitan	Desa Muning Kec. Daha Selatan
6	Kawasan pertambangan Mineral logam Emas Mangan Besi	Kec. Loksado Desa Tampak Pipi'i dan Desa Mawangi Kec. Padang Batung Desa Kamawakan, Desa Malinau, Desa Malaris, Desa Haruyan, Desa Bumbuyanin Kec. Loksado, dan Desa Tampak Pipi'i Kec. Padang Batung
	Mineral bukan logam Pasir kuarsa	Desa Malilingin Kec. Padang Batung Desa Taniti Kec. Telaga Langsat Desa Batu Bini dan Desa Batu Laki Kec. Padang Batung
	Fosfat Lempung	Desa Mandala Kec. Telaga Langsat Desa Lumpangi Kec. Loksado Kec. Padang Batung Kec. Telaga Langsat Kec. Angkinang Kec. Sungai Raya Kec. Simpur Kec. Kalumpang

NO.	FUNGSI/PEMANFAATAN RUANG	LOKASI
		Kec. Daha Utara Kec. Daha Selatan Daha Barat
	Batuan Marmer Granit Granodiorit Andesit Gabro Basalt Tanah urug Kerikil berpasir alami (sirtu) Batu gamping Kerikil Galian	Desa Lumpangi dan Desa Datar Kedayang Kec. Loksado Kec. Loksado, Kec. Padang Batung, dan Kec. Telaga Langsung Desa Tumingki dan Desa Malinau Kec. Loksado Kec. Loksado, Kec. Padang Batung, dan Kec. Telaga Langsung Kec. Loksado Kec. Loksado, Kec. Padang Batung, dan Kec. Telaga Langsung Desa Batu Laki, Desa Batu Bini, dan Desa Tambah Pipi'i Kec. Padang Batung Desa Sungai Raya, Desa Hariti, dan Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Desa Telaga Langsung dan Desa Mandala, Kec. Telaga Langsung Desa Loksado dan Desa Malinau Kec. Loksado Sepanjang Sungai Amandit di Kec. Padang Batung Desa Batu Laki, Desa Batu Bini, Desa Tayub Kec. Padang Batung Desa Mandala Kec. Telaga Langsung Desa Datar Kedayang, Desa Haratai dan Desa Tanuhi Kec. Loksado Sepanjang Gn. Lalayang Kec. Sungai Raya
	Batu bara Bitumen Padat	Kec. Padang Batung Kec. Telaga Langsung Kec. Sungai Raya
7	Kawasan industri Kawasan industri besar berupa agroindustri Kawasan industri kecil dan mikro Industri Dodol Kandangan Industri kerupuk Industri ikan kering Industri propeler Industri imitasi Industri pandai besi Industri gerabah Industri kue kering Industri anyaman bambu Industri Anyaman Purun	Kec. Daha Barat, Daha Selatan, Kec. Sungai Raya, Kec. Kalumpang, dan Kec. Padang Batung Desa Kapuh Kec. Simpur Desa Telaga Bidadari, Desa Hamalau, dan Desa Hariti Kec. Sungai Raya Desa Gambah Luar, Desa Kandangan Barat dan Desa Kandangan Utara Kec. Kandangan Bamban Utara Kec. Angkinang Desa Bangkau Kec. Kandangan Desa Bago Tanggul Kec. Kalumpang Desa Muning dan Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan Desa Penggadingan dan Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Desa Sungai Pinang dan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Desa Telaga Bidadari dan Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Desa Kapuh Kec. Simpur Desa Malinau, Desa Ulang dan Desa Panggungan Kec. Loksado Desa Balimau dan Desa Karang Paci Kec. Kalumpang Desa Sarang Halang dan Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya Desa Jambu Hulu, Desa Jambu Hilir Kec. Kandangan Desa Baru Hulu, Desa Baru Tengah, Desa Asam-Asam, Desa Tamiyang, Desa Karasikan, Desa

NO.	FUNGSI/PEMANFAATAN RUANG	LOKASI
	Industri Kumpang Parang	Batang Kulur Kanan, Desa Batang Kulur Kiri, Desa Bumi Berkat Kec. Sungai Raya
	Industri Gula merah	
8	Kawasan pariwisata Pariwisata Budaya Wisata Budaya Lokal Wisata Sejarah	Balai Adat Dayak di Kec. Loksado Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi di Desa Habirau Kec. Daha Selatan Rumah Adat Banjar Gajah Manyusu di Desa Amawang Kec. Kandangan Upacara Aruh Ganal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Seni Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga) di Kec. Daha Selatan Olahraga Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalang Hadangan di Kec. Daha Utara. Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih Kec. Loksado Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV di Kec. Telaga Langsat Tugu Peringatan Peristiwa Pemencaran Pasukan ALRI Divisi IV 10 Mei 1949 di Pagat Batu Desa Batu Bini Kec. Padang Batung Tugu Gencatan Senjata Antara Gubernur Tentara ALRI Divisi IV dengan NICA di Kec. Sungai Raya Monumen Mandapai, Upacara HUT ke-IV RI 17 Agustus 1949 di Desa Mandapai Kec. Padang Batung Tugu Palagan Nagara 2 Januari 1949 di Desa Hakurung Kec. Daha Utara Tugu Garis Demarkasi di Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung. Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Jelatang Kec. Padang Batung Gedung Juang Devisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Halamau Kec. Sungai Raya Situs Benteng Madang di Desa Madang Kec. Padang Batung Situs Amuk Hantarukung di Desa Hantarukung Kec. Simpur Makam Tumpang Talu di Kandangan Barat Kec. Kandangan Kubur Anam di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya Makam Singakarsa di Jln. Singakarsa Kec. Kandangan Makam aluh Idut di Jln. Aluh Idut Kec. Kandangan Makam Ning Bulangdi desa Hantarukung Kec. Simpur Rumah Bersejarah Mesjid Su'ada di Desa Wasah Hilir Kec. Simpur Makam H. M Said di Desa Simpur Kec. Simpur Makam Datu H. Abbas di Desa Simpur Kec. Simpur Kubah Datu Durabu di Desa Kalumpang Kec. Kalumpang Kubah Datu Akhmad di Desa Balimau Kec. Kalumpang

NO.	FUNGSI/PEMANFAATAN RUANG	LOKASI
	Wisata Religi	Kubah Datu Taniran di Desa Taniran Kec. Angkinang Makam Keramat Datu H.M Rais di Desa Loknyiur Kec. Angkinang Makam Datu Daha Kec. Daha Utara Makam Surgi Tuan di Desa Pasungkan Kec. Daha Utara Makam Habib Iberahim Desa Mandala Kec. Daha Utara Makam Panglima Dambung di Desa Padang Batung Kec. Padang Batung Makam Datu Parang di Desa Baru Kec. Sungai Raya Makam Tuan Guru H. Ali di Desa Pandansari Kec. Daha Selatan Makam Habib Lumpangi di desa Lumpangi Kec. Loksado Wisata Alam Loksado di Kec. Loksado Air Terjun Haratai di Kec. Loksado Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kec. Loksado Gunung Kentawan di Desa Tanuhi Kec. Loksado Danau Bangkau di Desa Kec. Kandangan Delta dan Dam Sungai Amandit di Desa Malutu Kec. Padang Batung Riam Anai di Desa Lok LahungKec. Loksado Air Terjun Kilap Api di Desa Tanuhi Kec. Loksado Air Terjun Uring di Desa Kamawakan Kec. Loksado Air Terjun Tangkaramin di Desa Malinau Kec. Loksado Air Terjun Tinggiran Hayam di Desa Kamawakan Kec. Loksado Air Panas Mandapai di Desa Bini Kec. Padang Batung Telaga Bidadari di Desa Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya
9	Kawasan permukiman Kawasan Peruntukan Pemukiman Kawasan Peruntukan permukiman perkotaan	Kawasan Perkotaan Kandangan di Kec. Kandangan Kawasan Perkotaan Angkinang di Kec. Angkinang Kawasan Perkotaan Sungai Raya di Kec. Sungai Raya Kawasan Perkotaan Nagara di Kec. Daha Selatan dan Daha Utara Kawasan Perkotaan Simpur di Kec. Simpur Kawasan Perkotaan Kalumpang di Kec. Kalumpang Kawasan Perkotaan Loksado di Kec. Loksado Kawasan Perkotaan Telaga Langsung di Kec. Telaga Langsung Kawasan Perkotaan Padang Batung di Kec. Padang Batung Kawasan Perkotaan Daha Barat di Kec. Daha Barat Semua permukiman di luar kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten.
	Kawasan Peruntukan permukiman perdesaan	
10	Kawasan lainnya Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan Militer Angkatan Darat Komando Rayon Militer	Pasar Los Batu Kec. Kandangan Pasar Nagara Kec. Daha Selatan Pasar Hewan Kec. Angkinang Komando Distrik Militer 1003 Kandangan di Kec. Kandangan

NO.	FUNGSI/PEMANFAATAN RUANG	LOKASI
	Kawasan Kepolisian	Komando Rayon Militer Tersebar di wilayah Kabupaten Kepolisian Resort berada di Kec. Sungai Raya Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten

Sumber : RTRW Kab. HSS Tahun 2013 – 2032

Potensi Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Kalimantan Selatan, karena secara geografis berada pada kawasan pegunungan, sungai, dan rawa. Sehingga memiliki objek wisata yang beragam dan alam yang sangat indah, seperti kawasan Pegunungan Meratus yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dengan air yang jernih , air terjun dan riam, dan sumber air panas alami. Seni budaya serta adat istiadat yang khas, beragam, dan terpelihara dengan baik. Pariwisata menjadi salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan melalui konsep “Ecotourism” serta Diamond Triangle dalam konsep pengelompokan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP). Konsep Eco-Tourism yaitu konsep pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan mengoptimalkan dan sekaligus melestarikan potensi alam dan budaya khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkelanjutan dengan pengembangan pariwisata menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Melindungi lingkungan yang dimanfaatkan;
- Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
- Menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan dan rekreasi dari nilai-nilai karakteristik (alam dan budaya lokal);
- Memberi sumbangan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah;
- Menekan sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan pariwisata.

Pemanfaatan potensi SDA, SDM lokal, seni budaya dan adat khas dalam konsep pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan (masyarakat, pengusaha, BUMN/BUMD, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) secara bersinergi, terkoordinasi dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga memberikan ruang yang luas bagi desa untuk memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada

di wilayahnya baik dalam pengelolaan daya tarik/atraksi wisata, peningkatan aksesibilitas, amenitas dan pemanfaatan peluang usaha jasa pariwisata melalui badan usaha milik desa dan pemberdayaan kelompok sadar wisata. Pemasaran pariwisata dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan aksesibilitas dan potensi jenis atraksi wisata, maka konsep Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok :

Gambar II-8 Pengembangan KSPN Loksado



Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I

WPP I Merupakan kawasan alam (pegunungan, hutan, dan pertanian) yang sesuai untuk kegiatan wisata petualangan (adventure) dengan menikmati pemandangan alam. di samping itu, juga terdapat kelompok dan masyarakat adat asli Dayak Pegunungan Meratus. WPP I merupakan kawasan prioritas I dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berada di Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Telaga Langsat, dengan kawasan pengembangan utama yaitu Loksado yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS).

di kawasan utama Kecamatan Loksado (Desa Loksado) perlu dibangun sebuah ruang terbuka yang berfungsi sebagai zona penyambutan/lokasi untuk bersantai dan istirahat bagi wisatawan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas berwisata. Sesuai dengan dokumen rencana induk dan rencana detail KSPN Loksado, maka dalam pengembangan amenitas di Kawasan Loksado diperlukan penataan terhadap bangunan-bangunan yang ada di tepi sungai dan pemulihan kembali Delta Amandit sebagai zona santai untuk wisatawan. Sinergitas antara berbagai urusan pemerintahan dalam pengembangan pariwisata di WP I berdasarkan konsep 3A, setidaknya mencakup :

- Pengembangan eco-tourism, edu-tourism, ethnic-tourism dan penyelenggaraan festival-festival dengan skala provinsi dan nasional, seperti jungle trekking, air terjun, air panas Tanuhi, festival Loksado, bamboo rafting, rumah adat/balai, dan upacara pesta adat/aruh ganal;
- Peningkatan jalan menuju destinasi pariwisata/obyek wisata sesuai dengan lingkup kewenangan secara berjenjang dari level pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat;
- Pengembangan usaha kecil dan menengah, fasilitasi jaringan permodalan dan legalitas usahanya;
- Pemberdayaan komunitas masyarakat adat;
- Pengembangan kawasan terpadu pariwisata desa;
- Pemanfaatan sumber daya hutan, perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi;
- Pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan upaya kebersihan lingkungan;
- Rehabilitasi dan peningkatan pelayanan di bidang perhubungan seperti penyediaan rambu-rambu dan peningkatan tipe pelayanan terminal Loksado;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan seluler di kawasan Loksado;
- Pembinaan terhadap masyarakat, kelompok sadar wisata dan pelaku usaha jasa pariwisata melalui bentuk-bentuk sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenisnya serta pemberian materi-materi khusus kepariwisataan pada pelajar di semua level pendidikan; dan
- Pengembangan kawasan yang dapat dijadikan museum rumah Adat Dayak, yang berisi kekhasan wilayah Loksado.

Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) II

WPP II merupakan wilayah dengan dataran dan rawa, sebagian berada di wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai zona penghubung. WPP II melingkupi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Kalumpang. Pengembangan pariwisata di wilayah ini diarahkan pada pengembangan wisata religi, wisata kuliner, wisata perkotaan, dan wisata minat khusus. Ada beberapa makam ulama besar, mesjid yang bernilai sejarah, kawasan kuliner khas “Ketupat Kandangan”, beberapa wisata buatan, wahana permainan dan taman kota. Mendukung fungsinya sebagai zona penghubung, pada WPP II perlu adanya Tourism Information Center (TIC) dalam rangka memberikan kemudahan

wisatawan terhadap akses informasi destinasi wisata dan mengarahkan pola perjalanannya sesuai paket-paket yang sudah disiapkan.

Pada wilayah ini juga perlu dikembangkan usaha jasa pariwisata, penyediaan galeri sentra industri kecil dan menengah sebagai upaya dalam pengembangan pemasaran dan pemenuhan kebutuhan wisatawan untuk berlibur dan belanja oleh-oleh/souvenir.

Wilayah Pengembangan Pariwisata Religi

Pariwisata religi atau wisata religius merupakan jenis pariwisata yang mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai keagamaan atau religius bagi pengunjungnya. Pada awalnya, wisata religius tidak direncanakan sebagai sebuah industri pariwisata, tetapi berkembang secara alami sesuai dengan kearifan lokal dan kepercayaan agama yang ada di suatu wilayah.

Dalam pengembangannya, wisata religius dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Selain dapat meningkatkan perekonomian lokal, wisata religius juga dapat memperkenalkan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat kepada wisatawan. Dengan demikian, wisata religius dapat memperkuat hubungan antara masyarakat setempat dan wisatawan, serta memperkaya pengalaman wisatawan.

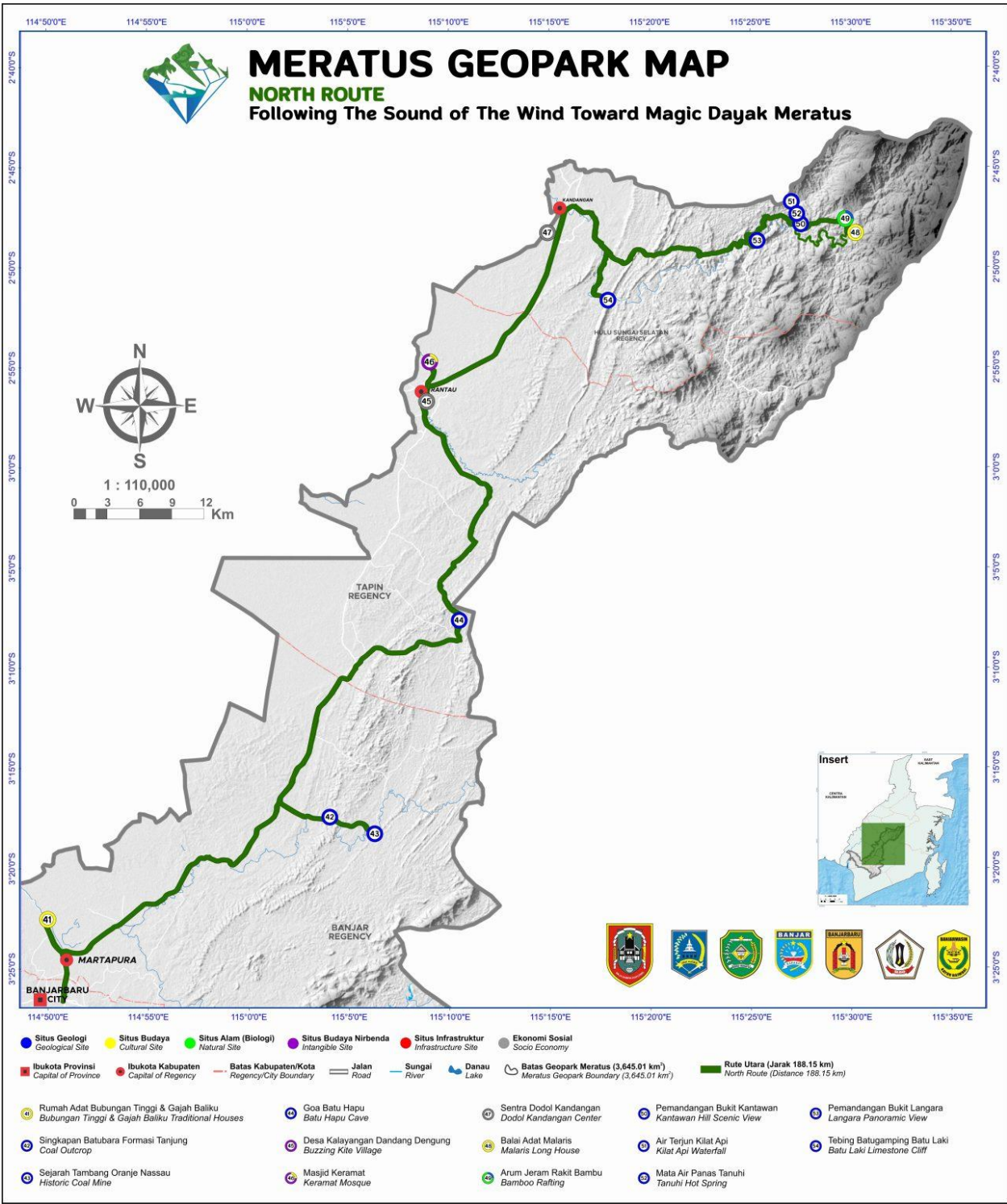
Pariwisata Religi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri terdapat 3 kawasan yang sering didatangi oleh para penziarah diantaranya adalah Makam Datu Taniran, Makam Datu Balimau dan terdapat satu areal baru yaitu Makam Guru Kapuh. 3 Titik ini menjadi Triangle Wisata yang menjadi daya tarik terkuat wisata religi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Geopark Meratus Rute Utara

Secara geografis, Geopark Meratus berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan telah ditetapkan oleh Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) sebagai Geopark Nasional Indonesia pada Tahun 2018 dan Geopark pertama di Kalimantan. Geopark Meratus yang mempunyai tema utama “Jiwanya Borneo” dan terdiri atas 4 (empat) rute perjalanan, yaitu Rute Utara, Timur, Selatan dan Barat. Rute-rute tersebut dirancang dengan penamaan yang merepresentasikan karakteristik wilayah dan d a n keanekaragaman Geopark Meratus dan dapat dijalani dalam kurun waktu 5 hari, dengan total 54 situs. Geopark Meratus mempunyai luas wilayah sekitar 3,645.01 km², yang mencakup 6 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar. Di dalam Kawasan Geopark Meratus juga terdapat

beberapa suku asli Kalimantan Selatan, yaitu Suku Banjar dan Suku Dayak Meratus.

Gambar II-9 Peta Geopark Meratus Rute Utara



Sumber : Geopark Meratus : The Soul of Borneo Rute Utara Tahun 2023

Geopark Meratus - Sentra Dodol Kandangan



Desa Telaga Bidadari

Kec. Sungai Raya. Kab. Hulu Sungai Selatan



Perjalanan dimulai dari Bandara Syamsudin Noor

Jarak Tempuh 117 KM dengan Waktu Tempuh 2 Jam 30 Menit

Sumber : Geopark Meratus : The Soul of Borneo Rute Utara Tahun 2023

Sentra Dodol Kandangan berlokasi di Desa Telaga Bidadari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lokasi ini dapat ditempuh dari Masjid Keramat sekitar 23 km atau sekitar 5 km dari Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan kendaraan roda dua/empat. Sentra Dodol Kandangan berada disepanjang Jalan Bina Warga sampai Jalan Kapuh Wadani ini banyak dijumpai produsen/pembuat makanan khas masyarakat Kandangan yang telah diwariskan secara turun temurun yaitu Dodol Kandangan, dimana pada lokasi ini terdapat sekitar 50 orang pengusaha Dodol Kandangan. Keberadaan Dodol Kandangan sudah ada sejak zaman kelaskaran atau setelah Indonesia Merdeka, dimana dulunya hanya dibuat untuk kalangan rumah tangga saja, jika dijualpun sesuai pesanan dan bentuknya hanya segi empat atau bulat dengan menggunakan butah (tas punggung yang terbuat dari kulit bambu) sebagai tempatnya. Kekhasan dodol kandangan yang memiliki rasa renyah, manis dan enak ini tidak terlepas dari penggunaan bahan-bahan alami tanpa pengawet, seperti beras ketan, kelapa dan gula aren (gula merah) yang tumbuh subur di Hulu Sungai Selatan sebagai pemanis buatan. Selain bahan baku alami, untuk menjaga keasliannya, proses pembuatan dodol masih dilakukan secara tradisional, dimana proses pembuatannya masih menggunakan tungku dan membutuhkan waktu sekitar

4 jam hingga pengemasan. Pengunjung yang datang selain dapat membeli dodol langsung dari pembuat, juga disajikan proses pembuatan dodol kandangan secara langsung.

Geopark Meratus – Balai Adat Malaris



Sumber : Geopark Meratus : The Soul of Borneo Rute Utara Tahun 2023

Balai Adat Malaris berlokasi di Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lokasi ini dapat ditempuh dari Sentra Dodol Kandangan sekitar 44 km atau sekitar 39 km dari Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan kendaraan roda dua/empat. Lokasi yang berada pada ketinggian sekitar 230 meter diatas permukaan laut dan berdasarkan proses kejadian bumi (geologi) tersusun atas Batuan Formasi Haruyan berumur 64.5-95 juta tahun yang lalu (Kapur Akhir) ini terdapat balai Suku Dayak Meratus yaitu Balai Adat Malaris atau yang sekarang dikenal sebagai Balai Adat Agama Kaharingan. Balai yang mempunyai panjang sekitar 45x40 meter persegi dan menjadi balai adat terpanjang sekaligus terbesar ini diperuntukan bagi Suku Dayak Meratus Malaris untuk melakukan ritual Aruh Adat/ Upacara tertentu, dimana dahulunya balai ini dapat dihuni puluhan keluarga. Kontruksi balai pada lantai dan atap terbuat dari kayu ulin serta dinding yang berbahan anyaman bambu ini menjadi ciri khas dari Balai Adat Malaris, disamping ukuran yang cukup besar serta pada bagian dalam terdapat

bilik-bilik/kamar, dan pada bagian tengah terdapat area lapang yang digunakan untuk upacara adat. Bahan-bahan tersebut terdapat disekitar kawasan tersebut, karena tanah hasil pelapukan batuan beku produk dari aktivitas vulkanisme tua menjadi media yang tepat serta didukung dengan kondisi iklim yang sesuai untuk tanaman tersebut.

Geopark Meratus – Bamboo Rafting



 **Desa Lok Lahung**
Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan



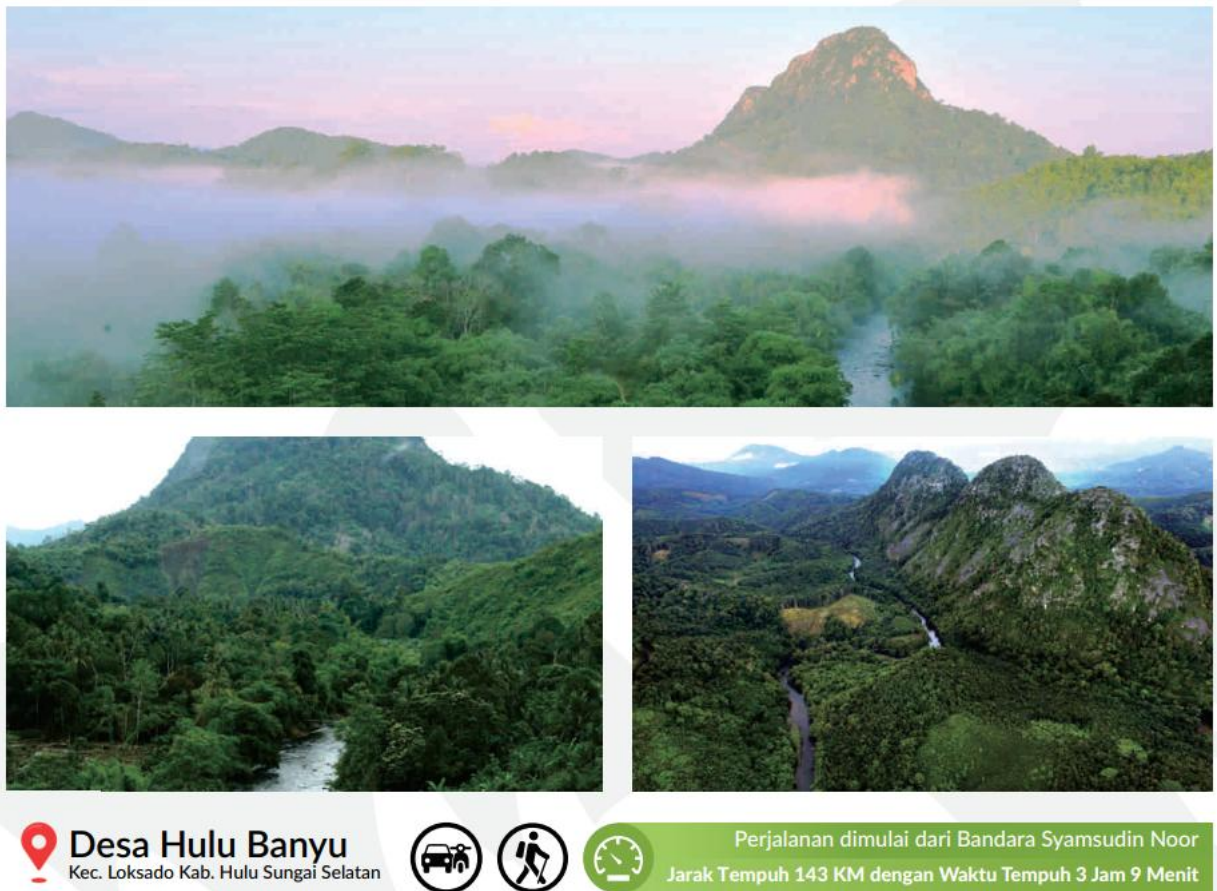
Perjalanan dimulai dari Bandara Syamsudin Noor
Jarak Tempuh 138 KM dengan Waktu Tempuh 3 Jam 17 Menit

Sumber : Geopark Meratus : *The Soul of Borneo Rute Utara Tahun 2023*

Arum Jeram Rakit Bambu berlokasi di Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lokasi ini dapat ditempuh dari Balai Adat Malaris sekitar 2 km atau sekitar 37 km dari Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan kendaraan roda dua/empat. Aktivitas arung jeram menggunakan rakit bambu ini dilakukan dengan menyusuri Sungai Amandit, dimana jarak tempuh yang dilalui sekitar 14 km atau sekitar 2-3 jam. Sepanjang perjalanan dapat dijumpai keragaman hasil kejadian bumi (geologi) seperti batuan Kelompok Malihan berumur 108- 182 juta tahun yang lalu (Jura Tengah) dan batuan hasil aktivitas vulkanik yaitu Kelompok Granit Batanglai/Belawaian berumur 96- 135 juta tahun yang lalu (Kapur Akhir). Selain itu, dapat dijumpai keragaman tanaman khas Hutan Hujan Tropis, aktivitas peladangan/ perkebunan khas Suku Dayak Meratus, pohon bambu (sebagai bahan untuk membuat rakit). Bambu kawasan ini dapat

tumbuh subur dan maksimal karena berada pada tanah hasil dari pelapukan batuan produk aktivitas vulkanik. Aktivitas rakit bambu dahulunya merupakan alat transportasi air yang biasa digunakan oleh warga Suku Dayak Meratus untuk membawa hasil hutan dan kebun untuk dijual ke kota dengan menyusuri Sungai Amandit.

Geopark Meratus – Bukit Kantawan



Sumber : Geopark Meratus : The Soul of Borneo Rute Utara Tahun 2023

Pemandangan Bukit Kantawan berlokasi di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lokasi ini dapat ditempuh dari Arum Jeram Rakit Bambu berlokasi sekitar 5 km atau sekitar 32 km dari Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan kendaraan roda dua/empat. Bukit Kantawan yang mempunyai ketinggian sekitar 400 meter diatas permukaan laut ini terbentuk oleh proses kejadian bumi (geologi) yang tersusun oleh batugamping Formasi Batununggal yang berumur 95-135 juta tahun yang lalu (Kapur Bawah), dimana batugamping ini terbentuk pada depan teran Patenoster saat hanyut pada zaman Kapur Bawah, sebelumnya pada Kapur Tengah membentur teran lain yang sudah ada terlebih dahulu (SW Borneo/Schwaner), kemudian proses kolisi membuat batu gamping tersebut terdeformasi, teralih tempatkan lalu kontak dengan batuan ofiolit dan selanjutnya terangkat ke permukaan setelah

benturan. Pada tahun 1979 kawasan hutan di Bukit Kantawan telah menjadi kawasan Cagar Alam (Surat Keputusan Menteri Pertanian No 109/Kpts-Um/2/1979).

Geopark Meratus – Air Terjun Kilat Api



Sumber : Geopark Meratus : The Soul of Borneo Rute Utara Tahun 2023

Air Terjun Kilat Api berlokasi di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lokasi ini dapat ditempuh dari Pemandangan Bukit Kantawan sekitar 2 km atau sekitar 30 km dari Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan kendaraan roda dua/empat. Lokasi yang berada di Pegunungan Meratus tersusun atas batuan yang dihasilkan dari produk aktivitas vulkanik pada umur 95-65 juta tahun yang lalu (Kapur Bawah), dimana pada periode tersebut aktivitas vulkanisme di Kawasan Pegunungan Meratus berlangsung cukup intens ini terdiri atas batuan-batuan seperti granit yang merupakan bagian dari Kelompok Granit Batanglai/Belawaian yang berumur 95- 135 juta tahun yang lalu (Kapur Bawah-Atas). Air terjun ini mempunyai kelereng yang tidak terlalu curam (Tingkat kelereng yang sedang) dengan ketinggian sekitar 15 meter dan terdiri atas berbagai tingkat, sehingga menghasilkan kelokan air yang indah menyerupai kelokan api, sehingga oleh masyarakat sekitar dinamakan Air Terjun Kilat Api.

Geopark Meratus – Air Panas Tanuhi



 **Desa Hulu Banyu**
Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan



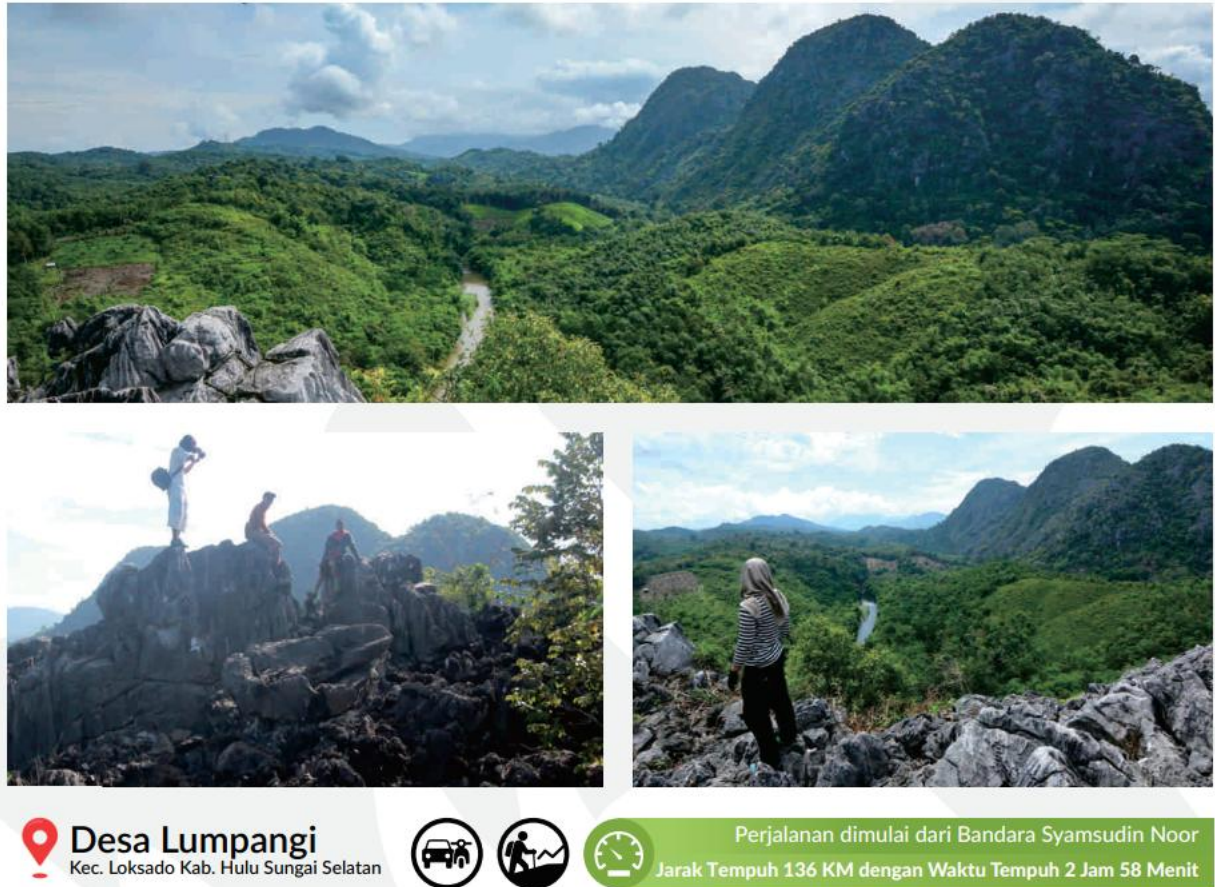
Perjalanan dimulai dari Bandara Syamsudin Noor
Jarak Tempuh 142 KM dengan Waktu Tempuh 3 Jam 10 Menit

Sumber : Geopark Meratus : The Soul of Borneo Rute Utara Tahun 2023

Mata Air Panas Tanuhi berlokasi di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lokasi ini dapat ditempuh dari Air Terjun Kilat Api sekitar 1 km atau sekitar 31 km dari Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan kendaraan roda dua/empat. Pada kawasan ini dijumpai adanya manifestasi sistem panas bumi, yaitu terdapatnya sumber mata air panas. Sistem panas bumi dikawasan ini termasuk didalam sistem panas bumi non vulkanik, dimana sistem tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan jalur vulkanisme/gunungapi saat ini, dimana sumber panasnya diinterpretasikan berasal dari proses peluruhan radiokatif pada batuan granit dari Kelompok Granit Batanglai/Belawaian yang berumur 95-135 juta tahun yang lalu (Kapur Bawah-Atas). Pada lokasi ini terdapat 2 sumber mata air panas. Berdasarkan hasil analisa air panas di lokasi ini mempunyai tipe jenis air sulfat, dimana jenis tipe air ini terbentuk oleh kondensasi gas H_2S terhadap air tanah (*steam heated waters*) yang diatas muka air tanah, sedangkan gas volatil (H_2S) berasal dari larutan fluida panas bumi namun berpisah akibat proses pendidihan dari air klorida dan gas ini bergerak menuju daerah keluaran secara vertikal. Jenis air panas non vulkanik dicirikan dengan temperatur yang sedang-tinggi (40-490) dan pH mendekati netral sebagai hasil dari reaksi air dengan batuan lokal di sekitar, dimana panas yang

tersimpan di dalam batuan terlewati oleh sumber air yang berasal dari meteorik, sehingga menghasilkan air panas pada permukaan.

Geopark Meratus – Bukit Langara



Sumber : Geopark Meratus : The Soul of Borneo Rute Utara Tahun 2023

Pemandangan Bukit Langara berlokasi di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lokasi ini dapat ditempuh dari Mata Air Panas Tanuhi sekitar 8 km atau sekitar 23 km dari Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan kendaraan roda dua/empat. Bukit Langara yang mempunyai ketinggian sekitar 200 meter diatas permukaan laut ini terbentuk oleh proses kejadian bumi (geologi) yang tersusun oleh batugamping Formasi Batununggal yang berumur 95-135 juta tahun yang lalu (Kapur Bawah), dimana batu gamping ini terbentuk pada depan teran Patenoster saat hanyut pada zaman Kapur Bawah, sebelumnya pada Kapur Tengah membentur teran lain yang sudah ada terlebih dahulu (SW Borneo/Schwaner), kemudian proses kolisi membuat batu gamping tersebut terdeformasi, teralihtempatkan lalu kontak dengan batuan ofiolit dan selanjutnya terangkat ke permukaan setelah benturan. Untuk menuju Puncak Bukit Langara dapat ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 20-30 menit (660 meter) dari tempat parkir kendaraan. Pada puncak bukit kita dapat memandang Bukit Kantawan, Sungai Amandit, dan Pegunungan Meratus secara 360.

Geopark Meratus – Tebing Batugamping Batu Laki



 **Desa Batu Laki**
Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan



Perjalanan dimulai dari Bandara Syamsudin Noor
Jarak Tempuh 124 KM dengan Waktu Tempuh 2 Jam 45 Menit

Sumber : Geopark Meratus : *The Soul of Borneo Rute Utara Tahun 2023*

Tebing Batugamping Batu Laki berlokasi di Desa Batu Laki, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lokasi ini dapat ditempuh dari Pemandangan Bukit Langara sekitar 25 km atau sekitar 13 km dari Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan kendaraan roda dua/empat. Bukit Batu laki mempunyai ketinggian sekitar 220 meter di atas permukaan laut ini, tersusun atas batu gamping yang merupakan bagian dari Formasi Berai berumur 16-36.5 juta tahun yang lalu (Oligosen-Miosen Awal) dan terbentuk pada kondisi laut dangkal (<30 meter). Lokasi ini merupakan kawasan karst dengan bentukan lahan berupa motoge (bentuk lahan positif) yang terbentuk dari hasil pelarutan dan erosi pada batugamping. Pada bagian bawah bukit terdapat goa yang menurut warga sekitar mempunyai lubang goa yang cukup besar dan saat ini telah tertutup oleh aliran Sungai Amandit. Kawasan ini menurut legenda merupakan pecahan Kapal milik Angui, dimana Angui merupakan seorang anak yang durhaka kepada orangtuanya. Salah satu pecahan dari kapal tersebut merupakan Bukit Batu Bini dan diantara pecahan kapal tersebut (Batu Laki dan Batu Bini) dipisahkan oleh Sungai Amandit. Lokasi ini merupakan akhir dari perjalanan Rute Utara “Mengikuti Suara Angin Menuju Keajaiban Dayak Meratus”.

II.1.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

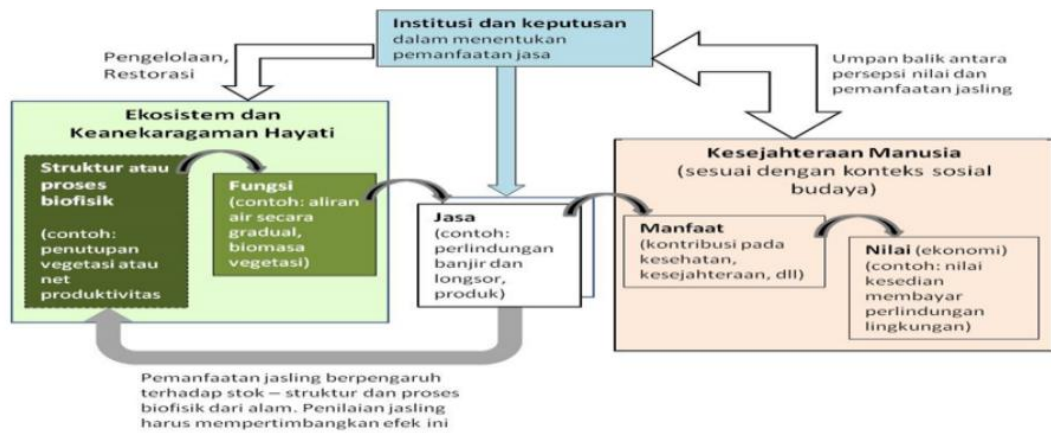
Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem, sedangkan ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pengertian tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa ekosistem mampu menyediakan produktivitas lingkungan hidup, yang artinya mampu menghasilkan sesuatu. Kontribusi atau manfaat yang diberikan oleh ekosistem disebut layanan/jasa lingkungan hidup. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) menyepakati bahwa jasa lingkungan hidup (*ecosystem services*) didefinisikan sebagai kontribusi struktur dan fungsi ekosistem secara langsung dan tidak langsung untuk kesejahteraan manusia (TEEB, 2010, de Groot, Braat dan Costanza, 2017). Definisi jasa lingkungan hidup tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi ekosistem dan sumber daya alam yang berfungsi baik yaitu yang mampu menyediakan jasa lingkungan hidup dari alam untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Menurut Schneiders dan Muller (2017) bahwa jasa lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh fungsi ekologisnya. Sebagai contoh produksi primer dan polinasi untuk produksi pangan, kapasitas infiltrasi air untuk penyediaan air dan dekomposisi organik untuk kesuburan tanah. Fungsi ekologis yang selanjutnya disebut sebagai fungsi lingkungan hidup, ketika dimanfaatkan akan menghasilkan jasa lingkungan. Konsep jasa lingkungan yang diadopsi oleh *Millenium Ecosystem Assessment* (MA) yang dipublikasikan tahun 2005 mengilustrasikan bahwa organisme berinteraksi dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem, pada prosesnya mereka menghasilkan, memperoleh, atau menguraikan biomassa dan berinteraksi dengan senyawa organik atau berbasis karbon yang terkait dengan organisme tersebut. Organisme juga berperan dalam pemindahan mineral dari air, sedimen, dan tanah hingga akhirnya kembali lagi ke lingkungan, begitu pula dengan tanaman darat yang mengangkut air dari tanah ke atmosfer.

Dalam melakukan fungsinya, tanaman menyediakan material untuk manusia dalam bentuk pangan, serat dan bahan bangunan. Tanaman juga berkontribusi terhadap pengaturan tanah, udara dan kualitas air. Karakteristik ekosistem menentukan penyediaan barang dan jasa oleh ekosistem yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Barang yang berasal dari ekosistem (seperti

pangan) dan jasa (pemurni air) mewakili manfaat yang diperoleh manusia secara langsung maupun tidak langsung dari fungsi-fungsi ekosistem (Costanza et al., 1997).

Berdasarkan konsep tersebut, lahirlah konsep jasa lingkungan ataupun *ecosystem services* yang didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem, baik yang tangible maupun intangible. Operasionalisasi konsep jasa lingkungan dikategorikan oleh *Millenium Ecosystem Assessment* (MA) ke dalam empat fungsi jasa lingkungan, yaitu fungsi penyediaan (*provisioning*), pengaturan (*regulating*), pendukung (*supporting*) dan fungsi budaya (*cultural*).



Sumber: *Mapping Ecosystem Services* (Burkhard dan Maes, 2017)

Intervensi manusia terhadap ekosistem dapat meningkatkan nilai jasa lingkungan, sebagai contoh bahwa teknologi yang dikembangkan manusia dapat meningkatkan produksi pangan secara signifikan, namun disisi lain memberikan perubahan terhadap komponen jasa lainnya misalnya penurunan fungsi pengatur air. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan multisektoral yang memeriksa ketersediaan dan kondisi tiap jasa lingkungan termasuk interaksinya. Syrbe et al., dalam Burkhard (2017) menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan kebijakan perlu dilakukan analisis terhadap konsep ekosistem yang saling terkait dan mempengaruhi dalam menghasilkan jasa lingkungan yang batasannya harus didelineasikan dengan jelas. Pemetaan jasa lingkungan bermanfaat untuk mengetahui risiko dari kondisi ekosistem yang ada, penggunaan potensi jasa lingkungan yang tidak berkelanjutan, dampak berbahaya pada bentang alam, aliran spasial jasa lingkungan atau ketidakcocokan antara ketersediaan dan kebutuhan. Informasi geospasial jasa lingkungan antara lain dapat mengindikasikan dimana jasa lingkungan penyedia yang harus diperbaiki dan dimana daerah yang bisa diprioritaskan dalam hal sumber daya alam dan konservasi keanekaragaman hayati. Tantangan yang dihadapi untuk memetakan jasa lingkungan adalah bagaimana menguantifikasi dan bagaimana kualifikasinya. Seiring dengan perkembangan

literatur ilmiah, maka dikembangkan indikator jasa lingkungan untuk memonitor kondisi maupun tren ekosistem dalam periode waktu tertentu.

Menurut Vihervaara et al., dalam Burkhard (2017) bahwa pendekatan untuk menguantifikasi stok dan aliran (flow) dapat dilakukan melalui: 1. Pengukuran langsung dengan cara mengukur langsung kondisi saat ini, melalui observasi, monitoring, survey maupun kuesioner. 2. Pengukuran tidak langsung dapat dilakukan melalui proses interpretasi, melibatkan asumsi tertentu, atau perlu dikombinasikan dengan model dari sumber lain sebelum digunakan untuk mengukur jasa lingkungan. 3. Pemodelan, digunakan jika tidak tersedia pengukuran langsung maupun tidak langsung. Pemodelan membantu pengguna informasi untuk mengetahui simulasi ketersediaan, penggunaan dan kebutuhan berdasarkan input data ekologis dan sosial budaya.

1. Jasa Penyedia (*provisioning services*) Ekosistem berfungsi untuk menyediakan produk-produknya yang secara langsung dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Jenis layanan atau jasa penyediaan dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan oleh ekosistem seperti:
 - 1) Jasa Penyedia air bersih yaitu dengan fungsi penyediaan air untuk dimanfaatkan
 - 2) Jasa Penyedia pangan, yaitu dengan fungsi penyediaan pangan yang dikelompokkan menjadi pangan yang diperoleh langsung dari alam (contoh: produk ikan tangkapan, tanaman pangan liar, hasil hutan yang dapat dijadikan pangan); serta pangan yang diperoleh dari hasil budidaya manusia yang mengandalkan dukungan lingkungan (contoh: produk pertanian).
 - 3) Jasa Penyedia serat, bahan bakar dan material lainnya yaitu dengan fungsi spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar, atau bahan dasar.
 - 4) Jasa Penyedia sumber daya genetik yaitu dengan fungsi penyediaan spesies dengan materi genetik yang (berpotensi) bermanfaat, misalnya untuk pengobatan dan spesies ornamental.
2. Jasa Pengatur atau Pengendali Ekosistem berfungsi membentuk dan memelihara keseimbangannya sendiri melalui sistem pengaturan dan pengendalian atas proses-proses alamnya. Manusia dan makhluk hidup mendapatkan manfaatnya dalam bentuk antara lain:
 - 1) Jasa pengatur kualitas udara yaitu ekosistem berfungsi untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer

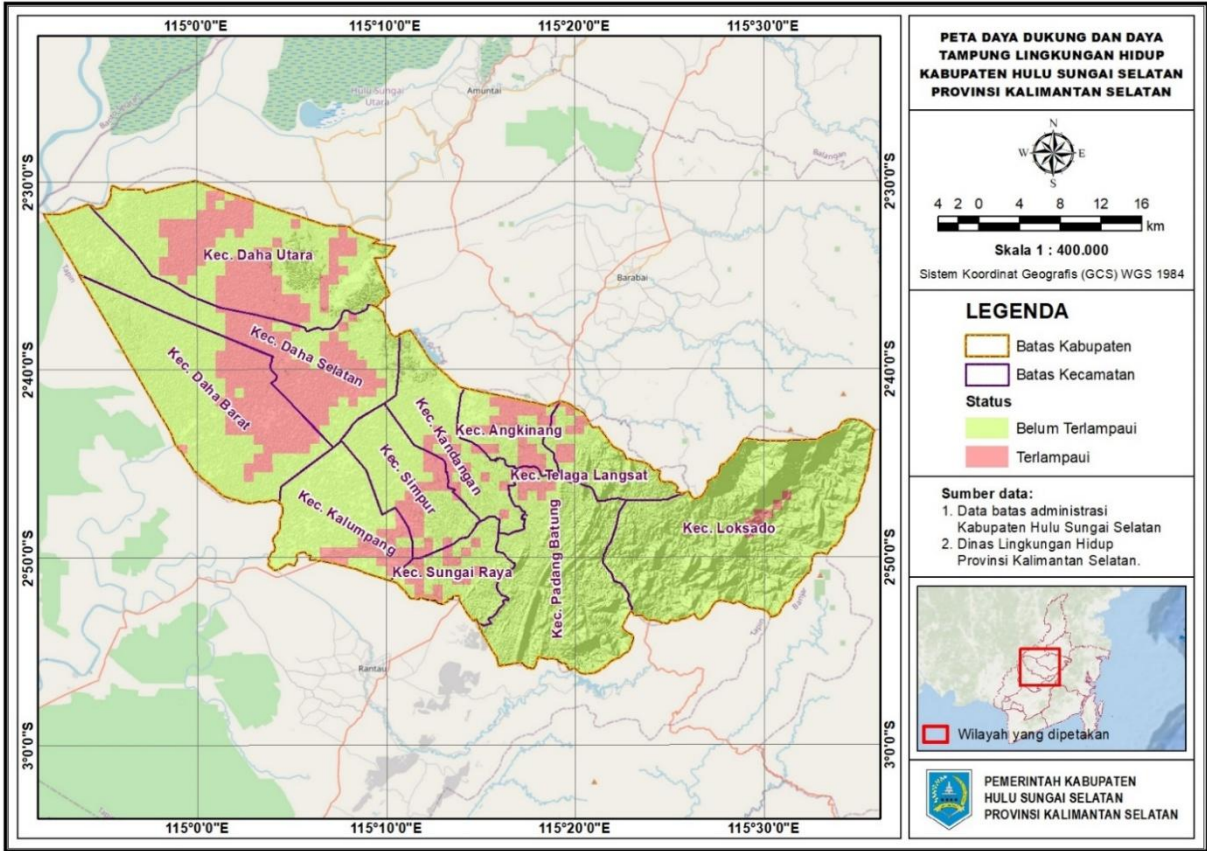
- 2) Jasa pengatur iklim yaitu ekosistem berfungsi mempengaruhi iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis.
 - 3) Jasa pengatur Mitigasi bencana Alam yaitu ekosistem terutama unsur struktur alamnya berfungsi mencegah dan melindungi dari kebakaran lahan, abrasi, longsor, badai, gempa bumi, banjir dan tsunami.
 - 4) Jasa pengatur air yaitu ekosistem terutama aspek bentang alam dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala
 - 5) Jasa pengatur pemurnian air dan pengolahan limbah yaitu unsur biota dan abiotik ekosistem berfungsi dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa dan nutrisi steril di sungai, danau, dan wilayah pesisir.
 - 6) Jasa penyerbukan alami yaitu ekosistem berfungsi mempengaruhi proses penyerbukan alami pada tanaman budidaya
 - 7) Jasa pengendali hama yaitu ekosistem berfungsi mengontrol populasi hama melalui hubungan trofik Penampungan dan penguraian limbah dan/atau sampah
3. Jasa Sosial Budaya Ekosistem berfungsi menyediakan manfaat yang bersifat non material bagi manusia yaitu berupa manfaat sosial budaya. Bentuk jasa sosial budaya antara lain:
- 1) Jasa estetika yaitu apresiasi terhadap pemandangan alami
 - 2) Jasa rekreasi yaitu peluang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi
 - 3) Jasa warisan budaya dan identitas lokal (adat istiadat) yang dilihat dari fitur bentang alam atau spesies budaya dan adat
4. Fungsi Layanan Pendukung Primer Layanan pendukung primer adalah hasil dan proses ekosistem yang menentukan keberadaan fungsi-fungsi layanan ekosistem lainnya, seperti:
- 1) Jasa Habitat dan keanekaragaman hayati yaitu manfaat ekosistem menyediakan habitat untuk pembiakan, makan, istirahat dan untuk spesies transien.
 - 2) Jasa pembentukan dan regenerasi tanah yaitu manfaat proses alami ekosistem dalam pembentukan dan regenerasi tanah
 - 3) Jasa produksi primer yaitu kemampuan lingkungan dalam mengonversi energi dari matahari menjadi bentuk organik melalui proses fotosintesis
 - 4) Jasa penyedia siklus hara yaitu kemampuan ekosistem mendukung proses pelapukan bahan organik.

Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH memiliki definisi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan definisi Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pemahaman terhadap konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebelumnya dipahami sebagai kemampuan lahan dan neraca air. Kemudian berkembang dan saat ini didekati dengan jasa lingkungan hidup. Evolusi pemahaman ini berdasarkan pertimbangan bahwa jasa lingkungan mewakili kemampuan lingkungan hidup secara holistik, termasuk menggambarkan keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pentingnya mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam pembangunan adalah agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pembangunan adalah optimasi, interdependensi dan interaksi antara komponen pembangunan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, tata nilai masyarakat, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup (Muta'ali, 2012). Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada dasarnya mengandung dua komponen yaitu komponen penyedia (*supply*) dan komponen pemanfaat/pengguna (*demand*). Syrbe et.al (2017) mendefinisikan penyedia jasa lingkungan (*ecosystem service supply*) sebagai penyediaan jasa oleh ekosistem tertentu, terlepas dari apapun penggunaan aktualnya. Dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu (seperti satu tahun) dalam masa sekarang, masa lalu, atau masa depan. Jumlah penyedia jasa lingkungan bergantung pada kondisi alami dan input manusia seperti, manajemen lahan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan (*ecosystem services demand*) didefinisikan sebagai kebutuhan jasa lingkungan tertentu oleh masyarakat, kelompok pemangku kepentingan tertentu atau individual. Hal tersebut tergantung pada beberapa faktor seperti, keinginan yang bergantung pada budaya dan kebutuhan, ketersediaan alternatif, atau sarana untuk memenuhi kebutuhan ini. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan diperlukan keseimbangan antara penyediaan dan pemanfaatan terhadap jasa lingkungan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan tersebut, kita perlu memetakan dan mengukur indikator yang dapat menggambarkan interaksi antara sisi lingkungan (*supply*) dan sisi sosial serta sistem ekonomi (*demand*).

Gambar II-10 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kapasitas dan kualitas ke empat jasa lingkungan hidup tersebut perlu dijaga keseimbangan, kestabilan, maupun produktivitasnya. Oleh karenanya, pasal 13 PP 46 PP 46 tahun 2016 mengamanatkan dilakukannya kajian kinerja layanan atau jasa lingkungan hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini dapat diartikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam sebagai konsekuensi pelaksanaan KRP wajib KLHS atau kegiatan lain yang berpotensi berdampak lingkungan tidak berdampak negatif terhadap kinerja layanan atau jasa lingkungan hidup.

Tabel II-20 Luas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kecamatan	Status D3TLH	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Angkinang	Belum Terlampaui	3.142,55	56,03%
	Terlampaui	2.466,23	43,97%
Daha Barat	Belum Terlampaui	16.094,32	69,43%
	Terlampaui	7.087,90	30,57%
Daha Selatan	Belum Terlampaui	12.577,82	62,48%
	Terlampaui	7.553,08	37,52%
Daha Utara	Belum Terlampaui	15.767,02	61,60%
	Terlampaui	9.829,71	38,40%
Kalumpang	Belum Terlampaui	9.442,03	81,62%
	Terlampaui	2.126,48	18,38%
Kandangan	Belum Terlampaui	8.314,59	85,87%

Kecamatan	Status D3TLH	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
	Terlampau	1.368,33	14,13%
Loksado	Belum Terlampaui	30.812,67	98,10%
	Terlampau	597,60	1,90%
Padang Batung	Belum Terlampaui	19.930,28	96,17%
	Terlampau	793,75	3,83%
Simpur	Belum Terlampaui	7.131,55	77,05%
	Terlampau	2.124,62	22,95%
Sungai Raya	Belum Terlampaui	4.863,50	76,75%
	Terlampau	1.472,99	23,25%
Telaga Langsat	Belum Terlampaui	5.392,46	86,90%
	Terlampau	812,94	13,10%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Secara umum, sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kondisi daya dukung dan daya tambung lingkungan hidup yang cukup baik, sebab kapasitasnya belum terlampaui. Akan tetapi, beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Angkinang, Daha Barat, Daha Selatan, dan Daha Utara, seperti kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya mulai terancam. Sebagaimana terlihat pada Gambar II.26 dan Tabel II.14. Sebab lebih dari 30% wilayahnya sudah terlampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya. Kecamatan Angkinang merupakan yang paling parah, sebab sudah lebih dari 40% wilayahnya melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dan dalam hal ini, Kecamatan Loksado dan Padang Batung merupakan dua kecamatan yang paling aman, sebab lebih dari 95% wilayahnya masih belum terlampaui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya.

2. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Jasa Penyedia pangan, yaitu dengan fungsi penyediaan pangan yang dikelompokkan menjadi pangan yang diperoleh langsung dari alam (contoh: produk ikan tangkapan, tanaman pangan liar, hasil hutan yang dapat dijadikan pangan); serta pangan yang diperoleh dari hasil budidaya manusia yang mengandalkan dukungan lingkungan (contoh: produk pertanian).

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Penyediaan pangan oleh

ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Di tingkat global, Agenda SDG telah memasukkan hak atas pangan sebagai tujuan tersendiri, yaitu Tujuan 2: "Mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan." Tujuan ini terdiri dari delapan target yang berkisar dari pengentasan kelaparan dan malnutrisi hingga produktivitas pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut, Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke IX, 2008, merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kualitas dan kemampuan daya beli (affordability). Untuk menjaga ketersediaan pangan telah dilakukan upaya mempertahankan luas lahan sawah.

Tabel II-21 Indikator Kinerja Urusan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	Ton	125,229	133,277	178,23	201,648	187,17
2	Tingkat Konsumsi Pangan Utama Beras	Kg/Thn	24.797.000	24.743.696	28.470.757	27.468.538	23.786.784
3	Tingkat Konsumsi Pangan Daging	Kg/Thn	1.763.626	4.334.694	1.580.358	2.053.061	1.557.468
4	Tingkat Konsumsi Pangan Ikan	Kg/Thn	7.776.951	6.969.508	8.436.680	7.905.464	7.527.762
5	Persentase Pangan Segar yang Tercemar	%	11,65%	5,19%	4,65%	3,07%	3%

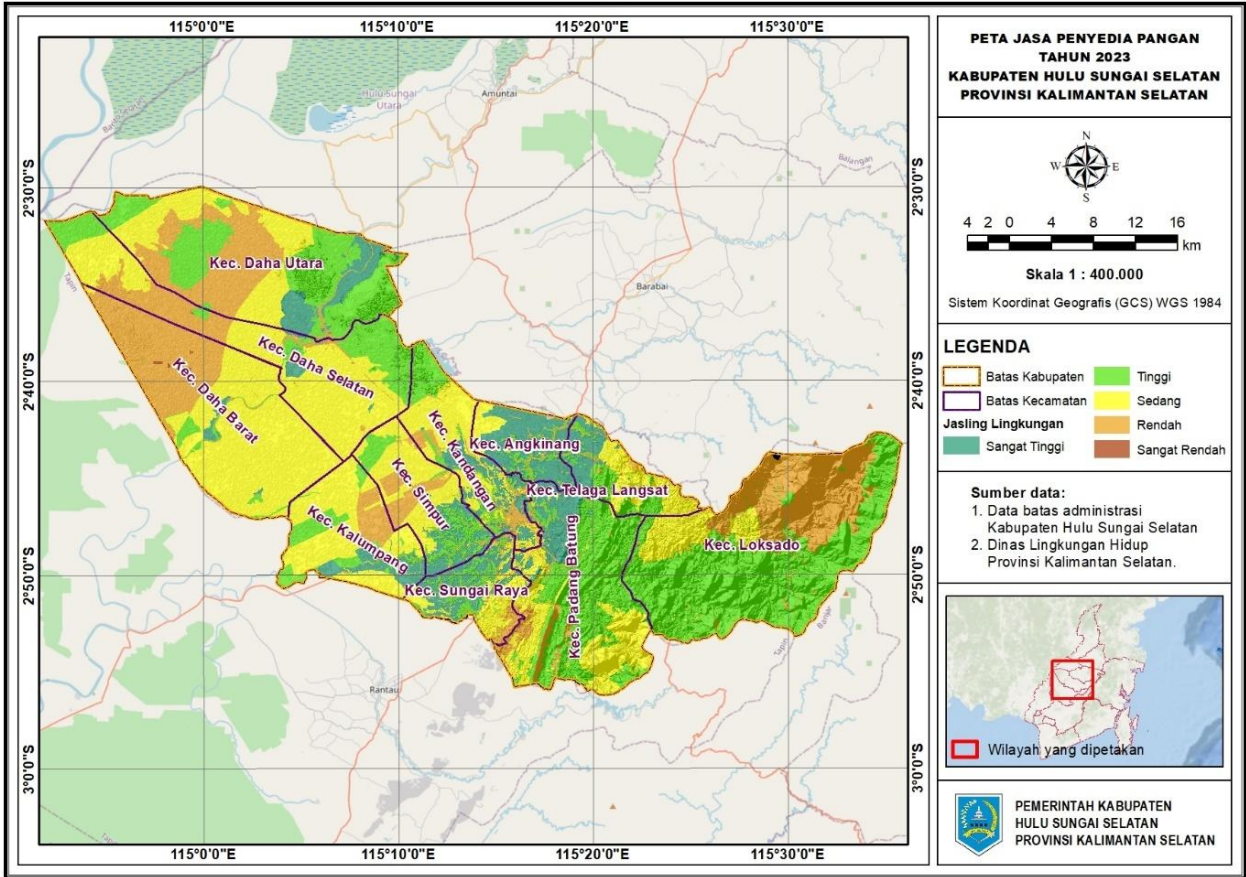
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang perlu dikembangkan antara lain sektor pertanian, dengan luas lahan sawah 29.221 Ha pada Tahun 2024. Potensi produksi pangan terutama dapat dilihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur.

Selain udara dan air, ketersediaan sumber-sumber makanan atau bahan pangan merupakan hal yang paling esensial di dalam menunjang kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Ketika manusia akan menghuni atau membuka suatu wilayah, maka pertanyaan pertama adalah apakah di wilayah tersebut tersedia pangan yang cukup. Memang untuk ukuran seperti

saat ini, terlebih di saat aksesibilitas antar wilayah sudah sangat bagus, sumber-sumber pangan dapat saja didatangkan dari luar. Artinya suatu daerah dapat saja tumbuh dan berkembang walau pun daerah tersebut tidak mampu menghasilkan pangan sendiri. Akan tetapi, jika wilayah tersebut dapat menghasilkan atau menyediakan bahan pangan sendiri tentu itu akan lebih baik. Atau setidaknya dapat mendatangkan persediaan bahan pangan dari wilayah-wilayah yang terdekat.

Gambar II-11 Peta Jasa Penyediaan Pangan Tahun 2023



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Gambar II.27 dan Tabel II.17 memperlihatkan bahwa secara umum, sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mampu menyediakan pangan dengan baik. Hanya Kecamatan Daha Barat, Daha Selatan, dan Daha Utara, yang penyediaan pangannya relatif lebih rendah dibanding kecamatan-kecamatan lainnya. Akan tetapi, meskipun lebih rendah, sebenarnya masih mencukupi. Di antara ketiga kecamatan ini, Kecamatan Daha Barat merupakan yang paling bermasalah di dalam penyediaan pangan. Sebab lebih dari 30% wilayahnya memiliki kemampuan penyedia pangan yang rendah. Sehingga ke depannya mungkin perlu dipertimbangkan untuk membuka lahan-lahan yang potensial menjadi sumber-sumber pangan di wilayah Kecamatan Daha Barat.

Tabel II-22 Luas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2023

Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Angkinang	Rendah	271,16	4,90%
	Sangat Tinggi	3.840,81	69,40%
	Sedang	784,39	14,17%
	Tinggi	637,83	11,53%
Daha Barat	Rendah	7.803,11	33,47%
	Sangat Rendah	61,29	0,26%
	Sangat Tinggi	384,80	1,65%
	Sedang	14.322,88	61,43%
Daha Selatan	Tinggi	743,39	3,19%
	Rendah	3.244,75	16,04%
	Sangat Rendah	5,33	0,03%
	Sangat Tinggi	414,33	2,05%
Daha Utara	Sedang	11.851,44	58,59%
	Tinggi	4.711,21	23,29%
	Rendah	7.146,59	27,82%
	Sangat Rendah	1,15	0,00%
Kalumpang	Sangat Tinggi	2.587,85	10,07%
	Sedang	5.986,72	23,31%
	Tinggi	9.965,00	38,79%
	Rendah	1.380,86	11,94%
Kandangan	Sangat Tinggi	1.419,28	12,27%
	Sedang	6.535,50	56,49%
	Tinggi	2.232,72	19,30%
	Rendah	1.067,53	10,96%
Loksado	Sangat Rendah	0,25	0,00%
	Sangat Tinggi	1.947,05	20,00%
	Sedang	4.419,64	45,39%
	Tinggi	2.302,87	23,65%
Padang Batung	Rendah	9.521,25	30,24%
	Sangat Rendah	5,55	0,02%
	Sedang	3.120,44	9,91%
	Tinggi	18.842,41	59,84%
Simpur	Rendah	1.745,27	8,39%
	Sangat Tinggi	2.541,56	12,21%
	Sedang	5.775,00	27,75%
	Tinggi	10.749,64	51,65%
Sungai Raya	Rendah	1.551,57	16,75%
	Sangat Tinggi	1.478,76	15,97%
	Sedang	4.275,18	46,16%
	Tinggi	1.955,98	21,12%
Telaga Langsat	Rendah	747,48	11,80%
	Sangat Tinggi	2.384,07	37,63%
	Sedang	2.008,43	31,70%
	Tinggi	1.196,37	18,88%
	Rendah	238,34	3,85%
	Sangat Tinggi	1.461,33	23,59%
	Sedang	2.685,10	43,35%
	Tinggi	1.809,32	29,21%

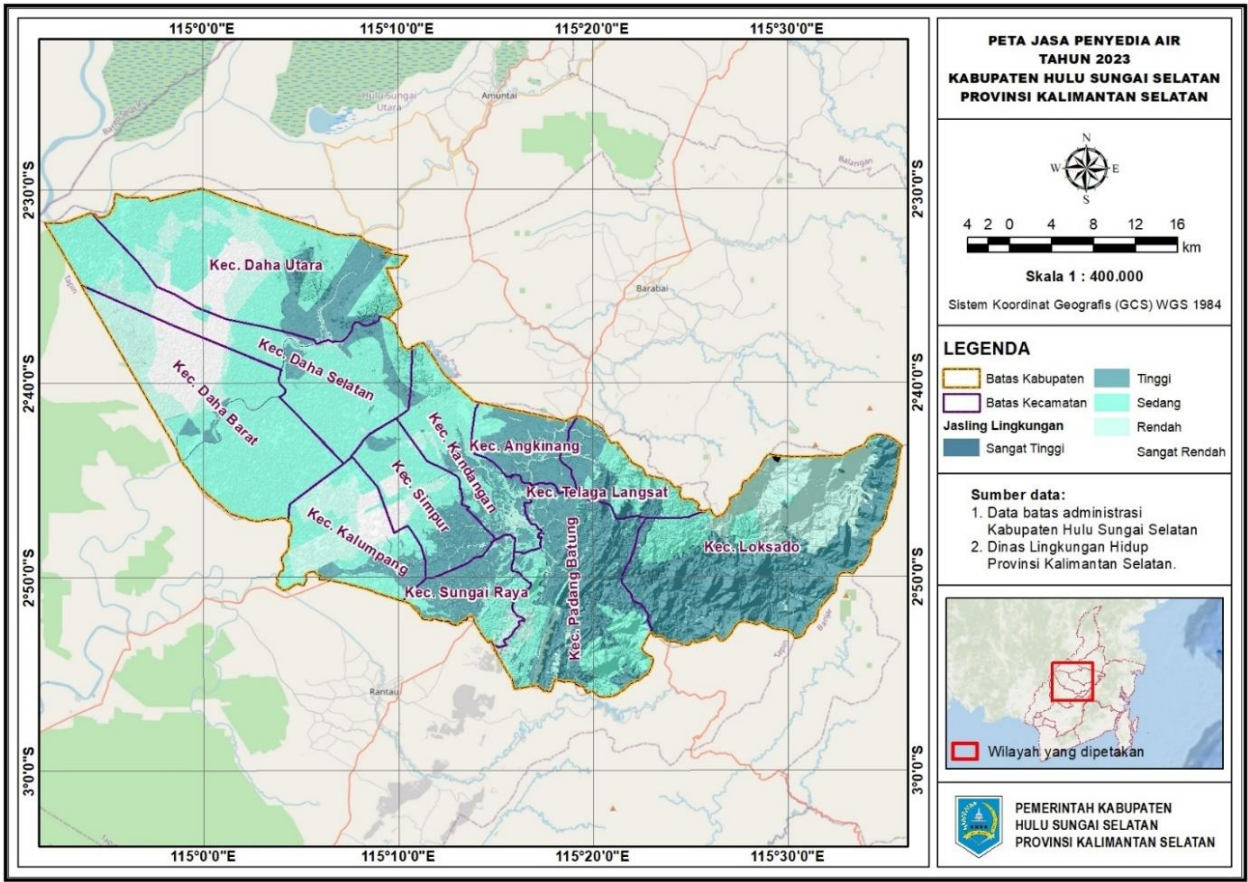
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Ketersediaan air merupakan salah satu unsur utama di dalam kelestarian lingkungan, dan akan menjadi parameter utama di dalam pembangunan berkelanjutan. Tentu saja, ketersediaan air yang dimaksud harus lah cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Sebab air yang berlebih, terutama air permukaan, juga akan berpotensi menjadi bencana. Data geospasial jasa lingkungan hidup penyedia air pada Gambar II.28 menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh tingkat jasa lingkungan penyedia air yang sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.18. Jasa penyedia air sedang ini

lebih banyak di temukan di lahan-lahan basah di bagian Barat. Sementara di sebagian wilayah di bagian tengah, seperti Kecamatan Loksado, Padang Batung, Telaga Langsung, Angkinang, Sungai Raya, Simpur, dan Kandangan, tingkat jasa lingkungan penyedia airnya cenderung tinggi.

Gambar II-12 Peta Jasa Penyedia Air Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Kecamatan Dahan Barat, Dahan Selatan, dan Dahan Utara, memiliki beberapa wilayah yang penyedia airnya sangat rendah. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.36 dan Tabel 3.27. Terutama dengan kehadiran perkebunan sawit di wilayah kecamatan ini.

Tabel II-23 Luas Jasa Lingkungan Penyedia Air menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2023

Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Air	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Angkinang	Rendah	271,16	4,90%
	Sedang	784,39	14,17%
	Tinggi	4.478,64	80,93%
Dahan Barat	Rendah	4.554,68	19,54%
	Sangat Rendah	4.033,10	17,30%
	Sangat Tinggi	255,26	1,09%
	Sedang	13.954,67	59,85%
Dahan Selatan	Tinggi	517,76	2,22%
	Rendah	1.483,65	7,33%
	Sangat Rendah	1.851,86	9,16%
	Sangat Tinggi	184,12	0,91%
	Sedang	14.820,45	73,27%

Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Air	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
	Tinggi	1.886,98	9,33%
Daha Utara	Rendah	4.513,40	17,57%
	Sangat Rendah	2.634,34	10,26%
	Sangat Tinggi	227,23	0,88%
	Sedang	13.270,06	51,66%
	Tinggi	5.042,27	19,63%
Kalumpang	Rendah	3.973,34	34,35%
	Sangat Rendah	1.273,18	11,01%
	Sangat Tinggi	20,28	0,18%
	Sedang	4.595,18	39,72%
	Tinggi	1.706,38	14,75%
Kandangan	Rendah	1.067,53	10,96%
	Sangat Rendah	0,25	0,00%
	Sangat Tinggi	101,75	1,04%
	Sedang	5.810,55	59,67%
	Tinggi	2.757,27	28,32%
Loksado	Rendah	9.497,74	30,16%
	Sangat Rendah	30,41	0,10%
	Sangat Tinggi	205,71	0,65%
	Sedang	3.437,04	10,91%
	Tinggi	18.318,75	58,17%
Padang Batung	Rendah	1.730,07	8,31%
	Sangat Rendah	14,33	0,07%
	Sangat Tinggi	172,59	0,83%
	Sedang	5.975,11	28,71%
	Tinggi	12.919,37	62,08%
Simpur	Rendah	799,55	8,63%
	Sangat Rendah	797,10	8,61%
	Sangat Tinggi	5,33	0,06%
	Sedang	4.624,50	49,93%
	Tinggi	3.034,99	32,77%
Sungai Raya	Rendah	747,48	11,80%
	Sedang	2.040,61	32,20%
	Tinggi	3.548,26	56,00%
Telaga Langsat	Rendah	235,97	3,81%
	Sangat Rendah	2,38	0,04%
	Sangat Tinggi	0,52	0,01%
	Sedang	2.924,17	47,21%
	Tinggi	3.031,07	48,93%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

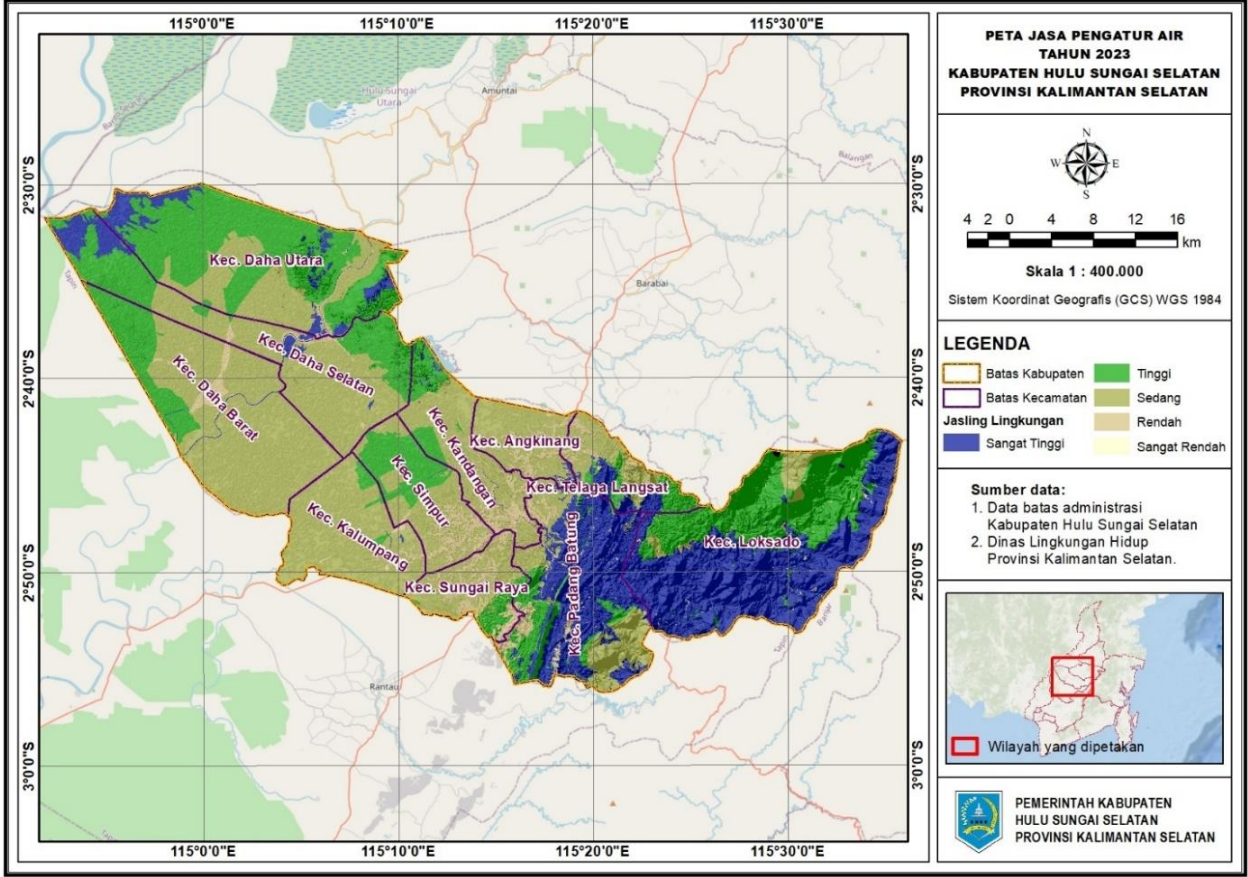
Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air

Jasa pengatur air yaitu ekosistem terutama aspek bentang alam dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala. Jasa lingkungan Pengatur Air berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup

dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Jasa lingkungan Pengatur Air sangat dipengaruhi oleh Siklus hidrologi. Siklus hidrologi (*hydrology cycle*) adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi) dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Selain ketersediaan air, pengaturan air juga merupakan elemen yang sangat penting. Sebab ketersediaan air yang melimpah tanpa pengaturan yang baik tentu akan menyebabkan pendistribusian dan pemanfaatan air menjadi tidak optimal. Wilayah-wilayah yang masih tertutup vegetasi alami yang cukup baik, seperti Kecamatan Loksado, Padang Batung, dan Telaga Langsat, memiliki kemampuan pengatur air yang tinggi. Berbeda dengan kecamatan yang relatif terbuka dari vegetasi rapat dan cenderung hanya tertutup belukar, lahan terbuka, atau tubuh air terbuka, sebagaimana Kecamatan Daha Barat, Daha Selatan, Kelumpang, dan Angkinang, kemampuan pengatur airnya relatif tidak begitu tinggi. Sebagaimana terlihat pada Gambar II.29 dan Tabel II.19.

Gambar II-13 Peta Jasa Pengatur Air Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan kenampakan visual pada Gambar 3.37 terlihat bahwa secara umum, kemampuan pengaturan air di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak begitu tinggi. Meskipun faktanya sebagian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki ketersediaan air yang melimpah. Akan tetapi, pada musim kemarau, air yang terdapat di lahan-lahan basah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya akan mengering. Hal ini menunjukkan kurang begitu baiknya wilayah di dalam menjaga ketersediaan air sepanjang waktu.

Tabel II-24 Luas Jasa Lingkungan Pengatur Air menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2023

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Air	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Angkinang	Rendah	908,93	16,4%
	Sangat Tinggi	117,28	2,1%
	Sedang	4.507,92	81,5%
	Tinggi	0,07	0,0%
Daha Barat	Rendah	901,36	3,9%
	Sangat Tinggi	278,41	1,2%
	Sedang	17.795,34	76,3%
	Tinggi	4.340,36	18,6%
Daha Selatan	Rendah	430,90	2,1%
	Sangat Tinggi	2.055,59	10,2%
	Sedang	11.249,43	55,6%
	Tinggi	6.491,13	32,1%
Daha Utara	Rendah	242,69	0,9%
	Sangat Tinggi	2.951,68	11,5%

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Air	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
	Sedang	6.884,78	26,8%
	Tinggi	15.608,16	60,8%
Kalumpang	Rendah	462,71	4,0%
	Sangat Tinggi	41,63	0,4%
	Sedang	10.444,11	90,3%
	Tinggi	619,91	5,4%
Kandangan	Rendah	1.429,74	14,7%
	Sangat Tinggi	216,73	2,2%
	Sedang	6.163,40	63,3%
	Tinggi	1.927,47	19,8%
Loksado	Rendah	251,63	0,8%
	Sangat Rendah	5,55	0,0%
	Sangat Tinggi	18.522,60	58,8%
	Sedang	1.372,11	4,4%
	Tinggi	11.337,75	36,0%
Padang Batung	Rendah	1.649,70	7,9%
	Sangat Tinggi	11.406,49	54,8%
	Sedang	4.852,37	23,3%
	Tinggi	2.902,92	13,9%
Simpur	Rendah	1.437,62	15,5%
	Sangat Tinggi	12,61	0,1%
	Sedang	4.508,48	48,7%
	Tinggi	3.302,77	35,7%
Sungai Raya	Rendah	1.893,35	29,9%
	Sangat Tinggi	4,78	0,1%
	Sedang	3.451,23	54,5%
	Tinggi	987,00	15,6%
Telaga Langsat	Rendah	574,52	9,3%
	Sangat Tinggi	1.423,56	23,0%
	Sedang	2.773,14	44,8%
	Tinggi	1.422,88	23,0%

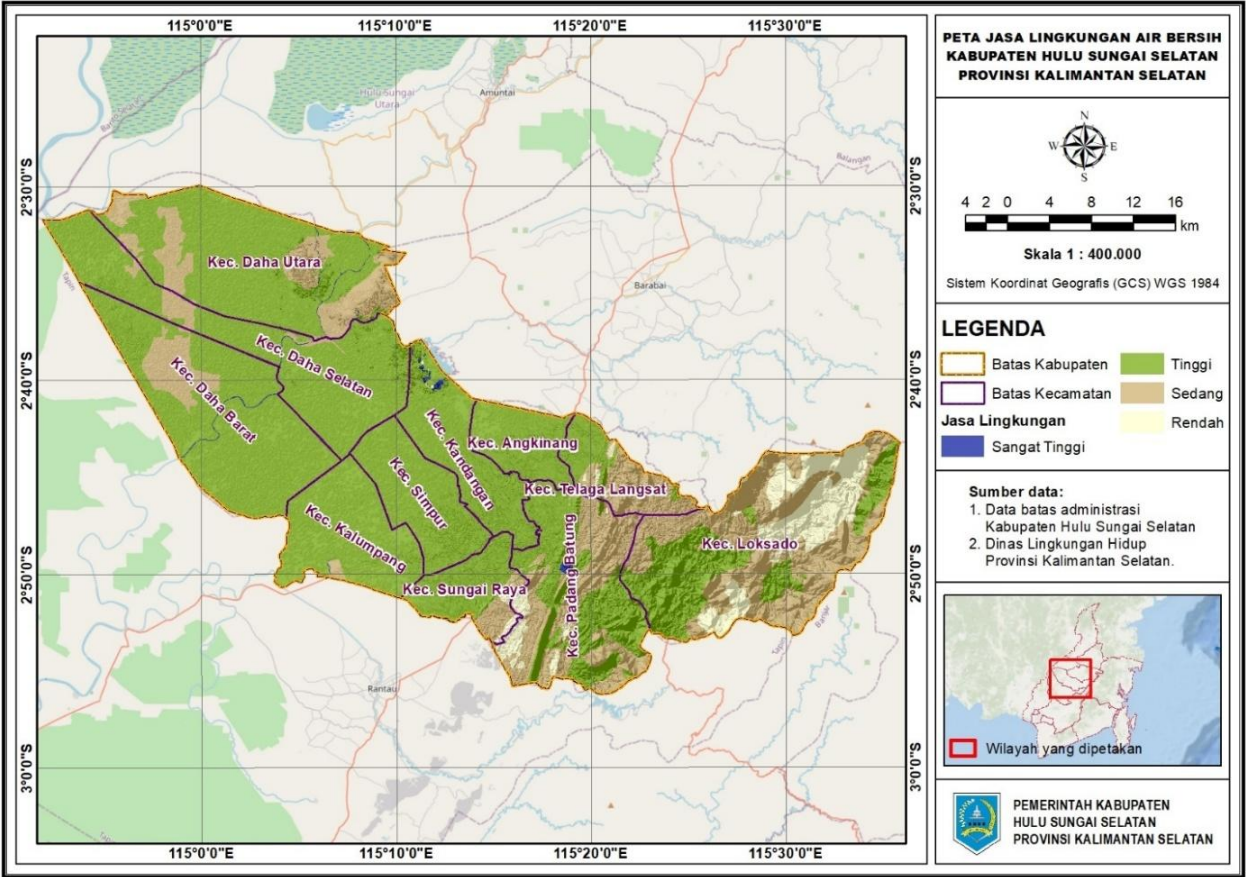
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air

Ketersediaan air minum bersih tidak kalah penting pada aspek perumahan. Air minum bersih dapat dikatakan jika air minum yang bersumber dari air yang terlindungi seperti air ledeng (kran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor serta sumur pompa yang jarak dari pembuangan kotoran/penampungan limbah dan sampah minimal 10 meter dari sumber air, termasuk air minum kemasan dan air isi ulang. Tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, serta air sumur dan mata air yang tidak terlindung. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan SUSENAS tahun 2022 sebanyak 65,26 persen rumah tangga yang telah mengakses air bersih. Sedangkan sebanyak 34,74 persen rumah tangga masih menggunakan air

minum yang tidak bersih. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengingat air minum yang bersih berkaitan dengan kesehatan penduduk, dimana air yang tidak bersih akan membuat masyarakat rentan terhadap penyakit.

Gambar II-14 Peta Jasa Lingkungan Air Bersih Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Secara umum, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mampu menyediakan air bersih pada tingkat yang tinggi dan sangat tinggi, sebagaimana terlihat pada Gambar II.30. Hanya sebagian wilayah pada bagian Timur, terutama Kecamatan Loksado, Telaga Langsat, dan Padang Batung, dimana tingkat penyediaan airnya rendah hingga sedang. Sebagaimana terlihat pada Tabel II.20. Hal ini tidak terlepas dari kondisi wilayah kedua kecamatan ini yang bertopografi kasar, dan semakin ke arah Timur kemiringan lerengnya cenderung naik. Sehingga jika sumber-sumber air bersih di alirkan dari bawah ke atas (bagian Timur), maka hal ini akan sangat memerlukan biaya, energi, dan teknologi yang sangat tinggi.

Tabel II-25 Luas Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2023

Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Angkinang	Tinggi	5.608,79	100%
	Sangat Tinggi	140,78	0,61%
Daha Barat	Sedang	2.957,65	12,76%
	Tinggi	20.083,78	86,63%
	Sangat Tinggi	127,53	0,63%

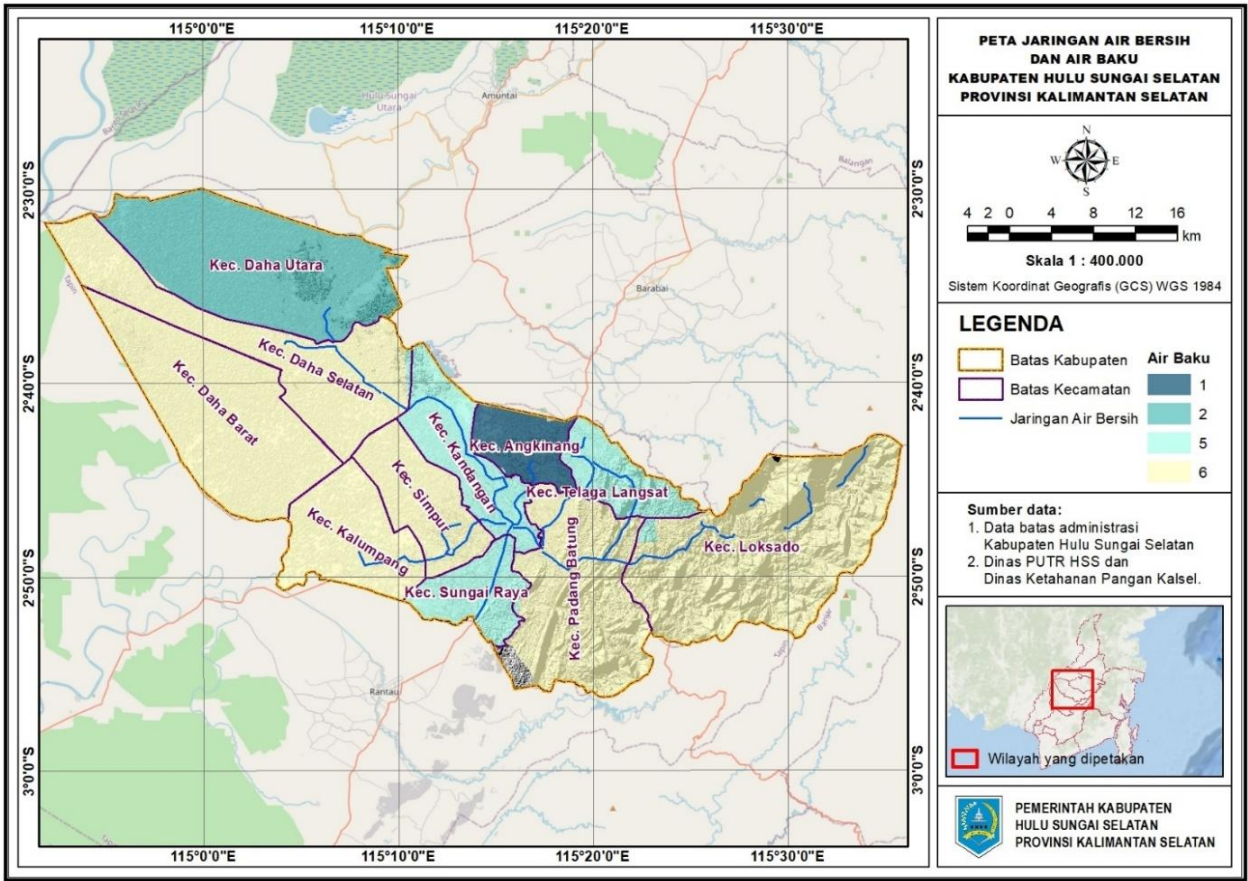
Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Daha Selatan	Sedang	1.138,55	5,66%
	Tinggi	18.864,82	93,71%
Daha Utara	Sangat Tinggi	107,43	0,42%
	Sedang	7.107,63	27,77%
	Tinggi	18.381,65	71,81%
Kalumpang	Sangat Tinggi	34,89	0,30%
	Sedang	237,36	2,05%
	Tinggi	11.296,26	97,65%
Kandangan	Rendah	24,48	0,25%
	Sangat Tinggi	143,75	1,48%
	Sedang	8,06	0,08%
	Tinggi	9.506,63	98,18%
Loksado	Rendah	7.282,48	23,19%
	Sedang	15.027,74	47,84%
	Tinggi	9.100,05	28,97%
Padang Batung	Rendah	1.398,48	6,75%
	Sangat Tinggi	155,35	0,75%
	Sedang	8.685,04	41,91%
	Tinggi	10.485,16	50,59%
Simpur	Tinggi	9.256,16	100%
Sungai Raya	Rendah	361,36	5,70%
	Sedang	1.213,09	19,14%
	Tinggi	4.762,05	75,15%
Telaga Langsat	Rendah	192,55	3,10%
	Sedang	3.658,66	58,96%
	Tinggi	2.354,19	37,94%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagai penunjang untuk penyediaan air bersih, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki infrastruktur jaringan air bersih. Sebagaimana terlihat pada Gambar II.30. Memang beberapa wilayah belum terjangkau oleh jaringan ini, sebagaimana Kecamatan Daha Barat dan sebagian besar Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Padang Batung, dan Loksado. Gambar II.30 juga menyajikan informasi geospasial air baku menurut wilayah kecamatan. Air baku merupakan air minum rumah tangga, yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Terlihat bahwa Kecamatan Padang Batung, Loksado, Simpur, Kalumpang, Daha Barat, dan Daha Selatan, memiliki potensi air baku yang rendah. Gambar II.31 lebih memperkuat lagi bahwa Daha Barat, Daha Selatan, Padang Batung, dan Loksado, tidak termasuk wilayah yang disalurkan air. Kecamatan-kecamatan ini sebenarnya harus diprioritaskan untuk dibangun infrastruktur jaringan air bersih. Memang untuk Kecamatan Padang Batung dan Loksado yang terletak di ketinggian, pembangunan

infrastruktur air bersih akan penuh tantangan, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

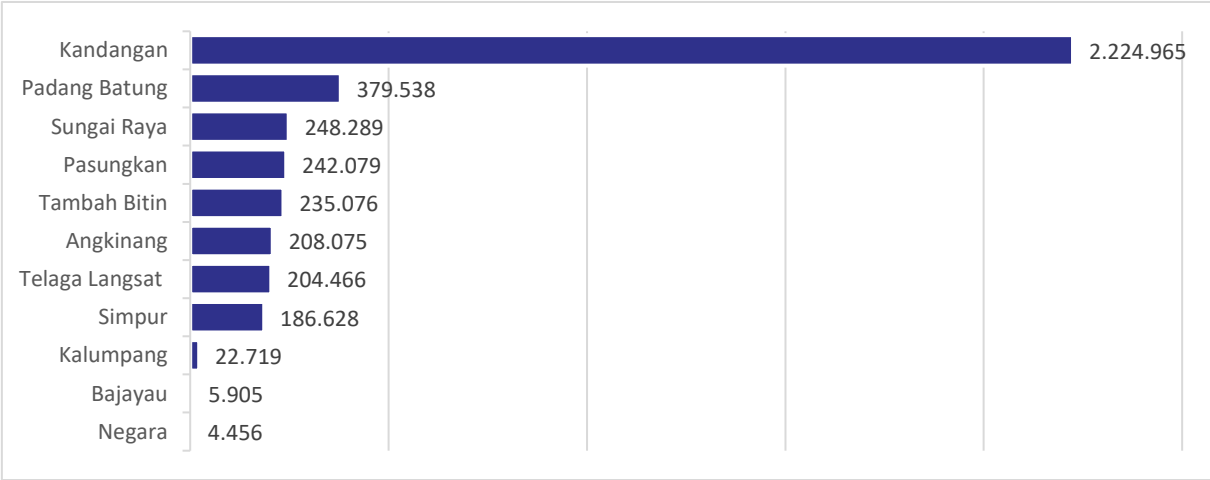
Gambar II-15 Peta Jaringan Air Bersih dan Air Baku Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Alternatif lainnya yang mungkin dapat ditempuh terkait penyediaan air bersih pada wilayah-wilayah yang topografinya tinggi, adalah dengan mencoba mencari sumber-sumber air bersih di bagian atas, sehingga nantinya relatif akan lebih mudah jika dialirkan ke bawah. Misalnya saja dengan pembuatan embung atau bahkan bendungan air di bagian atas. Tentu saja pembangunan infrastruktur air bersih seperti ini akan sangat memerlukan kajian dan perencanaan yang sangat matang.

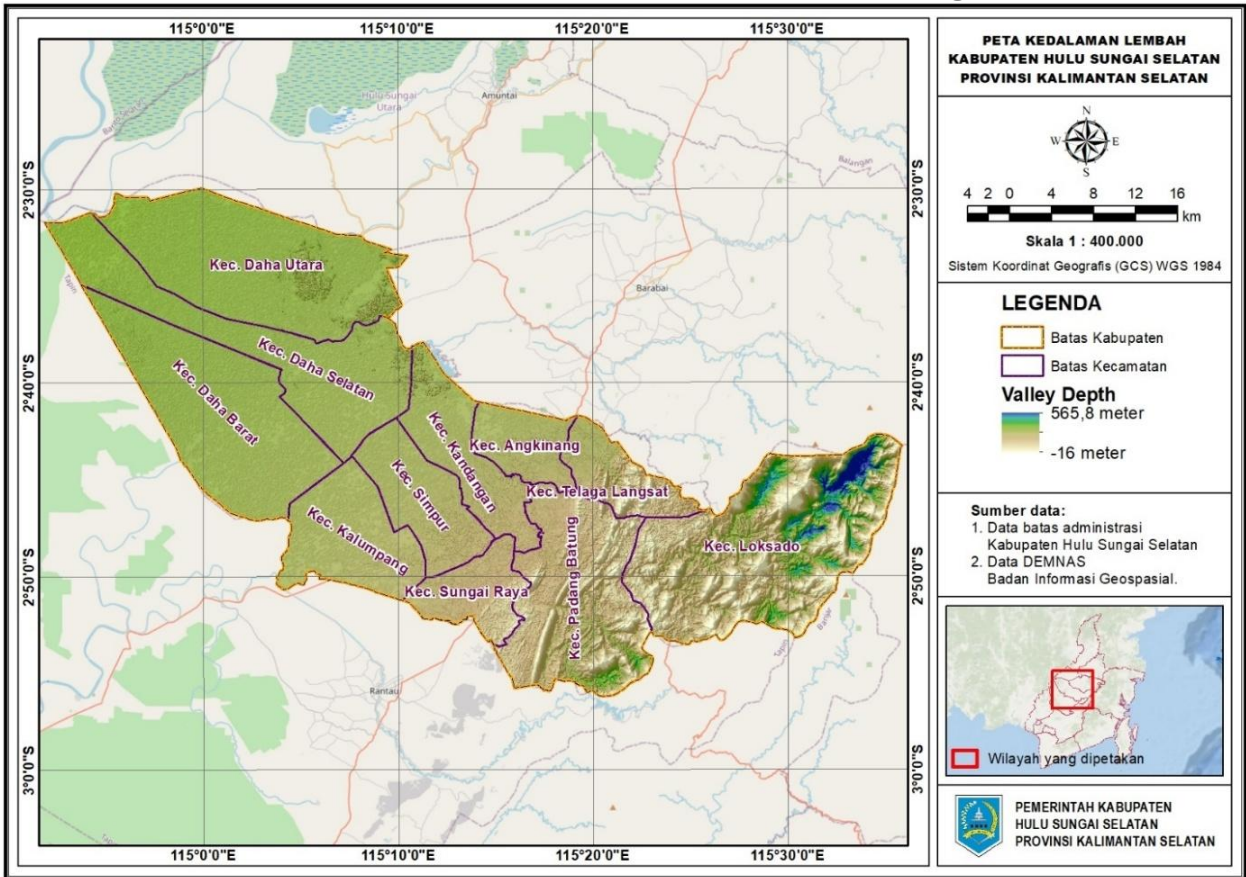
Gambar II-16 Jumlah Air yang Disalurkan di Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan

Terutama yang terkait topografi, jenis tanah, dan sumber-sumber airnya. Sebagai informasi potensi awal untuk penyediaan sumber-sumber air di bagian atas, pada Gambar II.31 disediakan informasi visual kedalaman lembah-lembah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tentu saja, informasi ini sifatnya sangat indikatif dan tentatif, dan tidak dapat dijadikan dasar operasional. Informasi ini hanya lebih diarahkan untuk menjadi dasar bagi kajian-kajian komprehensif selanjutnya.

Gambar II-17 Peta Kedalaman Lembah Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

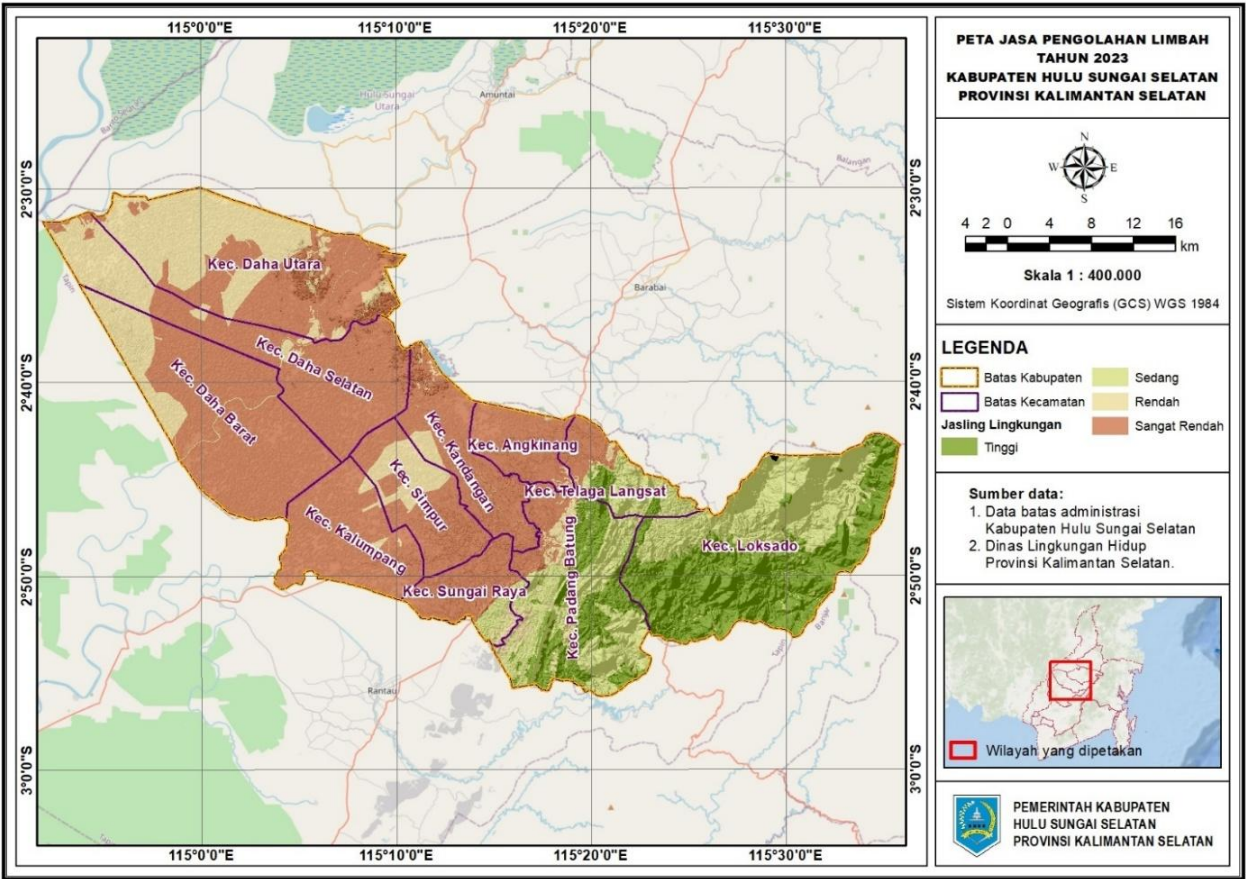
Lingkungan Hidup Berkualitas

Jasa Lingkungan Pengelolaan Limbah

Jasa lingkungan pengelolaan limbah memegang peranan yang sangat penting di dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dimana limbah-limbah yang tidak tertangani dengan baik, baik limbah industri, perdagangan, atau rumah tangga, berpotensi akan merusak lingkungan. Terutama untuk jangka panjang. Terkait jasa lingkungan pengelolaan limbah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebenarnya agak mengkhawatirkan. Mengingat lebih dari setengah wilayahnya memiliki kemampuan pengelolaan limbah yang rendah dan sangat rendah. Sebagaimana terlihat pada Gambar II.34. Hanya 3 (tiga) kecamatan yang memiliki pengelolaan limbah yang tinggi, yaitu Kecamatan Padang Batung, Telaga Langsat, dan Loksado. Untuk lebih jelasnya dapat dianalisis pada Tabel II.21. Hal ini berarti 8 (delapan) kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan memerlukan perhatian untuk pembangunan instalasi pengelolaan limbah ke depannya. Sebab secara lingkungan, kedelapan wilayah kecamatan ini tidak mampu menangani limbah dengan baik.

Gambar II-18 Peta Jasa Pengolahan Limbah Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Tabel II-26 Luas Jasa Lingkungan Pengelolaan Limbah menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2023

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengelolaan Limbah	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Angkinang	Rendah	117,28	2,12%
	Sangat Rendah	5.416,91	97,88%
Daha Barat	Rendah	4.169,63	17,88%
	Sangat Rendah	19.018,65	81,57%
	Sedang	127,20	0,55%
Daha Selatan	Rendah	5.108,45	25,26%
	Sangat Rendah	15.023,31	74,27%
	Sedang	95,29	0,47%
Daha Utara	Rendah	13.185,73	51,33%
	Sangat Rendah	12.393,26	48,25%
	Sedang	108,32	0,42%
Kalumpang	Rendah	374,07	3,23%
	Sangat Rendah	11.183,88	96,68%
	Sedang	10,41	0,09%
Kandangan	Rendah	785,06	8,06%
	Sangat Rendah	8.902,20	91,42%
	Sedang	50,08	0,51%

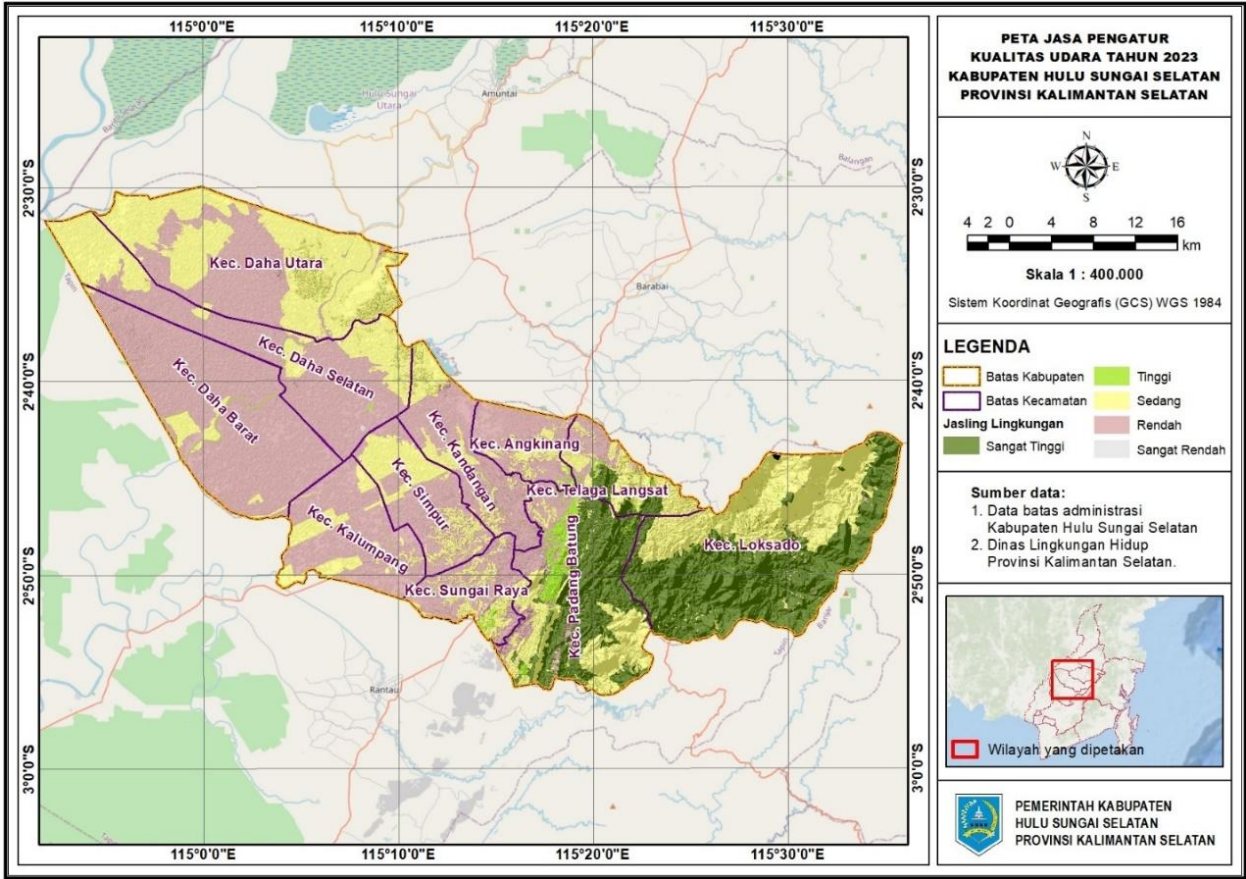
Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengelolaan Limbah	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Loksado	Rendah	251,63	0,80%
	Sedang	12.718,49	40,39%
	Tinggi	18.519,53	58,81%
Padang Batung	Rendah	2.227,21	10,70%
	Sangat Rendah	2.467,56	11,86%
	Sedang	9.132,35	43,88%
	Tinggi	6.984,34	33,56%
Simpur	Rendah	2.706,14	29,22%
	Sangat Rendah	6.550,04	70,72%
	Sedang	5,30	0,06%
Sungai Raya	Rendah	436,49	6,89%
	Sangat Rendah	4.901,29	77,35%
	Sedang	993,87	15,69%
	Tinggi	4,70	0,07%
Telaga Langsat	Rendah	307,41	4,96%
	Sangat Rendah	2.050,78	33,11%
	Sedang	2.908,93	46,96%
	Tinggi	926,98	14,97%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara

Hampir serupa dengan pengelolaan limbah, jasa lingkungan pengatur kualitas udara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dapat dikatakan cukup rendah. Terutama untuk wilayah-wilayah di bagian Barat yang merupakan lahan-lahan basah. Hanya wilayah-wilayah Timur, seperti Kecamatan Telaga Langsat, Kecamatan Padang Batung, dan Kecamatan Loksado, yang memiliki pengatur kualitas udara yang sangat tinggi. Sebagaimana terlihat pada Gambar II.35 dan Tabel II.22. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari keberadaan penutupan vegetasi yang rapat dan masih alami. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan wilayah, dan pembukaan lahan semakin masif, ketiga kecamatan dengan pengatur kualitas udara terbaik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini juga dapat terancam di kemudian hari.

Gambar II-19 Peta Jasa Pengatur Kualitas Udara Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Ke depannya perlu untuk mempertimbangkan melakukan penanaman vegetasi-vegetasi yang rapat atau pepohonan pada wilayah-wilayah yang memiliki jasa pengatur kualitas udara rendah. Memang ke arah Barat yang merupakan lahan-lahan basah, terlebih kawasannya juga bukan merupakan kawasan hutan, penanaman pepohonan merupakan kesulitan tersendiri. Akan tetapi, hal ini dapat di atasi dengan melibatkan peran serta masyarakat. Misalnya penanaman pepohonan di pinggir-pinggir jalan atau bedengan-bedengan sawah. Tentu saja, untuk daerah rawa, yang ditanam harus jenis-jenis pohon yang dapat tumbuh di rawa.

Tabel II-27 Luas Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2023

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Angkinang	Rendah	4.107,51	74,22%
	Sangat Rendah	0,45	0,01%
	Sedang	1.308,95	23,65%
	Tinggi	117,28	2,12%
Daha Barat	Rendah	21.910,14	93,97%
	Sangat Rendah	12,08	0,05%
	Sedang	1.114,85	4,78%
	Tinggi	278,41	1,19%
Daha Selatan	Rendah	12.354,87	61,08%
	Sangat Rendah	27,25	0,13%
	Sedang	7.638,17	37,76%

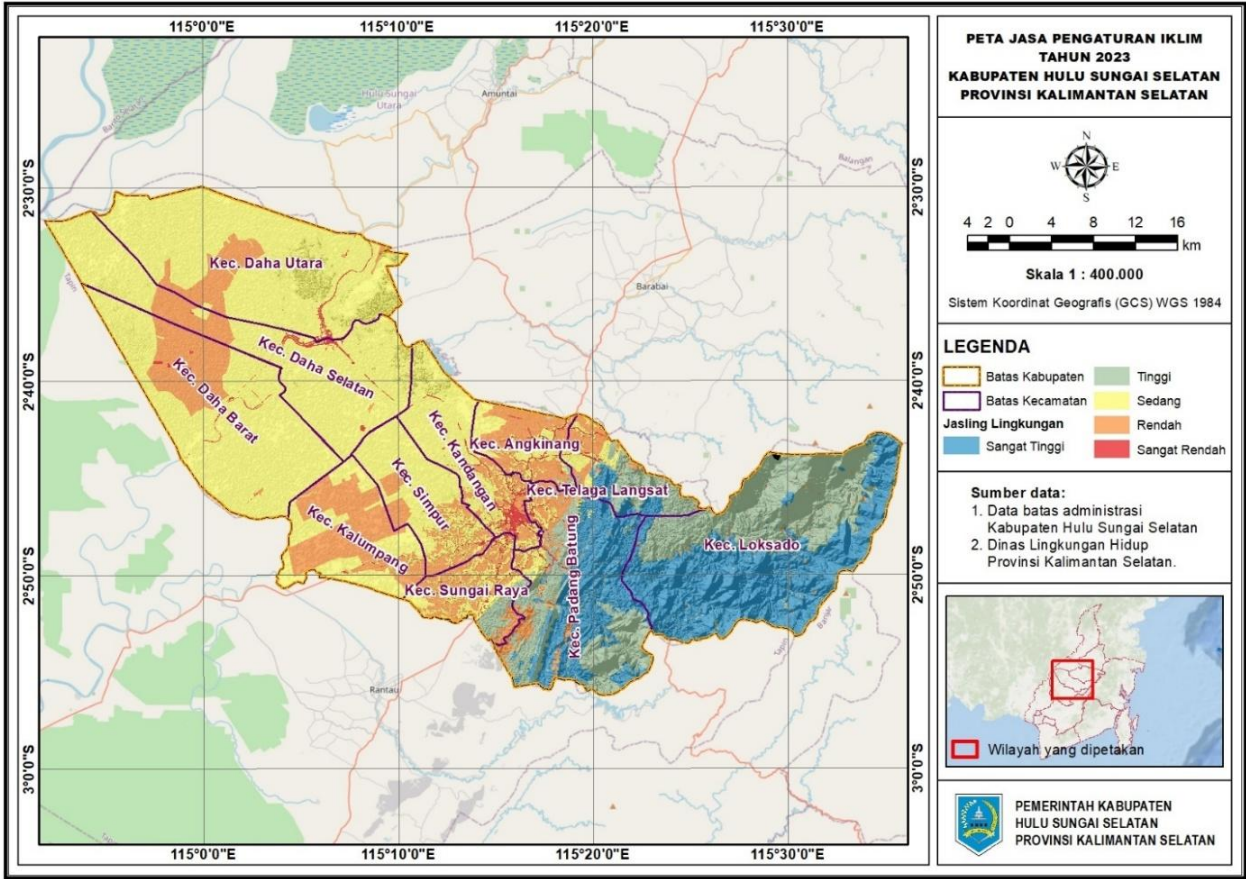
Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
	Tinggi	206,77	1,02%
Daha Utara	Rendah	9.019,50	35,11%
	Sangat Rendah	0,15	0,00%
	Sedang	16.440,43	64,00%
	Tinggi	227,23	0,88%
Kalumpang	Rendah	8.759,90	75,72%
	Sedang	2.785,48	24,08%
	Tinggi	22,98	0,20%
Kandangan	Rendah	6.663,42	68,43%
	Sangat Rendah	8,04	0,08%
	Sedang	2.963,98	30,44%
	Tinggi	101,90	1,05%
Loksado	Rendah	153,72	0,49%
	Sangat Tinggi	18.621,00	59,13%
	Sedang	12.488,67	39,66%
	Tinggi	226,27	0,72%
Padang Batung	Rendah	3.298,60	15,85%
	Sangat Rendah	10,82	0,05%
	Sangat Tinggi	9.743,54	46,82%
	Sedang	5.944,41	28,56%
	Tinggi	1.814,10	8,72%
Simpur	Rendah	5.256,30	56,75%
	Sedang	3.992,58	43,11%
	Tinggi	12,61	0,14%
Sungai Raya	Rendah	4.094,86	64,62%
	Sangat Rendah	30,09	0,47%
	Sangat Tinggi	4,70	0,07%
	Sedang	2.060,35	32,52%
	Tinggi	146,36	2,31%
Telaga Langsat	Rendah	1.530,22	24,70%
	Sangat Tinggi	1.324,44	21,38%
	Sedang	3.098,47	50,02%
	Tinggi	240,96	3,89%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim

Secara teoritis, keberadaan vegetasi rapat atau hutan di suatu wilayah akan mampu menciptakan iklim mikro. Sebab keberadaan kanopi hutan akan mengurangi intensitas cahaya matahari yang jatuh di permukaan tanah, dan suplai oksigen yang melimpah dari komunitas vegetasi yang ada di dalam hutan akan menurunkan temperatur udara. Akibatnya di dalam hutan atau di bawah tajuk pepohonan intensitas cahaya lebih rendah, temperatur lebih rendah, kelembaban udara lebih tinggi, dan permukaan tanah akan basah. Kondisi seperti ini akan menciptakan kondisi iklim yang lebih stabil.

Gambar II-20 Peta Jasa Pengaturan Iklim Kab. Hulu Sungai Selatan



Gambar II.36 dan data pada Tabel II.23 menunjukkan bahwa Kecamatan Telaga Langsat, Padang Batung, dan Loksado yang masih memiliki penutupan vegetasi alami yang rapat, relatif memiliki kemampuan pengaturan iklim yang tinggi dan bahkan sangat tinggi. Hal ini tentu saja kontras dengan wilayah-wilayah lainnya yang relatif lebih terbuka. Kondisi iklim yang stabil, terutama masih dapat menjaga temperatur dan kelembaban udara dengan baik pada saat musim kemarau, akan dapat mencegah potensi bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Hal ini terbukti pada Gambar II.36 sebelumnya, bahwa wilayah-wilayah yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan adalah wilayah-wilayah dengan jasa pengaturan iklim yang lebih rendah.

Tabel II-28 Luas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2023			
Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Iklim	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Angkinang	Rendah	3.052,41	55,16%
	Sangat Rendah	271,16	4,90%
	Sedang	2.093,35	37,83%
	Tinggi	117,28	2,12%
Daha Barat	Rendah	4.734,17	20,30%
	Sangat Rendah	178,23	0,76%
	Sedang	18.403,06	78,93%
Daha Selatan	Rendah	1.955,92	9,67%
	Sangat Rendah	345,47	1,71%
	Sedang	17.925,67	88,62%

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Iklim	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Daha Utara	Rendah	2.725,25	10,61%
	Sangat Rendah	242,69	0,94%
	Sedang	22.719,38	88,45%
Kalumpang	Rendah	6.217,86	53,75%
	Sangat Rendah	53,17	0,46%
	Sedang	5.297,33	45,79%
Kandangan	Rendah	1.339,89	13,76%
	Sangat Rendah	770,56	7,91%
	Sedang	7.626,58	78,32%
	Tinggi	0,31	0,00%
Loksado	Rendah	257,18	0,82%
	Sangat Tinggi	18.519,53	58,81%
	Tinggi	12.712,93	40,37%
Padang Batung	Rendah	2.563,85	12,32%
	Sangat Rendah	263,81	1,27%
	Sangat Tinggi	9.680,65	46,52%
	Sedang	1.021,08	4,91%
	Tinggi	7.282,08	34,99%
Simpur	Rendah	2.310,75	24,95%
	Sangat Rendah	140,79	1,52%
	Sedang	6.809,94	73,53%
Sungai Raya	Rendah	2.768,04	43,69%
	Sangat Rendah	311,06	4,91%
	Sangat Tinggi	4,70	0,07%
	Sedang	2.277,09	35,94%
	Tinggi	975,46	15,39%
Telaga Langsat	Rendah	1.112,72	17,96%
	Sangat Rendah	125,10	2,02%
	Sangat Tinggi	1.323,92	21,37%
	Sedang	1.013,22	16,36%
	Tinggi	2.619,13	42,28%

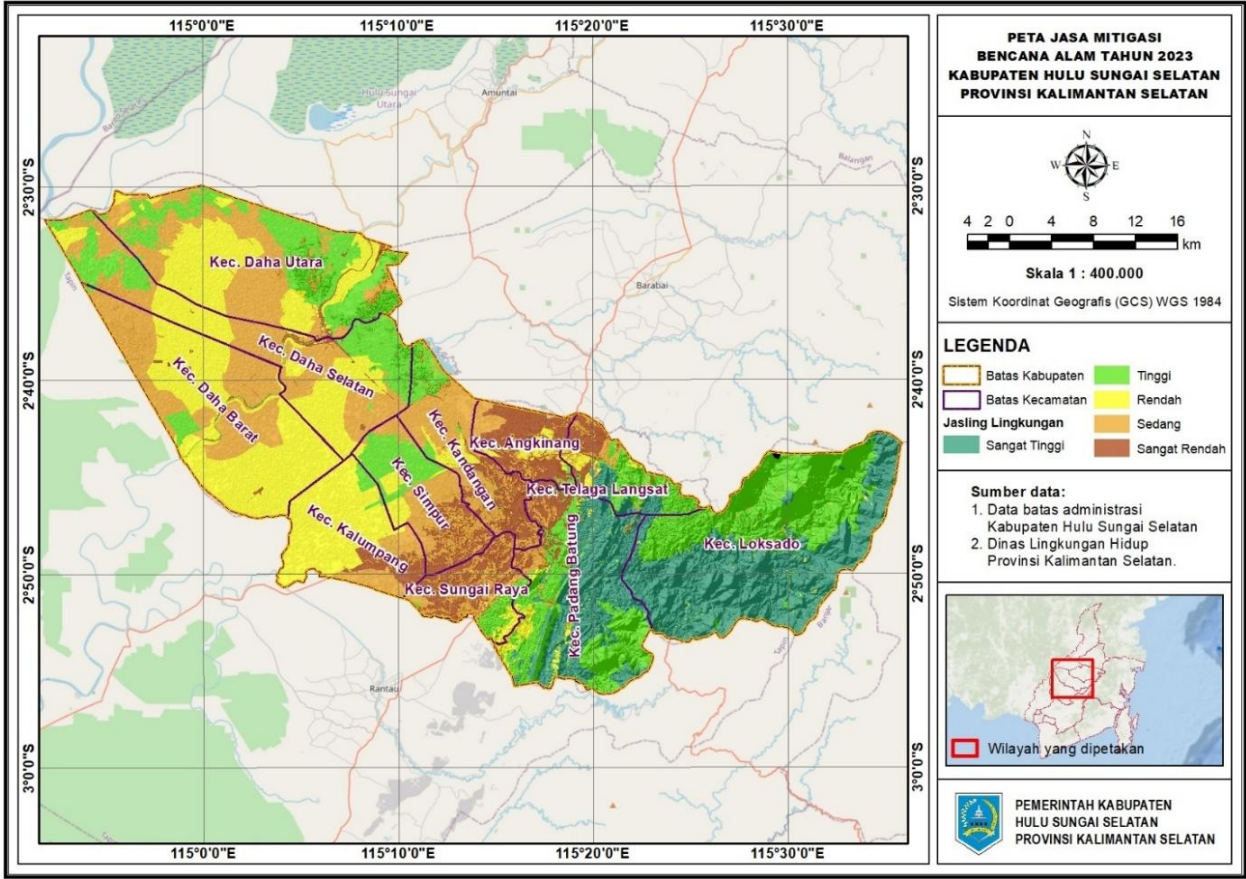
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Jasa Lingkungan Hidup Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam

Seperti halnya wilayah-wilayah lain di Kalimantan Selatan pada umumnya, sebagaimana juga sudah dibahas pada bagian terdahulu, bahwa potensi bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum hanya 4 (empat). Yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin, dan tanah longsor. Kerawanan terhadap keempat jenis bencana ini akan sangat tergantung dari kondisi bentang lahan wilayah. Wilayah dengan penutupan vegetasi rapat, stabilitas temperatur dan kelembaban udara terjaga, biasanya akan kurang rawan terhadap bencana alam banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Akan tetapi, untuk bencana tanah longsor mungkin masih mengancam. Sebab akan sangat tergantung dari kemiringan lereng dan kestabilan lapisan tanah.

Gambar II-21 Peta Jasa Mitigasi Bencana Alam Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Gambar II.37 dan Tabel II.24 menunjukkan bahwa, wilayah-wilayah yang masih terjaga penutupan vegetasi alaminya relatif memiliki kemampuan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam yang tinggi. Seperti Kecamatan Telaga Langsat, Padang Batung, dan Loksado. Tentu saja, hal ini tidak berlaku untuk bencana tekto-vulkanik seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Akan tetapi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kalimantan Selatan tidak ada potensi bencana alam ini.

Tabel II-29 Luas Jasa Lingkungan Mitigasi Bencana Alam menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2023

Kecamatan	Jasa Lingkungan Mitigasi Bencana Alam	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Angkinang	Rendah	671,12	12,13%
	Sangat Rendah	3.323,56	60,06%
	Sedang	1.422,16	25,70%
	Tinggi	117,35	2,12%
Daha Barat	Rendah	13.382,38	57,40%
	Sangat Rendah	211,07	0,91%
	Sedang	8.817,62	37,82%
	Tinggi	904,40	3,88%
Daha Selatan	Rendah	6.714,48	33,20%
	Sangat Rendah	345,47	1,71%
	Sedang	7.658,87	37,86%
	Tinggi	5.508,24	27,23%
Daha Utara	Rendah	7.997,72	31,13%
	Sangat Rendah	334,74	1,30%
	Sedang	8.476,23	33,00%

Kecamatan	Jasa Lingkungan Mitigasi Bencana Alam	Luas (hektare)	Persentase Menurut Wilayah Kecamatan
Kalumpang	Tinggi	8.878,63	34,56%
	Rendah	7.851,56	67,87%
	Sangat Rendah	1.131,54	9,78%
	Sedang	2.050,00	17,72%
	Tinggi	535,26	4,63%
Kandangan	Rendah	725,05	7,45%
	Sangat Rendah	2.106,06	21,63%
	Sedang	5.339,41	54,83%
	Tinggi	1.566,82	16,09%
Loksado	Rendah	257,18	0,82%
	Sangat Tinggi	18.694,78	59,37%
	Sedang	145,77	0,46%
	Tinggi	12.391,92	39,35%
Padang Batung	Rendah	1.236,66	5,94%
	Sangat Rendah	1.650,86	7,93%
	Sangat Tinggi	9.798,20	47,08%
	Sedang	987,46	4,74%
	Tinggi	7.138,29	34,30%
Simpur	Rendah	1.017,00	10,98%
	Sangat Rendah	1.609,36	17,38%
	Sedang	3.979,58	42,97%
	Tinggi	2.655,55	28,67%
Sungai Raya	Rendah	488,78	7,71%
	Sangat Rendah	2.642,69	41,71%
	Sangat Tinggi	4,70	0,07%
	Sedang	2.206,33	34,82%
	Tinggi	993,85	15,68%
Telaga Langsat	Rendah	462,28	7,46%
	Sangat Rendah	1.131,43	18,27%
	Sangat Tinggi	1.324,44	21,38%
	Sedang	799,18	12,90%
	Tinggi	2.476,77	39,99%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Wilayah Rawan Bencana

Morfologi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar >65% merupakan daerah dataran, hal ini sangat riskan akan terjadi bencana banjir disebabkan daerah hulu dari Sungai Amandit yaitu daerah Loksado merupakan hutan yang kian lama akan semakin gundul karena banyak penebangan kayu yang kurang terkontrol. Mengingat daerah Kecamatan Loksado dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Batung merupakan daerah dengan Satuan Geomorfologi Perbukitan Berelief Sedang hingga Terjal yaitu dengan kemiringan lereng mencapai > 36°, maka sering terjadi bencana tanah longsor yang sangat berbahaya terutama dekat dengan pemukiman dan jalan penghubung antar desa.

Tabel II-30 Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/ Kota Provinsi Tahun 2020-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RESIKO
1	Tanah Laut	178.00	139.20	139.20	123.23	134.62	Tinggi
2	Barito Kuala	190.00	83.54	87.34	87.34	123.79	Tinggi
3	Kotabaru	205.20	107.89	82.82	82.82	110.21	Tinggi
4	Tabalong	152.40	101.69	68.52	76.18	73.19	Sedang
5	Tanah Bumbu	155.60	144.40	120.96	100.62	96.65	Sedang
6	Banjar	131.36	120.40	120.40	120.40	108.69	Sedang
7	Hulu Sungai Selatan	152.40	205.20	137.56	114.24	131.12	Sedang
8	Hulu Sungai Tengah	140.40	138.79	116.11	93.84	82.99	Sedang
9	Tapin	140.40	178.00	105.75	113.34	88.79	Sedang
10	Balangan	122.82	118.64	106.77	106.77	94.43	Sedang
11	Hulu Sungai Utara	93.54	157.15	104.90	110.79	127.77	Sedang
12	Kota Banjarbaru	108.00	141.15	85.79	87.51	93.00	Sedang
13	Kota Banjarmasin	96.40	120.40	120.40	89.23	57.38	Sedang

Sumber : <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi> diakses pada tanggal 21 April 2025

Sesuai data dari Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Inarisk BNPB (<http://inarisk.bnpb.go.id>), pada tahun 2019 s.d. 2023 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk pada kelas risiko tinggi dengan skor 152,40 dan mengalami penurunan sampai tahun 2023 menjadi 129,09 di kategori Sedang. Dari tabel Indeks Risiko Bencana terlihat Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di urutan ke lima dengan kelas risiko tinggi. Jenis Bencana yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Banjir, Kekeringan, Angin Puting Beliung, Longsor, Kebakaran Lahan dan Hutan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki titik rawan bencana adalah sebagai berikut :

- Bencana Longsor meliputi Kec. Loksado di Desa Hulu Banyu, Kec. Padang Batung di desa Batu Laki, Kec. Telaga Langsat di Desa Hamak dan Hamak Utara.
- Bencana Banjir meliputi Kec. Kandangan, Kec. Kalumpang, Kec. Angkinang, Kec. Sungai Raya, Kec. Padang Batung, Kec. Telaga Langsat, Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Barat

II.1.3 Demografi

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator fundamental dalam perencanaan pembangunan daerah. Data ini menjadi landasan dalam menetapkan arah kebijakan, penganggaran, serta penyediaan pelayanan dasar yang merata dan berkeadilan. Analisis terhadap perkembangan jumlah

penduduk secara spasial dan temporal memberikan gambaran tentang dinamika demografi serta tekanan dan potensi pembangunan di setiap wilayah.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2020–2024, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren peningkatan yang konsisten, dari 228.006 jiwa pada tahun 2020 menjadi 238.413 jiwa pada tahun 2024. Selama periode lima tahun tersebut, rata-rata pertumbuhan tahunan penduduk mencapai sekitar 2.600 jiwa, atau setara dengan 1,13% per tahun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan dinamika demografi yang stabil dan cenderung positif, mencerminkan keseimbangan antara angka kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (mobilitas).

Tabel II-31 Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

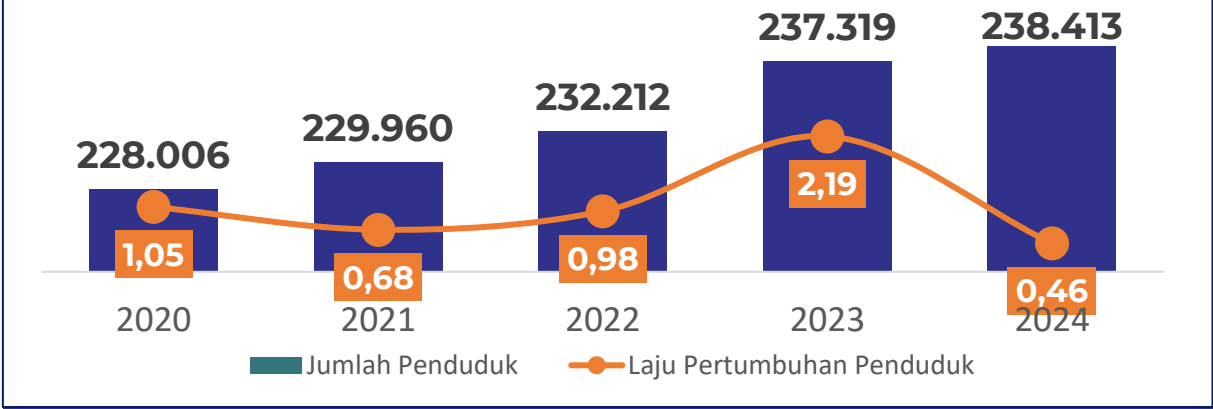
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Padang Batung	21.424	21.656	21.918	22.470	22.587
Loksado	8.454	8.496	8.548	8.869	8.931
Telaga Langsat	10.199	10.3496	10.508	10.594	10.618
Angkinang	18.561	18.780	19.024	19.437	19.507
Kandangan	48.866	49.204	49.604	50.382	50.691
Sungai Raya	18.047	18.277	18.533	18.450	18.502
Simpur	15.222	15.385	15.568	15.700	15.793
Kalumpang	6.522	6.586	5.658	6.674	6.656
Daha Selatan	40.802	41.014	41.276	42.883	43.061
Daha Barat	7.974	8.063	8.164	8.168	8.213
Daha Utara	31.935	32.153	32.411	33.692	33.854
Hulu Sungai Selatan	228.006	229.960	232.212	237.319	238.413

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Pertumbuhan jumlah penduduk antar kecamatan menunjukkan variasi yang cukup beragam. Kecamatan Padang Batung mencatat pertumbuhan penduduk tercepat secara persentase dalam lima tahun terakhir, yakni meningkat dari 21.424 jiwa (2020) menjadi 22.587 jiwa (2024) atau tumbuh sebesar 5,43%. Kecamatan dengan pertumbuhan absolut tertinggi adalah Daha Selatan yang meningkat sebanyak 2.259 jiwa dan Kandangan sebesar 1.825 jiwa.

Sebaliknya, Kecamatan Kalumpang mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat rendah, bahkan sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Secara kumulatif selama lima tahun terakhir, Kalumpang hanya mengalami peningkatan sebesar 134 jiwa, yang menjadikannya kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling lambat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar II-22 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhannya



Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan (Data diolah)

Struktur Penduduk

Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin merupakan dimensi penting dalam analisis demografi, karena dapat mencerminkan potensi pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya dalam aspek ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan perlindungan sosial.

Tabel II-32 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	2020	2021	2022	2023	2024
1	0 – 4	19.449	19.060	18.826	15.715	13.720
2	5 – 9	20.489	20.501	20.286	18.386	18.065
3	10 – 14	18.665	19.035	19.578	20.077	19.971
4	15 - 19	18.937	18.775	18.653	19.545	19.820
5	20 - 24	19.032	18.876	18.716	21.092	20.990
6	25 - 29	18.058	17.986	17.956	17.965	18.305
7	30 - 34	17.820	17.779	17.728	18.347	18.424
8	35 - 39	16.539	16.573	16.653	17.930	18.375
9	40 - 44	16.323	16.382	16.414	17.879	17.985
10	45 - 49	15.713	16.002	16.294	16.980	17.152
11	50 - 54	13.967	14.319	14.687	15.869	16.196
12	55 - 59	11.523	11.911	12.294	12.830	13.429
13	60 - 64	8.731	9.143	9.597	9.803	10.283
14	65 - 69	5.944	6.286	6.592	6.707	6.996
15	70 - 74	3.455	3.846	4.297	3.658	3.962
16	> 75	3.361	3.486	3.641	4.536	4.740
Jumlah		228.006	229.960	232.212	237.319	238.413

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021 - 2025

Berdasarkan data penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 hingga 2024, struktur umur penduduk menunjukkan kecenderungan yang masih didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun). Pada tahun 2024, kelompok usia produktif ini mencakup lebih dari 66% dari total penduduk, dengan proporsi yang stabil dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada dalam periode bonus demografi, yang apabila dikelola dengan tepat dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, kelompok usia anak-anak (0–14 tahun) menunjukkan tren penurunan jumlah secara bertahap. Jumlah penduduk usia 0–4 tahun menurun dari 19.449 jiwa pada tahun 2020 menjadi 13.720 jiwa pada tahun 2024, atau menurun sebesar 29,45% dalam lima tahun. Penurunan ini juga terlihat pada kelompok usia 5–9 tahun. Fenomena ini dapat menjadi indikasi awal dari penurunan angka kelahiran (fertilitas) yang perlu diperhatikan dalam perencanaan jangka menengah dan panjang, terutama dalam konteks perencanaan pendidikan dasar dan kebijakan kependudukan.

Di sisi lain, kelompok usia lansia (60 tahun ke atas) menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, jumlah penduduk lansia tercatat sebanyak 21.491 jiwa, dan meningkat menjadi 25.981 jiwa pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kecenderungan penuaan penduduk (aging population), yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan kebijakan perlindungan lanjut usia.

Tabel II-33 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Padang Batung	10.657	10.767	10.756	10.900	10.869	11.049	11.237	11.233	11.309	11.278
Loksado	4.291	4.163	4.306	4.190	4.326	4.222	4.538	4.331	4.563	4.368
Telaga Langsat	5.165	5.034	5.238	5.108	5.319	5.189	5.343	5.251	5.352	5.266
Angkinang	9.241	9.320	9.335	9.445	9.441	9.583	9.721	9.716	9.752	9.755
Kandangan	24.275	24.591	24.421	24.783	24.598	25.006	25.028	25.354	25.189	25.502
Sungai Raya	8.956	9.091	9.071	9.206	9.198	9.335	9.135	9.135	9.168	9.334
Simpur	7.527	7.695	7.610	7.775	7.703	7.865	7.745	7.955	7.803	7.990
Kalumpang	3.314	3.208	3.346	3.240	3.381	3.277	3.413	3.261	3.406	3.250
Daha Selatan	20.680	20.122	20.786	20.228	20.918	20.358	21.807	21.076	21.908	21.153
Daha Barat	4.092	3.882	4.135	3.928	4.184	3.980	4.185	3.983	4.219	3.994
Daha Utara	16.228	15.707	16.362	15.791	16.516	15.895	17.141	16.551	17.228	16.626
Hulu Sungai Selatan	114.456	113.580	115.366	114.594	116.453	115.759	119.293	118.026	119.897	118.516

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021 - 2025

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin selama lima tahun terakhir menunjukkan keseimbangan yang relatif stabil antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebanyak 119.897 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 118.516 jiwa. Rasio jenis kelamin (sex ratio) berada pada angka 101,17, yang berarti terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Angka ini mencerminkan struktur demografi yang seimbang, tanpa dominasi yang signifikan dari salah satu jenis kelamin.

Distribusi penduduk laki-laki dan perempuan juga cukup merata di setiap kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kandangan, dengan 25.189 jiwa laki-laki dan 25.502 jiwa perempuan pada tahun 2024. Sebaliknya, Kecamatan Kalumpang memiliki jumlah penduduk laki-laki dan perempuan paling sedikit, masing-masing sebanyak 3.406 jiwa dan 3.250 jiwa. Meskipun terdapat variasi jumlah antar

kecamatan, secara umum tidak terdapat kesenjangan gender yang mencolok dalam distribusi penduduk.

Secara umum, tren penduduk usia muda mengalami penurunan, sedangkan usia lanjut mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa transisi demografi sedang berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kelompok usia 15–64 tahun mengalami peningkatan ringan dan stabil dari tahun ke tahun, sementara kelompok 65 tahun ke atas meningkat lebih cepat, baik secara absolut maupun persentase.

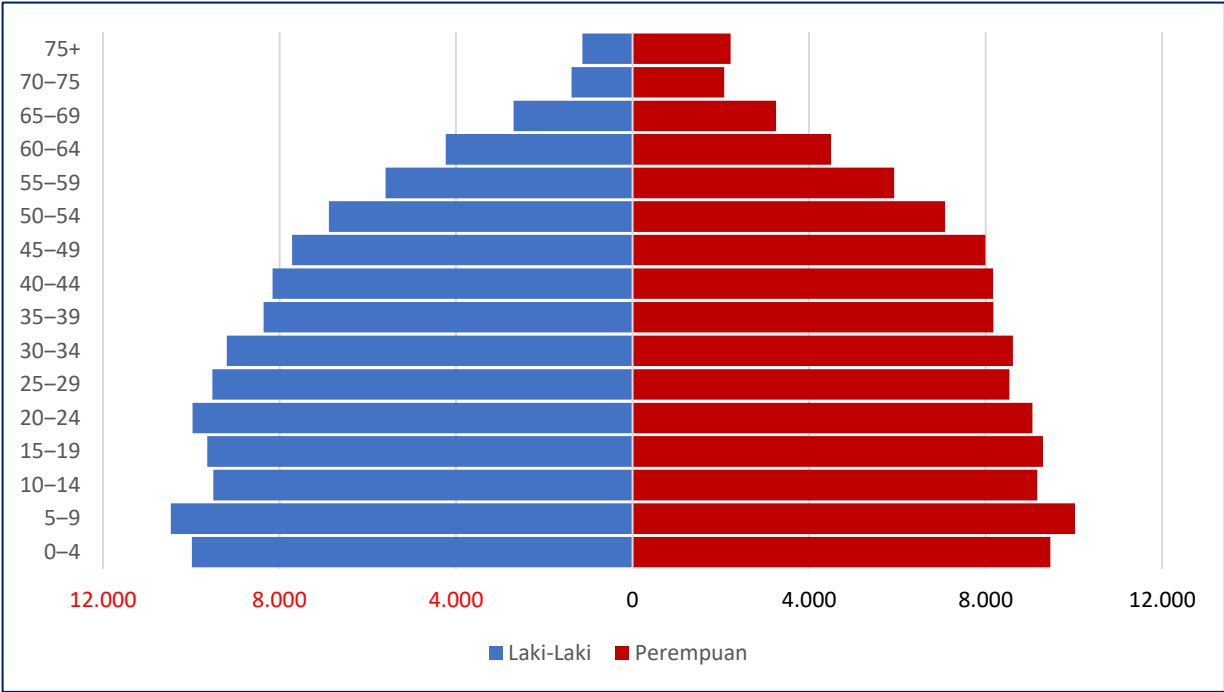
Pertumbuhan penduduk usia produktif tertinggi terjadi pada kelompok usia 20–24 tahun dan 30–39 tahun, yang menunjukkan adanya mobilitas tenaga kerja dan kontribusi kelompok ini terhadap produktivitas daerah. Sedangkan penurunan tertinggi tercatat pada kelompok usia 0–4 tahun, yang secara konsisten mengalami penurunan sejak tahun 2020.

Peningkatan jumlah penduduk kelompok usia dewasa dan lansia, serta penurunan penduduk usia dini, diduga dipengaruhi oleh perubahan pola fertilitas, peningkatan kualitas hidup, serta pengaruh migrasi keluar masuk wilayah. Selain itu, sistem administrasi kependudukan yang semakin terintegrasi dan akurat dalam beberapa tahun terakhir juga memungkinkan terjadinya perbaikan pada data yang berdampak terhadap distribusi antar kelompok umur.

Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun berhasil tidaknya program-program kependudukan selama ini. Karakteristik piramida penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk pola piramida ekspansif (muda) dimana sebagian besar penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian dan rasio ketergantungan tinggi.

Gambar II-23 Piramida Penduduk Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

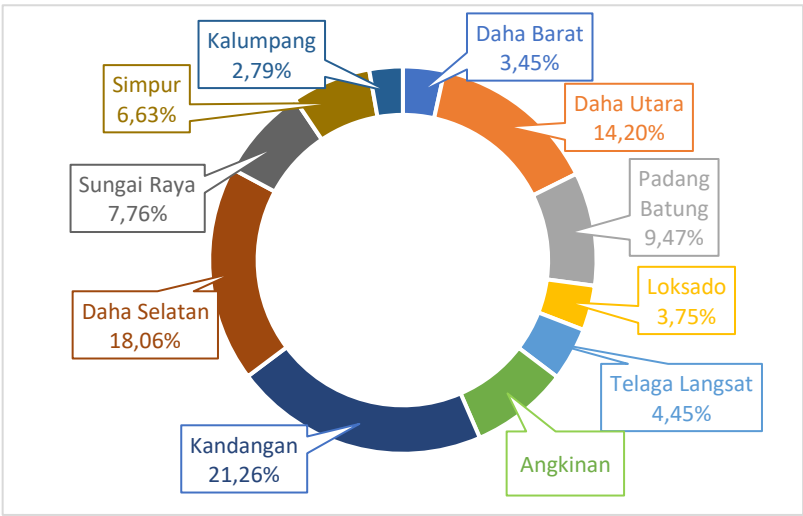


Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan 2025 (diolah)

Distribusi Penduduk

Analisis distribusi, kepadatan, dan rasio penduduk memiliki peran penting dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, serta tekanan terhadap ruang dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Informasi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan spasial, pengalokasian sumber daya, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Gambar II-24 Distribusi Penduduk Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

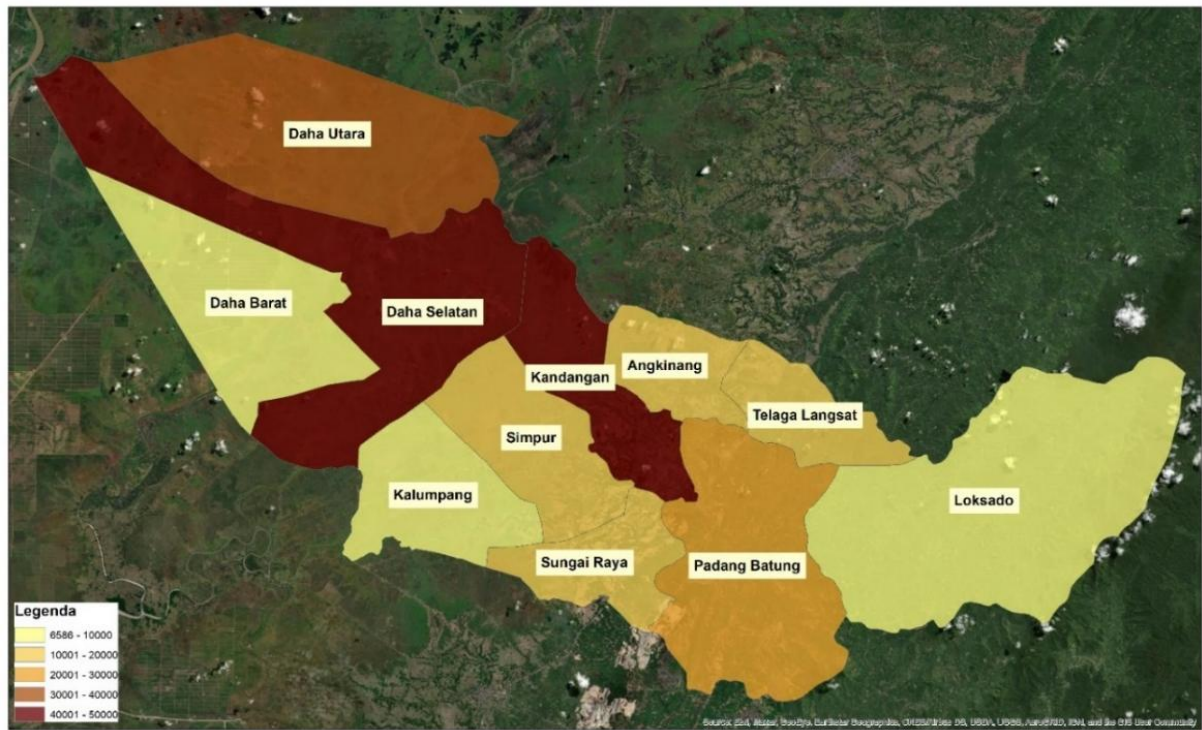
Secara umum, distribusi jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 2020–2024 memperlihatkan konsistensi konsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Pada tahun 2024, jumlah penduduk tertinggi tercatat di Kecamatan Kandangan, yaitu sebesar 50.691 jiwa (21,3% dari total penduduk kabupaten). Kandangan merupakan ibu kota kabupaten yang memiliki tingkat

urbanisasi dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

Disusul oleh Kecamatan Daha Selatan (43.061 jiwa) dan Daha Utara (33.854 jiwa) sebagai pusat konsentrasi penduduk di wilayah selatan kabupaten. Sebaliknya, jumlah penduduk terendah secara konsisten terdapat di Kecamatan Kalumpang (6.656 jiwa), dan Kecamatan Loksado (8.931 jiwa), dua kecamatan dengan karakteristik geografis sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur dasar.

Distribusi penduduk ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk terkonsentrasi di lima kecamatan, sedangkan sisanya tersebar di tujuh kecamatan lainnya, yang menunjukkan pentingnya pendekatan kewilayahan dan afirmatif dalam pembangunan daerah.

Gambar II-25 Peta Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Tabel II-34 Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Kepadatan	Rasio	Kepadatan	Rasio	Kepadatan	Rasio	Kepadatan	Rasio	Kepadatan	Rasio
Padang Batung	105	98.98	106	98.68	107.48	98.37	110	100.04	111	100.27
Loksado	25	103.07	25	102.77	25.22	102.46	26	104.78	26	1040.46
Telaga Langsat	176	102.60	178	102.55	180.92	102.51	182	101.75	183	101.63
Angkinang	318	99.15	322	98.84	325.75	98.52	333	100.05	334	99.97
Kandangan	458	98.71	461	98.54	464.85	98.37	472	98.71	475	98.77
Sungai Raya	223	98.52	226	98.53	228.92	98.53	228	98.07	229	98.22
Simpur	185	97.82	187	97.88	189.05	97.94	191	97.36	192	97.66
Kalumpang	48	103.30	49	103.27	49.29	103.17	49	104.66	49	104.80
Daha Selatan	126	102.77	127	102.76	127.86	102.75	133	103.47	133	103.57
Daha Barat	53	105.41	54	105.27	54.56	105.13	55	105.07	55	105.63
Daha Utara	119	103.32	120	103.62	120.89	103.91	126	103.56	126	103.62
Hulu Sungai Selatan	126	100.70	127	100.67	128.65	100.60	131	101.07	132	101.17

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Kepadatan penduduk mengukur jumlah penduduk per satuan luas wilayah dan merupakan indikator penting untuk menilai beban lahan dan layanan publik. Pada tahun 2024, Kecamatan Kandangan memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yakni 475 jiwa/km², yang terus meningkat sejak 2020 (458 jiwa/km²). Diikuti oleh Angkinang (334 jiwa/km²), dan Sungai Raya (229 jiwa/km²). Kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Loksado, yakni hanya 26 jiwa/km², dan Kalumpang dengan 49 jiwa/km². Perbedaan yang signifikan ini mencerminkan ketimpangan dalam persebaran beban penduduk terhadap wilayah dan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kapasitas lahan serta daya dukung lingkungan setempat.

Pada tahun 2024, rasio jenis kelamin kabupaten tercatat sebesar 101,17, yang berarti terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio ini mencerminkan tidak adanya ketimpangan signifikan dalam distribusi penduduk menurut jenis kelamin. Secara spasial, Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Daha Barat, yakni sebesar 105,63, menunjukkan dominasi jumlah laki-laki yang lebih besar. Rasio terendah tercatat di Kecamatan Simpur sebesar 97,66, mengindikasikan sedikit dominasi jumlah perempuan. Rasio yang seimbang di hampir seluruh kecamatan menunjukkan bahwa aspek gender tidak menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan penduduk di wilayah ini. Namun demikian, rasio tinggi di beberapa wilayah tertentu dapat mencerminkan pola migrasi kerja berbasis gender yang memerlukan perhatian dalam perencanaan ketenagakerjaan dan sosial.

Komposisi Penduduk

Berdasarkan agama yang dianut, tahun 2024 terdapat 98,47 persen penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan beragama Islam, dan selebihnya adalah Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya. Selain agama tersebut sebagian kecil penduduk Hulu Sungai Selatan, terutama di Kecamatan Loksado, menganut kepercayaan lainnya yaitu Kaharingan.

Tabel II-35 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Kepercayaan Lainnya	Total
1	Padang Batung	22.463	12	-	-	1	-	22.476
2	Loksado	5.107	1.277	39	438	2	2.132	8.995
3	Telaga Langsat	10.729	1	-	-	-	-	10.730
4	Angkinang	19.781	2	1	-	-	-	19.784
5	Kandangan	51.103	154	27	19	17	-	51.320
6	Sungai Raya	18.529	37	1	2	-	-	18.569
7	Simpur	15.999	4	-	-	-	-	16.003
8	Kalumpang	6.796	-	-	-	-	-	6.796
9	Daha Selatan	43.215	9	-	1	-	-	43.225
10	Daha Barat	8.224	6	-	-	-	-	8.230
11	Daha Utara	33.882	10	-	-	-	-	33.892
Hulu Sungai Selatan		235.828	1.512	68	460	20	2.132	240.020

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Berikut merupakan tabel jumlah tempat peribadatan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana didominasi oleh Masjid, Mushola dan Langgar sebesar 99,6 % dan 0,4% adalah Gereja Protestan.

Tabel II-36 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Masjid	Musala& Langgar	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	Padang Batung	23	58	-	-	-	-
2	Loksado	12	20	3	-	-	-
3	Telaga Langsat	10	38	-	-	-	-
4	Angkinang	10	61	-	-	-	-
5	Kandangan	20	140	-	-	-	-
6	Sungai Raya	13	95	-	-	-	-
7	Simpur	11	75	-	-	-	-
8	Kalumpang	5	30	-	-	-	-
9	Daha Selatan	8	84	-	-	-	-
10	Daha Barat	4	26	-	-	-	-
11	Daha Utara	10	90	-	-	-	-
Hulu Sungai Selatan		126	717	3	-	-	-

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Tabel II-37 Peta Sebaran Rumah Ibadah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025-2029

Proyeksi penduduk merupakan komponen penting dalam sistem perencanaan di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu pula. Proyeksi penduduk bermanfaat sebagai basis data dan target pengambilan kebijakan di berbagai sektor pembangunan.

Tabel II-38 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Kecamatan Padang Batung	22.274	22.797	23.052	23.303	23.548	23.788
2	Kecamatan Loksado	8.687	8.891	8.990	9.088	9.184	9.277
3	Kecamatan Telaga Langsat	10.679	10.930	11.052	11.172	11.289	11.404
4	Kecamatan Angkinang	19.333	19.787	20.008	20.226	20.438	20.647
5	Kecamatan Kandungan	50.410	51.594	52.170	52.738	53.292	53.835
6	Kecamatan Sungai Raya	18.834	19.277	19.492	19.704	19.911	20.114
7	Kecamatan Simpur	15.821	16.193	16.373	16.552	16.725	16.896
8	Kecamatan Kalumpang	6.766	6.925	7.002	7.079	7.153	7.226
9	Kecamatan Daha Selatan	41.946	42.932	43.411	43.884	44.345	44.797
10	Kecamatan Daha Barat	8.297	8.492	8.586	8.680	8.771	8.860
11	Kecamatan Daha Utara	32.937	33.711	34.087	34.459	34.821	35.176
HULU SUNGAI SELATAN		235.984	241.528	244.223	246.882	249.476	252.020

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Hasil proyeksi penduduk dalam kurun waktu perencanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk per lima tahunan yang dirinci per usia. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk tersebut, laju pertumbuhan penduduk dari periode ke periode memiliki kecenderungan menurun, salah satu

penyebabnya adalah dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk lewat program Keluarga Berencana (KB). Hasil penghitungan tersebut selanjutnya dilakukan pengolahan dengan mendetailkan jumlah penduduk per kecamatan menggunakan rata-rata distribusi penduduk per kecamatan tahun 2010 hingga 2022.

Tabel II-39 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Kecamatan Padang Batung	203,93	112	113	114	115	117
2	Kecamatan Loksado	338,89	26	27	27	27	27
3	Kecamatan Telaga Langsat	58,08	188	190	192	194	196
4	Kecamatan Angkinang	58,40	339	343	346	350	354
5	Kecamatan Kandangan	106,71	483	489	494	499	505
6	Kecamatan Sungai Raya	80,96	238	241	243	246	248
7	Kecamatan Simpur	82,35	197	199	201	203	205
8	Kecamatan Kalumpang	135,07	51	52	52	53	53
9	Kecamatan Daha Selatan	322,82	133	134	136	137	139
10	Kecamatan Daha Barat	149,62	57	57	58	59	59
11	Kecamatan Daha Utara	268,11	126	127	129	130	131
HULU SUNGAI SELATAN		1804,94	134	135	137	138	140

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui pula prediksi kepadatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2023, kepadatan penduduk kabupaten ini tercatat sebesar 131 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di kabupaten ini kemudian menunjukkan peningkatan di tahun 2025 menjadi 134 jiwa/km2 dan terus menunjukkan peningkatan hingga tahun 2029 menjadi 140 jiwa/km2, dengan kepadatan penduduk terbesar tercatat di Kecamatan Kandangan, Angkinang, dan Sungai Raya. Namun kepadatan penduduk ini tidak dapat dijadikan acuan secara utuh dikarenakan luas areal yang dihitung adalah luas areal keseluruhan dimana batang tubuh air, rawa, dan hutan lindung masuk di dalam komponen perhitungan.

Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2029

Proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, khususnya yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Sama halnya dengan proyeksi jumlah penduduk, BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga telah melakukan proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelaminnya.

Tabel II-40 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki	118.567	121.403	122.778	124.123	125.435	126.710
Perempuan	117.417	120.125	121.445	122.759	124.041	125.310
Rasio	100,98	101,06	101,10	101,11	101,12	101,12

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2022, rasio jenis kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan besaran yang cenderung stabil, di mana dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 100 hingga 101 orang penduduk laki-laki, dan kondisi tersebut masih akan terjadi hingga tahun 2029.

Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2030

Hasil proyeksi penduduk dalam kurun waktu perencanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk per lima tahunan yang dirinci per usia. Komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Tabel II-41 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
			2025	2030
1	0-4	19.512	19.764	19.906
2	5-9	20.226	19.489	19.858
3	10-14	19.389	20.639	19.677
4	15-19	18.607	18.646	20.668
5	20-24	19.031	18.793	18.559
6	25-29	18.454	19.056	18.881
7	30-34	17.966	18.178	19.237
8	35-39	16.945	17.749	18.149
9	40-44	16.236	16.337	17.576
10	45-49	15.922	16.040	16.105
11	50-54	14.591	15.324	15.696
12	55-59	12.320	13.446	14.818
13	60-64	9.558	10.819	12.689
14	65-69	6.694	7.864	9.818
15	70-74	3.999	4.990	6.656
16	75+	3.703	4.394	6.215
JUMLAH		233.153	241.528	254.508

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2022, proporsi penduduk usia non produktif menunjukkan kecenderungan menurun, di mana pada tahun 2022 proporsinya tercatat sebesar 30,68 persen. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan besaran 69,32 persen di tahun 2022. Selanjutnya, hasil proyeksi menurut kelompok umur di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan pergeseran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana proporsi penduduk usia non produktif menunjukkan kecenderungan meningkat, sementara proporsi penduduk usia produktif menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2025, proporsi penduduk usia non produktif tercatat sebesar 31,94 persen, dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2030 menjadi 32,22 persen. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif tercatat sebesar 68,06

persen di tahun 2025, dan menunjukkan kecenderungan menurun menjadi 67,72 persen di tahun 2030.

Tabel II-42 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
		2025	2030
(1)	(2)	(3)	(4)
0-14 Tahun	59.127	59.892	59.441
15-64 Tahun	159.630	164.388	172.378
>65 Tahun	14.396	17.248	22.689
Angka Ketergantungan	46,06%	46,93%	47,65%

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035

Saat ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tengah berada pada fase bonus demografi. Hal ini ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0 hingga 14 tahun dan lebih dari usia 65 tahun) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta besaran rasio ketergantungan kurang dari 50 persen. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah mulai berada pada era bonus demografi sejak tahun 2013. Berdasarkan hasil proyeksi yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, fase bonus demografi di kabupaten ini masih akan berlangsung hingga tahun 2030.

II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

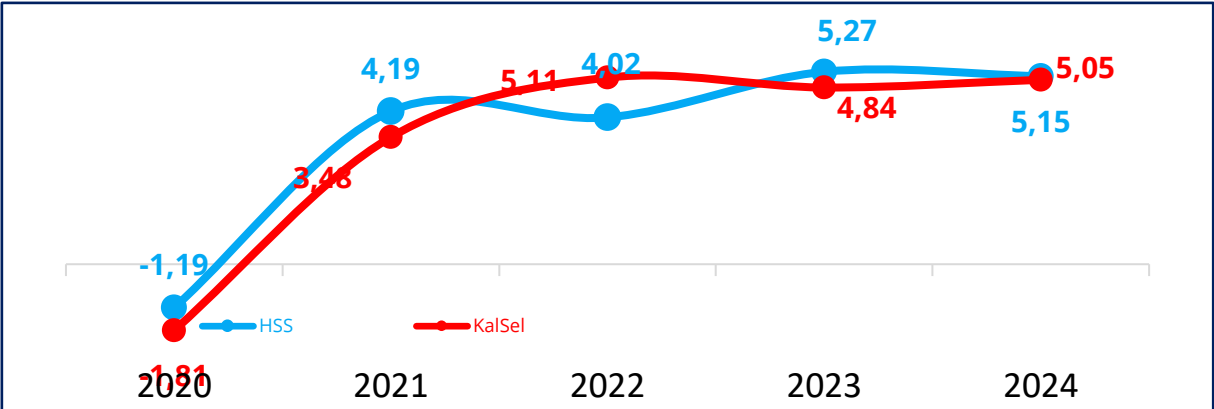
II.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan aktivitas ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun, yang diukur berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Indikator ini menjadi salah satu ukuran utama dalam menilai dinamika pembangunan ekonomi, serta efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) selama periode 2020–2023, terlihat fluktuasi yang mencerminkan dinamika pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dinamika perkembangan LPE dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II-26 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pada tahun 2020, perekonomian HSS mengalami kontraksi sebesar -1,19%, seiring dengan terjadinya krisis global akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, kontraksi ini relatif lebih ringan dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang mencatatkan penurunan sebesar -1,81%. Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah yang cukup baik dalam menghadapi tekanan eksternal, terutama pada sektor-sektor esensial seperti pertanian dan administrasi pemerintahan yang masih dapat menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Memasuki tahun 2021, terjadi pemulihan ekonomi yang signifikan, di mana LPE HSS tumbuh sebesar 4,19%, melebihi pertumbuhan Kalsel yang tercatat sebesar 3,48%. Pemulihan ini menunjukkan keberhasilan upaya

percepatan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai stimulus dan intervensi strategis.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi HSS sedikit melambat menjadi 4,02%, dan berada di bawah capaian Kalsel sebesar 5,11%. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari normalisasi pasca pemulihan awal serta ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu yang tumbuh moderat. Meski demikian, capaian ini tetap mencerminkan tren positif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, LPE HSS kembali menunjukkan penguatan dengan pertumbuhan sebesar 5,27% (atau 5,15% berdasarkan versi data lainnya), yang berada sedikit di atas rata-rata provinsi (4,84% atau 5,05%). Peningkatan ini merefleksikan keberlanjutan momentum pemulihan dan penguatan ekonomi lokal, serta kemungkinan adanya peningkatan kinerja pada sektor-sektor unggulan, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa pemerintah.

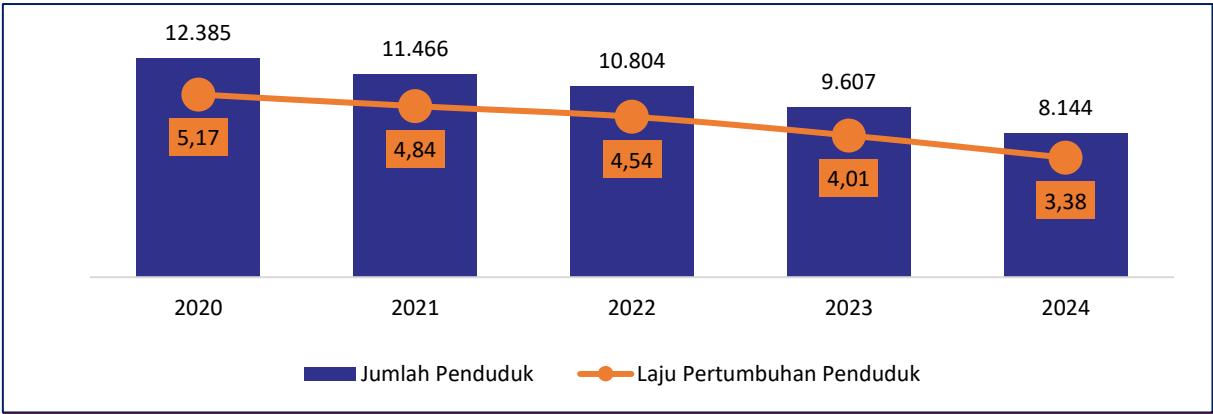
Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan arah yang positif dan resilien terhadap tekanan eksternal, dengan kinerja yang relatif kompetitif dibandingkan rata-rata provinsi. Capaian ini menjadi modal penting dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi unggulan lokal.

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan.

Terlebih dalam memberikan masukan (*input*) dan melakukan perencanaan strategis (*strategic planning*) terkait dengan kebijakan pemerintah. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik di setiap tahunnya. Seperti tersaji dalam gambar berikut:

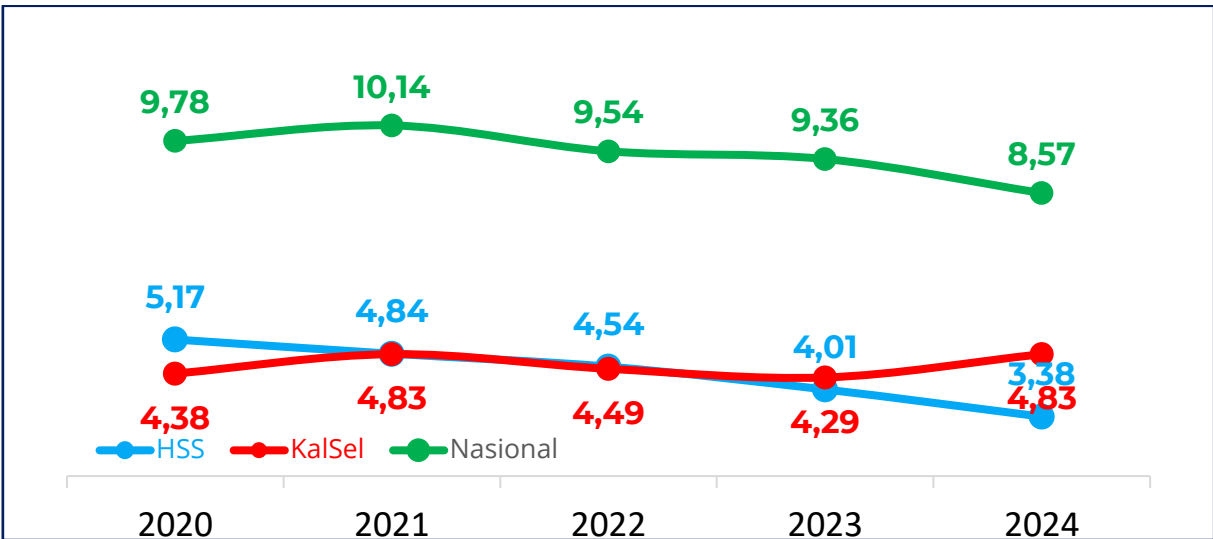
Gambar II-27 Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Selatan

Posisi kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu berada di atas rata-rata provinsi hingga tahun 2022 dan pada Tahun 2024 posisi kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di bawah level provinsi dengan capaian 3,38 %.

Gambar II-28 Angka Kemiskinan di Kab. HSS, Prov. Kalsel dan Nasional Th. 2020-2024



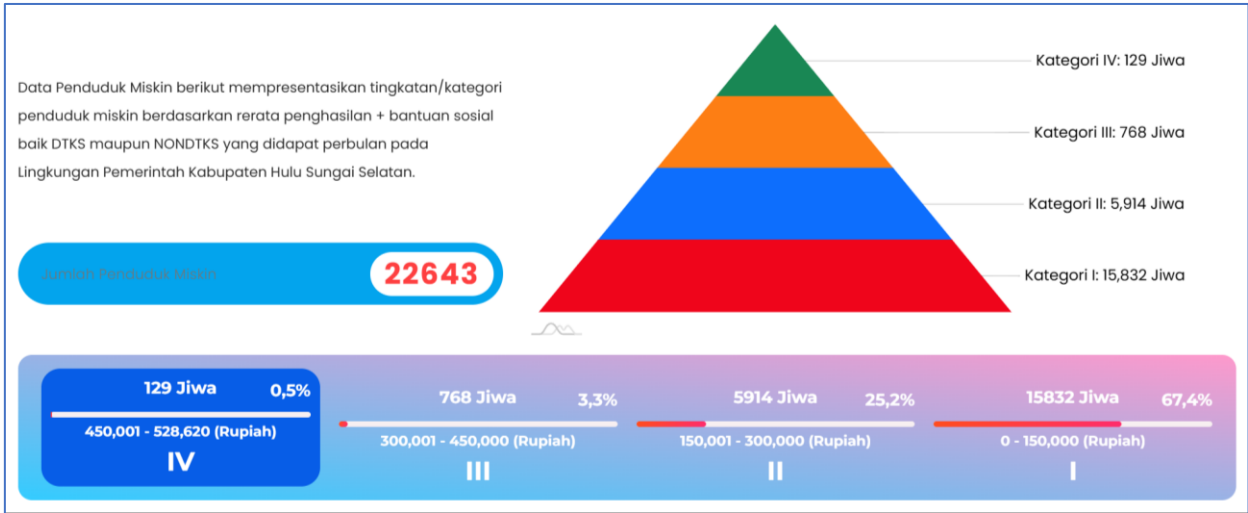
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*Family Based-Policy*), rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga miskin). dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, yang bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar.

Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses permodalan, teknologi dan pasar, yang diharapkan terjadi peningkatan pendapatan yang lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW.

Selain itu implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut telah menunjukkan sisi manfaat pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemanfaatan teknologi informasi yang intensif diharapkan dapat menyediakan data-data yang strategis dan akurat agar program-program kemiskinan yang akan dijalankan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar tepat dan membutuhkan sehingga proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar II-29 LIWAR Data Sosial 2024



Sumber : SATUNIK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Pada tabel berikut dapat diketahui perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel II-43 Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun

			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Kemiskinan (P0)	Persen	5,17	4,84	4,54	4,01	3,38
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	0,51	0,453	0,493	0,688	0,343
3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0,09	0,063	0,092	0,205	0,045

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 (diolah)

Masa Pandemi Covid-19 merupakan masa dimana tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan meningkat dikarenakan ketidakpastian situasi ekonomi pada saat-saat tersebut. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan program jaring pengaman sosialnya adalah satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang berhasil mempertahankan bahkan menurunkan tingkat kemiskinan di masa pandemi Covid-19. Selain kemiskinan secara umum, Kemiskinan Ekstrem juga menjadi perhatian untuk dapat ditanggulangi. Berikut merupakan perkembangan tingkat kemiskinan yang terjadi di Kalimantan Selatan pada masa pandemi Covid-19 dan perkembangan indikator-indikator pembentuk tingkat kemiskinan dari 2019 hingga 2023 serta data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 :

Tabel II-44 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	P0 (Persentase Kemiskinan) 2020 - 2024								
	2020	+-	2021	+-	2022	+-	2023		2024
Kalimantan Selatan	4,38	0,45	4,83	-0,34	4,49	-0,2	4,29	-0,18	4,11
Tanah Laut	4,26	0,31	4,57	-0,71	3,86	-0,13	3,73	0,01	3,74
Kotabaru	4,22	0,64	4,86	-0,56	4,3	0,02	4,32	0,13	4,45
Banjar	2,55	0,49	3,04	-0,25	2,79	-0,35	2,44	-0,08	2,36
Barito Kuala	4,51	0,6	5,11	-0,36	4,75	-0,15	4,6	-0,24	4,36
Tapin	3,06	0,54	3,6	0	3,6	-0,41	3,19	0,14	3,33
Hulu Sungai Selatan	5,17	-0,33	4,84	-0,3	4,54	-0,53	4,01	-0,63	3,38
Hulu Sungai Tengah	5,64	0,54	6,18	-0,26	5,92	-0,08	5,84	-0,03	5,81
Hulu Sungai Utara	6,14	0,69	6,83	-0,34	6,49	-0,24	6,25	-0,5	5,75
Tabalong	5,72	0,55	6,27	-0,4	5,87	-0,1	5,77	-0,13	5,64
Tanah Bumbu	4,6	0,22	4,82	-0,56	4,26	-0,14	4,12	-0,71	3,41
Balangan	5,32	0,75	6,07	-0,24	5,83	-0,61	5,22	-0,35	4,87
Kota Banjarmasin	4,39	0,5	4,89	-0,15	4,74	-0,11	4,63	-0,05	4,58
Kota Banjarbaru	4,01	0,39	4,4	-0,23	4,17	-0,25	3,92	-0,13	3,79

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 (diolah)

Tabel II-45 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Kemiskinan Ekstrem di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem
2020	528.622	12.390	5,17%	1,35 %
2021	494.203	11.466	4,84%	0,74 %

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Kemiskinan Ekstrem
2022	516.857	10.804	4,54%	0,78 %
2023	547.855	9.607	4,01%	0,65 %
2024	583.549	8.144	3,38	N/A

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 (diolah)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan kinerja ekonomi daerah dan menjadi dasar dalam menilai laju pertumbuhan serta struktur ekonomi suatu wilayah. PDRB dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) yang mencerminkan nilai nominal tanpa memperhitungkan inflasi, dan atas dasar harga konstan (ADHK), yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil setelah menghilangkan pengaruh perubahan harga dari waktu ke waktu.

Sementara itu, PDRB per kapita adalah nilai rata-rata PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah dan menjadi salah satu proksi untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, perkembangan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren yang positif sebagaimana tercermin dari peningkatan nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Capaian ini merefleksikan perbaikan kinerja ekonomi daerah secara konsisten, meskipun diwarnai oleh berbagai tantangan eksternal, termasuk dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang masih berpengaruh pada awal periode pengamatan.

Tabel II-46 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
ADHB	6.564.931,01	7.125.712,36	8.442.0004,82	9.165.460,18	9.901.344,52
ADHK (2010)	4.650.231,76	4.844.907,81	5.039.774,30	5.305.516,25	5.578.755,22
PDRB Per Kapita (Ribuan Rupiah)					
ADHB	28.837,32	30.943,69	36.208,00	38.839,33	41.466,74
ADHK (2010)	20.426,75	21.039,21	21.615,74	22.482,53	23.363,77
Jumlah Penduduk	227.654	230.280	233.153	235.984	238.778

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp6.564.931,01 juta pada tahun 2020 menjadi Rp9.901.344,52 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi nominal sebesar

kurang lebih 50,9% dalam kurun waktu lima tahun. Sementara itu, nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010), yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi, mengalami peningkatan dari Rp4.650.231,76 juta menjadi Rp5.578.755,22 juta, atau tumbuh sebesar 19,97% selama periode yang sama.

Peningkatan PDRB juga berpengaruh terhadap kenaikan PDRB per kapita. Pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar Rp28.837.320 dan meningkat menjadi Rp41.466.740 pada tahun 2024. Sedangkan PDRB per kapita ADHK meningkat dari Rp20.426.750 menjadi Rp23.363.770. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan produktivitas dan kontribusi ekonomi per penduduk, meskipun jumlah penduduk terus mengalami pertumbuhan dari 227.654 jiwa pada tahun 2020 menjadi 238.778 jiwa pada tahun 2024.

Jika dilihat dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi riil berdasarkan PDRB ADHK mengalami akselerasi yang stabil. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 5,27% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi pasca-pandemi serta perbaikan kinerja di beberapa sektor unggulan. Sementara itu, lonjakan terbesar dalam PDRB nominal (ADHB) terjadi pada tahun 2022, yakni 18,47% dibandingkan tahun 2021, yang kemungkinan besar terkait dengan kenaikan harga komoditas dan peningkatan nilai transaksi ekonomi.

Tidak terdapat perubahan metode penghitungan selama periode ini, namun perlu dicatat bahwa angka tahun 2023 dan 2024 masih bersifat sementara dan sangat sementara, sehingga masih dimungkinkan adanya penyesuaian pada rilis statistik selanjutnya. Walaupun demikian, data tersebut tetap dapat menjadi dasar yang cukup andal dalam menganalisis arah dan kinerja ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2020–2024 menggambarkan kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Namun, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, terutama dalam memperluas basis ekonomi produktif, menjaga daya saing daerah, dan memastikan pemerataan manfaat pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat dari Rp6.564.931,01 juta pada tahun 2020 menjadi Rp9.901.344,52 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi nominal sebesar kurang lebih 50,9% dalam kurun waktu lima tahun. Sementara itu, nilai PDRB

atas dasar harga konstan (ADHK 2010), yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi, mengalami peningkatan dari Rp4.650.231,76 juta menjadi Rp5.578.755,22 juta, atau tumbuh sebesar 19,97% selama periode yang sama.

Peningkatan PDRB juga berpengaruh terhadap kenaikan PDRB per kapita. Pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar Rp28.837.320 dan meningkat menjadi Rp41.466.740 pada tahun 2024. Sedangkan PDRB per kapita ADHK meningkat dari Rp20.426.750 menjadi Rp23.363.770. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan produktivitas dan kontribusi ekonomi per penduduk, meskipun jumlah penduduk terus mengalami pertumbuhan dari 227.654 jiwa pada tahun 2020 menjadi 238.778 jiwa pada tahun 2024.

Jika dilihat dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi riil berdasarkan PDRB ADHK mengalami akselerasi yang stabil. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 5,27% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi pasca-pandemi serta perbaikan kinerja di beberapa sektor unggulan. Sementara itu, lonjakan terbesar dalam PDRB nominal (ADHB) terjadi pada tahun 2022, yakni 18,47% dibandingkan tahun 2021, yang kemungkinan besar terkait dengan kenaikan harga komoditas dan peningkatan nilai transaksi ekonomi.

Tidak terdapat perubahan metode penghitungan selama periode ini, namun perlu dicatat bahwa angka tahun 2023 dan 2024 masih bersifat sementara dan sangat sementara, sehingga masih dimungkinkan adanya penyesuaian pada rilis statistik selanjutnya. Walaupun demikian, data tersebut tetap dapat menjadi dasar yang cukup andal dalam menganalisis arah dan kinerja ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2020–2024 menggambarkan kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Namun, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, terutama dalam memperluas basis ekonomi produktif, menjaga daya saing daerah, dan memastikan pemerataan manfaat pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat.

ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter “Nilai Tambah”.

Tabel II-47 ICOR Kab.Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021*	2022**	2023	2024
PDRB (ADHK 2010)	4.650.222,36	4.844.908,91	5.039.666,84	5.305.516,25	5.578.755,22
Perubahan	(56.240,92)	194.677,15	194.757,93	265.741,95	273.238,97
PMTB (ADHK 2010)	1.274.510,53	1.300.600,09	1.379.616,04	1.469.611,81	1.579.122,10
ICOR	-	6,68	7,08	5,53	5,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak “K” unit.

Analisis ICOR Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika efisiensi investasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, ICOR tercatat sebesar 6,68, menandai awal pemulihan pascapandemi namun dengan tingkat efisiensi yang masih terbatas. Kondisi ini memburuk pada tahun 2022 dengan ICOR mencapai 7,08, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini sekaligus menunjukkan tahun yang paling tidak efisien, karena dibutuhkan lebih banyak investasi untuk menghasilkan tambahan output PDRB yang relatif sama. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh pergeseran fokus investasi ke sektor-sektor yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk memberikan dampak ekonomi langsung.

Memasuki tahun 2023, efisiensi investasi membaik signifikan dengan ICOR menurun ke 5,53, sejalan dengan percepatan pemanfaatan infrastruktur dan meningkatnya daya saing sektor produktif. Pada tahun terakhir, yaitu 2024, ICOR sedikit meningkat menjadi 5,78, namun masih menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan tahun 2021–2022. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum terdapat tren perbaikan efisiensi investasi, meskipun peningkatan kecil pada 2024 menjadi perhatian agar perencanaan investasi tetap diarahkan pada sektor-sektor dengan multiplier effect tinggi untuk menjaga konsistensi efisiensi dalam jangka panjang.

Indeks Williamson

Pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh penduduk Indonesia merupakan salah satu dari tujuan pembangunan, salah satu caranya adalah dengan berusaha mewujudkan pembangunan yang inklusif sesuai

dengan tujuan dari misi kedua RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan. Indeks Williamson merupakan suatu indikator yang dapat memberikan indikasi tentang kondisi kesenjangan yang terdapat pada suatu wilayah. Semakin kecil angka indeksnya menunjukkan adanya ketimpangan atau kesenjangan yang menurun. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah dengan rumus :

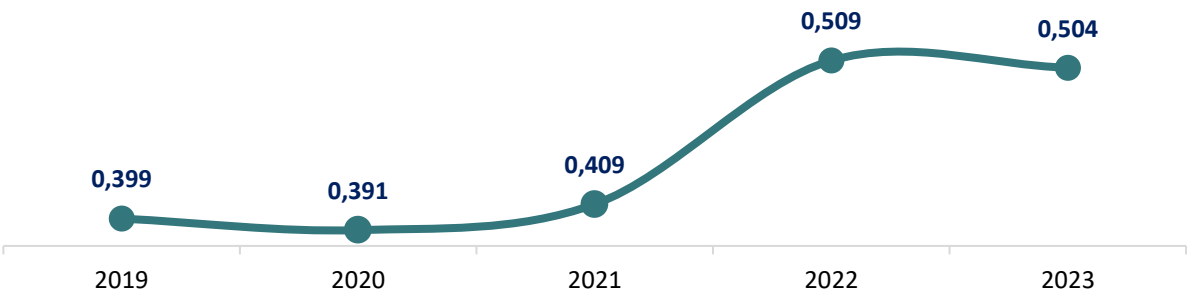
$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{n_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

CVw	=	Weighted coefficient of variation
n _i	=	Penduduk di daerah i
n	=	Penduduk total
Y _i	=	PDRB perkapita di daerah i
Y	=	Rata-rata PDRB perkapita untuk semua daerah

Data yang ditampilkan berikut ini merupakan indeks Williamson dari Prov. Kalimantan Selatan selama tahun 2019 hingga 2023 pada Gambar berikut ini.

Gambar II-30 Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Seri Indeks Williamson provinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan bahwa indeks tersebut naik dari 0,399 level rendah pada tahun 2019 menjadi 0,504 level sedang pada tahun 2023. Kabupaten/kota yang memiliki kontribusi ekonomi relatif kecil terhadap perekonomian provinsi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada kurun waktu 2019-2023 dibandingkan daerah yang kontribusinya besar, dan sebaliknya. Situasi tersebut berdampak pada membesarnya *share* PDRB kabupaten/kota tersebut, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan.

Sampai tahun 2024, PDRB per Kapita setiap kecamatan di Kabupaten HSS belum dilakukan penghitungan sehingga kita belum bisa melihat ketimpangan antar kecamatan. Untuk melakukan penghitungan PDRB menurut kecamatan diperlukan data-data dasar yang rinci menurut kecamatan yang nantinya akan digunakan sebagai bagian dalam penghitungan masing-masing kecamatan. Namun berdasarkan morfologi perkotaan kecamatan-kecamatan yang menjadi

pusat perkembangan adalah Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya dan kecamatan Daha Selatan

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan. Indikator ini mencerminkan tekanan pasar tenaga kerja serta efektivitas sistem ketenagakerjaan dalam menyerap tenaga kerja. TPT juga menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah.

Tabel II-48 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Prov/Kab/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	3,57	3,52	4,17	3,58	3,43
Kotabaru	4,96	5,57	6,70	6,08	6,05
Banjar	3,87	3,98	2,72	2,73	2,71
Barito Kuala	2,93	3,22	3,63	3,42	3,41
Tapin	3,73	4,96	4,15	3,93	3,86
Hulu Sungai Selatan	2,24	2,44	2,29	2,12	2,21
Hulu Sungai Tengah	3,90	3,76	3,35	3,26	3,20
Hulu Sungai Utara	4,49	4,80	4,64	3,85	3,73
Tabalong	3,07	3,43	4,46	3,60	3,44
Tanah Bumbu	6,95	6,83	6,89	6,56	6,37
Balangan	2,46	2,44	3,98	2,70	2,69
Kota Banjarmasin	8,32	8,47	6,96	6,70	6,56
Kota Banjarbaru	5,54	5,70	5,47	5,01	4,93
Kalimantan Selatan	4,74	4,95	4,74	4,31	4,20

Sumber Data : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025

Secara umum, TPT di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat meningkat pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021 (4,95%), angka TPT provinsi secara bertahap menurun menjadi 4,20% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja, meskipun belum merata di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) secara konsisten menunjukkan TPT yang rendah dan stabil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2020, TPT HSS tercatat sebesar 2,24% dan terus menurun hingga mencapai 2,21% pada tahun 2024, menjadikannya sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah di provinsi. Bahkan pada tahun 2024, HSS hanya sedikit lebih tinggi dari

Kabupaten Banjar (2,71%) dan Kabupaten Barito Kuala (3,41%), tetapi tetap lebih rendah dari rata-rata provinsi.

Tren penurunan TPT di HSS menunjukkan keberhasilan relatif dalam menjaga stabilitas pasar kerja lokal, termasuk kemungkinan kontribusi dari sektor informal dan pertanian yang cukup dominan, serta usaha kecil dan menengah yang adaptif terhadap krisis. Angka TPT di HSS juga mencerminkan kondisi demografis yang stabil serta kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.

Jika dilihat secara regional, angka TPT tertinggi secara konsisten terjadi di Kota Banjarmasin dan Tanah Bumbu. Pada tahun 2024, Kota Banjarmasin mencatat TPT sebesar 6,56%, disusul Tanah Bumbu sebesar 6,37%. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dan wilayah dengan dinamika ekonomi berbasis tambang masih menghadapi tekanan tinggi dalam hal penyediaan lapangan kerja yang seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Adapun kabupaten/kota yang menunjukkan penurunan TPT paling signifikan dalam periode lima tahun terakhir adalah Kota Banjarmasin, dari 8,47% (2021) menjadi 6,56% (2024), atau turun sebesar 1,91 poin persentase. Sementara itu, Kabupaten Banjar memperlihatkan penurunan paling konsisten dan signifikan secara tahunan, dari 3,98% (2021) menjadi 2,71% (2024), mendekati level TPT Hulu Sungai Selatan.

Sepanjang periode ini, tidak terdapat perubahan metode penghitungan TPT yang signifikan menurut rilis resmi Badan Pusat Statistik. Namun, perlu dicatat bahwa perbaikan TPT pasca-pandemi sebagian besar juga dipengaruhi oleh upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah, termasuk program padat karya, pelatihan vokasi, stimulus UMKM, dan perluasan akses kerja digital serta berbasis kewirausahaan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan pasar kerja yang relatif sehat, meskipun tetap perlu waspada terhadap tantangan tersembunyi seperti pengangguran terselubung, mismatch keterampilan, serta rendahnya produktivitas kerja di sektor-sektor tradisional. Oleh karena itu, kebijakan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, revitalisasi pendidikan vokasional, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis kewirausahaan dan inovasi digital.

Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) yang digunakan untuk menilai pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kategori gini ratio $0 < \text{gini ratio} \leq 0,35$ adalah ketimpangan rendah. $0,35 < \text{gini ratio} \leq 0,50$ adalah ketimpangan sedang, dan gini rasio $> 0,5$ adalah ketimpangan tinggi. Berdasarkan tabel berikut dalam enam tahun terakhir rasio gini Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkisar 0,288 (tahun 2019) sampai dengan 0,293 (tahun 2023).

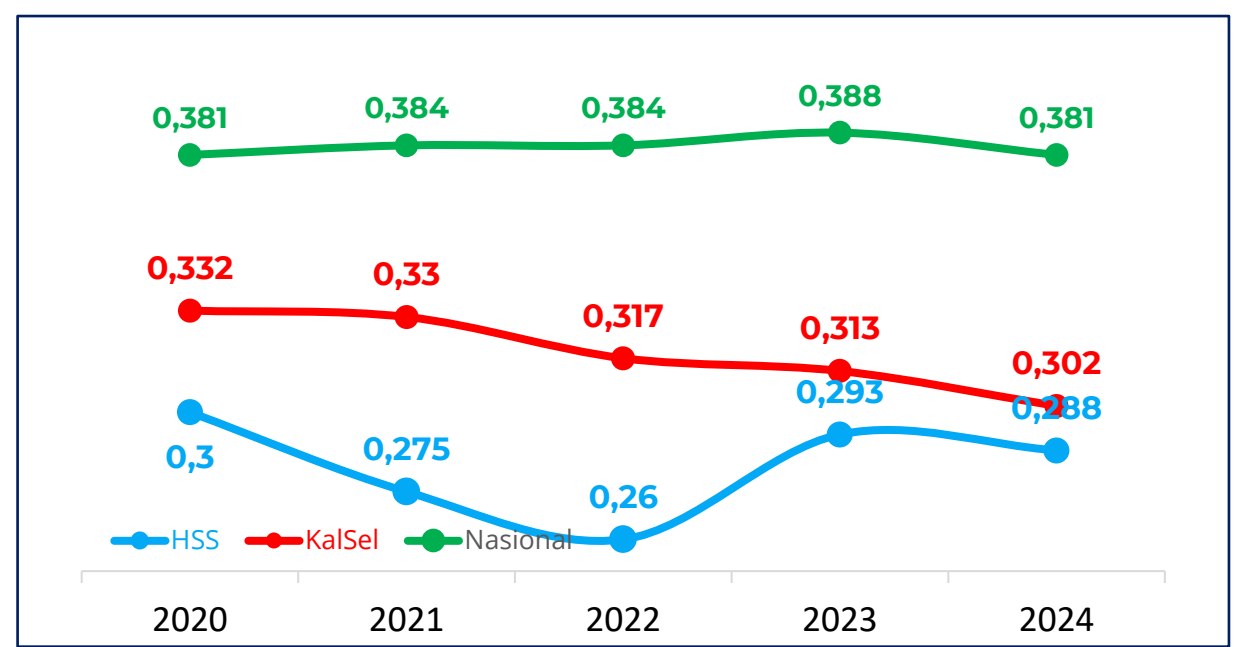
Tabel II-49 Indeks Gini Rasio Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TANAH LAUT	0,250	0,232	0,263	0,259	0,257
KOTABARU	0,287	0,306	0,331	0,316	0,296
BANJAR	0,322	0,344	0,300	0,297	0,258
BARITO KUALA	0,277	0,284	0,289	0,312	0,272
TAPIN	0,274	0,289	0,291	0,281	0,260
HULU SUNGAI SELATAN	0,300	0,275	0,260	0,293	0,288
HULU SUNGAI TENGAH	0,285	0,331	0,228	0,225	0,251
HULU SUNGAI UTARA	0,319	0,378	0,301	0,271	0,276
TABALONG	0,346	0,288	0,337	0,284	0,300
TANAH BUMBU	0,300	0,281	0,292	0,280	0,309
BALANGAN	0,298	0,277	0,266	0,258	0,218
KOTA BANJARMASIN	0,342	0,350	0,330	0,37	0,347
KOTA BANJAR BARU	0,381	0,361	0,341	0,321	0,300
KALIMANTAN SELATAN	0,332	0,330	0,317	0,313	0,302

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan

Gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024 berada di angka 0,288 merupakan angka ketimpangan yang “rendah”. Dibandingkan dengan Gini Rasio Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih baik pemerataan pembangunannya.

Gambar II-31 Gini Rasio Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Mulai tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan penyesuaian penghitungan Umur Harapan Hidup (UHH) berdasarkan hasil *Long Form Sensus Penduduk (SP) 2020*. Penyesuaian ini berdampak pada perubahan nilai IPM, khususnya pada aspek kesehatan, yang kemudian memengaruhi tren IPM secara keseluruhan.

Tabel II-50 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2020-2024

Prov/Kab/Kota	IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	71,36	71,86	72,33	72,98	73,42
Kotabaru	70,68	70,94	71,57	72,01	72,42
Banjar	71,67	72,40	73,25	74,01	74,41
Barito Kuala	68,65	69,08	69,87	70,67	71,40
Tapin	71,71	71,90	72,61	73,52	74,06
Hulu Sungai Selatan	71,57	71,93	72,47	73,21	73,95
Hulu Sungai Tengah	71,45	71,67	72,32	72,76	73,33
Hulu Sungai Utara	69,09	69,63	70,33	71,12	71,74
Tabalong	73,84	74,25	74,82	75,43	75,97
Tanah Bumbu	72,26	72,55	73,34	73,86	74,50
Balangan	71,28	71,58	72,20	72,97	73,83
Kota Banjarmasin	78,62	79,09	79,46	79,98	80,53
Kota Banjarbaru	80,26	80,41	80,82	81,25	81,65
Kalimantan Selatan	73,09	73,45	74,00	74,66	75,15

Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025 (diolah)

Secara agregat, IPM Provinsi Kalimantan Selatan meningkat dari 73,09 pada tahun 2020 menjadi 75,15 pada tahun 2024. Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin tetap menjadi daerah dengan capaian IPM tertinggi, masing-masing sebesar 81,65 dan 80,53 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kota tersebut telah berada pada fase pembangunan manusia yang relatif matang, dengan kualitas layanan dasar yang sudah cukup merata.

Sementara itu, beberapa kabupaten juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kabupaten Banjar mengalami peningkatan IPM tertinggi, yakni sebesar 2,74 poin dalam lima tahun terakhir, dari 71,67 menjadi 74,41. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mencatatkan pertumbuhan IPM yang kuat, dengan peningkatan lebih dari 2,3 poin. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, serta perbaikan dalam standar hidup masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri mencatatkan peningkatan IPM dari 71,57 pada tahun 2020 menjadi 73,95 pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 2,38 poin tersebut menandai adanya kemajuan yang cukup signifikan dan menempatkan daerah ini di atas rata-rata sejumlah kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Namun demikian, untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah dengan pertumbuhan IPM tercepat, diperlukan akselerasi yang lebih terpadu, khususnya dalam memperkuat kualitas pendidikan dan perluasan akses ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, meskipun Kabupaten Barito Kuala masih menjadi daerah dengan capaian IPM terendah (71,40 pada tahun 2024), daerah ini justru menunjukkan laju pertumbuhan IPM yang cukup cepat, yakni sebesar 2,75 poin. Ini menjadi indikasi bahwa perbaikan pembangunan manusia sedang berlangsung, namun memerlukan kesinambungan dan penguatan lintas sektor agar hasilnya dapat lebih merata dan berkelanjutan.

II.2.2 Kesehatan untuk Semua

Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas hidup penduduk serta keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data Survei Penduduk 2010 (SP2010), capaian UHH Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari 65,97 tahun pada tahun 2020 menjadi 67,17 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek layanan kesehatan dasar, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Tabel II-51 Umur Harapan Hidup (SP2010) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2020-2024

Prov/Kab/Kota	UHH (SP2010)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	69,45	69,59	69,86	70,11	70,31
Kotabaru	69,21	69,32	69,56	69,77	69,93
Banjar	67,21	67,41	67,73	68,01	68,26
Barito Kuala	66,09	66,27	66,55	66,8	67,07
Tapin	70,4	70,57	70,88	71,16	71,35
Hulu Sungai Selatan	65,97	66,12	66,51	66,9	67,17
Hulu Sungai Tengah	66,01	66,2	66,54	66,86	67,12
Hulu Sungai Utara	63,83	64,1	64,53	64,97	65,26
Tabalong	70,44	70,57	70,84	71,28	71,46
Tanah Bumbu	70,34	70,45	70,7	70,94	71,11
Balangan	67,72	67,85	68,13	68,4	68,59

Prov/Kab/Kota	UHH (SP2010)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banjarmasin	71,13	71,29	71,59	71,89	72,1
Kota Banjarbaru	71,99	72,1	72,36	72,62	72,8
Kalimantan Selatan	68,66	68,83	69,13	69,42	69,65

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

Sementara itu, apabila merujuk pada basis perhitungan terbaru dari Survei Penduduk 2020 (SP2020), UHH Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menunjukkan tren yang positif, dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan perhitungan SP2010. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar 71,64 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 72,82 tahun pada tahun 2024. Capaian tersebut menggambarkan peningkatan kualitas hidup yang signifikan dalam kurun lima tahun terakhir, meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang pada tahun 2024 mencapai 74,18 tahun.

Tabel II-52 Umur Harapan Hidup (SP2020) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2020-2024

Prov/Kab/Kota	UHH (SP2020)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	73,81	73,95	74,21	74,46	74,64
Kotabaru	73,21	73,31	73,55	73,76	73,88
Banjar	72,49	72,7	73,04	73,33	73,55
Barito Kuala	71,37	71,56	71,94	72,28	72,52
Tapin	73,92	74,09	74,39	74,47	74,72
Hulu Sungai Selatan	71,64	71,78	72,15	72,52	72,82
Hulu Sungai Tengah	71,46	71,66	72	72,33	72,6
Hulu Sungai Utara	71,22	71,5	71,89	72,21	72,49
Tabalong	73,99	74,09	74,45	74,63	74,76
Tanah Bumbu	73,72	73,82	74,06	74,28	74,44
Balangan	73,02	73,15	73,42	73,69	73,87
Kota Banjarmasin	74,21	74,36	74,6	74,88	75,07
Kota Banjarbaru	74,3	74,4	74,64	74,9	75,11
Kalimantan Selatan	73,28	73,43	73,7	73,97	74,18

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

Perbedaan angka antara SP2010 dan SP2020 mencerminkan adanya pembaruan metodologi dan data dasar yang lebih akurat, serta penyesuaian terhadap dinamika demografi dan mortalitas terkini. Namun secara umum, tren peningkatan UHH di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa upaya pembangunan kesehatan di daerah ini telah berjalan ke arah yang positif, meskipun masih memerlukan percepatan, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil dan kelompok rentan agar kesenjangan dalam kesehatan masyarakat dapat semakin dipersempit.

Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu isu prioritas dalam pembangunan kesehatan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Prevalensi stunting mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara konsisten melakukan pemantauan melalui dua sumber data utama, yakni Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan sistem e-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

Tabel II-53 Prevalensi Stunting Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	SSGI	E_PPGBM
1	2020	7.1	6.86
2	2021	6.01	5.12
3	2022	20.3	4.4
4	2023	25.4	4.1
5	2024	19,8	5.2

Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggambarkan pada tahun 2020, angka stunting tercatat cukup rendah di angka 7.1%, dan mengalami penurunan menjadi 6.01% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan prevalensi stunting yang cukup tinggi yaitu sebesar 20.3%. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 25%. Pada tahun 2024 berdasarkan data terakhir, angka stunting Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil diturunkan hingga 19,8%. Data ini mengindikasikan adanya tantangan besar yang perlu segera diatasi dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun upaya - upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan meningkatkan cakupan intervensi spesifik antara lain : skrining anemia pada remaja putri, konsumsi tablet tambah darah (TTD) remaja putri, pemeriksaan kehamilan (ANC), konsumsi tablet tambah darah ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK), pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi Baduta, tata laksana Balita dengan masalah gizi, peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi, edukasi remaja ibu hamil dan keluarga termasuk pemecuan bebas buang air besar sembarangan (BABS).

Data balita stunting yang bersumber dari e_PPGBM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 sebesar 6.86% dan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2023, yang mana cakupan dari pada tahun 2021

sebesar 5,12%, tahun 2022 cakupannya menurun lagi menjadi 4.4% dan tahun 2023 menjadi 4.1%, sedangkan cakupan balita stunting tahun 2024 berasal dari data hasil dari dilaksanakannya pengukuran serentak dengan seluruh sasaran balita yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bulan Juni 2024 dengan cakupan sebesar 5.2%.

Upaya- Upaya pencegahan balita stunting dan peningkatan status gizi balita yang bermasalah gizi tetap berlangsung, Upaya tersebut selain dengan intervensi spesifik juga pemberian makanan tambahan local untuk ibu hamil risiko KEK, balita bermasalah gizi seperti balita gizi kurang, balita berat badan kurang, balita tidak naik berat badannya; Pemberian asupan gizi untuk ibu hamil KEK dan risiko KEK, balita wasting, balita underweight, balita stunting; rujukan balita stunting ke dokter spesialis anak; penyuluhan dan konseling pemberian makanan pada bayi dan anak.

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kematian perempuan akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau dalam periode 42 hari setelah persalinan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu di suatu negara.

Tabel II-54 AKI Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan 2021-2024

Kabupaten/Kota	Satuan	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	267	50	158	-
Kotabaru	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	266	212	321	-
Banjar	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	157	199	123	-
Barito Kuala	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	133	70	143	-
Tapin	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	385	303	252	-
Hulu Sungai Selatan	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	108	88	94	
Hulu Sungai Tengah	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	226	79	141	-
Hulu Sungai Utara	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	326	241	197	-
Tabalong	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	276	135	87	-
Tanah Bumbu	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	166	75	61	-
Balangan	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	309	147	259	-
Banjarmasin	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	100	129	128	-
Banjarbaru	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	269	108	119	-
Kalimantan Selatan	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	205	136	145	-

Sumber : Opendata Kalimantan Selatan Tahun 2025

Penyebab kematian ibu hamil umumnya berkaitan dengan komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan periode pasca-persalinan. Berikut beberapa penyebab utama kematian ibu hamil di Indonesia:

- Perdarahan (Hemorrhage): Perdarahan, terutama perdarahan pasca-persalinan (PPH), adalah salah satu penyebab utama kematian ibu. Ini

bisa terjadi karena robekan pada rahim, trauma saat persalinan, atau masalah dengan plasenta seperti plasenta previa.

- **Preeklampsia dan Eklampsia:** Preeklampsia adalah kondisi yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ (biasanya ginjal) pada ibu hamil. Jika tidak segera ditangani, preeklampsia bisa berkembang menjadi eklampsia, yang disertai kejang dan mengancam jiwa.
- **Infeksi (Sepsis):** Infeksi selama kehamilan, saat persalinan, atau pasca-persalinan dapat menyebabkan sepsis. Infeksi ini dapat terjadi di rahim, saluran kemih, atau luka bekas operasi dan memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.
- **Komplikasi Persalinan (Obstructed Labor):** Ketika bayi tidak dapat dilahirkan secara normal karena posisi yang tidak tepat atau ukuran bayi yang terlalu besar, ibu berisiko mengalami persalinan macet (obstructed labor). Tanpa penanganan yang tepat, ini bisa menyebabkan kematian ibu.
- **Gangguan Penyakit Jantung dan Kardiovaskular:** Penyakit jantung atau masalah kardiovaskular yang sudah ada sebelumnya bisa diperburuk selama kehamilan, yang menyebabkan risiko kematian bagi ibu.
- **Emboli Air Ketuban:** Kondisi langka di mana cairan ketuban masuk ke dalam aliran darah ibu selama persalinan atau segera setelah melahirkan. Ini dapat memicu reaksi berbahaya yang menyebabkan kesulitan pernapasan dan kegagalan organ.
- **Abortus Tidak Aman:** Praktik aborsi yang tidak aman dan tidak dilakukan oleh tenaga medis berkompeten juga dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti perdarahan hebat dan infeksi, yang berujung pada kematian ibu.
- **Kekurangan Akses pada Perawatan Kesehatan yang Berkualitas:** Di daerah terpencil atau dengan fasilitas kesehatan terbatas, ibu hamil sering tidak mendapatkan perawatan yang memadai selama kehamilan atau saat persalinan, yang meningkatkan risiko kematian.
- **Anemia Berat:** Ibu hamil yang mengalami anemia berat (rendahnya kadar hemoglobin dalam darah) lebih rentan mengalami komplikasi selama persalinan dan periode pasca-persalinan, yang bisa berujung pada kematian.

Komplikasi akibat Penyakit Kronis: Penyakit kronis seperti diabetes atau HIV/AIDS yang tidak terkontrol selama kehamilan juga bisa memperburuk kondisi kesehatan ibu, berisiko menyebabkan kematian.

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah indikator yang mengukur jumlah kematian bayi yang terjadi dalam satu tahun pertama kehidupan per 1.000 kelahiran hidup. AKB mencakup kematian yang terjadi pada periode neonatal (0-28 hari) dan postneonatal (28 hari hingga 1 tahun).

Tabel II-55 AKB Kabupaten/Kota seKalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten/kota	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	12,2	11,3	10,3	10,2	
Kotabaru	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	7,7	7,3	9,4	5,3	
Banjar	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	6,5	7,8	13,1	14,3	
Barito Kuala	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	9,8	13,1	7,9	9,8	
Tapin	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	14,3	9,9	12,1	19,4	
Hulu Sungai Selatan	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	15,7	11,1	17,1	18,2	
Hulu Sungai Tengah	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	14,9	15,8	17,1	14,1	
Hulu Sungai Utara	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	13	15,8	20,5	19,7	
Tabalong	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	10,3	9,8	7,3	10,7	
Tanah Bumbu	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	9,6	10,5	9	8,4	
Balangan	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	6,7	13,3	8,8	15,5	
Banjarmasin	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	2,6	2,3	0,8	8,2	
Banjarbaru	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	4,5	4,7	6,9	12,7	
Kalimantan Selatan	Kasus per Setiap 1000 Kelahiran Hidup	9	9	10	11,7	

Sumber : Opendata Kalimantan Selatan Tahun 2025

Penyebab angka kematian bayi di Indonesia bisa dibagi menjadi beberapa faktor utama, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa penyebab umum:

- Prematuritas dan Berat Lahir Rendah (BBLR): Bayi yang lahir prematur atau dengan berat badan rendah memiliki risiko kematian lebih tinggi karena organ-organ tubuhnya belum berkembang sempurna.
- Asfiksia Neonatal: Asfiksia terjadi ketika bayi kekurangan oksigen saat proses persalinan atau setelah lahir, yang bisa menyebabkan kerusakan otak dan organ penting lainnya.

- Infeksi: Infeksi seperti sepsis, pneumonia, meningitis, atau tetanus neonatorum dapat menyebabkan kematian bayi, terutama jika tidak segera diatasi dengan pengobatan yang tepat.
- Kegagalan Pernafasan: Kondisi di mana bayi tidak dapat bernapas dengan baik akibat masalah kesehatan pernafasan atau kelainan kongenital.
- Kelainan Kongenital (Bawaan): Bayi yang lahir dengan kelainan bawaan, seperti masalah jantung, sistem saraf, atau kelainan lainnya, memiliki risiko lebih tinggi untuk meninggal dalam tahun pertama kehidupannya.
- Kurangnya Perawatan Kesehatan Selama Kehamilan dan Kelahiran: Minimnya akses ke fasilitas kesehatan yang layak, terutama di daerah terpencil, bisa menghambat upaya pencegahan dan penanganan komplikasi selama persalinan dan perawatan bayi.
- Gizi Buruk Pada Ibu: Ibu hamil dengan gizi buruk berisiko melahirkan bayi yang memiliki kondisi kesehatan yang buruk, termasuk berat lahir rendah dan perkembangan organ yang tidak optimal.
- Kondisi Ekonomi dan Sosial: Kemiskinan dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan ibu dan bayi juga berkontribusi terhadap tingginya angka kematian bayi, karena keterbatasan akses ke perawatan medis yang berkualitas.

II.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. RLS berkontribusi langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya dalam dimensi pendidikan, serta menjadi cerminan aksesibilitas dan keberlangsungan layanan pendidikan dasar hingga menengah.

Tabel II-56 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2020-2024

Prov/Kab/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	7,88	7,89	7,9	7,92	7,94
Kotabaru	7,43	7,46	7,47	7,55	7,56

Prov/Kab/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjar	7,35	7,52	7,71	7,94	7,95
Barito Kuala	7,34	7,55	7,63	7,74	7,92
Tapin	7,76	7,77	7,95	8,05	8,15
Hulu Sungai Selatan	7,75	7,76	7,79	7,86	8,09
Hulu Sungai Tengah	8	8,01	8,28	8,29	8,35
Hulu Sungai Utara	7,53	7,75	7,76	7,77	7,78
Tabalong	9,1	9,11	9,12	9,14	9,15
Tanah Bumbu	7,96	7,97	8,25	8,3	8,43
Balangan	7,55	7,69	7,85	8,03	8,13
Kota Banjarmasin	9,95	10,2	10,21	10,24	10,35
Kota Banjarbaru	10,95	10,96	10,98	10,99	11
Kalimantan Selatan	8,29	8,34	8,46	8,55	8,62

Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 7,75 tahun, dan meningkat menjadi 8,09 tahun pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah.

Secara rata-rata, peningkatan RLS di Hulu Sungai Selatan sebesar 0,34 tahun selama lima tahun terakhir, atau setara dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 0,085 tahun (sekitar satu bulan lebih). Meskipun peningkatannya bersifat gradual, arah tren yang positif ini merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kelompok menengah. Pada tahun 2024, RLS Hulu Sungai Selatan sebesar 8,09 tahun, masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,62 tahun. RLS tertinggi secara konsisten dicapai oleh Kota Banjarbaru, yakni mencapai 11 tahun pada tahun 2024, disusul oleh Kota Banjarmasin dengan 10,35 tahun. Kedua wilayah ini merupakan daerah perkotaan dengan konsentrasi fasilitas pendidikan menengah dan tinggi, serta partisipasi pendidikan yang lebih tinggi secara umum. Sementara itu, wilayah dengan RLS terendah pada tahun 2024 adalah Kabupaten Kotabaru sebesar 7,56 tahun, dan Kabupaten Banjar sebesar 7,95 tahun, menunjukkan masih adanya kesenjangan geografis dalam akses dan capaian pendidikan antarwilayah. Dengan RLS 8,09 tahun, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejajar dengan Kabupaten Tapin (8,15), Balangan (8,13), dan sedikit di atas Hulu Sungai Utara (7,78), menempatkan kabupaten ini dalam

posisi kompetitif namun masih membutuhkan akselerasi untuk mendekati rata-rata provinsi.

Dalam periode 2020–2024, pertumbuhan RLS di Hulu Sungai Selatan tergolong stabil namun moderat. Pertumbuhan tercepat secara absolut dicapai antara tahun 2023 dan 2024, yakni dari 7,86 tahun menjadi 8,09 tahun, dengan kenaikan sebesar 0,23 tahun. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemulihan partisipasi pendidikan pascapandemi COVID-19, yang sempat berdampak pada penurunan angka partisipasi murni maupun angka putus sekolah. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Kabupaten Banjar dan Barito Kuala mencatat peningkatan RLS yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir, masing-masing naik sebesar 0,60 tahun dan 0,58 tahun, sedangkan Kabupaten Kotabaru hanya mengalami kenaikan sebesar 0,13 tahun, menjadikannya wilayah dengan pertumbuhan RLS paling lambat di Kalimantan Selatan.

Tabel II-57 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	8,10	8,11	8,13	8,35
Perempuan	7,53	7,54	7,73	7,80

Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025

Data juga menunjukkan adanya perbedaan RLS berdasarkan jenis kelamin. Selama periode 2020–2023, penduduk laki-laki secara konsisten memiliki RLS lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2023, RLS laki-laki mencapai 8,35 tahun, sedangkan perempuan 7,80 tahun.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa akses dan keberlangsungan pendidikan perempuan masih menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui pendekatan afirmatif, khususnya di wilayah perdesaan. Peningkatan pendidikan perempuan menjadi kunci penting dalam menurunkan angka pernikahan usia anak dan memperbaiki status kesehatan ibu dan anak dalam jangka panjang.

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menggambarkan perkiraan lama waktu (dalam tahun) yang dapat diharapkan akan dijalani oleh seorang anak berusia 7 tahun dalam mengikuti pendidikan formal sepanjang hidupnya, dengan asumsi bahwa kondisi sistem pendidikan dan aksesnya tidak berubah. HLS menjadi indikator penting dalam mengukur harapan masa depan pendidikan suatu wilayah, dan merupakan komponen utama dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi pendidikan.

Tabel II-58 Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2020-2024

Prov/Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	12,01	12,31	12,32	12,41	12,43
Kotabaru	11,93	11,95	12,06	12,07	12,08
Banjar	12,44	12,73	13,02	13,03	13,04
Barito Kuala	12,39	12,4	12,54	12,55	12,56
Tapin	11,94	11,95	12,04	12,33	12,34
Hulu Sungai Selatan	12,17	12,38	12,4	12,46	12,48
Hulu Sungai Tengah	12,2	12,21	12,22	12,24	12,31
Hulu Sungai Utara	12,91	12,92	12,93	13,19	13,21
Tabalong	12,72	12,89	12,9	12,91	12,92
Tanah Bumbu	12,37	12,48	12,49	12,6	12,61
Balangan	12,46	12,47	12,61	12,82	13,09
Kota Banjarmasin	13,93	13,94	13,95	13,97	14,01
Kota Banjarbaru	14,81	14,82	14,83	14,85	14,86
Kalimantan Selatan	12,68	12,81	12,82	12,86	12,87

Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025

Data menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren peningkatan yang stabil selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, HLS berada pada angka 12,17 tahun, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 12,48 tahun pada tahun 2024. Rata-rata kenaikan selama lima tahun terakhir adalah 0,31 tahun, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2020–2021 sebesar 0,21 tahun.

Kenaikan tersebut mencerminkan peningkatan aksesibilitas dan persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta keberhasilan program pemerintah dalam memperluas layanan pendidikan hingga ke pelosok desa. Kecenderungan peningkatan ini juga dapat dikaitkan dengan upaya reformasi pendidikan dan pemulihan pascapandemi yang dimulai pada tahun 2022.

Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar 12,48 tahun, yang menempatkannya di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 12,87 tahun. Meski demikian, HLS Hulu Sungai Selatan berada di atas beberapa kabupaten lain seperti Kotabaru (12,08), Tapin (12,34), dan Hulu Sungai Tengah (12,31), dan cukup sejajar dengan Barito Kuala (12,56) dan Tanah Bumbu (12,61). HLS tertinggi di provinsi terdapat di Kota Banjarbaru, yaitu 14,86 tahun, diikuti oleh Kota Banjarmasin sebesar 14,01 tahun. HLS terendah tercatat di Kabupaten Kotabaru, dengan nilai 12,08 tahun pada tahun 2024. Rendahnya angka di wilayah kabupaten umumnya disebabkan oleh faktor keterjangkauan geografis, sebaran fasilitas pendidikan yang belum merata, serta tingkat partisipasi pendidikan lanjutan yang masih terbatas.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatat kenaikan HLS sebesar 0,31 tahun dalam lima tahun terakhir, tergolong pertumbuhan moderat jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Pertumbuhan tercepat secara absolut di Kalimantan Selatan dicapai oleh Kabupaten Banjar, dengan kenaikan dari 12,44 tahun (2020) menjadi 13,04 tahun (2024), dan Kabupaten Balangan dari 12,46 menjadi 13,09 tahun. Sebaliknya, pertumbuhan terendah tercatat di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, masing-masing hanya naik 0,08 dan 0,05 tahun selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat dimaklumi karena kedua wilayah tersebut telah mencapai nilai HLS yang sangat tinggi, mendekati optimal.

Tabel II-59 Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	12,10	12,11	12,15	12,42
Perempuan	12,62	12,91	12,92	12,93

Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025

Analisis berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan memiliki harapan lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki selama periode 2020–2023. Pada tahun 2023, HLS perempuan tercatat sebesar 12,93 tahun, sedangkan laki-laki sebesar 12,42 tahun.

Tren ini konsisten dari tahun ke tahun dan mencerminkan tingginya motivasi serta partisipasi perempuan dalam pendidikan formal, khususnya di jenjang menengah dan tinggi. Temuan ini sekaligus menjadi peluang strategis untuk mendorong peran perempuan dalam pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas dan pendidikan.

Nilai Literasi dan Numerasi SD

Peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari tren positif capaian nilai literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar selama periode tahun 2021 hingga 2024. Nilai literasi, yang merefleksikan kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tertulis secara efektif, menunjukkan peningkatan signifikan dari 46,39 pada tahun 2021 menjadi 58,17 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan hasil dari berbagai intervensi kebijakan pendidikan, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran, pelatihan guru, dan penyediaan sarana pendukung literasi.

Demikian pula, capaian nilai numerasi yang mencerminkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan konsep matematika dasar juga mengalami tren kenaikan yang menggembirakan. Pada tahun 2021, nilai

numerasi tercatat sebesar 34,67 dan meningkat tajam menjadi 52,42 pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi indikasi adanya perbaikan dalam strategi pembelajaran numerasi yang lebih aplikatif, kontekstual, serta berbasis kompetensi dasar siswa.

Meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target nasional, tren perbaikannya menunjukkan arah pembangunan sektor pendidikan dasar yang tepat. Upaya peningkatan kompetensi literasi dan numerasi akan terus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di masa mendatang.

Tabel II-60 Nilai Literasi dan Numerasi SD Kabupaten Hulu SUNgai Selatan Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Nilai Literasi	46,39	53.14	54.89	58.17
Nilai Numerasi	34.67	41.64	42.57	52.42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Nilai Literasi dan Numerasi SMP

Peningkatan kualitas pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari capaian nilai literasi dan numerasi siswa selama periode tahun 2021 hingga 2024. Berdasarkan data yang tersedia, nilai literasi menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, dari 58,47 pada tahun 2021 menjadi 68,45 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin membaiknya kemampuan membaca dan memahami teks siswa secara kritis, yang merupakan fondasi utama dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Di sisi lain, capaian nilai numerasi yang merepresentasikan kemampuan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan konsep matematika dasar juga mengalami kemajuan signifikan. Nilai numerasi meningkat dari 52,55 pada tahun 2021 menjadi 60,36 pada tahun 2024. Kenaikan nilai literasi dan numerasi ini menjadi indikasi bahwa program-program peningkatan mutu pendidikan, termasuk pelatihan guru, pembelajaran berbasis asesmen, serta penguatan sarana-prasarana belajar telah memberikan dampak positif terhadap kompetensi dasar siswa. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah target nasional yang diharapkan, sehingga ke depan dibutuhkan intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kualitas hasil belajar di tingkat SMP.

Tabel II-61 Nilai Literasi dan Numerasi SMP Kabupaten Hulu SUNgai Selatan Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Nilai Literasi	58.47	61.72	66.65	68.45

Nilai Numerasi	52.55	52.61	58.75	60.36

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator penting dalam mengukur keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya pada kelompok usia sekolah. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, APK untuk kelompok usia 7–12 tahun menunjukkan tren yang sangat positif selama periode 2020 hingga 2024. APK pada kelompok ini tercatat konsisten berada di atas 100 persen, yang berarti terdapat pula siswa yang berusia di luar rentang usia tersebut namun masih mengakses jenjang pendidikan dasar. Pada tahun 2020 APK 7–12 tahun berada pada angka 105,63 persen dan mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 112,60 persen, sebelum sedikit menurun menjadi 111,27 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan semakin meratanya akses dan peningkatan cakupan layanan pendidikan dasar di wilayah ini.

Sementara itu, untuk kelompok usia 13–15 tahun, yang mencerminkan partisipasi pendidikan jenjang menengah pertama, APK juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan meskipun masih berada di bawah 100 persen. Pada tahun 2020, APK kelompok usia ini tercatat sebesar 87,79 persen dan mengalami fluktuasi kecil dalam dua tahun berikutnya, namun mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 93,71 persen. Meningkatnya APK pada jenjang ini menunjukkan adanya perbaikan dalam transisi dari pendidikan dasar ke jenjang menengah pertama, sekaligus mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah serta mendorong keberlanjutan pendidikan bagi remaja usia sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Meskipun demikian, APK jenjang 13–15 tahun yang belum mencapai angka ideal 100 persen menunjukkan masih perlunya intervensi kebijakan, terutama dalam menjangkau kelompok rentan dan memperkuat dukungan sosial bagi keberlangsungan pendidikan anak usia remaja.

Tabel II-62 Angka Partisipasi Kasar 7-15 Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
APK 7-12 Tahun	105.63	104.28	104.06	112.60	111.27
APK 13-15 Tahun	87.79	86.19	88.74	88.86	93.71

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan jenis kelamin memberikan gambaran mengenai kesetaraan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, capaian APK kelompok usia 7–12 tahun selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa secara umum, baik

laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat partisipasi pendidikan dasar yang tinggi, bahkan melebihi angka 100 persen. Pada tahun 2020, APK laki-laki berada pada angka 106,37 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tercatat sebesar 104,81 persen. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi fluktuasi di kedua kelompok. APK laki-laki mencapai puncaknya pada 2024 dengan 115,84 persen, sedangkan APK perempuan tertinggi tercatat pada 2021 dengan 107,17 persen, sebelum menurun menjadi 107,30 persen di tahun 2024. Meskipun terdapat perbedaan kecil antarjenis kelamin, data ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar telah cukup merata bagi anak laki-laki dan perempuan di kabupaten ini.

Sementara itu, untuk kelompok usia 13–15 tahun, terdapat dinamika yang lebih mencolok antara APK laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020, APK laki-laki sebesar 91,01 persen lebih tinggi dibandingkan perempuan yang berada pada angka 85,03 persen. Namun, tren tersebut berbalik dalam beberapa tahun berikutnya. APK perempuan mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 99,80 persen pada tahun 2024, sedangkan APK laki-laki hanya mencapai 90,02 persen di tahun yang sama. Peningkatan pesat APK perempuan khususnya dari tahun 2022 ke 2024 menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan partisipasi pendidikan bagi remaja perempuan. Sementara itu, capaian APK laki-laki yang sempat menurun di tahun 2022 menjadi 78,49 persen, meskipun kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya, perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih spesifik dalam menjangkau remaja laki-laki, guna memastikan kesetaraan capaian pendidikan menengah pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel II-63 Angka Partisipasi Kasar 7-15 Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

		2020	2021	2022	2023	2024
APK 7-12 Tahun	Laki-Laki	106,37	101,86	104,05	114,12	115,84
	Perempuan	104,81	107,17	104,06	111,23	107,30
APK 13-15 Tahun	Laki-Laki	91,01	88,76	78,49	87,53	90,02
	Perempuan	85,03	83,43	98,47	90,89	99,80

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator penting dalam menilai tingkat keterlibatan anak-anak dalam jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok usia sekolah. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, capaian APM untuk kelompok usia 7–12 tahun selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan tinggi, yaitu selalu berada di atas 98 persen. Pada tahun 2020, APM kelompok ini tercatat sebesar 98,75 persen, kemudian sedikit

menurun pada 2021 menjadi 98,20 persen, namun kembali meningkat dan mencapai puncaknya di tahun 2022 sebesar 99,74 persen. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar telah mengikuti pendidikan sesuai usia yang semestinya.

Sementara itu, capaian APM untuk kelompok usia 13-15 tahun menunjukkan tren yang lebih dinamis, dengan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, APM tercatat sebesar 74,74 persen dan mengalami sedikit penurunan pada 2021 menjadi 74,38 persen. Namun demikian, sejak tahun 2022, capaian ini mulai meningkat secara konsisten hingga mencapai angka tertinggi sebesar 82,23 persen pada 2023, dan sedikit menurun menjadi 81,57 persen pada tahun 2024. Peningkatan APM pada kelompok usia ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan tingkat menengah pertama, walaupun masih terdapat ruang perbaikan agar seluruh anak usia 13-15 tahun dapat terakomodasi dalam sistem pendidikan formal sesuai jenjang usia mereka. Dengan demikian, pencapaian APM ini menjadi salah satu indikator strategis dalam perencanaan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel II-64 Angka Partisipasi Murni 7-15 Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
APM 7-12 Tahun	98,75	98,20	99,74	99,60	98,83
APM 13-15 Tahun	74,74	74,38	74,67	82,23	81,57

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenis kelamin pada kelompok usia 7-15 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 2020 hingga 2024, terlihat capaian yang cukup baik dan relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan pada jenjang pendidikan dasar. Untuk kelompok usia 7-12 tahun, APM laki-laki menunjukkan capaian tinggi dan konsisten, dengan nilai mencapai 98,32 persen pada tahun 2020, sempat menurun pada 2021 menjadi 96,70 persen, lalu meningkat menjadi 100 persen pada 2022, sedikit turun menjadi 99,16 persen pada 2023, dan kembali mencapai angka maksimal 100 persen di tahun 2024. Di sisi lain, APM perempuan pada kelompok usia yang sama juga menunjukkan capaian tinggi, bahkan lebih stabil, dengan nilai tertinggi 100 persen pada tahun 2023. Namun, pada 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 97,81 persen. Secara umum, kedua kelompok menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7-12 tahun telah mengakses pendidikan secara tepat waktu.

Untuk kelompok usia 13–15 tahun, perbedaan capaian APM antara laki-laki dan perempuan terlihat lebih mencolok. APM perempuan secara konsisten mencatat angka yang lebih tinggi dibanding laki-laki dalam hampir seluruh periode. Pada tahun 2020, APM perempuan berada pada angka 79,12 persen, sementara laki-laki hanya 69,63 persen. Meskipun terdapat fluktuasi, APM perempuan terus mengalami peningkatan dan mencapai 86,61 persen pada tahun 2024, sedangkan APM laki-laki juga meningkat namun lebih lambat, dengan capaian 78,51 persen di tahun yang sama. Perbedaan ini mengindikasikan adanya tantangan khusus dalam mendorong partisipasi anak laki-laki pada jenjang pendidikan menengah pertama, yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ke depan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjamin pemerataan akses pendidikan dasar, sekaligus memberikan landasan untuk penguatan intervensi berbasis gender dalam pembangunan pendidikan.

Tabel II-65 Angka Partisipasi Murni 7-15 Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

		2020	2021	2022	2023	2024
APM 7-12 Tahun	Laki-Laki	98,32	96,70	100	99,16	100,00
	Perempuan	99,23	99,98	99,46	100	97,81
APM 13-15 Tahun	Laki-Laki	69,63	74,03	70,29	80,81	78,51
	Perempuan	79,12	71,00	78,82	84,40	86,61

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, terutama pada kelompok usia 13–15 tahun. Untuk kelompok usia 7–12 tahun yang mencerminkan jenjang pendidikan dasar (SD/MI), capaian APS berada pada angka yang sangat tinggi, yaitu sebesar 98,75 persen pada tahun 2020, sedikit menurun menjadi 98,20 persen pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 99,74 persen pada tahun 2022, dan bertahan pada level yang tinggi hingga mencapai 98,83 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah mengakses layanan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan dasar yang merata dan terjangkau.

Sementara itu, untuk kelompok usia 13–15 tahun yang mencerminkan jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs), capaian APS cenderung lebih rendah dibanding usia 7–12 tahun, meskipun menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, APS untuk kelompok ini tercatat

sebesar 74,74 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 74,38 persen pada 2021, dan kembali naik menjadi 82,23 persen pada 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 81,57 persen, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan awal periode. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat dan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak hingga jenjang menengah pertama, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai cakupan yang optimal, khususnya dalam mengatasi hambatan sosial dan ekonomi yang mungkin memengaruhi keberlanjutan pendidikan pada jenjang tersebut. Secara keseluruhan, tren ini memberikan sinyal positif bagi pembangunan sektor pendidikan di daerah serta memperkuat fondasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel II-66 Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
APM 7-12 Tahun	98,75	98,20	99,74	99,60	98,83
APM 13-15 Tahun	74,74	74,38	74,67	82,23	81,57

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenis kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada kelompok usia 7–15 tahun selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian yang sangat baik, khususnya pada kelompok usia 7–12 tahun. Secara umum, baik laki-laki maupun perempuan pada kelompok usia ini telah mencapai tingkat partisipasi yang hampir sempurna. Pada tahun 2020, APS laki-laki tercatat sebesar 99,99 persen dan perempuan 99,98 persen. Angka ini terus terjaga pada tahun-tahun berikutnya, bahkan pada tahun 2022 dan 2024, partisipasi sekolah anak laki-laki mencapai 100 persen. Demikian pula dengan anak perempuan yang secara konsisten menunjukkan partisipasi di atas 99 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kesenjangan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan dasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Namun demikian, pada kelompok usia 13–15 tahun terdapat fluktuasi dan perbedaan yang lebih mencolok antar jenis kelamin. Partisipasi sekolah laki-laki mengalami penurunan dari 93,15 persen pada tahun 2020 menjadi 84,34 persen pada tahun 2024. Sebaliknya, partisipasi sekolah perempuan menunjukkan tren yang lebih stabil dan bahkan meningkat, dari 91,78 persen pada tahun 2020 menjadi 96,41 persen pada tahun 2024. Puncak partisipasi perempuan terjadi pada tahun 2022 sebesar 99,00 persen. Data ini mengindikasikan adanya tantangan khusus yang dihadapi oleh anak laki-laki pada jenjang pendidikan menengah pertama, baik dari segi motivasi, kondisi sosial ekonomi keluarga, maupun faktor lainnya yang memerlukan perhatian

dan intervensi kebijakan lebih lanjut. Dengan demikian, meskipun secara umum capaian APS sudah cukup tinggi, upaya peningkatan partisipasi sekolah bagi anak laki-laki usia 13–15 tahun perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan merata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel II-67 Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

		2020	2021	2022	2023	2024
APS 7-12 Tahun	Laki-Laki	99,99	99,04	100	99,16	100,00
	Perempuan	99,98	99,98	99,46	100	99,80
APS 13-15 Tahun	Laki-Laki	93,15	90,09	91,48	94,49	84,34
	Perempuan	91,78	94,02	99,00	95,84	96,41

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Tabel II-68 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2023-2024

Prov/Kab/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
	2023	2024
Tanah Laut	38,23	70,38
Kotabaru	60,23	78,15
Banjar	67,23	71,80
Barito Kuala	58,92	76,57
Tapin	79,60	77,34
Hulu Sungai Selatan	70,48	83,34
Hulu Sungai Tengah	57,53	68,12
Hulu Sungai Utara	82,34	80,60
Tabalong	79,04	87,66
Tanah Bumbu	61,03	72,68
Balangan	67,73	94,94
Kota Banjarmasin	73,57	74,18
Kota Banjarbaru	70,33	89,32
Kalimantan Selatan	71,29	81,16

Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025

Pada tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mencatat peningkatan signifikan pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dari 70,48 pada tahun 2023 menjadi 83,34 pada tahun 2024, melampaui rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang berada di angka 81,16. Capaian ini menempatkan HSS sebagai salah satu kabupaten dengan pertumbuhan IPLM yang cukup tinggi di provinsi tersebut.

Berdasarkan komponen penyusun IPLM, peningkatan tertinggi di HSS terlihat pada Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan yang mengalami lonjakan dari 0,2261 pada 2023 menjadi 1,0000 pada 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan yang berkompeten. Selain itu, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari juga meningkat hampir dua kali lipat dari 0,0717 menjadi 0,1661, mengindikasikan meningkatnya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan.

Komponen lain seperti Pemerataan Layanan Perpustakaan juga mengalami perbaikan dari 0,6357 menjadi 0,6679, yang mencerminkan semakin baiknya distribusi akses layanan perpustakaan di berbagai wilayah HSS. Sementara itu, komponen Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Perpustakaan yang dibina sesuai SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Jumlah Anggota Perpustakaan sudah berada pada nilai maksimum (1,0000) sejak tahun 2023, menunjukkan konsistensi dalam pemenuhan standar layanan literasi.

Secara keseluruhan, peningkatan IPLM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 menunjukkan keberhasilan strategi pembangunan literasi melalui penguatan sumber daya manusia perpustakaan, peningkatan akses layanan, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperluas budaya literasi di seluruh lapisan masyarakat HSS.

Tabel II-69 Komponen Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023-2024

Aspek/Tahun	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,48	83,34
Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,6357	0,6679
Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	1,0000	1,0000
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	0,2261	1,0000
Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari	0,0717	0,1661
Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	1,0000	1,0000
Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	1,0000	1,0000
Jumlah Anggota Perpustakaan	1,0000	1,0000

Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025

Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI merupakan pengukuran kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Berdasarkan pengembangan dari “G20 Toolkit for measuring digital skills and digital literacy”, kerangka kerja IMDI terdiri atas empat pilar, meliputi:

1. **Infrastruktur dan Ekosistem.** Merupakan pilar landasan pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Pilar ini menekankan kesetaraan akses untuk ekosistem yang inklusif dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan tuntutan dunia digital. Pilar infrastruktur dan ekosistem dapat dilihat dari tiga aspek yaitu akses dan adopsi teknologi digital, ekosistem pembelajaran, dan digitalisasi pemerintah.
2. **Keterampilan Digital Berperan** sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami dan menciptakan informasi secara aman. Pilar ini dapat dilihat dari tiga pengukuran yaitu komplementaritas, pengenalan dan keamanan TIK.
3. **Pemberdayaan**
Pilar pemberdayaan mempresentasikan operasionalisasi dari tingkat literasi dan keterampilan digital. Pilar ini melibatkan tiga pengukuran yaitu pengguna, penyedia dan platform.
4. **Pekerjaan.**
Pilar pekerjaan berfokus kepada keahlian digital yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan dimana digitalisasi menciptakan jenis dan tugas pekerjaan baru. Pilar ini terdiri atas dua aspek yaitu permintaan dan penawaran.

Gambar II-32 IMDI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
IMDI Hulu Sungai Selatan	Indeks	29,80	44,74	44,44
IMDI Kalimantan Selatan	Indeks	35,54	42,78	44,62
IMDI Indonesia	Indeks	37,80	43,18	43,34

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital, Tahun 2025

Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024, meskipun pada tahun terakhir terjadi sedikit penurunan. Nilai IMDI HSS meningkat signifikan dari 29,80 pada 2022 menjadi 44,74 pada 2023, namun sedikit menurun menjadi 44,44 pada 2024. Meski demikian, capaian tahun 2024 ini tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan hampir sejajar dengan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan (44,62) serta lebih tinggi dibanding rata-rata nasional (43,34).

Jika ditinjau dari dimensi IMDI, peningkatan terbesar terjadi pada Pilar Keterampilan Digital, yang naik tajam dari 37,18 di 2022 menjadi 63,74 di 2024. Hal ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi digital. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem juga

mengalami peningkatan stabil dari 37,94 pada 2022 menjadi 59,38 pada 2024, mencerminkan perbaikan fasilitas dan dukungan ekosistem digital di daerah.

Namun, terdapat tantangan pada Pilar Pemberdayaan, yang sempat naik dari 13,57 di 2022 menjadi 27,53 di 2023, tetapi kemudian menurun menjadi 20,59 di 2024. Penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan kembali program-program yang mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan produktif masyarakat. Sementara itu, Pilar Pekerjaan menunjukkan peningkatan yang relatif lambat, dari 32,48 pada 2022 menjadi 35,19 pada 2024, sehingga perlu perhatian dalam mendorong terciptanya peluang kerja berbasis ekonomi digital.

Secara keseluruhan, perkembangan IMDI di Hulu Sungai Selatan mencerminkan kemajuan dalam aspek infrastruktur dan keterampilan digital, namun masih diperlukan penguatan di dimensi pemberdayaan dan pekerjaan agar transformasi digital dapat berdampak lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gambar II-33 Pilar Pembentuk IMDI Tahun 2022-2024

Dimensi	2022	2023	2024
Pilar I Infrastruktur dan Ekosistem	37,94	57,48	59,38
Pilar II Keterampilan Digital	37,18	59,14	63,74
Pilar III Pemberdayaan	13,57	27,53	20,59
Pilar IV Pekerjaan	32,48	34,23	35,19

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital, Tahun 2025

II.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tabel II-70 Data Tenaga Kerja Terdaftar menjadi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Tahun 2018-2022

Prov/Kab/Kota	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	15928	16651	35896	35989	35978
Kotabaru	19415	19652	40691	40667	40665
Banjar	14284	14284	18337	18043	18037
Barito Kuala	9986	9987	9988	10007	9988d
Tapin	14942	14942	20924	20911	20911
Hulu Sungai Selatan	3279	3447	3713	3713	3713
Hulu Sungai Tengah	4511	4510	4511	4511	4511
Hulu Sungai Utara	2121	2121	2121	2121	2121
Tabalong	19329	19328	19329	19334	19329
Tanah Bumbu	18717	19414	27890	30689	30682
Balangan	6624	6594	6628	6629	6628

Anggaran Bansos Pangan										
Prov/Kab/Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
	a	i	a	i	a	i	a	i	a	i
Hulu Sungai Utara	3.342.600.000	4.105.800.000	50.349.200.000	42.458.600.000	43.203.600.000	40.190.800.000	40.258.000.000	39.575.800.000	39.831.000.000	39.279.600.000
Tabalong	2.381.800.000	2.269.000.000	32.197.200.000	30.276.800.000	23.301.200.000	19.976.400.000	21.659.600.000	21.188.800.000	21.749.400.000	21.144.000.000
Tanah Bumbu	1.939.400.000	1.935.600.000	25.388.800.000	23.170.600.000	17.359.800.000	15.791.600.000	16.143.800.000	15.207.600.000	15.124.200.000	14.173.800.000
Balangan	1.225.200.000	1.227.400.000	19.341.600.000	16.648.000.000	16.277.600.000	15.011.600.000	15.003.600.000	14.605.800.000	14.738.400.000	14.385.600.000
Kota Banjarmasin	5.554.200.000	5.824.400.000	78.465.600.000	70.046.800.000	60.910.000.000	55.547.000.000	56.213.800.000	54.915.200.000	55.884.600.000	54.663.600.000
Kota Banjarbaru	1.653.000.000	1.554.000.000	23.609.600.000	18.277.800.000	16.794.000.000	15.221.800.000	16.136.000.000	15.554.400.000	16.231.200.000	15.721.200.000
Kalimantan Selatan	35.096.400.000	37.674.000.000	505.132.000.000	450.131.600.000	407.910.200.000	372.600.600.000	383.356.800.000	372.566.000.000	376.957.200.000	367.825.200.000

Berdasarkan data penerima dan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Pangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan tren yang relatif stabil dalam kurun waktu 2020–2024, baik dari sisi jumlah penerima maupun realisasi anggaran. Pada tahun 2020, realisasi penerima bansos pangan di HSS tercatat sebanyak 17.616 orang dari rencana 16.403 orang. Namun, jumlah penerima cenderung menurun dalam beberapa tahun berikutnya, dari 85.647 orang pada 2022 menjadi 80.063 orang pada 2023, hingga mencapai 53.156 orang pada 2024. Penurunan ini sejalan dengan tren provinsi Kalimantan Selatan yang juga menunjukkan pengurangan jumlah penerima bansos, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi.

Dari sisi anggaran bansos pangan, HSS mengalami fluktuasi yang sejalan dengan penurunan jumlah penerima. Pada tahun 2020, realisasi anggaran mencapai Rp3,52 miliar, meningkat signifikan menjadi Rp41,46 miliar pada 2021, seiring dengan lonjakan penerima bantuan di masa pemulihan pandemi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya anggaran cenderung menurun, tercatat sebesar Rp30,84 miliar pada 2022, Rp32,28 miliar pada 2023, dan menjadi Rp31,89 miliar pada 2024. Penurunan ini relatif lebih terkendali dibandingkan penurunan jumlah penerima, menunjukkan adanya efisiensi dalam penyaluran bantuan.

Meskipun terjadi penurunan jumlah penerima, persentase realisasi penerima dan anggaran di HSS tetap tinggi dan mendekati target yang telah direncanakan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran bansos pangan di HSS berjalan efektif dan tepat sasaran. Namun demikian, tren penurunan pada jumlah penerima juga menjadi indikasi positif bahwa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pangan mulai berkurang, diduga karena adanya peningkatan kemandirian ekonomi. Ke depan, diperlukan

strategi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat agar peralihan dari bantuan sosial menuju kemandirian dapat berjalan lebih optimal.

II.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan memantau tingkat kerukunan umat beragama di suatu wilayah. Alat ukur ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana toleransi, kerja sama, dan kesetaraan antar umat beragama

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan, baik di tingkat nasional maupun daerah. IPK disusun berdasarkan framework Culture Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO, dan terdiri dari 22 indikator yang dikelompokkan dalam tujuh dimensi.

II.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan perlindungan anak di suatu daerah atau wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, seperti pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. IPA berfungsi sebagai tolok ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anak.

	2022	2023
IPA	58,62	56,68

Tabel II-71 IPA IPHA IPKA Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Prov/Kab/Kota	Klaster 1	Klaster 2	Klaster 3	Klaster 4	Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Tanah Laut	52,11	89,7	74,47	27,56	81,04	66,35	62,13	83,05
Kotabaru	47,29	82,1	65,62	27,58	76	61,02	56,72	79,97
Banjar	48,73	75,44	71,2	23,05	72,26	59,2	55,47	74,8
Barito Kuala	50,03	76,19	76,26	24,15	66,88	59,55	57,43	72,96
Tapin	54,42	77,99	78,12	33,7	72,62	64,15	61,7	79,47
Hulu Sungai Selatan	51,53	68,66	73,80	24,02	62,09	56,68	55,12	67,08
Hulu Sungai Tengah	49,9	80,87	80,55	23,29	68,63	61,56	59,5	73,77
Hulu Sungai Utara	48,8	80,48	77,78	23,03	63,74	59,63	58,41	69,63
Tabalong	47,07	81,82	79,91	32,33	78,56	64,9	60,97	83,52
Tanah Bumbu	47,98	79,5	77,74	30,16	73,34	62,64	59,55	78,96
Balangan	50,11	79,17	80,99	24,9	65,55	60,92	59,55	74,56
Kota Banjarmasin	40,38	93,13	80,62	26,01	75,66	64,4	61,1	80,27

Prov/Kab/Kota	Klaster 1	Klaster 2	Klaster 3	Klaster 4	Klaster 5	IPA	IPHA	IPKA
Kota Banjarbaru	43,34	82,22	83,41	33,53	81,9	65,82	61,18	85,84
Kalimantan Selatan	47,72	82,15	76,54	26,7	73,89	62,46	59,16	78,4

Sumber : Kemen PPPA Tahun 2023

Berdasarkan data Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan faktor pembentuknya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mencatat nilai IPA sebesar 56,68, yang berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yaitu 62,46. Nilai ini juga diikuti oleh Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 55,12 dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 67,08, yang sama-sama masih lebih rendah dibandingkan capaian provinsi (59,16 untuk IPHA dan 78,4 untuk IPKA). Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di HSS masih memerlukan penguatan agar dapat mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lainnya di provinsi.

Jika ditinjau dari lima klaster pembentuk IPA, klaster dengan capaian tertinggi di HSS adalah Klaster 3 (Hak Sipil dan Kebebasan Anak) yang mencapai 73,80, disusul oleh Klaster 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) dengan nilai 68,66. Sementara itu, klaster dengan capaian terendah adalah Klaster 4 (Perlindungan Khusus Anak) yang hanya mencapai 24,02, jauh di bawah rata-rata provinsi (26,7). Rendahnya nilai pada klaster ini mengindikasikan masih terbatasnya upaya perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan atau membutuhkan perlakuan khusus.

Capaian yang relatif rendah pada beberapa klaster juga berdampak pada nilai IPHA, yang mengukur tingkat pemenuhan hak anak secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan pada aspek hak sipil, kebebasan, dan pengasuhan, aspek perlindungan khusus dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak masih memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan program perlindungan anak berbasis masyarakat, serta peningkatan kesadaran keluarga dan lingkungan sosial menjadi langkah penting untuk mendorong perbaikan nilai IPA di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depannya.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga adalah ukuran pencapaian kualitas keluarga, yang mencakup berbagai aspek seperti legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologi, dan sosial-budaya. IKK digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di berbagai wilayah di Indonesia.

	2021	2022	2023	2024

Hulu Sungai Selatan	54,98	56,65	61,16	63,90

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, IPKK tercatat sebesar 54,98, kemudian meningkat menjadi 56,65 pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 61,16, dan kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 63,90 pada tahun 2024.

Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan keluarga di Hulu Sungai Selatan, baik dari segi ketahanan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun dukungan terhadap kesejahteraan sosial keluarga. Peningkatan ini juga menunjukkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada penguatan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dengan tren positif yang ditunjukkan, diharapkan upaya peningkatan kualitas keluarga di Hulu Sungai Selatan dapat terus berlanjut sehingga mampu menciptakan keluarga yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil tingkat ketimpangan gender yang terjadi, yang berarti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan semakin baik. Indeks ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai sejauh mana pembangunan yang inklusif dapat diwujudkan, khususnya dalam memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemantauan IKG secara berkelanjutan sangat penting untuk mendorong kebijakan yang responsif gender, guna menciptakan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Tabel II-72 Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Prov/Kab/Kota	Indeks Ketimpangan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	0,517	0,483	0,481	0,421	0,473
Kotabaru	0,584	0,588	0,597	0,571	0,551
Banjar	0,509	0,504	0,498	0,53	0,528

Prov/Kab/Kota	Indeks Ketimpangan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024
Barito Kuala	0,553	0,483	0,509	0,516	0,511
Tapin	0,605	0,586	0,581	0,563	0,577
Hulu Sungai Selatan	0,564	0,567	0,497	0,531	0,459
Hulu Sungai Tengah	0,521	0,436	0,482	0,36	0,390
Hulu Sungai Utara	0,518	0,494	0,445	0,458	0,465
Tabalong	0,523	0,529	0,504	0,503	0,421
Tanah Bumbu	0,591	0,573	0,57	0,557	0,533
Balangan	0,581	0,579	0,555	0,574	0,523
Kota Banjarmasin	0,356	0,459	0,422	0,4	0,284
Kota Banjarbaru	0,409	0,436	0,405	0,361	0,173
Kalimantan Selatan	0,528	0,525	0,514	0,507	0,486

Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IKG HSS berada pada angka 0,564, kemudian mengalami fluktuasi di tahun-tahun berikutnya dengan nilai 0,567 pada 2021, turun menjadi 0,497 pada 2022, sedikit meningkat ke 0,531 pada 2023, dan akhirnya mencapai 0,459 pada 2024. Penurunan yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang positif, menandakan berkurangnya kesenjangan gender di daerah ini, sekaligus lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang berada di angka 0,486.

Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan akses dan kesempatan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Meskipun demikian, fluktuasi yang sempat terjadi pada tahun 2023 mengindikasikan masih adanya tantangan struktural yang perlu ditangani secara berkelanjutan, termasuk dalam mendorong kesetaraan gender di sektor pekerjaan dan pengambilan keputusan. Dengan tren penurunan yang ditunjukkan pada tahun 2024, upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan di HSS dalam mengurangi ketimpangan gender mulai membuahkan hasil yang positif, sehingga diharapkan dapat terus berlanjut untuk mencapai kesetaraan yang lebih optimal.

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. IPG mengukur

sejauh mana perempuan dapat menikmati hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki. Semakin tinggi nilai IPG (mendekati 100), semakin kecil kesenjangan gender dalam akses dan capaian pembangunan. Indikator ini penting sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan responsif gender guna menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat.

Tabel II-73 Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Prov/Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	87,19	86,86	87,28	87,53	87,78
Kotabaru	84,15	84,77	84,93	85,05	85,17
Banjar	90,5	91	92,12	92,49	92,52
Barito Kuala	89,04	89,18	89,93	89,8	90,16
Tapin	84,08	84,15	84,37	85,13	85,39
Hulu Sungai Selatan	89,23	89,65	90,05	89,62	90,08
Hulu Sungai Tengah	96,5	96,46	96,51	96,07	96,18
Hulu Sungai Utara	91,52	91,74	92,01	91,69	91,79
Tabalong	85,34	85,48	86,06	86,47	86,83
Tanah Bumbu	84,6	85,09	85,31	85,74	85,83
Balangan	92,22	92,33	93,1	93,21	92,95
Kota Banjarmasin	93,37	93,69	93,76	93,88	94,43
Kota Banjarbaru	92,55	92,56	92,83	92,99	93,01
Kalimantan Selatan	88,86	88,86	89,44	89,65	89,94

Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), capaian IPG menunjukkan tren positif yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPG HSS berada di angka 89,23, kemudian meningkat menjadi 90,05 pada 2022, sempat sedikit menurun menjadi 89,62 pada 2023, dan kembali naik ke 90,08 pada 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang mencatat 89,94 pada tahun 2024. Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa kesenjangan gender di HSS relatif kecil, sehingga perempuan memiliki akses yang hampir setara dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Meskipun demikian, adanya fluktuasi kecil pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tantangan kesetaraan gender masih perlu diperhatikan, terutama dalam menjaga kesinambungan akses terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi bagi perempuan. Dengan capaian IPG yang terus membaik, diharapkan kebijakan pembangunan di HSS dapat semakin memperkuat pemberdayaan perempuan dan mendorong keterlibatan mereka dalam berbagai aspek pembangunan daerah.

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan, memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, dan berpartisipasi di dunia kerja secara setara dengan laki-laki. Semakin tinggi nilai IDG, menunjukkan semakin besar peran dan kesempatan perempuan dalam pembangunan, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan kebijakan publik. IDG menjadi penting sebagai tolok ukur efektivitas kebijakan pemberdayaan perempuan serta sebagai dasar dalam merumuskan strategi pembangunan yang responsif gender untuk menciptakan kesetaraan yang berkelanjutan.

Prov/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	72,8	72,86	73,54	76,45	76,98
Kotabaru	72,21	72,6	74,85	75,95	75,94
Banjar	80,52	80,24	80,83	80,86	76,41
Barito Kuala	78,03	78,17	78,8	79,24	79,23
Tapin	64,97	73,19	72,82	73,53	65,08
Hulu Sungai Selatan	53,82	53,55	54,45	55,12	65,92
Hulu Sungai Tengah	77,53	77,48	77,89	77,73	72,39
Hulu Sungai Utara	70,65	70,07	71,81	70,65	71,44
Tabalong	73,39	74,65	74,6	72,54	75,83
Tanah Bumbu	67,23	66,87	65,72	67,76	64,51
Balangan	70,14	70,57	70,03	73,27	68,83
Kota Banjarmasin	79,6	79,45	79,73	79,48	80,
Kota Banjarbaru	66,77	69,7	69,33	70,2	76,8
Kalimantan Selatan	74,48	74,58	74,8	75,97	75,01

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), perkembangan IDG dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Capaian IDG HSS terus mengalami peningkatan yang mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, penguasaan sumber daya ekonomi, serta keterlibatan mereka di berbagai posisi strategis. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan program-program pemberdayaan perempuan yang dijalankan pemerintah daerah, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan ekonomi, serta dorongan untuk terlibat dalam kepemimpinan lokal.

Meski demikian, meskipun IDG di HSS terus membaik, tantangan masih terdapat pada aspek representasi perempuan di ranah politik dan pengambilan kebijakan publik. Perlu adanya strategi yang lebih terfokus, seperti peningkatan jumlah perempuan di posisi legislatif dan jabatan struktural pemerintahan, serta penguatan dukungan terhadap wirausaha perempuan untuk mendorong

kemandirian ekonomi. Dengan tren positif yang ditunjukkan, HSS memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kesetaraan gender dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan pemuda di suatu wilayah, termasuk Indonesia. IPP memberikan gambaran komprehensif tentang kemajuan pemuda dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi, dan gender.

II.3 Aspek Daya Saing Daerah

II.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka Ketergantungan

Dependency Ratio atau rasio ketergantungan merupakan suatu indikator yang dapat mengindikasikan suatu wilayah apakah tergolong maju atau tidak dari segi demografi. Hal tersebut dikarenakan interpretasi dari rasio ketergantungan menyangkut tentang produktivitas penduduk suatu wilayah dalam menjalankan kesehariannya yang terjelaskan melalui analisis jika rasio ketergantungan semakin tinggi maka tanggungan penduduk produktif semakin tinggi terhadap penduduk non produktif, dan sebaliknya.

Prov/Kab/Kota	Rasio Ketergantungan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	46,73	46,82	46,91	46,96	46,95
Kotabaru	46,52	46,37	46,26	46,18	46,1
Banjar	44,37	44,73	45,15	45,57	45,9
Barito Kuala	45,36	45,46	45,62	45,77	45,87
Tapin	46,2	46,52	46,82	47,04	47,14
Hulu Sungai Selatan	45,57	45,77	46,05	46,37	46,69
Hulu Sungai Tengah	44,95	45,2	45,61	46,13	46,63
Hulu Sungai Utara	46,95	47,33	47,77	48,22	48,61
Tabalong	46,27	46,58	46,89	47,16	47,36
Tanah Bumbu	52,57	52,83	52,89	52,74	52,4
Balangan	46,43	46,72	47,09	47,46	47,75
Kota Banjarmasin	45,83	46,04	46,27	46,49	46,67
Kota Banjarbaru	45,23	45,5	45,79	46,06	46,25
Kalimantan Selatan	46,25	46,47	46,71	46,94	47,1

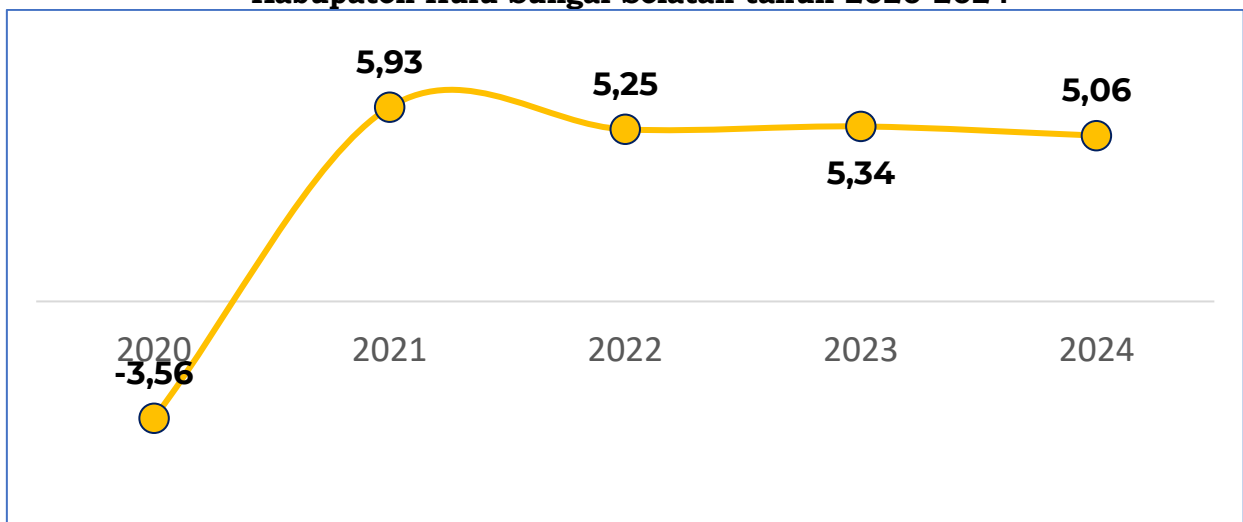
II.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

PDRB Industri Pengolahan

Perindustrian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami perkembangan yang menunjukkan sisi positif dalam membentuk struktur

perekonomian wilayah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian makro di Kalimantan Selatan cukup dominan dimana besarnya mencapai 8,07 persen distribusi sektor tersebut terhadap PDRB. Perkembangan sektor ini tidak lain dikarenakan sejumlah potensi ekonomi yang berada di wilayah Kalimantan Selatan seperti sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, hingga investor yang menanamkan modalnya untuk kepentingan bersama. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan dari 4,57 persen pada tahun 2018 menjadi -3,56 persen pada tahun 2020 akibat pandemi covid 19. Namun pada tahun 2021 dan 2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai menunjukkan tren positif dan berada pada angka 5,25% persen pada tahun 2022 seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar II-35 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan data pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada periode 2020–2024, terlihat adanya tren pertumbuhan yang positif meskipun disertai beberapa dinamika. Dari sisi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), sektor ini menunjukkan peningkatan konsisten dari Rp516.221,34 juta pada 2020 menjadi Rp714.457,79 juta pada 2024. Peningkatan serupa juga terlihat pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang naik dari Rp342.332,50 juta pada 2020 menjadi Rp422.405,20 juta pada 2024, yang mencerminkan pertumbuhan nyata sektor industri pengolahan tanpa pengaruh inflasi.

Pertumbuhan sektor ini ditandai dengan laju pertumbuhan positif sejak 2021, yakni 5,93%, setelah sempat berkontraksi -3,56% pada 2020 akibat dampak pandemi. Laju pertumbuhan yang relatif stabil pada kisaran 5–6%

hingga 2024 menunjukkan adanya pemulihan yang baik dan keberlanjutan aktivitas industri di daerah. Meski demikian, distribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap total PDRB HSS cenderung menurun, dari 7,97% pada 2021 menjadi 7,22% pada 2024, yang mengindikasikan pertumbuhan sektor lain yang lebih dominan atau perlunya penguatan peran sektor industri dalam struktur ekonomi daerah.

Selain itu, indeks perkembangan industri pengolahan meningkat signifikan dari 136,93 pada 2020 menjadi 168,96 pada 2024, sejalan dengan kenaikan indeks harga implisit yang menunjukkan adanya pengaruh harga pada pertumbuhan nominal. Meskipun laju harga implisit mengalami fluktuasi, dengan puncak 4,29% pada 2022 dan melambat menjadi 2,27% pada 2024, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri pengolahan di HSS lebih didorong oleh peningkatan volume produksi dibandingkan kenaikan harga.

Tabel II-74 Industri Pengolahan dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	516.221,34	567.833,43	623.322,60	664.950,49	714.457,79
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	342.332,50	362.641,89	381.692,70	402.070,84	422.405,20
Distribusi (%)	7,86	7,97	7,38	7,26	7,22
Laju Pertumbuhan (%)	-3,56	5,93	5,25	5,34	5,06
Indeks Perkembangan	136,93	145,06	152,68	160,83	168,96
Indeks Harga Implisit (2010 = 100)	150,80	156,58	163,30	165,38	169,14
Laju Harga Implisit (%)	1,90	3,84	4,29	1,27	2,27

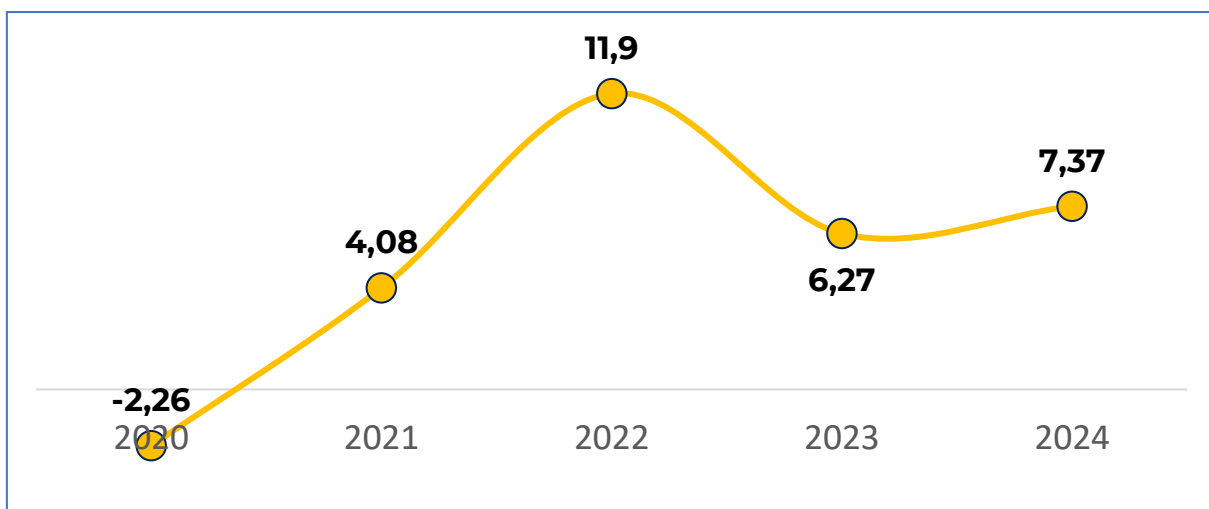
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa industri pengolahan di Hulu Sungai Selatan mengalami pemulihan yang kuat pasca pandemi dan terus berkembang secara stabil. Namun, penurunan kontribusi relatif terhadap PDRB menandakan perlunya kebijakan penguatan sektor industri, seperti peningkatan investasi, modernisasi teknologi, dan dukungan terhadap industri kecil dan menengah untuk memperbesar perannya dalam perekonomian daerah.

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu sektor penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya dalam mendukung aktivitas pariwisata, perdagangan, dan pergerakan ekonomi masyarakat.

Gambar II-36 Laju Pertumbuhan PDRB Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Secara umum, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih relatif kecil dibandingkan sektor lain, namun memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik. Dari sisi distribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), sektor ini mencatatkan kontribusi yang konsisten di kisaran 3,5–3,8 persen selama periode 2020 hingga 2024. Sementara dari sisi pertumbuhan riil (ADHK), sektor ini menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, kecuali pada awal masa pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 sangat terasa di sektor ini. Nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp251,24 miliar, dengan PDRB ADHK sebesar Rp170,78 miliar. Distribusi terhadap PDRB berada pada angka 3,83 persen, namun sektor ini mengalami kontraksi dengan laju pertumbuhan negatif sebesar -2,26 persen. Hal ini mencerminkan penurunan aktivitas konsumsi masyarakat di restoran, hotel, maupun penyedia jasa makanan dan minuman lainnya.

Memasuki tahun 2021, sektor ini mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 4,08 persen (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku meningkat menjadi Rp265,65 miliar, sementara atas dasar harga konstan mencapai Rp177,75 miliar. Meskipun distribusi terhadap total PDRB sedikit menurun menjadi 3,73 persen, peningkatan ini menunjukkan adanya pergerakan positif pasca relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat.

Tahun 2022 mencatat pertumbuhan tertinggi selama periode lima tahun terakhir dengan laju pertumbuhan sebesar 11,90 persen. Nilai PDRB ADHB melonjak signifikan menjadi Rp394,12 miliar dan ADHK menjadi Rp198,90 miliar. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan kuat di sektor akomodasi

dan makan minum, seiring peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata serta usaha kuliner yang kembali menggeliat.

Pada tahun 2023, meskipun nilai PDRB ADHB mengalami penurunan menjadi Rp328,04 miliar dari tahun sebelumnya, PDRB ADHK justru naik menjadi Rp211,36 miliar. Laju pertumbuhan riil tercatat sebesar 6,27 persen dengan kontribusi sektor ini terhadap PDRB sebesar 3,58 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa secara kuantitas dan aktivitas riil, sektor ini masih berkembang, meskipun terdapat penyesuaian harga dan kemungkinan penurunan omzet nominal.

Pada tahun 2024, sektor ini kembali mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 7,37 persen. PDRB ADHB naik menjadi Rp367,95 miliar, dan ADHK meningkat menjadi Rp226,94 miliar. Indeks perkembangan sektor juga menunjukkan tren peningkatan, dari 177,88 pada tahun 2020 menjadi 236,38 pada tahun 2024. Indeks harga implisit juga menunjukkan kecenderungan kenaikan harga di sektor ini, dengan laju harga tertinggi pada tahun 2024 sebesar 4,46 persen.

Tabel II-75 Akomodasi Makan dan Minum dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	251.236,29	265.647,72	394.120,21	328.043,85	367.948,89
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	170.780,44	177.751,37	198.895,12	211.360,94	226.940,41
Distribusi (%)	3,83	3,73	3,60	3,58	3,72
Laju Pertumbuhan (%)	-2,26	4,08	11,90	6,27	7,37
Indeks Perkembangan	177,88	185,15	207,17	220,15	236,38
Indeks Harga Implisit (2010 = 100)	147,11	149,45	152,90	155,21	162,13
Laju Harga Implisit (%)	2,63	,59	2,31	1,50	4,46

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Secara keseluruhan, sektor Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang positif pasca pandemi, dengan pertumbuhan riil yang terus meningkat dan kontribusi yang relatif stabil terhadap PDRB daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor ini untuk terus didorong, terutama dalam mendukung ekosistem pariwisata dan UMKM lokal.

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan

gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas.

Ekonomi kreatif pada mulanya merupakan aliran ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Aliran ekonomi tersebut diketahui mengutamakan nilai intelektual dalam menciptakan uang, menambah kesempatan kerja, serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Alvin Toffler (1980) mengungkapkan dalam teorinya bahwa terdapat tiga gelombang dalam peradaban ekonomi. Pertama, ialah pertanian. Kedua, ialah ekonomi industri, dan ketiga adalah ekonomi informasi. Ia juga kemudian memprediksi bahwa akan ada gelombang keempat, yakni ekonomi kreatif. Dalam konsep ekonomi kreatif, salah satu hal terbesar yang dibutuhkan adalah kreativitas. Hal itu karena industri kreatif merupakan inti dari bidang ekonomi kreatif yang digerakan oleh para kreator dan inovator.

Sederhananya, ekonomi kreatif merupakan bentuk pengembangan dari konsep ekonomi, namun dengan penambahan kreativitas. Namun, kreativitas tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi saja, tetapi juga termasuk ke dalam bagaimana penggunaan bahan baku serta inovasi suatu teknologi di dalamnya. Pada intinya, ekonomi kreatif merupakan suatu bidang yang memiliki hubungan erat dengan kreativitas, ide, serta sumber daya manusia yang kemudian dikombinasikan dengan digitalisasi masa kini.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada tabel di bawah ini tentang ketenagakerjaan menunjukkan penduduk usia kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sekitar 74,91 persen adalah mereka yang termasuk dalam penduduk angkatan kerja (TPAK). TPAK sebesar 74,91 persen menyiratkan bahwa kira-kira 74 - 75 orang dari setiap 100 orang penduduk usia kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi atau mereka yang berusaha untuk masuk ke dalam dunia kerja. Selebihnya 25,09 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel II-76 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Hulu aten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Prov/Kab/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	72,03	72,27	67,55	69,61	73,03
Kotabaru	64,68	67,50	70,92	64,00	65,80
Banjar	72,55	70,84	63,96	70,21	71,03
Barito Kuala	74,61	75,48	70,74	71,89	73,46
Tapin	70,17	70,31	70,31	70,17	68,12
Hulu Sungai Selatan	73,15	69,25	69,55	74,91	75,77
Hulu Sungai Tengah	71,15	70,20	67,63	71,97	74,53
Hulu Sungai Utara	70,08	71,41	69,35	75,34	73,89
Tabalong	69,27	71,49	72,32	72,94	74,17
Tanah Bumbu	70,16	68,29	64,75	68,57	67,35
Balangan	76,50	75,38	72,54	73,16	76,91
Kota Banjarmasin	62,07	63,19	63,15	66,16	63,93
Kota Banjarbaru	66,82	65,95	52,46	67,18	67,23
Kalimantan Selatan	69,33	69,26	67,55	69,76	70,22

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025, Diolah 2025

Tabel II-77 Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Berdasarkan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

Rincian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja	73,16	69,25	69,55	74,91	75,77
Bekerja	71,52	67,56	67,95	73,32	74,17
Pengangguran	1,64	1,69	1,60	1,59	1,60
Bukan Angkatan Kerja	26,84	30,75	30,45	25,09	24,23
Sekolah	23,85	26,77	6,05	5,35	5,33
Mengurus Rumah Tangga			20,13	16,62	16,54
Lainnya	2,99	3,98	4,27	3,12	2,36
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

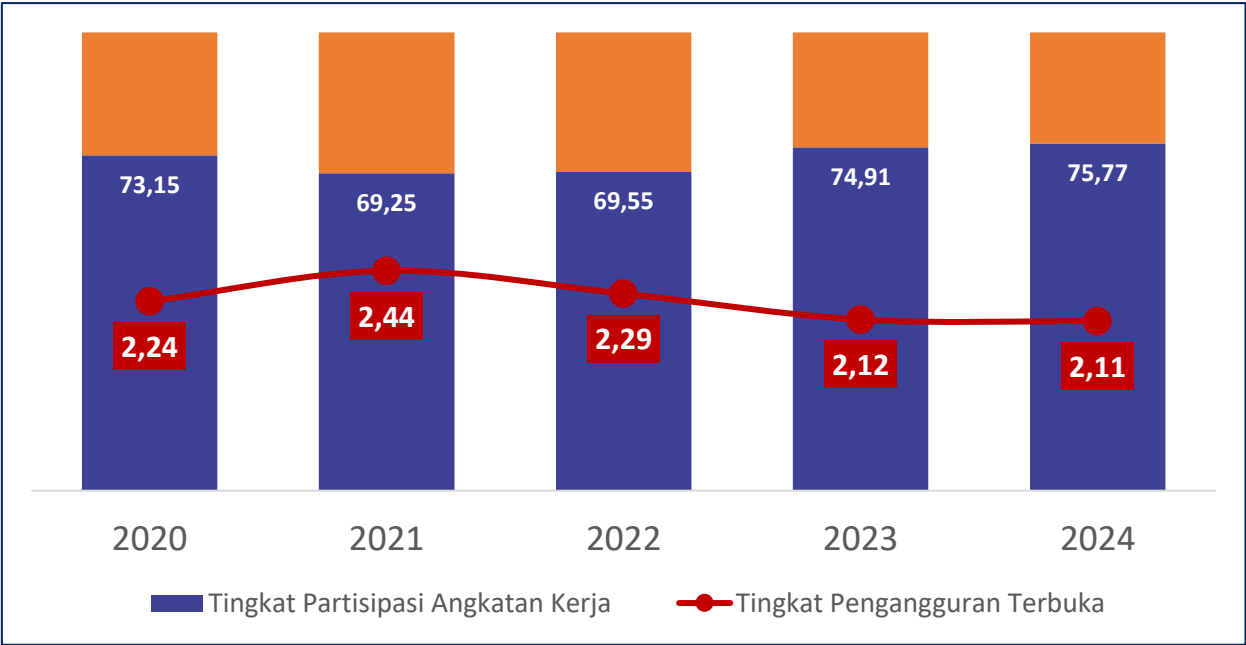
Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025, Diolah 2025

Berdasarkan data capaian tersebut, kondisi partisipasi masyarakat dalam mengisi kesempatan kerja masih belum optimal sehingga memerlukan upaya pengentasan pengangguran yang tepat. Kondisi ini dapat dilihat dari dua indikator yang menjadi tolok ukur pembangunan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Realisasi capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2019 sebesar 71,49%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 74,91%.

Kondisi ini selaras dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu berada pada angka 2,12%. Artinya kondisi partisipasi kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada pada kondisi cukup ideal dengan melihat peluang kerja yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk lokal secara baik. Meskipun demikian masih diperlukan banyak usaha untuk meningkatkan kualitas pekerja menjadi pekerja berkompeten yang berimplikasi pada kesejahteraan pekerja sendiri. Hal ini tentu saja membutuhkan upaya, baik dari

pemerintah maupun masyarakat melalui berbagai program pembangunan seperti pelatihan bahasa asing, *internet marketing*, *job fair* dan pelatihan bidang kompetensi untuk mendukung penyiapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Gambar II-37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Kab. Hulu Sungai Selatan, Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 (data diolah)

Tabel II-78 Persentase Penduduk Usia 15 tahun Ke atas Berdasarkan Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Rincian	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Angkatan Kerja	84,64	81,02	83,28	89,05	87,24	61,98	57,82	56,23	60,81	64,32
Bekerja	82,45	78,28	81,27	86,74	83,53	60,88	57,15	55,04	59,94	63,03
Pengangguran	2,19	2,74	2,01	2,31	1,91	1,10	0,67	1,19	0,87	1,29
Bukan Angkatan Kerja	15,36	18,98	16,72	10,95	12,76	38,02	42,18	43,77	39,19	35,68
Sekolah	4,66	7,22	6,02	4,66	6,28	5,15	6,64	6,08	6,04	4,39
Mengurus Rumah Tangga	5,50	6,92	4,89	3,40	3,10	32,02	32,41	34,91	29,81	29,94
Lainnya	5,20	4,84	5,81	2,89	3,38	0,85	3,13	2,78	3,34	1,35

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025, Data diolah

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan

data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun

Tabel II-79 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai IID	8,577	61,83	67,04	70,41	73,15

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Pada tahun 2020, Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memiliki nilai sebesar 8.577, yang dikategorikan sebagai "Sangat Inovatif". Kabupaten HSS juga berhasil masuk dalam 10 besar Kabupaten Terinovatif IGA (Indeks Guna Pembangunan Daerah) 2020 Pada Tahun 2021 ini Indeks Inovasi Daerah dilakukan perubahan dan perbaikan. Kebijakan dari Kemendagri ini bisa terlihat dari penyeimbangan antara aspek kuantitas inovasi dan kualitas inovasi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat nilai indeks 61,83 dan masuk Kategori Sangat Inovatif serta embali masuk dalam 10 Besar Kabupaten Terinovatif secara Nasional. Pada Tahun 2021 dan 2022 ini Indeks Inovasi Daerah dilakukan perubahan dan perbaikan. Kebijakan dari Kemendagri ini bisa terlihat dari penyeimbangan antara aspek kuantitas inovasi dan kualitas inovasi. Pada Tahun 2022 ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat nilai indeks 67,04 dan masuk Kategori Sangat Inovatif serta kembali masuk dalam 10 Besar Kabupaten Terinovatif secara Nasional untuk ke 4 kalinya secara berturut-turut. Terus perlu dilakukan peningkatan ekosistem inovasi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan digencarkannya ide-ide inovasi serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mindset inovatif, serta memacu dan memotivasi Pemerintah Daerah, untuk mampu melihat permasalahan dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah dengan mindset *think out of the box* serta memecahkannya secara kreatif, solutif dan inovatif; Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks sebesar 70,41 (Kategori Sangat Inovatif), dengan ini terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 3,37 kalau dibandingkan dengan tahun 2022 dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks 67,04 (Kategori Sangat Inovatif). Dengan ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil menjadi Kabupaten Terinovatif selama 5 (lima) tahun berturut-turut, 2019 hingga 2023. mulai dari Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks sebesar 70,41 (Kategori Sangat Inovatif), dengan ini terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 3,37 kalau dibandingkan dengan tahun 2022 dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai indeks 67,04 (Kategori Sangat Inovatif).

Dengan ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil menjadi Kabupaten Terinovatif selama 5 (lima) tahun berturut-turut Pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaporkan sebanyak 137 inovasi. Selanjutnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk dalam tahapan Presentasi dan Wawancara pada ajang Innovative Government Award 2024 yang mana selaras dengan hasil Indeks Inovasi Daerah. Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan meraih nilai indeks sebesar 73,15 dan masuk dalam Kategori Sangat Inovatif. Walaupun secara nilai indeks meningkat setiap tahunnya, namun secara laju dan peringkat Nasional terjadi penurunan.

II.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Target GNI per Kapita setara negara maju dan intensitas Emisi GRK menurun menuju *Net Zero Emissions* merupakan sasaran pembangunan yang memerlukan upaya-upaya *extraordinary* untuk dapat mencapainya. Praktik ekonomi yang saat ini dipakai merupakan praktik ekonomi yang memaki pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, praktik ekonomi ini disebut sebagai praktik ekonomi linear. Pada ekonomi linear, seluruh kegiatan ekonomi hanya berfokus pada penambahan nilai (*added value*) dalam proses produksi kemudian digunakan pada fase konsumsi. Ketika suatu produk sudah tidak memiliki nilai guna, produk langsung dibuang di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Transformasi harus dilakukan pada praktik ekonomi yang sudah ada dimana salah satu transformasi yang dapat dilakukan adalah melakukan penerapan ekonomi hijau, ekonomi sirkular dan ekonomi biru. Ekonomi sirkular merupakan konsep pengelolaan sumber daya yang bersifat regeneratif, di mana material yang diproduksi dan dikonsumsi tidak berakhir sebagai limbah. Prinsip ini sejalan dengan Tujuan 12 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berfokus pada konsumsi dan produksi berkelanjutan. Dalam aspek produksi, produk dirancang agar tahan lama, mudah diperbaiki, serta dapat didaur ulang, sehingga memperpanjang siklus hidupnya dan memungkinkan pengolahan kembali setelah masa pakainya berakhir. Sementara itu, dari sisi konsumsi, masyarakat didorong untuk memilih produk ramah lingkungan dan menggunakannya secara optimal guna memperpanjang masa pakai.

Ekonomi sirkular bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan material di seluruh rantai nilai, sehingga dapat mengurangi timbulan sampah dan polusi. Konsep ini lebih luas dibanding sekadar pengelolaan sampah dan daur ulang, dengan tiga prinsip utama: (1) Menghilangkan limbah dan

pencemaran, (2) Memastikan sumber daya tetap berada dalam siklus ekonomi selama mungkin, dan (3) Membangun sistem yang regeneratif.

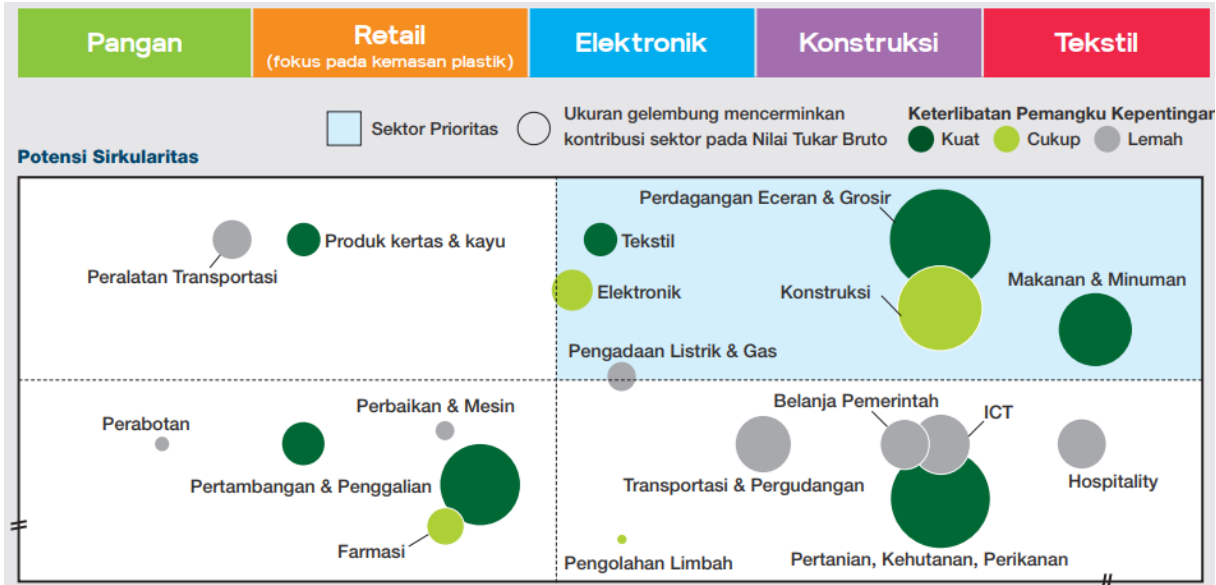
Secara operasional, ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang mengadopsi pendekatan sistemik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mendesain produk agar memiliki umur panjang, serta mengembalikan limbah produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Strategi penerapan ekonomi sirkular menggunakan kerangka 9R, yang terdiri dari 10 strategi, mulai dari R0 hingga R9. Semakin kecil nomor R, semakin tinggi tingkat sirkularitasnya, sedangkan angka yang lebih besar menunjukkan pendekatan yang lebih mendekati ekonomi linear. Mirip dengan piramida pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), strategi dengan tingkat sirkularitas tertinggi menjadi prioritas dalam penerapan ekonomi sirkular.

Tabel II-80 Definisi 9R

Prinsip 9R		Definisi
R0	<i>Refuse</i>	Menghindari redundansi pembuatan sebuah produk dengan fungsi yang sama.
R1	<i>Rethink</i>	Menggunakan produk secara lebih intensif
R2	<i>Reduce</i>	Meningkatkan efisiensi produksi dan guna produk dengan menggunakan lebih sedikit material
R3	<i>Reuse</i>	Menggunakan kembali produk yang masih layak pakai tanpa mengubah fungsinya
R4	<i>Repair</i>	Memperbaiki produk yang sudah rusak
R5	<i>Refurbish</i>	Memulihkan produk, biasanya produk yang sudah lama supaya dapat berfungsi kembali
R6	<i>Remanufacture</i>	Menggunakan sebagian komponen dari produk lama yang sudah tidak berfungsi untuk digunakan di produk baru dengan fungsi yang sama.
R7	<i>Repurpose</i>	Memanfaatkan produk yang sudah tidak berfungsi untuk digunakan kembali dengan fungsi yang berbeda.
R8	<i>Recycle</i>	Mengolah material untuk menghasilkan material yang sama (dengan kualitas yang sama atau lebih rendah).
R9	<i>Recover</i>	Proses konversi material menjadi sumber energi.

Sumber : Peta Jalan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045, Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2024

Gambar II-38 Analisa Sektor Prioritas Ekonomi Sirkular di Indonesia



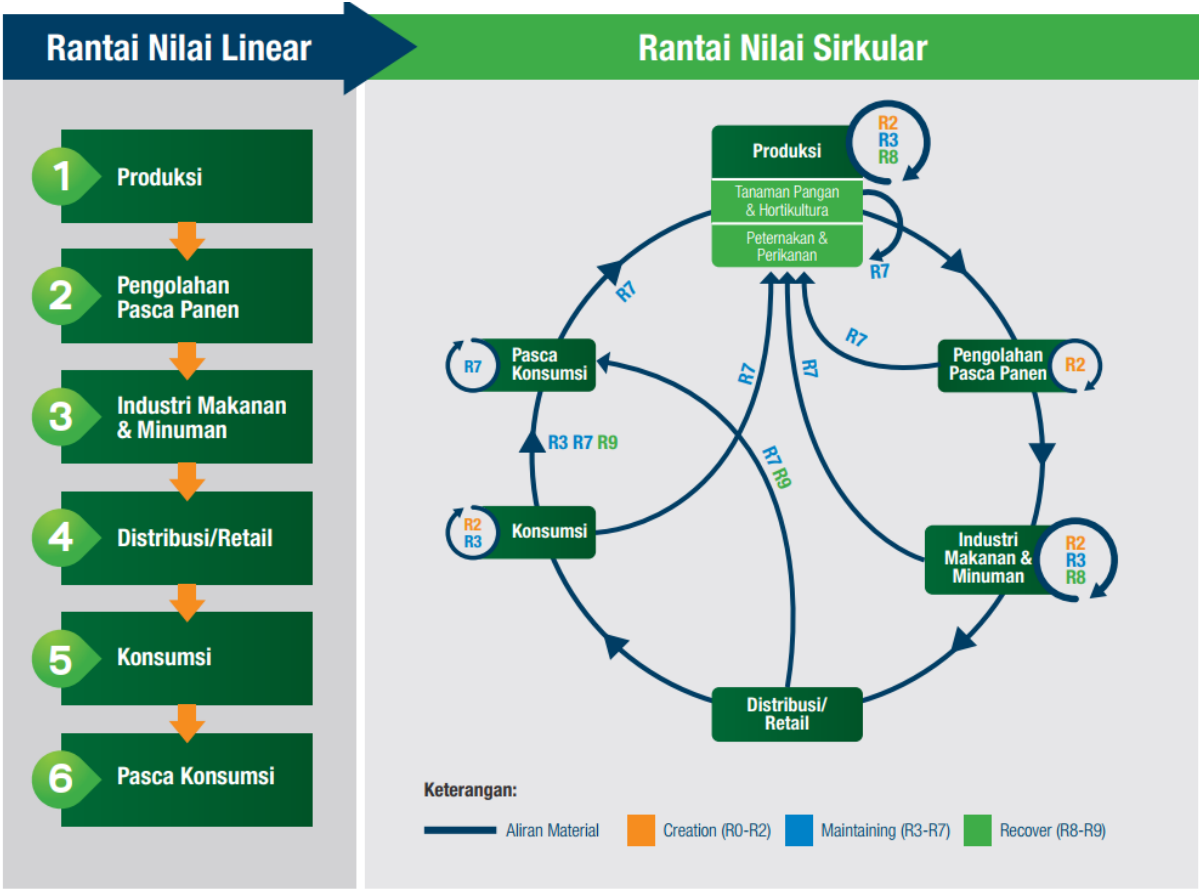
Sumber : Peta Jalan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

Ekonomi Sirkular Sektor Pangan

Secara umum, rantai produksi dan konsumsi pangan masih bersifat linear, dimulai dari proses produksi, diikuti oleh pengolahan pascapanen, pengolahan menjadi makanan dan minuman, distribusi serta pemasaran, hingga akhirnya dikonsumsi, dengan sisa konsumsi yang seringkali berakhir sebagai limbah di TPA. Model linear ini mencakup produksi intensif, penggunaan bahan tambahan, pengemasan yang tidak ramah lingkungan, serta pembuangan akhir yang tidak berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada permasalahan lingkungan global.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya transisi ke ekonomi sirkular semakin meningkat. Pendekatan ini menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, serta pemanfaatan limbah sebagai bahan baku baru, seperti pengolahan limbah pangan menjadi pupuk atau pakan ternak. Prinsip ekonomi sirkular dalam sektor pangan mencakup pertanian organik, pengolahan pangan yang masih layak konsumsi, pengomposan, pengurangan limbah makanan, serta redistribusi makanan yang belum dikonsumsi dengan tetap menjaga standar kualitas dan keamanan pangan.

Gambar II-39 Komparasi Rantai Nilai Linear dan Sirkular Sektor Pangan

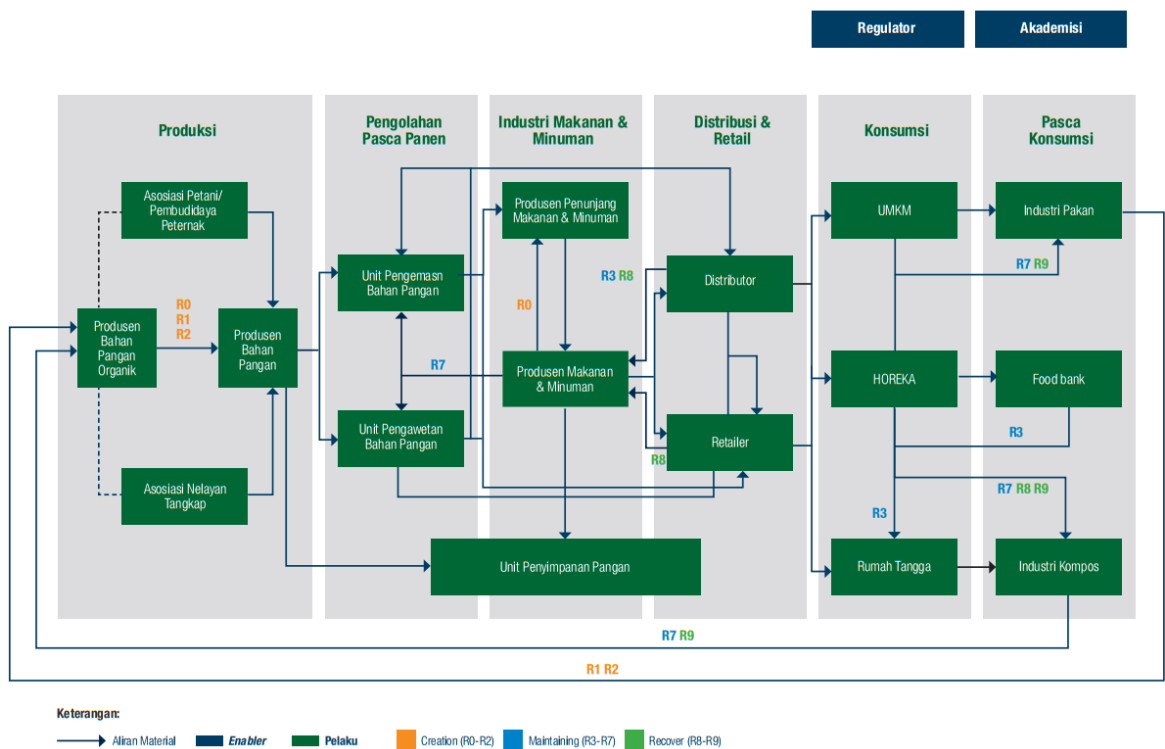


Sumber : Peta Jalan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

Dalam ekosistem ekonomi sirkular sektor pangan, rantai nilai dapat dikategorikan ke dalam enam kelompok utama, yaitu produksi, pengolahan pascapanen, pengolahan makanan dan minuman, ritel serta distribusi, konsumsi, dan pasca konsumsi. Setiap aktor dalam rantai nilai ini memiliki peluang untuk saling mendukung dan memanfaatkan sumber daya secara lebih optimal dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Penerapan ekonomi sirkular di sektor pangan mencakup praktik pertanian berkelanjutan, peningkatan efisiensi sumber daya dalam proses produksi, serta pengurangan timbulan sisa dan limbah pangan.

Secara prinsip, penerapan strategi ekonomi sirkular yang berfokus pada pengurangan penggunaan sumber daya (R0, R1, R2) dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pelaku produksi dan industri pengolahan makanan serta minuman. Sementara itu, strategi untuk memperpanjang masa pakai produk dan material (R3, R4, R5, R6, R7), serta proses daur ulang dan pemanfaatan limbah produksi serta konsumsi (R8, R9), lebih relevan bagi sektor konsumsi dan pasca konsumsi. Namun, beberapa prinsip dalam pendekatan 9R, seperti perbaikan (R4), pemugaran (R5), dan remanufaktur (R6), kurang dapat diterapkan dalam sektor pangan karena karakteristik produk pangan yang memiliki umur simpan terbatas. Oleh karena itu, strategi tersebut tidak efektif jika diterapkan pada produk pangan. Praktik ekonomi sirkular berbasis 9R yang telah diterapkan di sektor pangan dapat dilihat lebih lanjut pada ilustrasi berikut.

Gambar II-40 Ekosistem Ekonomi Sirkular Sektor Pangan



Sumber : Peta Jalan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045, Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2024

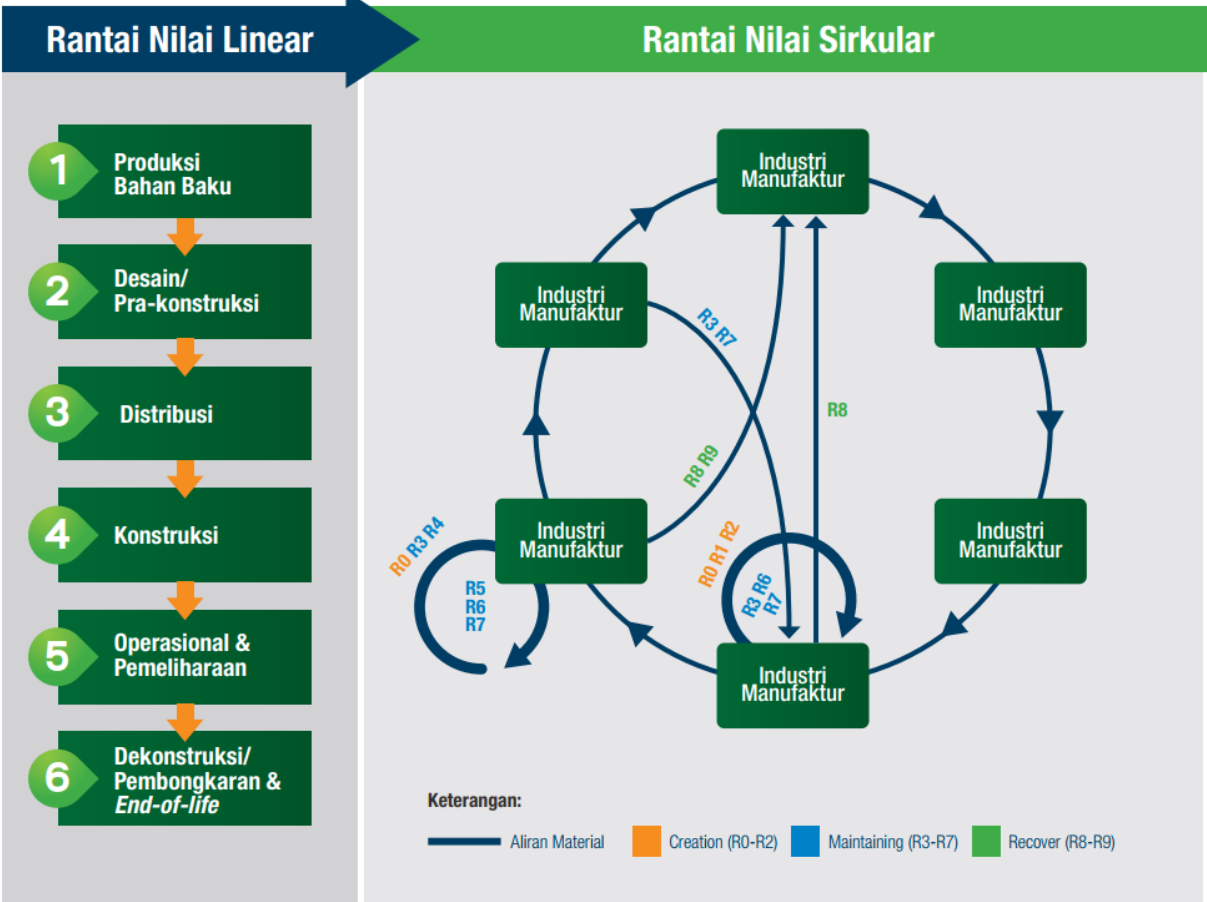
Pada ekosistem ekonomi sirkular sektor pangan di atas, area-area yang dapat menjadi area intervensi untuk transformasi ekonomi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pada areal Produksi, areal Pengolahan Pascapanen, areal Industri Makanan dan Minuman, areal konsumsi dan areal pasca Konsumsi.

Ekonomi Sirkular Sektor Konstruksi

Dalam ekonomi sirkular sektor konstruksi, rantai proses awal yang sebelumnya bersifat linear mencakup produksi bahan baku, perancangan atau pra-konstruksi, distribusi material ke lokasi proyek, proses pembangunan, operasional serta pemeliharaan bangunan, hingga tahap dekonstruksi atau pembongkaran saat bangunan mencapai akhir masa pakainya. Meskipun saat ini limbah konstruksi sebagian besar sudah ditampung oleh pihak tertentu, data mengenai pemanfaatan kembali limbah tersebut masih terbatas.

Pemangku kepentingan dalam sektor konstruksi mencakup produsen bahan baku, konsultan desain, distributor material, kontraktor, manajemen operasional dan pemeliharaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas dekonstruksi dan pengolahan limbah. Seluruh pemangku kepentingan ini memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman dan persepsi di antara mereka untuk mendorong implementasi ekonomi sirkular di sektor konstruksi.

Gambar II-41 Komparasi Rantai Nilai Linear dan Sirkular Sektor Konstruksi

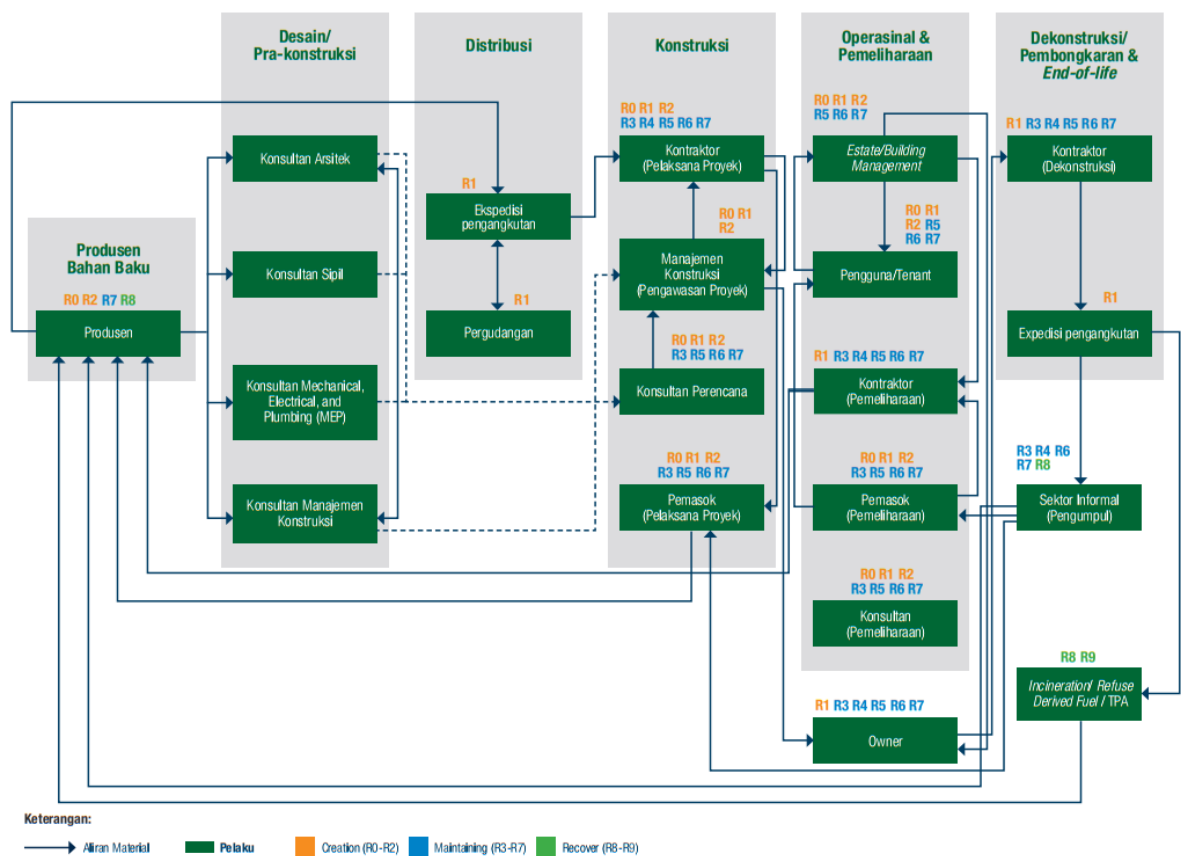


Sumber : Peta Jalan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045, Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2024

Dalam ekosistem ekonomi sirkular, pelaku dalam rantai nilai sektor konstruksi dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori utama: produksi bahan baku, desain atau pra-konstruksi, distribusi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta dekonstruksi atau pembongkaran pada akhir siklus hidup bangunan.

Dalam kondisi ideal, penerapan ekonomi sirkular di sektor konstruksi mencakup pengurangan penggunaan sumber daya dan material (R0, R1, R2) serta perpanjangan masa pakai produk dan material (R3, R4, R5, R6, R7) pada tahap konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Prinsip ekonomi sirkular mendorong para pelaku industri untuk menghindari penggunaan bahan yang sulit didaur ulang, sulit digunakan kembali, atau berpotensi berdampak negatif terhadap kesehatan. Selain itu, dalam setiap proses perbaikan dan renovasi, pemanfaatan kembali komponen seperti pintu, jendela, perlengkapan pipa, kayu, lantai, pagar, serta elemen bangunan lainnya perlu menjadi kebiasaan guna memastikan produk memiliki masa pakai lebih lama sebelum akhirnya dibuang.

Gambar II-42 Ekosistem Ekonomi Sirkular Sektor Konstruksi



Sumber : Peta Jalan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

Pada ekosistem ekonomi sirkular sektor konstruksi diatas, area-area yang dapat menjadi area intervensi untuk transformasi ekonomi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pada areal Desain/Pra-Konstruksi, Areal Konstruksi, Areal Operasional & Pemeliharaan, dan Areal Dekonstruksi/Pembongkaran & End-of-Life.

II.3.4 Transformasi Digital

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dengan nama *ICT Development Index* (ICT-DI). Indeks Pembangunan TIK merupakan ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, Indeks Pembangunan TIK mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK.

II.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto

PMTB atau Pembentukan Modal Tetap Bruto adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB merupakan salah satu komponen penting

dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran

Tabel II-81 Pembentukan Modal Tetap Bruto dalam PDRB Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	1.875,15	2.015,26	2.246,15	2.486,97	2.769,71
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	1.274,51	1.300,60	1.379,61	1.469,61	1.579,12
Distribusi (%)	28,56	28,28	26,61	27,13	27,97
Laju (%)	(4,96)	2,05	6,08	6,2	7,45

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 (Diolah)

Berdasarkan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tahun 2020–2024, terlihat adanya tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Nilai PDRB ADHB sektor PMTB meningkat secara konsisten dari Rp1.875,15 miliar pada 2020 menjadi Rp2.769,71 miliar pada 2024, yang mencerminkan peningkatan nilai investasi fisik di daerah ini. Pertumbuhan serupa juga terjadi pada PDRB ADHK, dari Rp1.274,51 miliar pada 2020 menjadi Rp1.579,12 miliar pada 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi riil tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

Dari sisi pertumbuhan, PMTB sempat mengalami kontraksi pada 2020 dengan laju -4,96% akibat dampak pandemi, namun segera pulih pada tahun-tahun berikutnya dengan laju yang positif dan semakin menguat, mencapai 7,45% pada 2024. Hal ini mencerminkan pulihnya aktivitas investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Sementara itu, kontribusi PMTB terhadap PDRB HSS menunjukkan fluktuasi, dari 28,56% pada 2020 turun ke 26,61% pada 2022, lalu kembali meningkat menjadi 27,97% pada 2024, yang menandakan peran penting sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kenaikan PMTB yang signifikan pasca-pandemi menunjukkan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur, pembelian peralatan modal, dan investasi lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi di Hulu Sungai Selatan. Dengan tren pertumbuhan yang terus menguat, PMTB menjadi salah satu indikator penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah, sekaligus mencerminkan iklim investasi yang semakin membaik. Ke depan, penguatan kebijakan untuk menarik investasi, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mendorong peran sektor swasta akan menjadi kunci dalam menjaga momentum positif ini.

Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan

kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan produk yang dapat dipasarkan ke luar wilayah, baik ke daerah lain maupun ke luar negeri. Kinerja ekspor menjadi indikator daya saing ekonomi daerah, karena peningkatan ekspor biasanya menunjukkan berkembangnya sektor produksi dan keterlibatan daerah dalam rantai pasok yang lebih luas. Sebaliknya, neraca ekspor yang negatif dapat mengindikasikan ketergantungan yang lebih besar pada barang dan jasa dari luar daerah serta perlunya peningkatan kapasitas produksi lokal.

Jenis Pengeluaran		2020	2021	2022	2023**	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	ADHB	4.677,30	4.865,29	5.551,21	6.106,70	6.646,14
	ADHK 2010	3.308,17	3.350,50	3.536,60	3.730,77	3.938,83
Pengeluaran Konsumsi LMPRT	ADHB	121,04	127,47	144,05	166,30	192,73
	ADHK 2010	77,95	80,19	87,07	95,15	108,15
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	ADHB	1.361,39	1.419,61	1.446,90	1.612,72	1.736,34
	ADHK 2010	816,04	832,69	811,95	871,54	872,81
Pembentukan Modal Tetap Bruto	ADHB	1.875,15	2.015,26	2.246,15	2.486,97	2.769,71
	ADHK 2010	1.274,51	1.300,60	1.379,61	1.469,61	1.579,12
Perubahan Inventori	ADHB	0,24	1,93	(21,11)	9,65	(11,43)
	ADHK 2010	0,17	1,31	(12,89)	5,54	(6,55)
Net Ekspor Barang dan Jasa	ADHB	(1.470,19)	(1.308,85)	(925,19)	(1.216,88)	(1.432,15)
	ADHK 2010	(826,61)	(720,38)	(762,57)	(867,09)	(913,60)
PDRB	ADHB	6.564,93	7.125,71	8.442,00	9.165,46	9.901,34
	ADHK 2010	4.650,23	4.844,91	5.039,77	5.305,52	5.578,76

Berdasarkan data Net Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tahun 2020–2024, terlihat bahwa nilai ekspor bersih secara konsisten berada pada posisi negatif. Pada harga berlaku (ADHB), nilai ekspor bersih tercatat sebesar -Rp1.470,19 miliar pada 2020 dan sempat membaik hingga -Rp925,19 miliar pada 2022, namun kembali melebar menjadi -Rp1.432,15 miliar pada 2024. Pola serupa juga terjadi pada harga konstan (ADHK), dari -Rp826,61 miliar pada 2020 menjadi -Rp913,60 miliar pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa impor barang dan jasa yang masuk ke HSS masih lebih besar dibandingkan ekspor yang dihasilkan daerah.

Meskipun demikian, perbaikan sempat terlihat pada tahun 2022 yang menunjukkan adanya peningkatan produksi dan daya saing lokal. Namun, penurunan kembali pada 2023–2024 mengindikasikan perlunya strategi yang lebih kuat dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor berorientasi ekspor seperti industri pengolahan, pertanian bernilai tambah, serta perdagangan antarwilayah. Optimalisasi potensi lokal, dukungan terhadap UMKM, serta penguatan infrastruktur logistik menjadi kunci untuk menekan defisit ekspor bersih dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Hulu Sungai Selatan.

II.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Sebagai salah satu faktor utama penunjang pengembangan perekonomian daerah, fasilitas listrik di suatu wilayah menjadi titik vital bagi pemberdayaan aktivitas ekonomi regional. Perkembangan fasilitas listrik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup signifikan dimana terlihat pada banyaknya pelanggan listrik yang terus mengalami peningkatan. Baik pelanggan rumah tangga, usaha, industri, maupun umum terjadi kenaikan yang cukup menjanjikan dimana persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan pada tahun 2021 hampir mencapai 100 persen. Antara daerah perkotaan dan perdesaan akses penerangan listrik sudah cukup baik terlihat pada fasilitas penerangan, dimana pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan pada daerah perkotaan dan perdesaan hampir mencapai 100 persen.

Fasilitas akomodasi berupa perhotelan merupakan salah satu sisi strategis pengembangan perekonomian dari sisi jasa yang mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi terutama pada daerah perkotaan. Tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sebesar 57,63 persen, hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,42 poin dibanding TPK bulan Desember 2020 yang sebesar 51,21 persen.

Sebelum tahun 2011, air minum layak adalah sumber air untuk minum berupa air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m. Kemudian sebelum tahun 2019, air minum layak adalah sumber air untuk minum, mandi, dan keperluan sehari-hari yang meliputi air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m.

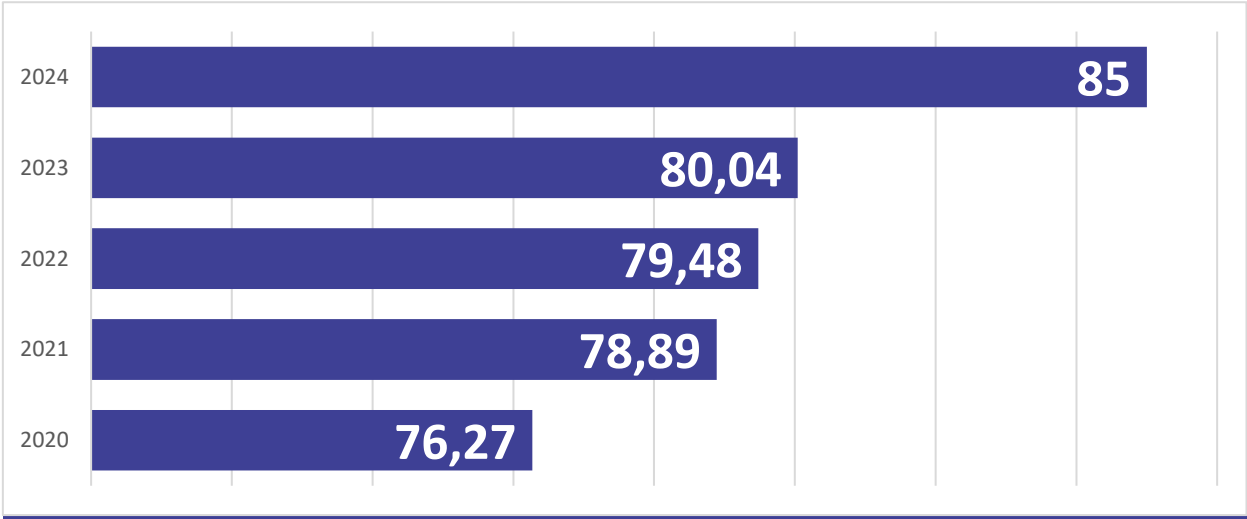
Mulai tahun 2019 kembali mengalami perubahan definisi, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak

jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Perbedaan klasifikasi dari sebelumnya adalah tidak lagi memasukkan karakteristik ke tempat pembuangan limbah/kotoran/ tinja terdekat. Berdasarkan data Susenas 2021 persentase rumah yang mempunyai akses air minum layak mencapai 72,32 persen. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang mempunyai akses air minum layak di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 76,50 persen dan 70,52 persen.

Berikut disajikan data perkembangan rasio rumah tangga yang memiliki akses sarana air bersih yang layak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 – 2024 :

Gambar II-43 Rasio Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih Layak Tahun 2020-2024

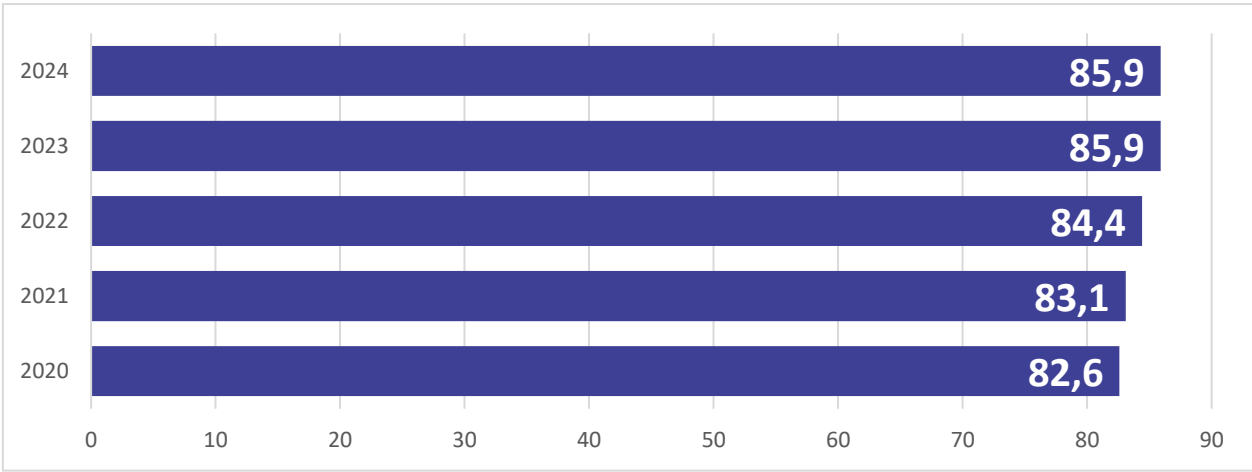


Sumber : Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan pada rasio rumah tangga yang memiliki akses sarana air bersih yang layak. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berusaha agar masyarakat dapat mendapatkan kebutuhan dasar yang paling utama secara layak yaitu ketersediaan air bersih. Diharapkan pada tahun berikutnya dapat mencapai 100% sesuai dengan target nasional terkait pemenuhan akses sarana air bersih yang layak.

Selain air minum layak, sanitasi layak juga menjadi perhatian serta fokus oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut merupakan perkembangan rasio Rumah Tangga yang memiliki akses sarana sanitasi yang layak :

Gambar II-44 Rasio Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Yang Layak Tahun 2020-202



Sumber : Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

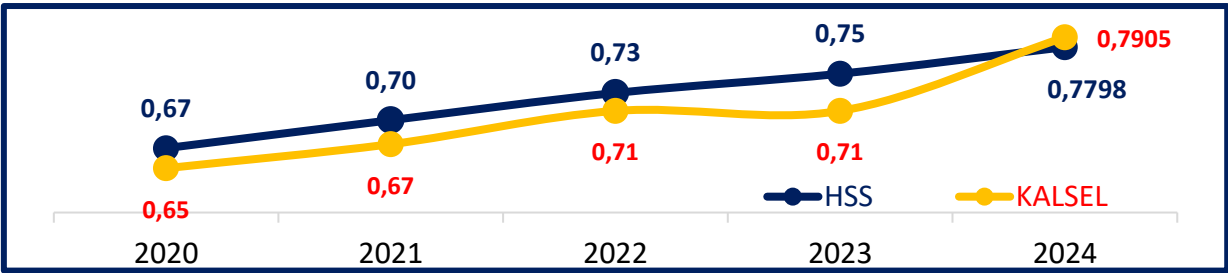
Di lihat dari perkembangannya setiap tahun selalu terjadi peningkatan pada sisi akses sanitasi layak. Namun apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2024 masih terdapat gap untuk dapat memenuhi target 90% akses sanitasi layak pada rumah tangga tercapai di tahun 2024.

Persentase Desa Mandiri

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa, dengan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat terwujud masyarakat desa yang berdaya dari aspek kualitas SDM, berdaya dari aspek ekonomi dan berdaya dari aspek lingkungan yang berkualitas. Dengan 3 aspek tersebut terwujud dapat tumbuh kemandirian masyarakat desa dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa bertumpu pada beberapa tujuan yaitu: 1). Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, 2). Mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi desa, 3). meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. 4). meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan 5). Meningkatkan peran serta perempuan kegiatan usaha ekonomi profuktif dan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

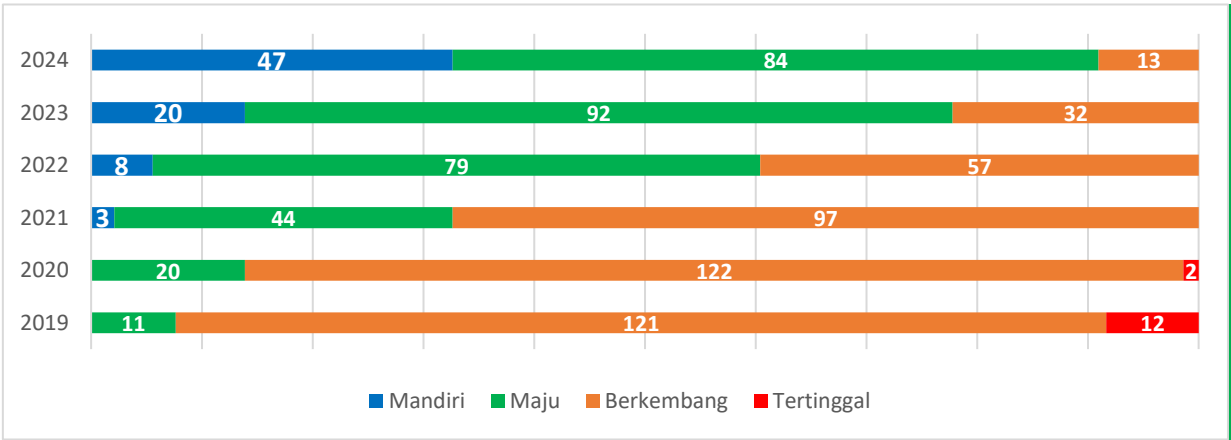
Gambar II-45 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Capaian RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

IDM Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 ke 2024, menunjukkan tren pembangunan desa yang positif. Kenaikan IDM Hulu Sungai Selatan terjadi di semua tahun, meskipun lajunya bervariasi. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2021 (0,03) dan terendah di tahun 2020 (0,02). Secara keseluruhan, IDM Hulu Sungai Selatan selalu lebih tinggi dibandingkan IDM Kalimantan Selatan dalam periode 2020-2023. Selisih IDM Hulu Sungai Selatan dan Kalimantan Selatan melebar di tahun 2021 dan 2022, kemudian sedikit menyempit di tahun 2023. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja pembangunan desa yang lebih baik dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan dalam periode 2020-2023. Namun pada tahun 2024 IDM Provinsi Kalimantan Selatan melonjak ke angka 0,7905 hal ini menandakan terdapat peningkatan status desa-desa secara signifikan di wilayah Kalimantan Selatan secara umum.

Gambar II-46 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019-2024



Sumber : Indeks Desa Membangun, Data Diolah 2025

II.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

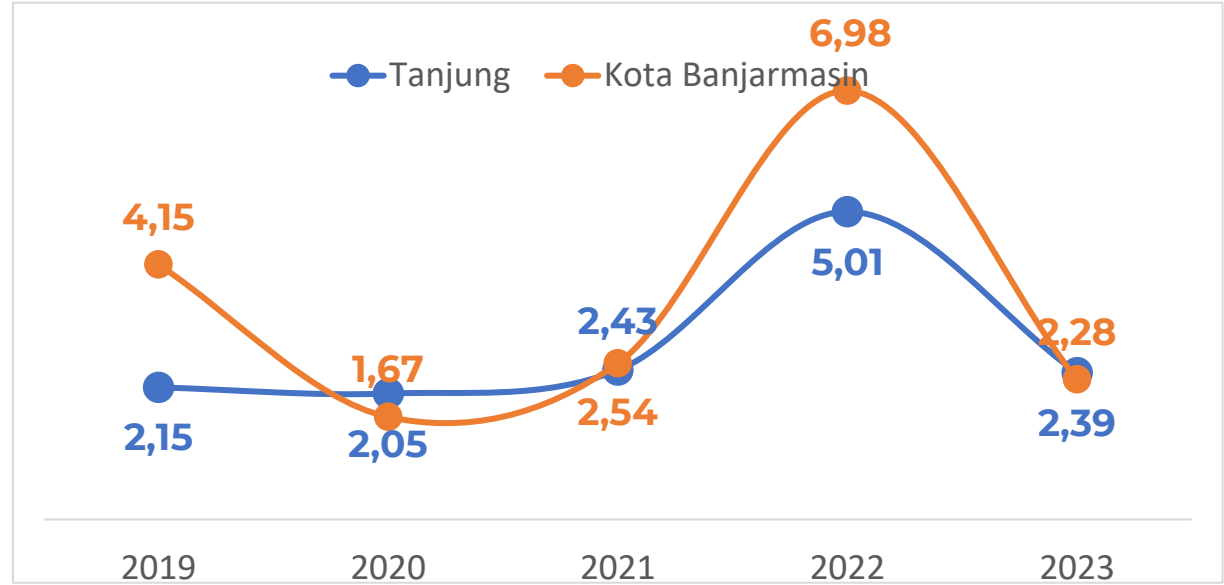
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Tingkat Inflasi

Kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu terhadap inflasi di Kota Banjarmasin. Berkaitan dengan mekanisme

pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dalam kegiatan perekonomian di Banjarmasin dan Kota Tanjung dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar II-47 Laju Inflasi di Banjarmasin, 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, pada Desember 2021 Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi tahun kalender adalah rekreasi, olahraga dan budaya yaitu 6,97 persen. Sementara itu terdapat kelompok pengeluaran yang terjadi deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,04 persen dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,22 persen.

II.4 Aspek Pelayanan Umum

II.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator yang mengukur tingkat keberhasilan reformasi birokrasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*proses bisnis*) dan sumber daya manusia (aparatur), maka dilakukan penilaian melalui indeks reformasi birokrasi (RB). Nilai indeks reformasi birokrasi menjadi dasar pengelompokan

kondisi reformasi daerah ke dalam kategori Istimewa (90– 100), Memuaskan (80–90), Sangat Baik (70–80), Baik (60–70), Cukup (50–60), Kurang (30–50), dan sangat kurang (0-30).

Pada tahun 2020, IRB sebesar 66,22 menunjukkan bahwa reformasi birokrasi masih dalam tahap menengah. Ini mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan tata kelola, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi. Pada tahun 2021, IRB meningkat menjadi 66,81, dengan kenaikan sebesar 0,59 poin. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan kecil dalam reformasi birokrasi, meskipun masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022, IRB meningkat menjadi 70,45, dengan kenaikan sebesar 3,64 poin. Ini menunjukkan percepatan dalam reformasi birokrasi, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Pada tahun 2023, IRB meningkat signifikan menjadi 80,11, dengan kenaikan sebesar 9,66 poin. Ini mencerminkan keberhasilan program-program reformasi birokrasi yang lebih intensif, seperti digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan penegakan integritas. Pada tahun 2024, IRB meningkat lagi menjadi 91,25, dengan kenaikan sebesar 11,14 poin. Ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah mencapai tingkat yang sangat baik, dengan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Tabel II-82 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

Reformasi Birokrasi	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	66,22	66,81	70,45	80,11	91,25

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana reformasi hukum telah diimplementasikan di suatu daerah atau lembaga. IRH mengidentifikasi, memetakan, dan mengevaluasi berbagai regulasi, termasuk regulasi baru, deregulasi, dan penguatan sistem regulasi nasional. Dengan kata lain, IRH memberikan gambaran tentang efektivitas dan dampak dari upaya reformasi hukum dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan transparansi dalam sistem pemerintahan

	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	55.75 (CC)	98,62 (AA)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan perkembangan yang signifikan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil evaluasi

indeks SPBE, terjadi peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yaitu dari skor 2,35 pada tahun 2022 menjadi 3,51 pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi 4,09 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin matangnya implementasi digitalisasi pemerintahan di berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara domain, capaian tertinggi dicapai pada Domain Kebijakan SPBE, khususnya dalam indikator kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, yang meningkat tajam dari skor 2,30 pada tahun 2022 menjadi 4,80 pada tahun 2024. Kemajuan juga tampak pada Domain Tata Kelola SPBE, yang mengalami peningkatan signifikan dari 1,40 pada tahun 2022 menjadi 3,60 pada tahun 2024, terutama pada aspek perencanaan strategis dan teknologi informasi dan komunikasi. Poin perencanaan strategis meningkat dari 1,25 menjadi 3,25, sementara aspek TIK melonjak dari 1,75 menjadi 4,00, menunjukkan akselerasi dalam penggunaan teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan.

Pada Domain Manajemen SPBE, skor juga menunjukkan pertumbuhan positif dari 1,00 pada tahun 2022 menjadi 3,09 pada tahun 2024, dengan indikator penerapan manajemen SPBE dan audit TIK yang masing-masing meningkat menjadi 3,13 dan 3,00 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa manajemen internal SPBE semakin sistematis dan terukur. Di sisi lain, Domain Layanan SPBE yang meliputi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik, menunjukkan capaian paling stabil dan tinggi sejak awal, masing-masing meningkat dari 3,40 dan 3,33 pada tahun 2022 menjadi 4,30 dan 4,83 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi digital telah memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Secara keseluruhan, peningkatan indeks SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 2022–2024 menjadi cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan. Capaian ini sekaligus menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif berbasis teknologi informasi.

Tabel II-83 Indeks SPBE Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024			
SPBE	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2.35	3.51	4.09
Domain Kebijakan SPBE	2.30	3.60	4.80
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2.30	3.60	4.80
Domain Tata Kelola SPBE	1.40	3.30	3.60
Perencanaan Strategis SPBE	1.25	2.25	3.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.75	4.75	4.00
Penyelenggara SPBE	1.00	2.50	3.50

SPBE	2022	2023	2024
Domain Manajemen SPBE	1.00	2.00	3.09
Penerapan Manajemen SPBE	1.00	2.38	3.13
Audit TIK	1.00	1.00	3.00
Domain Layanan SPBE	3.37	4.14	4.51
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.40	3.90	4.30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.33	4.50	4.83

Sumber : Laporan Hasil SPBE KemenpanRB Tahun 2022-2024

Indeks Pelayanan Publik

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. IPP Kabupaten pertama kali tercatat pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 4,19 dan masuk dalam kategori “B” (Baik). Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian IPP sebesar 4,54, yang mengantarkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke kategori “A-” (Sangat Baik). Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian menjadi 3,67 dan kembali masuk dalam kategori “B”, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan publik di seluruh unit pelayanan. Meskipun demikian, pada tahun 2024, capaian IPP Kabupaten berhasil kembali meningkat secara signifikan menjadi 4,46, dan kembali memperoleh kategori “A” (Sangat Baik). Tren ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum telah mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, meskipun masih terdapat fluktuasi yang mencerminkan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, serta konsistensi dalam pelaksanaan standar pelayanan. Secara keseluruhan, capaian IPP Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam lima tahun terakhir mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel II-84 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
IPP Dinas PMPTSP	4,01	4,23	4,6	-	-
IPP Dinas Sosial	3,98	4,14	-	3,15	3,87
IPP RSUD	-	-	-	4,85	4,87
IPP Kecamatan	-	-	-	3,01	-
IPP Disdukcapil	-	-	4,47	-	4,65
IPP Kabupaten	-	4,19	4,54	3,67	4,46
Kategori	B	A-	A	B	A

Sumber : Kementerian PAN RB Tahun 2025

Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah skor yang mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah, berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tabel II-85 Skor Survei Penilaian Integritas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Komponen Internal	85,44	87,51	89,46	91,42
Komponen Eksternal	82,37	84,70	84,32	80,04
Komponen Eksper	79,50	84,58	78,66	77,75
SPI	79,80	81,82	81,14	79,06

Sumber : *jaga.id* diakses pada tanggal 21 April 2025

Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tahun 2021–2024, terlihat adanya dinamika pada skor integritas yang mencerminkan persepsi dan pengalaman terkait praktik pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Nilai SPI secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 79,80 pada 2021 menjadi 81,82 pada 2022, namun kemudian sedikit menurun menjadi 81,14 pada 2023 dan turun lebih lanjut ke 79,06 pada 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi persepsi integritas, terutama dari sisi eksternal dan penilaian pakar.

Dari segi komponen, internal menunjukkan tren yang konsisten meningkat dari 85,44 pada 2021 menjadi 91,42 pada 2024, menandakan adanya penguatan integritas di lingkungan aparatur pemerintah daerah melalui perbaikan sistem pengendalian internal dan peningkatan kesadaran anti-korupsi. Namun, komponen eksternal yang mencerminkan pengalaman masyarakat dan pemangku kepentingan luar terhadap pelayanan publik, justru mengalami penurunan signifikan pada 2024 menjadi 80,04 dari sebelumnya 84,32 di 2023. Sementara itu, komponen eksper juga menurun dari 84,58 pada 2022 menjadi 77,75 pada 2024, menunjukkan adanya kekhawatiran atau persepsi negatif dari para pakar terkait efektivitas upaya pencegahan korupsi di HSS.

Secara keseluruhan, meskipun aspek internal menunjukkan perkembangan positif, penurunan skor pada komponen eksternal dan eksper mengindikasikan perlunya penguatan transparansi, akuntabilitas pelayanan publik, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Fokus perbaikan pada interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta penegakan disiplin dan etika aparatur, menjadi kunci dalam meningkatkan kembali skor SPI dan membangun kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan di Hulu Sungai Selatan.

II.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Subtansial

Indeks Rasa Aman

Kondisi keamanan pada suatu daerah merupakan salah satu faktor mempengaruhi tingkat investasi pada daerah tersebut. Para investor tentunya menginginkan investasi yang aman dan potensial untuk mengembangkan usaha. Kondisi keamanan yang baik membawa dampak positif lainnya bagi investasi, seperti meningkatkan kepercayaan investor terhadap pemerintah dan meningkatkan stabilitas ekonomi daerah. Hal ini dapat mendorong para investor untuk berinvestasi jangka panjang di daerah tersebut.

Sebaliknya, jika kondisi keamanan pada suatu daerah buruk, investor akan ragu untuk berinvestasi di daerah tersebut karena takut kehilangan modal mereka akibat tindakan kriminal atau risiko lainnya. Hal ini dapat membuat daerah tersebut kehilangan potensi investasi dan berkembang lebih lambat dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki tingkat keamanan yang lebih baik.

Tabel II-86 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Sektor Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Padang Batung	16	16	22	19	5
Loksado	8	8	9	12	5
Telaga Langsat	10	2	1	9	4
Angkinang	16	10	17	21	6
Kandangan	35	36	38	45	21
Sungai Raya	15	18	12	17	4
Simpur	9	1	9	8	7
Kalumpang	3	4	3	3	3
Daha Selatan	31	16	22	26	18
Daha Barat	-	-	-	-	-
Daha Utara	17	11	13	15	3
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	160	122	243	175	42

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

II.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Aspek daya saing daerah memberikan gambaran umum mengenai kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia. Daya saing daerah dapat diukur melalui pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran

daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

IDSD diarahkan menjadi data dasar yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan peningkatan daya saing daerah. Adapun kalau dilihat secara rinci dalam nilai pilar-pilar pembentuk nilai indeks, maka akan terlihat beberapa pilar yang sudah dominan dan tinggi nilainya, namun juga ada beberapa pilar yang masih rendah dan di bawah dari nilai indeks daerah. Gambaran umum detail nilai pilar dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Tabel II-87 Pilar Pembentuk IDSD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024			
Provinsi Kalimantan Selatan			
Kabupaten Hulu Sungai Selatan			
Skor IDSD 3,53			
Pilar 1	Institusi	4,69	Peluang & Modal
Pilar 2	Infrastruktur	3,16	Kendala & Kelemahan
Pilar 3	Adopsi TIK	4,54	Peluang & Modal
Pilar 4	Stabilitas Ekonomi	3,94	Peluang & Modal
Pilar 5	Kesehatan	3,50	Peluang & Modal
Pilar 6	Keterampilan	4,19	Peluang & Modal
Pilar 7	Pasar Produk	3,97	Peluang & Modal
Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja	3,71	Peluang & Modal
Pilar 9	Sistem Keuangan	1,88	Kendala & Kelemahan
Pilar 10	Ukuran Pasar	3,82	Peluang & Modal
Pilar 11	Dinamisme Bisnis	3,63	Peluang & Modal
Pilar 12	Kapabilitas Inovasi	1,35	Kendala & Kelemahan

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Berdasarkan hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tahun 2024, skor yang diperoleh adalah 3,53, yang menempatkan daerah ini pada kategori menengah dalam hal daya saing. Analisis per pilar menunjukkan bahwa sebagian besar indikator berada pada kategori “Peluang dan Modal”, mencerminkan potensi yang cukup besar untuk mendorong daya saing daerah jika didukung kebijakan yang tepat. Pilar-pilar yang menjadi kekuatan utama di antaranya adalah Institusi (4,69), Adopsi TIK (4,54), dan Keterampilan (4,19), yang mengindikasikan tata kelola pemerintahan yang baik, pemanfaatan teknologi informasi yang cukup tinggi, serta kualitas sumber daya manusia yang mendukung peningkatan produktivitas.

Selain itu, pilar Stabilitas Ekonomi (3,94), Pasar Produk (3,97), Pasar Tenaga Kerja (3,71), dan Dinamisme Bisnis (3,63) juga menunjukkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun demikian, hasil IDSD juga menyoroti beberapa kendala utama yang menjadi kelemahan daerah, yakni Sistem

Keuangan (1,88) dan Kapabilitas Inovasi (1,35) yang berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan terbatasnya akses pembiayaan bagi dunia usaha serta rendahnya kemampuan daerah dalam menghasilkan inovasi dan penelitian yang dapat mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan. Pilar Infrastruktur (3,16) juga masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat untuk menunjang konektivitas dan mendukung iklim investasi.

Gambar II-48 IDSD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024

Kategori	2022	2023	2024
IDSD	2,95	3,07	3,53
Pilar 1- Institusi	4,75	4,69	4,69
Pilar 2 - Infrastruktur	1,82	2,23	3,16
Pilar 3 - Adopsi TIK	3,14	4,29	4,54
Pilar 4 - Stabilitas Ekonomi	2,89	3,59	3,94
Pilar 5 - Kesehatan	3,54	3,58	3,50
Pilar 6 - Keterampilan	2,96	3,27	4,19
Pilar 7 - Pasar Produk	5	3,01	3,97
Pilar 8 - Pasar Tenaga Kerja	3,27	3,51	3,71
Pilar 9 - Sistem Keuangan	2,04	0,84	1,88
Pilar 10 - Ukuran Pasar	0,32	3,8	3,82
Pilar 11 - Dinamisme Bisnis	5	3,32	3,63
Pilar 12 - Kapabilitas Inovasi	0,64	0,68	1,35

Apabila dilihat dari perkembangan setiap tahunnya, Berdasarkan perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tahun 2022–2024, terlihat tren yang positif dengan skor yang meningkat dari 2,95 pada 2022 menjadi 3,07 pada 2023, dan mencapai 3,53 pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap dalam berbagai aspek yang memengaruhi daya saing daerah. Meskipun masih berada pada kategori menengah, kenaikan skor ini mencerminkan penguatan fundamental ekonomi daerah serta perbaikan tata kelola dan kapasitas pembangunan.

Dari sisi pilar, terdapat kemajuan signifikan pada Infrastruktur, yang naik dari 1,82 pada 2022 menjadi 3,16 pada 2024, menandakan adanya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang lebih baik. Adopsi TIK juga mengalami peningkatan mencolok dari 3,14 pada 2022 menjadi 4,54 pada 2024, menunjukkan kemajuan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Pilar Keterampilan melonjak dari 2,96 menjadi 4,19, mencerminkan perbaikan kualitas sumber daya manusia di daerah. Selain itu, Stabilitas Ekonomi dan Pasar Produk juga mencatat peningkatan yang konsisten, masing-masing mencapai 3,94 dan 3,97 pada 2024, yang memperlihatkan membaiknya kondisi ekonomi makro dan iklim usaha lokal.

Namun demikian, beberapa pilar masih menunjukkan tantangan signifikan. Sistem Keuangan mengalami fluktuasi, sempat turun drastis pada 2023 (0,84) sebelum membaik ke 1,88 pada 2024, tetapi tetap berada pada tingkat rendah yang mengindikasikan terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Pilar Kapabilitas Inovasi meski meningkat menjadi 1,35 pada 2024, masih sangat rendah, menandakan perlunya dorongan besar terhadap riset, teknologi, dan ekosistem inovasi lokal. Pilar Kesehatan juga relatif stagnan, bergerak di kisaran 3,50–3,58, yang menandakan pentingnya peningkatan layanan kesehatan sebagai penunjang daya saing jangka panjang.

Secara keseluruhan, kenaikan IDSD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencerminkan kemajuan yang cukup pesat, terutama pada infrastruktur, keterampilan SDM, dan adopsi teknologi. Namun, fokus penguatan ke depan perlu diarahkan pada pengembangan sistem keuangan yang inklusif dan penciptaan ekosistem inovasi yang lebih dinamis agar daya saing daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

II.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Pada aspek pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang utama pembangunan seperti bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan, dan sebagainya yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, dan sebagainya yang menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

A. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan memang sudah menunjukkan adanya perbaikan di setiap periodenya, namun masih perlu adanya peningkatan di beberapa sektor.

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia karena dengan meningkatnya pendidikan maka seseorang dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

menyerap kemajuan teknologi. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas, maka lulusan pada berbagai jenjang pendidikan diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja yang selanjutnya peningkatan produktivitas tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Tabel II-88 Capaian IKK Urusan Pendidikan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99.88	100	103.477
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	104.301
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	100	104.931
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100

Sumber : Bagian Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Fasilitas dasar pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan lebih dari cukup dengan ketersediaan sekolah maupun kuantitas tenaga pengajar seperti pada tabel berikut ini:

Tabel II-89 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

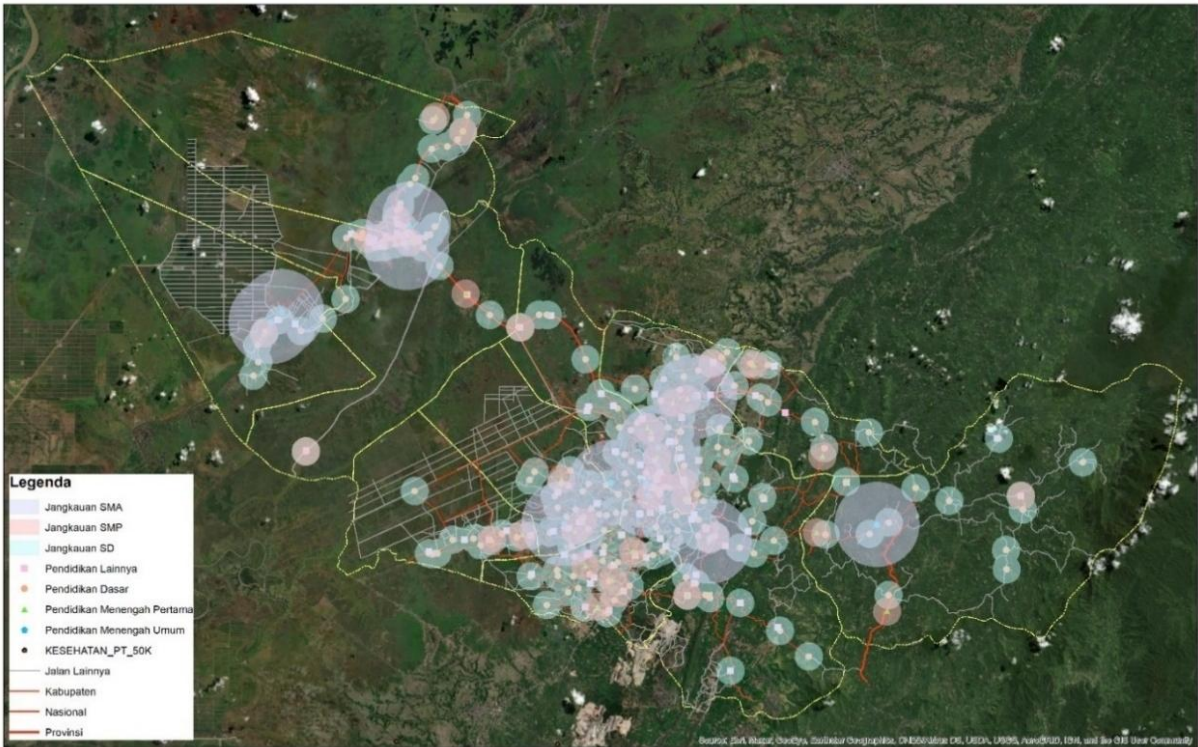
Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid terhadap Guru
TK Negeri	4	27	207	7,67
TK Swasta	156	501	3.976	7,94
Raudhatul Atfhal (RA)	37	168	1.657	9,86
SD Negeri	239	1.366	17.201	12,59
SD Swasta	3	70	649	9,27
MI Negeri	20	335	3.476	10,38
MI Swasta	22	312	2.024	6,49
SMP Negeri	33	532	4.824	9,07
SMP Swasta	4	84	605	7,20
MTs Negeri	12	355	3.457	9,74
MTs Swasta	13	150	1.097	7,31
SMA Negeri	7	222	2.799	12,61
SMA Swasta	2	22	195	8,86
MA Negeri	3	136	1.249	9,18
MA Swasta	10	123	816	6,63
SMK Negeri	4	138	2.087	15,12
SMK Swasta	1	12	150	12,50

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2025 (diolah)

Jika melihat analisis berikutnya berupa Rasio Murid terhadap Guru, maka angka ini akan menggambarkan tingkat perbandingan murid terhadap guru sebagai asumsi dasar kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rasio murid terhadap guru maka beban mengajar guru semakin berat sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga sebaliknya. Namun analisis awal ini harus juga diperhatikan terkait distribusi penempatan hingga kualitas guru yang mengajar apakah sudah memenuhi standar kualifikasi atau

belum. Namun dalam persebaran guru tetap perlu diperhatikan sekaligus kualitas tenaga pendidik dan kependidikannya agar kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dapat terealisasi.

Gambar II-49 Peta Jangkauan Pendidikan SD-SMA di Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

2. Kesehatan

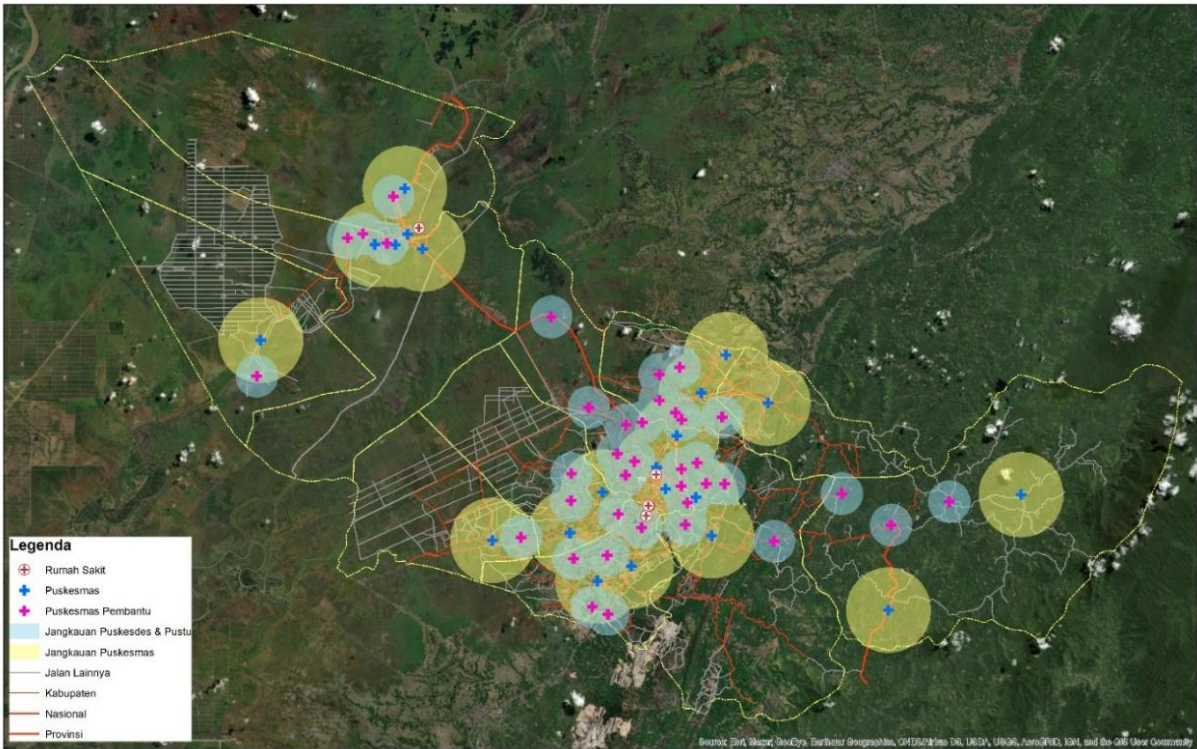
Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki multiplier effect pada program-program pembangunan ke depannya baik secara langsung maupun tidak langsung

Tabel II-90 Capaian IKK Urusan Kesehatan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	2,08	2.141	1.841
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	60	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,41	90.34	96.80
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,45	98.27	99.72
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,51	96.81	98,03
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,09	94.15	91,46
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,78	100	96,89
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80,37	87.62	93,62

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,65	98.20	99,36
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,83	95.56	98,02
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	99,13	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	99,66	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	95,34	99.38	100

Gambar II-50 Peta Jangkauan Layanan Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang harus ditangani sesuai kewenangan Kabupaten meliputi jalan, sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan, jasa konstruksi, dan penataan ruang.

Tabel II-91 Capaian IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	81.2432	0	25.844
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0	0

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	81.0884	82.0067077	82.38
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	94,65	97.765383	83.46
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,44	87.4449339	79.90
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	88,42	67,39	67,47
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan juga sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan uratnadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jalan dapat diklasifikasikan menjadi Klasifikasi jalan menurut fungsi dan klasifikasi jalan menurut wewenang.

Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Jumlah ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian berdasarkan pengembangan wilayah strategis ada beberapa ruas jalan kabupaten yang kemudian menjadi jalan nasional dan jalan provinsi. Sementara kondisi jalan terus mengalami perbaikan dan peningkatan hal ini dimaksudkan untuk memperlancar arus orang dan barang sehingga menunjang perekonomian daerah.

Tabel II-92 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Km), 2024

Kecamatan	Pemerintahan yang Berwenang Mengelola			Jumlah Total
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padang Batung	13,86	0	91,82	105,68
Loksado	20,45	12,53	160,95	193,93
Telaga Langsat	-	-	38,45	38,45
Angkinang	8,57	-	81,95	90,52
Kandangan	15,20	18,39	97,68	131,27

Kecamatan	Pemerintahan yang Berwenang Mengelola			Jumlah Total
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Sungai Raya	8,41	-	105,87	114,28
Simpur	8,11	-	76,43	84,54
Kalumpang	8,35	-	80,22	88,57
Daha Selatan	-	12,10	45,92	58,03
Daha Barat	-	-	39,80	39,80
Daha Utara	-	10,97	40,27	51,24
Hulu Sungai Selatan	82,95	53,99	859,36	996,30

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Jalan mantap merupakan klasifikasi jalan daerah dalam kondisi baik dan sedang, berikut dapat dilihat perkembangan persentase kondisi jalan mantap selama 5 tahun terakhir:

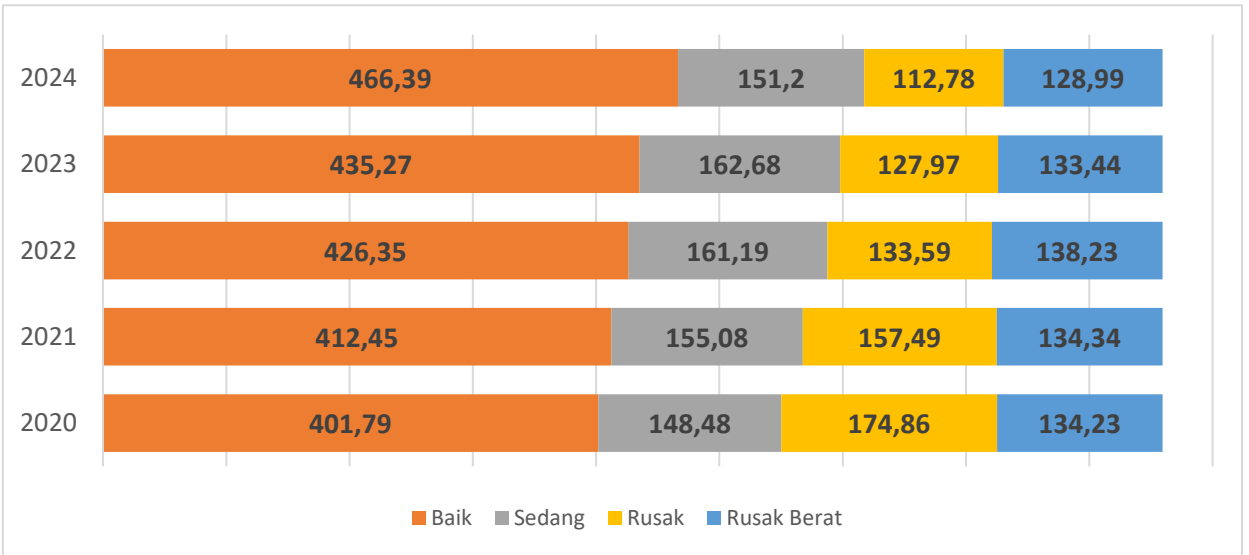
Gambar II-51 Persentase Kondisi Jalan Mantap Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Kemudian apabila dilihat dari perkembangannya secara mendalam selama 5 tahun berikut merupakan kondisi panjang jalan kabupaten berdasarkan kondisinya secara detil dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar II-52 Kondisi Jalan Kab.Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (km)



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Terdapat peningkatan signifikan dalam panjang jalan yang dalam kondisi baik setiap tahun, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa ada upaya berkelanjutan dalam pembangunan dan perbaikan jalan. Panjang jalan dalam kondisi rusak dan

rusak berat menurun dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa upaya perbaikan jalan efektif dalam mengurangi jumlah jalan yang rusak. Penurunan panjang jalan dalam kondisi sedang pada tahun 2023 mungkin menunjukkan pergeseran kondisi jalan, baik menjadi lebih baik atau lebih buruk.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Kebutuhan masyarakat akan perumahan dan permukiman semakin tinggi sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.

Tabel II-93 Capaian IKK Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	80.07	90.19	8.79
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7.6	6.112	6.31
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	100	100

Berikut merupakan capaian SPM pada urusan Perumahan Rakyat di Tahun 2024 :

Tabel II-94 Capaian Urusan SPM Perumahan Rakyat

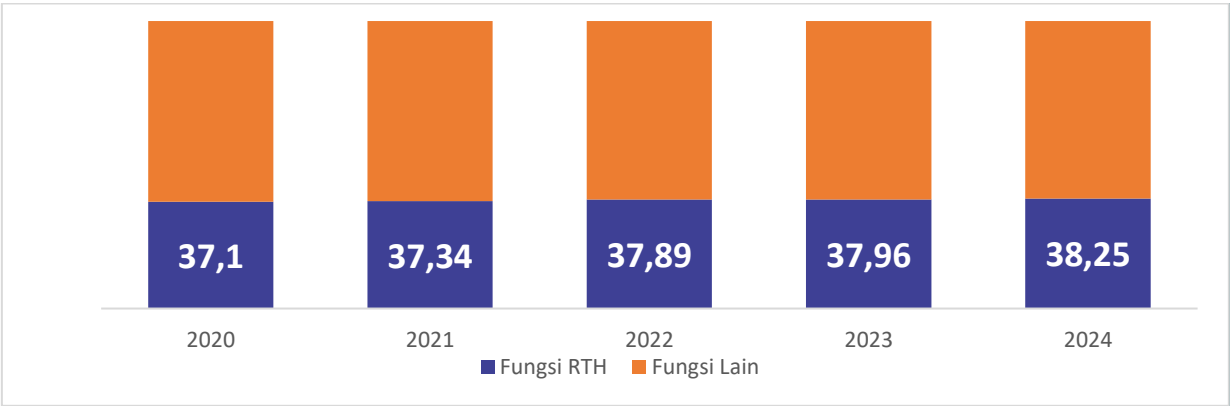
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	
				Realisasi	%
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	0	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100%	0	100%

Sumber : DisperaKPLH Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Pada capaian SPM tercapai 100% dikarenakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terdapat korban bencana ataupun warga terdampak akibat relokasi program pemerintah.

Pertumbuhan kawasan pemukiman harus diimbangi dengan ketersediaan lahan ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Fungsi dari RTH ini antara lain sebagai penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan, area pengembangan keanekaragaman hayati dan juga sebagai tempat rekreasi dan olahraga masyarakat

Gambar II-53 Persentase Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Capaian RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel II-95 Capaian IKK Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	4,42	6.09	7

B. Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

1. Sosial

Urusan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang optimal pada kedua indikator yang diukur selama periode 2022–2024. Pada indikator persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM), capaian mencapai 100% baik pada tahun 2023 maupun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah berhasil memberikan layanan dasar secara menyeluruh kepada kelompok rentan di luar panti, termasuk melalui program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan sosial berbasis keluarga dan komunitas.

Tabel II-96 IKK Urusan Sosial Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100	100

Demikian pula pada indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, capaian juga konsisten pada angka 100% di tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas respons tanggap darurat pemerintah daerah dalam penanganan bencana, baik dalam penyediaan logistik, tempat pengungsian, maupun layanan pemulihan pascabencana.

Capaian maksimal pada kedua indikator ini mengindikasikan bahwa urusan sosial telah dikelola dengan baik, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan serta korban bencana. Namun, meskipun capaian kuantitatif telah optimal, tantangan yang perlu diperhatikan ke depan adalah menjaga keberlanjutan layanan sosial, peningkatan kualitas intervensi, dan pemutakhiran data

kelompok sasaran agar layanan tetap tepat sasaran serta responsif terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif melalui layanan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan bagi kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus.

2. Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang relatif positif pada beberapa indikator, meskipun terdapat aspek yang perlu perhatian khusus. Pada indikator persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja, capaian sebesar 100% pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa seluruh kegiatan ketenagakerjaan telah selaras dengan dokumen perencanaan, menandakan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program sesuai arah kebijakan yang ditetapkan.

Tabel II-97 Capaian IKK Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		8.023	7,76
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		4088591.597	39.857,26
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).		100	100
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		75.44	78,66

Indikator persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengalami penurunan dari 8,023% pada tahun 2023 menjadi 7,76% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan masih terbatasnya akses pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja, yang dapat memengaruhi daya saing angkatan kerja daerah. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan memperluas program pelatihan berbasis kompetensi serta menjalin kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi.

Pada aspek tingkat produktivitas tenaga kerja, terjadi penurunan yang signifikan dari Rp4.088.591,60 pada tahun 2023 menjadi Rp39.857,26 pada tahun 2024. Penurunan drastis ini memerlukan kajian lebih mendalam untuk mengidentifikasi penyebabnya, apakah terkait metode penghitungan indikator, perubahan struktur sektor ekonomi, atau penurunan output per tenaga kerja.

Sementara itu, indikator persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mencapai 100% baik pada tahun 2023 maupun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mendorong perusahaan untuk memenuhi standar ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja bersama (PP/PKB), pembentukan LKS Bipartit, penetapan struktur skala upah, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja meningkat dari 75,44% pada tahun 2023 menjadi 78,66% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan efektivitas layanan penempatan kerja di tingkat kabupaten/kota dalam memfasilitasi pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Secara keseluruhan, capaian urusan ketenagakerjaan menunjukkan kemajuan dalam aspek tata kelola perusahaan dan penempatan tenaga kerja, namun menyoroti penurunan sertifikasi kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebagai tantangan utama yang perlu segera diatasi melalui intervensi kebijakan peningkatan kualitas SDM dan penguatan pelatihan vokasi.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang beragam, dengan beberapa indikator yang stabil serta lainnya yang mengalami fluktuasi. Pada indikator persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD), terlihat penurunan signifikan dari 36,74% pada tahun 2022 menjadi 19,10% pada tahun 2023, meskipun sedikit meningkat kembali menjadi 23,39% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian alokasi anggaran di beberapa sektor, sehingga perlu penguatan mekanisme pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran agar belanja daerah lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.

Tabel II-98 IKK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36.7405894	19.0995322	23.3940263
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5.00219	19.3596266	16.0315907

Indikator persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait menunjukkan capaian yang konsisten, yaitu 100% selama periode 2022–2024. Hal ini menunjukkan kesiapan dan respons cepat pemerintah daerah

dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, serta efektivitas koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam perlindungan anak.

Namun, pada indikator rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan, terjadi kenaikan tajam dari 5,00 pada 2022 menjadi 19,36 pada 2023, meskipun menurun kembali menjadi 16,03 pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan masih tingginya kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan dan memerlukan perhatian khusus. Penurunan pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan, namun angka tersebut tetap relatif tinggi dan menuntut penguatan program pencegahan kekerasan, sosialisasi hukum perlindungan perempuan, dan peningkatan akses layanan pendampingan korban.

Secara keseluruhan, capaian urusan ini menunjukkan efektivitas penanganan korban kekerasan anak yang telah maksimal, namun terdapat tantangan pada aspek pengarusutamaan gender dalam anggaran serta tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan, memperluas kampanye kesadaran publik, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

4. Pangan

Urusan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam periode 2022–2024. Indikator persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) menunjukkan penurunan tajam dari 92,68% pada tahun 2022 menjadi 70,62% pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat secara signifikan menjadi 104,80% pada tahun 2024.

Tabel II-99 IKK Urusan Pangan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	92,68	70.6237927	104,80

Penurunan yang terjadi pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan daerah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi produksi pertanian. Hal ini berdampak pada berkurangnya cadangan pangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat pada periode tersebut.

Namun, lonjakan capaian hingga 104,80% pada tahun 2024 menunjukkan adanya pemulihan yang sangat baik dalam ketersediaan pangan. Peningkatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh optimalisasi program ketahanan pangan daerah, keberhasilan panen yang lebih baik, serta peningkatan cadangan pangan strategis. Surplus ketersediaan pangan pada tahun 2024 menjadi indikasi positif bahwa daerah mampu tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memiliki cadangan yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan.

Secara keseluruhan, capaian urusan pangan menunjukkan perbaikan signifikan setelah sempat mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Namun, fluktuasi yang terjadi menandakan perlunya strategi ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan, seperti peningkatan produktivitas pertanian, penguatan cadangan pangan daerah, diversifikasi sumber pangan lokal, serta mitigasi risiko terhadap perubahan iklim dan gangguan pasokan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pada fokus kemampuan ekonomi daerah, salah satu indikator yang relevan untuk menganalisis tingkat perekonomian mikro penduduk adalah pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan. Pengeluaran ini mencerminkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, serta menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam konteks ini, pengeluaran untuk pangan memiliki porsi terbesar dalam struktur konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok berpendapatan rendah, sehingga fluktuasi harga pangan dan aksesibilitas terhadap bahan makanan pokok sangat memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, tingkat pengeluaran konsumsi—khususnya pada komponen pangan—menjadi cerminan penting dari kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

Tabel II-100 Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan	
	Nominal (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)
MAKANAN		
Padi-padian	99.403	6,46%
Umbi-Umbian	1.889	0,21%
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	72.852	6,40%
Daging	17.251	1,47%
Telur dan Susu	29.822	2,70%
Sayur-Sayuran	38.887	3,10%
Kacang-Kacangan	10.623	0,67%
Buah-Buahan	39.104	1,62%
Minyak dan Kelapa	16.104	1,77%

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan	
	Nominal (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Bahan Minuman	22.103	1,71%
Bumbu-Bumbuan	16.375	1,16%
Konsumsi Lainnya	14.302	1,43%
Makanan dan Minuman Jadi	278.150	21,64%
Rokok	67.935	5,08%
TOTAL	724.799	55,26%
NON MAKANAN		
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga		21,74%
Aneka Barang & Jasa		9,44%
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala		2,66%
Barang Tahan Lama Durable Goods		4,96%
Pajak, Pungutan, dan Asuransi		7,89%
Keperluan Pesta dan Upacara		0,64%
TOTAL		44,74%

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2025

Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren yang meningkat, yang mencerminkan adanya perbaikan daya beli masyarakat serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2021, total pengeluaran per kapita per bulan tercatat sebesar Rp 1.115.342 dan terus meningkat hingga mencapai Rp 1.354.965 pada tahun 2024. Komponen pengeluaran untuk makanan masih mendominasi struktur konsumsi, dengan besaran yang meningkat dari Rp 616.294 pada tahun 2021 menjadi Rp 724.799 pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Sementara itu, pengeluaran non-makanan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp 499.048 menjadi Rp 630.167 dalam periode yang sama. Kenaikan tertinggi dalam komponen non-makanan terjadi pada kategori perumahan dan fasilitas rumah tangga, serta barang tahan lama. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari pengeluaran yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan dasar, tetapi juga mengarah pada pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. Selain itu, peningkatan pengeluaran pada komponen lain-lain, yang melonjak dari Rp 57.146 pada tahun 2021 menjadi Rp 100.519 pada tahun 2024, mengindikasikan adanya keragaman dalam pola konsumsi masyarakat. Secara keseluruhan, perkembangan struktur pengeluaran konsumsi ini memberikan gambaran positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil penduduk.

Tabel II-101 Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan (Nominal Rp)				
	2021	2022	2023	2023	2024
(1)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)

Makanan	616.294	640.605	637.990	637.990	724.799
Non Makanan	499.048	518.638	596.008	596.008	630.167
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	248.638	252.058	267.610	267.610	293.512
Aneka Barang dan Jasa	119.758	109.469	112.245	112.245	127.701
Pakaian, Alas Kaki, Tutup Kepala	29.804	30.786	33.310	33.310	33.213
Barang Tahan Lama	43.702	57.480	82.733	82.733	75.222
Lainnya	57.146	62.845	70.110	100.110	100.519
Jumlah	1.115.342	1.159.243	1.233.998	1.233.998	1.354.965

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2025

5. Pertanian

Urusan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja yang optimal selama periode 2022–2024, di mana seluruh indikator yang diukur mencapai capaian 100% secara konsisten pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel II-102 IKK Urusan Pertanian Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.		100	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100	100
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat		100	100
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		100	100

Indikator persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanah di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan mencapai 100%, yang menandakan adanya kepatuhan yang baik terhadap rencana tata ruang dan peruntukan lahan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan serta mendukung pengelolaan ruang yang tertib dan berkelanjutan.

Indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum juga mencapai 100%, menunjukkan kesiapan lahan yang memadai dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana publik. Demikian pula, indikator tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal menunjukkan kesesuaian lahan yang baik untuk mendukung investasi daerah, sehingga berkontribusi pada peningkatan iklim usaha dan perekonomian lokal.

Pada aspek reforma agraria, indikator tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan mencapai 100%, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan kepemilikan lahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, indikator tersedianya tanah untuk masyarakat juga tercapai secara penuh, menunjukkan

keberhasilan dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap lahan untuk berbagai keperluan, termasuk perumahan dan pertanian.

Selanjutnya, indikator penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi juga mencapai 100%, yang mencerminkan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik pertanahan secara non-litigasi. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik yang berkepanjangan di masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian urusan pertanahan yang konsisten pada tingkat maksimal menunjukkan tata kelola pertanahan yang baik, dengan kepatuhan terhadap rencana tata ruang, kesiapan lahan untuk pembangunan dan investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Tantangan ke depan adalah menjaga kualitas layanan pertanahan ini, meningkatkan digitalisasi administrasi pertanahan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

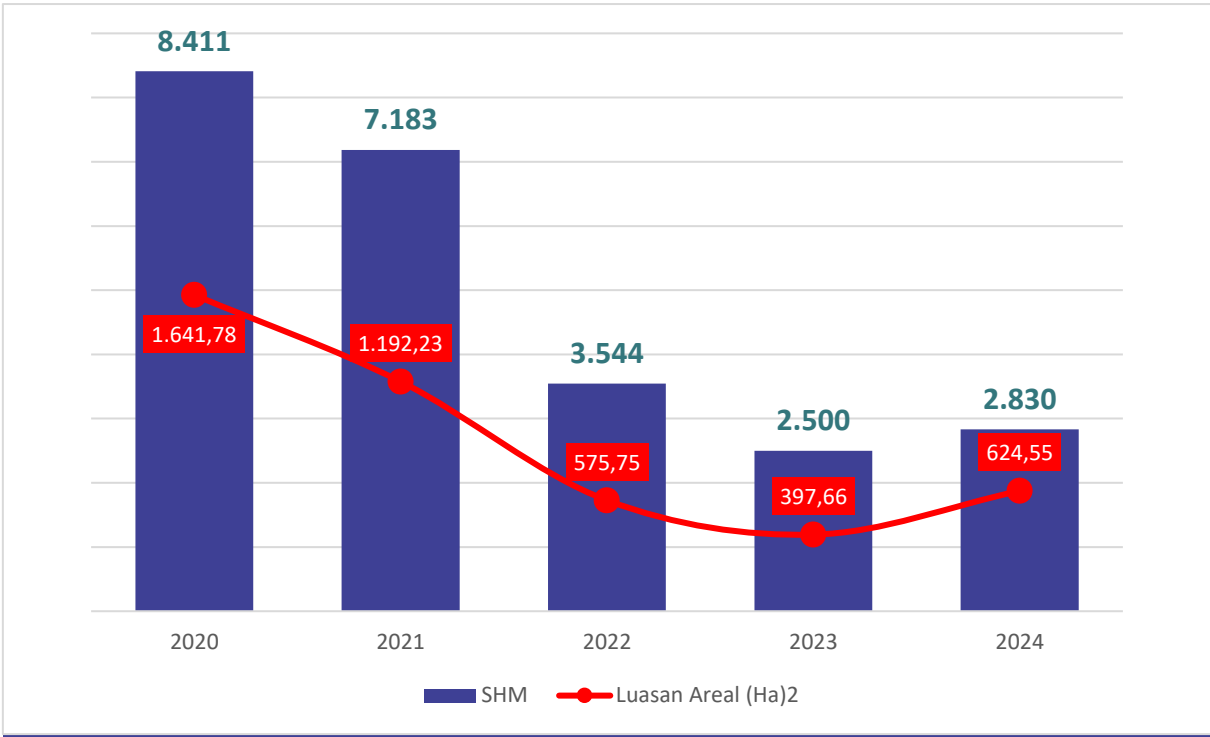
Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Pembangunan urusan pertanahan mencakup administrasi pertanahan, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dan pengembangan sistem informasi pertanahan. Pembangunan pertanahan diarahkan untuk menjamin kepastian hukum akan penggunaan tanah untuk berbagai kepentingan, baik yang bersifat kepentingan pribadi, keperluan usaha, maupun kepentingan masyarakat umum.

Tabel II-103 Luas Tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang Diterbitkan Menurut Bulan di Kab. Hulu Sungai Selatan, 2024

Bulan	Sertifikat Hak Milik	Luas (m ²)
Januari	6	16.708
Februari	11	18.305
Maret	657	559.853
April	402	536.740
Mei	94	346.123
Juni	24	20.971
Juli	27	52.177
Agustus	7	3.403
September	12	10.077
Oktober	606	1.526.504
Nopember	639	1.324.107
Desember	345	1.830.484
Jumlah/Total	2.830	6.245.452

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Gambar II-54 Perkembangan Penerbitan Sertifikat Hak Milik dan Luasannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

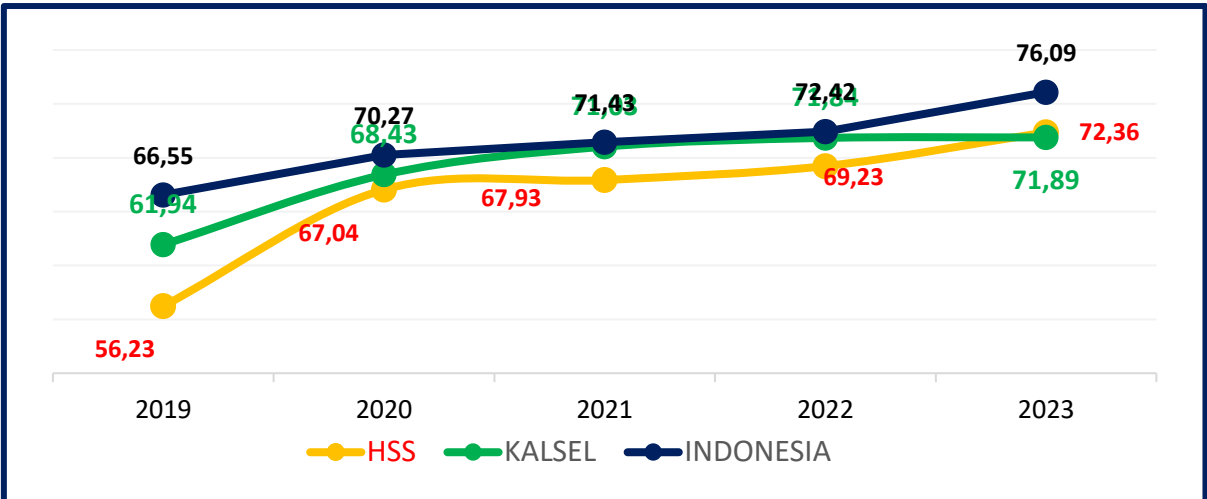


Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2018-2023 (Data diolah)

6. Lingkungan Hidup

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, pada tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-29 se Indonesia masalah pencemaran udara serta lingkungan. Oleh sebab itu, langkah pelestarian hutan dan lingkungan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, program yang dijalankan antara lain menggalakkan larangan membakar lahan dan hutan serta melaksanakan penanaman pohon. Program penanaman pohon serentak dilaksanakan melalui program revolusi hijau yang sesuai dengan surat edaran Gubernur Sahbirin Nor No. 522/132/PDASRHL. Sedangkan penanganan kebakaran hutan melibatkan petugas pemadam kebakaran, polisi, serta masyarakat di masing-masing daerah. Salah satu indikator keberhasilan program yang dilaksanakan diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Gambar II-55 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Capaian Sasaran RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam IKLH selama periode 2019-2023, dengan peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan dan mendekati laju peningkatan nasional. Perubahan perhitungan pada tahun 2023 tampaknya lebih menguntungkan bagi Hulu Sungai Selatan, menunjukkan efektivitas kebijakan dan program lingkungan yang diterapkan di daerah tersebut. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan yang lebih stabil dan lambat, sementara peningkatan nasional tetap konsisten dan signifikan, mencerminkan komitmen yang kuat untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup di seluruh Indonesia.

Tabel II-104 IKK Urusan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	69,4	68,39	67,39
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	78,72	78,942	78,987
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	9,375	6,25	0

7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu sasaran utama dalam pembangunan. Keberadaan penduduk yang merupakan salah satu modal utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian agar penerapan adminsitasi kependudukan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP

Berbasis NIK Secara Nasional, memerlukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang positif dan cenderung mengalami peningkatan pada seluruh indikator selama periode 2022–2024.

Tabel II-105 IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP elektronik	97,01	97.96	98.25
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	91,44	91.50	92.72
3	Kepemilikan akta kelahiran	97,83	97.85	98.039
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100	100	100

Indikator perekaman KTP elektronik meningkat dari 97,01% pada tahun 2022 menjadi 98,25% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk yang wajib KTP telah melakukan perekaman e-KTP, mencerminkan efektivitas pelayanan Adminduk dalam memberikan dokumen identitas yang sah dan terintegrasi dengan sistem nasional.

Pada indikator persentase anak usia 0–7 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), terjadi peningkatan dari 91,44% pada tahun 2022 menjadi 92,72% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi serta keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi pentingnya KIA sebagai identitas anak dan syarat akses layanan publik.

Indikator kepemilikan akta kelahiran juga mengalami tren peningkatan dari 97,83% pada tahun 2022 menjadi 98,04% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan hampir semua anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki dokumen akta kelahiran, yang merupakan dasar hukum penting untuk pemenuhan hak-hak sipil warga negara.

Sementara itu, indikator jumlah perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama konsisten mencapai 100% dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menandakan integrasi data kependudukan yang optimal dalam mendukung berbagai layanan publik lintas sektor, serta menunjukkan implementasi prinsip "satu data kependudukan" yang efektif di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mendekati target maksimal di seluruh indikator. Tantangan ke depan adalah mempertahankan capaian tinggi ini dengan terus melakukan pemutakhiran data kependudukan, memperluas layanan berbasis digital untuk memudahkan akses masyarakat, serta memperkuat literasi administrasi kependudukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami pentingnya dokumen kependudukan.

8. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang sangat positif, khususnya dalam peningkatan status desa. Pada indikator persentase pengentasan desa tertinggal, capaian berada pada angka 0% sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Namun, kondisi ini bukanlah sebuah kekurangan, melainkan mencerminkan fakta bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak memiliki desa berstatus tertinggal. Hal ini menjadi pencapaian penting yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah pedesaan.

Tabel II-106 IKK Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	70.17	78.125	146.15

Sementara itu, indikator persentase peningkatan status desa mandiri menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 70,17% pada tahun 2022 menjadi 78,13% pada tahun 2023, dan melonjak tajam menjadi 146,15% pada tahun 2024. Lonjakan capaian ini menandakan bahwa semakin banyak desa yang berhasil naik kelas menjadi desa mandiri, yang diukur melalui kemandirian ekonomi, kualitas pelayanan, serta keberdayaan sosial masyarakat desa. Capaian yang melampaui 100% pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan desa yang tidak hanya sesuai target, tetapi juga mampu menghasilkan capaian tambahan di luar ekspektasi awal.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari implementasi program seperti penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi Dana Desa, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat turut mendorong percepatan pembangunan desa menuju kemandirian.

Secara keseluruhan, capaian urusan ini menegaskan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berhasil keluar dari permasalahan desa tertinggal dan bahkan mengalami perkembangan signifikan menuju desa mandiri.

Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan status desa mandiri, memperkuat inovasi desa, dan memastikan desa yang telah mandiri mampu mempertahankan kemandiriannya serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah pedesaan.

9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang positif dengan beberapa indikator yang bergerak sesuai arah kebijakan pengendalian penduduk.

Tabel II-107 IKK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.26	2.2	2.32
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74.76	82.57	79.01
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7.12	4.30	3.43

Indikator Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total berada pada kisaran yang relatif terkendali, yaitu 2,26 pada tahun 2022, turun menjadi 2,20 pada tahun 2023, kemudian sedikit meningkat menjadi 2,32 pada tahun 2024. Penurunan TFR hingga 2023 menunjukkan efektivitas program keluarga berencana dalam mengendalikan angka kelahiran, meskipun kenaikan kembali pada 2024 perlu diwaspadai agar tidak mengganggu stabilitas pertumbuhan penduduk.

Indikator persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) mengalami peningkatan signifikan dari 74,76% pada tahun 2022 menjadi 82,57% pada tahun 2023, sebelum turun ke 79,01% pada tahun 2024. Kenaikan mCPR hingga 2023 mencerminkan keberhasilan sosialisasi dan layanan KB modern yang efektif, sementara penurunan pada 2024 mengindikasikan perlunya upaya intensif dalam mempertahankan kesadaran dan akses masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi modern.

Sementara itu, indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 7,12% pada tahun 2022 menjadi 4,30% pada tahun 2023, dan mencapai 3,43% pada tahun 2024. Penurunan unmet need ini mencerminkan peningkatan aksesibilitas layanan KB serta efektivitas penyuluhan terhadap pasangan usia subur untuk menggunakan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, capaian urusan pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan perkembangan yang baik dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern. Namun, kenaikan TFR pada tahun 2024 dan penurunan mCPR perlu menjadi perhatian, agar tren positif pengendalian penduduk dapat dipertahankan.

Ke depan, penguatan layanan KB berbasis komunitas, perluasan akses kontrasepsi modern di daerah terpencil, serta peningkatan edukasi kesehatan reproduksi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan laju pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup masyarakat.

10. Perhubungan

Urusan perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang masih memerlukan perhatian khusus karena kedua indikator yang diukur relatif rendah dan mengalami penurunan selama periode 2022–2024.

Tabel II-108 IKK Urusan Perhubungan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0.71	0.67	0.67
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.53	0.25	0.27

Indikator rasio konektivitas kabupaten/kota menurun dari 0,71 pada tahun 2022 menjadi 0,67 pada tahun 2023 dan bertahan di angka yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan masih terbatasnya jaringan transportasi antarwilayah atau kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur transportasi yang tersedia. Rendahnya rasio konektivitas dapat berdampak pada keterbatasan mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta hambatan dalam mengakses layanan publik lintas wilayah.

Indikator kinerja lalu lintas kabupaten/kota juga menunjukkan tren menurun signifikan, dari 0,53 pada tahun 2022 menjadi 0,25 pada tahun 2023, dan hanya sedikit meningkat ke 0,27 pada tahun 2024. Angka ini menandakan adanya permasalahan pada kelancaran arus lalu lintas, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan volume kendaraan tanpa diimbangi dengan pelebaran jalan, keterbatasan fasilitas lalu lintas, minimnya transportasi umum yang efisien, serta rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas.

Secara keseluruhan, capaian pada urusan perhubungan mengindikasikan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan kinerja lalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upaya

yang dapat dilakukan antara lain melalui pengembangan transportasi publik yang terintegrasi, perbaikan manajemen lalu lintas berbasis teknologi, pembangunan infrastruktur pendukung seperti terminal atau halte, serta penataan ulang kawasan rawan macet.

Ke depan, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat diperlukan agar pembangunan transportasi lebih terarah, termasuk peningkatan aksesibilitas jalan strategis dan pengembangan angkutan umum yang terjangkau. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan rasio konektivitas dan kinerja lalu lintas dapat meningkat secara signifikan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

11. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tren positif pada seluruh indikator yang diukur.

Tabel II-109 IKK Urusan Komnuikasi dan Informatika Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	71,49	100	100

Indikator persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo konsisten mencapai 100% selama periode 2022–2024. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh PD di daerah telah terkoneksi dengan jaringan internet yang terpusat dan terkelola oleh Dinas Kominfo, sehingga mendukung kelancaran koordinasi, administrasi, dan digitalisasi layanan pemerintahan.

Indikator persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi juga konsisten berada di angka 100% dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mencerminkan keberhasilan transformasi digital di bidang pelayanan publik, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintahan secara lebih cepat, mudah, dan transparan melalui platform daring yang terintegrasi.

Sementara itu, indikator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah mengalami peningkatan signifikan dari 71,49% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan

keberhasilan strategi komunikasi publik pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program-program prioritas pemerintah, baik melalui media digital, media cetak, maupun sosialisasi langsung.

Secara keseluruhan, capaian urusan Komunikasi dan Informatika menegaskan keberhasilan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membangun ekosistem pemerintahan berbasis digital yang efisien, terintegrasi, dan informatif. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga kualitas infrastruktur teknologi informasi, mengantisipasi risiko keamanan siber, serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar pemanfaatan layanan online dapat lebih optimal di seluruh lapisan masyarakat.

12. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tren peningkatan pada kedua indikator yang diukur selama periode 2023–2024.

Tabel II-110 KK Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022-2024				
No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		76.969697	77.245509
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha		63.086233	84.8806366

Indikator meningkatnya koperasi yang berkualitas mengalami peningkatan dari 76,97% pada tahun 2023 menjadi 77,25% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan tata kelola koperasi di daerah, baik dari sisi administrasi, manajemen usaha, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun peningkatannya relatif kecil, capaian ini mencerminkan stabilitas dan keberlanjutan pembinaan koperasi agar semakin sehat, transparan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

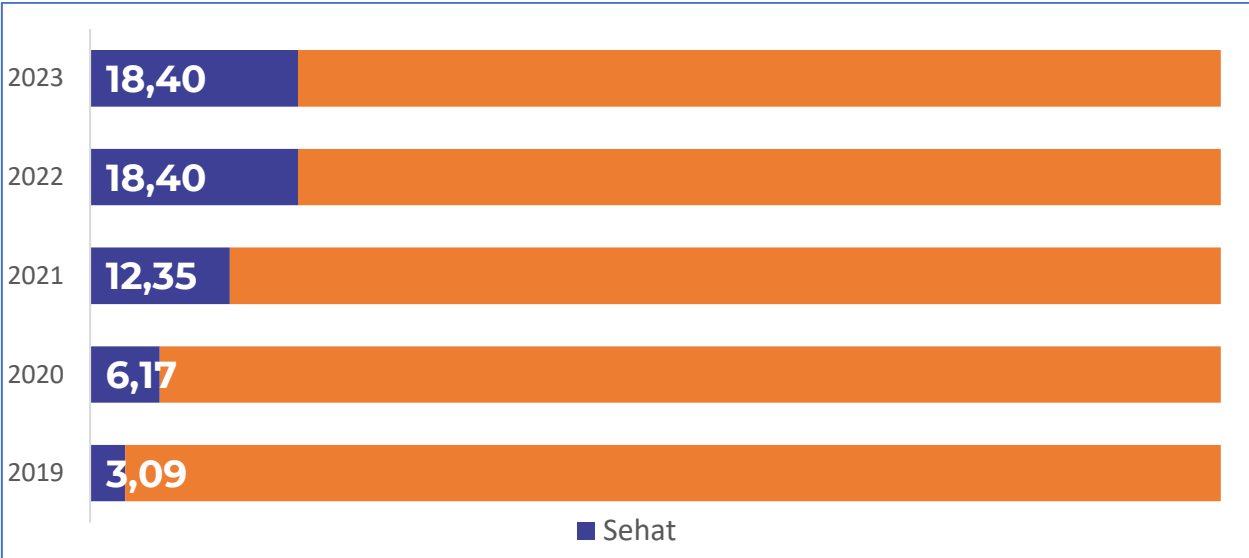
Sementara itu, indikator meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha mencatat peningkatan signifikan dari 63,09% pada tahun 2023 menjadi 84,88% pada tahun 2024. Lonjakan ini menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan usaha mikro, seperti pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pembiayaan, dan pendampingan usaha, yang mendorong pelaku usaha mikro untuk naik kelas dan mengembangkan usahanya secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian pada urusan ini menunjukkan kinerja yang positif dalam pemberdayaan sektor koperasi dan UKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Namun, peningkatan yang lebih signifikan

masih diperlukan pada kualitas koperasi agar dapat bersaing di era ekonomi digital dan mampu mengelola usaha secara lebih profesional.

Ke depan, tantangan yang dihadapi meliputi penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan literasi keuangan dan digital bagi pelaku UKM, serta fasilitasi akses pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan strategi yang tepat, koperasi dan UKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

Gambar II-56 Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019-2023



Sumber: Capaian RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan 2018-2023

13. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif dalam periode 2022–2024. Indikator persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota mencatat angka negatif pada tahun 2022 sebesar -10,76% dan semakin menurun drastis menjadi -70,64% pada tahun 2023, sebelum melonjak tajam ke angka 480,88% pada tahun 2024.

Tabel II-111 IKK Urusan Penanaman Modal Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-10.76	-70.64	480.88

Penurunan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya penurunan minat investor untuk menanamkan modal di daerah. Faktor yang dapat memengaruhi kondisi ini antara lain ketidakpastian ekonomi pascapandemi, keterbatasan infrastruktur pendukung investasi, proses perizinan yang belum sepenuhnya optimal, serta persaingan dengan daerah lain yang memiliki daya tarik investasi lebih tinggi.

Namun, lonjakan luar biasa pada tahun 2024 menjadi sinyal positif bahwa iklim investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengalami pemulihan signifikan. Peningkatan investasi yang mencapai 480,88% menunjukkan keberhasilan kebijakan dan program pemerintah daerah dalam menarik investor, seperti penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission), promosi potensi daerah secara agresif, dan peningkatan infrastruktur pendukung dunia usaha.

Secara keseluruhan, meskipun capaian tahun 2024 sangat positif, fluktuasi yang terjadi dalam tiga tahun terakhir menandakan perlunya strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas pertumbuhan investasi. Upaya yang perlu dilakukan antara lain memperkuat kepastian hukum dan regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, memfasilitasi kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal, serta terus mempromosikan potensi unggulan daerah yang memiliki nilai kompetitif.

Investasi dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih sangat dibutuhkan dalam memberdayakan setiap sumber daya baik manusia maupun alam. Berikut ini adalah data Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.

Tabel II-112 Data Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

TAHUN	REALISASI	AKUMULASI
2018	550.000.000.000	550.000.000.000
2019	1.478.990.000.000	2.028.990.000.000
2020	208.890.040.000	2.237.880.040.000
2021	231.060.423.173	2.468.940.463.173
2022	206.294.613.373	2.675.235.076.546
2023	60.443.221.391	2.735.678.297.937

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

14. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang relatif stabil, dengan tren peningkatan pada beberapa indikator namun masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, khususnya dalam aspek partisipasi organisasi dan prestasi olahraga.

Tabel II-113 IKK Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	9.12	9.68	9.89
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	23.31	18.39	20.23
3	Peningkatan prestasi olahraga	24	14	16

Indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 9,12% pada tahun 2022 menjadi 9,68% pada tahun 2023 dan 9,89% pada tahun 2024. Tren positif ini menandakan adanya pertumbuhan keterlibatan pemuda dalam kegiatan ekonomi produktif, yang dapat didorong oleh berbagai program kewirausahaan dan pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Meskipun kenaikan masih relatif kecil, hal ini menunjukkan arah perkembangan yang baik menuju kemandirian ekonomi pemuda.

Sebaliknya, indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan mengalami penurunan dari 23,31% pada tahun 2022 menjadi 18,39% pada tahun 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 20,23% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam membangun minat pemuda terhadap aktivitas organisasi, yang bisa disebabkan oleh pergeseran minat generasi muda ke arah kegiatan digital atau kurangnya inovasi dalam aktivitas organisasi kepemudaan.

Sementara itu, indikator peningkatan prestasi olahraga juga menunjukkan fluktuasi. Dari 24 capaian prestasi pada tahun 2022, angka ini menurun menjadi 14 pada tahun 2023, kemudian meningkat kembali menjadi 16 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan pembinaan olahraga yang lebih terarah, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta penguatan sistem pencarian dan pengembangan bakat atlet di daerah.

Secara keseluruhan, capaian urusan ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi terus meningkat, tantangan masih ada dalam meningkatkan partisipasi organisasi kepemudaan serta mengembalikan kejayaan prestasi olahraga. Ke depan, dibutuhkan strategi yang lebih inovatif dalam pemberdayaan pemuda melalui integrasi program kewirausahaan, kepemimpinan, dan olahraga untuk menciptakan generasi muda yang produktif, aktif berorganisasi, serta berprestasi di bidang olahraga.

15. Statistik

Urusan Statistik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang optimal dengan konsistensi pada kedua indikator yang diukur selama periode 2022–2024.

Tabel II-114 IKK Urusan Statistik Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100

Indikator persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah mencapai 100% secara konsisten dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah memanfaatkan data statistik sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan, sehingga perencanaan daerah menjadi lebih berbasis data (evidence-based planning) dan terukur.

Demikian pula, indikator persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah juga mencapai 100% secara konsisten pada periode yang sama. Capaian ini menandakan adanya budaya kerja berbasis data di lingkungan pemerintahan daerah, di mana data statistik digunakan tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil evaluasi dapat lebih obyektif dan akurat.

Konsistensi capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pemanfaatan data statistik dalam siklus perencanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini juga menunjukkan efektivitas koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan penguatan kapasitas aparatur dalam mengakses serta menggunakan data statistik.

Secara keseluruhan, capaian urusan statistik yang stabil di angka maksimal menjadi pondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. Tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan pemutakhiran data statistik, memperluas pemanfaatan data sektoral yang terintegrasi, serta mendorong inovasi analisis data berbasis teknologi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.

16. Persandian

Urusan Persandian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam tingkat keamanan informasi pemerintah selama periode 2022–2024. Indikator ini naik dari 27,9% pada tahun 2022

menjadi 51,47% pada tahun 2023, dan terus meningkat menjadi 60,47% pada tahun 2024.

Tabel II-115 IKK Urusan Persandian Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	27.9	51.4728682	60.4651163

Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah. Hal ini dapat dikaitkan dengan penerapan kebijakan keamanan siber yang lebih ketat, peningkatan kesadaran aparatur pemerintah terhadap pentingnya perlindungan data, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung keamanan sistem.

Meskipun terjadi peningkatan yang konsisten, capaian 60,47% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat keamanan informasi pemerintah masih belum optimal dan memerlukan penguatan lebih lanjut. Potensi kerentanan terhadap ancaman siber seperti peretasan, kebocoran data, dan serangan malware masih harus diantisipasi melalui pengembangan sistem pertahanan siber yang lebih canggih, peningkatan kompetensi SDM di bidang keamanan informasi, serta penerapan standar keamanan informasi yang sesuai regulasi nasional.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan arah kemajuan yang positif dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih aman secara digital. Namun, mengingat tren transformasi digital yang semakin cepat, peningkatan keamanan informasi harus menjadi prioritas strategis agar pelayanan publik berbasis teknologi dapat berjalan tanpa gangguan dan tetap terpercaya di mata masyarakat.

17. Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya adalah bentuk pelestarian budaya secara keseluruhan. Melalui pengalaman mengunjungi cagar budaya, generasi muda akan belajar sejarah dan budaya leluhur sehingga mampu memaknai sejarah nenek moyangnya sebagai pelajaran untuk menghadapi masa depan. Pelestarian dan perawatan cagar budaya di Kab. Hulu Sungai Selatan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga cagar budaya yang ada dapat tetap bertahan.

Tabel II-116 IKK Urusan Kebudayaan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	100	100

18. Perpustakaan

Urusan Perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan selama periode 2022–2024, yang terlihat dari peningkatan pada kedua indikator utama.

Tabel II-117 IKK Urusan Perpustakaan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66.15	67.68	83.27
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	36.53	70.48	83.34

Indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat meningkat dari 66,15 pada tahun 2022 menjadi 67,68 pada tahun 2023, dan melonjak tajam ke 83,27 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program-program yang mendorong minat baca masyarakat, seperti pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital, kegiatan literasi masyarakat, dan penyediaan akses bacaan yang lebih mudah melalui perpustakaan keliling atau pojok baca di desa-desa.

Demikian pula, indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami lonjakan signifikan dari 36,53 pada tahun 2022 menjadi 70,48 pada tahun 2023, dan semakin meningkat ke 83,34 pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi masyarakat tidak hanya meningkat secara kuantitatif dalam hal minat baca, tetapi juga secara kualitatif melalui pemahaman dan pemanfaatan informasi yang lebih baik. Hal ini erat kaitannya dengan upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi akses pendidikan informal, penguatan literasi digital, serta kolaborasi dengan sekolah dan komunitas literasi lokal.

Secara keseluruhan, capaian ini menandakan bahwa urusan perpustakaan telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Lonjakan signifikan pada tahun 2024 menjadi bukti keberhasilan transformasi layanan perpustakaan dari model konvensional menuju layanan berbasis teknologi dan komunitas yang lebih inklusif.

Namun demikian, tantangan ke depan adalah memastikan pemerataan akses literasi hingga ke wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat marginal, serta mengintegrasikan program literasi dengan pengembangan keterampilan abad 21 seperti literasi digital, informasi, dan budaya baca yang berkelanjutan.

19. Kearsipan

Urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang relatif baik, meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian.

Tabel II-118IKK Urusan Kearsipan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	95.01	95.14	87.02
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	96.76	100

Indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional tercatat sebesar 95,01% pada tahun 2022, sedikit meningkat menjadi 95,14% pada tahun 2023, namun kemudian menurun menjadi 87,02% pada tahun 2024. Penurunan di tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi ketersediaan arsip yang terkelola dengan baik, yang dapat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, pemutakhiran sistem kearsipan, atau kepatuhan perangkat daerah terhadap tata kelola arsip yang sesuai standar.

Sementara itu, indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat tetap berada pada level tinggi, yaitu 100% pada tahun 2022, sedikit menurun ke 96,76% pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 100% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum arsip yang ada telah terjaga keberadaannya dan tetap utuh sebagai dokumen penting negara dan daerah.

Secara keseluruhan, capaian urusan ini menegaskan bahwa pengelolaan arsip di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah berjalan cukup baik, terutama dalam menjaga keutuhan arsip sebagai dokumen penting. Namun, penurunan tingkat ketersediaan arsip di tahun 2024 menandakan perlunya penguatan sistem manajemen arsip, termasuk penerapan arsip elektronik, peningkatan kapasitas SDM kearsipan, serta pengawasan terhadap kepatuhan perangkat daerah dalam penyerahan dan pemeliharaan arsip.

Ke depan, pengembangan arsip digital terintegrasi akan menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan dan keutuhan arsip secara berkelanjutan,

sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

C. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pertanian

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi pertanian yang sangat besar sebagai modal dasar pergerakan roda perekonomian daerah. Potensi inilah yang menjadikan pertanian menjadi salah satu sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kontribusi PDRB pada tahun 2021 sebesar 23,60% terhadap perekonomian daerah.

Perlu digarisbawahi bahwa sektor pertanian memiliki keunggulan dalam mewujudkan sustainability development karena sektor tersebut merupakan sektor yang menggali potensi sumber daya alam terbaharukan. Meskipun sekarang pertambangan dan penggalian mendominasi struktur perekonomian, namun sektor pertanian juga memiliki kekuatan yang tidak kalah besarnya dengan sektor pertambangan dan penggalian tersebut sehingga shifting sektor ekonomi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh tanaman padi baik ladang maupun sawah. S selain itu, komoditas ubi jalar juga cukup memiliki dominasi dalam produksi tanaman pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun jenis ternak yang dominan, baik yang dipelihara, dipotong, maupun diproduksi daging adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan itik.

Tabel II-119 IKK Urusan Pertanian Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	472.6	495.51	496.47
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	0	0	0

Urusan Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang stabil dan positif pada kedua indikator yang diukur, mencerminkan perkembangan sektor pertanian yang konsisten.

Indikator produktivitas pertanian per hektar per tahun mengalami peningkatan dari 472,6 pada tahun 2022 menjadi 495,51 pada tahun 2023, dan sedikit meningkat lagi ke 496,47 pada tahun 2024. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui penerapan teknologi pertanian modern, penggunaan

bibit unggul, pelatihan kepada petani, serta penguatan akses terhadap sarana produksi pertanian. Meski peningkatannya relatif kecil pada 2024, capaian ini menegaskan bahwa produktivitas pertanian tetap terjaga di tingkat yang baik.

Indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular serta kasus zoonosis konsisten berada pada angka 0% selama periode 2022–2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kasus penyakit hewan menular atau zoonosis yang signifikan di daerah, yang mencerminkan efektivitas program kesehatan hewan, pengawasan penyakit ternak, serta penerapan biosekuriti yang baik. Kondisi ini penting untuk menjaga ketahanan pangan asal hewan dan mendukung sektor peternakan yang sehat.

Secara keseluruhan, capaian urusan pertanian menunjukkan perkembangan yang positif dengan produktivitas yang terjaga dan bebasnya daerah dari kasus penyakit hewan menular. Namun, untuk meningkatkan daya saing pertanian ke depan, diperlukan langkah-langkah inovatif seperti pemanfaatan teknologi digital (smart farming), diversifikasi komoditas unggulan, penguatan rantai pasok, serta pengembangan pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian lokal.

2. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Perikanan darat (air tawar), terbagi atas usaha perikanan budidaya dan usaha perikanan tangkap. Usaha perikanan budidaya meliputi kegiatan budidaya ikan (pembenihan dan pembesaran) dengan sistem pemeliharaan di kolam, karamba/jaring apung, dan minapadi. Sedangkan usaha perikanan tangkap merupakan kegiatan penangkapan ikan di perairan umum rawa dan sungai.

Tabel II-120 IKK Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	97,6	100	100,1

3. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor riil yang memberikan keunggulan lebih dalam pengembangan potensi perekonomian wilayah terutama bagi masyarakat sebagai bagian dari penunjang sektor pariwisata. Adanya pengembangan pariwisata akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dalam peningkatan perekonomian daerah dengan cara meningkatkan taraf perekonomian rumah tangganya masing-masing. Pengembangan pariwisata juga tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran

masyarakat dalam proses pembangunan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi obyek wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Adapun tingkat pengeluaran wisatawan (*spending of money*) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, sebagaimana yang tertuang pada gambar berikut.

Tabel II-121 IKK Urusan Pariwisata Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	61300	6.0358891	25,23
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	9.007301	45.8886077	67,16
3	Tingkat hunian akomodasi	14.2425096	14.1946349	66,84
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,72	3,64	3,72
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2.4229916	2.3849853	2,88

Urusan Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan perkembangan yang dinamis dengan tren positif di beberapa indikator utama, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa capaian yang memerlukan perhatian.

Indikator persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan mencatat angka yang sangat tinggi pada tahun 2022 sebesar 61.300%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh efek pemulihan pascapandemi COVID-19 dari basis kunjungan yang rendah pada tahun sebelumnya. Namun, capaian ini turun signifikan menjadi 6,04% pada tahun 2023, sebelum meningkat kembali ke 25,23% pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan perlunya strategi yang lebih konsisten dalam menarik wisatawan mancanegara, melalui promosi internasional dan peningkatan aksesibilitas destinasi.

Indikator persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) menunjukkan tren positif yang signifikan, dari 9,01% pada 2022, meningkat drastis ke 45,89% pada 2023, dan kembali naik ke 67,16% pada 2024. Hal ini menandakan keberhasilan dalam menarik wisatawan domestik, didukung oleh promosi pariwisata lokal, pengembangan destinasi berbasis potensi alam dan budaya, serta perbaikan sarana penunjang pariwisata.

Indikator tingkat hunian akomodasi juga mencatat lonjakan tajam dari 14,24% pada 2022 dan 14,19% pada 2023 menjadi 66,84% pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemanfaatan fasilitas penginapan, yang sejalan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan nusantara.

Sementara itu, indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku relatif stabil di angka 3,72% pada 2022, sedikit turun menjadi 3,64% pada 2023, dan kembali ke 3,72% pada 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun kunjungan wisatawan meningkat, dampak ekonomi terhadap PDRB belum mengalami lonjakan signifikan.

Indikator terakhir, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, juga menunjukkan tren meningkat dari 2,42% pada 2022 menjadi 2,38% pada 2023, dan naik menjadi 2,88% pada 2024. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata yang mendukung pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi pariwisata.

Secara keseluruhan, capaian urusan pariwisata menunjukkan potensi besar yang terus berkembang, terutama dengan meningkatnya wisatawan nusantara dan tingkat hunian akomodasi yang tinggi pada 2024. Namun, upaya menarik wisatawan mancanegara serta meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB perlu diperkuat melalui promosi internasional, pengembangan event berkelas nasional/internasional, dan perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata.

4. Perdagangan

Urusan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang relatif baik dengan tren positif pada sebagian besar indikator, meskipun terdapat sedikit penurunan pada salah satu indikator yang perlu diperhatikan.

Tabel II-122 IKK Urusan Perdagangan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	95.14	95.775	92.9390997
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	100	100	100
3	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	84.62	88.029	92.1428571

Indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) mengalami sedikit fluktuasi. Dari 95,14% pada 2022, naik tipis menjadi 95,78% pada 2023, namun kemudian menurun menjadi 92,94% pada 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berkurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus perizinan atau adanya peralihan ke sektor usaha informal yang belum terdaftar resmi. Kondisi ini menandakan perlunya

penguatan pengawasan dan sosialisasi terkait kewajiban perizinan usaha agar legalitas pelaku usaha tetap terjaga.

Indikator persentase kinerja realisasi pupuk menunjukkan capaian yang sangat baik, konsisten di angka 100% selama periode 2022–2024. Hal ini menegaskan bahwa distribusi pupuk kepada petani telah berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga mendukung produktivitas sektor pertanian di daerah.

Indikator persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku mencatat tren positif dengan kenaikan dari 84,62% pada 2022 menjadi 88,03% pada 2023, dan mencapai 92,14% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pengawasan terhadap standar metrologi legal di pasar maupun kegiatan perdagangan lainnya, yang berdampak pada terciptanya keadilan transaksi dan perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, capaian urusan perdagangan menunjukkan kinerja yang baik terutama dalam aspek distribusi pupuk dan pengawasan UTTP. Namun, penurunan pada tingkat kepatuhan izin usaha perlu segera diatasi melalui penguatan sistem perizinan berbasis digital, penyederhanaan prosedur izin, serta pembinaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

5. Perindustrian

Urusan Perindustrian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang bervariasi dengan tren positif pada beberapa indikator utama, namun terdapat pula aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius untuk perbaikan ke depan.

Tabel II-123 IKK Urusan Perindustrian Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota		288.1012658	23538
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		100	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		0	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)		0	0

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
	dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota			
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		25	0

Indikator pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023 dengan capaian 288,10, namun turun drastis pada tahun 2024 menjadi 23.538. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian data, konsolidasi usaha, atau adanya tantangan yang dihadapi pelaku industri kecil dan menengah dalam mempertahankan keberlanjutan usaha, seperti keterbatasan modal, akses pasar, atau pengaruh dinamika ekonomi.

Indikator persentase pencapaian sasaran pembangunan industri sesuai RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK menunjukkan hasil optimal dengan capaian 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mencerminkan keselarasan program pembangunan industri daerah dengan kebijakan nasional serta efektivitas pelaksanaan rencana pengembangan industri prioritas di daerah.

Indikator persentase hasil pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah juga konsisten mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan perizinan industri telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

Namun, indikator pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Perluasan Industri (IPIU) dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)/Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) tetap berada di angka 0% selama 2023–2024, yang menunjukkan tidak adanya aktivitas ekspansi industri atau kawasan industri baru di daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan minat investor atau belum adanya pengembangan kawasan industri yang siap menampung investasi skala besar.

Sementara itu, indikator tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini justru menurun dari 25% pada tahun 2023 menjadi 0% pada tahun 2024. Kondisi ini menjadi catatan penting karena ketersediaan data industri yang lengkap sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan dan promosi investasi sektor industri di daerah.

Secara keseluruhan, capaian urusan perindustrian menunjukkan kinerja yang baik dalam pencapaian sasaran pembangunan industri dan pengawasan izin industri kecil dan menengah. Namun, penurunan jumlah IKM, minimnya pengembangan kawasan industri, serta tidak tersedianya informasi

industri yang mutakhir menandakan perlunya strategi lebih agresif untuk menarik investasi serta mengembangkan kawasan industri terencana.

D. Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

Urusan Perencanaan dan Keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja yang stabil dan positif pada aspek pengelolaan keuangan daerah, dengan pencapaian indikator yang mencerminkan perbaikan efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel II-124 IKK Fungsi Penunjang Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,434	9.856	9.9146622
2	Rasio PAD	2,682	12.184	11.8007352
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	68,235	63.234	58.4946091
4	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP

Indikator rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan kenaikan bertahap dari 9,434% pada 2022, menjadi 9,856% pada 2023, dan 9,91% pada 2024. Peningkatan yang relatif kecil ini mencerminkan pengelolaan belanja pegawai yang terkendali, sehingga tidak membebani struktur anggaran secara signifikan.

Indikator rasio PAD mengalami lonjakan signifikan dari 2,682% pada 2022 menjadi 12,184% pada 2023, kemudian sedikit menurun ke 11,80% pada 2024. Kenaikan tajam pada 2023 mencerminkan optimalisasi sumber-sumber PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang lebih efektif. Penurunan kecil pada 2024 perlu dicermati agar tidak berlanjut, sehingga potensi PAD dapat terus digali secara berkelanjutan.

Indikator rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) menunjukkan tren penurunan dari 68,235% pada 2022 menjadi 63,234% pada 2023, dan turun lagi ke 58,49% pada 2024. Penurunan ini menandakan adanya efisiensi dalam belanja pemerintahan umum, sehingga anggaran dapat lebih diarahkan ke belanja yang bersifat produktif dan mendukung pelayanan publik.

Sementara itu, indikator Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara konsisten meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun

berturut-turut (2022–2024). Hal ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah.

Secara keseluruhan, capaian urusan ini mencerminkan kinerja keuangan daerah yang sehat, ditandai dengan peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Tantangan ke depan adalah menjaga tren positif PAD melalui inovasi pengelolaan pendapatan, memperluas basis pajak daerah, dan memastikan belanja daerah semakin produktif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan.

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun. Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan.

Berikut merupakan prestasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama mengikuti Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sejak tahun 2021.

No	Tahun	Tingkat Provinsi	Tingkat Nasional
1	2021	Kabupaten Terbaik I Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Terbaik III Tingkat Nasional
2	2022	Kabupaten Terbaik I Provinsi Kalimantan Selatan	10 Besar Kabupaten Terbaik Tingkat Nasional
			Penghargaan Khusus Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Masa Pandemi Covid-19
3	2023	Kabupaten Terbaik I Provinsi Kalimantan Selatan	12 Besar Kabupaten Terbaik Tingkat Nasional
4	2024	Kabupaten Terbaik I Provinsi Kalimantan Selatan	10 Besar Kabupaten Terbaik Tingkat Nasional

Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas 2024

2. Pengawasan

Urusan Pengadaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan capaian yang stabil pada dua indikator utama yang mencerminkan kualitas tata kelola pengendalian internal dan pengawasan pemerintah daerah.

Tabel II-125 IKK Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3

Indikator maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) konsisten berada pada level 3 selama periode 2022–2024. Level ini mengindikasikan bahwa pengendalian internal pemerintah daerah telah berada pada tahap "terdefinisi", di mana kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian telah terdokumentasi dengan baik dan diimplementasikan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko, pemantauan, serta kepatuhan terhadap peraturan telah berjalan efektif dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga bertahan pada level 3 selama periode yang sama. Level ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal telah dilaksanakan dengan baik, termasuk dalam memberikan jaminan kualitas (assurance) dan konsultasi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Capaian ini menegaskan bahwa APIP telah mampu menjalankan perannya dalam mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen risiko secara efektif.

Secara keseluruhan, capaian yang konsisten pada kedua indikator ini mencerminkan stabilitas dan kematangan sistem pengendalian internal serta fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun, untuk mencapai level yang lebih tinggi, diperlukan upaya lanjutan seperti penerapan manajemen risiko terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian internal, serta peningkatan kapasitas SDM pengawasan untuk memperkuat deteksi dini atas potensi penyimpangan.

Dengan peningkatan berkelanjutan pada SPIP dan APIP, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah akan semakin akuntabel, transparan, dan mampu mendukung pembangunan yang efektif dan efisien.

3. Pengadaan

Urusan Pengadaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan pada sebagian besar indikator yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

Tabel II-126 IKK Fungsi Penunjang Pengadaan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	86.9236	97.1308998	95.8682277
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	8.91116	91.3734911	80.868583
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0.58225	30.3559978	55.3169643

Indikator persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama konsisten berada pada 0% selama periode 2022–2024, menunjukkan bahwa tidak ada proyek konstruksi yang tertunda hingga tahun berikutnya. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan penjadwalan proyek, serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan kontrak konstruksi di daerah.

Indikator persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif mengalami peningkatan dari 86,92% pada 2022 menjadi 97,13% pada 2023, kemudian sedikit menurun ke 95,87% pada 2024. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengadaan telah dilaksanakan secara kompetitif, sehingga mendorong terciptanya transparansi, efisiensi harga, dan kualitas barang/jasa yang lebih baik.

Indikator rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan mencatat lonjakan sangat signifikan dari 8,91% pada 2022 menjadi 91,37% pada 2023, kemudian menurun ke 80,87% pada 2024. Lonjakan pada tahun 2023 menunjukkan perbaikan besar dalam kepatuhan pelaksanaan belanja melalui mekanisme pengadaan yang sesuai regulasi, sementara penurunan pada 2024 masih dalam kisaran yang baik namun perlu dijaga agar tidak terus menurun.

Indikator peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-Koperasi) menunjukkan progres yang sangat positif dari 0,58% pada 2022 menjadi 30,36% pada 2023, dan naik lagi menjadi 55,32% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan afirmatif terhadap PDN dan UMK-Koperasi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kemandirian industri daerah.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang/jasa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berjalan dengan baik, ditandai dengan minimnya proyek yang tertunda, dominasi metode kompetitif dalam pengadaan, dan peningkatan penggunaan produk lokal. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga konsistensi kinerja pengadaan,

memperluas pemanfaatan e-procurement, serta memperkuat kapasitas pelaku UMK-Koperasi agar lebih siap berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

4. Kepegawaian

Fungsi Penunjang Kepegawaian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) di luar guru dan tenaga kesehatan. Namun, data capaian menunjukkan tren yang beragam dengan adanya peningkatan pada beberapa indikator, tetapi juga penurunan signifikan pada aspek tertentu yang memerlukan perhatian khusus.

Tabel II-127 IKK Fungsi Penunjang Kepegawaian Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		74.3478261	71.535115
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		15.8937198	25.6681168
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		78.4194529	55.8252427

Indikator rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar mengalami penurunan dari 74,35% pada tahun 2023 menjadi 71,54% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN, baik melalui program beasiswa, pelatihan, maupun fasilitasi peningkatan jenjang pendidikan formal bagi pegawai.

Sebaliknya, indikator rasio pegawai fungsional menunjukkan peningkatan signifikan dari 15,89% pada tahun 2023 menjadi 25,67% pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan adanya pergeseran positif dalam penataan kepegawaian dengan mendorong penempatan ASN pada jabatan fungsional sesuai keahlian masing-masing, yang mendukung efektivitas dan spesialisasi kerja birokrasi.

Namun, indikator rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi justru mengalami penurunan tajam dari 78,42% pada tahun 2023 menjadi 55,83% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun penempatan ASN pada jabatan fungsional meningkat, tidak semua pegawai yang menduduki jabatan tersebut memiliki sertifikasi kompetensi yang diperlukan. Hal ini menjadi catatan penting karena sertifikasi kompetensi merupakan tolok ukur profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugasnya.

Secara keseluruhan, capaian fungsi penunjang kepegawaian menunjukkan adanya kemajuan dalam penataan jabatan fungsional, namun dibarengi dengan tantangan dalam peningkatan kualifikasi pendidikan dan pemenuhan sertifikasi kompetensi. Ke depan, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dalam mendorong peningkatan kompetensi ASN, termasuk program sertifikasi profesi yang masif, pelatihan berbasis kompetensi, serta sinergi dengan lembaga pendidikan untuk peningkatan jenjang kualifikasi pegawai.

5. Manajemen Keuangan

Fungsi Penunjang Manajemen Keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik, ditandai dengan konsistensi dalam pengelolaan aset dan peningkatan efektivitas mobilisasi pendapatan, meskipun terdapat aspek yang perlu diperhatikan terutama terkait manajemen kas dan deviasi belanja.

Tabel II-128 IKK Fungsi Penunjang Manajemen Keuangan Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,03	1,12	1,03
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,73	0,87	1,13
3	Manajemen Aset	4	4	4
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	21,280	26.981	32.1069767

Indikator budget execution (deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD) relatif stabil pada kisaran rendah, yaitu 1,03 pada tahun 2022, naik sedikit menjadi 1,12 pada 2023, dan kembali ke 1,03 pada 2024. Stabilitas ini mencerminkan pelaksanaan anggaran yang efisien dengan deviasi belanja yang sangat kecil, sehingga menunjukkan kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaannya.

Indikator revenue mobilization (deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD) mengalami peningkatan dari 0,73 pada 2022, naik ke 0,87 pada 2023, dan mencapai 1,13 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD hingga melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, yang menandakan efektivitas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Indikator manajemen aset konsisten berada pada nilai 4 selama 2022–2024, mencerminkan pengelolaan aset daerah yang baik, termasuk dalam pencatatan, pengamanan, pemanfaatan, dan optimalisasi aset yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun, indikator cash management (rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya) menunjukkan tren peningkatan dari 21,28% pada 2022 menjadi 26,98% pada 2023, dan naik lagi ke 32,11% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sisa anggaran atau SILPA yang relatif besar masih terjadi, yang bisa mengindikasikan adanya kelebihan alokasi anggaran atau efisiensi yang belum disertai pemanfaatan optimal dana tersebut untuk belanja produktif.

Secara keseluruhan, capaian fungsi penunjang manajemen keuangan menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang baik dengan deviasi anggaran yang rendah, pencapaian PAD yang meningkat, dan pengelolaan aset yang stabil. Namun, tantangan ke depan adalah menekan rasio SILPA melalui perencanaan belanja yang lebih presisi serta mempercepat pelaksanaan program prioritas agar alokasi anggaran lebih optimal dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

6. Transparansi dan Partisipasi Publik

Fungsi Penunjang Transparansi dan Partisipasi Publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang relevan, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tabel II-129 IKK Fungsi Penunjang Transparansi dan Partisipasi Publik Tahun 2022-2024

No.	IKK Outcome	2022	2023	2024
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	84,238	93.7987904	92,81
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	100	100

Indikator informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan menunjukkan tren positif dengan capaian 84,24% pada 2022, meningkat ke 93,80% pada 2023, dan sedikit menurun menjadi 92,81% pada 2024. Peningkatan signifikan pada 2023 menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi terkait sumber daya pelayanan publik secara lebih transparan dan komprehensif. Penurunan kecil pada 2024 masih berada pada tingkat yang sangat baik, namun menjadi catatan untuk mempertahankan kualitas dan kelengkapan informasi yang diberikan kepada unit pelayanan garis depan serta masyarakat.

Indikator akses publik terhadap informasi keuangan daerah konsisten berada pada 100% selama periode 2022–2024, yang mencerminkan

keterbukaan penuh pemerintah daerah dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi keuangan daerah, di mana laporan anggaran, realisasi keuangan, serta dokumen-dokumen terkait dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berhasil menjaga transparansi informasi publik, khususnya terkait keuangan daerah dan sumber daya pelayanan publik. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah memastikan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan informasi tersebut untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam pengawasan, perencanaan, dan evaluasi program pemerintah.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, seperti portal data terbuka (open data) dan platform layanan publik digital, transparansi dan partisipasi publik dapat ditingkatkan lebih jauh untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

7. Kesatuan Bangsa dan Politik

Gerakan nasional revolusi mental bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter yang mengacu nilai-nilai strategis untuk kemajuan budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila. Sebagai gugus tugas daerah di kabupaten dalam hal pembangunan manusia yang berkarakter diperlukan upaya mengharmonisasikan prinsip-prinsip internalisasi nilai-nilai pendidikan yang luhur dari berbagai sumber, baik agama, budaya lokal, maupun nilai-nilai kebijakan yang mengakar di masyarakat. Pembangunan manusia berkarakter juga dimaksudkan untuk memfasilitasi kelestarian budaya lokal yang genuine (asli), kelembagaan sosial sehingga dapat berperan dan berkontribusi bagi penguatan keseluruhan karakter manusia dan bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan

publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 4 ayat (1) bahwa jenis SPM terdiri atas 6 Jenis Pelayanan Dasar (6 SPM) sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Bidang Urusan Sosial.

Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis pelayanan dasar urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Pendidikan Dasar
- 3) Pendidikan Kesetaraan

Dimana untuk realisasi dari capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel II-130 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					96.40 %
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini					95.09 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.34 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5549	5434	115	97.93 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.74 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83.72 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	108.11	-8.11	100.00 %
	2 . Angka partisipasi murni	%	100	97.93	2.07	97.93 %
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	51.82	51.79	0.03	99.94 %
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	80.88	79.98	0.89	98.89 %
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0.01	0.05	-0.04	100.00 %
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00 %
	7 . Indeks distribusi guru	%	1	0.42	0.58	42.00 %
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	30	35.81	-5.81	100.00 %
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	10	1.47	8.53	14.70 %
2 .	Pendidikan Dasar					94.92 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.87 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	30171	28992	1179	96.09 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.04 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	90.21 %
	SD (2024)					91.88 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	102.42	-2.42	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.6	0.40	99.60 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	58.45	54.89	3.56	93.91 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	44.97	42.75	2.22	95.06 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	77.73	70.71	7.02	90.97 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.86	70.17	3.69	95.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62.03	53.76	8.27	86.67 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	89.79	10.21	89.79 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	1	0.44	0.56	44.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	96	95.5	0.5	99.48 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	2	2.37	-0.37	100.00 %
	SMP (2024)					88.54 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	108.56	-8.56	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	95.03	4.97	95.03 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	67.89	66.65	1.24	98.17 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	64.19	58.75	5.44	91.53 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74.12	70.18	3.94	94.68 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74.69	71.93	2.76	96.30 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.75	55.32	5.43	91.06 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	80.24	19.76	80.24 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	1	0.34	0.66	34.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	94.5	93.45	1.05	98.89 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	6	4.27	1.73	71.17 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan					99.21 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	666	666	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.21 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96.04 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	62.69	37.31	62.69 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	55.5	53.53	1.97	96.45 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	53.2	51.13	2.07	96.11 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	68.5	66.54	1.96	97.14 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	58.5	57.35	1.15	98.03 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55	53.94	1.06	98.07 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Dari hasil capaian realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan terdapat permasalahan serta solusi yang dapat dilakukan agar prosesi pelaksanaan SPM dapat memenuhi target yang sudah direncanakan :

Permasalahan Bidang Urusan Pendidikan

1. Belum terkoneksi data anak usia sekolah antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab. HSS sehingga data yang ada hanya untuk SD dan SMP, untuk data siswa MI dan MTs menunggu dari Kementerian Agama Kab. HSS.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan (S1).
3. Tidak meratanya penyebaran guru dimana penumpukan guru di perkotaan dan guru di sekolah pinggiran masih banyak yang kurang

4. Masih ada sekolah yang kekurangan guru bidang studi, sebaliknya ada juga sekolah yang kelebihan guru sehingga menyebabkan terhambatnya sertifikasi.
5. Banyaknya guru yang memasuki usia pensiun dan mutasi sehingga menyebabkan kekurangan guru.
6. Kekurangan guru tersebut dapat tertutupi dengan adanya guru tenaga honor akan tetapi kadang kualifikasi guru yang mengisi tersebut tidak sesuai dengan mapel yang diampu.
7. Masih ada sekolah yang belum terakreditasi
8. Faktor penghambat yang menyebabkan angka persentase PAUD yang terakreditasi masih belum memenuhi target adalah karena terbatasnya kouta dari Badan Akreditasi Nasional untuk mengikuti akreditasi lembaga PAUD.
9. Belum tercapainya target persentase partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.
10. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki PAUD

Saran Solusi untuk Bidang Urusan Pendidikan

1. Harus ada MoU antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kemenag Kab. HSS untuk saling bersinergi masalah data peserta didik.
2. Agar segera menambah SDM yang memiliki kualifikasi dan memberikan surat edaran tentang penerimaan Pendidik PAUD minimal S1 dan melakukan diklat dasar bagi yang belum S1.
3. Perlunya pemetaan guru melalui penyegaran atau roling.
4. Untuk menutupi kekurangan guru di daerah perkotaan diatasi dengan perputaran, pengangkatan guru PPPK dan atau regrouping sekolah yang memungkinkan dari segi jarak, keadaan bangunan sekolah dan jumlah siswa.
5. Harus ada guru pengganti untuk menggantikan guru yang telah pensiun yaitu dengan cara mengusulkan PPPK pada tahun berikutnya.
6. Perlunya pemetaan terhadap guru untuk menutupi kekurangan guru yang ada.

7. Upaya yang dapat dilakukan ke depan untuk memperoleh nilai akreditasi adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD (workshop dan pendampingan)
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan PNF dalam mengupayakan kesiapan lembaga dalam proses akreditasi, diantaranya adalah dengan memberikan pembinaan kepada lembaga secara terus-menerus yang bertujuan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan angka persentase PAUD formal yang terakreditasi.
9. Tenaga kependidikan yang kurang dari SMA diminta untuk sekolah Paket kesetaraan (Paket C).
10. Melakukan pembenahan pada segi sarana dan prasarana baik rehabilitasi, pembangunan maupun pengadaan alat peraga.

Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB; Dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Dimana untuk realisasi dari capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel II-131 Realisasi Capaian SPM Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2		3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM						98.05 %	
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							97.40 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.44 %		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2846	2755	91	96.80 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						19.96 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.81 %		
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	3520	3520	0	100.00 %		
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	792000	792000	0	100.00 %		
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	4400	4400	0	100.00 %		
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	4400	4400	0	100.00 %		
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	4400	4400	0	100.00 %		
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	660	660	0	100.00 %		
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	4400	4400	0	100.00 %		
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4400	4400	0	100.00 %		
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4400	4400	0	100.00 %		
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	4400	4400	0	100.00 %		
	11 . Gel USG	Botol	4400	4400	0	100.00 %		
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang	21	21	0	100.00 %		
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %		
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	21	21	0	100.00 %		
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	21	21	0	100.00 %		
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	21	21	0	100.00 %		
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	2846	2755	91	96.80 %		
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							99.78 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.78 %		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2846	2838	8	99.72 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %		
	1 . Formulir partograf	Formulir	4400	4400	0	100.00 %		
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4400	4400	0	100.00 %		
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4400	4400	0	100.00 %		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2		3	4	5	6	7	8
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		Paket	21	21	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi		Orang	21	21	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan		Paket	21	21	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat		Orang	21	21	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian		Orang	21	21	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		Orang	21	21	0	100.00 %	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							98.43 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.43 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2847	2791	56	98.03 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	4061	4061	0	100.00 %		
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	4061	4061	0	100.00 %		
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	4061	4061	0	100.00 %		
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	4061	4061	0	100.00 %		
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	12183	12183	0	100.00 %		
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4061	4061	0	100.00 %		
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00 %		
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	21	21	0	100.00 %		
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	21	21	0	100.00 %		
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %		
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	21	21	0	100.00 %		
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	21	21	0	100.00 %		
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	21	21	0	100.00 %		
	14 . Kader Kesehatan	Orang	148	148	0	100.00 %		
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita							93.17 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.17 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	14822	13556	1266	91.46 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	14042	14042	0	100.00 %		
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	14042	14042	0	100.00 %		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	14042	14042	0	100.00 %	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	14042	14042	0	100.00 %	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	14042	14042	0	100.00 %	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	4061	4061	0	100.00 %	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	15866	15866	0	100.00 %	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	11805	11805	0	100.00 %	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	Vaksin	3935	3935	0	100.00 %	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	3935	3935	0	100.00 %	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	3125	3125	0	100.00 %	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	3125	3125	0	100.00 %	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	33795	33795	0	100.00 %	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	21	21	0	100.00 %	
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	21	21	0	100.00 %	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	21	21	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	21	21	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	21	21	0	100.00 %	
	20 . Guru PAUD	Orang	11	11	0	100.00 %	
	21 . Kader Kesehatan	Orang	148	148	0	100.00 %	
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						97.51 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.51 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	34877	33793	1084	96.89 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai	Buku	35943	35943	0	100.00 %	
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	35943	35943	0	100.00 %	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	35943	35943	0	100.00 %	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	395	395	0	100.00 %	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	10	10	0	100.00 %	
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	10782	10782	0	100.00 %	
	7 . Alat Pemeriksaan Hb	Alat	12	12	0	100.00 %	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	2237	2237	0	100.00 %	
	9 . Media promosi kesehatan	Paket	441	441	0	100.00 %	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	3901	3901	0	100.00 %	
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	21	21	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2		3	4	5	6	7	8
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan		Orang	21	21	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat		Orang	63	63	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		Orang	21	21	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian		Orang	21	21	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat		Orang	21	21	0	100.00 %	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru		Orang	441	441	0	100.00 %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor		Orang	395	395	0	100.00 %	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif							94.90 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.90 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	160676	150428	10248	93.62 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	105	105	0	100.00 %		
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	21	21	0	100.00 %		
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	21	21	0	100.00 %		
	4 . Alat : Glukometer	Unit	21	21	0	100.00 %		
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	21	21	0	100.00 %		
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	145.234	145.234	0	100.00 %		
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	21	21	0	100.00 %		
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	504	504	0	100.00 %		
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	21	21	0	100.00 %		
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	40000	40000	0	100.00 %		
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	57	33	24	100.00 %		
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	152383	152383	0	100.00 %		
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	13371	13371	0	100.00 %		
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	21	21	0	100.00 %		
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	208	208	0	100.00 %		
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	63	63	0	100.00 %		
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	21	21	0	100.00 %		
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	21	21	0	100.00 %		
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	148	148	0	100.00 %		
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut							99.49 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.49 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25981	25815	166	99.36 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %		
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	21	21	0	100.00 %		
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	21	21	0	100.00 %		
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	21	21	0	100.00 %		
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	27482	27482	0	100.00 %		
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	27482	27482	0	100.00 %		
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	27482	27482	0	100.00 %		
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00 %		
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	21	21	0	100.00 %		
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	21	21	0	100.00 %		
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %		
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	21	21	0	100.00 %		
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	21	21	0	100.00 %		
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	21	21	0	100.00 %		
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							96.85 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.42 %		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	69308	67939	1369	98.02 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.43 %		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	92.17 %		
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00 %		
	2 . Obat Hipertensi	Paket	2623915	160000	2463915	6.10 %		
	3 . Tensimeter	Unit	21	21	0	100.00 %		
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	70005	70005	0	100.00 %		
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00 %		
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	21	21	0	100.00 %		
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	21	21	0	100.00 %		
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2		3	4	5	6	7	8
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		Orang	21	21	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku		Orang	21	21	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian		Orang	21	21	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat		Orang	21	21	0	100.00 %	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							99.51 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4316	4316	0	100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						19.51 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.54 %	
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	4318	3044	1274	70.50 %		
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	21	21	0	100.00 %		
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	4318	4318	0	100.00 %		
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	4318	4318	0	100.00 %		
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	0	100.00 %		
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	21	21	0	100.00 %		
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	21	21	0	100.00 %		
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %		
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	21	21	0	100.00 %		
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	21	21	0	100.00 %		
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	21	21	0	100.00 %		
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	21	21	0	100.00 %		
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat							100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	652	652	0	100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis	Buku	21	21	0	100.00 %		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)						
	2 . Penyediaan Psikofarmaka	Jenus	12	12	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	652	652	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	652	652	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	21	21	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	21	21	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	21	21	0	100.00 %	
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	21	21	0	100.00 %	
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100.00 %	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4890	4890	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00 %	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	35	35	0	100.00 %	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	911	911	0	100.00 %	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	538	538	0	100.00 %	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	3500	3500	0	100.00 %	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	4890	4890	0	100.00 %	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	21	21	0	100.00 %	
	8 . Tuberkulin	Vial	10	10	0	100.00 %	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	21	21	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	21	21	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	21	21	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	21	21	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	1	1	0	100.00 %	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	21	21	0	100.00 %	
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)						100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2		3	4	5	6	7	8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5190	5190	0	100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00 %		
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	5190	5190	0	100.00 %		
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	5190	5190	0	100.00 %		
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	5190	5190	0	100.00 %		
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	21	21	0	100.00 %		
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	21	21	0	100.00 %		
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %		
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	21	21	0	100.00 %		
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	21	21	0	100.00 %		
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	21	21	0	100.00 %		

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2025

Dari hasil capaian realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan terdapat permasalahan serta solusi yang dapat dilakukan agar prosesi pelaksanaan SPM dapat memenuhi target yang sudah direncanakan :

Permasalahan Bidang Urusan Kesehatan

- Semua ibu hamil sudah diberikan pelayanan oleh tenaga kesehatan tapi untuk kunjungan sampai ke K4 terkendala karena masih adanya ibu hamil yang mengalami keguguran dan melahirkan di usia 7 bulan/prematur sehingga untuk capaian pelayanan antenatal care sesuai standar tidak mencapai target
- Masih adanya persalinan dengan bidan kampung di daerah sulit seperti di kecamatan loksado

- Adanya kematian bayi Usia 0 -28 hari sebanyak 36 bayi dan ada BBLR yang tidak bisa diberikan Hb0 sebanyak 23 orang dikarenakan BB nya di bawah 2000 gr
- Kegiatan posyandu pada masa pandemi tidak maksimal berjalan sehingga balita tidak datang untuk bertimbang
- pada masa pandemi ada sebagian sekolah tidak melakukan PTM sehingga ada 0.57% anak sekolah tidak mendapatkan skrining pelayanan Kesehatan
- Kesadaran Masyarakat untuk melakukan skrining FR PTM masih rendah
- Kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait penyakit Menular dan Tidak Menular.

Saran Solusi Bidang Urusan Kesehatan

- Melakukan kunjungan rumah untuk pemantauan ibu hamil resti agar tidak terjadi persalinan premature
- Kemitraan dan komitmen dengan kepala desa pada saat lokmin lintas sektor dan kemitraan dengan Bidan Kampung.
- Pendampingan /kunjungan rumah pada bayi resti.
- Melakukan sweeping ke rumah balita yang tidak datang ke posyandu
- Berkoordinasi dengan pihak sekolah agar bagi peserta didik yang tidak datang untuk melakukan janji temu dengan pihak puskesmas agar dilakukan skrining Kesehatan.
- Melakukan sosialisasi dan KIE terkait pentingnya pemeriksaan FR PTM di Posbindu
- Melakukan KIE terkait Penyakit menular dan Tidak Menular.

Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Dimana untuk realisasi dari capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel II-132 Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024							
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7296	7296	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	JARINGAN PERPIPAAN						
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1824	1824	0	100.00 %	
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1824	1824	0	100.00 %	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	607	315	292	100.00 %	
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	607	315	292	100.00 %	
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4336	4336	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dilayani / Dipenuhi				
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1084	1084	0	100.00 %	
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	2704	0	2704	100.00 %	
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1084	1084	0	100.00 %	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Dari hasil capaian realisasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum terdapat permasalahan serta solusi yang dapat dilakukan agar prosesi pelaksanaan SPM dapat memenuhi target yang sudah direncanakan :

Permasalahan Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan Permasalahan Air Minum:

- Kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang luas dengan kepadatan penduduk masih kecil sehingga membutuhkan investasi besar jaringan perpipaan.
- Topografi pegunungan di kecamatan Loksado dan Padang Batung menyulitkan akses PDAM untuk masuk sehingga diperlukan investasi yang besar untuk memenuhi akses SPAM Jaringan Perpipaan PDAM di lokasi tersebut.
- Biaya bulanan PDAM bagi sebagian masyarakat masih menjadi faktor keengganan memasang Sambungan Rumah (SR) Air Minum meski gratis.

Permasalahan Air Limbah :

- Topografi rawa pada tiga Kecamatan seperti Daha Utara, Daha Barat, dan Daha Selatan merupakan daerah rawa pasang surut cukup menyulitkan instalasi tangki septik pabrikan. Sementara itu tiga kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan angka BABS (Buang Air Besar Sembarangan) tertinggi dibanding kecamatan lain.
- Mindset dan culture set masyarakat yang pada umumnya masih belum bisa terlepas dari sungai sebagai pusat aktifitas rumah tangga seperti untuk keperluan minum, mandi sekaligus buang air.

Solusi Bidang Urusan Pekerjaan Umum

- Konsistensi dan sinergisitas pendanaan kegiatan dari APBD, DAK Sanitasi dan DAK Air Minum dan APBN Pamsimas dan Sanimas tetap menjadi solusi utama.
- Sinkronisasi penanganan dan penentuan lokus dari berbagai sumber dana tersebut dan kerja sama antara Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas PMD di bawah koordinasi Bappelitbangda merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan angka SPM air Minum dan Air Limbah secara signifikan .
- Pemicuan PHBS bersama Dinkes menjadi faktor penentu SPM air minum dan air limbah, serta dengan pemilihan lokasi dan kebutuhan yang lebih baik.

Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan rumah dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dimana untuk realisasi dari capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Tabel II-133 Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7

	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %
1 .	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				-100%	100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpe nuhi	100.00 %
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-100%	100.00 %
	Ada Relokasi Program Pemerintah					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpe nuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Dari hasil capaian realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat permasalahan serta solusi yang dapat dilakukan agar prosesi pelaksanaan SPM dapat memenuhi target yang sudah direncanakan :

Permasalahan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Pada program Kawasan permukiman dan program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh tidak tercapainya target untuk meningkatkan persentase rumah layak huni disebabkan oleh adanya perubahan program dalam peningkatan kualitas RTLH (BSPD/DAK) pada kementerian.

Saran Solusi untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Solusi yang direncanakan dan mulai dilaksanakan adalah Mengupayakan tambahan usulan peningkatan RTLH kepada kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari:

- 1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pengampu SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar. Sedangkan pengampu SPM Sub Urusan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dimana untuk realisasi dari capaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan adalah sebagai berikut :

Tabel II-134 Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					100.00 %
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	510	510	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara	Unit	92	92	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara*	Dokumen	6	6	0	100.00 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	78	78	0	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	171021	171021	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	100	100	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	171021	171021	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	12	12	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	171021	171021	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	Unit	1	1	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	6	6	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	19	19	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	19	19	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	16	16	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	1	1	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	442	442	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	58	58	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	2	2	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	125	125	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	5	5	0	100.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	1	0	1	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	1	0	1	100.00 %

Sumber : Satpol PP & Damkar dan BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Bidang Urusan Sosial

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kemetenterian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- 1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti:
- 2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti:
- 3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti:
- 4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti:
- 5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Dimana untuk realisasi dari capaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel II-135 Tabel Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM						99.67 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	150	150	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	12	12	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	150	150	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	15	15	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	15	15	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	150	150	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	150	150	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	150	150	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	526	526	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	13	13	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	13	13	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	526	526	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	7	7	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	13	13	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK		Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	285	285	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga		Orang	13	13	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan		Orang	1	1	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	782	782	0		100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	6	6	0		100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	6	6	0		100.00 %
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	782	782	0		100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	308	308	0		100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	87	87	0		100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	95	95	0		100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10	10	0		100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1	1	0		100.00 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1020	1020	0		100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0		100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	6	6	0		100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6	6	0		100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	12	12	0		100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti						98.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	23	23	0		100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						18.33 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	91.67 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	23	23	0		100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0		100.00 %
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	17	17	0		100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	3	3	0		100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0		100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	17	0	17	0.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	17	17	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	17	17	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	17	17	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1533	1533	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	1533	1533	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	1533	1533	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1	1	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	68	68	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1533	1533	0	100.00 %

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2025

Dari hasil capaian realisasi SPM Bidang Urusan Sosial terdapat permasalahan serta solusi yang dapat dilakukan agar prosesi pelaksanaan SPM dapat memenuhi target yang sudah direncanakan :

Permasalahan Bidang Urusan Sosial

- Penyediaan Data dilakukan melalui data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dikumpulkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan belum terdata untuk tahun 2024
- Perhitungan kebutuhan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia dan menyesuaikan persediaan bantuan tanggap darurat bencana yang masih ada pada stock opname. Untuk penyediaan sandang pada tahun 2024 belum diakomodir dengan APBD Kabupaten karena adanya barang bantuan tanggap darurat dari Kementerian Sosial

- Perencanaan dan penganggaran dilaksanakan dengan memaksimalkan pagu anggaran daerah yang tersedia tetapi untuk pelaksanaan SPM khususnya dibidang sosial, proses perencanaan dan penganggaran belum optimal dan belum berfokus pada target sasaran SPM dan indikator SPM atau dengan kata lain masih bersifat umum dan tidak terfokus sehingga belum semua kebutuhan untuk pemenuhan SPM dapat dianggarkan. Pada tahun selanjutnya akan kami fokuskan secara khusus perencanaan dan penganggaran terkait SPM melalui matriks perencanaan yang kami buat sehingga KPM dapat terlayani dengan baik dan maksimal. Kesulitan ini adalah dampak dari masa transisi dan penyesuaian terhadap Permendagri 90, kami terus berupaya agar pemetaan dan sinkronisasi kegiatan dapat berjalan optimal sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- Belum adanya kendaraan khusus roda empat (operasional) untuk layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti.
- Untuk tahun anggaran 2024 terjadi kesalahan pemetaan kegiatan khusus terkait penanganan bencana sehingga belum dapat dilakukan entry pada capaian realisasi kegiatan SPM pada aplikasi sesuai dengan indikator SPM yang seharusnya. Namun pelaksanaan SPM bidang Sosial khususnya penanganan bencana tetap terlaksana dengan baik. Untuk indikator SPM yang masih 0% karena tidak adanya penganggaran ataupun perencanaan maka akan terus kami lakukan evaluasi demi perbaikan layanan SPM khususnya bidang Sosial pada Dinas Sosial. Dan untuk Pagu dan Realisasi Anggaran pada pelaksanaan SPM tahun 2024 belum terpilah spesifik berdasarkan Bidang SPM yang ditangani dan hal ini tentu akan kami perbaiki ditahun-tahun mendatang.

Saran Solusi untuk Bidang Sosial

- Melakukan perbaikan dengan melakukan pengumpulan data terkait PPKS yang menjadi target layanan SPM pada tahun 2024
- Perlu dianggarkan untuk pembelian kendaraan Roda empat untuk Rehabilitasi di luar Panti.

II.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemenuhan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020. Kerjasama

Daerah dapat dilakukan antar daerah (KSDD) maupun dengan pihak ketiga (KSDPK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan kerja sama ini meliputi kerja sama wajib bagi daerah yang memiliki keterkaitan kewilayahan atau eksternalitas lintas daerah, serta kerja sama sukarela yang dipandang lebih efektif dan efisien apabila dilakukan bersama. Objek kerja sama mencakup urusan pemerintahan wajib, baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan sesuai karakteristik daerah. Tahapan kerja sama dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi dan pemetaan, penyusunan kesepakatan, persetujuan DPRD bila diperlukan, hingga pelaksanaan dan evaluasi secara berjenjang. Selain itu, kerja sama daerah juga dapat melibatkan pihak ketiga melalui mekanisme studi kelayakan dan perjanjian kerja sama yang diatur secara jelas. Dengan mekanisme tersebut, kerja sama daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi antar wilayah dan dengan pemerintah pusat, mendukung pencapaian target pembangunan daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel

Berikut merupakan kerjasama daerah yang telah dilakukan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurun waktu 2022 hingga 2024 :

No.	Klasifikasi Kerjasama Daerah	2022	2023	2024
1	Pelayanan Publik	7	10	26
2	Pendidikan	3	6	2
3	Sarana dan Prasarana	1	-	-
4	Kesehatan	-	4	-
5	Keuangan	-	9	6
6	Hukum	-	1	
7	Pariwisata	-	-	1

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Kerja sama daerah yang dilaksanakan selama periode 2022–2024 mencakup berbagai bidang strategis sesuai dengan kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani. Pada sektor pelayanan publik, kerja sama difokuskan pada peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, percepatan pelayanan terpadu, serta penguatan kapasitas aparatur melalui program pelatihan dan pendampingan teknis. Di bidang pendidikan, kerja sama dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan perguruan tinggi untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian terapan, serta program magang bagi mahasiswa. Pada sektor kesehatan, MoU yang ditandatangani mencakup kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat serta peningkatan kapasitas tenaga medis. Selain itu,

kerja sama di bidang keuangan berfokus pada optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, pemanfaatan teknologi informasi untuk transaksi non-tunai, serta pendampingan penguatan akuntabilitas keuangan daerah. Di bidang hukum, kerja sama diwujudkan melalui MoU dengan lembaga penegak hukum untuk mendukung penyuluhan hukum, penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, sektor pariwisata menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan komunitas lokal untuk pengembangan destinasi wisata berbasis potensi daerah serta promosi pariwisata terpadu. Keseluruhan MoU tersebut menunjukkan bahwa kerja sama daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, serta pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

II.7 BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan BLU sebagai bagian dari perbendaharaan negara telah disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perbendaharaan negara juga meliputi pengelolaan Badan Layanan Umum.

Pembentukan BLU diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan. Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu produk dari reformasi keuangan. Adanya reformasi keuangan berdampak pada kegiatan pelayanan BLU/BLUD kepada

masyarakat. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang kini lebih mengedepankan efisiensi maupun efektivitas dan produktivitas pelayanan masyarakat, alih-alih mencari keuntungan. Adanya Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU ini diharapkan dapat di implementasikan pada seluruh BLU maupun BLUD.

Untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD, dikeluarkanlah aturan pelaksanaan terkait dengan BLUD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Berikut merupakan data terkait BLUD yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

Tabel II-136 BLUD di Kabupaten Hulu Sungai Sealtan

No	Jenis	Nama BLUD
1	Rumah Sakit Tipe B	RSUD Brigjend. H Hasan Basry Kandangan
2	Rumah Sakit Tipe C	RSUD Daha Sejahtera
3	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Kandangan
4	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Jambu Hilir
5	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Gambah
6	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Bayanan
7	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Baruh Jaya
8	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Sungai Pinang
9	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Bajayau
10	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Negara
11	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Pasungkan
12	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Simpur
13	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Wasah
14	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Sungai Raya
15	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Batang Kulur
16	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Padang Batung
17	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Kaliring
18	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Angkinang
19	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Bamban
20	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Telaga Langsung
21	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Kalumpang
22	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Loksado
23	Puskesmas Rawat Jalan	Puskesmas Malinau

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

II.8 PT. Tirta Amandit (Perseroda)

PT. Tirta Amandit (Perseroda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 7 Desember 2022. Pendirian PT.Tirat Amandit (Perseroda) telah mendapatkan

Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Tirta Amandit. PT Tirta Amandit (Perseroda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkedudukan di Jalan Kamboja Nomor 1 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan Akte Pendirian, PT. Tirta Amandit (Perseroda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak di dalam bidang :

- 1. Industri Pengolahan
- 2. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah
- 3. Aktivitas Kontruksi.

Saat ini PT. Tirta Amandit (Perseroda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak di Bidang Pengelolaan Air Bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, PT> Tirta Amandit (Perseroda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan didukung oleh 7(tujuh) unit instalasi Kota Kecamatan (IKK) yang masing-masing berada di : IKK Padang Batung, IKK Angkinang, IKK Telaga Langsat, IKK Kalumpang, IKK Simpur, IKK Sungai Raya, IKK Daha Barat dan 1(satu) cabang yaitu Cabang Negara.

Berdasarkan hasil opini Kantor Akuntan Publik (KAP) atas laporan keuangan PT Tirta Amandit Perseroda selama periode 2020–2023, perusahaan secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

Tabel II-137 Opini KAP Atas Laporan Keuangan PT. Tirta Amandit (Perseroda) Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Hasil Opini	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : Laporan Tahunan PT. Tirta Amandit (Perseroda) Tahun 2023

Dari sisi kinerja keuangan, perkembangan perusahaan menunjukkan tren yang dinamis. Laba perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp552 juta meningkat signifikan menjadi Rp1 miliar pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp812 juta, dan kembali menurun pada

tahun 2023 menjadi Rp242 juta. Meski demikian, total aset perusahaan mengalami pertumbuhan stabil dari Rp33 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp35 miliar pada tahun 2023, dengan arus kas operasional yang relatif terjaga di kisaran Rp3,4 hingga Rp4,3 miliar.

Dari sisi layanan, jumlah pelanggan mengalami pertumbuhan konsisten dari 19.883 pelanggan pada tahun 2020 menjadi 23.728 pelanggan pada tahun 2023, dan terus bertambah hingga mencapai 24.013 pelanggan pada Mei 2024

Tabel II-138 Perkembangan Perusahaan dan Jumlah Pelanggan Tahun 2020-2024

Tahun	Laba	Aset	Arus Kas	Jumlah Pelanggan
2020	552 Juta	33 M	3,8 M	19.883
2021	1 M	34 M	3,7 M	21.213
2022	812 Juta	35 M	4,3 M	22.515
2023	242 Juta	35 M	3,4 M	23.728
Mei 2024	-	-	-	24.013

Sumber : Laporan Tahunan PT. Tirta Amandit (Perseroda) Tahun 2023

Evaluasi kinerja oleh BPKP juga menunjukkan bahwa berdasarkan Kemendagri Nomor 47 Tahun 1999, predikat kinerja perusahaan tetap berada pada kategori "Baik" dengan skor yang relatif stabil, sementara berdasarkan penilaian Kementerian PUPR, PT Tirta Amandit Perseroda secara konsisten memperoleh kategori "Sehat" dengan skor di atas 3, yang mencerminkan kinerja operasional dan keuangan yang terjaga.

Tabel II-139 Evaluasi Kinerja oleh BPKP Tahun 2020-2023

Aspek	2020	2021	2022	2023
Berdasarkan Kemendagri No.47 Tahun 1999				
Predikat Kinerja	Baik (65,70)	Baik (63,90)	Baik (63,90)	Baik (63,15)
Berdasarkan Kementerian PUPR				
Kategori	Sehat (3,14)	Sehat (3,46)	Sehat (3,53)	Sehat (3,45)

Sumber : Laporan Tahunan PT. Tirta Amandit (Perseroda) Tahun 2023

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa PT Tirta Amandit Perseroda memiliki tata kelola keuangan yang baik dan tingkat kesehatan perusahaan yang stabil, meskipun tantangan pada aspek laba masih perlu menjadi perhatian. Pertumbuhan jumlah pelanggan yang berkelanjutan menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sehingga perusahaan memiliki potensi untuk memperkuat kinerja keuangan di masa mendatang melalui peningkatan efisiensi operasional dan optimalisasi pendapatan.

II.9 Gambaran Keuangan Daerah

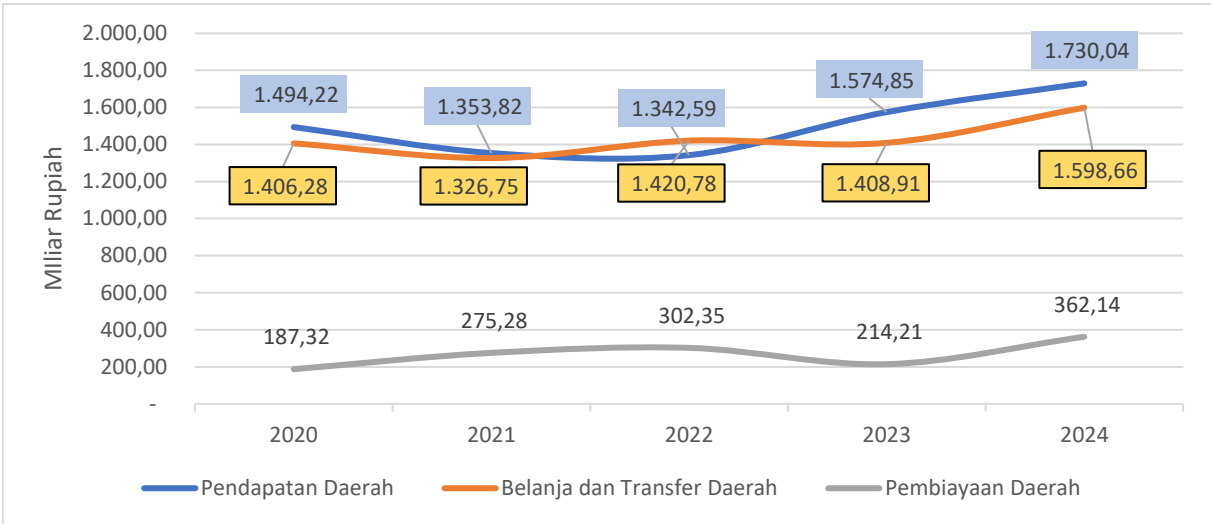
II.9.1 Kinerja Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam upaya mengatur keuangan daerah agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka dibutuhkan suatu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan dengan APBD. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu, jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Gambar II-57 Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Berdasarkan realisasi pendapatannya, total pendapatan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan Kenaikan, yang ditunjukkan dengan rata-rata Kenaikan sebesar 3,39 persen per tahun. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah di kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 1.494.217.423.038,81 dan mengalami kenaikan hingga tahun 2024, hingga besarnya menjadi Rp 1.730.043.230.546,90. Adapun, total belanja dan transfer daerah di kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,81 persen per tahun, di mana besaran belanja ini tercatat sebesar Rp 1.406.278.238.726,75 di tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 1.598.656.735.693,28 di tahun 2024. Selanjutnya, dilihat dari pembiayaan daerahnya, besaran pembiayaan netto di kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,34 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran pembiayaan netto di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 187.321.728.933,38, yang kemudian besaran tersebut menunjukkan besaran yang fluktuatif hingga tahun 2024, hingga capaiannya menjadi Rp 362.140.105.980,57.

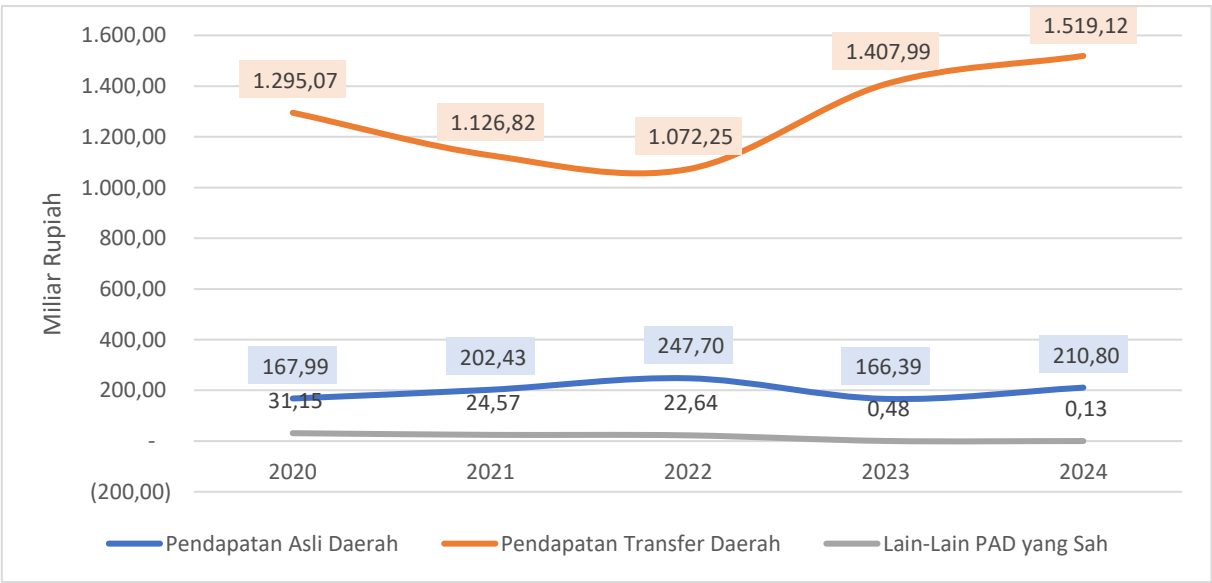
Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber pendapatan daerah meliputi (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat yang mencakup dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa; serta transfer antar daerah yang mencakup pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, komponen pendapatan transfer memiliki komposisi yang paling besar dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan rata-rata kontribusinya, pendapatan transfer memiliki rata-rata kontribusi sebesar 85,67 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sementara rata-rata kontribusi PAD tercatat sebesar 13,28 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1,05 persen. Selanjutnya, berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, komponen PAD memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan dua komponen lainnya, yakni sebesar 7,35 persen per tahun. Sama halnya dengan komponen PAD, komponen pendapatan transfer juga menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,27 persen per tahun. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan yang sah tercatat menunjukkan kecenderungan menurun yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 40 persen per tahun.

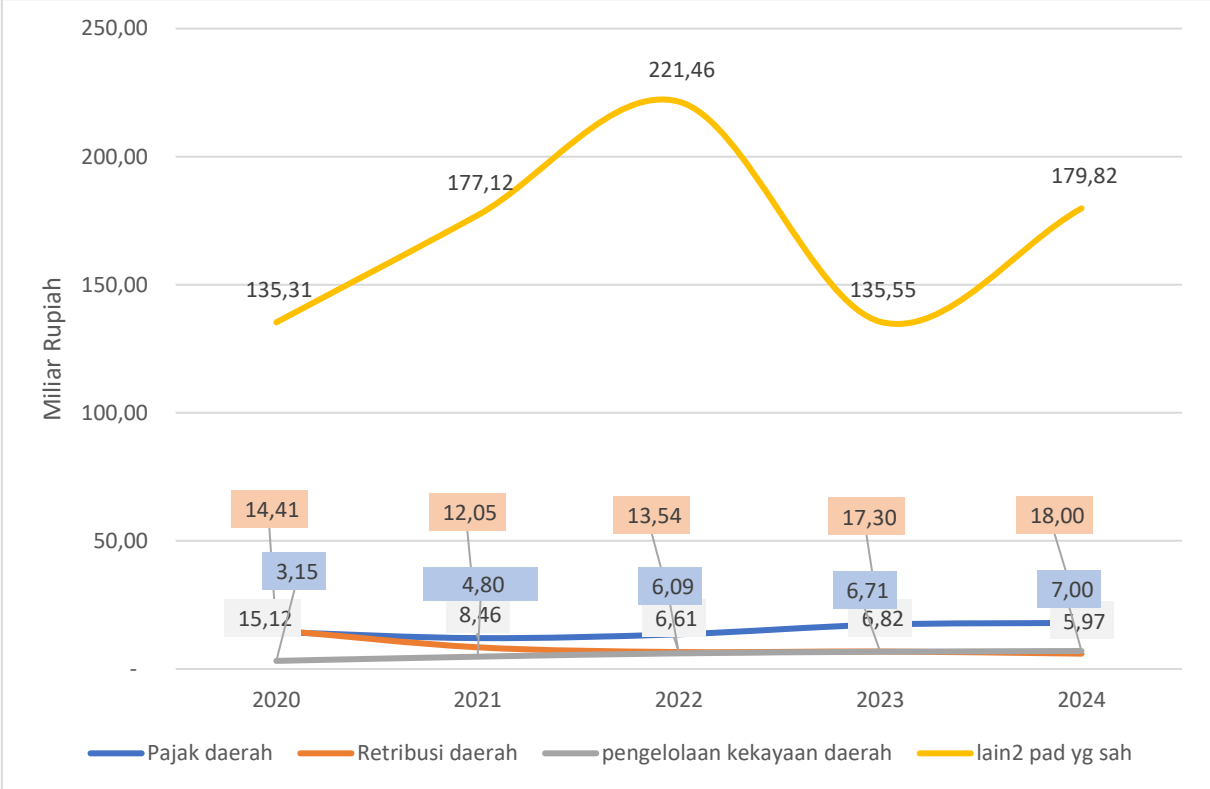
Gambar II-58 Perkembangan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, PAD merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal, dan semakin kecil ketergantungan dan/atau tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk memperoleh PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.

Gambar II-59 Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan



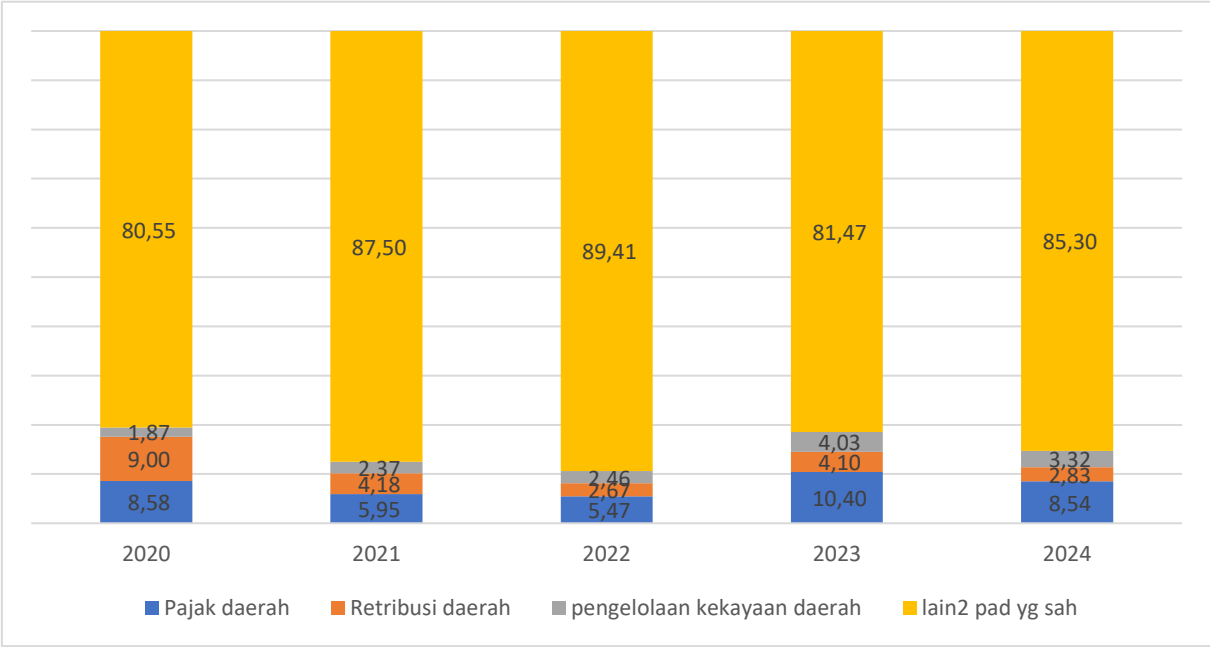
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Pada tahun 2020 besaran PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 167.990.651.494,81, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp 210.796.181.341,90. Dilihat dari komponen pembentuknya, komponen pendapatan pajak daerah tercatat menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,56 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen pendapatan ini tercatat sebesar Rp 14.412.031.504,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 menjadi sebesar Rp 17.998.220.856,00. Komponen pendapatan retribusi daerah tercatat

menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 15,02 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 komponen pendapatan ini tercatat sebesar Rp 15.116.946.827,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 5.974.690.084,00 di tahun 2023.

Selanjutnya, komponen pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan menunjukkan besaran dengan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,77 persen per tahun. Komponen dengan rata-rata pertumbuhannya tertinggi dalam struktur PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini tercatat sebesar Rp 3.149.352.464,00 di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi Rp 7.004.148.066,00 di tahun 2023. Terakhir, komponen lain-lain PAD yang sah tercatat sebesar Rp 135.321.320.699,81 di tahun 2020 dan menunjukkan kecenderungan meningkat sampai dengan tahun 2024 menjadi Rp 179.819.122.335,90 di tahun 2024, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,96 persen per tahun. Berdasarkan proporsinya, Pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan memiliki rata-rata kontribusi paling tinggi diantara tiga komponen pembentuk PAD yang lainnya, yakni dengan besaran 18,77 persen, yang diikuti oleh Lain-lain PAD yang sah sebesar 9,96 persen, Pendapatan pajak daerah yang dengan besaran rata-rata kontribusi sebesar 5,56 persen.

Gambar II-60 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

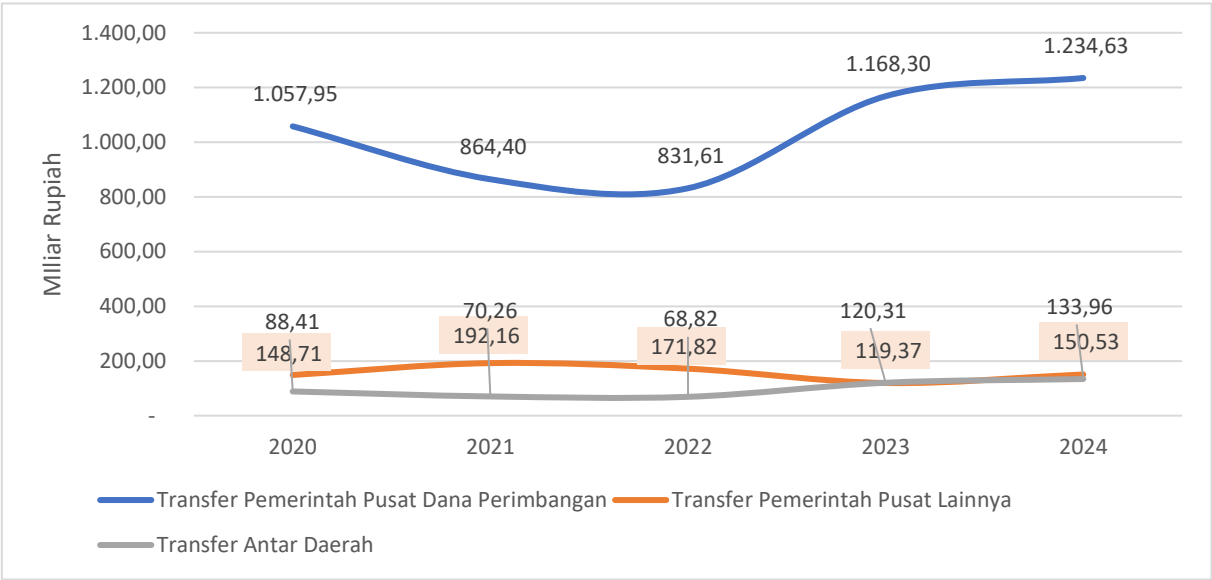


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Selanjutnya, kebijakan transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan transfer pemerintah pusat yang merupakan dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer antar daerah. Hingga tahun 2024, pendapatan transfer masih menjadi kontributor utama dalam penerimaan

daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau dengan rata-rata kontribusi dalam lima tahun terakhir yang tercatat sebesar 85,67 persen. Besaran tersebut mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi. Berdasarkan nominalnya, dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, komponen transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), komponen transfer antar daerah dan komponen transfer pemerintah pusat lainnya menunjukkan peningkatan.

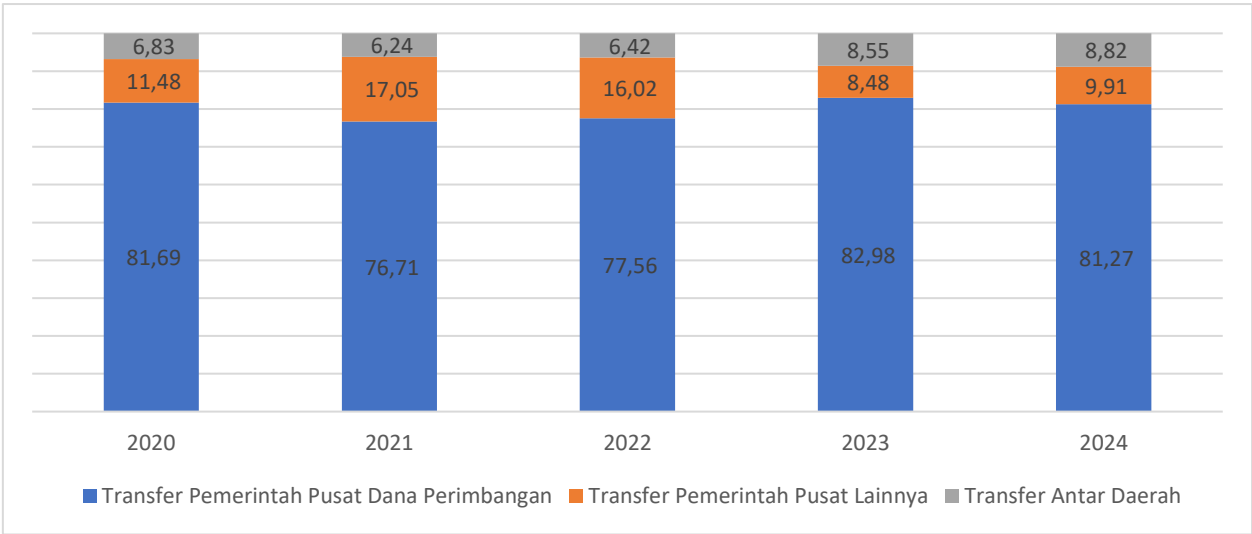
Gambar II-61 Perkembangan Komponen Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Komponen transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari APBN yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintahan pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintahan daerah. Pada tahun 2020, besaran pendapatan transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 1.057.953.649.787,00 dan bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,82 persen per tahun hingga besarnya menjadi Rp 1.234.633.624.682,00 di tahun 2024. Berdasarkan nominal komponen pembentuknya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, alokasi DBH menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. sementara DAK dan DAU memiliki kecenderungan menurun yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan yang bertumbuh negatif.

Gambar II-62 Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Terkait dengan komposisi dana perimbangan, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, DAU merupakan komponen terbesar dari dana perimbangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 47,71 persen. Dana alokasi umum merupakan dana yang digulirkan pemerintah pusat untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan DAU diperoleh dari alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung dari kebutuhan belanja pegawai, sementara celah fiskal yang diperoleh dari selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. DAU merupakan dana yang paling elastis pemanfaatannya, hal tersebut dikarenakan pemanfaatan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah dan tanpa syarat apapun. Pada tahun 2020, besaran DAU yang diterima oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 538.186.183.000,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp 491.370.004.000,00, atau dengan rata-rata penurunan sebesar 1,69 persen per tahun.

Setelah DAU, proporsi terbesar kedua dari struktur dana perimbangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah DAK. Dalam rentang waktu yang sama, komponen pendapatan ini memiliki rata-rata kontribusi sebesar 19,07 persen. DAK merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus. DAK terdiri dari dua komponen, yakni DAK fisik dan non fisik. DAK fisik diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sementara DAK non fisik dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Pada tahun 2020, besaran DAK di kabupaten ini tercatat sebesar Rp

239.651.436.191,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 226.414.721.959,00, atau dengan rata-rata Penurunan pertumbuhan sebesar 0,84 persen per tahun. Selanjutnya, DBH baik pajak maupun sumber daya alam yang dialokasikan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki proporsi 33,22 persen, atau dengan besaran Rp 280.116.030.596.00 di tahun 2020, dan berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,68 persen per tahun menjadi Rp 516.848.898.723,00 di tahun 2024.

Selanjutnya, komponen pendapatan transfer lainnya yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah transfer pemerintah pusat lainnya, yakni penerimaan dana penyesuaian/dana insentif daerah (DID) dan dana desa. Pada tahun 2020, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya di Kabupaten hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 148.706.398.200,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi Rp 150.530.265.000,00 atau dengan rata-rata Kenaikan sebesar 2,84 persen per tahun. Pada tahun 2024, seluruh pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya di kabupaten ini berupa dana desa, di mana dana tersebut diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Komponen selanjutnya yang menjadi komponen dari pendapatan transfer daerah adalah pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran transfer pemerintah provinsi yang diterima oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,72 persen per tahun. Pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima Rp 88.414.416.882,00 dari pemerintah provinsi dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 di mana besarannya menjadi Rp 133.955.221.252,00. Terakhir, komponen lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 40 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran komponen pendapatan ini tercatat sebesar Rp 31.152.306.675,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 127.938.271,00 di tahun 2024.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah,

tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat adalah indeks kemandirian fiskal. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu kabupaten yang kondisi kemandirian fiskal yang masuk dalam kategori belum mandiri karena menunjukkan capaian di bawah 0,25.

Tabel II-140 Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 - 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Komponen A	1.052.102.385.005,00	1.018.733.815.279,00	1.396.456.124.088,00	1.480.012.176.934,00	1.655.067.557.200,00
DAU	482.100.383.000,00	474.753.627.000,00	473.900.465.240,00	491.370.004.000,00	518.400.709.656,00
Dana Desa	117.434.196.000,00	118.303.532.000,00	107.798.562.000,00	111.423.331.000,00	109.594.295.000,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	70.261.383.049,00	68.817.570.282,00	120.313.759.249,00	133.955.221.252,00	131.403.258.184,00
DAK	159.918.084.762,00	159.085.774.511,00	198.175.603.752,00	226.414.721.959	191.879.403.360,00
Penerimaan pinjaman daerah	5.504.000,00		43.220.000,00		
DBH	222.382.834.194,00	197.773.311.486,00	496.224.513.847,00	516.848.898.723,00	703.789.891.000,00
Komponen B	1.254.527.892.518,86	1.266.431.749.845,62	1.562.842.237.108,88	1.690.808.358.274,90	1.883.958.705.658,02
PAD	202.425.507.513,86	247.697.934.566,62	166.386.113.020,88	210.796.181.341,90	228.891.148.458,02
DAU	482.100.383.000,00	474.753.627.000,00	473.900.465.240,00	491.370.004.000	518.400.709.656,00
Dana Desa	117.434.196.000,00	118.303.532.000,00	107.798.562.000,00	111.423.331.000	109.594.295.000,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	70.261.383.049,00	68.817.570.282,00	120.313.759.249,00	133.955.221.251,00	131.403.258.184,00
DAK	159.918.084.762,00	159.085.774.511,00	198.175.603.752,00	226.414.721.959	191.879.403.360,00
Penerimaan pinjaman daerah	5.504.000,00		3.220.000,00		
DBH	222.382.834.194,00	197.773.311.486,00	496.224.513.847,00	516.848.898.723,00	703.789.891.000,00
A/B	0,84	0,80	0,89	0,88	0,88
Indeks Kemandirian Fiskal	0,16	0,20	0,11	0,12	0,12
Kondisi Kemandirian Fiskal	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri

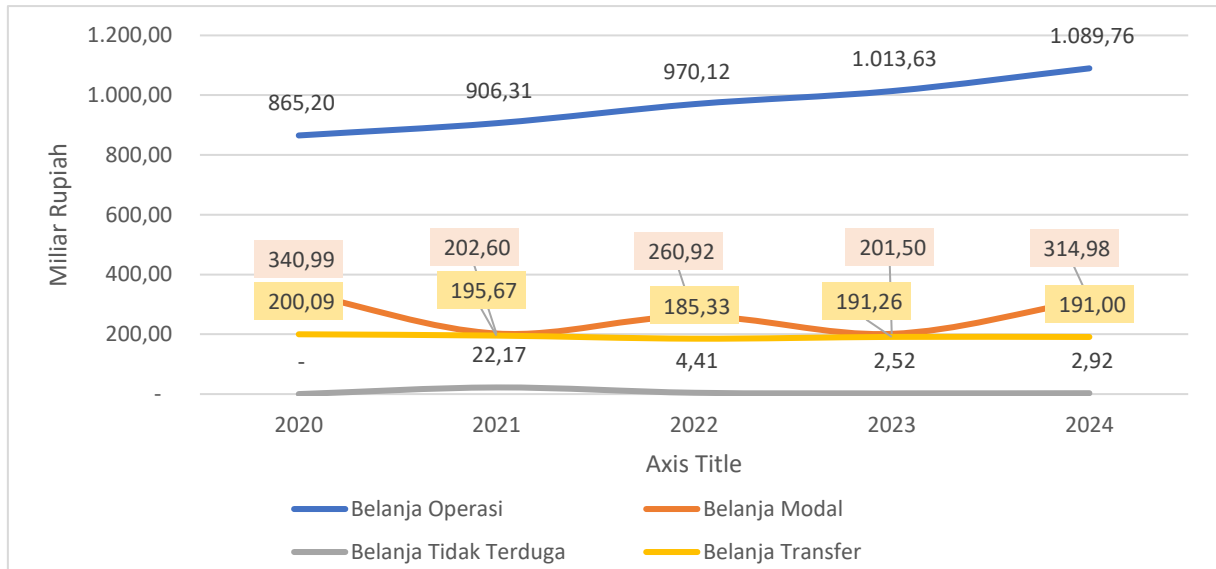
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-20234 (Audited), Diolah

Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Analisis belanja daerah digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggunakan APBD, apakah telah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, dimana hal tersebut dilakukan untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dirinci atas jenis belanja modal. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Gambar II-63 Perkembangan Struktur Belanja Daerah dalam Anggaran Belanja Daerah



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

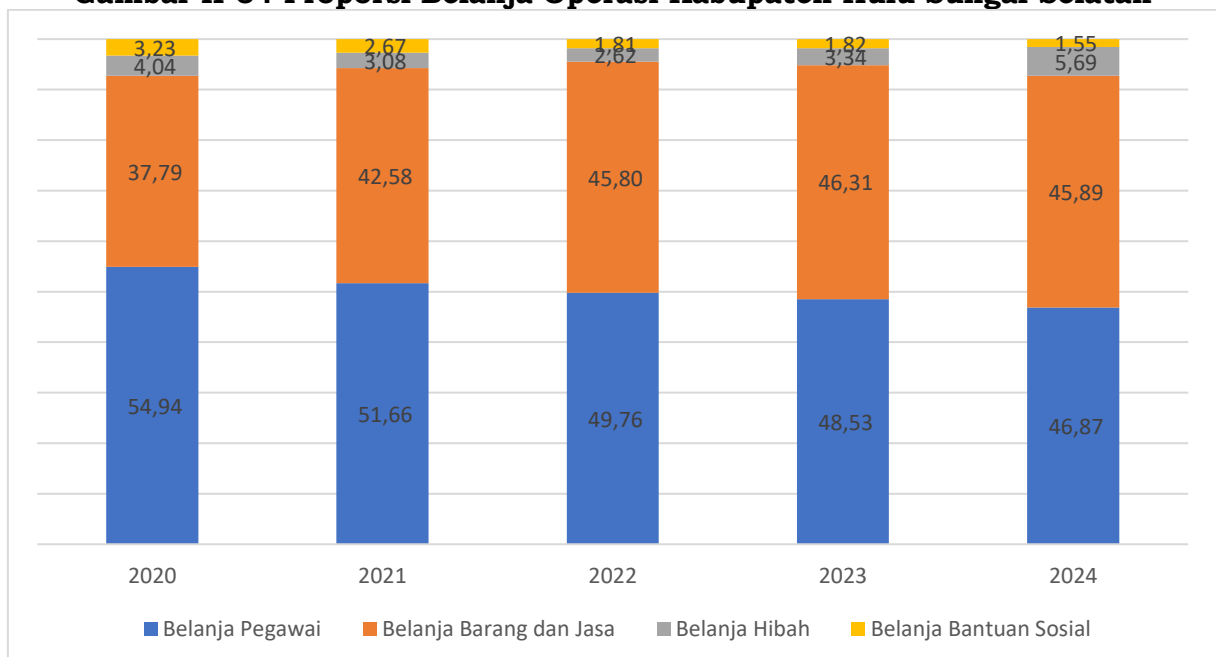
Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 2,81 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran belanja daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 1.406.278.238.726,75 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp 1.598.656.735.693,28. Perhitungan pertumbuhan belanja daerah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan komponen-komponen belanja dari tahun ke tahun, di mana pada umumnya besaran nilai belanja daerah memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap tingkat inflasi, perubahan kurs, penyesuaian kondisi makro ekonomi, dan lainnya. Meskipun umumnya besarnya meningkat, namun berkaitan dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja, dan penghematan anggaran.

Berdasarkan proporsinya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, belanja operasi merupakan komponen belanja dengan kontribusi terbesar dalam struktur belanja daerah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 67,65 persen, yang kemudian diikuti oleh komponen belanja modal sebesar

18,45 persen, belanja tak terduga 0,45 persen dan belanja transfer 13,45 persen, Sementara itu, berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, komponen belanja operasi dan belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, sementara komponen belanja tak terduga dan belanja transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif (menurun).

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, komponen belanja operasi dalam struktur belanja daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,76 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 besaran komponen belanja tersebut tercatat sebesar Rp 865.199.123.173,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp 1.089.758.445.852,70. Secara lebih detail, komponen belanja pegawai menunjukkan rata-rata kontribusi tertinggi dalam struktur belanja operasi di kabupaten ini, yakni dengan besaran 50,13 persen. Capaian tersebut menandakan bahwa porsi belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga tahun 2024 masih tergolong tinggi. Komponen belanja operasi dengan kontribusi terbesar selanjutnya adalah komponen belanja barang dan jasa dengan rata-rata kontribusi sebesar 43,90 persen, yang diikuti oleh komponen belanja hibah dengan besaran 3,80 persen, dan komponen belanja bantuan sosial sebesar 2,17 persen.

Gambar II-64 Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung rasio belanja pegawai, di mana rasio tersebut digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin turunnya porsi belanja pegawai dalam APBD mengindikasikan semakin membaiknya kualitas belanja daerah, hal tersebut terjadi karena semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik, seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2020, komponen belanja pegawai di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 475.340.937.446,75 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,47 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp 510.805.103.799,42 di tahun 2024. Alokasi belanja pegawai ini diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN–tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja pegawai BOS, serta belanja pegawai BLUD.

Selanjutnya, proporsi terbesar kedua dalam struktur belanja operasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS, serta belanja barang dan jasa BLUD. Berdasarkan nominalnya, komponen belanja barang dan jasa di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 326.935.755.106,25 di tahun 2020, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan mengalami kenaikan sebesar 9,07 persen per tahun, hingga pada tahun 2024 komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 500.094.930.891,28.

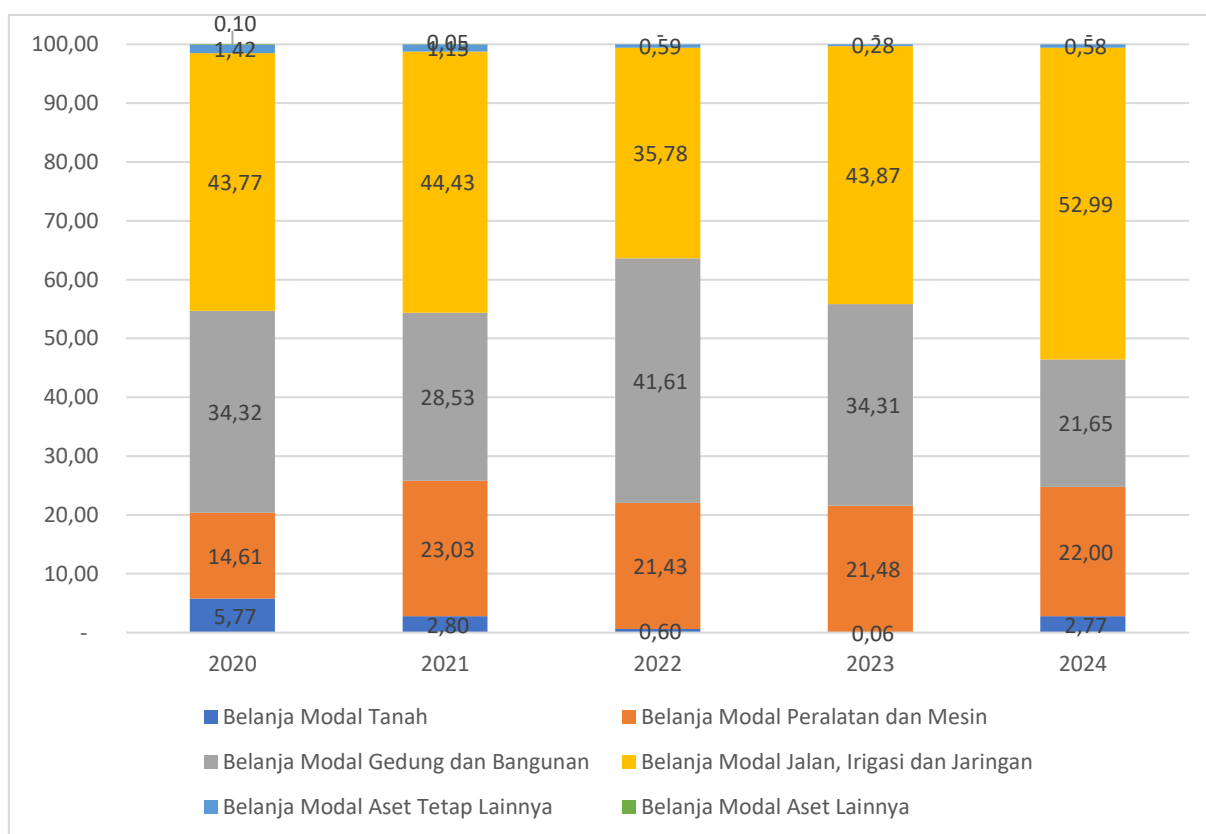
Belanja hibah sebagai komponen belanja operasi dengan rata-rata proporsi terbesar ketiga ini digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2020, komponen belanja hibah di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 34.971.036.943,00, dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,42 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp 61.990.049.648,00 di tahun 2024. Pada tahun 2024, alokasi belanja hibah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dialokasikan untuk belanja hibah kepada pemerintah pusat, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, belanja hibah dana BOS–belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Setdikdas Swasta, serta belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu komponen belanja operasi yang kontinyu tercatat hingga tahun 2024. Realisasi belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, komponen belanja bantuan sosial di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 27.951.393.677,00, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 8,89 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp 16.868.361.514,00 di tahun 2024.

Selanjutnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, komponen belanja modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan Kenaikan, begitu pula yang tercatat pada sebagian besar komponennya yang juga menunjukkan Kenaikan. Pada tahun 2020,

komponen belanja modal di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 340.987.909.455,75, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp 314.976.748.840,58, atau dengan rata-rata Kenaikan sebesar 4,35 persen per tahun. Kenaikan yang terjadi sejak tahun 2021, Sementara itu, berdasarkan rata-rata proporsinya, dalam kurun waktu yang sama, struktur pembentuk belanja modal terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah belanja modal Jalan, Irigasi, dan jaringan sebesar 44,51 persen, yang diikuti oleh belanja modal gedung dan bangunan sebesar 31,85, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 20,06 persen, belanja modal tanah 2,71 persen, belanja aset tetap lainnya 0,84 persen, dan belanja aset lainnya/aset tak berwujud 0,03 persen.

Gambar II-65 Proporsi Belanja Modal Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Secara lebih detail, komponen belanja tanah dalam struktur belanja modal di Kabupaten tercatat sebesar Rp 19.667.528.871,00 di tahun 2020 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 dengan kenaikan mencapai 64,33 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp 8.730.800.952,00. Selanjutnya, komponen belanja peralatan dan mesin yang dalam kurun

waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 10,19 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 komponen belanja modal ini tercatat sebesar Rp 49.819.929.451,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp 69.282.699.025,00.

Komponen belanja selanjutnya dalam struktur belanja modal Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah komponen belanja gedung dan bangunan. Pada tahun 2020, komponen belanja modal tersebut tercatat sebesar Rp117.039.470.166,00, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun atau ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 0,10 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp68.204.311.868,58 di tahun 2024, sedangkan Komponen belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Pada tahun 2020, komponen belanja modal tersebut tercatat sebesar Rp149.267.120.517,75 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2023 hingga besarnya menjadi Rp166.919.396.895,00, atau dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,51 persen per tahun.

Belanja aset tetap lainnya dalam lima tahun terakhir tercatat menunjukkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 16,07 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 komponen belanja modal ini tercatat sebesar Rp4.844.160.450,00 dan berfluktuasi menjadi Rp1.839.540.100,00 di tahun 2023. Komponen terakhir dalam struktur belanja modal Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah belanja aset tetap lainnya (aset tak berwujud), yang merupakan satu-satunya komponen belanja modal dengan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,03 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen belanja modal ini tercatat sebesar Rp349.700.000,00 dan berfluktuasi menjadi Rp0,00 di tahun 2024.

Komponen belanja selanjutnya adalah belanja tak terduga, di mana dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 merupakan komponen belanja daerah dengan besaran rata-rata pertumbuhan tertinggi apabila dibandingkan dengan komponen belanja daerah lainnya. Pada tahun 2020, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 0,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp2.922.935.000,00, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar (21,37) persen per tahun. Dalam masa pandemi Covid

19 yang terjadi sejak tahun 2020, salah satu realisasi belanja tak terduga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga tahun 2021 digunakan untuk penanganan Covid 19. Selain itu, pada pos belanja ini juga salah satunya dialokasikan untuk penanganan tanggap darurat Gunung Merapi. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi belanja tak terduga digunakan untuk pengembalian beberapa komponen belanja, pembayaran denda, serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya, komponen belanja yang terakhir yakni belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Berdasarkan nominalnya, pada tahun 2020 besaran belanja transfer di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp200.091.206.098,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 dengan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,89 persen per tahun, hingga besarnya menjadi Rp190.998.606.000,00.

Selanjutnya, beberapa urusan yang dapat dihitung proporsinya diantaranya adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan mandatory spending atau belanja wajib. Belanja pendidikan merupakan satu dari empat mandatory spending yang ditetapkan oleh pemerintah. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBD didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan alokasi anggarannya, berdasarkan data yang ditemukan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, anggaran belanja pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,41 persen per tahun. Pada tahun 2020, dengan anggaran belanja urusan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 232.285.858.799,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi Rp 360.573.916.049,00. Berdasarkan nominal tersebut, dalam kurun waktu

perencanaan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, alokasi belanja pendidikan di kabupaten ini telah mampu melampaui 20 persen dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun 2024.

Sama dengan belanja pendidikan, belanja kesehatan juga merupakan *mandatory spending* yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal sepuluh persen dari APBD di luar gaji. Adapun besaran anggaran tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.

Berdasarkan alokasi anggarannya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, anggaran belanja kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, dengan Anggaran belanja urusan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 161.701.278.673,00, dan menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,84 persen per tahun hingga menjadi sebesar Rp 389.545.489.499,00. Berdasarkan nominal tersebut, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran alokasi belanja kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mampu melampaui target 10 persen yang ditetapkan. di mana dalam lima tahun terakhir besaran alokasi belanja tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat di tahun 2024.

Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Daerah

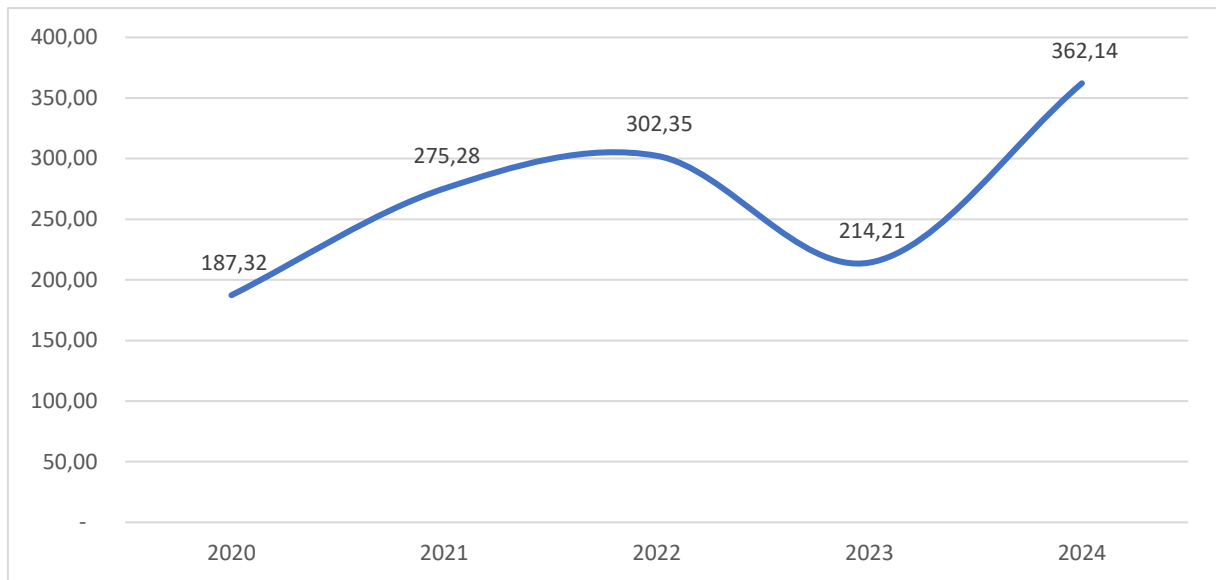
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, dimana dalam kondisi surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, sementara ketika APBD dalam kondisi defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun

anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang perlu dibayar kembali, sementara pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara yang akan diterima kembali. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutup APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sementara itu, dalam hal pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar menunjukkan anggaran surplus. Anggaran defisit atau dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan besarnya komponen belanja daerah, hanya ditemukan pada tahun anggaran 2021 yakni sebesar -Rp78.189.525.859,54. Rasio defisit terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besaran yang semakin membaik, hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah yang dapat ditutup dari pendapatan daerah. Selanjutnya, dilihat dari besaran defisit anggaran dan pembiayaannya maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan daerah telah mampu menutup defisit anggaran, dikarenakan nilai pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan defisitnya.

Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, total pembiayaan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, atau ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 19,34 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen pembiayaan netto di kabupaten ini tercatat sebesar Rp187.321.728.933,38 dan dalam perkembangannya menunjukkan kecenderungan meningkat hingga besarnya menjadi Rp362.140.105.980,57 di tahun 2024.

Gambar II-66 Realisasi Pembiayaan Daerah Netto Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Secara lebih detail, pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana yang disebut dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap. Secara umum, kondisi SiLPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,68 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran SiLPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp275.260.913.245,44 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp493.526.600.834,19.

Fluktuatifnya besaran komponen SiLPA dan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghasilkan capaian persentase SiLPA terhadap total belanja dengan besaran yang fluktuatif pula. Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja daerah menunjukkan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,80 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja daerah di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan tercatat sebesar 22,82 persen yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi 35,06 persen. Secara ideal, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja memiliki kinerja yang baik apabila menunjukkan kecenderungan yang menurun, di mana kecenderungan yang menurun mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran semakin membaik. Pada tahun 2024, capaian rasio SiLPA terhadap total belanja Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 31,22 persen, Oleh karena itu, besaran SiLPA di kabupaten ini masih perlu mendapatkan perhatian untuk ke depannya sedangkan menurunnya besaran capaian persentase SiLPA terhadap total belanja dalam menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran semakin membaik.

Rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata kenaikan sebesar 16,68 persen per tahun. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol, artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Pada tahun 2020, besaran SILPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp275.260.913.245,44 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp493.526.600.834,19. Besaran SILPA tersebut menunjukkan SILPA Positif, yang diartikan bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Besaran SILPA pada akhir tahun akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah, khususnya dialokasikan untuk belanja modal.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diketahui besaran kemampuan keuangan daerah untuk mendanai belanja daerah. Kemampuan keuangan daerah berasal dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan. Kedua

komponen tersebut seharusnya bisa mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka semakin besar pula kemampuan untuk mendanai belanja daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran kemampuan mendanai belanja daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun atau masih pada besaran di sekitar rata-ratanya. Pada tahun 2020, kondisi kemampuan mendanai belanja daerah di kabupaten ini tercatat sebesar 1,34 dan menunjukkan besaran yang fluktuatif hingga tahun 2024 hingga capaiannya menjadi 1,06. Berdasarkan capaian rasio kemampuan mendanai belanja daerah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu mencari sumber penerimaan maupun pembiayaan lainnya, misalnya dengan melakukan kerjasama dengan badan usaha/swasta.

Tabel II-141 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2024

Tahun	Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a)+(b)	(c)+(d)	
2018	1.306.141.312.108,62	138.504.188.424,10	1.078.149.596.307,34	0	1.444.645.500.532,72	1.078.149.596.307,34	1,34
2019	1.494.217.423.038,81	187.321.728.933,38	1.406.278.238.726,75	0	1.681.539.151.972,19	1.406.278.238.726,75	1,20
2020	1.353.819.885.219,86	275.280.367.245,44	1.326.747.578.187,02	0	1.629.100.252.465,30	1.326.747.578.187,02	1,23
2021	1.342.594.283.395,62	302.352.674.278,28	1.420.783.809.255,16	0	1.644.946.957.673,90	1.420.783.809.255,16	1,16
2022	1.574.848.507.549,88	224.206.368.418,74	1.408.914.769.988,05	10.000.000.000	1.799.054.875.968,62	1.418.914.769.988,05	1,27
2023	1.730.043.230.546,90	400.140.105.980,57	1.598.656.735.693,28	38.000.000.000	2.130.183.336.527,47	1.636.656.735.693,28	1,30
2024	1.938.419.984.658,02	523.526.600.834,00	1.968.442.557.701,35	36.116.000.000	2.461.946.585.492,02	2.004.558.557.701,35	1,23

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Tabel II-142 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	202.425.507.513,86	247.697.934.566,62	166.386.113.020,88	210.796.181.341,90	228.891.148.458,02	7,35
1.1.1.	Pendapatan pajak daerah	12.046.129.929,00	13.543.126.921,00	17.300.630.533,90	17.998.220.856,00	19.817.957.627,02	5,56
1.1.2.	Pendapatan Retribusi daerah	8.461.009.994,00	6.608.175.981,00	6.818.208.641,00	5.974.690.084,00	19.579.363.980,72	-15,02
1.1.3.	Pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.801.193.114,00	6.091.259.048,00	6.713.672.614,00	7.004.148.066,00	7.151.180.130,00	18,77
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	177.117.174.476,86	221.455.372.616,62	135.553.601.231,98	179.819.122.335,90	182.342.6446.720,28	9,96
1.2.	Pendapatan Transfer	1.126.819.545.005,00	1.072.252.216.279,00	1.407.985.852.088,00	1.519.119.110.934,00	1.698.036.057.200,00	4,27
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	864.401.301.956,00	831.612.712.997,00	1.168.300.582.839,00	1.234.633.624.682,00	1.414.070.004.016,00	4,82
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak/Dana bagi hasil sumber daya alam	222.382.834.194,00	197.773.311.486,00	496.224.513.847,00	516.848.898.723,00	703.789.891.000,00	24,68
1.2.2.2	Dana alokasi umum	482.100.383.000,00	474.753.627.000,00	473.900.465.240,00	491.370.004.000,00	518.400.709.656,00	-1,69
1.2.2.3	Dana alokasi khusus (Dak Fisik)	61.965.883.202,00	71.332.731.438,00	99.395.904.042,00	104.943.218.466,00	70.905.328.762,00	0,58
1.2.2.4	Dana alokasi khusus (Dak Non Fisik)	97.952.201.560,00	87.753.043.073,00	98.779.699.710,00	121.471.503.493,00	120.974.074.598,00	-1,42
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	192.156.860.000,00	171.821.933.000,00	119.371.510.000,00	150.530.265.000,00	152.562.795.000,00	2,84
1.2.2.1	Dana penyesuaian/Dana Insentif Daerah	74.722.664.000,00	53.518.401.000,00	11.572.948.000,00	39.106.934.000,00	42.968.500,00	55,51
1.2.2.2	Dana Desa	117.434.196.000,00	118.303.532.000,00	107.798.562.000,00	111.423.331.000,00	109.594.295.000,00	
1.2.3	Transfer Antar Daerah	70.261.383.049,00	68.817.570.282,00	120.313.759.249,00	133.955.221.252,00	131.403.258.184,00	12,72
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	70.261.383.049,00	68.817.570.282,00	120.313.759.249,00	133.955.221.252,00	131.403.258.184,00	12,72
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya						
1.2.3.3	Bantuan keuangan						
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	24.574.832.701,00	22.644.132.550,00	476.542.441,00	127.938.271,00	11.492.779.000,00	-40,00
1.3.1	Pendapatan hibah	24.574.832.701,00	55.024.550,00	476.542.441,00	127.938.271,00	11.492.779.000,00	114,40
1.3.2	Pendapatan dana darurat						

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
1.3.3	Pendapatan Lainnya		22.589.108.000,00				
	JUMLAH PENDAPATAN	1.353.819.885.219,86	1.342.594.283.395,62	1.574.848.507.549,88	1.730.043.230.546,90		3,39
2	BELANJA						
2.1	Belanja Operasi	906.310.422.488,75	970.121.278.940,00	1.013.633.493.802,50	1.089.758.445.852,70	1.253.774.006.998,89	4,76
2.1.1	Belanja pegawai	468.226.677.267,00	482.702.664.650,00	491.961.749.591,00	510.805.103.799,42	601.206.220.152,89	1,47
2.1.2	Belanja barang dan jasa	385.945.661.462,75	444.359.498.382,00	469.412.076.976,50	500.094.930.891,28	550.211.887.257,00	9,07
2.1.3	Belanja hibah	27.917.073.003,00	25.458.597.908,00	33.859.162.335,00	61.990.049.648,00	80.188.955.189,00	17,42
2.1.4	Belanja bantuan sosial	24.221.010.756,00	17.600.518.000,00	18.400.504.900,00	16.868.361.514,00	22.045.9488.400,00	-8,89
2.2	Belanja Modal	202.599.536.825,27	260.921.215.974,16	201.501.385.149,55	314.976.748.840,58	486.944.787.102,46	4,35
2.2.1	Belanja modal tanah	5.665.753.150,00	1.563.402.500,00	117.926.000,00	8.730.800.952,00	4.111.328.007,00	1413,51
2.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	46.653.731.769,00	55.907.592.945,00	43.292.195.973,00	69.282.699.025,00	99.518.601.167,00	10,19
2.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	57.811.004.588,92	108.565.226.735,16	69.144.610.697,55	68.204.311.868,58	223.786.590.740,46	-0,10
2.2.4	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	90.023.175.380,35	93.351.134.994,00	88.389.484.279,00	166.919.396.895,00	156.955.128.513,00	9,51
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	2.338.663.937,00	1.533.858.800,00	557.168.200,00	1.839.540.100,00	2.558.388.675,00	16,07
2.2.6	Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)	107.208.000,00	0,00	0	0,00	14.750.000,00	0,00
2.3	Belanja Tak Terduga	22.165.472.553,00	4.408.917.341,00	2.515.261.000,00	2.922.935.000,00	2.877.798.000,00	-21,37
2.3.1	Belanja tak terduga	22.165.472.553,00	4.408.917.341,00	2.515.261.000,00	2.922.935.000,00	2.877.798.000,00	-21,37
	JUMLAH BELANJA	1.131.075.431.867,02	1.235.451.412.255,16	1.217.650.139.952,05	1.407.658.129.693,28	1.743.596.592.101,35	3,43
3	TRANSFER						
3.1	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.288.000.000,00	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00	2.605.109.600,00	-0,91
3.1.1	Transfer bagi hasil pajak	1.274.000.000,00	1.528.865.000,00	1.528.865.000,00	1.528.865.000,00		3,75
3.1.2	Transfer bagi hasil retribusi	1.014.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00		-5,22

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
3.2	Transfer Bantuan Keuangan	193.384.146.320,00	182.703.532.000,00	188.635.765.036,00	188.369.741.000,00	222.240.802.000	
3.2.1	Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya						
3.2.2	Transfer bantuan keuangan ke desa	192.700.196.000,00	182.703.532.000,00	188.635.765.036,00	188.369.741.000,00	222.240.802.000	
3.2.3	Transfer bantuan keuangan lainnya	683.950.320,00					
	JUMLAH TRANSFER	195.672.146.320,00	185.332.397.000,00	191.264.630.036,00	190.998.606.000,00	224.845.911.600,00	-0,89
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.326.747.578.187,02	1.420.783.809.255,16	1.408.914.769.988,05	1.598.656.735.693,28	1.968.442.557.701,35	2,81
	SURPLUS/DEFISIT	27.072.307.032,84	-78.189.525.859,54	165.933.737.561,83	131.386.494.853,62	(30.022.573.043,33)	-158,21
4	PEMBIAYAAN						
4.1	Penerimaan Pembiayaan	275.280.367.245,44	302.352.674.278,28	224.206.368.418,74	400.140.105.980,57	523.526.600.834,19	21,88
4.1.1	Penggunaan SiLPA	275.260.913.245,44	302.352.674.278,28	224.163.148.418,74	380.140.105.980,57	4993.526.600.834,19	20,11
4.1.2	Pencairan dana cadangan				20.000.000.000,00	30.000.000,00	
4.1.3	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	5.504.000,00		43.220.000,00			
	Penerimaan Hasil Investasi Non Permanen	13.950.000,00					
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	10.000.000.000,00	38.000.000.000,00	36.116.000.000,00	56,00
4.2.1	Pembentukan dana cadangan			10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20,00
4.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00	16.116.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	275.280.367.245,44	302.352.674.278,28	214.206.368.418,74	362.140.105.980,57	487.510.600.8834,19	19,34
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	302.352.674.278,28	224.163.148.418,74	380.140.105.980,57	493.526.600.834,19	457.388.027.790,86	16,68

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

II.9.2 Analisis Neraca Daerah

Mengutip pernyataan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan, analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Tabel II-143 Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Rasio Likuiditas					
1	Rasio Lancar	5,32	4,41	7,71	14,93	12,34
2	Rasio Quick	5,03	4,08	7,21	14,04	11,96
	Rasio solvabilitas					
3	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,0213	0,0193	0,0153	0,0095	0,0099
4	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0218	0,0197	0,0156	0,0096	0,0099

Sumber: Neraca-Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Rasio likuiditas menunjukkan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat anggaran kas, namun perlu ditunjang oleh analisis likuiditas, di mana untuk dapat memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah harus mempunyai alat-alat yang dapat digunakan untuk membayar yang berupa aktiva-aktiva lancar yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan. Analisis rasio likuiditas meliputi rasio lancar (current ratio) dan rasio quick.

Rasio lancar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintahan daerah. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya, oleh karena itu kondisi keuangan daerah dapat dikatakan sehat apabila rasio lancarnya berada di atas 1, atau dengan kata lain jumlah aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancarnya, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 rasio lancar Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan besaran lebih dari ukuran baku yang ditetapkan, di mana hal tersebut mengindikasikan bahwa kabupaten ini memiliki aset yang cukup untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Selanjutnya, rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, dimana indikator ini mengindikasikan pemerintah daerah dapat membayarkan utangnya dengan cepat. Rasio quick merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory), dengan kata lain dalam perhitungan rasio ini mengabaikan nilai sediaan dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan. Standar nilai untuk rasio quick adalah sebesar >1 , semakin tinggi besaran nilai rasio ini maka semakin tinggi likuiditasnya, namun tidak boleh terlalu besar karena menunjukkan besarnya aset yang tidak tersalurkan sehingga terjadi kelebihan likuiditas. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian rasio quick di kabupaten ini dapat dikatakan sehat karena memiliki besaran nilai >1 , hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi aktiva lancar di kabupaten ini masih mampu menutupi utang lancarnya.

Rasio solvabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk pemerintah daerah yakni rasio total utang terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva, maka semakin kecil rasionya maka semakin aman (solvable), sementara itu apabila semakin besar rasionya maka semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan yang menandakan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah, dengan kata lain porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. Berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 diketahui bahwa proporsi utang daerah lebih kecil dibandingkan dengan aktivanya, sehingga dapat dikatakan bahwa utang pemerintah dapat ditutupi oleh aktivanya (solvable) yang berarti pengaruh utang terhadap aktiva adalah sangat kecil.

Rasio utang terhadap aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal diproksikan dengan aset tetap. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara total utang dengan total aset modal. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap total aset modal yang dicapai kurang dari atau sama dengan 0,45. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang

terhadap aset modal, dapat diketahui bahwa besaran rasio utang terhadap total aset modal atau aset tetap pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran di bawah standar yang ditetapkan ($\leq 0,45$). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui aset tetapnya sudah baik.

Selanjutnya, rasio utang terhadap modal digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Indikator rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan antara total utang dengan jumlah ekuitas dana. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah kemungkinan berada pada fase kelebihan utang (*over leverage*), sehingga perlu mencari upaya untuk mengurangi dan/atau melunasi utang tersebut. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang yang semakin besar, atau dengan kata lain kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap modal yang dicapai ini kurang dari satu. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap ekuitas, dapat diketahui bahwa besaran rasio utang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran kurang dari satu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui setiap rupiah ekuitas dana sudah baik, atau dengan kata lain rasio tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah kabupaten ini mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya dengan modal yang dimilikinya.

II.9.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain melaksanakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, juga harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi alokasi

diartikan bahwa belanja daerah harus sesuai kebutuhan, menjaga ketepatan pada sektor prioritas, dan dilakukan sesuai dengan fungsi pokok (*money follow function*), serta menekankan akurasi pengalokasian.

Secara sederhana, analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar bahwa keuangan daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan jaminan sosial. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Belanja aparatur daerah merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 masih menggunakan istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung, di mana belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, serta belanja pemungutan pajak daerah. Sementara itu belanja langsung diantaranya terdiri dari belanja honorarium PNS; beasiswa pendidikan PNS; kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS; makan dan minuman pegawai; pakaian dinas dan pakaian khusus; perjalanan dinas serta belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll).

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 3,73 persen per tahun. Pada tahun 2020, realisasi

belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 1.168.377.173.835,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 1.003.434.260.049,00 di tahun 2024. Dinamisnya besaran nilai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur dan jenis kebutuhan yang lebih kompleks. Sementara itu, apabila dilihat dari proporsinya, komponen belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja langsungnya, dengan rata-rata proporsi mencapai 69,99 persen.

Tabel II-144 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
A	Belanja Tidak Langsung	459.872.598.017,00	482.702.664.650,00	491.961.749.591,00	510.805.103.799,42	533.474.785.703,89	2,16
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	352.623.742.480,00	282.110.539.724,00	294.981.538.595,00	311.328.791.604,00	340.018.553.170,63	-3,45
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	101.663.789.473,00	182.326.655.158,00	179.573.495.254,00	182.651.329.426,42	174.225.873.542,26	21,13
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.692.465.432,00	17.692.400.231,00	16.601.091.606,00	16.624.658.754,00	19.230.358.991,00	68,21
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	892.600.632,00	573.069.537,00	805.624.136,00	200.324.015,00		-23,57
B	Belanja Langsung	294.800.270.730,27	367.051.747.386,16	320.759.530.491,55	460.409.353.368,58	626.332.008.220,46	5,34
1	Belanja Honorarium PNS**)	340.775.000,00	90.400.000,00	416.300.000,00	399.300.000,00		- 0,10
2	Belanja Uang Lembur**)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	24.217.813,00	51.720.000,00	153.632.342,00	192.100.000,00	184.288.054,00	64,46
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	930.987.500,00	1.832.519.842,00	2.750.175.750,00	624.220.000,00	541.980.000,00	15,04
5	Belanja premi asuransi kesehatan	47.321.728.277,00	58.915.337.342,00	56.943.347.027,00	58.937.910.611,00	59.720.154.288,00	18,45
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	9.239.068.157,00	6.035.824.025,00	6.284.626.184,00	9.573.989.975,00		- 5,05
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	386.855.000,00	264.915.500,00	276.940.000,00	273.975.000,00		-16,37

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	651.547.200,00	2.535.241.400,00	2.985.072.172,00	2.630.315.340,00		62,03
9	Belanja perjalanan dinas**)	33.305.554.958,00	36.104.573.303,00	49.448.051.867,00	72.800.793.602,00	78.940.798.776,00	13,22
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	202.599.536.825,27	260.921.215.974,16	201.501.385.149,55	314.976.748.840,58	486.944.787.102,46	5,44
	TOTAL	754.672.868.747,27	849.754.412.036,16	812.721.280.082,55	971.214.457.168,00	1.159.806.793.924,35	2,51

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Keterangan:

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

***) Dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisiensi

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, realisasi belanja tidak langsung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan naik, yang ditandai dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,16 persen per tahun. Pada tahun 2020, realisasi belanja ini mencapai Rp469.525.586.606,75 dan berfluktuasi menjadi Rp510.805.103.799,42 di tahun 2024. Komponen belanja gaji dan tunjangan merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja tidak langsung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 komponen belanja ini tercatat memiliki rata-rata proporsi mencapai 66,84 persen dalam struktur belanja tidak langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Meskipun demikian, komponen belanja gaji dan tunjangan ini tercatat memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu yang sama, atau ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 3,45 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp366.913.283.219,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp311.328.791.604,00.

Komponen dengan kontribusi terbesar kedua setelah komponen belanja gaji dan tunjangan dalam struktur belanja tidak langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah komponen belanja tambahan penghasilan PNS, yang tercatat menunjukkan rata-rata kontribusi sebesar 30,55 persen. Pada tahun 2020, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp96.830.029.557,75 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp182.651.329.426,42, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,13 persen per tahun. Komponen belanja tidak langsung berikutnya adalah belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH yang tercatat memiliki rata-rata kontribusi sebesar 2,46 persen. Komponen belanja ini menunjukkan kecenderungan naik dalam lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2020 besarannya tercatat sebesar Rp4.608.647.710,00 dan berfluktuasi menjadi Rp16.624.658.754,00 di tahun 2024. Selanjutnya, komponen belanja pemungutan pajak daerah tercatat memiliki besaran yang paling kecil pada struktur belanja tidak langsung, yakni sebesar Rp1.173.626.120,00 di tahun 2020 dan menunjukkan penurunan di tahun berikutnya menjadi Rp200.324.015,00.

Selanjutnya, komponen belanja langsung dalam realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan naik, yang ditandai dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,34 persen per tahun. Pada tahun

2020, komponen belanja ini tercatat memiliki besaran sebesar Rp447.295.445.034,75 yang kemudian berfluktuasi hingga menjadi Rp460.409.353.368,58 di tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir, komponen belanja modal merupakan komponen belanja dengan proporsi tertinggi dalam struktur belanja langsung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni dengan rata-rata kontribusi sebesar 69,46 persen. Pada tahun 2020, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp340.987.909.455,75 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp314.976.748.840,58, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,44 persen per tahun.

Komponen dengan besaran rata-rata proporsi terbesar selanjutnya dalam struktur belanja langsung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah komponen belanja premi asuransi kesehatan yang tercatat memiliki rata-rata proporsi sebesar 13,95 persen. Pada tahun 2020, komponen belanja premi asuransi kesehatan tersebut tercatat sebesar Rp31.731.687.123,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp58.937.910.611,00, yang ditandai dengan besaran rata-rata kenaikan sebesar 18,45 persen per tahun. Selanjutnya, komponen belanja perjalanan dinas tercatat memiliki rata-rata proporsi sebesar 12,94 persen, di mana pada tahun 2019 komponen belanja ini tercatat sebesar Rp55.257.595.518,00 dan bertumbuh menjadi Rp72.800.793.602,00, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,22 persen per tahun. Sementara itu, komponen belanja langsung yang lainnya memiliki rata-rata kontribusi pada kisaran 0,1 hingga di bawah lima persen. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, pemerintah daerah masih perlu menetapkan beberapa komponen belanja untuk dilakukan efisiensi anggaran daerah, agar porsi belanja APBD lebih dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik, seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Selanjutnya, analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah di kabupaten ini menunjukkan besaran 65,19 persen, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi 59,34 persen. Dari besaran tersebut dapat dikatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, belanja daerah yang dialokasikan

untuk pembiayaan pembangunan memiliki proporsi yang lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparaturnya.

Tabel II-145 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2019	Rp916.821.031.641,50	Rp1.406.278.238.726,75	65,19
2	Tahun anggaran 2020	Rp754.672.868.747,27	Rp1.326.747.578.187,02	56,88
3	Tahun anggaran 2021	Rp849.754.412.036,16	Rp1.420.783.809.255,16	59,81
4	Tahun anggaran 2022	Rp812.721.280.082,55	Rp1.418.914.769.988,05	57,28
5	Tahun anggaran 2023	Rp971.214.457.168,00	Rp1.636.656.735.693,28	59,34
6	Tahun anggaran 2024	Rp1.159.806.793.924,35	Rp1.968.442.557.701,35	58,92

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, dan belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran nilai pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 0,58 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp573.908.263.255,00 dan berfluktuasi menjadi Rp559.569.503.270,00 di tahun 2024.

Tabel II-146 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	359.604.207.912,00	302.431.804.955,00	314.211.495.201,00	329.470.560.815,00	360.804.775.032,63	-2,19
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	352.623.742.480,00	282.110.539.724,00	294.981.538.595,00	311.328.791.604,00	340.018.553.170,63	-3,45
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.692.465.432,00	17.692.400.231,00	16.601.091.606,00	15.512.904.211,00	18.181.112.262	68,21
3	Belanja Bunga	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja bagi hasil	2.288.000.000,00	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00	2.605.109.600,00	0,28
	Dst..						
B	Belanja Langsung	52.714.040.936,50	91.708.113.268,00	85.388.959.958,50	76.020.388.956,00	80.622.828.943,00	10,76
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.						
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	24.217.813,00	51.720.000,00	153.632.342,00	192.100.000,00	184.288.054,00	64,46
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	52.689.823.123,50	91.656.393.268,00	85.235.327.616,50	75.828.288.956,00	80.438.540.889,00	10,74
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)						
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)						
	Dst ...						
C	Pembiayaan Pengeluaran	0	0	10.000.000.000,00	38.000.000.000,00	36.116.000.000,00	10,76
1	Pembentukan dana cadangan	0	0,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00	16.116.000.000,00	0,00
	TOTAL (A+B+C)	540.298.289.785,00	550.248.031.491,00	563.289.415.118,00	559.569.503.270,00		- 0,58

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Analisis Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa analisis pembiayaan adalah analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun analisis pembiayaan daerah ini dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil anggaran, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, dan analisis proyeksi pembiayaan daerah.

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Analisis sumber penutup defisit ini dilakukan dengan terlebih dahulu mencari nilai defisit ril anggaran, yang kemudian dilihat ada atau tidaknya penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit riil anggaran tersebut, sehingga akan diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran. Defisit riil anggaran dihitung dari jumlah realisasi pendapatan daerah dikurangi dengan realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam lima tahun terakhir, defisit riil anggaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terjadi pada tahun 2021 (Rp78.189.525.859,54) dan tahun 2024 (Rp66.138.573.043,33).

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, penutup defisit riil anggaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Defisit anggaran yang terjadi di kabupaten ini dapat ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan daerah. Meskipun telah digunakan untuk menutup defisit riil anggarannya, masih terdapat sisa penerimaan pembiayaan yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan lainnya. Komposisi penerimaan pembiayaan daerah untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti berikut.

Tabel II-147 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.353.819.885.219,86	1.342.594.283.395,62	1.574.848.507.549,88	1.730.043.230.546,90	1.938.419.984.658,02	3,39
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja Daerah (Pos Belanja dan Transfer)	1.326.747.578.187,02	1.420.783.809.255,16	1.408.914.769.988,05	1.598.656.735.693,28	1.968.442.557.701,35	2,81
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	10.000.000.000,00	38.000.000.000,00	36.116.000.000,00	56,00
A	Defisit riil	27.072.307.032,84	-78.189.525.859,54	155.933.737.561,83	93.386.494.853,62	-66.138.573.043,33	162,12
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
4.	Penggunaan SiLPA	275.260.913.245,44	302.352.674.278,28	224.163.148.418,74	380.140.105.980,57	493.526.600.834,19	20,11
5.	Pencairan dana cadangan				20.000.000.000,00		-
6	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	5.504.000,00	0	43.220.000,00	0	30.000.000.000,00	
7	Penerimaan Hasil Investasi Non Permanen	13.950.000,00					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	275.280.367.245,44	302.352.674.278,28	224.206.368.418,74	400.140.105.980,57	523.526.600.834,19	21,88
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	302.352.674.278,28	224.163.148.418,74	380.140.105.980,57	493.526.600.834,19	457.388.027.790,86	16,68

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran anggaran (belanja) selama satu periode anggaran. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah, mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan/atau mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran, di mana dengan mengetahui besaran SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, maka dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Besaran SiLPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,11 persen per tahun. Besaran SiLPA pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat semakin menurun, hal tersebut perlu diupayakan oleh pemerintah kabupaten karena semakin kecil nilai SiLPA mengindikasikan semakin baik dan sinergisnya perencanaan penganggaran dengan realisasinya.

Tabel II-148 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024		Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA	275.260.913.245,44	100	302.352.674.278,28	100	224.163.148.418,74	100	380.140.105.980,57	100	493.526.600.834,19	100	20,11
2.	Pelampauan penerimaan PAD											
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan											
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah											
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya											
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan											
7.	Kegiatan lanjutan											

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto di tahun berkenaan. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis SILPA bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Besaran sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan didapatkan dari selisih saldo kas neraca daerah yang dihitung berdasarkan jumlah kas dan setara kas daerah dikurangi dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, besaran sisa lebih (riil) pembiayaan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 16,68 persen per tahun.

Tabel II-149 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
1.	Saldo kas neraca daerah	302.365.102.234	224.163.148.419	380.417.752.651	493.526.600.834	457.388.027.790,86	26,08
	Dikurangi:						
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
3.	Kegiatan lanjutan						
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	302.365.102.234	224.163.148.419	380.417.752.651	493.526.600.834	457.388.027.790,86	26,08

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 (Audited), Diolah

II.9.4 PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2026-2030

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkaitan erat dengan kapasitas daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan wilayah, kegiatan pembangunan di kabupaten ini masih dilakukan secara masif di berbagai bidang, di mana pelaksanaan pembangunan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan penganggaran daerah. Perhitungan proyeksi APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun berdasarkan histori penerimaan daerah dan belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Pada komponen penerimaan, proyeksi disusun dengan memperhatikan kebijakan penganggaran daerah maupun nasional.

Penerimaan daerah di tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan memiliki kecenderungan yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada periode tahun perencanaan lima tahun mendatang, penerimaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,1 persen per tahun, di mana pada tahun 2026 pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 1.699.657.720.748,00 dan meningkat menjadi Rp 2.075.621.415.275,00 di tahun 2030. Secara lebih detail, komponen PAD dalam pos penerimaan daerah diproyeksikan menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan yang relatif stabil. Pada tahun 2026, komponen PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 264.612.222.586,00 dan meningkat menjadi Rp 264.534.514.795,00 di tahun 2030. Komponen tersebut diharapkan akan semakin meningkat dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaannya yang potensial untuk memperbesar keuangan daerah. Salah satu hal yang dilakukan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Komponen pajak daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan yang kompetitif per tahun, sementara komponen retribusi daerah menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya.

Selanjutnya, peningkatan penerimaan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memperhitungkan perubahan besaran penerimaan daerah yang dipengaruhi oleh besaran pendapatan transfer. Komponen pendapatan transfer di kabupaten ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,0 persen per tahun. Pada tahun 2026, besaran pendapatan transfer Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 1.435.020.498.163,00 dan meningkat menjadi Rp

1.811.056.512.823,00 di tahun 2030. Sementara itu, komponen transfer pemerintahan pusat berupa dana perimbangan diasumsikan meningkat secara bertahap dalam kurun waktu perencanaan. Besaran dana perimbangan tersebut merupakan kewenangan pusat, dan sumber-sumber pendapatan daerah yang berubah karena adanya perubahan kebijakan pajak dan retribusi yang sifatnya dinamis.

Selain itu, alokasi belanja daerah yang mendukung masifnya pembangunan diharapkan akan mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah. Kegiatan ekonomi yang semakin maju berdampak positif pada pendapatan daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah diproyeksikan semakin meningkat. Sementara itu, rencana belanja daerah diproyeksikan dengan menggunakan tren proporsi belanja tahun 2020 hingga 2024. Tren belanja daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menyesuaikan besaran penerimaan daerah yang juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan masifnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, yang salah satunya bertujuan untuk pemerataan wilayah. Pada tahun 2026, besaran komponen belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar Rp 1.999.123.524.801,00 dan meningkat menjadi Rp 2.558.147.994.920,00 atau meningkat sebesar 6,3 persen setiap tahunnya.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka diperoleh hasil bahwa dalam lima tahun ke depan pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat lebih kecil dari belanja daerah, sehingga menghasilkan defisit anggaran. Dalam hal defisit anggaran tersebut, maka sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutupnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2026, besaran SiLPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 0,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2030 hingga besarnya menjadi Rp 52.714.824.028,00.

Tabel II-150 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	252.612.222.585	245.713.922.291	251.987.453.126	258.260.983.961	264.534.514.794
	B. Pendapatan Transfer	1.435.020.498.163	1.554.556.281.345	1.640.056.358.505	1.725.556.435.664	1.811.056.512.823
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	30.387.656
	JUMLAH PENDAPATAN	1.687.657.720.748	1.800.296.453.636	1.892.071.374.131	1.983.846.360.250	2.075.621.415.273
2	BELANJA DAERAH					
	A. Belanja Operasi	1.320.776.250.986	1.346.793.350.674	1.410.373.285.545	1.511.290.957.844	1.652.507.219.469
	B. Belanja Modal	350.043.451.538	503.323.625.782	603.251.867.164	669.483.632.471	718.102.554.337
	C. Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	13.978.729.830	14.913.102.920	16.727.891.343	17.714.174.049
	D. Belanja Transfer	210.014.661.204	211.923.252.343	216.907.353.345	235.748.316.478	255.642.479.320
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.900.834.363.728	2.076.018.958.629	2.245.445.608.974	2.433.250.798.136	2.643.966.427.175
	SURPLUS/DEFISIT	-213.176.642.980	-275.722.504.993	-353.374.234.843	-449.404.437.886	-568.345.011.902
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	222.028.642.980	275.722.504.993	353.374.234.843	449.404.437.887	568.345.011.902
	B. Pengeluaran Pembiayaan	8.852.000.000	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	230.880.642.980	275.722.504.993	353.374.234.843	449.404.437.887	568.345.011.902
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	213.176.642.980	275.722.504.993	353.374.234.843	449.404.437.887	568.345.011.902

Sumber: BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Diolah 2025

II.10 Capaian RPJMD Periode Sebelumnya

Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018–2023 merupakan refleksi atas pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam periode kepemimpinan sebelumnya. Evaluasi capaian RPJMD ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembangunan, mengidentifikasi faktor pendorong maupun penghambat, serta menilai sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi capaian RPJMD 2018–2023 menjadi landasan strategis dalam penyusunan RPJMD periode 2025–2029, agar arah pembangunan ke depan dapat lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Pelaksanaan Misi I: Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Dasar Lainnya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Tujuan dari misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya, sehingga masyarakat Hulu Sungai Selatan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar secara adil dan merata.

Tabel II-151 Tujuan, Sasaran & Indikator Misi I RPJMD 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Target 2023
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Harapan lama sekolah	12,10	12,17	12,38	12,40	12,46	92,16	13,52
	Rata-rata lama sekolah	7,74	7,75	7,76	7,79	7,86	92,15	8,53
	Persentase PAUD formal terakreditasi A	1,25	3,75	1,25	1,88	5,00	40,00	12,50
	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	6,88	13,21	12,90	13,98	12,70	84,54	15,02
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	65,82	65,97	66,12	66,51	72,52	98,57	67,87
	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia <= 20 tahun	72,90	66,15	70,54	70,92	70,92	98,22	69,68
	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	AA (83,60)	A (77,13)	AA (80,75)	AA (87,40)	AA (91,59)	97,44	AAA (97,51)
	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	4,35	0	0	11,54	42,31	243,29	17,39
Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	PPH Ketersediaan	83,95	85,48	86,33	87,54	88,32	100,32	88,04
Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	57,00	61,00	95,80	97,04	99,38	132,51	75,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Target 2023
Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Persentase angka PMKS yang mandiri	61,40	55,93	54,09	56,77	56,77	84,48	67,20

Sumber : Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023

Secara umum, capaian Misi I “Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Dasar Lainnya” menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan beberapa indikator bahkan melampaui target. Keunggulan utama terlihat pada sektor kesehatan, dimana *angka harapan hidup* meningkat signifikan hingga 72,52 tahun, kualitas rumah sakit stabil pada kategori AA, dan persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna mencapai 42,31%, jauh melampaui target. Demikian pula pada pelayanan dasar, capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 132,51% dari target, serta ketahanan pangan melalui *PPH ketersediaan* yang berhasil memenuhi target.

Di sisi lain, kelemahan masih terlihat pada sektor pendidikan, khususnya *harapan lama sekolah* dan *rata-rata lama sekolah* yang meski meningkat setiap tahun, namun realisasinya hanya sekitar 92% dari target. Persentase PAUD formal terakreditasi A juga masih rendah, baru mencapai 5% dari target 12,5%, sehingga kualitas pendidikan anak usia dini masih menjadi tantangan penting. Selain itu, pada bidang perlindungan sosial, persentase PMKS yang mandiri baru mencapai 84,48% dari target, yang menandakan perlunya penguatan program pemberdayaan sosial agar kelompok rentan dapat lebih mandiri.

Dengan demikian, capaian Misi I memperlihatkan keunggulan utama pada layanan kesehatan, pangan, dan pelayanan dasar yang berjalan sangat baik, sementara tantangan terbesar masih terdapat pada mutu dan pemerataan layanan pendidikan serta penguatan perlindungan sosial.

Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah agar tumbuh inklusif dan berdaya saing. Evaluasi misi ini penting untuk menilai efektivitas strategi pembangunan ekonomi, penguatan sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, sehingga dapat memberi dampak nyata pada penurunan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel II-152 Tujuan, Sasaran & Indikator Misi II RPJMD 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Target 2023
Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	5,33	5,17	2,44	4,54	4,01	106,31	4,28
	Indeks Gini	0,288	0,300	5,59	0,260	0,293	96,83	0,284
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	2,43	2,24	4,40	2,29	2,12	86,02	1,86
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	3,97	-3,60	-0,07	5,25	5,34	91,28	5,85
	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,96	-2,39	2,44	8,40	4,14	71,01	5,83
	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	2,97	0,03	5,59	-0,49	4,54	92,28	4,92
	Persentase koperasi sehat	2,35	3,18	12,96	18,40	18,40	360,88	5,10
	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	29,52 Milyar	20,50 Milyar	20,15 Milyar	23,89 Milyar	25,60	94,81	27,00
Meningkatnya investasi PMDN	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	151,54	8,51	12,43	8,36	2,26	32,29	7,00
Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	Rp. 4.758.098.000	Rp. 7.337.250.000	Rp. 7.204.500.000	Rp. 14.705.425.000	Rp. 10.800.000.000	119,02	Rp. 9.073.800.000

Sumber : Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Misi II “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal” pada periode 2018–2023 menunjukkan capaian yang bervariasi. Secara umum, indikator makro memperlihatkan arah positif dengan tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,33% pada tahun 2019 menjadi 4,01% pada tahun 2023, bahkan melampaui target dengan capaian 106,31%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi relatif mampu memberi dampak nyata pada penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Gini juga relatif terjaga pada kisaran 0,260–0,300, dengan capaian 96,83% dari target, menandakan ketimpangan pendapatan di daerah

masih relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional. Namun, capaian tingkat pengangguran terbuka hanya 86,02% dari target, menunjukkan perlunya intervensi lebih kuat dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, terutama di sektor-sektor produktif.

Pertumbuhan ekonomi di sektor unggulan memperlihatkan hasil yang beragam. Sektor industri pengolahan berhasil tumbuh positif sebesar 5,34% pada tahun 2023 meski belum sepenuhnya mencapai target (91,28%). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tumbuh 4,54% atau mencapai 92,28% dari target, menunjukkan peran penting sektor primer dalam menopang perekonomian daerah. Namun, sektor perdagangan besar dan eceran hanya tumbuh 4,14%, jauh di bawah target 5,83% dengan capaian 71,01%, yang mengindikasikan adanya perlambatan daya beli masyarakat maupun hambatan pada rantai distribusi. Sebaliknya, indikator kelembagaan ekonomi rakyat menunjukkan capaian sangat baik, dimana persentase koperasi sehat mencapai 18,40%, jauh melampaui target dengan capaian 360,88%, mencerminkan meningkatnya peran koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal.

Dari sisi fiskal, pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah pada tahun 2023 mencapai Rp25,60 miliar atau 94,81% dari target, menunjukkan tren positif namun masih di bawah target yang ditetapkan. Sementara itu, kinerja investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi kelemahan utama dengan realisasi peningkatan hanya 2,26% dari target 7%, sehingga capaian baru mencapai 32,29%. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim investasi daerah perlu ditingkatkan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur pendukung, dan promosi potensi daerah.

Sementara itu, sektor pariwisata menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Tingkat pengeluaran wisatawan meningkat tajam, dari Rp4,7 miliar pada 2019 menjadi Rp10,8 miliar pada 2023, melampaui target dengan capaian 119,02%. Hal ini memperlihatkan adanya potensi besar dari sektor pariwisata dan kebudayaan dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah, sekaligus membuka peluang lapangan kerja dan usaha baru bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian Misi II memperlihatkan keunggulan pada penurunan kemiskinan, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat melalui koperasi, serta peningkatan sektor pariwisata. Namun demikian, kelemahan masih terdapat pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, kinerja investasi PMDN, serta pertumbuhan sektor perdagangan. Hal ini menjadi catatan penting untuk RPJMD berikutnya agar strategi pembangunan ekonomi

tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan, pemerataan, dan peningkatan daya saing daerah.

Misi III: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang Menunjang Sektor Perekonomian menekankan pada pembangunan infrastruktur yang tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga mendukung pelayanan publik dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Evaluasi capaian misi ini memberikan gambaran mengenai keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur ekonomi maupun sosial secara merata, guna memperlancar aktivitas perekonomian, mendukung pelayanan dasar, dan memperkuat daya saing daerah.

Tabel II-153 Tujuan, Sasaran & Indikator Misi III RPJMD 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Target 2023
Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	64,03	66,04	68,37	69,58	69,58	103,85	67,00
	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	61,95	65,60	68,49	70,47	71,65	100,31	71,43
	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	23,81	52,38	66,67	85,71	100,00	100,00	100,00
	Persentase kecukupan RTH publik	24,84	24,88	28,45	38,06	38,25	153,80	24,87
	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	50,84	53,24	58,35	59,88	64,34	78,16	82,32

Sumber : Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Misi III “Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang Menunjang Sektor Perekonomian” selama periode 2018–2023 menunjukkan capaian yang secara umum menggembirakan. Hampir seluruh indikator kinerja strategis mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, menandakan adanya konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Indikator persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 km/jam menunjukkan capaian 69,58% pada tahun 2023, melampaui target 67% dengan tingkat capaian 103,85%. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas dan aksesibilitas jaringan jalan yang semakin mempermudah mobilitas barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Demikian pula, persentase kinerja sistem jaringan irigasi berhasil mencapai 71,65% atau 100,31% dari target, menunjukkan efektivitas pembangunan dan rehabilitasi

jaringan irigasi yang mendukung ketahanan pangan dan produktivitas pertanian.

Keberhasilan signifikan juga terlihat pada indikator persentase kecukupan sarana dan prasarana publik yang mencapai 100% sesuai target. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat secara menyeluruh. Capaian yang sangat menonjol terjadi pada persentase kecukupan ruang terbuka hijau (RTH) publik, yang meningkat dari 24,84% pada tahun 2019 menjadi 38,25% pada tahun 2023, jauh melampaui target dengan capaian 153,80%. Keberhasilan ini penting, mengingat RTH berperan sebagai penyangga kualitas lingkungan dan ruang interaksi sosial masyarakat.

Meski demikian, kelemahan masih terlihat pada indikator persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas, yang pada tahun 2023 baru mencapai 64,34% atau 78,16% dari target 82,32%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas permukiman masyarakat masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan, sehingga memerlukan perhatian khusus terutama terkait penyediaan infrastruktur dasar permukiman, pengendalian kawasan kumuh, dan peningkatan akses air bersih serta sanitasi layak.

Secara keseluruhan, capaian Misi III memperlihatkan keunggulan pada peningkatan kualitas jalan, sistem irigasi, pemenuhan sarana prasarana publik, serta pengembangan ruang terbuka hijau yang melampaui target. Namun, tantangan masih terdapat pada peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, yang perlu didorong melalui program terpadu antara perbaikan infrastruktur dasar, pengendalian kawasan tidak layak huni, dan kebijakan pembangunan perumahan yang berkelanjutan.

Misi IV: Mengoptimalkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan merupakan pijakan strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, perlindungan anak, serta menjaga kualitas lingkungan hidup. Evaluasi capaian misi ini menunjukkan sejauh mana pembangunan daerah mampu mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kearifan lokal. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan dapat berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan inklusivitas sosial.

Tabel II-154 Tujuan, Sasaran & Indikator Misi IV RPJMD 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Target 2023
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,65	0,67	0,70	0,73	0,75	105,63	0,71
Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,21	89,23	89,65	89,65	90,05	98,66	91,27
	Persentase desa/ kelurahan layak anak	2,03	3,38	4,73	6,08	7,43	100	7,43
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	55,96	62,13	67,93	69,23	68,39	122,63	55,77

Sumber : Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Misi IV “Mengoptimalkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan” pada periode 2018–2023 menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan peningkatan konsisten dari 0,65 pada tahun 2019 menjadi 0,75 pada tahun 2023, melampaui target 0,71 dengan capaian 105,63%. Hal ini menandakan semakin kuatnya kapasitas pembangunan desa baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Selanjutnya, indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 90,05 pada tahun 2023 atau 98,66% dari target, menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender meskipun masih terdapat ruang untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Capaian yang sangat positif terlihat pada persentase desa/kelurahan layak anak, yang meningkat dari 2,03% pada tahun 2019 menjadi 7,43% pada tahun 2023, tepat sesuai target dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari berbagai risiko sosial.

Keunggulan lain ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang naik signifikan dari 55,96 pada tahun 2019 menjadi 68,39 pada tahun 2023, jauh melampaui target 55,77 dengan capaian 122,63%. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan program pengelolaan lingkungan, baik dalam pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan. Namun, fluktuasi nilai IKLH pada tahun terakhir menunjukkan masih adanya

tantangan, terutama pada aspek yang berada di luar kewenangan kabupaten seperti tutupan lahan dan tata kelola lahan gambut.

Secara keseluruhan, capaian Misi IV memperlihatkan keunggulan dalam pemberdayaan masyarakat desa, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang melampaui target, serta perbaikan yang konsisten pada kesetaraan gender. Meski demikian, tantangan tetap ada pada penguatan substansi pemberdayaan gender dan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup, yang memerlukan sinergi lintas sektor dan lintas kewenangan. Capaian ini sekaligus menegaskan pentingnya melanjutkan strategi pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, inklusif, dan ramah lingkungan.

Misi V: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis berorientasi pada terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Evaluasi capaian misi ini penting untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, serta penguatan nilai-nilai sosial keagamaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, memperluas layanan publik berbasis teknologi informasi, serta memperkuat kehidupan sosial keagamaan yang harmonis sebagai fondasi pembangunan daerah.

Tabel II-155 Tujuan, Sasaran & Indikator Misi V RPJMD 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	%Capaian 2023	Target 2023
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Predikat AKIP	BB (76,23)	BB (77,05)	A (80,02)	A (81,50)	A (82,08)	102,47	A (80,10)
	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	B (3,97)	B (3,97)	A-	A (4,54)	A (4,54)	100,67	A (4,51)
Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	Kualitas aspek perencanaan	62,95	62,95	62,95	95,00	95,00	141,60	67,09
	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP
	Indeks profesionalisme ASN	62,74	72,00	76,76	59,75	73,48	90,35	81,33
Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	21,05	60,53	65,79	92,30	100,00	100,00	100,00
	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	9,03	15,97	23,61	31,25	38,89	100	38,88
Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan	Persentase peningkatan penerimaan zakat	23,62	123,06	17,95	12,24	15,61	130,08	12,00

Sumber : Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Misi V “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi

dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis” menunjukkan capaian yang cukup signifikan dan konsisten dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi. Secara umum, mayoritas indikator kinerja strategis berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Indikator predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meningkat dari predikat BB (76,23) pada tahun 2019 menjadi A (82,08) pada tahun 2023, melampaui target dengan capaian 102,47%. Hal ini menegaskan perbaikan akuntabilitas birokrasi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) juga meningkat dari kategori B (3,97) menjadi A (4,54) pada tahun 2023 dengan capaian 100,67%, menunjukkan peningkatan kualitas layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek keuangan dan birokrasi, capaian sangat positif terlihat pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berhasil dipertahankan secara konsisten selama periode 2019–2023. Selain itu, kualitas aspek perencanaan mengalami peningkatan signifikan dari skor 62,95 menjadi 95,00, jauh melampaui target dengan capaian 141,60%, yang mencerminkan penguatan sistem perencanaan dan integrasi kebijakan pembangunan. Namun demikian, Indeks Profesionalisme ASN meski menunjukkan tren positif dengan capaian 73,48 pada 2023, masih berada di bawah target 81,33 (90,35%). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan budaya kerja aparatur agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Indikator di bidang teknologi informasi menunjukkan keberhasilan besar. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik meningkat drastis dari 21,05% pada 2019 menjadi 100% pada 2023, sepenuhnya memenuhi target. Hal serupa juga terlihat pada persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan, yang naik signifikan dari 9,03% menjadi 38,89% pada 2023, tepat mencapai target. Capaian ini menegaskan keberhasilan transformasi digital di tingkat kabupaten hingga desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern.

Sementara itu, capaian pada aspek sosial keagamaan juga sangat menggembirakan. Penerimaan zakat mengalami peningkatan hingga 15,61% pada 2023, melampaui target 12% dengan capaian 130,08%. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi dan kepedulian sosial masyarakat yang

semakin kuat, serta peran kelembagaan zakat yang semakin efektif dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian Misi V menunjukkan keunggulan pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, kualitas pelayanan publik, konsistensi opini WTP, pemanfaatan teknologi informasi baik di perangkat daerah maupun desa, serta penguatan peran sosial-keagamaan melalui zakat. Namun, kelemahan masih terdapat pada aspek profesionalisme ASN yang belum sepenuhnya memenuhi target, sehingga perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi, integritas, serta adaptasi terhadap tuntutan birokrasi modern.

II.11 Capaian Indikator Makro Tahun 2020-2024

Indikator makro pembangunan daerah merupakan seperangkat ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Indikator ini mencerminkan capaian pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Analisis terhadap indikator makro tidak hanya memberikan gambaran mengenai tren capaian pembangunan dalam kurun waktu tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai dasar teknokratis dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan prioritas pembangunan daerah pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel II-156 Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024

Indikator Makro	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Pembangunan Manusia	71,57	71,93	72,47	73,21	73,95
Pendapatan Perkapita	28.837	30.987	36.208	38.839	41.466
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,19	4,19	4,02	5,27	5,15
Tingkat Kemiskinan	5,17	4,84	4,54	4,01	3,38
Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,300	0,275	0,260	0,293	0,288
Angka Pengangguran	2,24	2,44	2,29	2,12	2,11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,13	67,04	69,23	72,36	67,39

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan capaian yang positif di berbagai aspek, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Secara umum, indikator makro pembangunan daerah memperlihatkan arah yang

sejalan dengan target pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus menjadi modal penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dari 71,57 pada tahun 2020 menjadi 73,95 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun daya beli. Peningkatan IPM didukung oleh program pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal. Namun, masih terdapat tantangan berupa disparitas kualitas layanan antarwilayah yang perlu diatasi agar pembangunan manusia berjalan lebih merata.

Pendapatan Per Kapita juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp28,837 juta pada tahun 2020 menjadi Rp41,466 juta pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan membaiknya produktivitas masyarakat dan geliat ekonomi daerah, terutama melalui sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM. Walau demikian, masih diperlukan upaya peningkatan nilai tambah produk lokal dan diversifikasi ekonomi agar struktur ekonomi lebih tangguh terhadap guncangan eksternal.

Laju Pertumbuhan Ekonomi yang sempat terkontraksi -1,19% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 berhasil pulih dan tumbuh positif hingga 5,15% pada tahun 2024. Pemulihan ini ditopang oleh program pemulihan ekonomi, peningkatan aktivitas perdagangan, serta kontribusi sektor jasa dan pertanian. Meski demikian, ketergantungan yang cukup tinggi pada sektor primer masih menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkualitas.

Tingkat Kemiskinan berhasil ditekan secara konsisten dari 5,17% pada tahun 2020 menjadi 3,38% pada tahun 2024. Pencapaian ini menegaskan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses pekerjaan, dan perlindungan sosial. Namun, meskipun angka kemiskinan relatif rendah, kelompok rentan masih menghadapi risiko kembali jatuh miskin akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok, keterbatasan akses pekerjaan layak, maupun dampak bencana alam.

Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) relatif terjaga pada level rendah, yakni di bawah 0,30, dengan tren fluktuatif dari 0,300 pada tahun 2020 menjadi 0,288 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan distribusi pendapatan yang cukup merata dibandingkan dengan rata-rata nasional. Walaupun demikian, fluktuasi yang terjadi mengindikasikan perlunya penguatan pertumbuhan

ekonomi yang lebih inklusif, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada level rendah dan relatif stabil, yakni 2,24% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 2,11% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan serapan tenaga kerja yang cukup baik, didukung oleh sektor padat karya, pertanian, serta UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja. Tantangan ke depan adalah meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan dari 62,13 pada tahun 2020 menjadi 72,36 pada tahun 2023, namun sedikit menurun menjadi 67,39 pada tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh Indeks Tutupan Lahan (IKTL) yang secara kewenangan bukan sepenuhnya dapat diintervensi oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, adanya perbedaan perspektif dalam pengelolaan lahan gambut turut memengaruhi penilaian IKLH. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan melalui program pengendalian pencemaran, penataan pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada aspek yang melampaui kewenangan daerah.

Secara keseluruhan, capaian indikator makro Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Peningkatan IPM, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi bukti keberhasilan pembangunan. Namun, fluktuasi ketimpangan pendapatan dan penurunan IKLH pada tahun terakhir menjadi catatan penting yang harus diantisipasi dengan kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan lingkungan maupun sosial-ekonomi.

II.12 Permasalahan Urusan

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan

memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan dalam beberapa tahun sebelumnya. Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, akan timbul permasalahan karena adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target sasaran pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD atau RPJPD). Adanya kesenjangan ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus identifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan sumber daya (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta tantangan dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan

dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Rumusan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Daerah akan menjadi program prioritas pemerintah daerah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Perspektif Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk 5 tahun ke depan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran strategis.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum

diberdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi. Secara keseluruhan, berikut rekapitulasi identifikasi permasalahan pada setiap aspek urusan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

Tabel II-157 Tabel Identifikasi Permasalahan Urusan

URUSAN	PERMASALAHAN
Pendidikan	Belum merata dan optimalnya layanan akses dan mutu pendidikan anak usia dini
	Belum optimalnya mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini
	Belum optimalnya layanan pendidikan inklusif
	Belum optimalnya Indeks Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
	Belum optimalnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
	Belum Optimalnya Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
	Tidak Belum optimalnya jumlah tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar terutama di daerah dengan akses sulit dan daerah pedesaan
	Belum optimalnya tingkat pendidikan Tenaga Pendidik di satuan pendidikan
	Masih terdapatnya lembaga pendidikan yang belum terakreditasi maupun masih terakreditasi B
Kesehatan	Masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	Masih kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarganya dalam mengetahui gejala dan permasalahan kehamilan
	Perlunya optimalisasi beberapa layanan yang berkaitan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada urusan kesehatan
	Masih adanya balita yang berstatus gizinya, pendek dan sangat pendek
	Belum tingginya pengetahuan ibu terhadap peningkatan gizi balitanya
	Masih tingginya kasus kematian bayi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan
	Masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular di masyarakat
	Belum tingginya pengetahuan masyarakat terhadap kasus penyakit menular dan tidak menular
	Belum tingginya kepedulian masyarakat terhadap imunisasi bayi, balita, anak pra sekolah dan anak sekolah
	Masih adanya izin praktik tenaga kesehatan yang melewati batas waktu perizinan
	Masih adanya tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar kompetensinya
	Masih kurang meratanya persebaran tenaga kesehatan yang sesuai teknis kompetensinya
	Masih adanya izin pendirian usaha fasilitas layanan kesehatan yang melewati batas waktu perizinan
	Belum tingginya kepedulian masyarakat terhadap standarisasi sertifikasi usahanya
	Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat Laik Higiene Sanitasi usahanya
	Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap program kesehatan
	Belum optimalnya ketersediaan prasarana edukasi promosi kesehatan ke masyarakat
	Belum optimalnya pengembangan UKBM aktif di masyarakat
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih adanya jaringan irigasi dengan kondisi belum baik yang mengakibatkan terjadinya tidak teraliri areal sawah dengan baik
	Masih perlunya perbaikan beberapa kawasan pemukiman di wilayah sungai diakibatkan banjir, tanah longsor dan erosi
	Belum optimalnya penyediaan akses air bersih terutama di kawasan pedesaan
	Belum banyaknya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak
	Masih adanya drainase dengan kondisi buruk/rusak
	Masih adanya ruas jalan lingkungan yang rusak
	Masih adanya target pada urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang belum tercapai
	Masih adanya ruas jalan yang belum terlayani PJU
	Masih banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan
	Masih kurangnya jumlah tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi

URUSAN	PERMASALAHAN
	Masih banyaknya wilayah yang belum memiliki rencana tata ruang serta rencana tata ruangnya belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Masih adanya ketidaksesuaian antara PSU yang tercantum pada siteplan dan PSU yg akan diserahkan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tidak adanya law enforcement bagi pengembang yang tidak mematuhi aturan yang berlaku pada penyerahan PSU Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Masih adanya kelurahan/desa yang belum memenuhi pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Masih belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran, serta minimnya sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran Masih terdapatnya anggota Linmas yang belum terampil dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih tinggi Kurangnya kesiapsiagaan dan pendidikan mitigasi bencana (bencana alam, non-alam dan wabah) Belum tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kurangnya peningkatan kapasitas operator pusdalops, Petugas TRC dan Petugas Pembantuan PB Masih minimnya ketersediaan peralatan Penanggulangan Bencana Belum optimalnya pemulihan pasca bencana
Sosial	Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana Sulitnya memprediksi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Kurangnya penyediaan sarana prasarana untuk pemberdayaan sosial Masih terdapatnya Keluarga Miskin yang belum mendapatkan bantuan Program PKH Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran Belum optimalnya Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terkendala validasi data yang belum selesainya integrasi data DTKS yang di SIKS-NG
Ketenagakerjaan	Kurangnya pemahaman dan ketaatan para pelaku hubungan industrial terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Belum adanya dokumen rencana tenaga kerja daerah makro kabupaten Masih kurangnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Minimnya penyediaan informasi pasar kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum terupdatenya data gender dan anak Belum optimalnya sosialisasi penanganan kasus pada perempuan Kurangnya pengawasan dan pengetahuan terhadap perlindungan anak Belum optimalnya kebutuhan dasar keluarga Kurang optimalnya peran perempuan dalam lembaga legislatif
Pangan	Masih belum optimalnya cadangan pangan yang dikelola masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat secara berkelanjutan Masih perlu ditingkatkannya Penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas Kurang optimalnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian karena petani sebagai pelaku usaha sering kali dihadapkan pada realita rendahnya minat konsumen lokal terhadap produk olahan atau produk premium pertanian dengan label harga di atas rata-rata, sedangkan jaringan pemasaran untuk menjangkau konsumen luar kota masih kurang optimal Masih kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan olahan pangan lokal yang bergizi, bercita rasa, berestetika dan bernilai ekonomi
Lingkungan Hidup	Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Belum optimalnya pengelolaan lahan dan sumber air, pengelolaan lingkungan perkotaan dan pengendalian pencemaran udara Masih terdapat potensi terjadinya penurunan kualitas air Terdapat perbedaan kriteria terhadap perhitungan Kualitas Tutupan Lahan terutama pada areal rawa

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
Pertanahan	-
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah Masih adanya anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran, sekitar 93% kepemilikan akta kelahiran/kia pada tahun 2023 Terdapat masyarakat yang kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan legal dikarenakan status pernikahan siri Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masih banyaknya desa yang belum memiliki minat ekspansi usaha melakukan kerja sama dengan pihak lain khususnya lembaga perekonomian dan jasa pariwisata yang lebih besar baik swasta maupun pemerintah Masih banyaknya kelembagaan desa yang belum sesuai standar regulasi yang berlaku Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Lembaga Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Belum optimalnya sistem/kebijakan yang mengklasifikasi angka kelahiran berdasarkan kelompok umur Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu- isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana Angka kelahiran total masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) dikategorikan masih tinggi Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PR) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z) Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan angka panjang lansia. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana Belum optimalnya fokus dan kesinambungan penggerakan Mekanisme Operasional (Mekop) Lini Lapangan Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga Kencana (termasuk dukungan dan sisi Teknologi Informasi/TI)
Urusan Perhubungan	Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan transportasi umum, khususnya angkutan darat Belum terselenggaranya pengelolaan pelayaran sungai yang baik dalam wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan
Urusan Komunikasi dan Informatika	Nilai SPBE pada kebijakan tata kelola, kebijakan layanan dan perencanaan belum mencapai target terutama nilai kelembagaan Belum optimalnya Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih banyaknya lembaga koperasi yang tidak aktif Belum optimalnya tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi Minimnya SDM pengelola koperasi yang memiliki sertifikasi kompetensi Minimnya diversifikasi usaha koperasi Menurunnya volume usaha koperasi akibat pandemi Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri Belum maksimalnya kemampuan SDM usaha mikro Minimnya diversifikasi usaha mikro Lemahnya perluasan jaringan dan kemitraan usaha mikro Belum optimalnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar. Belum optimalnya mentoring, fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro

URUSAN	PERMASALAHAN
Penanaman Modal	Masih adanya proses pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan SOP Pelayanan
	Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal
	Menurunnya minat investasi di masa pandemi Covid-19
	Belum optimalnya pengendalian penanaman modal
	Belum terintegrasinya data dan informasi penanaman modal
Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya legalitas organisasi kepemudaan
	Belum optimalnya kualitas manajemen organisasi kepemudaan dan kepramukaan
	Belum optimalnya SDM keolahragaan
	Belum meratanya sentra keolahragaan
	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kompetisi/festival keolahragaan
Statistik	Terbatasnya bibit atlit potensial
	Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah
Persandian	Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
	Belum tercapainya target nilai per area keamanan informasi yang diamankan
Kebudayaan	Menurunnya aktivitas pertunjukkan seni dan budaya akibat pandemi Covid-19
	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	Belum optimalnya pengelolaan keragaman budaya
	Belum optimalnya pengelolaan museum
Perpustakaan	Belum maksimalnya indeks kegemaran membaca masyarakat
	Belum maksimalnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
	Belum optimalnya pengadaan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang di lestarikan
Kearsipan	Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip
	Belum maksimalnya pemanfaatan arsip yang bersifat tertutup
Kelautan dan Perikanan	Menurunnya volume produksi dan permintaan hasil produksi perikanan
	Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, Poklhasar, dan Pokdakan)
	Urusan Pariwisata
	Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi
	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata
	Menurunnya jumlah kunjungan wisata akibat pandemi Covid-19
	Belum optimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
	Pengembangan kawasan pariwisata loksado yang tidak dapat maksimal karena arealnya berada di sekitar hutan lindung
Pertanian	Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	Masih banyaknya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
	Semakin menurunnya tingkat kesuburan atau produktivitas lahan karena penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dalam jangka waktu lama, sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikan
	Masih lemahnya peran kelembagaan petani dalam meningkatkan produktivitas dan manajemen pengelolaannya
	Masih adanya usaha produk hewan yang belum bersertifikat PRA/NKV
	Masih rentannya ancaman penyakit zoonosis (yg menular dari hewan ke manusia) seperti rabies, flu burung, brucellosis, antrax, dll
	Belum memadainya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air
Perdagangan	Melemahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran akibat pandemi
	Belum maksimalnya kualitas sarana distribusi perdagangan.
	Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar ekspor.
	Minimnya SDM penara alat UTTP
	Belum maksimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri
	Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Perindustrian	Minimnya keterisian database informasi industri dalam SIINAS
	Belum maksimalnya pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah
	Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

URUSAN	PERMASALAHAN
Perencanaan	Minimnya cakupan pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah
	Masih adanya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah disebabkan adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak.
	Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak sesuai jadwal.
	Perlunya peningkatan kualitas SDM perencanaan.
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Belum adanya Human Capital Development Plan (HCDP) ASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	Perlunya mengoptimalkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi.
Keuangan	Realisasi Belanja modal kecenderungan mengalami penurunan.
	Pencatatan dan administrasi aset belum optimal
Penelitian dan Pengembangan	Perlunya penetapan regulasi atau payung hukum yang bersifat teknis dalam penyelesaian permasalahan pembangunan serta permasalahan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.
Pengawasan	Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan.

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025, Diolah

II.13 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / TPB

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi agenda global 2030 setelah disepakati dalam sidang PBB pada bulan September 2015. SDGs yang berisikan 17 tujuan dan 169 target, adalah sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Selain itu juga dikenal sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Butir-butir SDGs bersifat inklusif, melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO).

Pembangunan global ini merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Keberhasilan pencapaian SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Oleh karena pemerintah kota dan kabupaten berada lebih dekat dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi, serta ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga nasib dan

kualitas hidup masyarakat dalam praktiknya sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja pemerintah daerah. Mulai dari soal kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, kualitas sekolah, dan pelayanan kesehatan. Pada intinya kondisi masyarakat tergantung pada tinggi rendahnya mutu pelayanan publik di daerah.

Terdapat 17 tujuan dalam SDGs/TPB, yakni meliputi: tujuan 1 (tanpa kemiskinan – mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun), tujuan 2 (tanpa kelaparan – menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan), tujuan 3 (kehidupan sehat dan sejahtera – menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia), tujuan 4 (pendidikan berkualitas – menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua), tujuan 5 (kesetaraan gender – mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan), tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak – menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau – menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua), tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua).

Selanjutnya, tujuan 9 (industri, inovasi dan infrastruktur – membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi), tujuan 10 (berkurangnya kesenjangan – mengurangi kesenjangan intra dan antar negara), tujuan 11 (kota dan permukiman berkelanjutan – menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan), tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab – menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan), tujuan 13 (penanganan perubahan iklim – mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya), tujuan 14 (ekosistem lautan – melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan), tujuan 15 (ekosistem daratan – melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati), tujuan 16 (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh – menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan), serta tujuan 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan – menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan salah satu pedoman yang harus dipedomani di setiap dokumen perencanaan di Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden yang terbit setiap periode RPJMN, di mana RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sasaran TPB nasional tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, di mana TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauannya, tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dikelompokkan ke dalam empat pilar pembangunan, yaitu :

- 1) Pilar pembangunan sosial, meliputi tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5
- 2) Pilar pembangunan lingkungan, meliputi tujuan 6, 11, 12, 13, dan 15
- 3) Pilar pembangunan ekonomi, meliputi tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
- 4) Pilar pembangunan hukum dan tata Kelola, meliputi tujuan 16

Mengacu pada pengelompokan tersebut, maka status capaian TPB Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan empat pilar pembangunan adalah sebagai berikut :

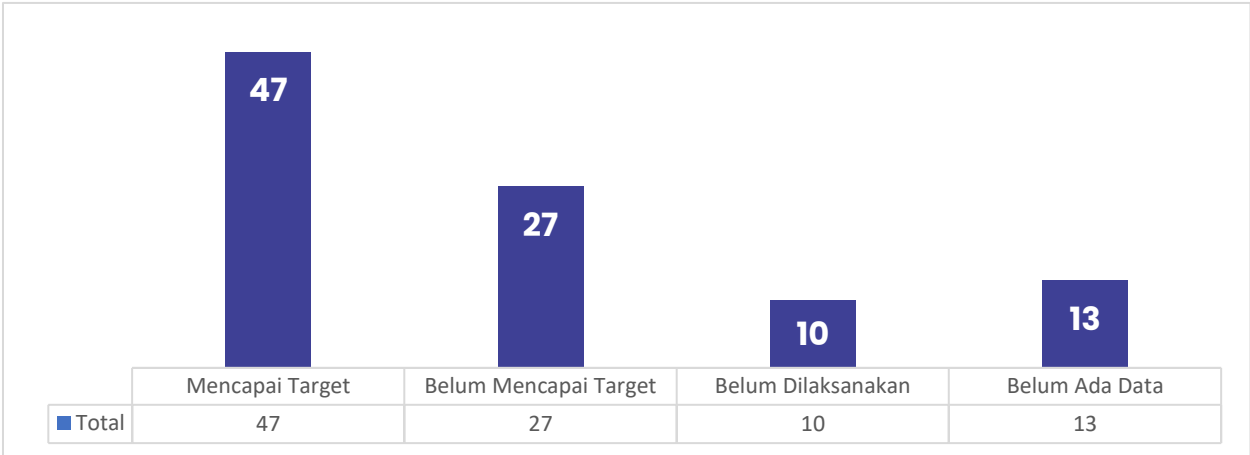
CAPAIAN INDIKATOR TPB PILAR SOSIAL

Berdasarkan TPB pilar Pembangunan Sosial yang relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup:

- 1) Tujuan TPB 1 meliputi 25 indikator
- 2) Tujuan TPB 2 meliputi 11 indikator
- 3) Tujuan TPB 3 meliputi 35 indikator
- 4) Tujuan TPB 4 meliputi 13 indikator

5) Tujuan TPB 5 meliputi 13 indikator

Gambar II-67 Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029

Mengacu pada target sasaran TPB dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, terdapat 97 indikator TPB pilar Pembangunan Sosial yang relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari 47 indikator TPB mencapai target, 27 indikator TPB belum mencapai target, 10 indikator TPB belum dilaksanakan, dan 13 indikator TPB tidak/belum ada data. (0).

Berdasarkan capaian indikator TPB pilar pembangunan sosial pada OPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat 9 OPD yang berkontribusi dan memiliki kewenangan terkait. Dinas Kesehatan mempunyai indikator terbanyak terhadap pilar sosial yaitu 35 indikator. Rincian indikator masing-masing OPD tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-158 Jumlah Indikator Perangkat Daerah Berdasarkan Pilar Sosial

No	OPD	Capaian				Grand Total
		A	B	C	D	
1	Dinas Kesehatan	24	6	3	2	35
2	Dinas PPKBPPPA	7	7		3	17
3	Dinas Pendidikan	6	7	1	1	15
4	Dinas Sosial	3	3	3	2	11
5	BPBD	4		1	1	6
6	Dinas Ketahanan Pangan	1	1	1	2	5
7	Kepolisian	1		1	1	3
8	Dinas Perumahan Rakyat KPLH		3			3
9	Dinas Dukcapil	1			1	2
Grand Total		47	27	10	13	97

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029

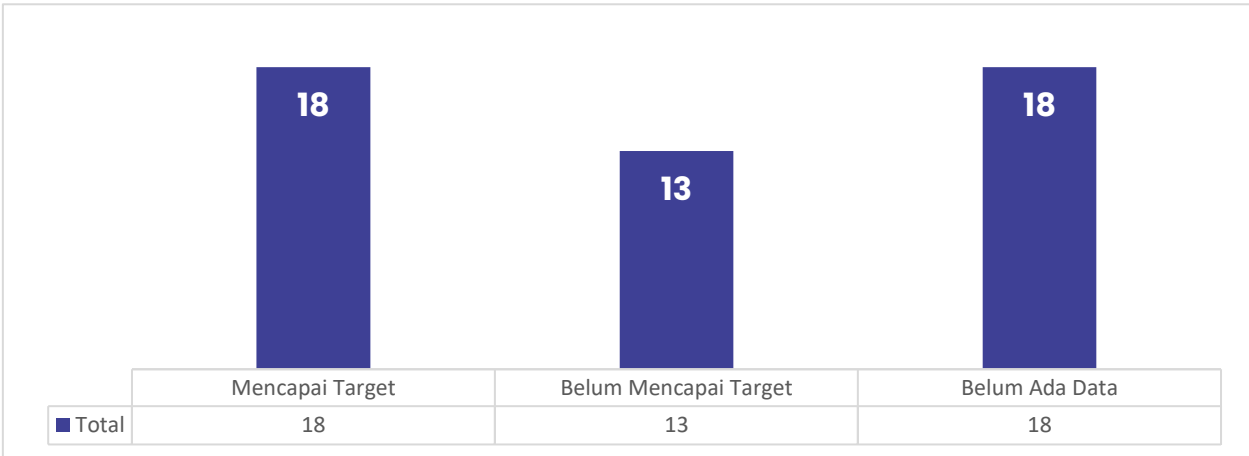
CAPAIAN INDIKATOR TPB PILAR EKONOMI

TPB pilar Pembangunan Ekonomi yang relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup:

- 1) Tujuan TPB 7 meliputi 2 sasaran dan 2 indikator
- 2) Tujuan TPB 8 meliputi 7 sasaran dan 20 indikator
- 3) Tujuan TPB 9 meliputi 4 sasaran dan 6 indikator

- 4) Tujuan TPB 10 meliputi 4 sasaran dan 9 indikator
- 5) Tujuan TPB 17 meliputi 6 sasaran dan 12 indikator

Gambar II-68 Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Ekonomi



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 – 2029

Mengacu pada target sasaran TPB dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, terdapat 49, indikator TPB pilar Pembangunan Ekonomi yang relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari 18 indikator TPB mencapai target, 13 indikator TPB belum mencapai target, dan 18 indikator TPB tidak/belum ada data.

Berdasarkan capaian indikator TPB pilar pembangunan sosial pada OPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat 14 OPD yang berkontribusi dan memiliki kewenangan terkait. Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai indikator terbanyak terhadap pilar ekonomi yaitu 11 indikator. Rincian indikator masing-masing OPD tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-159 Jumlah Indikator Perangkat Daerah Berdasarkan Pilar Ekonomi

No	OPD	Capaian				Grand Total
		A	B	C	D	
1	BPS	6	3		2	11
2	Dinas Naker KUKMP	3	4		3	10
3	Dinas Kominfo		3		3	6
4	Dinas Porapar	2			3	5
5	Setda		3		2	5
6	Dinas PMD	4				4
7	BI / Bank	1			1	2
8	Dinas Lingkungan Hidup				2	2
9	Dinas Perindustrian	1				1
10	Dinas Pertanian	1				1
11	Bapenda	1				1
12	Dinas Perdagangan				1	1
Grand Total		19	13	0	17	49

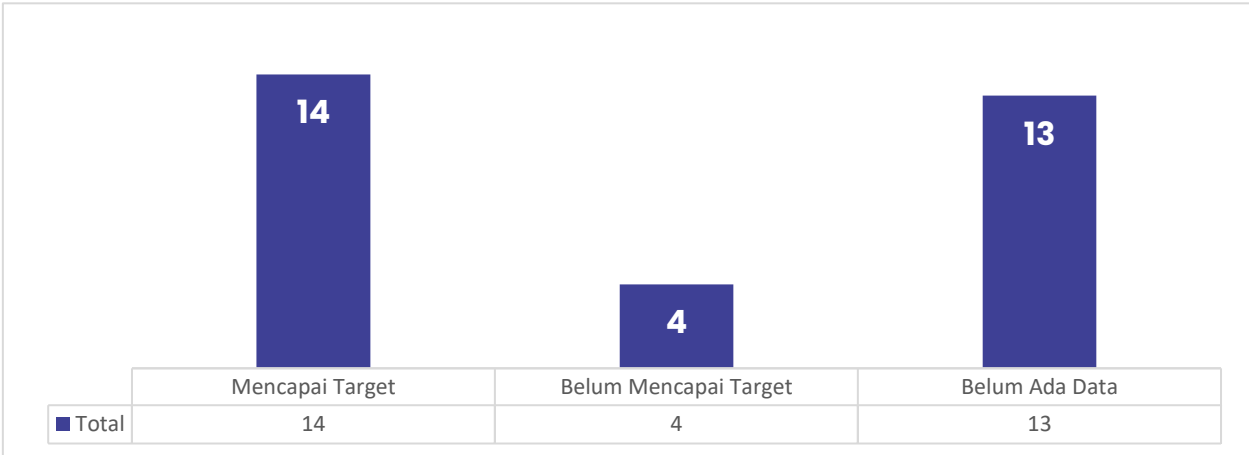
Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 – 2029

CAPAIAN INDIKATOR TPB PILAR LINGKUNGAN

TPB pilar Pembangunan Sosial yang relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup:

- 1) Tujuan TPB 6 meliputi 13 indikator
- 2) Tujuan TPB 11 meliputi 9 indikator
- 3) Tujuan TPB 12 meliputi 5 indikator
- 4) Tujuan TPB 13 meliputi 1 indikator
- 5) Tujuan TPB 15 meliputi 3 indikator

Gambar II-69 Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 – 2029

Mengacu pada target sasaran TPB dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, terdapat 65 indikator TPB pilar Pembangunan Lingkungan yang relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari 14 indikator TPB mencapai target, 4 indikator TPB belum mencapai target, dan 13 indikator TPB tidak/belum ada data.

Berdasarkan capaian indikator TPB pilar pembangunan sosial pada OPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat 10 OPD yang berkontribusi dan memiliki kewenangan terkait. Dinas PUTR mempunyai indikator terbanyak terhadap pilar Lingkungan yaitu 9 indikator. Rincian indikator masing-masing OPD tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-160 Jumlah Indikator Perangkat Daerah Berdasarkan Pilar Lingkungan

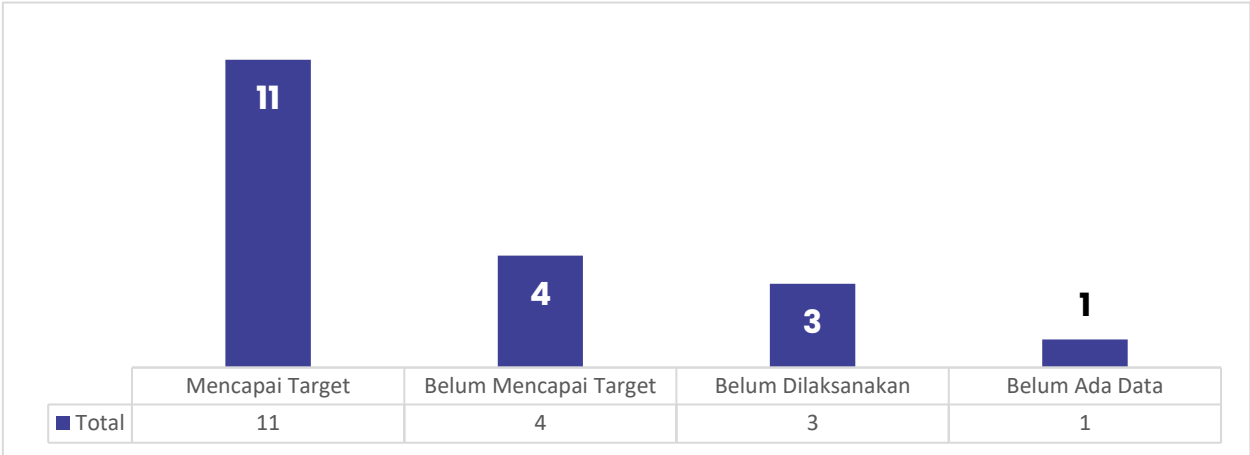
No	OPD	Capaian				Grand Total
		A	B	C	D	
1	Dinas PUTR	5	2		2	9
2	Dinas Lingkungan Hidup	5			3	8
3	BPBD	1			5	6
4	Dinas Kesehatan	2	2		1	5
5	Kepolisian				1	1
6	Bappelitbangda				1	1
7	Dinas Porapar	1				1
Grand Total		14	4	0	13	31

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 – 2029

CAPAIAN INDIKATOR TPB PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA

TPB pilar Pembangunan Ekonomi yang relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup tujuan TPB 16 dengan 19 indikator.

Gambar II-70 Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 – 2029

Mengacu pada target sasaran TPB dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan mengacu pada target sasaran TPB Peta Jalan SGDs Indonesia 2030, terdapat 22 indikator TPB pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang relevan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari 11 indikator TPB mencapai target, 4 indikator TPB belum mencapai target, 3 indikator TPB belum dilaksanakan, dan 3 indikator TPB belum dilaksanakan.

Berdasarkan capaian indikator TPB pilar pembangunan sosial pada OPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat 7 OPD yang berkontribusi dan memiliki kewenangan terkait. Sekretariat Daerah mempunyai indikator terbanyak terhadap pilar Hukum dan Tata Kelola yaitu 10 indikator. Rincian indikator masing-masing OPD tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-161 Jumlah Indikator Perangkat Daerah Berdasarkan Pilar Hukum dan Tata Kelola

No	OPD	Capaian				Grand Total
		A	B	C	D	
1	Setda	6	2	1	1	10
2	Kepolisian	2	1			3
3	Dinas Kominfo			2		2
4	BPS	1				1
5	Dinas Dukcapil		1			1
6	Dinas Sosial	1				1
7	Dinas PPKBPPPA	1				1
Grand Total		11	4	3	1	19

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 – 2029

II.14 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrumen pencegahan yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kewajiban KLHS oleh Pemerintah Daerah tersebut juga ditegaskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan pemberlakuan KLHS tersebut ditujukan untuk memastikan penerapan pembangunan yang berkelanjutan pada suatu wilayah atau pada program pemerintahan. Pada eksekusinya, KLHS wajib tertuang pada RTRW suatu wilayah provinsi, kota atau pun kabupaten dan juga pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam penataan ruang, KLHS ini akan mempunyai manfaat:

- 1) Merupakan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Merupakan sarana pendukung pengambilan keputusan pelaksanaan program pemanfaatan ruang;
- 3) Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas pilihan-pilihan pemanfaatan ruang yang tersedia;
- 4) Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan;
- 5) Melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan;
- 6) Memfasilitasi kerja sama lintas sektor dan/atau batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumber daya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Berdasarkan hasil capaian serta evaluasi yang telah dilakukan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Untuk pencapaian target, tentu saja arah kebijakan dan program yang telah dijalankan saat ini perlu dilanjutkan dan dipertahankan. Akan tetapi, ada beberapa indikator yang tidak akan tercapai, apabila hanya melanjutkan kebijakan dan program yang telah berjalan selama ini. Untuk itu diperlukan arah kebijakan dan program baru yang memerlukan inovasi atau memerlukan upaya tambahan untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2030. Berikut merupakan Matriks Alternatif Skenario dan Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan :

Tabel II-162 Matriks Alternatif Skenario dan Rekomendasi KLHS RPJMD 2025-2029 dengan Upaya Tambahan

NO	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REKOMENDASI
PILAR SOSIAL				
1	Indikator Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Percepatan dan optimalisasi pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan persentase penerima bantuan untuk mengurangi kemiskinan bagi penyandang disabilitas dan rentan dalam skala kabupaten.	Pemantapan bantuan sosial yang terintegrasi dengan keuangan inklusif, terutama bagi penduduk miskin dan rentan Pengembangan inovasi berbasis teknologi dalam layanan dasar di seluruh pelosok Indonesia. Sinergi dan kerjasama pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, LSM) dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar. Peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan menengah melalui berbagai pelatihan, pendampingan memulai usaha, dan mentoring.
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Belum terpenuhinya Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Peningkatan akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan agar memenuhi target sesuai Perpres 59/2017	Peningkatan akses layanan sanitasi rumah tangga bagi yang belum memiliki akses Memberikan bantuan terhadap rumah tangga yang memiliki akses maupun namun sudah tidak layak pakai.
3	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Dampak negatif Rumah Tangga Kumuh Perkotaan bagi lingkungan	Memperbaiki maupun menata ulang rumah tangga kumuh perkotaan agar meminimalisir kerusakan lingkungan	Pembangunan fisik dan lingkungan seperti merelokasi daerah kumuh menjadi rusunawa, peningkatan akses sanitasi dan air bersih Pembangunan ekonomi dalam konteks meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh agar bangkit dari kemiskinan
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat.	Belum tercapainya angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Peningkatan angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Sederajat agar mencapai target sesuai Perpres 59/2017	Peningkatan standard layanan pendidikan untuk menunjang Pendidikan lanjut baik di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai Perguruan Tinggi. Peningkatan fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama agar memenuhi standard yang ditentukan.
5	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Terwujudnya kehidupan yang sehat dan sejahtera	Penurunan persentase penduduk yang mengalami tekanan darah tinggi pada semua usia	Peningkatan pelayanan kesehatan dan penyuluhan terkait pencegahan dini agar tidak terkena tekanan darah tinggi. Menetapkan regulasi terkait garam dalam makanan dan mendukung produksi serta konsumsi makanan rendah garam.
6	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	Menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk dan merealisasikan program keluarga berencana dengan cukup mempunyai dua anak.	Pasangan yang baru saja menikah dan belum mempunyai keturunan.	Peningkatan standard layanan keluarga berencana bagi pasangan yang baru menikah Pendataan jumlah pasangan yang baru menikah untuk diberikan sosialisasi mengenai keluarga berencana dan penggunaan kontrasepsi jangka panjang cara modern
7	Total Fertility Rate (TFR)	Optimalisasi pencapaian Total Fertility Rate (TFR) setiap tahun secara konstan	Peningkatan Total Fertility Rate (TFR) setiap tahun secara konstan.	Peningkatan pendidikan seksual yang komprehensif Penyediaan program konseling dan mentor . Peningkatan kampanye di media sosial

NO	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REKOMENDASI
8	Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan	Optimalisasi pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan	Optimalisasi pembiayaan kesehatan untuk tenaga kesehatan Rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Peningkatan angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat agar mencapai 100%	Peningkatan standard layanan pendidikan untuk menunjang Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Peningkatan fasilitasi dan akses layanan pendidikan sekolah dasar agar memenuhi standard yang ditentukan. Melakukan pendataan penduduk yang menempuh pendidikan SMP/MTs/Sederajat
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Sederajat. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥15 Tahun	Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Peningkatan angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat dan Rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih atau sama dengan 15 tahun	Peningkatan standard layanan pendidikan untuk menunjang Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Peningkatan fasilitasi dan akses layanan pendidikan sekolah dasar agar memenuhi standard yang ditentukan. Melakukan pendataan penduduk yang menempuh pendidikan SMP/MTs/Sederajat
11	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Tercapainya persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Peningkatan sosialisasi di media sosial dan media lainnya Peningkatan akses ke layanan korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif Pengintegrasian layanan persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif Kemitraan dengan sektor lain dalam hal layanan persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
12	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun dan Sebelum Umur 18 Tahun	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Tercapainya persentase korban praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Peningkatan sosialisasi di media sosial dan media lainnya Peningkatan akses ke layanan pengaduan korban praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan Pengintegrasian layanan persentase korban praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan Kemitraan dengan sektor lain dalam hal layanan persentase korban praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat Perempuan
13	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah	Belum proporsionalnya kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Proporsionalisasi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Peningkatan sosialisasi di media sosial Kerjasama dengan partai atau ormas Perempuan untuk mensosialisasikan urgensi keterwakilan Perempuan di Parlemen
14	Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS)	Akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi	Tercapainya target penggunaan pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi modern	Peningkatan sosialisasi di media sosial dan media lainnya Mendata pasangan usia subur yang akan menggunakan kontrasepsi modern

NO	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REKOMENDASI
	Tentang Metode Kontrasepsi Modern			Pengintegrasian layanan komprehensif dengan layana kelompok usia subur Peningkatan pendidikan seksual yang komprehensif untuk pasangan usia subur Penyediaan program konseling dan mentor untuk pasangan usia subur
PILAR EKONOMI				
1	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita	Belum tercapainya target peningkatan laju pertumbuhan PDRB per kapita (proyeksi 2030: turun menjadi 0,94%/tahun)	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB per kapita	Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian berkelanjutan Mengembangkan industri kecil-menengah berbasis unggulan daerah Memperbaiki iklim investasi yang baik bagi investor dalam negeri/asing
2	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	Belum tercapainya target peningkatan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (proyeksi 2030: turun menjadi -1,99%/tahun)	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja (SDM) lokal Meningkatkan daya beli masyarakat melalui <i>government expenditure</i> Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama Pemda dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Meningkatkan ketaatan penerapan upah minimum yang layak bagi tenaga kerja profesional
3	Persentase Tenaga Kerja Formal	Persentase tenaga kerja formal belum mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	Peningkatan persentase tenaga kerja formal hingga 51%	Meningkatkan kualitas tenaga kerja (SDM) lokal Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama Pemda dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Meningkatkan kemandirian bisnis masyarakat lokal
4	Tingkat Setengah Pengangguran	Persentase tenaga kerja setengah menganggur cenderung menaik.	Penurunan persentase tenaga kerja setengah menganggur hingga 49%	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Meningkatkan skill tenaga kerja Meningkatkan kemandirian tenaga kerja
5	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit cenderung menurun.	Peningkatan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit hingga 10%	Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses permodalan dari pemerintah atau bank. Meningkatkan skill UMKM dalam penyusunan dokumen finansial.
6	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB cenderung menurun	Peningkatan proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB hingga 21,15% pada tahun 2030	Meningkatkan jumlah industri manufaktur Meningkatkan kuantitas layanan investasi untuk industri manufaktur (dari dalam dan luar negeri). Meningkatkan kerjasama daerah dengan DUDI
7	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDRB	Proporsi anggaran riset pemerintah daerah terhadap PDRB cenderung stagnan.	Peningkatan proporsi anggaran riset pemerintah daerah terhadap PDRB 0,63% pada tahun 2030	Meningkatkan jumlah riset berbasis industri. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan DUDI.
8			Peningkatan penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1	Meningkatkan layanan akses bergerak pita lebar dengan kecepatan target (1 Mbps).

NO	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REKOMENDASI
	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: perkotaan menjangkau 100% populasi; dan perdesaan menjangkau 52% populasi.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung. Meningkatkan kesepahaman dan kemitraan antara pemda dan penyedia jasa komunikasi
PILAR LINGKUNGAN				
1	Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	Belum tercapainya target meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%)	Tercapainya pemerataan pemenuhan kebutuhan air minum yang layak bagi semua masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan air minum
			Terpeliharanya sumber air baku secara berkesinambungan	Pemeliharaan dan peningkatan instalasi pengolahan air minum sesuai perkembangan penduduk dan ekonomi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten
2	Indikator Kapasitas Prasarana Air Baku untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan, dan Industri	Belum tercapainya target meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%)	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak	Peningkatan prasarana dan sarana air limbah, baik on-site maupun off-site di perkotaan dan perdesaan
				Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
				Penguatan kelembagaan dan peningkatan alternatif sumber pembiayaan prasarana dan sarana air limbah permukiman
				Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya
3	Indikator Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Belum tercapainya target pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Dalam hal ini target disesuaikan dengan mengestimasi berdasarkan jumlah total penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sebesar ±232.212 jiwa dengan asumsi 1 rumah dihuni 4 orang anggota keluarga sehingga sebesar ±58,053 SR	Terwujudnya akses universal sanitasi dan pemenuhan pelayanan pengelolaan air limbah terpusat bagi rumah tangga	Mensinergikan pelanggan air minum dengan pelanggan air limbah
				Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyambungan SR SPALD-T bagi perumahan baru
4	Indikator Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem	Belum tercapainya target pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan	Terwujudnya akses universal sanitasi dan pemenuhan pelayanan pengelolaan lumpur tinja bagi rumah tangga	Penguatan kelembagaan dan pengembangan program terkait penyelenggaraan pengelolaan limbah domestik melalui Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dan sosialisasi penerapan tariff

NO	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REKOMENDASI
	Pengelolaan Lumpur Tinja	meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Dalam hal ini target disesuaikan dengan mengestimasi berdasarkan jumlah total penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 sebesar ±232.212 jiwa dengan asumsi 1 rumah dihuni 4 orang anggota keluarga sehingga sebesar ±58,053 SR		Perlu adanya program pemucuan yang inovatif ke masyarakat terkait penggunaan tangki septik sesuai standar dan penyedotan lumpur tinja Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait manfaat IPLT ditinjau dari sudut pandang sosio ekonomi untuk mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA				
1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Mengoptimalkan Penguatan Integritas Masyarakat, Penegak Hukum, dan Penyelenggara Negara	Mengembangkan Budaya Anti Korupsi	Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggaraan Negara Penguatan budaya anti korupsi Masyarakat Meningkatkan pemahaman dan literasi terhadap aturan perundang-undangan Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu Pengembangan kerjasama dengan BPS untuk survey/mengukur indek perilaku anti korupsi (IPAK) Pengembangan Pusat Edukasi Anti Korupsi dan diseminasi pencegahan korupsi
2	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Terpenuhinya seluruh kewajiban oleh penyelenggara pelayanan publik dan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan	terpenuhinya standar pelayanan publik	Memberikan apresiasi bagi unit layanan publik yang mematuhi standar pelayanan publik Pemberian insentif bagi unit layanan publik yang memperoleh nilai terbaik dalam kepatuhan standar pelayanan publik Pemberian tambahan anggaran bagi perangkat daerah yang telah mematuhi standar pelayanan publik
3	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Memperluas jangkauan layanan pencatatan akta kelahiran bagi seluruh penduduk	Peningkatan proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menjadi 100%.	inovasi layanan pencatatan akta kelahiran yang mudah dan terjangkau Peningkatan kapasitas petugas pelayanan pencatatan akta kelahiran Pengembangan sistem registrasi daring dan portal pesan singkat untuk pencatatan akta kelahiran Penguatan sistem pengaduan dan penyampaian aspirasi yang responsif untuk layanan pencatatan akta kelahiran

NO	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REKOMENDASI
				Penyelarasan kewenangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa dalam pemutakhiran catatan akta kelahiran

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029

Tabel II-163 Matriks Alternatif Skenario dan Rekomendasi KLHS RPMPD 2025-2045 dengan Upaya Tanpa Tambahan

NO	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REKOMENDASI
PILAR SOSIAL				
1	Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas	Percepatan dan optimalisasi pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan persentase penerima bantuan untuk mengurangi kemiskinan bagi penyandang disabilitas dan rentan dalam skala kabupaten.	Pembuatan kegiatan berbasis komunitas yang mengikut sertakan penyandang disabilitas
				Pemantapan jaminan sosial yang komprehensif dan memadai bagi penyandang disabilitas miskin.
				Integrasi bantuan dan subsidi tepat sasaran bagi penyandang disabilitas miskin.
				Pengembangan kualitas layanan dasar, melalui tata kelola SPM yang handal dan responsif bagi penyandang disabilitas miskin.
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga yang belum Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan dan yang telah memiliki akses	Peningkatan angka pada persentase rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan agar memenuhi target sesuai Perpres 59/2017 dan Perpres No. 111 Tahun 2022	Peningkatan fasilitasi penyedia air agar memenuhi kebutuhan air rumah tangga baik yang belum memiliki akses maupun yang sudah memiliki akses
				Pemeliharaan terhadap sumber air bersih yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
3	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik dari PLN dan Bukan PLN	Belum terpenuhinya Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik dari PLN dan Bukan PLN	Peningkatan angka persentase rumah tangga miskin dan rentan sebagai pengguna sumber Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik dari PLN dan Bukan PLN agar persentase dapat mencapai target 100% sesuai Perpres 59/2017	Pemberian subsidi bagi rumah tangga miskin dan rentan Membangun sumber penerangan alternatif non PLN bagi daerah yang sulit terjangkau PLN
4	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	Mengurangi Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) pada Anak Balita	Mengurangi angka Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balitawa dan ibu hamil agar memenuhi target sesuai Perpres 59/2017	Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi
				Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
				Penerapan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (<i>food based approach</i>).
				Peningkatan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan intervensi sensitif secara terintegrasi.
				Penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat.
				Penguatan sistem surveilans gizi.
				Pengembangan mutu dan nilai tambah hasil produksi pertanian.

NO	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REKOMENDASI
5	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Dua Tahun/Baduta	Memenuhi standart minimum Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Dua Tahun/Baduta	Mengurangi angka minimum Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Dua Tahun/Baduta agar memenuhi target sesuai Perperes 59/2017	Pemberian sosialisasi dengan arahan terstruktur kepada para orang tua agar memperbaiki stunting sebelum usia 2 tahun
				Diperlukan pendekatan multisektoral untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia. Salah satunya dengan intervensi nutrisi yang terintegrasi pada masa 1.000 hari pertama kehidupan.
				Program penyediaan nutrisi lengkap bagi ibu hamil dan menyusui, pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang benar,
				Pemantauan pertumbuhan, peningkatan akses terhadap sanitasi dan air minum layak, perkembangan anak usia dini, dan menggalakkan pola asuh anak yang benar
				Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi
				Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
				Penerapan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (<i>food based approach</i>).
				Peningkatan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan intervensi sensitif secara terintegrasi.
				Penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat.
				Penguatan sistem surveilans gizi.
6	Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe	Meminimalisir adanya gangguan kesehatan pada Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe	Penanganan gangguan kesehatan Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe	Penyusunan pedoman pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada anak usia kurang dari 5 tahun
				Peningkatan layanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.
7	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Mencapai; Dan Tingkat Konsumsi Ikan	Belum terpenuhinya ketahanan pangan dan gizi yang baik, yang didukung meningkatnya pertanian berkelanjutan	Terpenuhinya ketahanan pangan dan gizi yang baik, yang didukung meningkatnya pertanian berkelanjutan	Meningkatkan penguatan ketahanan pangan yang didukung pertanian berkelanjutan
				Peningkatan fasilitasi layanan gizi untuk anak, kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula agar memenuhi standard yang ditentukan.
8	Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80%	Jaminan Kehidupan yang Sehat dan Kesejahteraan yang meningkat	Imunisasi dasar lengkap pada bayi	Mewajibkan semua anak bayi yang baru lahir untuk diimunisasi lengkap
				Menyediakan layanan yang mudah dan nyaman untuk proses imunisasi bayi secara gratis

NO	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REKOMENDASI
	Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi			Petugas kesehatan proaktif mengakses lokasi-lokasi yang sulit terjangkau untuk memberikan layanan langsung terhadap proses imunisasi anak bayi
9	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Tercapainya persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Sosialisasi SOP penyusunan akreditasi untuk SD/MI
				Pelatihan bagi kepala sekolah SD/MI dalam penerapan SOP penyusunan akreditasi
				Pendampingan dalam penyusunan dokumen akreditasi
				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta manajemen satuan pendidikan SD/MI sehingga dapat memperoleh akreditasi Minimal
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Peningkatan angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Sederajat agar mencapai 100%	Peningkatan standard layanan pendidikan untuk menunjang Pendidikan SD/MI/Sederajat
				Peningkatan fasilitasi dan akses layanan pendidikan sekolah dasar agar memenuhi standard yang ditentukan.
				Melakukan pendataan penduduk yang menempuh pendidikan SD/MI/Sederajat
11	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun dan Umur 15-59 Tahun	Optimalisasi persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun.	Tercapainya persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun.	Melaksanakan program yang berkaitan dengan melek aksara untuk penduduk umur ≥15 tahun
				Melaksanakan program yang berkaitan dengan melek huruf pada penduduk umur ≥15 tahun
12	Proporsi Sekolah dengan Akses Ke: (A) Listrik (B) Internet untuk Tujuan Pengajaran, (C) Komputer untuk Tujuan Pengajaran, (D) Infrastruktur dan Materi Memadai Bagi Siswa Disabilitas, (E) Air Minum Layak, (F) Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin, (G) Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, dan Higienis Bagi Semua (WASH)	Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan untuk semua lapisan dan kalangan	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak
				Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah penyandang cacat
				Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah gender
				Menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
13	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun	Perempuan yang pernah kawin umur 25 – 49 tahun	Peningkatan sosialisasi di media sosial dan media lainnya
				Mendata kelompok perempuan yang kawin sesuai usia yang dianjurkan, matang secara psikologis dan seksual

NO	INDIKATOR	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REKOMENDASI
	Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun			Pengintegrasian layanan komprehensif dengan layanan kelompok Perempuan usia layak kawin Peningkatan pendidikan seksual yang komprehensif Penyediaan program konseling dan mentor
PILAR EKONOMI				
1	PDB per kapita	Peningkatan nilai PDRB per kapita (proyeksi 2030: 50 juta rupiah/tahun)	Peningkatan PDB per kapita	Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian berkelanjutan. Mengembangkan industri kecil-menengah berbasis unggulan daerah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah
2	Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Peningkatan proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur tanpa upaya tambahan 15,7% pada tahun 2030	Meningkatkan pengetahuan dan skill tenaga kerja Menyelenggarakan pendidikan berbasis industri manufaktur
3	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK)	Kelancaran komunikasi antar wilayah nasional	Peningkatan jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten/kota yang menjangkau 100% kabupaten/kota pada tahun 2019	Meningkatkan layanan akses bergerak pita lebar dengan kecepatan target (1 Mbps). Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung. Meningkatkan kesepahaman dan kemitraan antara pemda dan penyedia jasa komunikasi
4	Tingkat Penetrasi Akses Tetap Pita lebar (<i>Fixed Broadband</i>) di Perkotaan dan di Pedesaan	Proporsi penduduk terlayani <i>fixed broadband</i>	Peningkatan penetrasi akses tetap pita lebar (<i>fixed broadband</i>) pada tahun 2019 di: Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%); pedesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Meningkatkan layanan akses tetap pita lebar dengan kecepatan target (20 Mbps). Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung. Meningkatkan kesepahaman dan kemitraan antara pemda dan penyedia jasa komunikasi
5	Jumlah Alokasi Pemerintah Untuk Penyiapan Proyek, Transaksi Proyek, dan Dukungan Pemerintah	Pendanaan untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek daerah	Peningkatan ketersediaan alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan investasi bagi proyek KPS/KPBU (dalam dan luar negeri). Meningkatkan kerja sama daerah dengan DUDI Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung.
PILAR LINGKUNGAN				
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA				
1	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Menurunkan tindak pidana kekerasan Meningkatkan keamanan masyarakat	Meningkatkan jaminan keamanan dan rasa aman di masyarakat dari korban kejahatan kekerasan.	Peningkatan Paham Keagamaan Kepada Masyarakat Peningkatan Penerapan Norma Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat Penguatan Kapasitas dan Koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan yaitu POLRI dan TNI Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Selatan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas berikut merupakan isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 :

- 1) Percepatan dan optimalisasi pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Peningkatan kualitas lingkungan;
- 3) Pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- 4) Pengurangan risiko dan mitigasi bencana serta adaptasi perubahan iklim;
- 5) Pengembangan ekonomi daerah dan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
- 6) Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi;
- 7) Optimalisasi kualitas sumber daya manusia dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.

II.15 GLOBAL MEGATREND

Megatrend dapat diartikan sebagai transformasi global dalam periode jangka panjang yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Berdasarkan dokumen Visi Indonesia 2045, megatren meliputi 10 komponen, yaitu 1) demografi global; 2) urbanisasi dunia; 3) peranan emerging economies; 4) perdagangan internasional; 5) keuangan internasional; 6) kelas menengah; 7) persaingan sumber daya alam; 8) teknologi; 9) perubahan iklim; dan 10) perubahan geopolitik.

Demografi Global

Penduduk dunia pada tahun 2045 diprediksi mencapai 9,45 miliar jiwa dan penduduk asia masih menjadi yang terbesar (55 persen). Adanya tren demografi global akan mendorong peningkatan urbanisasi, arus imigrasi, dan penduduk usia lanjut. Jika dikaitkan dengan persebaran usia penduduk maka pada negara maju terjadi persaingan antara populasi penduduk usia produktif dan penduduk lanjut usia yang menjadi hambatan dalam hal pendapatan pajak. Adapun pada negara berkembang, proporsi penduduk usia produktif diprediksi akan lebih dominan sehingga memunculkan tuntutan dalam hal pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sumber daya. Hal ini agar peluang tingginya jumlah penduduk usia dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan peningkatan pengangguran yang menjadi beban pada aspek kependudukan.

Urbanisasi Dunia

Peningkatan sebesar 65 persen penduduk dunia diperkirakan terjadi di perkotaan dengan 95 persen pertambahan terdapat di *emerging economies*. Pembangunan perkotaan akan berperan dalam meningkatkan daya saing, kualitas hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi implikasi bahwa perlu adanya perencanaan perkotaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga kawasan perkotaan menjadi layak huni dalam jangka waktu lama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk perkotaan yang meningkat.

Peranan *emerging economies*

Output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama (54 persen). Adanya investasi Sumber Daya Manusia dan infrastruktur serta reformasi struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.

Perdagangan Internasional

Perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun hingga tahun 2045. Poros perdagangan dan investasi dunia terletak di negara berkembang dengan pertumbuhan 6 persen per tahun. Diprediksikan perdagangan intra Asia akan meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.

Keuangan Internasional

Terjadinya pergeseran dominasi mata uang dunia dari dolar AS menjadi *multi currencies*. Diperkirakan pada tahun 2050, aset keuangan *emerging economies* akan melebihi negara maju. Negara Cina menjadi salah satu sumber keuangan bagi Pembangunan mendatang.

Kelas menengah

Jumlah *middle* dan *upper income class* pada tahun 2050 diprediksi mencapai lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang dengan Asia dan Amerika Latin sebagai negara dengan jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar.

Persaingan Sumber Daya Alam

Persaingan memperebutkan sumber daya alam akan meningkat seiring dengan peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika. Akan tetapi, diperkirakan ketersediaan sumber daya alam tidak dapat memenuhi

kebutuhan permintaan yang semakin bertambah meskipun dengan adanya teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan berdampak pada peningkatan harga komoditas sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk mengurangi penggunaan sumber daya, meningkatkan *reuse*, *recycle*, dan mencari alternatif sumber daya pengganti.

Teknologi

Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetika, Kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, wearable devices, otomatisasi dan robotik serta artificial intelligence. Rockefeller Foundation and Global Business Network (RF and GBN, 2010) menjelaskan bahwa tantangan utama bukan hanya tentang pengembangan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan penyediaan akses teknologi yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia seperti pada pendidikan, Kesehatan, energi, dan pengaturan terhadap teknologi yang berpotensi mengancam keamanan negara seperti terorisme global atau perdagangan ilegal.

Perubahan iklim

Seiring waktu, tantangan pemanasan global semakin meningkat, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka Panjang. Perubahan iklim berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Jika tidak ada upaya untuk menurunkan emisi, maka rata-rata suhu global diprediksi meningkat 3 – 3,5 derajat celsius pada akhir abad ini. Pemanasan global berpotensi memicu bahaya perubahan iklim yang cepat dan parah, mengganggu *supply chains*, hingga menenggelamkan beberapa kota besar di seluruh dunia. Selain itu, keanekaragaman hayati akan terus berkurang dan mengancam kestabilan pasokan pangan dan sumber daya air. Upaya mengatasi perubahan iklim harus dilakukan oleh seluruh pihak, khususnya merubah gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan, dapat melakukan beberapa upaya, khususnya terhadap sektor industri yang menyumbang emisi besar seperti melalui penyusunan regulasi terkait perubahan iklim serta pemberian insentif dan disinsentif.

Perubahan Geopolitik

Perubahan geopolitik akan terus berlanjut di masa mendatang seiring dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

Retief, dkk. (2016) ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian oleh pemerintah atau pemangku kepentingan mengenai *Environmental Assesment* (penilaian lingkungan) dengan adanya Megatrend, yaitu 1) Menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian; 2) Meningkatkan efisiensi; 3) Menghadapi perubahan yang signifikan; 4) Menghadapi komunikasi dan partisipasi. Peningkatan populasi yang cepat, urbanisasi, dan inovasi teknologi yang terus berkembang mempengaruhi kompleksitas pengambilan keputusan dan juga ketidakpastian akan perubahan. IPPC (dalam Retief, dkk., 2016) memperkirakan bahwa masa depan menjadi lebih tidak stabil dan sulit untuk diprediksi, salah satu kasus yang telah terjadi adalah pada perubahan iklim.

Selain itu, dengan adanya perubahan demografi, urbanisasi, dan inovasi teknologi yang membuat lebih banyak populasi penduduk maka diperlukan efisiensi dalam meningkatkan informasi sehingga mempersingkat waktu pengambilan keputusan. Khususnya dalam hal regulasi di pemerintahan. IAIA dan IEA (dalam Retief, dkk., 2016) menjelaskan empat prinsip pendukung efisiensi, yaitu relevan, hemat biaya, fokus, dan kredibel. Berbagai analisis megatren menunjukkan bahwa di masa depan, permintaan terhadap sumber daya akan terus meningkat dan menyebabkan kelangkaan terjadi. Peraturan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi isu utama yang diperhatikan.

Di masa depan, perkembangan yang pesat pada teknologi komunikasi dan urbanisasi sekali lagi menjadi aspek penting. Hal ini karena setiap orang akan lebih mudah terhubung antara satu sama lain melalui teknologi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan lebih mudah diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah memberikan informasi dan meminta masukan dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil nantinya sesuai dengan kebutuhan di dalam Masyarakat.

Perkembangan Megatren dan dampak yang ditimbulkan di masa mendatang, harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Kendati demikian, pemahaman terhadap megatren dapat berbeda, bergantung pada sudut pandang pemangku kepentingan ataupun Masyarakat. Sebagai contoh, pertumbuhan populasi global, dapat dilihat sebagai faktor pendorong atau sebagai faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi. Contoh lainnya adalah urbanisasi yang dapat dianggap sebagai faktor yang membebani keberlangsungan ekosistem atau sebagai peluang untuk menerapkan gaya hidup yang lebih hemat sumber daya. Dengan memahami hal tersebut maka

peluang yang mungkin muncul akibat megatren dapat ditangkap dan dimanfaatkan serta permasalahan yang mungkin terjadi dapat diantisipasi.

II.16 Telaahan Dokumen Nasional, Provinsi dan Sektoral

II.16.1 Telaahan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di selatan Pulau Kalimantan yang berbasis sinergi ruang antar Kabupaten/Kota dalam hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif dengan menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi :

1. perwujudan restorasi ekologis untuk membantu pemulihan ekosistem alam yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur;
2. pengembangan pariwisata berbasis alam untuk melindungi dan mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup;
3. perwujudan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk mengembangkan kawasan perekonomian wilayah;
4. penguatan hilirisasi industri dan konektivitas penyediaan rantai pasokan agar dapat bersaing dengan nasional dan global;
5. peningkatan konektivitas multimoda pantai timur untuk mewujudkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang saling bersinergi;
6. perwujudan penataan ruang hijau metropolitan di Banjarbakula pada sektor infrastruktur dan ruang kawasan; dan
7. pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi yang Selaras dengan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Strategi atas kebijakan perwujudan restorasi ekologis untuk membantu pemulihan ekosistem alam yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur meliputi:

1. melakukan penghijauan dan penanaman kembali di dataran tinggi;
2. melakukan konservasi lahan gambut;
3. melakukan penanaman kembali bakau;
4. membangun kembali fungsi lahan bekas tambang;
5. meningkatkan perlindungan kawasan konservasi;

6. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi/lindung khususnya kawasan hutan lindung, cagar alam, suaka alam, KKP, KKP3K dan suaka margasatwa;
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi baik yang dikelola oleh daerah maupun pusat dengan melibatkan masyarakat;
8. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;
9. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem bersama *stakeholder* dan masyarakat; dan
10. memberdayakan budaya lokal seperti di sekitar sungai, kawasan meratus dan wilayah pesisir

Strategi atas kebijakan pengembangan pariwisata berbasis alam untuk melindungi dan mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup meliputi:

1. menjaga dan melestarikan *geosites* di kawasan Pegunungan Meratus; dan
2. mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan pantai.

Strategi atas kebijakan perwujudan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk mengembangkan kawasan perekonomian wilayah meliputi:

1. memperluas produktivitas padi lahan basah yang tinggi;
2. mengembangkan industri minyak sawit;
3. menetapkan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi laut;
4. mendorong pelaksanaan kebijakan yang berbasis masyarakat;
5. mengembangkan kawasan pertanian dan kawasan perikanan berkelanjutan; dan
6. mengembangkan kawasan perikanan dengan prinsip berkelanjutan di daerah konservasi.

Strategi atas kebijakan penguatan hilirisasi industri dan konektivitas penyediaan rantai pasokan agar dapat bersaing dengan nasional dan global meliputi:

1. menyelenggarakan hilirisasi batu bara;
2. mengembangkan produk turunan karet;
3. menciptakan nilai tambah pada industri pengolahan kelapa sawit;
4. menyelenggarakan hilirisasi minapolitan kelautan;
5. menetapkan kawasan industri berbasis sumber daya alam;
6. mengembangkan industri padat modal dan teknologi tinggi;
7. mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi wilayah;

8. membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan peruntukan industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi; dan
9. mengurangi dampak negatif kegiatan industri.

Strategi atas kebijakan pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan meliputi:

1. mengembangkan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian; dan
2. mengembangkan kawasan perikanan budidaya dan tangkap

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi

SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

Sistem pusat permukiman meliputi: a. PKN; b. PKW; dan c. PKL.

PKN terdapat di Kawasan Perkotaan Banjarmasin - Banjarbaru - Banjar - Barito Kuala - Tanah Laut yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, industri, industri kelautan, pertanian dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar kawasan.

PKW meliputi:

1. Marabahan di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian dan industri pengolahan, pusat pemerintahan kabupaten, Pusat pengembangan perkantoran kabupaten, pusat pengembangan transportasi, pusat kesehatan, pusat pengembangan perdagangan, perbankan dan jasa regional, pusat pendidikan, pusat permukiman perkotaan, dan pusat pariwisata sungai;
2. Martapura di Kabupaten Banjar yang memiliki fungsi sebagai pusat pariwisata dan kegiatan keagamaan skala regional dan nasional, serta pusat perdagangan dan jasa skala internasional;
3. Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan komersial, industri pengolahan, wisata budaya, pertanian dan perikanan; dan
4. Kotabaru di Kabupaten Kotabaru yang memiliki fungsi sebagai pusat ekowisata dan jasa lingkungan.

PKL meliputi:

1. Tanjung di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan publik dan perdagangan jasa;

2. Simpang Empat - Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan transportasi regional dan internasional, pusat kawasan industri, pusat pemerintahan dan pelayanan publik skala regional, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan perdagangan dan jasa;
3. **KANDANGAN** di **KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN** yang memiliki fungsi sebagai **KAWASAN JASA PEMERINTAHAN UMUM SKALA REGIONAL, JASA PARIWISATA SKALA REGIONAL, dan PERMUKIMAN**; d. Rantau di Kabupaten Tapin yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian dan pariwisata;
4. Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa;
5. Paringin di Kabupaten Balangan yang memiliki fungsi sebagai pusat ekowisata, wisata budaya skala regional;
6. Tabukan di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki fungsi sebagai pusat perikanan, pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengembangan industri skala besar, pusat pengumpul komoditas hasil pertanian dan perkebunan, pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya, pusat pelayanan lintas kecamatan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, dan pusat pengembangan pelabuhan sungai;
7. Simpang Empat di Kabupaten Banjar yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, permukiman, jasa pariwisata, pertanian dan perikanan;
8. Kelua di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa;
9. Jaro di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian, perikanan dan pariwisata;
10. Mantewe di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan publik, pusat layanan koleksi serta distribusi barang dan jasa; dan
11. Sengayam di Kabupaten Kotabaru yang memiliki fungsi sebagai pusat permukiman, pertanian, dan pusat transportasi

II.16.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Wilayah Nasional, ruang wilayah Provinsi dan Ruang Wilayah Kabupaten, yang mencakup kawasan-kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu, baik direncanakan maupun tidak, yang

menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang wilayah berisikan tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan umum kebijaksanaan operasional dan kebijaksanaan pemantapan kawasan lindung, kawasan budidaya dan strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah. Untuk memperjelas dalam pemahaman Rencana Tata Ruang Wilayah ini dijabarkan beberapa hal mengenai tata ruang, penataan ruang, ruang lingkup penataan ruang, tujuan penataan ruang dan asas penataan ruang.

Menyadari pentingnya pengembangan dan pengendalian wilayah dalam skala yang lebih luas maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dapat mengakomodir berbagai macam kepentingan dan peraturan seperti :

- Distribusi kewenangan mengatur pada level yang setingkat, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sering kurang sinkron, sehingga kebijaksanaan pengembangan wilayah Kabupaten dirasakan kurang jelas;
- Perkembangan kawasan budidaya yang tidak seimbang akan mengakibatkan luas areal pertanian dan lahan potensial untuk tanaman pangan cenderung menurun, bertambah luasnya kawasan budidaya yang tidak tertata dengan baik serta tidak sinkron dengan produk tata ruang yang ada di atasnya.

Secara regional, Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki peran sebagai berikut :

- Sebagai daerah penunjang Provinsi Kalimantan Selatan yang mendukung kategori Pariwisata khususnya cagar alam dan cagar budaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus mengoptimalkan kinerja ekonomi wilayah yang telah berkembang.
- Mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi perkotaan secara efektif yaitu peningkatan fungsi terminal angkutan kota, pengembangan dermaga di daerah Nagara, serta mendukung pembangunan Jalan Lingkar luar Kandangan.
- Pengembangan wilayah penyangga antara lain pengembangan kegiatan pertanian, pengembangan pusat-pusat sub-regional dan pusat-pusat pelayanan masyarakat.
- Memiliki potensi yang kuat terhadap pengembangan daerah kawasan rawa khususnya pengembangan ekonomi kawasan rawa yang merupakan

suatu simbol tersendiri dari program pemerintah daerah, serta dituangkan ke dalam visi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tersusun sebelumnya, telah direncanakan setiap fungsi kawasan, peruntukan lahan, struktur pelayanan, pengembangan kategori-kategori, dan pengembangan aktivitas lainnya, tetapi karena kedinamisan aktivitas/kegiatan penduduk maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan potensi dan permasalahan yang ada. Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah ini juga sangat perlu dilakukan mengingat adanya perkembangan kawasan pertumbuhan baru pada beberapa lokasi di kabupaten ini, yaitu :

- Perkembangan kawasan di daerah Nagara yang akan dikembangkan menjadi salah satu kutub pertumbuhan skala regional dengan kegiatan basis kategori industri dan jasa serta pertanian lahan basah serta lahan rawa
- Perkembangan kawasan Kandangan Baru yang segera di programkan oleh pemerintah daerah yang akan mengembangkan pola ruang kota modern yang sesuai dengan prinsip kota
- Perkembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai suatu sub kawasan khususnya Kandangan sebagai kota transit, posisinya yang berada pada jalur trans Kalimantan.
- Perkembangan kawasan wisata yang menjadi salah satu andalan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya kawasan daerah Loksado yang menjadi *ecotourism* Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap menyambut Program Pemerintah Pusat yaitu *visit year*.
- Perkembangan kawasan kategori industri yang menciptakan sentra-sentra industri sesuai dengan komoditas unggulan yang ada di masing-masing wilayah.

Selain faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah serta sejalan dengan kekritisian dan peran serta masyarakat maka kebutuhan masyarakat pada Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu pengembangan wilayah-wilayah strategis dan potensi seperti wilayah di sepanjang jalan akses utama antara kawasan Terminal Baru dengan jalan lingkar dan kawasan Nagara sebagai area pengembangan industri dan pengembangan ekonomi rawa, perkembangan kawasan Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkembang ke arah selatan.

Misi Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat diakomodir sesuai dengan prospek dan arah pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga 2032, yakni :

“Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bertujuan Untuk Mewujudkan Keterpaduan Struktur Ruang Dan Pola Ruang Yang Efisien Dan Berkelanjutan Menuju Kabupaten Agropolitan“

Perumusan masalah yang terdapat pada kawasan sehubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

Adanya perubahan struktur wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya berkembangnya beberapa *growth pole* baru di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan mempengaruhi pola dan skenario perkembangan kabupaten Hulu Sungai Selatan di masa mendatang

- Adanya perkembangan kebijakan baru yang perlu dikaji ulang untuk memperoleh penanganan secara optimal, meliputi :
- Pengembangan Kawasan Agropolitan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Pengembangan koridor jalan akses utama Trans Kalimantan dan akses jalan lingkar sehingga melewati jalur Kandangan Baru yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Pengembangan kawasan ibukota kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Pengembangan masing – masing wilayah IKK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan perkembangan masing – masing kategori ekonomi unggulan di dalamnya.
- Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Loksado.
- Pengembangan kawasan perdesaan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

5. Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :
6. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
7. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
8. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
9. Pengembangan agropolitan;
10. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
11. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
12. Penanganan kawasan rawan bencana;
13. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
14. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun strategi penataan ruang diuraikan sebagai berikut :

Strategi pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang terdiri atas:

1. memperkuat fungsi dan peran PKL dan PKLp;
2. memperkuat fungsi dan peran PPK;
3. memperkuat fungsi dan peran PPL; dan
4. menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata terdiri atas:

1. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan sistem pelayanan jaringan prasarana transportasi darat;
2. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan air baku;
3. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
4. meningkatkan pengelolaan air limbah;
5. meningkatkan pengelolaan sistem drainase;
6. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku; dan
7. mengembangkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.

Strategi pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung terdiri atas:

1. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam, berdasarkan kesesuaian lahan;
2. mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas unggulan;
3. mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah;
4. mengelola pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan; dan
5. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan sentra-sentra produksi, kawasan industri, dan kawasan perdagangan dan jasa.

Strategi pengembangan agropolitan terdiri atas:

1. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, perikanan yang berkelanjutan;
2. mengembangkan kegiatan industri pengolahan perdagangan dan jasa;
3. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan; dan
4. mempertahankan luasan lahan pertanian.

Strategi pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan terdiri atas:

1. mengembangkan kawasan wisata; dan
2. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata.

Strategi pemantapan dan pelestarian kawasan lindung terdiri atas:

1. menetapkan kawasan lindung;
2. mempertahankan luasan kawasan hutan lindung dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pada kawasan lindung;
3. mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan dan kelestarian keanekaragaman hayati ;
4. merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi fungsi lindung;
5. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung;
6. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian kawasan lindung;
7. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan formal otonom dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar;
8. melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal dalam kawasan lindung; dan

9. menyelenggarakan upaya terpadu dalam mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah terhadap kawasan lindung.

Strategi penanganan kawasan rawan bencana terdiri atas:

1. mengidentifikasi kawasan rawan bencana;
2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor;
3. mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan kritis rawan bencana tanah longsor;
4. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam pengendalian banjir; dan
5. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Strategi untuk pengembangan dan pengendalian kawasan strategis terdiri atas:

1. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
2. mengembangkan kawasan strategis provinsi yang berada di kabupaten;
3. mengembangkan dan meningkatkan kawasan strategis kabupaten; dan
4. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:

1. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
2. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
3. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
4. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/militer.

II.16.3Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045

A. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Tahun 2025-2029
Berdasarkan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-
2045

PROYEKSI KEBUTUHAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL DAN PERMUKIMAN

Rumah sebagai tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang mendasar (*basic needs*). Meningkatnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan rumah atau tempat tinggal. Perhitungan proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk, dengan asumsi satu rumah tangga terdiri dari empat jiwa. Pada tahun 2025, kebutuhan rumah atau tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar 60.382 unit, dan meningkat menjadi 63.627 unit di tahun 2030.

Tabel II-164 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Rata-rata Jumlah Keluarga	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	4	5.699	6.006
2	Kecamatan Loksado		2.223	2.342
3	Kecamatan Telaga Langsat		2.732	2.879
4	Kecamatan Angkinang		4.947	5.213
5	Kecamatan Kandangan		12.899	13.592
6	Kecamatan Sungai Raya		4.819	5.078
7	Kecamatan Simpur		4.048	4.266
8	Kecamatan Kalumpang		1.731	1.824
9	Kecamatan Daha Selatan		10.733	11.310
10	Kecamatan Daha Barat		2.123	2.237
11	Kecamatan Daha Utara		8.428	8.881
HULU SUNGAI SELATAN			60.382	63.627

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Backlog rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah. Secara umum backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat, dengan kata lain backlog rumah adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani. Backlog rumah dapat diukur dari dari sisi kepenghunian atau yang disebut dengan backlog hunian. Backlog hunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal, yakni satu rumah tangga atau keluarga menghuni satu rumah. Rumus yang digunakan untuk menghitung backlog hunian adalah:

Backlog Hunian = Jumlah Keluarga - Jumlah Rumah

Tabel II-165 Proyeksi Backlog Hunian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (2023)	Proyeksi Backlog Hunian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	7.313	-1.614	-1.307
2	Kecamatan Loksado	2.629	-406	-287
3	Kecamatan Telaga Langsat	3.238	-506	-359
4	Kecamatan Angkinang	6.610	-1.663	-1.397
5	Kecamatan Kandangan	9.722	3.177	3.870
6	Kecamatan Sungai Raya	7.392	-2.573	-2.314
7	Kecamatan Simpur	5.782	-1.734	-1.516
8	Kecamatan Kalumpang	2.100	-369	-276
9	Kecamatan Daha Selatan	11.598	-865	-288
10	Kecamatan Daha Barat	1.972	151	265
11	Kecamatan Daha Utara	8.722	-294	159
HULU SUNGAI SELATAN		67.078	-6.696	-3.451

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Secara umum, proyeksi backlog di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan besaran backlog negatif, dimana besaran backlog negatif tersebut mengindikasikan bahwa sudah terpenuhi kebutuhan rumahnya (surplus) hingga tahun 2030. Secara lebih rinci, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki besaran backlog positif, di mana besaran backlog positif tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangan rumah di kecamatan tersebut. Adapun beberapa kecamatan yang memiliki backlog positif hingga tahun 2030 adalah Kecamatan Kandangan dan Daha Barat memiliki backlog perumahan sejak awal tahun perencanaan, dengan jumlah kekurangan rumah sebesar 3.177 unit di tahun 2025 dan meningkat menjadi 3.870 unit di tahun 2030 untuk Kecamatan Kandangan. Sementara itu, kecamatan lainnya tercatat memiliki besaran backlog negatif dengan besaran jumlah rumah surplus tertinggi berada di Kecamatan Sungai Raya, yakni mencapai 2.314 di tahun 2030.

PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH

Sumber air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersumber dari air permukaan maupun air tanah yang diakses melalui sistem perpipaan maupun bukan perpipaan. Selain itu, sebagian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah terlayani oleh Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sebagian lainnya tidak mengakses layanan perusahaan milik daerah tersebut. Total kebutuhan air bersih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan air domestik/rumah tangga, kebutuhan air bersih untuk fungsi komersial, kebutuhan air bersih untuk fasilitas sosial (termasuk dengan hidran umum), serta proyeksi kebocoran/kehilangan air (*Non Revenue Water/NRW*).

**Tabel II-166 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2025-2030**

No	Kecamatan	Standar	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Domestik/Rumah Tangga Kabupaten Hulu Sungai Selatan (liter/hari)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	120 Liter/ Orang/ Hari	2.735.640	2.882.640
2	Kecamatan Loksado		1.066.920	1.124.280
3	Kecamatan Telaga Langsat		1.311.600	1.382.040
4	Kecamatan Angkinang		2.374.440	2.502.120
5	Kecamatan Kandangan		6.191.280	6.524.040
6	Kecamatan Sungai Raya		2.313.240	2.437.440
7	Kecamatan Simpur		1.943.160	2.047.560
8	Kecamatan Kalumpang		831.000	875.640
9	Kecamatan Daha Selatan		5.151.840	5.428.680
10	Kecamatan Daha Barat		1.019.040	1.073.760
11	Kecamatan Daha Utara		4.045.320	4.262.760
HULU SUNGAI SELATAN			28.983.360	30.540.960

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Secara umum, kebutuhan air bersih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebesar 233.153 jiwa, dan dalam kurun waktu perencanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan akan menjadi 241.528 jiwa di tahun 2025 dan akan terus meningkat. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, kebutuhan air bersih untuk penduduk (domestik/rumah tangga) Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan dengan standar kebutuhan air sebesar 120 liter/orang/hari. Berdasarkan standar tersebut, pada tahun 2025, kebutuhan air bersih domestik/rumah tangga di kabupaten ini diperkirakan sebesar 28.983.360 liter per hari dan meningkat menjadi 30.540.960 liter per hari pada tahun 2030.

Selanjutnya, proyeksi kebutuhan air bersih untuk keperluan komersial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihitung dengan mengasumsikan sebesar 20 persen dari kebutuhan domestik. Kebutuhan air bersih untuk keperluan komersial di kabupaten ini juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat di setiap periode perencanaan. Pada tahun 2025, kebutuhan air bersih untuk keperluan komersial diperkirakan sebesar 5.796.672 liter/hari dan meningkat menjadi 6.108.192 liter/hari pada tahun 2030.

Tabel II-167 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Keperluan Komersil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Standar	Proyeksi Keperluan Komersial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (liter/hari)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	20 % Dari Kebutuhan Domestik	547.128	576.528
2	Kecamatan Loksado		213.384	224.856
3	Kecamatan Telaga Langsat		262.320	276.408
4	Kecamatan Angkinang		474.888	500.424
5	Kecamatan Kandangan		1.238.256	1.304.808
6	Kecamatan Sungai Raya		462.648	487.488
7	Kecamatan Simpur		388.632	409.512
8	Kecamatan Kalumpang		166.200	175.128
9	Kecamatan Daha Selatan		1.030.368	1.085.736
10	Kecamatan Daha Barat		203.808	214.752
11	Kecamatan Daha Utara		809.064	852.552
HULU SUNGAI SELATAN			5.796.672	6.108.192

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Berbeda dengan proyeksi kebutuhan air bersih untuk keperluan komersial yang diasumsikan 20 persen dari kebutuhan domestik, proyeksi kebutuhan air bersih untuk keperluan fasilitas sosial (termasuk hidran umum) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihitung dengan mengasumsikan sebesar 10 persen dari kebutuhan domestik. Pada tahun 2025, kebutuhan air bersih untuk keperluan fasilitas sosial di kabupaten ini tercatat sebesar 2.896.336 liter/hari, dan meningkat menjadi 3.054.096 liter/hari di tahun 2030.

Tabel II-168 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Keperluan Fasilitas Sosial (termasuk Hidran Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Standar	Proyeksi Keperluan Fasilitas Sosial (termasuk Hidran Umum) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (liter/hari)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	10 % Dari Kebutuhan Domestik	273.564	288.264
2	Kecamatan Loksado		106.692	112.428
3	Kecamatan Telaga Langsat		131.160	138.204
4	Kecamatan Angkinang		237.444	250.212
5	Kecamatan Kandangan		619.128	652.404
6	Kecamatan Sungai Raya		231.324	243.744
7	Kecamatan Simpur		194.316	204.756
8	Kecamatan Kalumpang		83.100	87.564
9	Kecamatan Daha Selatan		515.184	542.868
10	Kecamatan Daha Barat		101.904	107.376
11	Kecamatan Daha Utara		404.532	426.276
HULU SUNGAI SELATAN			2.898.336	3.054.096

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Selanjutnya, untuk menghitung total kebutuhan air juga diperhitungkan kebocoran atau kehilangan air. Kehilangan air merupakan suatu permasalahan dalam pengelolaan pelayanan air bersih, yang berakibat pada berkurangnya kuantitas dan tekanan air, turunnya kualitas air minum, dan beberapa kerugian lainnya. Kehilangan air tersebut dapat disebabkan dari adanya kebocoran pipa, kerusakan aksesoris, dan lain sebagainya. Proyeksi kebocoran/kehilangan air di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihitung dengan mengasumsikan sebesar 20 persen dari kebutuhan domestik. Besaran kebocoran/kehilangan air di kabupaten ini diproyeksikan sebesar 7.535.674 liter/hari di tahun 2025 dan meningkat menjadi 7.940.650 liter/hari di tahun 2030.

Tabel II-169 Proyeksi Kebocoran/Kehilangan Air (Non Revenue Water/NRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Standar	Proyeksi Kebocoran/Kehilangan Air (NRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (liter/hari)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	20 % dari Total Kebutuhan Domestik dan Non-Domestik	711.276	749.501
2	Kecamatan Loksado		277.397	292.305
3	Kecamatan Telaga Langsat		341.002	359.328
4	Kecamatan Angkinang		617.361	650.539
5	Kecamatan Kandangan		1.609.734	1.696.243
6	Kecamatan Sungai Raya		601.427	633.749
7	Kecamatan Simpur		505.208	532.359
8	Kecamatan Kalumpang		216.063	227.675
9	Kecamatan Daha Selatan		1.339.476	1.411.461
10	Kecamatan Daha Barat		264.936	279.174
11	Kecamatan Daha Utara		1.051.792	1.108.317
HULU SUNGAI SELATAN			7.535.674	7.940.650

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Berdasarkan hasil penjumlahan kebutuhan air domestik/rumah tangga, kebutuhan air bersih untuk fungsi komersial, kebutuhan air bersih untuk fasilitas sosial (termasuk dengan hidran umum), serta proyeksi kebocoran/kehilangan air (*Non Revenue Water/NRW*), maka didapatkan total kebutuhan air bersih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan besaran 45.214.042 liter/hari di tahun 2025 dan meningkat menjadi 47.643.898 liter/hari di tahun 2030.

**Tabel II-170 Proyeksi Total Kebutuhan Air
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030**

No	Kecamatan	Proyeksi Total Kebutuhan Air di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (liter/hari)	
		2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	4.267.658	4.497.007
2	Kecamatan Loksado	1.664.383	1.753.829
3	Kecamatan Telaga Langsat	2.046.015	2.155.970
4	Kecamatan Angkinang	3.704.167	3.903.233
5	Kecamatan Kandangan	9.658.404	10.177.458
6	Kecamatan Sungai Raya	3.608.564	3.802.492
7	Kecamatan Simpur	3.031.248	3.194.151
8	Kecamatan Kalumpang	1.296.380	1.366.049
9	Kecamatan Daha Selatan	8.036.858	8.468.768
10	Kecamatan Daha Barat	1.589.614	1.675.042
11	Kecamatan Daha Utara	6.310.752	6.649.899
HULU SUNGAI SELATAN		45.214.042	47.643.898

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Berdasarkan hasil diskusi terfokus dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyatakan bahwa saat ini terjadi konflik kepentingan air bersih di sumbernya, di mana sumber air yang ada saat ini digunakan bersama untuk irigasi dan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, baik yang dikelola oleh PDAM maupun pengguna air bersih lainnya (seperti desa). Berdasarkan informasi tersebut, maka untuk mengantisipasi krisis air bersih untuk masyarakat, maka perlu menjaga dan melestarikan sumber air yang sudah ada, melakukan efisiensi dalam penggunaan air, dan/atau mencari alternatif sumber air yang baru.

PROYEKSI KEBUTUHAN LISTRIK

Total kebutuhan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan listrik domestik dan non domestik. Secara umum, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kebutuhan listrik di kabupaten ini juga akan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kebutuhan listrik domestik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan dengan standar kebutuhan listrik sebesar 225 VA/orang.

Tabel II-171 Proyeksi Kebutuhan Listrik Domestik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Standar	Proyeksi Kebutuhan Listrik Domestik (VA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	225 VA/	5.129.396	5.405.056

No	Kecamatan	Standar	Proyeksi Kebutuhan Listrik Domestik (VA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
			2025	2030
2	Kecamatan Loksado	orang	2.000.460	2.107.967
3	Kecamatan Telaga Langsat		2.459.152	2.591.310
4	Kecamatan Angkinang		4.452.123	4.691.386
5	Kecamatan Kandangan		11.608.659	12.232.522
6	Kecamatan Sungai Raya		4.337.216	4.570.303
7	Kecamatan Simpur		3.643.327	3.839.124
8	Kecamatan Kalumpang		1.558.150	1.641.886
9	Kecamatan Daha Selatan		9.659.685	10.178.807
10	Kecamatan Daha Barat		1.910.594	2.013.271
11	Kecamatan Daha Utara		7.585.038	7.992.667
HULU SUNGAI SELATAN			54.343.800	57.264.300

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Berdasarkan standar tersebut, pada tahun 2025 kebutuhan listrik di kabupaten ini diperkirakan sebesar 54.343.800 VA dan meningkat menjadi 57.264.300 VA di tahun 2030.

**Tabel II-172 Proyeksi Kebutuhan Listrik Non Domestik
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030**

No	Kecamatan	Standar	Proyeksi Kebutuhan Listrik Non Domestik (VA)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	20 % dari Kebutuhan Domestik	1.025.879	1.081.011
2	Kecamatan Loksado		400.092	421.593
3	Kecamatan Telaga Langsat		491.830	518.262
4	Kecamatan Angkinang		890.425	938.277
5	Kecamatan Kandangan		2.321.732	2.446.504
6	Kecamatan Sungai Raya		867.443	914.061
7	Kecamatan Simpur		728.665	767.825
8	Kecamatan Kalumpang		311.630	328.377
9	Kecamatan Daha Selatan		1.931.937	2.035.761
10	Kecamatan Daha Barat		382.119	402.654
11	Kecamatan Daha Utara		1.517.008	1.598.533
HULU SUNGAI SELATAN			10.868.760	11.452.860

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Proyeksi kebutuhan listrik non domestik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihitung dengan mengasumsikan sebesar 20 persen dari kebutuhan domestik. Kebutuhan listrik untuk keperluan non domestik di kabupaten ini juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat di setiap periode perencanaan. Pada tahun 2025, kebutuhan listrik untuk keperluan non domestik diperkirakan sebesar 10.868.760 VA dan meningkat menjadi 11.452.860 VA di tahun 2030. Berdasarkan hasil penjumlahan kebutuhan air domestik dan non domestik, maka didapatkan total kebutuhan listrik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan besaran 65.212.560 VA di tahun 2025 dan meningkat menjadi 68.717.160 VA di tahun 2030.

**Tabel II-173 Proyeksi Total Kebutuhan Listrik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2025-2045**

No	Kecamatan	Proyeksi Total Kebutuhan Listrik (VA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
		2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	6.155.276	6.486.068
2	Kecamatan Loksado	2.400.552	2.529.560
3	Kecamatan Telaga Langsat	2.950.983	3.109.572
4	Kecamatan Angkinang	5.342.548	5.629.663
5	Kecamatan Kandangan	13.930.390	14.679.026
6	Kecamatan Sungai Raya	5.204.659	5.484.364
7	Kecamatan Simpur	4.371.993	4.606.949
8	Kecamatan Kalumpang	1.869.779	1.970.264
9	Kecamatan Daha Selatan	11.591.622	12.214.569
10	Kecamatan Daha Barat	2.292.712	2.415.926
11	Kecamatan Daha Utara	9.102.046	9.591.201

No	Kecamatan	Proyeksi Total Kebutuhan Listrik (VA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
		2025	2030
HULU SUNGAI SELATAN		65.212.560	68.717.160

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

PROYEKSI KEBUTUHAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2030 disebutkan bahwa sistem pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan penanganan sampah yang ditinjau dari beberapa aspek, seperti institusi, teknik operasional, pembiayaan, pengaturan, serta peran serta masyarakat. Lingkup program peningkatan pengelolaan persampahan adalah dengan peningkatan manajemen, peningkatan pengelolaan sampah berupa 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), serta peningkatan kualitas seluruh prasarana pengelolaan sampah melalui TPS, TPST, dan TPA.

Tabel II-174 Proyeksi Timbulan Sampah Domestik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Standar	Proyeksi Timbulan Sampah Domestik Kabupaten Hulu Sungai Selatan (kg/hari)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	0,5 Kg/ Orang/ Hari	11.399	12.011
2	Kecamatan Loksado		4.445	4.684
3	Kecamatan Telaga Langsat		5.465	5.758
4	Kecamatan Angkinang		9.894	10.425
5	Kecamatan Kandungan		25.797	27.183
6	Kecamatan Sungai Raya		9.638	10.156
7	Kecamatan Simpur		8.096	8.531
8	Kecamatan Kalumpang		3.463	3.649
9	Kecamatan Daha Selatan		21.466	22.620
10	Kecamatan Daha Barat		4.246	4.474
11	Kecamatan Daha Utara		16.856	17.761
HULU SUNGAI SELATAN			120.764	127.254

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Total timbulan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihitung dengan menjumlahkan timbulan sampah domestik dan non domestik. Secara umum, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah timbulan sampah di kabupaten ini juga akan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Timbulan sampah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan dengan asumsi bahwa setiap orang menimbulkan/menghasilkan sampah sebesar 0,5 kg/orang/hari. Berdasarkan asumsi tersebut, pada tahun 2025 besaran timbulan sampah domestik di kabupaten ini diperkirakan sebesar 120.764 kg/hari dan meningkat menjadi 127.254 kg/hari di tahun 2030. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan/atau penetapan kebijakan oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengatur sistem jaringan persampahan dan pengembangan fasilitas persampahan wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel II-175 Proyeksi Timbulan Sampah Non Domestik
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030**

No	Kecamatan	Asumsi	Proyeksi Timbulan Sampah Non Domestik Kabupaten Hulu Sungai Selatan (kg/hari)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	25 % Dari Timbulan Sampah Domestik	2.850	3.003
2	Kecamatan Loksado		1.111	1.171
3	Kecamatan Telaga Langsat		1.366	1.440
4	Kecamatan Angkinang		2.473	2.606
5	Kecamatan Kandangan		6.449	6.796
6	Kecamatan Sungai Raya		2.410	2.539
7	Kecamatan Simpur		2.024	2.133
8	Kecamatan Kalumpang		866	912
9	Kecamatan Daha Selatan		5.366	5.655
10	Kecamatan Daha Barat		1.061	1.118
11	Kecamatan Daha Utara		4.214	4.440
HULU SUNGAI SELATAN			30.191	31.814

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Proyeksi timbulan sampah non domestik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihitung dengan mengasumsikan sebesar 25 persen dari timbulan sampah domestik. Sampah non domestik ini terdiri dari sampah pasar dan pertokoan, sampah jalan, sampah fasilitas umu/sosial (pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan sebagainya), serta sampah kawasan industri (pabrik, pergudangan, dan sebagainya). Berdasarkan hasil perhitungannya, timbulan sampah non domestik di kabupaten ini juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat di setiap periode perencanaan. Pada tahun 2025, timbulan sampah non domestik diperkirakan sebesar 30.191 kg/hari dan meningkat menjadi 31.814 kg/hari di tahun 2030. Berdasarkan hasil penjumlahan kebutuhan air domestik dan non domestik, maka didapatkan total timbulan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan besaran 150.995 kg/hari atau setara dengan 150 ton/hari di tahun 2025 dan meningkat menjadi 159.068 kg/hari atau setara dengan 159 ton/hari di tahun 2030.

**Tabel II-176 Proyeksi Total Timbulan Sampah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2025-2030**

No	Kecamatan	Total Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (kg/hari)	
		2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	14.248	15.014
2	Kecamatan Loksado	5.557	5.855
3	Kecamatan Telaga Langsat	6.831	7.198
4	Kecamatan Angkinang	12.367	13.032
5	Kecamatan Kandangan	32.246	33.979
6	Kecamatan Sungai Raya	12.048	12.695
7	Kecamatan Simpur	10.120	10.664
8	Kecamatan Kalumpang	4.328	4.561
9	Kecamatan Daha Selatan	26.832	28.274
10	Kecamatan Daha Barat	5.307	5.592
11	Kecamatan Daha Utara	21.070	22.202
HULU SUNGAI SELATAN		150.955	159.068

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Selanjutnya, berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengolahan Sampah Perkotaan, disebutkan bahwa terdapat beberapa standar prasarana persampahan. Merujuk pada pedoman tersebut dapat diketahui bahwa setiap rumah harus menyediakan tong sampah masing-masing secara pribadi sebagai sarana penampung sampah rumah tangganya.

Sementara itu, sarana pelengkap lainnya seperti gerobak sampah, bak sampah kecil dan besar, mobil sampah, bak sampah akhir, serta tempat daur ulang sampah dihitung dengan didasarkan pada penduduk pendukung dan lingkup prasarana. Berdasarkan Laporan Fakta Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2042 disebutkan bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki sembilan unit truk sampah, lima unit truk kontainer, 38 unit kontainer, 156 unit gerobak sampah, 48 unit TPS, dua unit TPA, dua unit bajaj, 11 unit pick up mobil, tiga unit mesin penggali, dan satu unit mesin pemuat.

Tabel II-177 Proyeksi Kebutuhan Gerobak Sampah/Bak Sampah Kecil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Gerobak Sampah/Bak Sampah Kecil Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	2500	9	10
2	Kecamatan Loksado		4	4
3	Kecamatan Telaga Langsat		4	5
4	Kecamatan Angkinang		8	8
5	Kecamatan Kandangan		21	22
6	Kecamatan Sungai Raya		8	8
7	Kecamatan Simpur		6	7
8	Kecamatan Kalumpang		3	3
9	Kecamatan Daha Selatan		17	18
10	Kecamatan Daha Barat		3	4
11	Kecamatan Daha Utara		13	14
HULU SUNGAI SELATAN			97	102

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Pertama, pada lingkup Rukun Warga (RW) perlu disediakan sarana pelengkap berupa gerobak sampah dan bak sampah kecil dengan status TPS, dengan intensitas pengangkutan gerobak sampah setidaknya dilakukan tiga kali dalam satu minggu. Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian masyarakat minimal sejauh 30 meter. Sementara itu, jumlah pendukung minimal bagi sarana pelengkap ini adalah 2.500 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka kebutuhan gerobak sampah dan bak sampah kecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini diproyeksikan sebesar 97 unit di tahun 2025 dan meningkat menjadi 102 unit di tahun 2045.

Kedua, pada lingkup kelurahan perlu disediakan sarana pelengkap berupa gerobak sampah dan bak sampah besar dengan status TPS, dengan intensitas pengangkutan gerobak sampah setidaknya dilakukan tiga kali dalam satu minggu. Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian masyarakat minimal sejauh 30 meter. Jumlah pendukung minimal bagi sarana pelengkap ini adalah 30.000 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka kebutuhan gerobak sampah dan bak sampah besar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini

diperkirakan sebesar 11 unit di tahun 2025 dan diproyeksikan sama sampai tahun 2030.

Tabel II-178 Proyeksi Kebutuhan Bak Sampah Besar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Gerobak Sampah/Bak Sampah Besar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	30000	1	1
2	Kecamatan Loksado		1	1
3	Kecamatan Telaga Langsat		1	1
4	Kecamatan Angkinang		1	1
5	Kecamatan Kandungan		2	2
6	Kecamatan Sungai Raya		1	1
7	Kecamatan Simpur		1	1
8	Kecamatan Kalumpang		1	1
9	Kecamatan Daha Selatan		1	2
10	Kecamatan Daha Barat		1	1
11	Kecamatan Daha Utara		1	1
HULU SUNGAI SELATAN			11	11

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Ketiga, pada lingkup kecamatan perlu disediakan sarana pelengkap berupa mobil sampah dan bak sampah besar dengan status TPS/TPA lokal, dengan intensitas pengangkutan mobil sampah setidaknya dilakukan tiga kali dalam satu minggu. Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian masyarakat minimal sejauh 30 meter. Sementara itu, jumlah pendukung minimal bagi sarana pelengkap ini adalah 120.000 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka kebutuhan mobil sampah dan bak sampah besar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini diproyeksikan sebanyak 2 unit hingga tahun 2030.

Terakhir, pada lingkup kabupaten perlu disediakan sarana pelengkap berupa bak sampah akhir dan tempat daur ulang sampah dengan status TPA. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri saat ini telah memiliki satu unit TPA, yakni TPA Malutu di Kecamatan Sungai Raya. Kondisi TPA Malutu saat ini berdasarkan Analisa yang ada memiliki umur pakai hingga 5 tahun dari tahun 2020, sehingga diproyeksikan pada tahun 2025 TPA ini bisa dikatakan *overload* dan memerlukan perluasan sebelum hal tersebut terjadi.

Tabel II-179 Proyeksi Kebutuhan Mobil Sampah/Bak Sampah Besar Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	Kabupaten	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Mobil Sampah/Bak Sampah Besar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	HULU SUNGAI SELATAN	120000	2	2

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dilakukan oleh Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan, Data diolah.

Selanjutnya, konsep pengurangan sampah dari sumbernya juga sudah mulai digalakkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini terlihat dari adanya fasilitasi TPS 3R yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. TPS 3R yang ada masih berfungsi namun belum optimal, karena masih memerlukan sarana dan prasarana pendukung seperti mesin pemilah sampah, alat pemusnah sampah skala rumah tangga, fasilitas pengumpulan sampah domestik, serta adanya keterbatasan sumberdaya manusia.

Ke depannya, selain TPS 3R, pengelolaan sampah dilakukan dengan mengelola sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh TPST meliputi (1) luas TPST, lebih besar dari 20.000 m2, (2) penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan/atau di TPA; (3) jarak TPST ke permukiman terdekat minimal 500 meter; (4) pengolahan sampah di TPST dapat mengadopsi teknologi; serta (5) fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU

Pedoman SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan menyebutkan bahwa ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai air sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. RTH terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dimana besarnya paling sedikit sebesar 30 persen dari luas wilayah kota atau kasawan perkotaan, dengan detail RTH publik paling sedikit 20 persen dan RTH privat paling sedikit 10 persen.

Tabel II-180 Proyeksi Kebutuhan Taman RT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Taman RT Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	250	91	96
2	Kecamatan Loksado		36	37
3	Kecamatan Telaga Langsat		44	46
4	Kecamatan Angkinang		79	83
5	Kecamatan Kandangan		206	217
6	Kecamatan Sungai Raya		77	81
7	Kecamatan Simpur		65	68
8	Kecamatan Kalumpang		28	29
9	Kecamatan Daha Selatan		172	181
10	Kecamatan Daha Barat		34	36
11	Kecamatan Daha Utara		135	142
HULU SUNGAI SELATAN			966	1018

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dan Data Proyeksi Kebutuhan diolah Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan

Merujuk pada pedoman SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan menyebutkan bahwa penggolongan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan perumahan didasarkan pada kapasitas pelayanannya terhadap sejumlah penduduk. Setiap unit RT atau kawasan berpenduduk 250 jiwa dibutuhkan minimal satu taman yang dapat memberikan kesegaran pada kota, baik udara segar maupun cahaya matahari, sekaligus tempat bermain anak-anak. Taman RT ini berlokasi di tengah kelompok tetangga. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan taman RT di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan membutuhkan 966 unit taman RT dan meningkat menjadi 1.018 unit taman RT di tahun 2030.

Tabel II-181 Proyeksi Kebutuhan Taman Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Taman Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	2500	9	10
2	Kecamatan Loksado		4	4
3	Kecamatan Telaga Langsat		4	5
4	Kecamatan Angkinang		8	8
5	Kecamatan Kandangan		21	22
6	Kecamatan Sungai Raya		8	8
7	Kecamatan Simpur		6	7
8	Kecamatan Kalumpang		3	3
9	Kecamatan Daha Selatan		17	18
10	Kecamatan Daha Barat		3	4
11	Kecamatan Daha Utara		13	14
HULU SUNGAI SELATAN			97	102

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dan Data Proyeksi Kebutuhan diolah Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan

Selanjutnya, di setiap unit RW atau kawasan berpenduduk 2.500 jiwa, diperlukan sekurang-kurangnya satu daerah terbuka berupa taman lingkungan, di samping daerah-daerah terbuka yang telah ada pada tiap kelompok 250 jiwa, yang berfungsi sebagai taman tempat bermain untuk anak-anak, dan lapangan olahraga untuk kegiatan olahraga. Lokasi taman lingkungan ini berada di pusat kegiatan lingkungan. Berdasarkan hasil

perhitungan proyeksi kebutuhan taman lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan membutuhkan 97 unit taman lingkungan dan meningkat menjadi 102 unit taman lingkungan di tahun 2030.

**Tabel II-182 Proyeksi Kebutuhan Taman dan Lapangan Olahraga
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030**

No	Kecamatan	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Taman dan Lapangan Olahraga Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	30000	1	1
2	Kecamatan Loksado		0	0
3	Kecamatan Telaga Langsat		0	0
4	Kecamatan Angkinang		1	1
5	Kecamatan Kandangan		2	2
6	Kecamatan Sungai Raya		1	1
7	Kecamatan Simpur		1	1
8	Kecamatan Kalumpang		0	0
9	Kecamatan Daha Selatan		1	2
10	Kecamatan Daha Barat		0	0
11	Kecamatan Daha Utara		1	1
HULU SUNGAI SELATAN			8	8

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dan Data Proyeksi Kebutuhan diolah Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan

Di setiap unit kelurahan atau kawasan berpenduduk 30.000 jiwa, diperlukan sekurang-kurangnya satu taman dan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka, seperti pertandingan olahraga, upacara, serta kegiatan lainnya. Lokasi taman dan lapangan olahraga ini sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan taman lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan membutuhkan 8 unit taman lingkungan dan diproyeksikan tetap sama hingga tahun 2030.

**Tabel II-183 Proyeksi Kebutuhan Taman Pemakaman Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030**

No	Kabupaten	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Taman Pemakaman Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	120000	2	2

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dan Data Proyeksi Kebutuhan diolah Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan

Terakhir, di tingkat kecamatan atau kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, diperlukan sekurang-kurangnya satu ruang terbuka yang berfungsi sebagai kuburan/pemakaman umum. Lokasi dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut perlu mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani. Sementara luasannya tergantung dari sistem penyempurnaan yang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, di mana acuan perhitungan luasannya berdasarkan angka kematian setempat dan/atau sistem penyempurnaan. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan TPU di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selama rentang Tahun 2025 hingga 2030 Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan membutuhkan 2 unit TPU.

PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PERNIAGAAN

Pedoman SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan menyebutkan bahwa sarana perdagangan dan niaga tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan sarana ini selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Selanjutnya, penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

**Tabel II-184 Proyeksi Kebutuhan Toko/Warung
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030**

No	Kecamatan	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Toko/Warung Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	250	91	96
2	Kecamatan Loksado		36	37
3	Kecamatan Telaga Langsat		44	46
4	Kecamatan Angkinang		79	83
5	Kecamatan Kandangan		206	217
6	Kecamatan Sungai Raya		77	81
7	Kecamatan Simpur		65	68
8	Kecamatan Kalumpang		28	29
9	Kecamatan Daha Selatan		172	181
10	Kecamatan Daha Barat		34	36
11	Kecamatan Daha Utara		135	142
HULU SUNGAI SELATAN			966	1018

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dan Data Proyeksi Kebutuhan diolah Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan

Merujuk pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, toko/warung didefinisikan sebagai sarana perdagangan yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, yang berlokasi di tengah kelompok tentangga dan dapat merupakan bagian dari sarana lain. Kebutuhan toko/warung didasarkan pada pedoman SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, di mana jumlah penduduk pendukung untuk fasilitas perdagangan ini adalah 250 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan toko/warung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan membutuhkan 966 unit toko/warung dan meningkat menjadi 1.018 unit toko/warung di tahun 2030.

**Tabel II-185 Proyeksi Kebutuhan Pertokoan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030**

No	Kecamatan	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Pertokoan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	6000	4	4

No	Kecamatan	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Pertokoan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
2	Kecamatan Loksado		1	2
3	Kecamatan Telaga Langsat		2	2
4	Kecamatan Angkinang		3	3
5	Kecamatan Kandangan		9	9
6	Kecamatan Sungai Raya		3	3
7	Kecamatan Simpur		3	3
8	Kecamatan Kalumpang		1	1
9	Kecamatan Daha Selatan		7	8
10	Kecamatan Daha Barat		1	1
11	Kecamatan Daha Utara		6	6
HULU SUNGAI SELATAN			40	42

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dan Data Proyeksi Kebutuhan diolah Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan

Pertokoan didefinisikan sebagai sarana perdagangan yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotokopi, dan sebagainya yang berlokasi di pusat kegiatan sub kegiatan dengan KDB sebesar 40 persen. Kebutuhan pertokoan didasarkan pada pedoman SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, di mana jumlah penduduk pendukung untuk fasilitas perdagangan ini adalah 6.000 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan pertokoan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan membutuhkan 40 unit pertokoan dan meningkat menjadi 42 unit pertokoan di tahun 2030.

Tabel II-186 Proyeksi Kebutuhan Pusat Pertokoan dan Pasar Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Pusat Pertokoan dan Pasar Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kecamatan Padang Batung	30.000	1	1
2	Kecamatan Loksado		0	0
3	Kecamatan Telaga Langsat		0	0
4	Kecamatan Angkinang		1	1
5	Kecamatan Kandangan		2	2
6	Kecamatan Sungai Raya		1	1
7	Kecamatan Simpur		1	1
8	Kecamatan Kalumpang		0	0
9	Kecamatan Daha Selatan		1	2
10	Kecamatan Daha Barat		0	0
11	Kecamatan Daha Utara		1	1
HULU SUNGAI SELATAN			8	8

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dan Data Proyeksi Kebutuhan diolah Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan

Selanjutnya, pusat pertokoan dan/atau pasar lingkungan merupakan sarana perdagangan yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, pakaian, barang-barang kelontong, peralatan sekolah, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel, dan sebagainya, yang lokasinya dapat dijangkau dengan kendaraan

umum. Kebutuhan pusat pertokoan dan pasar lingkungan didasarkan pada pedoman SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, di mana jumlah penduduk pendukung untuk fasilitas perdagangan ini adalah 30.000 jiwa atau dengan skala pelayanan unit kelurahan. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan pusat pertokoan dan pasar lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan membutuhkan 8 unit pusat pertokoan dan pasar lingkungan dan diproyeksikan sama hingga tahun 2030.

Tabel II-187 Proyeksi Kebutuhan Pusat Perbelanjaan dan Niaga Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030

No	KABUPATEN	Penduduk Pendukung	Proyeksi Kebutuhan Pusat Perbelanjaan dan Niaga Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Unit)	
			2025	2030
1	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	120.000	2	2

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan s.d Proyeksi 2035, Proyeksi 2040-2045 dan Data Proyeksi Kebutuhan diolah Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan.

Pusat perbelanjaan dan niaga merupakan sarana perdagangan yang menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektroik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan, serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil, dan lain-lain, yang berlokasi di jalan utama termasuk memiliki fasilitas parkir sesuai dengan ketentuan setempat. Kebutuhan perbelanjaan dan niaga didasarkan pada pedoman SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, di mana jumlah penduduk pendukung untuk fasilitas perdagangan ini adalah 120.000 jiwa atau dengan skala pelayanan unit kecamatan. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan perbelanjaan dan niaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tahun 2025 hingga 2030 Kabupaten Hulu Sungai Selatan diproyeksikan membutuhkan 2 unit perbelanjaan dan niaga. Salah satu contoh perbelanjaan dan niaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah kawasan Pasar Los Batu dan Pasar Nagara, dimana di kawasan tersebut terdapat pasar, toko, bank, dan kantor.

B. Visi, Misi, Tema dan Arah Kebijakan pada RPJPD 2025-2045

Pada dokumen RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045 visi pembangunan jangka panjangnya adalah :

“HULU SUNGAI SELATAN SEBAGAI SIMPUL LOGISTIK BANUA ANAM YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN DENGAN BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN”

Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki empat kata kunci utama, yakni Simpul Logistik, Maju, Berkelanjutan dan Ekonomi Kerakyatan.

Perumusan penjelasan dari visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **SIMPUL LOGISTIK** menggambarkan posisi yang strategis menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu kabupaten dengan konektivitas dan aksesibilitas yang dapat mendukung peran Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai simpul logistik khususnya di Kawasan Banua Anam.
2. **MAJU** mencerminkan harapan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi daerah yang unggul dari berbagai aspek, antara lain sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dukungan infrastruktur dan teknologi yang andal, serta tata kelola pemerintahan. Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di areal Banua Anam yang mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN)
3. **BERKELANJUTAN** memiliki makna bahwa pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Pembangunan dilakukan dengan mempertahankan kualitas hidup penduduk saat ini dan di masa datang secara berkelanjutan. Pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, dan tata kelola, secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. **EKONOMI KERAKYATAN** memiliki makna bahwa konsep ekonomi yang diujung oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah konsep ekonomi yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat terutama di sektor **PERTANIAN, UMKM/IKM dan PARIWISATA**. Harapannya adalah ketiga sektor tersebut menjadi motor utama penggerak perekonomian yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Upaya untuk mewujudkan visi “**HULU SUNGAI SELATAN SEBAGAI SIMPUL LOGISTIK BANUA ANAM YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN**”, maka ditetapkan delapan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025- 2045 sebagai berikut:

- MISI I : Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berkeadilan;**
MISI II : Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing;
MISI III : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berdampak;

- MISI IV : Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban yang Mendukung Stabilitas Daerah;**
- MISI V : Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;**
- MISI VI : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;**
- MISI VII : Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;**
- MISI VIII: Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan;**

Arah kebijakan jangka panjang daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam empat tahapan, di mana setiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Adapun pentahapan arah kebijakan diuraikan seperti berikut:

Gambar II-71 Tahapan Periodisasi Pembangunan RPJPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045



Sumber : Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045

Berdasarkan tema pembangunan pada setiap periode, dimana periode 2025-2029 merupakan memiliki tahapan tema Penguatan Ekosistem.

Selain tema terdapat arah kebijakan transformasi yang tertuang pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan harus diterjemahkan ataupun disinkronisasikan dengan arah kebijakan yang ada pada RPJMD Tahun 2025-2029 berikut merupakan Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045 :

Tabel II-188 Arah Kebijakan Transformasi RPJPD 2025-2045

No	Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
1	Sosial	Kesehatan Untuk Semua	
		1	Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat

No	Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		2	Penuntasan stunting dan percepatan pencegahan dan penanganan penyakit menular melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor
		3	Peningkatan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan
		4	Penyediaan layanan kesehatan primer dan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis
		5	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi
			Pendidikan Berkualitas yang Merata
		6	Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya
		7	Peningkatan kualitas antar satuan pendidikan dan antardaerah
		8	Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
		9	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama pertanian, pariwisata, perkebunan, industri pengolahan serta keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i>
		10	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK
			Perlindungan Sosial yang Adaptif
		11	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan pemanfaatan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
		12	Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
		13	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran
		14	Peningkatan kualitas Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta peningkatan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
		15	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
		16	Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas
		17	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dengan cakupan yang inklusif
		18	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		19	Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan
		20	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
2	Ekonomi		Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
		21	Pengembangan pusat industri di Hulu Sungai Selatan melalui hilirisasi komoditi unggulan
		22	Peningkatan hilirisasi industri strategis berbasis sektor unggulan eksisting (<i>smart agro-bioproduction</i>)
		23	Pengembangan Ekonomi berbasis keunggulan wilayah
		24	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian melalui smart farming dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani
		25	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak
		26	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani
		27	Pengembangan pariwisata unggulan berbasis alam, budaya dan ekonomi kreatif
		28	Peningkatan rantai nilai pangan domestik Hulu Sungai Selatan Selatan untuk mendukung rantai pasok pangan Kalimantan Selatan melalui skema-skema kerja sama regional
		29	Peningkatan pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to-work
		30	Peningkatan penempatan tenaga kerja
		31	Penerapan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan
		32	Pembangunan perkotaan serta perdesaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan
		33	Peningkatan upaya industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
		34	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, dengan meningkatkan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
		35	Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan
		36	Peningkatan produktivitas BUMD
		37	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

No	Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		38	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.
		39	Pemberian kemudahan perizinan pada sektor industri hijau dan proses penyediaan perumahan
		Penerapan Ekonomi Hijau	
		40	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian dan kompleksitas industri
		41	Peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung sistem ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah dan pengembalian material ke dalam siklus produksi
		Transformasi Digital	
		42	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok serta kawasan pariwisata Geopark Meratus
		43	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis
		44	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
		45	Pembangunan dan pengembangan Hulu Sungai Selatan sebagai simpul logistik yang menggerakkan aktivitas ekonomi yang maju dan berdaya saing
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
		46	Pembangunan perkotaan serta perdesaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan
		47	Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian perdesaan
		48	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk wilayah metropolitan dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
		49	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar desa berbasis karakteristik wilayah serta konektivitas dengan pusat-pusat kegiatan
3	Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	
		50	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah
		51	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		52	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat
		53	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
		54	Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
		55	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
		56	Pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	57	Penguatan integritas partai politik
		Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh	
		58	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.
		Stabilitas Ekonomi Makro	
		59	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		60	Peningkatan pengendalian inflasi daerah.
		Kepemimpinan Daerah di Tingkat Nasional	
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	61	Peningkatan daya saing daerah
		Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	
		62	Peningkatan pendidikan yang berbasis agama
		63	Peningkatan kerukunan antar etnis dan antar umat beragama
		64	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga- lembaga adat dan hak ulayat masyarakat
		65	Peningkatan perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan cagar budaya
		66	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
		67	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	
		68	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		69	Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
		70	Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
		71	Peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
		Lingkungan Hidup Berkualitas	
		72	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya kondisi kritis, serta penghambatan laju deforestasi
		73	Peningkatan rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang
		74	Peningkatan upaya menjaga dan melestarikan alam dan geosites di kawasan Pegunungan Meratus
		75	Peningkatan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal

No	Transformasi/Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		76	Peningkatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan gambut serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>)
		77	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
		78	Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir untuk melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan serta sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (melalui daur ulang) guna mendorong ekonomi sirkular
		Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	
		79	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
		80	Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.
		81	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
		82	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
		83	Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan
		84	Peningkatan pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan
		85	Pembangunan irigasi baru terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya
		86	Mendorong pemanfaatan penggunaan energi terbarukan sebagai pasokan lokal sesuai dengan kewenangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
		87	Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim
		88	Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan tanah longsor
		89	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, respons terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas dan adaptasi masyarakat
		90	Pengembangan area yang didedikasikan sebagai <i>retarding basin</i>
		91	Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai sebagai alur pelayaran.
6	Implementasi Transformasi	Implementasi Transformasi	
		92	Penyusunan dan penetapan RDTR Kecamatan bagi yang belum memiliki RDTR
		93	Koordinasi pelaksanaan reforma agraria
		94	Pembangunan serta peningkatan konektivitas antar kawasan yang menjangkau seluruh wilayah
		95	Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi
		96	Peningkatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
		97	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
		98	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
		99	Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk semua kawasan.
		100	Peningkatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
		101	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
		102	Penguatan peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional.
		103	Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
		104	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan
		105	Peningkatan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD
		106	Pengembangan jaringan informasi Geospasial Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan berkualitas, mendorong percepatan kebijakan Satu Peta dan Kebijakan Satu Data
		107	Pengembangan pembiayaan inovatif

Sumber : Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045

II.16.4Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Telaah Kegiatan Prioritas Utama RPJMN yang sesuai dengan potensi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel II-189 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

Nomor pada RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1
6	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Prioritas Nasional 2
7	Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	
8	Pengembangan Pangan Hewani	

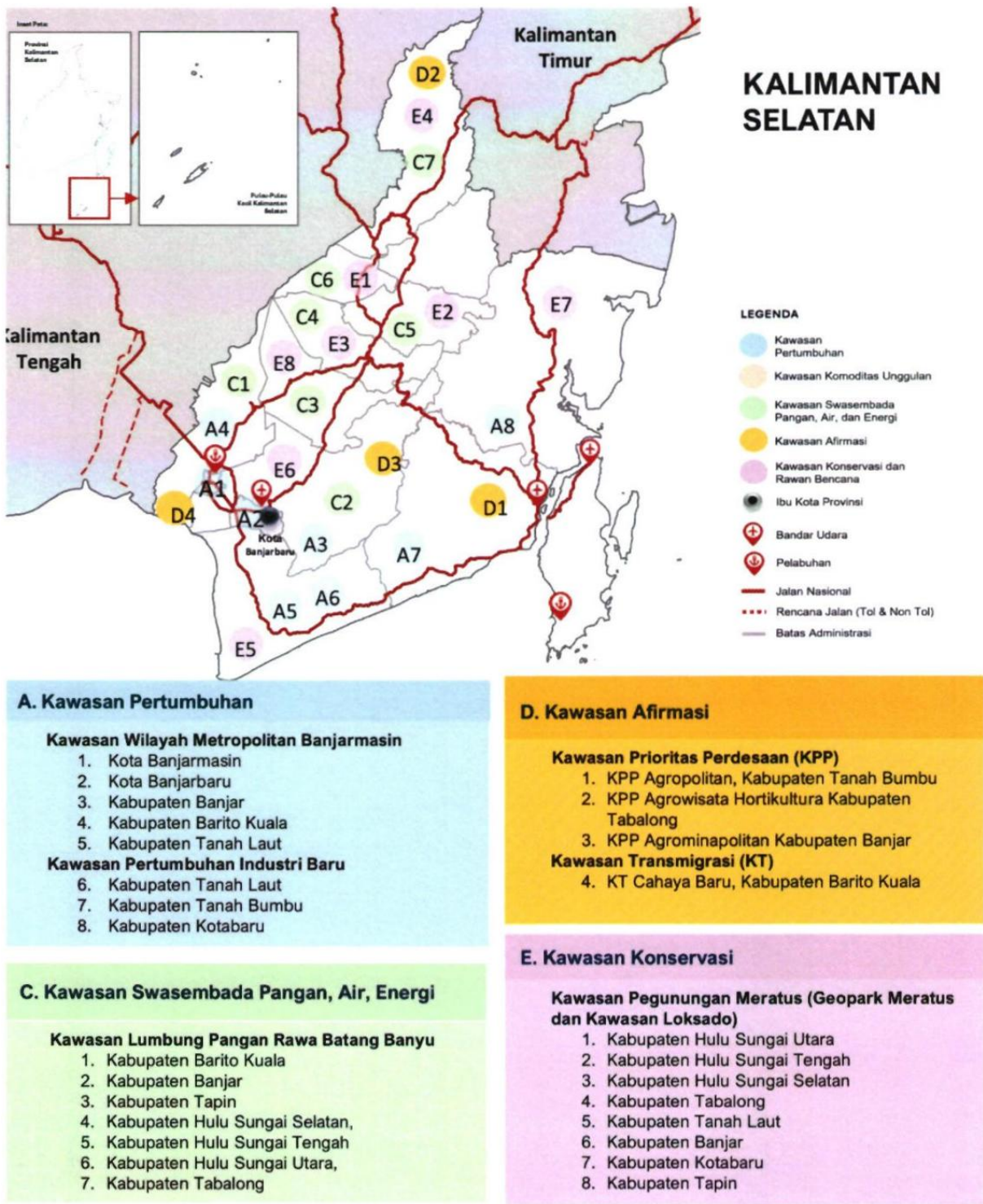
Nomor pada RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
9	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	
10	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	
14	Konservasi Sumber Daya Air	
15	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	
16	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	
18	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	
19	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Straegis Lainnya	
20	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	
22	Peningkatan Pengelolaan kualitas air sungai dan Danau	
23	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	
24	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	
25	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	
28	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Prioritas Nasional 3
33	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	
34	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	
35	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4
36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	
37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	
38	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	
40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	
42	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	
43	Pencegahan dan Penurunan Stunting	
44	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	
45	Penuntasan TBC	
46	Pemberian makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita	
47	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	
49	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	
50	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan dan Daerah Sulit Akses	
51	Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	
59	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Prioritas Nasional 5
70	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 6
71	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	
72	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	
74	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	
75	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	
76	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	
77	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Prioritas Nasional 7
78	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	
79	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	
80	Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak	
81	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Prioritas Nasional 8
82	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	

Sumber : Perpres RI Nomor 12 tentang RPJMN 2025-2029

Isu dan Potensi Wilayah Kalimantan pada RPJMN

Highlight Indikasi Intervensi Provinsi Kalimantan Selatan spesifik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar II-72 Highlight Intervensi Kalimantan Selatan dalam RPJMN 2025-2029



Sumber : Perpres RI Nomor 12 tentang RPJMN 2025-2029

Tabel II-190 Highlight Indikasi Intervensi RPJMN 2025-2029 di Provinsi Kalimantan Selatan spesifik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
C4	Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu C4 : Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Perwujudan swasembaga sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui : • Pengembangan korporasi petani,nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dengan output : sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara • Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output : kawasan karet • Penguatan pascapanen pangan nabati, dengan output: sarana pascapananen tanaman perkebunan • Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output : benih ternak unggul • Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output : internensi cetak sawah di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tabalong
E3	Kawasan Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado): E3 : Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengembangan ekowisata kelas dunia di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial melalui : • Pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja • Perlindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya

Sumber : Perpres RI Nomor 12 tentang RPJMN 2025-2029

II.16.5Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 adalah: KALSEL BEKERJA (BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN

Pokok-pokok pernyataan Visi RPJMD Kalimantan Selatan memiliki makna sebagai berikut:

- BEKERJA; Ikhtiar melakukan sesuatu yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya.
- BERKELANJUTAN; 1). melanjutkan pembangunan periode sebelumnya; dan 2). pembangunan yang seimbang antara sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.
- BERBUDAYA; masyarakat yang memiliki warisan budaya, norma, dan nilai-nilai yang membentuk identitas dan memiliki pikiran dan akal yang maju.
- RELIGI; masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada adanya Tuhan dan memiliki nilai moral serta etika.
- SEJAHTERA; kebutuhan jasmaniah, rohani, dan rasa aman yang terpenuhi bagi masyarakat.
- GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN; pintu keluar masuk untuk distribusi barang dan jasa keseluruh Kalimantan, mulai dari pusat produksi, pengolahan, pergudangan, dan pengiriman ke konsumen,

Dimana Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 meliputi :

- Misi I : Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
- Misi II : Pembangunan Infrastruktur yang Handal
- Misi III : Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata dan Syariah
- Misi IV : Penguatan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim
- Misi V : Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah & Cepat

Telaah Rencana Program Strategis pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 yang berada di Klaster Banua Anam

Tabel II-191 Program Strategis Kawasan Banua Anam di RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Nama Program Strategis	Lokasi	Nilai Investasi	Status	Nilai Strategis
PENGEMBANGAN KLASTER BANUA ANAM				
Pengembangan bendungan Tapin (Pengembangan Daerah Irigasi Tapin)	Tapin	± 156 Milliar	On Going	- o Mengairi irigasi seluas 5.472 Hektare di Kabupaten Tapin. - o Penyediaan layanan air baku dengan kapasitas ±500 liter/detik. - o Mengurangi debit banjir 107 m3/detik. - o Potensi energi listrik (PLTA) sebesar 3,3 MW. - Potensi wisata alam.
Pembangunan Bendungan Pancur Hanau	Hulu Sungai Tengah	± 1,492 Triliun	On Going	- o Suplai irigasi pertanian 15.000 Ha. - o Sebagai pengendali daya rusak air (banjir). - o Penyediaan listrik (PLTA Mikro Hydro). - o Sumber air baku untuk air bersih dan air minum 500 liter/detik. - o Budidaya perikanan/perikanan air danau. - Obyek Wisata
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Banua Anam				- o Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana air minum Klaster Banua Anam. - o Menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan mencegah pencemaran air baku. - o Mendukung pencapaian akses air minum layak dan aman pada lingkup Klaster Banua Anam. - o Menjamin Pemerataan pelayanan akses air minum untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS ANTAR KLASTER				
Pembangunan Jalan Lintas Tengah	Klaster Banjarbakula – Klaster Banua Anam	± 1,76 Triliun	Tahap Perencanaan	- o Merupakan jalan alternatif diluar jalan utama (Jalan Nasional Ahmad Yani) dengan mengoptimalkan jalan-jalan daerah eksisting. - o Membuka daerah terisolir guna menunjang pengembangan wilayah secara merata. - o Menampung pertumbuhan lalu lintas pada daerah yang mulai meningkat pertumbuhan ekonomi, khususnya kawasan pertanian dan objek wisata. - o Mengatasi kepadatan atau kemacetan lalu lintas pada Jalan Nasional Ahmad Yani.

Nama Program Strategis	Lokasi	Nilai Investasi	Status	Nilai Strategis
Pembangunan Jalan Lintas Barat	Pengembangan Konektivitas Antar Klaster	± 10 Triliun	On Going	- o Alternatif jalan baru untuk mengurangi kemacetan pada jalan nasional eksisting (Jalan Ahmad Yani). - o Menghubungkan pusat - pusat kegiatan dan pusat pengembangan kawasan strategis (PKN dan KSN Banjarbakula - KSP Rawa Batang Banyu - PKW Amuntai - Perkotaan Tanjung - IKN). - o Mendukung pengembangan KSP Rawa Batang Banyu. - o Mendorong pertumbuhan pada sepanjang koridor Jalan Lintas Barat.
Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung - Banjarmasin	Klaster Banua Anam – Klaster Banjarbakula	± 24,7 Triliun	Dalam Tahap Perencanaan	- o Pendukung sistem logistik barang antar wilayah di Pulau Kalimantan dan IKN. - o Menyediakan alternatif pelayanan transportasi penumpang dan interkoneksi antar simpul transportasi yang lebih cepat, nyaman dan dapat diandalkan. - o Menyediakan akses pasar bagi potensi ekonomi utama Kalimantan Selatan (Menghubungkan lokasi sumber daya alam dan kawasan produksi dengan pelabuhan terdekat untuk dipasarkan). - o Memberikan dukungan bagi pelaksanaan rencana pengembangan ekonomi dan wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. - o Menyediakan pemerataan aksesibilitas transportasi ke semua wilayah dalam rangka menciptakan stabilitasi ekonomi, sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan nasional
Pembangunan Jalan Halong - Paser	Klaster Banua Anam – IKN Provinsi Kalimantan Timur	± 1,3 Triliun	Dalam Tahap Perencanaan	- o Menyediakan jalan alternatif pelayanan transporasi penumpang dan barang antar klaster yakni Klaster Banua Anam dengan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. - o Membuka daerah yang terisolir untuk pengembangan perekonomian terkhusus pada sektor perdagangan dan sektor pariwisata dalam rangka - o peningkatan pendapatan daerah - o Provinsi Kalimantan Selatan.

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

II.16.6Telaahan Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen sebagai bahan pertimbangan penyusunan RPJMD. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Di dalam RIPJPID Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikembangkan 5 (lima) produk unggulan daerah, yaitu dodol, ekowisata, pengecoran logam, kayu manis, dan padi yang dikembangkan dengan teknik teknik pertanian apung. Permasalahan utama daerah yang diangkat adalah peningkatan kualitas

sumber daya manusia, penanganan masalah kesehatan dan mengatasi permasalahan ekonomi dengan transformasi ekonomi. Peningkatan produk unggulan daerah dan permasalahan utama daerah merupakan fokus yang akan dipecahkan pada penyusunan RIPJPID. Kedua hal tersebut dianalisis melalui kerangka ekosistem dan inovasi daerah, terdiri dari 6 elemen, yaitu: 1) Kebijakan dan infrastruktur RID; 2) Kapasitas Kelembagaan; 3) Kemitraan riset dan inovasi (RI); 4) Budaya RI; 5) Keterpaduan RID; dan 6) Perkembangan Global.

Strategi riset dan inovasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun untuk menjawab berbagai tantangan dan kesenjangan dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Strategi ini mencakup upaya untuk memperkuat kelembagaan, memperbaiki koordinasi lintas sektor, meningkatkan pemanfaatan hasil riset, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan riset dan inovasi masih menghadapi kendala seperti terbatasnya SDM peneliti, minimnya dukungan anggaran, belum optimalnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi, serta rendahnya hilirisasi produk lokal berbasis riset. Di sisi lain, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peluang besar melalui penetapan lima Produk Unggulan Daerah (PUD) dan semangat masyarakat dalam menciptakan solusi lokal. Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan diarahkan untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah. Berikut merupakan strategi-strategi pengembangan riset dan inovasi daerah di Kabupaaten Hulu Sungai Selatan :

Tabel II-192 Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan			
No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DAERAH			
1	Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Belum tersedia regulasi daerah khusus tentang pemajuan riset dan inovasi	Menyusun Peraturan Daerah tentang penguatan riset dan inovasi daerah
		Belum tersedia rencana induk dan peta jalan riset dan inovasi yang mengarahkan prioritas pembangunan daerah secara tematik dan sektoral	Menyusun dan menetapkan rencana induk serta peta jalan riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas daerah
		Belum terintegrasinya agenda riset dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	Mengintegrasikan program riset dan inovasi dalam rencana kerja perangkat daerah dan kebijakan pembangunan daerah
2	Penataan basis data riset dan inovasi	Data pelaku inovasi, UMKM, dan kegiatan riset belum terdokumentasi secara terpadu	Membangun sistem basis data riset dan inovasi daerah yang terintegrasi lintas sektor
		Belum ada sistem berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan riset dan inovasi	Menyediakan platform data terbuka dan akurat untuk mendukung perencanaan dan kolaborasi inovasi lintas pemangku kepentingan

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
3	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Minim fasilitas fisik seperti ruang pelatihan, demplot, atau laboratorium riset sederhana	Membangun fasilitas riset dasar secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah
		Keterbatasan sarana uji coba di sektor unggulan seperti pertanian, industri kecil, dan lingkungan	Mengoptimalkan fasilitas OPD dan ruang publik sebagai pusat edukasi dan uji coba teknologi tepat guna
4	Pengelolaan lokasi edukatif dan taman inovasi	Belum tersedia ruang publik edukatif yang mendukung literasi riset dan inovasi masyarakat	Mengembangkan taman inovasi, kebun edukatif, atau ruang demonstratif berbasis potensi lokal
		Potensi kawasan lokal belum dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran dan promosi inovasi daerah	Melibatkan sekolah, komunitas, dan mitra lokal dalam pengelolaan ruang edukatif daerah
5	Perlindungan dan pemanfaatan HKI daerah	Rendahnya pemahaman dan akses terhadap perlindungan kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha dan masyarakat	Memberikan layanan pendampingan dan sosialisasi HKI secara aktif di tingkat daerah
		Produk lokal belum banyak memiliki perlindungan hukum seperti merek, desain, atau indikasi geografis	Memfasilitasi pendaftaran HKI kolektif dan mendukung legalisasi IG untuk produk unggulan daerah
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI			
1	Kolaborasi riset dan inovasi lintas OPD dan pemangku kepentingan	Belum tersedia unit khusus pengelola inovasi	Mengoptimalkan peran Bappelitbangda sebagai koordinator riset lintas sektor
		Riset masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi	Mendorong kerja sama antar perangkat daerah dan mitra luar daerah untuk riset tematik
2	Penyediaan sarana pendukung sesuai kapasitas daerah	Belum tersedia fasilitas pendukung riset sederhana di sektor prioritas	Menyediakan fasilitas sederhana secara bertahap (pelatihan, rakit apung, alat peraga)
		Kegiatan pelatihan belum fokus pada inovasi praktis	Menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan daerah (pertanian, UMKM, lingkungan)
		Fasilitas OPD belum dimanfaatkan optimal	Memanfaatkan ruang OPD dan pusat layanan publik sebagai pusat pelatihan
3	Peningkatan kapasitas SDM daerah	SDM belum memiliki keterampilan riset terapan	Menyelenggarakan pelatihan inovasi berbasis kebutuhan daerah
		Keterbatasan mentor dan narasumber lokal	Membangun kemitraan pelatihan dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan teknis
4	Evaluasi dan tindak lanjut hasil riset	Hasil riset yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal	Menyusun sistem pelaporan dan evaluasi riset daerah secara rutin
		Belum tersedia sistem dokumentasi dan diseminasi hasil riset	Membangun arsip digital hasil riset yang dapat diakses publik dan OPD
PENINGKATAN KEMITRAAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
1	Penguatan kerja sama lintas sektor	Kegiatan riset dan inovasi masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pihak	Membangun forum komunikasi dan koordinasi riset daerah yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat
		Belum tersedia model kemitraan berkelanjutan untuk mendukung hilirisasi hasil riset	Menyusun kesepakatan kerja sama antara pemerintah daerah dan mitra strategis dalam bentuk MoU atau PKS
2	Kolaborasi riset terapan di sektor prioritas	Keterlibatan lembaga pendidikan tinggi dan mitra penelitian dalam pengembangan sektor unggulan daerah masih terbatas	Mendorong kolaborasi riset pada sektor seperti pertanian, UMKM, logam, lingkungan, dan pangan lokal
		Agenda riset masih belum terstruktur berdasarkan kebutuhan sektor-sektor prioritas daerah	Menetapkan tema riset tahunan yang disusun secara partisipatif oleh OPD teknis, akademisi, dan pelaku lapangan
3	Diseminasi dan pemanfaatan hasil riset	Hasil riset belum terdokumentasi dan belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat	Menyediakan sistem dokumentasi dan publikasi hasil riset dalam bentuk digital dan cetak yang mudah diakses publik

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
		Masyarakat dan pelaku usaha lokal belum memanfaatkan hasil riset secara optimal	Menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat seperti pelatihan, pameran, atau sosialisasi teknologi sederhana
4	Pelibatan generasi muda dan komunitas lokal	Keterlibatan generasi muda dalam ekosistem riset dan inovasi daerah masih belum optimal	Mendorong pembentukan komunitas atau kelompok belajar inovatif yang berbasis minat generasi muda daerah
		Belum tersedia program berkelanjutan untuk mengembangkan ide dan inovasi pemuda di tingkat lokal	Menyediakan kegiatan pendampingan, pelatihan, dan kompetisi inovasi bagi generasi muda secara terbuka dan berkelanjutan
PENINGKATAN BUDAYA RISET DAN INOVASI			
1	Peningkatan literasi riset dan inovasi masyarakat	Budaya riset dan inovasi belum dikenal luas oleh masyarakat umum	Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi publik secara rutin tentang pentingnya riset dan inovasi
		Kegiatan riset masih dianggap eksklusif milik akademisi atau pemerintah	Menyusun dan menyebarluaskan materi edukatif berbasis lokal dalam berbagai format (digital, cetak, visual)
2	Ruang ekspresi dan kreativitas inovatif	Masyarakat belum memiliki ruang yang cukup untuk mengekspresikan ide atau hasil inovasinya	Menyediakan ruang komunitas kreatif, taman inovasi, atau pojok riset di sekolah, balai desa, dan ruang publik
		Hasil karya atau inovasi warga belum terdokumentasi dan belum diberi panggung publik	Menyelenggarakan pameran inovasi daerah secara berkala dan inklusif
3	Apresiasi dan penghargaan terhadap pelaku inovasi	Pelaku inovatif belum mendapat pengakuan atau penghargaan dari pemerintah daerah	Memberikan penghargaan resmi kepada inovator lokal dalam forum atau kegiatan daerah
		Tidak tersedia skema insentif atau dukungan lanjutan bagi inovasi yang telah terbukti bermanfaat	Menyediakan fasilitasi lanjutan seperti pendampingan HKI, akses pasar, pelatihan, dan replikasi inovasi
4	Pelibatan generasi muda dalam aktivitas inovatif	Keterlibatan generasi muda dalam riset dan inovasi masih terbatas dan belum terfasilitasi secara berkelanjutan	Menyelenggarakan kegiatan yang mendorong partisipasi generasi muda dalam pengembangan ide dan pemecahan masalah lokal melalui pendekatan kreatif dan kolaboratif
		Belum tersedia program inovasi yang sesuai dengan minat, potensi, dan tantangan yang dihadapi generasi muda di daerah	Menyediakan pelatihan dan wadah pengembangan inovasi yang inklusif bagi generasi muda melalui kompetisi, pelatihan, dan pendampingan secara terbuka dan merata
PENGUATAN KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
1	Regulasi dan kebijakan pendukung keterpaduan	Belum tersedia regulasi yang secara eksplisit mengatur sinergi dan integrasi pelaksanaan riset lintas sektor	Menyusun regulasi daerah yang mengatur koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan riset dan inovasi antar perangkat daerah dan mitra
		Belum terdapat mekanisme kelembagaan yang memfasilitasi integrasi program riset dengan perencanaan pembangunan daerah	Menetapkan struktur koordinasi riset yang dapat menjembatani antara perencanaan program OPD dan pelaksanaan riset lapangan
2	Penetapan prioritas riset daerah	Prioritas riset belum ditetapkan secara kolektif dan partisipatif antar pemangku kepentingan	Menyusun daftar prioritas riset daerah melalui forum lintas sektor yang melibatkan OPD teknis, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat
		Agenda riset masih ditentukan berdasarkan kebutuhan internal masing-masing sektor tanpa melihat keterkaitan antar isu	Mendorong integrasi tema riset dalam dokumen perencanaan daerah agar setiap riset dapat berkontribusi pada sasaran pembangunan strategis
3	Penguatan sistem pelaporan dan pemantauan	Belum ada sistem pelaporan terpadu untuk memantau perkembangan dan hasil pelaksanaan riset	Menyusun sistem pelaporan dan monitoring pelaksanaan riset yang berbasis data dan dapat diakses lintas sektor
		Hasil riset belum dianalisis secara sistematis untuk	Menyediakan mekanisme analisis hasil riset secara berkala dan

No	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
		dijadikan dasar rekomendasi kebijakan	menjadikan laporan riset sebagai bagian dari evaluasi kebijakan daerah
4	Pembiayaan riset yang terkoordinasi	Pendanaan riset masih bersifat sektoral dan tidak ada sinergi dalam pembiayaannya	Menetapkan alokasi pendanaan riset daerah secara terarah dan memungkinkan sharing dana antar OPD dan mitra riset
		Belum tersedia skema pendanaan kolaboratif antara pemerintah daerah dan pihak eksternal	Mendorong pembentukan skema pendanaan bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan lembaga donor yang relevan
PENYELARASAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
1	Integrasi tren global dalam agenda riset daerah	Arah riset daerah belum secara eksplisit mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global	Menyesuaikan agenda riset daerah dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, pertanian berkelanjutan, dan transformasi digital yang relevan dengan konteks lokal
		Belum tersedia mekanisme untuk mengidentifikasi dan menyerap tren riset global secara sistematis	Membentuk tim atau kelompok kerja yang bertugas memantau dan mengkaji perkembangan riset dan inovasi internasional untuk dijadikan referensi daerah
2	Akses terhadap sumber pengetahuan global	Akses terhadap jurnal, data, dan hasil riset internasional masih terbatas di kalangan OPD dan pelaku riset lokal	Memfasilitasi akses terbuka terhadap referensi internasional melalui langganan basis data, pelatihan literasi digital, atau kerja sama dengan perguruan tinggi
		Minimnya pemanfaatan hasil studi internasional dalam perumusan program inovasi	Mendorong penggunaan rujukan global dalam perencanaan program riset dan pengembangan teknologi di daerah
3	Pembelajaran dari praktik internasional	Belum dilakukan dokumentasi atau adaptasi praktik baik dari luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan daerah	Menggali praktik baik (best practices) dari negara atau daerah lain dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal melalui studi literatur dan kunjungan pembelajaran
		Tidak ada forum yang secara khusus membahas adopsi inovasi luar negeri dalam riset lokal	Menyelenggarakan forum atau seminar tematik yang membahas adaptasi teknologi dan kebijakan riset global ke dalam pendekatan pembangunan daerah
4	Kemitraan dan jejaring global	Kerja sama internasional dalam bidang riset dan inovasi masih sangat terbatas	Mendorong kemitraan riset dengan lembaga luar negeri melalui fasilitasi proposal, program magang, atau kolaborasi akademik
		Belum ada insentif atau dukungan untuk inisiatif lokal yang memiliki potensi menjalin kerja sama global	Memberikan ruang dan dukungan bagi pelaku riset yang berorientasi internasional, termasuk dalam hal pengembangan produk inovatif yang kompetitif di tingkat global

Sumber : RIPJPID Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2025

II.16.7Telaahan Rencana Pengembangan Kawasan Banua Anam

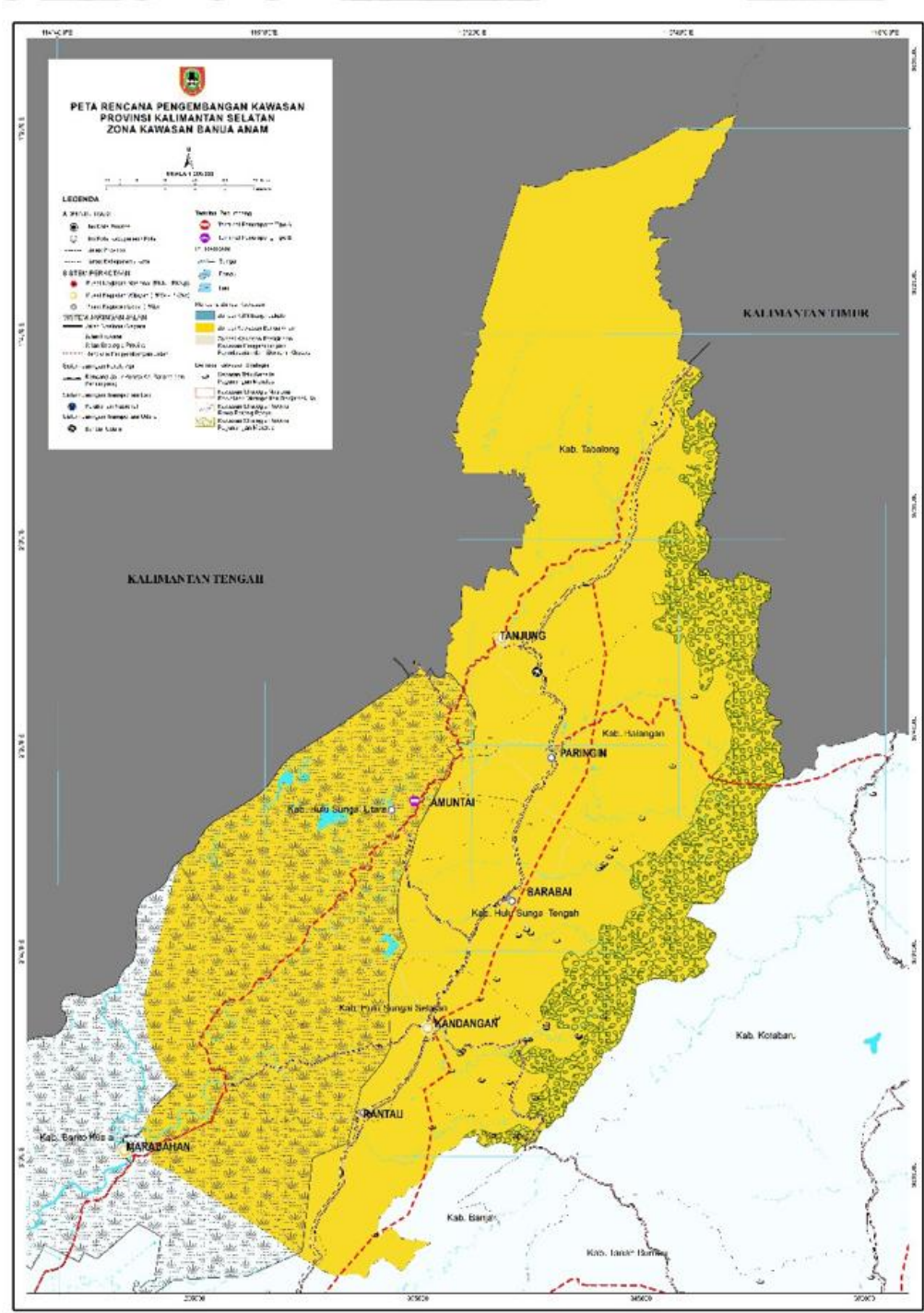
Secara umum Kawasan Banua Anam merupakan Kawasan yang memiliki Potensi pada sektor Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata dalam kaitannya untuk mendukung fungsi kawasan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dan Pusat Kegiatan, pengembangan ekonomi khususnya Hulu Sungai Selatan diarahkan sebagai berikut:

1. Pembangunan diarahkan untuk tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong:

- Pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang tinggi
 - Pencapaian pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat
 - Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
 - Penurunan jumlah penduduk miskin
 - Penguatan kemampuan fiskal daerah yang mandiri
2. Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pertanian berkelanjutan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong:
- Penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup (habitat) sumber daya pertanian.
 - Jaminan bagi perluasan lahan pertanian, peningkatan ketersediaan saprodi dan infrastruktur pendukung bagi peningkatan produktifitas
 - Jaminan ketahanan pangan dan taraf hidup petani yang layak
 - Pengolahan hasil perkebunan lebih lanjut agar tercipta nilai tambah dan jaringan pemasaran yang lebih luas dan kompetitif
 - Reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan jaminan mutu produk
 - Pengembangan sentra-sentra agribisnis dalam suatu kawasan terpadu secara luas
3. Pembangunan diarahkan untuk optimalisasi sumber daya alam dan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong:
- Pengembangan agribisnis modern berbasis SDA pertanian
 - Pengembangan pola kemitraan
 - Pengembangan pola produksi berbasis masyarakat
 - Pengembangan sumber daya energi alternatif dan energi baru terbarukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan
 - Pengembangan sumber daya air, tanah dan mitigasi bencana alam yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa hasil hutan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas
- Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional sekaligus mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, lindung, dan produksi (kayu, non kayu, jasa) untuk mencapai manfaat sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang melalui terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi, Lindung dan Konservasi

- Melakukan pembangunan hutan secara lestari melalui pendekatan forest resource management dengan memperhatikan keanekaragaman manfaat dan hasil hutan, kondisi fisik kawasan dan kepentingan para pihak
 - Revitalisasi industri kehutanan yang dikembangkan sesuai konsep pengelolaan hutan lestari dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada prinsip efisiensi, ramah lingkungan, variasi produk, nilai tambah, jaminan pasokan dan akses pasar, dan mampu bersaing secara global.
 - Pengkajian neraca sumber daya alam dan optimalisasi PDRB-termasuk
 - PDRB hijau melalui pengelolaan hutan secara lestari pada unit IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman (industri dan rakyat) serta peningkatan produk non kayu (non timber forest product) dan percepatan mekanisme perdagangan karbon
 - Pengembangan insentif dan reward bagi perusahaan dan masyarakat yang mampu mengelola hutan sesuai prinsip-prinsip kelestarian
5. Pembangunan diarahkan untuk optimalisasi sumberdaya alam dan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong :
- Pengembangan agribisnis modern berbasis SDA pertanian
 - Pengembangan pola kemitraan
 - Pengembangan pola produksi berbasis masyarakat
 - Pengembangan sumber daya energi alternatif dan energi baru terbarukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan
 - Pengembangan sumber daya mineral, batubara, air, tanah dan mitigasi bencana alam yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Gambar II-73 Delineasi Kawasan Banua Anam

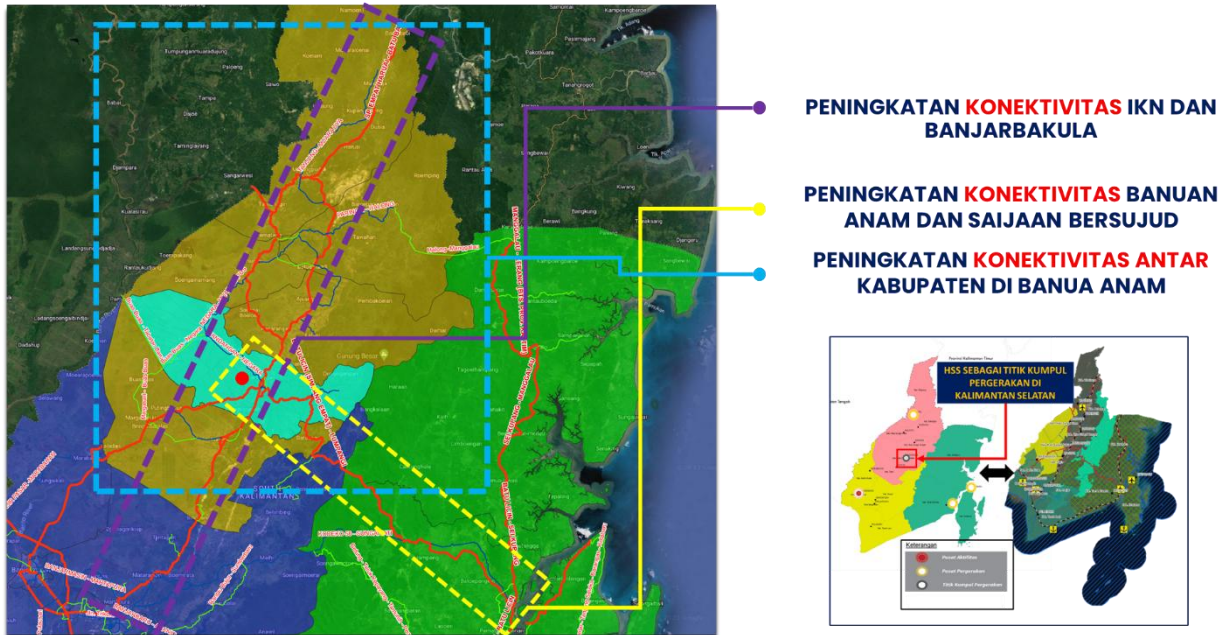


Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Wilayah Banua Anam merupakan wilayah ketahanan pangan dan kerajinan dengan potensi perkebunan terutama sayuran dan buah - buahan yang dapat menopang wilayah banjarbakula dan ibukota nusantara, potensi perikanan air tawar yang besar yang perlu dikembangkan ke dalam ikan kemasan dan albumin ikan gabus agar mampu bersaing masuk ke pasar Ibu Kota Nusantara dan masuk ke pasar Internasional. Industri Perkebunan Karet yang dihasilkan wilayah ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan di zona industri di sekitar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peran untuk menjadi penyedia untuk hal-hal tersebut seperti pangan, bahan baku albumin, serta hasil dari pertanian karet ataupun sawit. Posisi Hulu Sungai Selatan yang

berada di tengah Kawasan menjadikan posisi ini strategis dalam menyalurkan komoditas-komoditas tersebut ke wilayah Banjarbakula, Kawasan Saijaan Bersujud, Kawasan Banua Anam lainnya dan Ibu Kota Nusantara

Gambar II-74 Konektivitas Hulu Sungai Selatan dengan Kawasan Sekitar



Sumber : Bappelitbangda Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

II.16.8 Telaahan Pengembangan Kawasan Strategis Hulu Sungai Selatan

Pengembangan wilayah (*Regional Development*) adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengembangan wilayah jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, secara umum berorientasi pada meningkat atau menurunnya produktivitas wilayah dengan indikatornya adalah jumlah penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan *additional value* (nilai tambah) dari sektor industri pengolahan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosial, pengembangan wilayah berfokus terhadap tujuan agar terjadinya perubahan dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang atau maju yang terjadi secara bertahap dan diharapkan dapat membantu pengembangan daerah sekitarnya. Friedman dan Alonso (2008) berpendapat bahwa untuk jangka panjang dalam pengembangan wilayah menjadi lebih penting bagi masyarakat untuk mengenal potensi sumber daya dan potensi pengembangan lokal wilayah khususnya potensi-potensi yang dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, tidak terkecuali pengurangan angka kemiskinan, dan juga hambatan pembangunan daerah dapat teratasi dalam rangka meraih tujuan dari pembangunan. Berikut adalah 7 hal penting dalam pembangunan yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan wilayah:

- a. Sumber daya lokal : sumber daya lokal merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan karena sumber daya lokal merupakan kondisi alam yang dimiliki wilayah yang sifatnya berasal dari dalam daerah itu sendiri dan dapat memberi nilai positif bagi daerah. Selain itu sumber daya lokal juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing. Contohnya adalah keberadaan barang tambang yang melimpah, tanah yang subur, dan lain sebagainya.
- b. Pasar : Pasar merupakan tempat bagi daerah untuk memasarkan produk yang dihasilkan wilayah tersebut dalam proses produksi.
- c. Tenaga kerja : merupakan sumber daya yang bertugas sebagai pengolah sumber daya lokal yang fungsinya adalah meningkatkan nilai jual produk yang berasal dari hasil proses produksi wilayah tersebut.
- d. Investasi : dalam mengembangkan wilayah memerlukan investasi berupa penanaman modal dalam setiap kegiatannya. Semakin stabil kondisi wilayah dan meningkat atau dengan kata lain kondusif maka akan semakin besar investasi yang masuk
- e. Kemampuan pemerintah : kehadiran pemerintah dianggap penting dalam pengembangan wilayah karena pemerintah mempunyai peran sebagai pengarah, selain itu pemerintah juga sebagai katalisator pembangunan.
- f. Transportasi dan komunikasi : mengingat pentingnya wilayah satu dan wilayah lainnya untuk terhubung membuat peran transportasi dan komunikasi menjadi penting. Dengan adanya penghubung yang baik antara wilayah satu dan lainnya dapat menimbulkan terciptanya arus pergerakan barang, jasa, dan informasi dengan begitu akan memberi pengaruh juga terhadap pengembangan wilayah.
- g. Teknologi : teknologi menjadi komponen penting karena teknologi dapat membantu proses produksi di wilayah agar menghasilkan output dan kinerja yang meningkat.

Pengembangan wilayah memiliki tantangan besar di tengah kondisi dunia yang tidak menentu, beberapa tantangan dan isu itu adalah : Pertumbuhan Ekonomi Rendah, Pengangguran dan Kemiskinan, Ketimpangan Ekonomi Terburuk Ke-3 di Dunia, Disparitas Pembangunan Antar Wilayah, Fragmentasi Sosial, Deindustrialisasi, Rendahnya Kedaulatan Pangan, Farmasi, dan Energi, Rendahnya Daya Saing dan IPM, Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, serta adanya Volatilitas Global (Perubahan Iklim, Perang Rusia Ukraina, Persaingan China dan Amerika Serikat, Industry 4.0). Kondisi

Volatilitas Global secara umum terlihat dalam era VUCA. VUCA adalah singkatan dari *volatility*, *uncertainty*, *complexity*, dan *ambiguity*. Istilah VUCA di era industri 4.0 tetap berlaku pada era *society* 5.0. Kita dihadapkan pada kondisi dimana terjadi perubahan skala besar (*volatility*), kesulitan melakukan prediksi secara akurat (*uncertainty*), kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang saling terkait (*complexity*), dan ketidakjelasan suatu kejadian dengan mata rantai akibatnya (*ambiguity*) atau yang disebut sebagai kriteria VUCA. Situasi lingkungan yang hadir serba tidak pasti, fluktuatif, kompleks, sulit diprediksi dan kebenaran realitas bersifat subjektif

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari aspek geografi dan demografi adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 Km sebelah utara ibu kota Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Serta 363 Km dari Penajam Paser Utara, Kawasan Ibu kota Negara (IKN). Memiliki banyak keanekaragaman hayati yang melimpah. Tak ketinggalan pula kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang secara turun temurun dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Secara teori pengembangan wilayah dapat dibedakan berdasarkan kategori :

1. Berdasar wilayah administrasi pemerintahan, seperti Kabupaten/Kota,
2. Berdasarkan kesamaan kondisi, yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik.
3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang kira-kira sama besarnya
4. Berdasarkan wilayah perencanaan/program

Hoover dan Giarratani menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses pembangunan wilayah, yaitu:

1. Keunggulan komparatif (Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah).
2. Aglomerasi (Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial), dan
3. Biaya Transport. (Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian)

Syarat lain yang juga tidak kalah penting adalah transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan), sektor sekunder : Sektor yang mengolah bahan baku dari sektor Primer maupun Sektor sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi Sektor Bangunan, Sektor Industri Pengolahan. Sektor ketiga adalah sektor tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa).

Tabel II-193 Peranan Sektor Ekonomi PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan

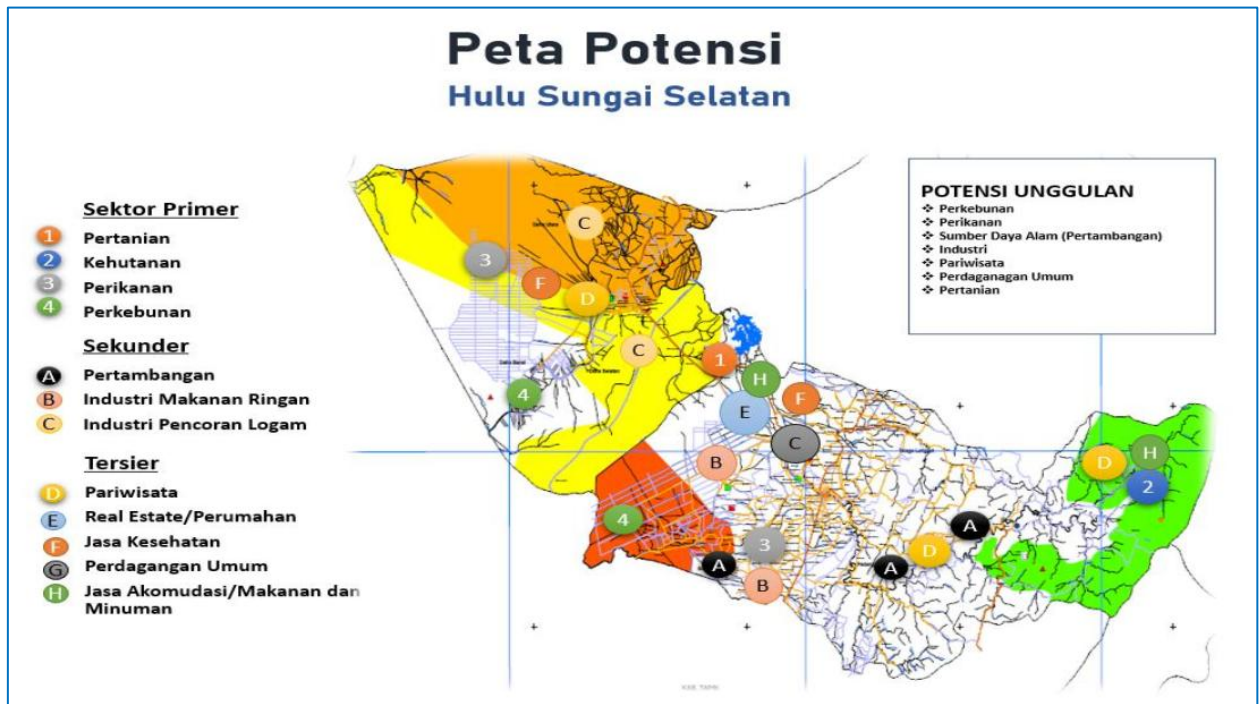
Wilayah	Primer	Sekunder	Tersier	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	41,38	20,42	38,2	100,00
Kotabaru	37,6	39,59	22,81	100,00
Banjar	31,58	17,9	50,52	100,00
Barito Kuala	27,08	29,98	42,94	100,00
Tapin	47,38	13,09	39,53	100,00
Hulu Sungai Selatan	35,06	16,43	48,51	100,00
Hulu Sungai Tengah	24,25	23,14	52,61	100,00
Hulu Sungai Utara	16,68	20,6	62,72	100,00
Tabalong	52,6	15,81	31,59	100,00
Tanah Bumbu	50,32	16,83	32,85	100,00
Balangan	72,66	6,74	20,6	100,00
Banjarmasin	2,38	29	68,62	100,00
Banjarbaru	5,76	23,34	70,9	100,00
Kalimantan Selatan	33,3	22,72	43,98	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Diolah

Terlihat dalam tabel di atas bahwa sektor sekunder (pengolahan/industri) masih rendah. Padahal di daerah maju sektor ini menjadi lebih dominan Syarat lain yang juga tidak kalah penting adalah transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan), sektor sekunder : Sektor yang mengolah bahan baku dari sektor Primer maupun Sektor sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi Sektor Bangunan, Sektor Industri Pengolahan. Sektor ketiga adalah sektor tertier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Terlihat dalam tabel di atas bahwa sektor sekunder (pengolahan/industri) masih rendah. Padahal di daerah maju sektor ini menjadi lebih dominan.

Secara sebaran ketiga sektor tersebut di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat di lihat dalam gambar peta potensi ekonomi berikut ini. Peta tersebut dapat memberikan gambaran secara umum mengenai sebaran sektor primer, sekunder dan tersier dalam struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar II-75 Peta Potensi Ekonomi Kab Hulu Sungai Selatan



Sumber : Bappelitbangda Kab.. Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, Diolah

Berdasarkan kondisi tersebut serta keberadaan Kawasan Ibu kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang berjarak sekitar 363 Km dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentu perlu penyikapan Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawasan Ibu kota Negara (IKN) disiapkan dengan luas total 256.142 Ha, areal perkantoran 56.180 Ha, serta diperkirakan penduduk yang datang termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 1,1 jt – 1,5 jt jiwa ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitar IKN. Kebijakan yang paling strategis bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Gerbang IKN dan penopang pangan. Hal ini dapat ditindak lanjuti dengan :

- Percepatan dan Optimalisasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RTRW merupakan arahan dalam memanfaatkan ruang, sedangkan RDTR merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah kota atau Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten. Urgensi penyusunan RDTR adalah sebagai alat operasionalisasi sekaligus pengendalian pemafaatan ruang. dalam implementasi rencana tata ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya operasional dan belum dapat dijadikan dasar bagi pengeluaran perizinan.

- b. Mengembangkan peluang dari keberadaan dan potensi Ruas Jalan Loksado – Tanah Bumbu, Ruas Jalan Kalumpang – Margasari – Banjarmasin, serta memperjuangkan akan adanya Ruas Jalan Daha Barat – Margasari – Banjarmasin.
- c. Alternatif kebijakan Pengembangan Wilayah di Kab HSS yang meliputi 4 Zona dengan alternatif pembagian zona adalah :
 - 1. Zona Perdagangan Umum, Industri dan Pusat Pemerintahan
 - 2. Zona Pertanian Pangan , Hortikultura, Sayuran
 - 3. Zona Pariwisata dan Perkebunan
 - 4. Zona Perikanan dan Peternakan

Pembagian Kecamatan dalam zona tersebut bisa sangat variatif namun sebagai bahan pendalaman dijadikan alternatif sebagai berikut :

- 1. Zona Satu meliputi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Selatan dan Sebagian Kecamatan Sungai Raya.
- 2. Zona Dua meliputi Kecamatan Telaga Langsat, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Simpur, Sebagian Sungai Raya, Kalumpang, Padang Batung dan daerah Daha.
- 3. Zona Tiga meliputi Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung serta sebagian Kecamatan Sungai Raya
- 4. Zona Empat meliputi Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Barat, sebagian Kandangan, Telaga Langsat dan Sungai Raya

II.17 Penetapan Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dari suatu daerah dimasa mendatang, di mana isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, serta dapat pula dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Berikut merupakan penetapan isu strategis daerah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal

Pemanfaatan potensi ekonomi lokal pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan sektor-sektor unggulan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia masih menghadapi tantangan, khususnya keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal, serta belum optimalnya keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan tuntutan pasar kerja sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja daerah.

Penguatan Inklusivitas dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif rendah, yakni berada di angka 3,38%. Namun demikian, masih terdapat kerentanan masyarakat terhadap risiko sosial-ekonomi yang dapat mendorong terjadinya kemiskinan kembali, baik akibat keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, terbatasnya infrastruktur dasar, maupun potensi guncangan ekonomi dan bencana alam. Oleh karena itu, strategi pembangunan perlu difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Risiko Bencana

Kualitas lingkungan hidup masih menghadapi tekanan akibat degradasi hutan, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta tingginya risiko bencana alam seperti banjir. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat jika tidak ditangani secara tepat. Diperlukan langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta penguatan upaya mitigasi dan adaptasi bencana.

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal efisiensi birokrasi, transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan percepatan transformasi digital menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Isu strategis rencana jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan rumusan yang didasarkan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, hasil telaah dokumen perencanaan baik di level kabupaten ini sendiri, Provinsi Kalimantan Selatan, maupun Nasional, serta hasil penelaahan isu strategis di level regional, nasional, maupun internasional. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Berikut merupakan hasil dari pemetaan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

Tabel II-0-188 Pemetaan Isu Strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Potensi Daerah	Permasalahan	ISU KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1) Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki konfigurasi spasial sumber daya alam yang memberikan peluang besar bagi pengembangan wilayah secara terencana dan berkelanjutan. Distribusi potensi wilayah mencerminkan pemanfaatan ruang yang telah terbentuk secara alami berdasarkan kemudahan aksesibilitas, karakteristik biofisik, serta dukungan infrastruktur dasar. 2) Wilayah dataran rendah seperti Daha Utara, Daha Selatan, dan Sungai Raya merupakan pusat utama kegiatan pertanian lahan basah yang didominasi oleh komoditas padi, palawija, dan hortikultura. Kawasan ini ditunjang oleh akses distribusi yang relatif baik menuju pusat-pusat permukiman dan pasar lokal. Ketersediaan jaringan irigasi serta kesesuaian agroklimat menjadikan wilayah ini sebagai basis produksi pangan strategis.	1) Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih menghadapi berbagai tantangan lintas urusan yang saling berkaitan. Pada sektor sosial, isu utama mencakup rendahnya mutu dan akses layanan pendidikan, tingginya angka stunting dan kematian ibu-bayi, serta terbatasnya layanan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Selain itu, pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga belum optimal. 2) Di sektor ekonomi, produktivitas pertanian, perikanan, dan UMKM masih rendah akibat keterbatasan infrastruktur, modal, dan pendampingan. Industri lokal belum memiliki daya saing kuat, sementara sektor pariwisata belum berkembang optimal karena minimnya sarana pendukung dan promosi. Masalah pangan juga masih terjadi, terutama dalam hal cadangan dan konsumsi pangan yang bergizi dan beragam. 3) Sektor infrastruktur dan lingkungan menghadapi tantangan berupa banyaknya kawasan rawan banjir dan longsor, rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, serta lemahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pengurangan risiko bencana juga belum sepenuhnya	1) Percepatan dan optimalisasi pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 2) Peningkatan kualitas lingkungan; 3) Pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; 4) Pengurangan risiko dan mitigasi bencana serta adaptasi perubahan iklim; 5) Pengembangan ekonomi daerah dan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat; 6) Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi; 7) Optimalisasi kualitas sumber daya manusia dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.	Perubahan iklim merupakan isu lingkungan global yang semakin mendesak untuk ditangani. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama dari sektor energi dan transportasi, telah menyebabkan kenaikan suhu bumi secara signifikan. Dampaknya meliputi mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, hingga meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dituntut untuk berperan aktif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kebijakan pengurangan emisi dan transisi energi bersih.	Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait deforestasi dan alih fungsi lahan, terutama di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Aktivitas ini umumnya dipicu oleh ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pembangunan, dan infrastruktur, yang berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi karbon, serta terjadinya bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Pemerintah telah mendorong kebijakan restorasi lahan dan perhutanan sosial sebagai bagian dari solusi berkelanjutan.	Di tingkat regional, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan menghadapi isu penurunan kualitas lingkungan, khususnya menyangkut pencemaran air sungai dan lahan kritis. Limbah domestik, pertanian, serta sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Amandit dan Nagara telah memicu penurunan kualitas air dan mengancam keberlanjutan sumber daya air bersih. Selain itu, laju degradasi lahan akibat pengelolaan lahan yang kurang ramah lingkungan turut memperparah kondisi ekosistem lokal.	1) Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal 2) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 3) Penguatan Inklusivitas dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat 4) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Risiko Bencana 5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Adaptif

Potensi Daerah	Permasalahan	ISU KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
3) Pada sektor perkebunan, Kecamatan Kalumpang, Padang Batung, dan Daha Barat menjadi zona prioritas pengembangan komoditas unggulan seperti karet, kelapa sawit, dan kelapa dalam. Kondisi topografi bergelombang ringan dan kemiringan lahan yang mendukung, serta orientasi pasar luar wilayah, menjadikan kawasan ini berperan dalam struktur ekonomi sektoral daerah.	terintegrasi dalam pembangunan daerah. 4) Dalam tata kelola pemerintahan, masih dijumpai persoalan rendahnya cakupan administrasi kependudukan, belum optimalnya pelayanan transportasi dan komunikasi, serta rendahnya kualitas pengelolaan arsip, perpustakaan, statistik, dan keamanan informasi. Digitalisasi pelayanan belum sepenuhnya berjalan baik, tercermin dari nilai SPBE yang masih rendah. 5) Dari sisi kelembagaan, tantangan terbesar meliputi lemahnya integrasi perencanaan berbasis data, kurangnya kompetensi ASN, belum optimalnya pengawasan internal, serta rendahnya efisiensi pengelolaan keuangan berbasis kinerja. Koordinasi lintas sektor, inovasi, dan kolaborasi dengan pihak luar juga masih perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.					
4) 5) Pengembangan peternakan dan perikanan berpusat pada wilayah dengan ketersediaan lahan padang rumput, akses air, dan jaringan irigasi, antara lain di Sungai Raya, Kalumpang, dan Daha. Pola pemanfaatan ruang ini secara fungsional mendukung pengembangan kawasan minapolitan, yang memadukan budidaya ikan air tawar dengan integrasi pertanian dan peternakan.						

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

III.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan penjabaran dari visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Secara politis visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingi dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang diemban.

“Membangun Desa, Menata Kota Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi dan Teknologi (SEMANGAT)”

Visi “Membangun Desa, Menata Kota untuk Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (SEMANGAT)” merupakan arah pembangunan jangka menengah yang mencerminkan cita-cita Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik, maju, dan berdaya saing. Visi ini terdiri dari lima elemen utama yang saling melengkapi dan menjadi pedoman dalam merancang kebijakan pembangunan daerah.

Sejahtera dimaknai sebagai kondisi ketika masyarakat hidup makmur dengan ditopang oleh ekonomi yang kuat, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta lingkungan yang nyaman. Konsep kesejahteraan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada terjaminnya kualitas hidup secara menyeluruh. Hal ini mencakup kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta perlindungan budaya lokal sebagai identitas dan warisan daerah yang perlu dijaga serta diwariskan kepada generasi mendatang.

Mandiri mengandung arti bahwa daerah mampu tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki, tanpa bergantung secara berlebihan pada pihak luar. Kemandirian ini mencakup kemampuan mengelola sumber daya alam dan budaya lokal

secara berkelanjutan, memperkuat ekonomi daerah berbasis kearifan lokal, serta membangun daya tahan masyarakat terhadap perubahan global.

Agamis merefleksikan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, ditunjukkan dengan sikap toleransi, akhlak yang mulia, dan harmoni antar umat beragama. Nilai agamis ini menjadi fondasi moral pembangunan yang selaras dengan etika, keadilan, dan keberkahan, sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang peduli terhadap sesama, lingkungan, dan nilai-nilai budaya.

Mengayomi berarti kehadiran pemerintah sebagai pelindung dan pelayan masyarakat dengan kebijakan yang adil, transparan, serta berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani, dan memiliki ruang yang setara dalam pembangunan.

Teknologi bermakna pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Penerapan teknologi tidak hanya digunakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan, tetapi juga untuk mendorong transformasi ekonomi, memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pembangunan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Membangun Desa berarti memastikan pembangunan berawal dari lingkup terkecil dengan mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menjaga kearifan lokal dan kelestarian lingkungan pedesaan. Sedangkan **Menata Kota** tidak hanya dimaknai sebagai penataan fisik wilayah perkotaan, melainkan juga pembenahan birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan operasional pelayanan publik, serta pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan lingkungan dan budaya. Dengan demikian, pembangunan desa dan penataan kota akan saling melengkapi, membentuk kesatuan yang mendorong kemajuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

III.2 Misi Pembangunan Daerah

Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Misi Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 menetapkan 5 misi untuk mewujudkan visi pembangunannya, kelima misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Penataan Perkotaan
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia serta kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat HSS
4. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintah serta Penyelenggaraan Pemerintah yang Inovatif
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintah yang Melayani dan Kondusif

Untuk kepentingan dalam menyusun desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang baik, maka pemahaman terhadap kerangka berpikir visi-misi Kepala Daerah menjadi penting. Kerangka pikir tersebut dapat terlihat dalam konstruksi visi-misi kepala daerah sebagai berikut :

Gambar III-1 Konstruksi Kerangka Pikir Visi Misi Kepala Daerah Terpilih



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan dalam menyusun arsitektur kinerja pembangunan, maka misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diatas akan ditransformasi menjadi misi pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna serta substansi dari Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dibawa pada saat pilkada. Transformasi ini dilakukan dengan cara membaca intisari makna dari misi tersebut dan dilakukan kategorisasi dengan mempertimbangkan terkait urusan dan fungsi atas terjemahan dari misi tersebut.

Tabel III-1 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah

Misi Kepala Daerah	Misi Pembangunan Daerah
Misi 1 Mewujudkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Penataan Perkotaan	Misi 1 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal
Misi 2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Misi 2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Misi 2 Membangun Masyarakat yang Berdaya, Sejahtera, dan Inklusif
Misi 5 Meningkatkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintah yang Melayani dan Kondusif	
Misi 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia serta kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat HSS	Misi 3 Mewujudkan Pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter
Misi 5 Meningkatkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintah yang Melayani dan Kondusif	
Misi 4 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintah serta Penyelenggaraan Pemerintah yang Inovatif	Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
Misi 5 Meningkatkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintah yang Melayani dan Kondusif	

Sumber : Bappeliitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Visi pembangunan daerah bukan sekadar rangkaian kata inspiratif, melainkan cerminan arah dan jiwa penyelenggaraan pemerintahan yang ingin diwujudkan bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, pokok visi yang terdiri atas **Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologi** menjadi landasan filosofis bagi setiap langkah strategis pembangunan.

Kelima nilai tersebut menggambarkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, ketahanan sosial, moralitas, serta inovasi pemerintahan. Sejahtera menegaskan tujuan akhir pembangunan, yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Mandiri menekankan daya tumbuh daerah dari kekuatan potensi lokalnya. Agamis memastikan arah pembangunan berlandaskan nilai moral dan spiritual. Mengayomi menggambarkan kehadiran pemerintah yang melindungi dan melayani

dengan adil, sedangkan Teknologi menjadi sarana akselerasi untuk menjawab tantangan zaman yang semakin dinamis.

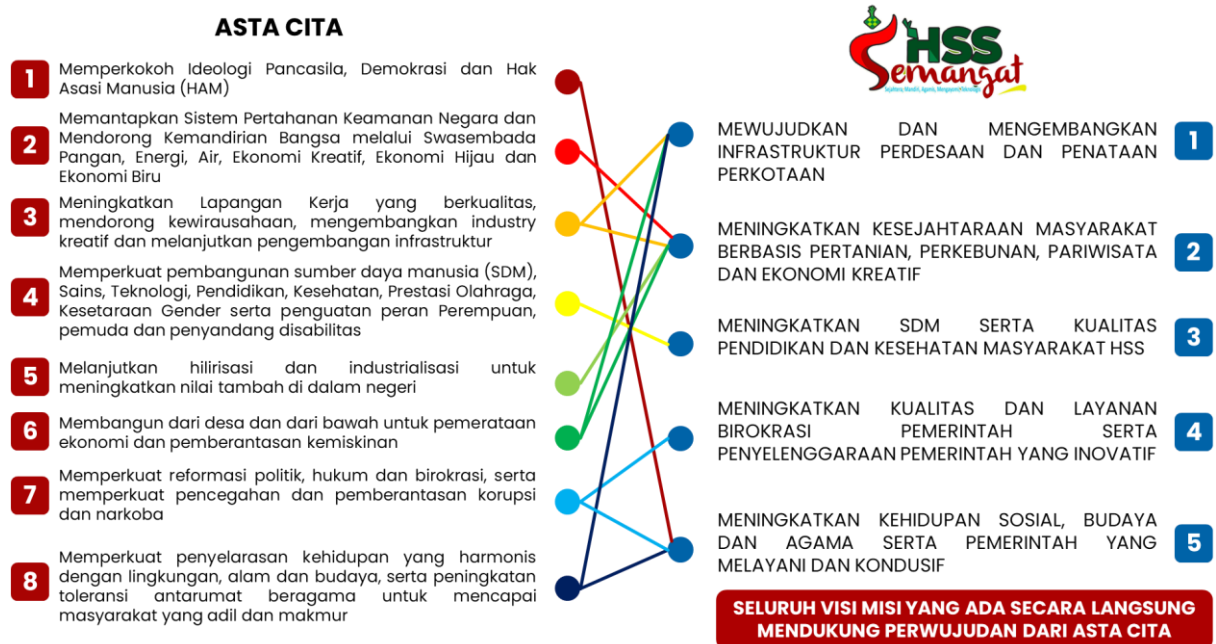
Seluruh pokok visi ini kemudian diterjemahkan secara operasional dalam empat misi pembangunan daerah. Masing-masing misi menjadi instrumen yang menggerakkan nilai-nilai visi agar benar-benar hadir dalam kebijakan, program, dan pelayanan publik. Hubungan antara pokok visi dan misi inilah yang memperlihatkan keselarasan antara arah ideal dan langkah nyata pembangunan menuju masyarakat Hulu Sungai Selatan yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

III.3 Keselarasan Visi Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Keselarasan visi dan misi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi hasil. Dalam konteks otonomi daerah, sinergi antara ketiga level pemerintahan menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berjalan searah serta saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Visi nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” mencerminkan arah besar pembangunan bangsa, yang menekankan pada penguatan ideologi, pembangunan sumber daya manusia unggul, transformasi ekonomi berkelanjutan, serta pemerintahan yang bersih dan efisien. Visi ini perlu dijabarkan dan dijalankan secara konkuren oleh pemerintah provinsi dan kabupaten melalui adaptasi misi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Gambar III-2 Keselarasan Asta Cita dengan Misi Kepala Daerah



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Provinsi Kalimantan Selatan, melalui visinya “Kalsel Bekerja: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan”, merespons visi nasional dengan menekankan pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan posisi strategis wilayah. Selanjutnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan visinya “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (SEMANGAT)” memperkuat pendekatan pembangunan dari bawah, yang selaras dengan strategi nasional dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan ketahanan ekonomi lokal, serta membangun sumber daya manusia yang tangguh.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut secara eksplisit mendukung visi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai *Gerbang Logistik Kalimantan*. Dukungan ini diwujudkan melalui strategi *membangun desa* yang memperkuat basis produksi pertanian, perkebunan, perikanan, serta komoditas unggulan lokal sebagai fondasi pasokan logistik regional, serta strategi *menata kota* yang berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur, pusat perdagangan, dan sarana transportasi untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Nilai *Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologi* mencerminkan komitmen Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membangun sistem logistik daerah yang inklusif,

berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya menjadi arah pembangunan internal daerah, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya kolektif Kalimantan Selatan dalam mewujudkan posisinya sebagai *Gerbang Logistik Kalimantan*.

Gambar III-3 Keselarasan Misi Kalsel Bekerja dengan Misi Kepala Daerah



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Keselarasan visi dan misi antar level pemerintahan ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih arah kebijakan maupun fragmentasi pembangunan. Dengan sinergi yang kuat, program nasional dapat diterjemahkan secara efektif di daerah, sementara aspirasi dan kebutuhan lokal dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional. Hasil akhirnya adalah pembangunan yang lebih tepat sasaran, adil, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

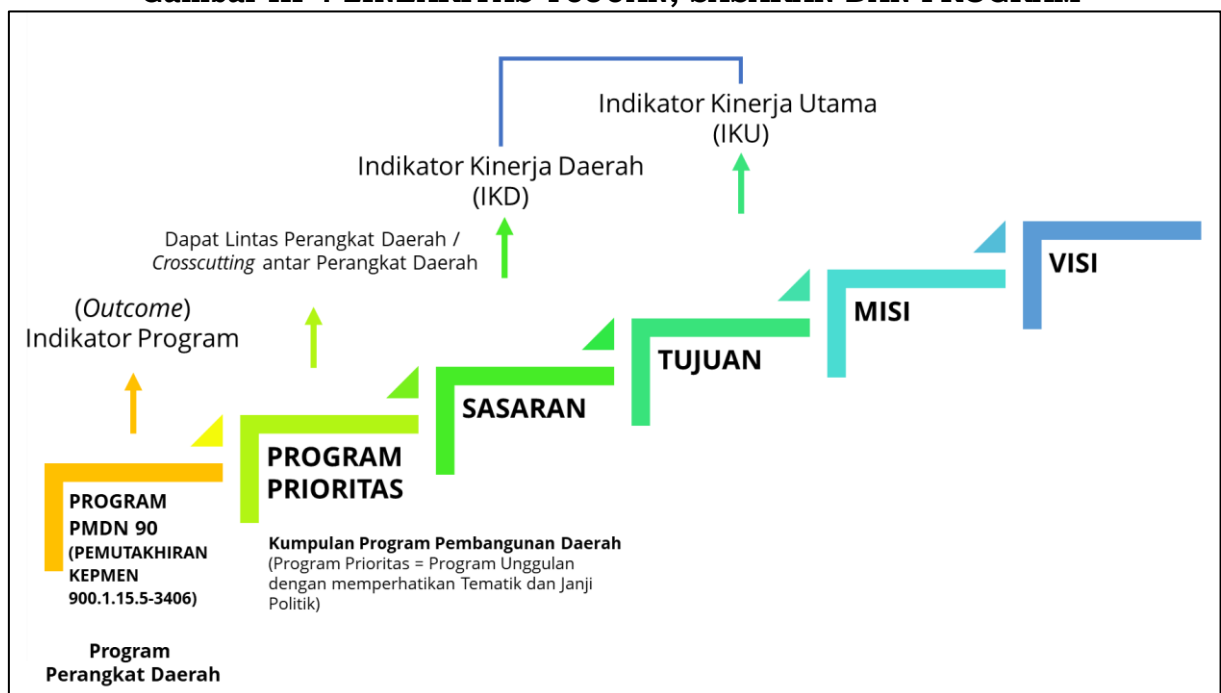
III.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada RPJMD 2025-2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Pertama pada RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2045. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD 2025-2029 berada pada periode tahapan Pertama dari RPJPD Hulu Sungai Selatan 2025-2045, sehingga prioritas pembangunan jangka panjang tahap pertama (2025-2029) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 ini. Pembangunan jangka panjang tahap pertama ditujukan pada pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, penguatan potensi daerah pada sektor ekonomi unggulan, pemerataan layanan infrastruktur dasar, kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif dan digitalisasi pelayanan publik.

Syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD.

Gambar III-4 LINEARITAS TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan logframe Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Gambaran cascading di atas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat di dalamnya. Masing-masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program-program pembangunan daerah terdapat keterlibatan

lintas perangkat daerah/ lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Program prioritas daerah ditransformasikan ke program nomenklatur di Permendagri 90 tahun 2019 (Pemutakhiran Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024) yang berfokus pada langkah intervensi yang dilakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah. Keberadaan Program Prioritas Daerah (Program Pemda) dalam arsitektur kinerja merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mewujudkan pendekatan *money follow program* yang berorientasi pada pendekatan tematik. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 yang di ikuti dengan gambar arsitektur kinerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkelanjutan

Pokok visi **“Sejahtera dan Mandiri”** mencerminkan arah pembangunan daerah yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan melalui penguatan kemandirian ekonomi serta optimalisasi potensi lokal. *Sejahtera* dimaknai sebagai kondisi ideal di mana seluruh masyarakat hidup dalam kemakmuran, memperoleh pendapatan yang layak, dan menikmati kualitas hidup yang baik melalui akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan. Kesejahteraan dalam konteks ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas manusia, pengurangan kesenjangan sosial, serta terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Sementara itu, *Mandiri* merefleksikan tekad daerah untuk membangun kemampuan internal dalam menggerakkan perekonomian dan meningkatkan daya saing tanpa bergantung secara berlebihan pada bantuan eksternal. Kemandirian dimaknai sebagai kemampuan daerah untuk tumbuh dan berkembang melalui pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan

kelembagaan secara optimal, berkelanjutan, dan inovatif. Nilai kemandirian ini menuntut penguatan struktur ekonomi yang produktif, peningkatan investasi dan kapasitas usaha masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja yang mendorong masyarakat agar mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.

Sebagai penjabaran dari pokok visi **Sejahtera dan Mandiri**, arah pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pokok visi *Sejahtera* dimaknai sebagai kondisi ideal di mana masyarakat hidup dalam kemakmuran, memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan dasar, serta menikmati lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Kesejahteraan dalam pengertian ini tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari terpenuhinya kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh—mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ketahanan wilayah. Sementara itu, *Mandiri* mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperkuat kemandirian masyarakat untuk tidak bergantung secara berlebihan pada intervensi eksternal. Kemandirian daerah menjadi penopang utama bagi kesejahteraan yang berkelanjutan, karena pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung oleh basis produktif yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Dalam konteks tersebut, tujuan pembangunan daerah difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan sektor-sektor unggulan dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Pembangunan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan angka pertumbuhan PDRB, tetapi juga untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi di seluruh wilayah serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Pendekatan ini menegaskan komitmen Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan mampu menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Gambar III-5 Cascading Pencapaian Tujuan I



POKOK VISI	SEJAHTERA, MANDIRI							
TUJUAN	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH YANG BERKUALITAS, INKLUSIF, DAN BERKELANJUTAN							
	PERTUMBUHAN EKONOMI							
SASARAN	MENINGKATNYA EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS INVESTASI	MENGUATNYA STRUKTUR DAN RANTAI NILAI EKONOMI DAERAH				MENINGKATNYA KUALITAS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR DESA		
	ICOR	PERTUMBUHAN PDRB PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN	PERTUMBUHAN PDRB PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	% KONTRIBUSI EKONOMI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS RISIKO BENCANA
URUSAN	URUSAN PENANAMAN MODAL	URUSAN PERTANIAN	URUSAN PERINDUSTRIAN	URUSAN PERDAGANGAN	URUSAN PARIWISATA	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
						URUSAN PERHUBUNGAN		
						URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
						URUSAN TRANTIBUMLINMAS		

Sumber: Bappalitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Secara strategis, pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas investasi, penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai penopang utama ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi menuju sistem yang inovatif, tangguh, dan adaptif terhadap dinamika global, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.

Sebagai turunan dari tujuan tersebut, sasaran pembangunan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya Efisiensi dan Produktivitas Investasi, yang diukur melalui indikator *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) sebagai cerminan efisiensi pemanfaatan modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menguatnya Struktur dan Rantai Nilai Ekonomi Daerah, yang diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; rasio PDRB industri pengolahan; pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran; serta persentase kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
3. Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Desa, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Layanan

Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Indeks Risiko Bencana.

Sasaran-sasaran tersebut menegaskan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berorientasi pada pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, visi Sejahtera dan Mandiri diwujudkan melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas investasi, penguatan struktur dan rantai nilai ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup dan infrastruktur desa, guna menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

2. Tujuan II : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Sosial Masyarakat

Pokok visi **“Sejahtera”** mencerminkan cita-cita pembangunan daerah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan berkeadilan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, serta terciptanya lingkungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. *Sejahtera* dalam konteks ini dimaknai bukan sekadar sebagai peningkatan ekonomi, melainkan sebagai kondisi di mana masyarakat dapat hidup layak, memiliki akses yang merata terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta terlindungi dari berbagai bentuk kerentanan sosial.

Sebagai penjabaran dari pokok visi Sejahtera, arah pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Pokok visi Sejahtera dimaknai sebagai kondisi ideal di mana seluruh lapisan masyarakat dapat hidup dalam kecukupan, memperoleh pendapatan yang layak, serta menikmati kualitas hidup yang baik melalui pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, kesempatan kerja, dan lingkungan sosial yang harmonis. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan, berpartisipasi aktif

dalam pembangunan, dan terbebas dari berbagai bentuk kerentanan sosial serta kemiskinan struktural.

Dalam kerangka tersebut, tujuan pembangunan daerah secara spesifik dirumuskan sebagai Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan dan Pengurangan Kesenjangan Sosial Ekonomi. Tujuan ini menegaskan komitmen Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk secara progresif meningkatkan kualitas hidup sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Persentase Penduduk Miskin dan Gini Rasio. Dengan demikian, fokus pembangunan tidak hanya pada pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi yang adil dan upaya afirmatif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Gambar III-6 Cascading Pencapaian Tujuan II



POKOK VISI	SEJAHTERA			
TUJUAN	AKSELERASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PENGURANGAN KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI			
	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN		GINI RASIO	
SASARAN	AKSELERASI PENINGKATAN KAPASITAS EKONOMI DAN KEMANDIRIAN DESA		MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA PRODUKTIF
	PENDAPATAN PER KAPITA	PERSENTASE DESA MANDIRI	PERSENTASE PPKS YANG MANDIRI	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
URUSAN	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		URUSAN SOSIAL	URUSAN TENAGA KERJA
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	URUSAN PARIWISATA			

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Secara strategis, pembangunan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada tiga pilar utama: akselerasi kapasitas ekonomi masyarakat di tingkat desa, peningkatan kemandirian kelompok rentan, serta perluasan kesempatan kerja yang produktif. Upaya ini diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal (seperti Koperasi, UKM, dan Pariwisata), penguatan program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran, serta peningkatan kompetensi angkatan kerja. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi rumah tangga, meningkatkan

kemandirian sosial, dan mengurangi angka pengangguran secara berkelanjutan.

Sebagai turunan dari tujuan tersebut, sasaran pembangunan yang ditetapkan adalah:

1. Akselerasi Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Kemandirian Desa, yang diukur melalui indikator Pendapatan Per Kapita dan Persentase Desa Mandiri;
2. Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang diukur melalui indikator Persentase PPKS yang Mandiri; dan
3. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Produktif, yang diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sasaran-sasaran tersebut menggambarkan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan dan inklusivitas. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi dari tingkat desa, meningkatkan kemandirian kelompok rentan, serta memperluas kesempatan kerja yang layak. Dengan demikian, visi Sejahtera diwujudkan melalui penciptaan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang produktif, mandiri, dan berkeadilan sosial, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati hasil pembangunan.

3. Tujuan III : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pokok visi “Sejahtera” dan “Agamis” merupakan dua landasan moral dan substantif dalam mewujudkan pembangunan manusia yang utuh, berdaya saing, serta berkarakter. *Sejahtera* menekankan pada tercapainya kualitas hidup yang baik melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, sementara *Agamis* menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moralitas dalam membentuk masyarakat yang beretika, peduli, dan harmonis. Keduanya menjadi pilar yang saling melengkapi antara kemajuan lahiriah dan keseimbangan batiniah dalam pembangunan daerah.

Sebagai penjabaran dari pokok visi SEJAHTERA, AGAMIS, arah pembangunan daerah difokuskan pada Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Tujuan ini menegaskan komitmen Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan moral sosial masyarakat. Pembangunan manusia, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ditempatkan sebagai inti dari seluruh proses pembangunan, karena hanya melalui peningkatan kualitas manusia dapat tercapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sebagai penjabaran dari pokok visi Sejahtera dan Agamis, arah pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berakarakter. Tujuan ini menegaskan komitmen Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan moral sosial masyarakat. Pembangunan manusia ditempatkan sebagai inti dari seluruh proses pembangunan, karena hanya melalui peningkatan kualitas manusia dapat tercapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Gambar III-7 Cascading Pencapaian Tujuan III



POKOK VISI	SEJAHTERA, AGAMIS					
TUJUAN	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA					
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA					
SASARAN	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MERATA	MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT YANG MERATA			MENCIPTAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONI, SETARA DAN INKLUSIF	
	UMUR HARAPAN HIDUP (SP2020)	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	HARAPAN LAMA SEKOLAH	NILAI ASESMEN NASIONAL PENDIDIKAN (AKM)	INDEKS HARMONI	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER
URUSAN	URUSAN KESEHATAN	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PENDIDIKAN		KESBANGPOL	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			URUSAN PERPUSTAKAAN		URUSAN KEBUDAYAAN	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Secara strategis, tujuan pembangunan diarahkan pada peningkatan IPM melalui penguatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan, sekaligus menciptakan tatanan kehidupan sosial yang harmonis, setara, dan inklusif. Pembangunan manusia yang berakarakter tidak hanya

mengandalkan peningkatan aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga penguatan nilai-nilai moral, spiritual, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai turunan dari tujuan tersebut, sasaran pembangunan difokuskan pada tiga arah utama, yaitu:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata, yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (SP2020);
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Merata, yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM);
3. Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni, Setara dan Inklusif, yang diukur melalui Indeks Harmoni dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Sasaran ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas manusia harus dilihat secara menyeluruh—mencakup keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kesehatan jasmani, dan kematangan sosial. Arah pembangunan diarahkan agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta hidup dalam lingkungan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kesetaraan gender, dan kebersamaan. Melalui pencapaian sasaran ini, diharapkan terbentuk masyarakat Hulu Sungai Selatan yang sehat, berilmu, berakhlak mulia, dan hidup dalam harmoni sosial yang kokoh sebagai pondasi menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

4. Tujuan IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Pokok visi “Mengayomi” dan “Teknologi” merepresentasikan orientasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui tata kelola yang adil, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Mengayomi menggambarkan peran pemerintah sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang senantiasa hadir memberikan kepastian, keadilan, serta rasa aman dalam setiap kebijakan

dan pelayanan publik. Sementara itu, Teknologi mencerminkan komitmen untuk memanfaatkan inovasi digital sebagai instrumen peningkatan efisiensi birokrasi dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penjabaran dari pokok visi MENGAYOMI, TEKNOLOGI, arah pembangunan daerah difokuskan pada upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), yang diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini menegaskan komitmen Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi pilar utama dalam memperkuat kepercayaan masyarakat serta memastikan penyelenggaraan pembangunan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Gambar III-8 Cascading Pencapaian Tujuan IV



POKOK VISI	MENGAYOMI ,TEKNOLOGI					
TUJUAN	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)					
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI					
SASARAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH		MENINGKATNYA PROFESIONALISME DAN KUALITAS MANAJEMEN SDM APARATUR	TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG TERINTEGRASI DAN EFEKTIF	
	NILAI SAKIP	SPIP TERINTEGRASI	OPINI BPK TERHADAP LKPD	INDEKS SISTEM MERIT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS PEMERINTAHAN DIGITAL
URUSAN	PERENCANAAN		KEUANGAN	KEPEGAWAIAN	SELURUH URUSAN	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	SEKRETARIAT DAERAH		INSPEKTORAT	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Secara strategis, tujuan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan integritas birokrasi melalui percepatan reformasi kelembagaan, perbaikan sistem pengelolaan keuangan, serta optimalisasi layanan publik berbasis teknologi digital. Upaya ini juga ditujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur sipil negara yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menciptakan pemerintahan daerah yang tangkas dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan tuntutan era digital.

Sebagai turunan dari tujuan tersebut, sasaran pembangunan difokuskan pada empat arah utama, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah, yang diukur melalui Nilai SAKIP, SPIP Terintegrasi, dan Opini BPK terhadap LKPD;
2. Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Manajemen SDM Aparatur, yang diukur melalui Indeks Sistem Merit;
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
4. Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif, yang diukur melalui Indeks Pemerintahan Digital.

Keempat sasaran tersebut mencerminkan upaya komprehensif untuk membangun pemerintahan yang adaptif dan modern. Sasaran pertama (Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan) difokuskan pada penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi pengawasan internal, serta peningkatan integritas birokrasi. Sasaran kedua (Profesionalisme SDM) menjadi pilar reformasi manajemen kepegawaian, yang diarahkan untuk memperkuat profesionalitas aparatur melalui penataan sistem merit, peningkatan kompetensi, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

Selanjutnya, sasaran ketiga (Pelayanan Publik Prima) difokuskan pada pemenuhan ekspektasi dan kepuasan masyarakat melalui inovasi layanan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Adapun sasaran keempat (Pemerintahan Digital) diarahkan untuk mempercepat transformasi menuju *digital governance*, dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana utama peningkatan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem yang inklusif dan partisipatif.

Melalui pencapaian sasaran-sasaran tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik prima, sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan digital yang tangguh dan inovatif. Hal ini

akan menjadi landasan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat menuju pemerintahan daerah yang mengayomi dan berlandaskan kemajuan teknologi.

Sementara itu, penguatan pelayanan publik diarahkan untuk mempercepat transformasi menuju *digital governance*, dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Pelayanan publik berbasis digital tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga menciptakan sistem yang inklusif dan partisipatif dengan ruang interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui pencapaian sasaran-sasaran tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik prima, sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan digital yang tangguh dan inovatif. Hal ini akan menjadi landasan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat menuju pemerintahan daerah yang mengayomi dan berlandaskan kemajuan teknologi.

Tabel III-2 POKOK VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025-2030

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
SEJAHTERA & MANDIRI	MISI PEMBANGUNAN 1 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal	TUJUAN 1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi		%	5,15	5,6 – 5,7	5,9 – 6,8	6,08 – 7,15	6,25 – 7,55	6,45 – 7,85	6,6 – 8,7	6,6 – 8,7
			Meningkatnya Efisiensi dan Produktivitas Investasi	ICOR	Indeks	5.78	5.35 - 5.26	5.11 - 4.47	4.98 - 4.28	4.87 - 4.08	4.74 - 3.95	4.65 - 3.61	4.65 - 3.61
			Menguatnya Struktur dan Rantai Nilai Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,85	3,15	3,27	3,36	3,46	3,57	3,65	3,65
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	7,22	7,39	7,55	7,72	7,88	8,05	8,36	8,36
				Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	%	4,51	4,9	5,17	5,32	5,47	5,65	5,78	5,78
				% kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif	%	3,72	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	4,00
			Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Desa	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,39	72,86	73,11	73,36	73,62	73,87	74,12	74,12
				Indeks Risiko Bencana	Indeks	119,36	115	113	110	107	105	100	100
				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,63	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	81,75	81,75
SEJAHTERA	MISI PEMBANGUNAN 2 Membangun Masyarakat yang Berdaya, Sejahtera, dan Inklusif	TUJUAN 2 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin		%	3,38	3,01 – 3,22	2,71 – 2,94	2,41 – 2,65	2,10 – 2,37	1,80 – 2,08	1,50 – 1,80	1,50 – 1,80
			Gini Rasio		Indeks	0,288	0,282 – 0,286	0,280 – 0,284	0,278 – 0,282	0,276 – 0,280	0,274 – 0,278	0,272 – 0,276	0,272 – 0,276
			Akselerasi Peningkatan	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	41.51	42,05-44,01	44,75 - 48,35	48,50 - 53,14	53,50 - 58,79	59,50 - 65,29	65,70 - 72,83	65,70 - 72,83

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Kapasitas Ekonomi dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	%	32.64	40.28	46.53	52.08	56.94	61.11	64.58	64.58
			Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang Mandiri	%	87.78	87.90	88.10	88.25	88.40	88.65	88.90	88.90
			Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Produktif.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,21	1,95 – 2,20	1,90-2,08	1,85 – 2,06	1,80 – 2,04	1,75 – 2,02	1,70 – 1,98	1,70 – 1,98
SEJAHTERA & AGAMIS	MISI PEMBANGUNAN 3 Mewujudkan Pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter	TUJUAN 3 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	73,95	74,50	74,51-75,01	74,95-75,65	75,59 – 76,30	76,24 – 76,94	76,88 - 77,58	76,88 - 77,58
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	Umur Harapan Hidup (SP2020)	Tahun	8,09	8,25 – 8,35	8,40 – 8,50	8,55 – 8,65	8,70 – 8,80	8,85 – 8,95	9,00 – 9,15	9,00 – 9,15
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12,48	12,65 – 12,75	12,80 – 12,95	12,95 – 13,10	13,10 – 13,25	13,25 – 13,40	13,35 – 13,50	13,35 – 13,50
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	72,82	73,10 – 73,30	73,40 – 73,60	73,65 – 73,85	73,85 – 74,05	74,05 – 74,25	74,30 – 74,60	74,30 – 74,60
				Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	Skor	59,86	62,25	65,00	68,25	71,25	74,25	78,00	78,00
			Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni, Setara dan Inklusif	Indeks Harmoni	Indeks	N/A	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0
				Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,92	67,42	68,96	70,53	72,10	73,68	75,27	75,27

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MENGAYOMI & TEKNOLOGI	MISI PEMBANGUNAN 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	TUJUAN 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	93,39	95,82	97,65	99,48	101,31	103,14	105,00	105,00
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	84,07	86,05	88,25	90,25	92,45	94,50	95,25	95,25
				Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				SPIP Terintegrasi	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Manajemen SDM Aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	267.5	300	325	330	340	350	360	360
			Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	98,13	98,15	98,20	98,25	98,30	98,35	98,40	98,40
			Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	1,40	1,56	1,84	1,98	2,23	2,45	2,45

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

III.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 3(tiga) tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

1. Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagi Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi

swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktivitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Strategi terpilih berdasarkan pertimbangan SWOT yang ada adalah sebagai berikut :

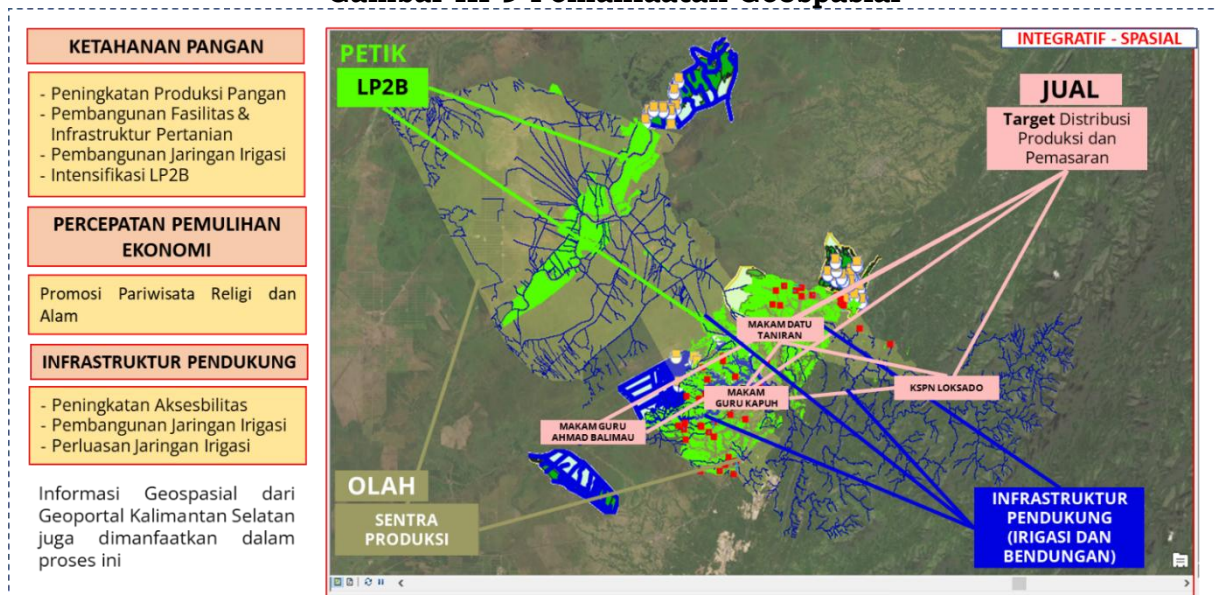
Strategi 1.1 Peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, promosi potensi daerah secara terarah, dan fasilitasi perizinan berusaha yang cepat dan transparan.

Efisiensi dan produktivitas investasi merupakan prasyarat fundamental bagi akselerasi pembangunan ekonomi daerah dalam menghadapi kompetisi regional yang semakin dinamis. Strategi ini diarahkan untuk melakukan perbaikan struktural pada ekosistem investasi guna meningkatkan daya saing dan menarik modal berkualitas. Upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif akan ditempuh melalui agenda reformasi regulasi dan debirokratisasi layanan perizinan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha akan ditransformasikan melalui platform digital terpadu untuk menjamin kecepatan, transparansi, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Secara simultan, kegiatan promosi investasi akan dilaksanakan secara proaktif, dengan menyajikan data potensi unggulan dan studi kelayakan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Upaya ini akan diperkuat dengan penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang memberikan kepastian alokasi ruang untuk kegiatan ekonomi produktif. Perwujudan strategi ini merupakan implementasi dari Asta Cita ke-7 (tata kelola pemerintahan yang baik), yang menciptakan iklim anti-korupsi sebagai fondasi kepercayaan, dan menjadi faktor pendorong utama bagi keberhasilan implementasi Asta Cita ke-3 (hilirisasi dan industrialisasi).

Strategi 1.2 Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah dengan penguatan keterkaitan rantai nilai hulu-hilir, peningkatan nilai tambah komoditas, dan pemberdayaan industri pengolahan serta UMKM.

Untuk membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berdaya tahan, diperlukan pergeseran dari ekonomi berbasis komoditas primer menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi. Strategi ini merupakan cetak biru transformasi struktural tersebut, yang difokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan secara terpadu, utamanya pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Pendekatan utama yang digunakan adalah penguatan rantai nilai (*value chain*), di mana pemerintah daerah memfasilitasi penguatan keterkaitan antara sektor produksi di hulu, industri pengolahan di tingkat menengah, hingga pemasaran di hilir. Pemberdayaan industri pengolahan lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi inti dari strategi ini melalui pendampingan kualitas produk, fasilitasi sertifikasi, dan perluasan akses pasar.

Gambar III-9 Pemanfaatan Geospasial

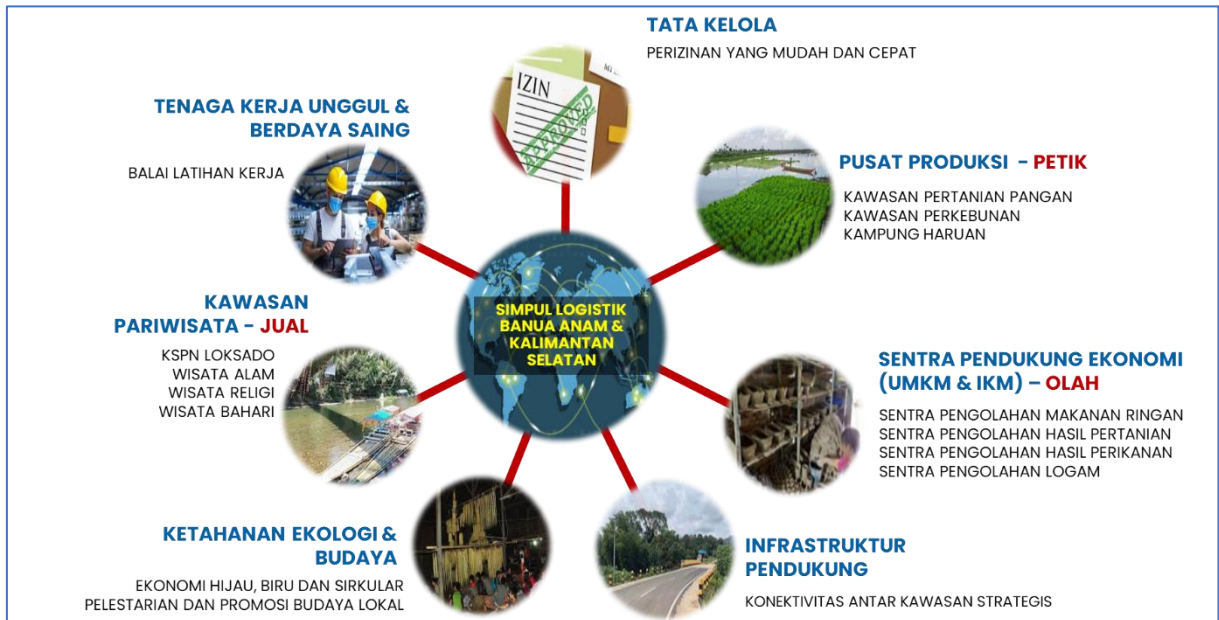


Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Skema "Petik-Olah-Kemas-Jual" akan menjadi model bisnis yang didorong untuk memastikan margin nilai tambah dapat dinikmati secara maksimal oleh pelaku ekonomi daerah. Ini merupakan implementasi terperinci dari Asta Cita ke-3 (hilirisasi) dan Asta Cita ke-6 (ekonomi kreatif) yang bertujuan

untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih mandiri.

Gambar III-10 Skema Pengembangan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Strategi 1.3 Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur dasar perdesaan yang terintegrasi serta penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk menopang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan pilar inklusivitas dan keberlanjutan. Strategi ini menjadi penjamin bagi kedua pilar tersebut dengan memadukan secara harmonis antara percepatan pembangunan infrastruktur dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan—meliputi modernisasi jaringan irigasi, peningkatan kualitas jalan produksi, serta perluasan sistem sanitasi dan air bersih aman—menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesenjangan wilayah. Secara simultan, setiap intervensi pembangunan harus berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya pengendalian alih fungsi lahan produktif, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana akan

diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan. Potensi perdagangan karbon (*carbon trading*) dari lahan gambut akan diujajaki sebagai insentif ekonomi untuk konservasi. Dengan demikian, strategi ini merupakan perpaduan implementasi antara Asta Cita ke-5 (pemerataan infrastruktur) dan Asta Cita ke-8 (keselarasan dengan alam), guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab.

Strategi 2.1 Akselerasi pengembangan ekonomi perdesaan yang berdaya saing melalui intervensi pada rantai nilai komoditas unggulan dan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal.

Kemandirian daerah berakar pada kemandirian desa. Strategi ini menempatkan masyarakat perdesaan sebagai subjek pembangunan yang kapabilitasnya perlu ditingkatkan secara sistematis. Pemerintah Kabupaten akan menjalankan fungsi sebagai akselerator dengan memberikan intervensi terfokus untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi perdesaan. Inti dari strategi ini adalah penguatan kelembagaan ekonomi lokal, utamanya melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi yang profesional dan inovatif. Fasilitasi penyediaan sarana produksi modern, pembukaan akses permodalan, penguatan kelembagaan kelompok tani, dan pengenalan skema asuransi usaha tani menjadi bagian dari intervensi komprehensif untuk memberdayakan pelaku usaha di tingkat akar rumput. Dengan memperkuat kapasitas individu dan kelembagaan di desa, kita sedang membangun fondasi ekonomi yang kokoh, sejalan dengan semangat Asta Cita ke-5 (pembangunan dari pinggiran) untuk menciptakan pusat-pusat kesejahteraan baru dan meningkatkan status kemandirian desa.

Strategi 2.2 Penyelenggaraan program perlindungan sosial dan pemberdayaan yang terintegrasi dan presisi dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan pada reformasi sistem perlindungan sosial yang fundamental guna mewujudkan intervensi yang modern, efisien, dan tepat sasaran. Pemanfaatan DTSEN sebagai basis data tunggal menjadi landasan utama strategi ini untuk menjamin bahwa setiap

intervensi menjangkau kelompok sasaran yang paling berhak. Pendekatan konvergensi diterapkan untuk memastikan setiap keluarga rentan teridentifikasi kebutuhannya secara holistik, sehingga memungkinkan integrasi berbagai program relevan mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah layak huni dan penanganan permukiman kumuh, hingga program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan ketahanan keluarga. Pendekatan terpadu ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS). Ini adalah implementasi dari Asta Cita ke-2 (pemberantasan kemiskinan) yang dieksekusi dengan prinsip-prinsip Asta Cita ke-7 (tata kelola yang baik), memastikan setiap alokasi anggaran publik memberikan dampak yang signifikan dan terukur.

Strategi 2.3 Peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta fasilitasi pasar kerja yang efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyedia kerja

Penyediaan pekerjaan yang layak merupakan instrumen paling efektif untuk mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Strategi ini dirancang untuk mengatasi tantangan kesenjangan kompetensi antara angkatan kerja dengan kebutuhan industri. Pemerintah daerah akan secara proaktif memfasilitasi kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasi dan dunia usaha untuk memastikan sinkronisasi kurikulum dan pengembangan program pemagangan yang terstruktur. Secara paralel, ekosistem kewirausahaan akan ditumbuhkembangkan melalui program inkubasi bisnis untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru oleh para wirausahawan muda. Peningkatan kapasitas angkatan kerja akan difokuskan pada penguasaan keterampilan berbasis digital dan teknologi untuk menjawab kebutuhan pasar masa depan. Pengembangan klaster industri dan skema kemitraan juga akan didorong untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. Ini adalah perwujudan konkret dari Asta Cita ke-4 (pembangunan SDM berkualitas) sebagai penopang utama daya saing ekonomi daerah dan upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Strategi 3.1 Penguatan sistem layanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif serta percepatan penurunan stunting dan Angka Kematian Ibu/Bayi

Paradigma pembangunan kesehatan digeser dari kuratif menjadi promotif-preventif. Ujung tombak strategi ini adalah revitalisasi dan penguatan fungsi Puskesmas dan Posyandu sebagai garda terdepan layanan kesehatan primer yang proaktif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Intervensi spesifik dan sensitif akan dikerahkan secara terintegrasi untuk menuntaskan prevalensi stunting sebagai wujud investasi pada kualitas generasi masa depan sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya ini akan didukung oleh peningkatan kapasitas layanan dasar dan sistem pemantauan terpadu. Masyarakat akan diberdayakan untuk mandiri dalam perilaku hidup bersih dan sehat, sementara pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan akan diprioritaskan untuk menjamin akses yang merata di seluruh desa. Ini adalah implementasi inti dari Asta Cita ke-4 (pembangunan kesehatan) yang bertujuan untuk membangun fondasi SDM yang sehat dan produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Strategi 3.2 Peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang, didukung oleh peningkatan kompetensi dan distribusi tenaga pendidik yang merata serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai

Pendidikan berkualitas merupakan hak dasar warga negara dan kunci utama daya saing daerah. Strategi ini dilandaskan pada dua pilar kebijakan: peningkatan kualitas dan pemerataan akses. Kualitas akan ditingkatkan melalui investasi berkelanjutan pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Sementara itu, pemerataan akses akan dijamin melalui penyediaan beasiswa yang menjangkau seluruh desa, penguatan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C), serta pemenuhan sarana prasarana yang layak. Muatan pendidikan akan diperkaya dengan nilai-nilai agama, etika, dan budaya lokal, serta penguatan literasi berbasis digital untuk menjawab tantangan zaman. Ini

adalah perwujudan dari Asta Cita ke-4 (pembangunan pendidikan), sebuah komitmen untuk menyiapkan generasi yang berpengetahuan, berakhlak mulia, dan mampu meningkatkan rata-rata serta harapan lama sekolah.

Strategi 3.3 Penguatan modal sosial dan kerukunan masyarakat melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan, peningkatan harmoni sosial, kesetaraan gender, dan pembangunan yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat

Kohesi sosial yang kuat merupakan fondasi bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Strategi ini bertujuan untuk merawat dan memperkuat modal sosial daerah melalui pendekatan pembangunan yang inklusif. Pemerintah akan secara aktif memfasilitasi dialog antar-kelompok melalui forum keagamaan, melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat, serta mengintegrasikan kebijakan pengarusutamaan gender dalam setiap program pembangunan. Hak-hak dan partisipasi kelompok rentan—termasuk perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia—akan dijamin melalui program perlindungan dan pemberdayaan yang spesifik. Pelestarian seni dan budaya lokal akan didorong sebagai perekat identitas bersama dan penunjang sektor pariwisata. Ini adalah implementasi dari Asta Cita ke-1 (pemantapan ideologi dan kerukunan) yang menciptakan kondisi sosial yang stabil dan kondusif bagi kemajuan bersama, yang tercermin dalam peningkatan Indeks Harmoni dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Strategi 4.1 Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Akuntabilitas menjadi prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan. Strategi ini bertujuan untuk menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil di seluruh jajaran birokrasi. Implementasi SAKIP akan dipertajam untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki sasaran dan indikator kinerja yang jelas. Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dan manajemen risiko akan diperkuat untuk mencegah penyimpangan dan inefisiensi. Pemanfaatan

data statistik dan teknologi geospasial akan menjadi standar dalam proses evaluasi dan perencanaan untuk memastikan setiap keputusan berbasis bukti. Penegakan peraturan daerah yang diiringi edukasi juga menjadi bagian dari penguatan kelembagaan pemerintahan. Ini adalah langkah teknis fundamental dalam mewujudkan Asta Cita ke-7 (pemerintahan yang akuntabel), yang dibuktikan dengan peraihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan peningkatan nilai SAKIP.

Strategi 4.2 Pengembangan manajemen talenta dan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan profesionalisme, peningkatan kompetensi, dan kinerja aparatur yang berintegritas

Kualitas birokrasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Strategi ini merupakan reformasi di jantung manajemen ASN, yaitu beralih menuju manajemen talenta yang modern. Inti dari strategi ini adalah implementasi sistem merit yang konsisten, di mana penempatan dan promosi didasarkan sepenuhnya pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. ASN akan terus didorong untuk menjadi adaptif dan profesional, terutama melalui peningkatan penguasaan kompetensi digital dan pengembangan budaya kerja yang inovatif. Dengan aparatur yang kompeten dan berintegritas, mesin birokrasi akan bergerak lebih cepat dan efektif dalam memberikan pelayanan dan menjalankan program pembangunan. Ini adalah penerapan Asta Cita ke-4 (SDM unggul) di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri, sebagai prasyarat untuk menyukseskan Asta Cita ke-7 dan meningkatkan Indeks Sistem Merit.

Strategi 4.3 Penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui penyederhanaan prosedur, inovasi layanan, dan penerapan standar pelayanan yang berkualitas

Kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dan tolok ukur utama dari keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, strategi ini menempatkan kepuasan masyarakat sebagai orientasi utama. Pendekatannya adalah melalui simplifikasi dan inovasi. Seluruh prosedur pelayanan, terutama perizinan usaha dan administrasi kependudukan, akan ditinjau ulang, disederhanakan, dan dipercepat hingga

menjangkau tingkat desa. Inovasi seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) akan terus dikembangkan untuk memberikan layanan yang terintegrasi dalam satu atap. Pemerintah akan secara proaktif melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan untuk memastikan layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga, yang pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat. Ini adalah bukti nyata dari komitmen terhadap Asta Cita ke-7, yaitu mewujudkan pemerintahan yang melayani.

Strategi 4.4 Percepatan pembangunan ekosistem digital pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang cerdas dan pelayanan publik yang inklusif.

Transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman. Strategi ini bertujuan untuk membangun sebuah ekosistem digital pemerintahan yang utuh dan terintegrasi, bukan sekadar aplikasi yang terfragmentasi. Pemerintah akan membangun infrastruktur TIK yang andal untuk menghilangkan kesenjangan digital (*blankspot*), kemudian membangun platform layanan yang terpusat dan interoperabel antar dinas. Tujuannya adalah menciptakan sebuah *smart government*—pemerintahan cerdas yang tidak hanya memberikan layanan secara elektronik, tetapi juga mampu memanfaatkan data untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik dan proaktif. Keberhasilan strategi ini akan tecermin dari peningkatan Indeks Pemerintahan Digital, yang merupakan jawaban komprehensif terhadap Asta Cita ke-6 (pembangunan ekosistem digital) dan sekaligus menjadi instrumen ampuh untuk mengakselerasi pencapaian Asta Cita ke-7 (tata kelola yang efisien dan transparan)

Tabel III-3 Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
MISI PEMBANGUNAN 1 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal	TUJUAN 1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkelanjutan	1.1	Meningkatnya Efisiensi dan Produktivitas Investasi	1.1	Peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, promosi potensi daerah secara terarah, dan fasilitasi perizinan berusaha yang cepat dan transparan.
		1.2	Menguatnya Struktur dan Rantai Nilai Ekonomi Daerah	1.2	Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah dengan penguatan keterkaitan rantai nilai hulu-hilir, peningkatan nilai tambah komoditas, dan pemberdayaan industri pengolahan serta UMKM.
		1.3	Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Desa	1.3	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur dasar perdesaan yang terintegrasi serta penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk menopang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
MISI PEMBANGUNAN 2 Membangun Masyarakat yang Berdaya, Sejahtera, dan Inklusif	TUJUAN 2 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Sosial Masyarakat	2.1	Akselerasi Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Kemandirian Desa	2.1	Akselerasi pengembangan ekonomi perdesaan yang berdaya saing melalui intervensi pada rantai nilai komoditas unggulan dan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal.
		2.2	Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	2.2	Penyelenggaraan program perlindungan sosial dan pemberdayaan yang terintegrasi dan presisi dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama
		2.3	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Produktif.	2.3	Peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta fasilitasi pasar kerja yang efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyedia kerja
MISI PEMBANGUNAN 3 Mewujudkan Pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter	TUJUAN 3 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	3.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	3.1	Penguatan sistem layanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif serta percepatan penurunan stunting dan Angka Kematian Ibu/Bayi
		3.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Merata	3.2	Peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang, didukung oleh peningkatan kompetensi dan distribusi tenaga pendidik yang merata serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai
		3.3	Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni, Setara dan Inklusif	3.3	Penguatan modal sosial dan kerukunan masyarakat melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan, peningkatan harmoni sosial, kesetaraan gender, dan pembangunan yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
MISI PEMBANGUNAN 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	TUJUAN 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah	4.1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
		4.2	Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Manajemen SDM Aparatur	4.2	Pengembangan manajemen talenta dan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan profesionalisme, peningkatan kompetensi, dan kinerja aparatur yang berintegritas
		4.3	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Mudah Diakses	4.3	Penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui penyederhanaan prosedur, inovasi layanan, dan penerapan standar pelayanan yang berkualitas
		4.4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif	4.4	Percepatan pembangunan ekosistem digital pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang cerdas dan pelayanan publik yang inklusif.

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan memperhatikan misi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung misi. Kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel III-4 Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
1	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan dengan pendekatan penggunaan teknologi modern (smart farming) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan. Optimalisasi rantai pasok pangan Hulu Sungai Selatan untuk mencapai ketahanan pangan daerah dan mendukung kebutuhan pangan Kalimantan Selatan Pendampingan dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM melalui penguatan kualitas produk, diversifikasi usaha, dan penguatan kelembagaan. Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional Peningkatan Promosi dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Loksado (Geopark Meratus) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pengembangan ekonomi syariah dan industri halal berbasis produk unggulan daerah untuk mendorong daya saing, pemberdayaan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat Optimalisasi Potensi Perdagangan Karbon (Carbon Trading) pada Lahan Gambut Peningkatan infrastruktur irigasi dan embung untuk meningkatkan ketersediaan air secara berkelanjutan, mendorong peningkatan indeks tanam dan produktivitas hasil pertanian. Penyediaan pemenuhan sistem sanitasi aman dan air bersih aman di kawasan perkotaan dan pedesaan peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
		Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang Mengurangi pencemaran lingkungan, reduksi emisi karbon dan pelestarian alam khususnya di kawasan Pegunungan Meratus (Geopark Meratus) Mendorong pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dengan prinsip ekonomi sirkular melalui pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah untuk menciptakan nilai ekonomi serta keberlanjutan lingkungan Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar desa untuk mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah dengan pusat-pusat kegiatan Peningkatan ketangguhan dan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim Penanganan permukiman kumuh melalui upaya pemugaran secara komprehensif Peningkatan akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan penyusunan, penetapan dan pengawasan melalui RDTR Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mengentaskan areal blankspot sesuai dengan kewenangan kabupaten
2	Membangun Masyarakat yang Berdaya, Sejahtera, dan Inklusif	Bantuan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan Penguatan kelembagaan kelompok petani, peternak dan nelayan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani, peternak dan nelayan Pendampingan kelembagaan,sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda guna mendorong kewirausahaan berbasis inovasi untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi Pengentasan Kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dengan penggunaan Data Tunggal Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pertanian, UMKM, Ekonomi Kreatif dan pariwisata Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak
3	Mewujudkan Pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter	Peningkatan ketersediaan , akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting peningkatan Kualitas Pendidikan yang mengedepankan nilai nilai agama, etika, dan budaya lokal serta keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau seluruh desa dan mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja Penguatan akses pendidikan kesetaraan dengan memperluas layanan Paket A, B, dan C. Penuntasan stunting dengan penguatan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi lintas sektor, peningkatan kapasitas layanan dasar dan sistem pemantauan yang terpadu, serta optimalisasi peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mendukung tumbuh kembang anak pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh desa Peningkatan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penguatan literasi berbasis digital Peningkatan pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan, resiliensi, serta pencegahan kekerasan, sekaligus mendorong

No	Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
		partisipasi aktif mereka dalam pembangunan dengan mengedepankan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial
		Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga- lembaga adat dan hak ulayat masyarakat
		Peningkatan modal sosial dengan fasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas
		Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan pemuda atas budaya lokal
		Penegakan perda dengan edukasi masyarakat
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	Perrmudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat desa Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasiskan e-government sebagai langkah menuju smart government Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif melalui peningkatan kompetensi digital, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, serta pengembangan budaya kerja berbasis data dan inovasi Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko Peningkatan Infrastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik Penguatan data data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah Penguatan pemanfaatan teknologi dan data geospasial dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi fokus utama selama periode 2025-2029.

Prioritas Pembangunan Daerah ini merupakan sintesis dari keseluruhan arsitektur perencanaan dan menjadi payung strategis bagi seluruh program dan kegiatan. Kelima Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sektor Unggulan;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter;
3. Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Penguatan Ketahanan Sosial yang Inklusif;
4. Pemantapan Infrastruktur Dasar, Konektivitas, dan Kualitas Lingkungan Hidup;

5. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik Prima.

Kelima prioritas pembangunan ini akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD.

Untuk menjamin implementasi yang fokus dan terukur setiap tahunnya, kelima prioritas daerah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Tema Pembangunan. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan arahan yang mengacu dari tema pembangunan tahap pertama pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dijadikan acuan tahunan pada RKPD. Maka, tema pembangunan Tahun 2026-2030 disajikan pada Gambar berikut ini:

Gambar III-11 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026-2030

2026	2027	2028	2029	2030
MEMBANGUN FONDASI EKONOMI LOKAL YANG TANGGUH DAN INKLUSIF SEBAGAI LANDASAN TRANSFORMASI	PENGUATAN SEKTOR PANGAN LOKAL DAN INDUSTRI KREATIF BERBASIS TEKNOLOGI	PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI	SINERGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN STABILITAS SOSIAL MENUJU DAERAH MANDIRI	MEMANTAPKAN FONDASI TRANSFORMASI UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI DAN STABILITAS SOSIAL BUDAYA
PRIORITAS	PRIORITAS	PRIORITAS	PRIORITAS	PRIORITAS
- Pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta sarana pendukung pertanian dan perkebunan. - Digitalisasi layanan publik dan infrastruktur komunikasi di wilayah perdesaan. - Peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi. - Pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi daerah (pertanian, perkebunan, dan perikanan). - Penyusunan kebijakan insentif investasi di sektor strategis. - Mendorong hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan melalui kemitraan dengan industri. - Pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. - Penguatan pendidikan kejuruan berbasis pertanian, teknologi, dan ekonomi kreatif.	- Pengembangan sistem pertanian modern dan smart farming. - Eksansi program diversifikasi pangan berbasis lokal. - Penyediaan pupuk dan alat pertanian dengan skema subsidi atau insentif bagi petani. - Pembangunan sentra produksi dan distribusi pangan berbasis desa. - Mendorong agroindustri dan produk olahan dari hasil pertanian dan perkebunan. - Digitalisasi sektor pertanian dan industri kreatif untuk meningkatkan efisiensi dan pemasaran. - Pelatihan dan inkubasi bisnis berbasis teknologi untuk pelaku UMKM dan startup lokal. - Peminaan sektor industri kreatif seperti kerajinan, kuliner khas daerah, dan pariwisata digital. - Mendorong pemanfaatan platform e-commerce untuk produk lokal.	- Penguatan program bantuan sosial berbasis produktif (bansos untuk usaha mikro). - Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di wilayah perdesaan. - Pengembangan energi terbarukan berbasis lokal (biomassa, tenaga surya). - Penerapan konsep ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. - Revitalisasi destinasi wisata berbasis budaya dan ekowisata. - Pengembangan kebijakan keberlanjutan untuk usaha pariwisata. - Digitalisasi layanan pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. - Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam pelayanan berbasis inovasi dan teknologi.	- Penguatan sinergi antar-sektor dalam pembangunan (pertanian, industri, dan pariwisata). - Peningkatan kesejahteraan pekerja dan skema jaminan sosial bagi masyarakat rentan. - Program penguatan nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan daerah. - Penguatan dialog sosial dan peran komunitas dalam menjaga harmoni masyarakat. - Peningkatan ekspor komoditas unggulan melalui kemitraan dengan pasar nasional dan internasional. - Insentif bagi industri lokal yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. - Implementasi teknologi AI dan big data dalam pengelolaan layanan publik. - Optimalisasi peran desa dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah.	- Penguatan ekosistem industri berbasis sumber daya lokal. - Implementasi kebijakan ekonomi hijau dan keberlanjutan jangka panjang. - Akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas. - Penguatan peran sosial keagamaan dalam menciptakan keharmonisan sosial. - Integrasi teknologi dalam sektor pertanian, industri, dan layanan publik. - Digitalisasi sektor ekonomi kreatif untuk memperluas pasar dan daya saing global. - Peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk pelayanan berbasis inovasi. - Penguatan sistem birokrasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

III.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Proses berikutnya adalah penyelarasan antara janji politis dengan program prioritas, serta melakukan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam proses perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain dari penyelarasan ini adalah

karena perumusan program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program prioritas merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan dalam strategi, arah kebijakan ataupun dalam program kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Apabila bunyi dari janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output maka akan diterjemahkan dalam level kegiatan, namun apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome akan didefinisikan dalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika berada pada level yang lebih makro lagi, maka akan diterjemahkan dalam bentuk strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini :

Gambar III-12 Definisi Janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih



Mekanisme implementasi janji kampanye kepala daerah terpilih pada prinsipnya ditempuh melalui integrasi ke dalam urusan pemerintahan daerah yang relevan, sehingga setiap program dapat dijalankan secara terarah dan efektif. Janji kampanye yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD,

RKPD, hingga Renstra perangkat daerah, untuk kemudian ditindaklanjuti melalui penganggaran dalam APBD maupun dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, serta potensi sumber lain yang sah. Dengan cara ini, program-program prioritas yang berpihak pada masyarakat dapat terlaksana secara konsisten dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan mengedepankan koordinasi lintas sektor, baik antar perangkat daerah maupun dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, hingga mitra pembangunan lain. Hal ini penting terutama bagi program yang berada di luar kewenangan langsung kabupaten, seperti pelepasan kawasan hutan, program sertifikat tanah, maupun pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Melalui sinergi tersebut, setiap janji kampanye tidak hanya menjadi komitmen lokal, tetapi juga terhubung dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi, sehingga memberi daya ungkit yang lebih besar bagi kemajuan Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah daerah juga menyadari adanya tantangan, baik dari sisi keterbatasan anggaran, kebutuhan sumber daya manusia yang memadai, maupun tuntutan keberlanjutan fiskal. Namun demikian, tantangan ini akan dijawab dengan semangat inovasi, pemanfaatan teknologi, serta kemitraan yang lebih luas, sehingga setiap program tidak hanya dapat diwujudkan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, janji-janji kampanye yang telah diamanahkan masyarakat akan terimplementasi secara bertahap, berkelanjutan, dan mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing. Berdasarkan penjelasan dan ilustrasi diatas maka dapat dijabarkan pendefinisian program-program prioritas pembangunan daerah melalui janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih.

Tabel III-5 Pemetaan Janji Kampanye Kepala Daerah pada Dokumen Perencanaan

No	JANJI KAMPANYE			INTEGRASI/TINDAK LANJUT		
				ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	LINTAS K/L/D
1	SEMANGAT MELANJUTKAN	1	Jaminan Kesehatan Gratis (BPJS Kesehatan Semesta)	☑	- Urusan Kesehatan	
		2	Beras Gratis bagi Syarifah yang Janda dan Masyarakat Kurang Mampu		- Urusan Sosial	
		3	Listrik Gratis untuk Tempat Ibadah		- Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Sekretariat Daerah	
		4	Bedah Rumah Sejahtera	☑	- Urusan Sosial	
		5	Asuransi Kesehatan untuk Alim Ulama		- Urusan Kesehatan	
		6	BUS (Saran Angkutan) untuk Pelajar dan Guru		- Urusan Pendidikan - Urusan Perhubungan	
		7	Pemerintah yang Melayani	☑	- Seluruh Urusan	
		8	Internet Gratis di Ruang Publik		- Urusan Komunikasi dan Informatika	
		9	Generasi Muda dan Pelajar Bebas Narkoba	☑	- Urusan Pendidikan	☑
		10	BOS bagi Pesantren, Buku Pelajaran serta Sarana dan Prasarana yang Menunjang		- Urusan Pendidikan	☑
		11	BOS Daerah untuk Sekolah		- Urusan Pendidikan	
		12	Kota Kandangan sebagai Pusat Kuliner	☑		
		13	Jaminan Hidup untuk Lansia, Anak Yatim Piatu dan Penyandang Cacat	☑	- Urusan Sosial	
		14	Peningkatan SDM Guru, Tenaga Kesehatan, Guru Sekolah Kemenag dan Pemda	☑	- Urusan Pendidikan	☑
		15	Meningkatkan serta Memajukan BUMDES		- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Urusan Perindustrian	☑
		16	Jaminan Asuransi bagi Petani dan Nelayan Aktif yang Gagal Panen	☑	- Urusan Pertanian - Urusan Perikanan	
2	SEMANGAT MENINGKATKAN	1	Tidak Mengeluarkan Izin Pertambangan Batubara Baru	☑		☑
		2	Membuka Balai Latihan Kerja		- Urusan Tenaga Kerja	
		3	Sertifikat Tanah Gratis (Sepanjang Program PTSL Berkelanjutan)		- Urusan Pertanahan	☑
		4	Pesantren Kilat (Dauroh) bagi Alim Ulama		- Sekretariat Daerah	
		5	Membina Pengusaha Lokal serta Pengusaha Kecil dan Menengah	☑	- Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	JANJI KAMPANYE		INTEGRASI/TINDAK LANJUT		
			ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	LINTAS K/L/D
				- Urusan Perindustrian	
	6	Meningkatkan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	☑	- Urusan Pertanian - Urusan Perikanan	
	7	Mendorong Pelaksanaan Otonomi Program Dana Desa	☑	- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Urusan Keuangan	☑
	8	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	☑		
	9	Menurunkan Stunting	☑	- Urusan Kesehatan	
	10	Menambah Jurusan pada Sekolah SMK			☑
	11	Infrastruktur untuk Meningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan	☑	- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	12	Membina Usaha Kerajinan dan Fasilitasi Modal UMKM dengan bunga 0%	☑	- Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	☑
	13	Meningkatkan kesejahteraan Guru Pesantren, Pegawai, Tenaga Kesehatan ASN dan Non ASN serta Guru-Guru	☑	- Urusan Kesehatan - Urusan Pendidikan	
	14	Asuransi Anggota BPK		- Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
	15	Santunan Kematian bagi Masyarakat Kurang Mampu	☑	- Urusan Bidang Sosial	
	16	Insentif Marbot		- Sekretariat Daerah	
	17	Insentif Guru TKA dan TPA		- Urusan Bidang Pendidikan Sekretariat Daerah	
	18	Meningkatkan SDM kaum Perempuan, Milenial, Penyandang Disabilitas dalam bidang Seni, Budaya dan Pariwisata	☑	- Urusan Kebudayaan - Urusan Pemberdayaan Perempuan - Urusan Perlindungan Anak - Urusan Kepemudaan dan Olahraga - Urusan Pariwisata	
	19	Pemberian Beasiswa bagi santri dan pelajar yang berprestasi		- Urusan Pendidikan - Sekretariat Daerah	
	20	Mengupayakan Pemekaran Wilayah Desa dan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	☑	- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Sekretariat Daerah	☑
	21	Mengupayakan Melepas Sebagian Kawasan Hutan menjadi Fasilitas Umum dan Sosial di Loksado		- Urusan Pertanahan	☑

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Tabel III-6 Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Tahun 2025-2029

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
SEJAHTERA	MISI PEMBANGUNAN 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal						
		TUJUAN 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	
			Meningkatnya Efisiensi dan Produktivitas Investasi		ICOR	Nilai	
				Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Daerah	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal	%	Peningkatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha
				Meningkatnya Kualitas Data dan Pelaporan Penanaman Modal di Daerah	Persentase Pelaku Usaha yang mempunyai LKPM sesuai standar	%	
				Meningkatnya iklim usaha dan investasi di daerah	Persentase Potensi Investasi Daerah yang Terealisasi	%	
				Meningkatnya ketersediaan rencana detail tata ruang sebagai acuan pengendalian dan pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan	Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR	%	
			Menguatnya Struktur dan Rantai Nilai Ekonomi Daerah		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	
					Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	
					Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	%	
					% kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif	%	
				Meningkatnya akses dan pemanfaatan sarana produksi oleh pelaku usaha pertanian	Persentase Kelompok tani yang memanfaatkan sarana produksi pertanian	%	Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Terpadu
				Meningkatnya akses dan pemanfaatan prasarana produksi oleh pelaku usaha pertanian	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi pertanian	%	
				Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia pertanian	Persentase Kelompok Tani Kelas Madya	%	
				Meningkatnya efektivitas pengelolaan usaha peternakan melalui sistem perlindungan dan pengendalian kesehatan ternak	% Populasi Ternak Yang Terlindungi	%	
				Meningkatnya penerapan sistem perlindungan usaha tani yang mendukung keberlanjutan produksi	% luas areal pertanian yang terlindungi	%	

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan produk hilir hasil pertanian untuk memperkuat nilai tambah ekonomi.	Jumlah produk hilir unggulan	Jumlah	
				Meningkatnya produktivitas usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil	Persentasi peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan skala usaha mikro kecil	%	
				Meningkatnya akses produk perikanan ke pasar	Persentasi peningkatan produk perikanan yang terakses pasar	%	
				Meningkatnya produktivitas usaha perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap nelayan kecil	Ton	
				Meningkatnya produktivitas usaha perikanan budidaya.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	
				Meningkatnya kapasitas dan peran kelompok masyarakat dalam pengawasan kawasan perikanan umum daratan	Jumlah POKMASWAS yang dibina	Kelompok	
				Meningkatnya Jumlah dan Diversifikasi Daerah Tujuan Ekspor	Persentase Peningkatan Jumlah Daerah Tujuan Ekspor	%	
				Meningkatnya Kualitas dan Kepatuhan Sarana Distribusi Perdagangan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI)	% Kesesuaian Sarana Distribusi Perdagangan dengan Standar SNI	%	
				Meningkatnya Tertib Niaga	Persentase Tertib Niaga	%	
				Meningkatnya Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	% Pertumbuhan Nilai Produksi	%	
				Meningkatnya Pengembangan dan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) Unggulan	% Peningkatan IKM Naik Kelas	%	
				Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan UMKM	% Usaha Mikro Formal	%	
				Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro	% Peningkatan Volume Omset Usaha Mikro	%	
				Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	
				Popularitas Pariwisata Meningkat	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	
				Daya Saing Pelaku Ekraf Meningkat	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	%	
				Terimplementasinya kebijakan strategis perekonomian dan program pembangunan daerah	% Kebijakan strategis perekonomian dan pembangunan daerah yang terlaksana	%	

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya kinerja dan cakupan pelayanan jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas lahan pertanian	Persentase Daerah Irigasi yang terlayani	%	
			Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Desa		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	
					Indeks Risiko Bencana	Indeks	
					Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	
				Peningkatan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Kegiatan Usaha Terhadap Izin Lingkungan	%	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Daerah
				Peningkatan efektivitas pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase lokasi badan air dengan status memenuhi baku mutu	%	
				Peningkatan efektivitas pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu	%	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH yang Tersedia	%	
				Menurunnya Volume Sampah Yang Masuk ke TPA	Persentase Rata-rata Sampah Yang Masuk ke TPA	%	
				Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan sampah	%	
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup	%	
				Meningkatnya kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentasi Wilayah Dengan Mitigasi Bencana Yang Baik	%	
				Meningkatnya Kualitas Penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	
				Meningkatnya kualitas penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentasi Penanganan Pasca Bencana	%	
				Meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum yang aman dan nyaman	Persentase peningkatan pengguna jasa angkutan penumpang umum di bidang transportasi darat	%	
				Meningkatnya kelayakan dan kenyamanan fasilitas terminal dalam mendukung pelayanan transportasi darat	Presentese terminal Tipe C yang layak	%	

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya keamanan dan keselamatan penyelenggaraan transportasi bagi pengguna dan masyarakat	Rasio Kejadian kecelakaan Transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	
				Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerangan Jalan Umum	Persentase ruas jalan yang memiliki LPJU sesuai standar	%	
				Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan yang mantap dan berfungsi mendukung konektivitas wilayah	Persentase Jalan dan Jembatan dengan Kondisi Mantap	%	
				Meningkatnya kelaikan dan keberfungsian drainase dan trotoar	Persentase prasarana dalam kondisi baik	%	
				Meningkatnya kondisi bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi layanan publik	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	
				Meningkatnya kondisi wilayah yang terlindungi dari potensi daya rusak air melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu	Persen Daerah Aman dari Daya Rusak Air	%	
				Meningkatnya Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh yang ditangani untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	%	
MANDIRI	MISI PEMBANGUNAN 2 : Membangun Masyarakat yang Berdaya, Sejahtera, dan Inklusif						
		TUJUAN 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Sosial Masyarakat			Persentase Penduduk Miskin	%	
					Gini Rasio	Nilai	
			Akselerasi Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Kemandirian Desa		Pendapatan Perkapita	Juta Rp	
					Persentase Desa Mandiri	%	
				Daya Saing Pelaku Ekonomi Kreatif Meningkat	% Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	%	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kemandirian Desa
				Meningkatnya Minat Pemuda dalam berwirausaha	% Wirausaha Mandiri	%	
				Meningkatnya Aktivitas Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	% RT Miskin yang mendapatkan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	%	

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya Kualitas Layanan Dasar Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitas Layanan Pendidikan	%	
					Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitas Layanan Kesehatan	%	
				Meningkatnya Pengembangan Produk Unggulan Desa melalui Program OVOP	Persentase desa yang memiliki minimal 1 produk unggulan yang dikembangkan	%	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Dasar Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitas Layanan Pendidikan	%	
				Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Usaha BUMDesa dalam Mendukung Perekonomian Desa	Persentase BUMDesa yang mencatatkan Laba bersih setiap tahun	%	
			Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Persentase PPKS yang Mandiri		
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat	Persentase Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilakukan sesuai standar	%	Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat	Persentase penerima bantuan rehabilitasi sosial yang tepat sasaran	%	
				Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang diberdayakan	%	
				Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan	%	
				Meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	
				Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas pasokan air bersih melalui jaringan perpipaan dan nonperpipaan	Jumlah debit air yang didistribusikan	lt/detik	
				Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	
				Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Pasca Bencana dan Terdampak Relokasi	Persentase Pemenuhan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Korban Bencana dan Relokasi	%	
				Meningkatnya Aktivitas Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapatkan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	%	
				Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya jaminan keamanan pangan bagi masyarakat	Persentase Keamanan Pangan	%	
				Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan	Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	%	
				Meningkatnya pemberdayaan keluarga dalam memperkuat ketahanan dan meningkatkan kesejahteraan	Persentase Kelompok Terbina	%	
				Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Komoditas Bahan Pokok	%	
			Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Produktif.		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	
				Meningkatnya Kesempatan Kerja	% Tingkat Kesempatan Kerja	%	Pembukaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
				Meningkatnya Kualitas Tenaga kErja	% Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	
				Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	% Tenaga Kerja yang ditempatkan sesuai kompetensinya	%	
				Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	% Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	%	
SEJAHTERA & MANDIRI	MISI PEMBANGUNAN 3 : Mewujudkan Pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter						
		TUJUAN 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata		Umur Harapan Hidup (SP2020)	Umur	
				Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Pemenuhan Gizi	Prevalensi Balita Wasting	%	Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan Berorientasi Pada Upaya Preventif
				Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan Pemenuhan Gizi	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	%	
				Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus Penyakit	%	
				Meningkatnya Sarpras, Faskes yang Memenuhi Standar	Persentase Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar	%	
				Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan	Angka Kunjungan (Visit Rate)	%	
					Persentase Desa Integrasi Layanan Primer (Desa ILP)	%	

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga ber Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	%	
				Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pelaksanaan program keluarga berencana	% cakupan KB Aktif	%	
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Merata		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	
					Harapan Lama Sekolah	Tahun	
					Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki nilai Rapor Berkategori Baik	%	
				MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN YANG LAYAK DAN BERKUALITAS	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkondisi Baik	%	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Untuk SDM Unggul
				MENINGKATNYA KESEMPATAN PESERTA DIDIK UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan Sekolah	%	
				MENINGKATNYA MUTU KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	%	
				MENINGKATNYA KUALITAS PESERTA DIDIK	Nilai Kemampuan Literasi	Skor	
					Nilai Kemampuan Numerasi	Skor	
					Persentase Peserta Didik yang Berprestasi	%	
				MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERKUALITAS	Rata-rata Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi di Masing-Masing Sekolah	%	
				MENINGKATNYA KUALITAS PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	Persentase Kurikulum yang Dikembangkan	%	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	%	
				Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Jumlah partisipasi masyarakat dalam minat baca	%	
			Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni, Setara dan Inklusif		Indeks Harmoni	Indeks	
					Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	
				MENINGKATNYA PELESTARIAN BUDAYA LOKAL	Persentase Budaya Lokal yang Diikutsertakan Dalam Festival	%	

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				MENINGKATNYA PARTISIPASI PELAKU SENI DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH	Persentase Pelaku Seni yang Aktif Dalam Pelestarian Budaya	%	Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan, dan Kerukunan Warga
				MENINGKATNYA PELESTARIAN OBYEK WARISAN BUDAYA	Persentase Obyek Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	
				MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN SEJARAH	Persentase Kegiatan Pembinaan Sejarah yang Terlaksana Sesuai Standar	%	
				Meningkatnya Pemahaman nilai-nilai Kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM	Persentase masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM yang baik (nilai post test lebih dari 70)	%	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan Ketahanan Ekososbud	Persentase penyelenggaraan kegiatan Ketahanan Ekososbud	%	
				Meningkatnya efektivitas deteksi dini potensi konflik di masyarakat	Persentase Deteksi Dini Potensi Konflik	%	
				Meningkatnya Partisipasi Politik di Masyarakat	Persentase partai politik yang berkontribusi pada pendidikan politik di masyarakat	%	
				Meningkatnya Kapasitas dan kemandirian organisasi masyarakat	Persentase organisasi masyarakat yang aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan	%	
				Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender	% ARG	%	Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal
				Meningkatnya efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase penyelesaian kasus kekerasan perempuan	%	
				Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek kehidupan	% Penurunan kekerasan anak	%	
MENGAYOMI & TEKNOLOGI	MISI PEMBANGUNAN 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital						
		TUJUAN 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah		Nilai SAKIP	Nilai	
					Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	
					SPIP Terintegrasi	Level	

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	% keselarasan antara RKPD dengan RPJMD (sasaran, indikator, program dan kegiatan)	%	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Keuangan Daerah
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	% keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	
				Meningkatnya pencapaian pelaksanaan program Pembangunan Daerah	% pelaksanaan program yang tercapai (Program keseluruhan)	%	
				Meningkatnya pencapaian kinerja PD	% PD yang kinerjanya baik (IKU Renstra PD)	%	
				Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan ditindaklanjuti	%	
				Meningkatnya inovasi daerah	Persentase peningkatan inovasi daerah	%	
				Meningkatnya pemanfaatan hasil riset	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti	%	
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Penganggaran	Persentase kesalahan pembebanan rekening belanja	%	
				Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja	%	
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Laporan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	%	
				Penatausahaan BMD sesuai ketentuan	persentase database BMD sesuai regulasi	%	
				Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat	% Wajib Pajak yang taat Pajak	%	
				Meningkatnya Objek Pendapatan Baru	% Pertumbuhan Pendapatan Baru	%	
				Meningkatnya Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Auditor Eksternal	% Temuan Auditor Eksternal (BPK/BPKP) yang ditindaklanjuti	%	
				Meningkatnya Efektivitas Audit/Evaluasi/Reviu Keuangan oleh APIP	% PD dengan Rekomendasi hasil Audit/Evaluasi/Reviu Keuangan yang ditindaklanjuti >90%	%	
				Meningkatnya Kualitas Reviu Laporan Kinerja Pemda	% Reviu LKj Pemda yang direviu sesuai dengan Permenpan 53/2014	%	
				Meningkatnya Efektivitas Evaluasi AKIP Laporan Kinerja PD	% Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal AKIP yang ditindaklanjuti PD	%	
				Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda	Nilai IEPK	Nilai	
				Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda	% PD yang Berhasil Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	%	

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal Perangkat Daerah	% PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai Ketentuan	%	
				Meningkatnya Efektivitas Pemantauan Program Anti Korupsi	Nilai / Indeks MCP	Nilai	
				Meningkatnya Komitmen Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas	% PD yang Berhasil diusulkan ke penilaian ZI Nasional	%	
				Meningkatnya Kompetensi Auditor	% Auditor yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Ketentuan/Kebutuhan	%	
				Meningkatnya Profesionalitas APIP	% PKPT yang Terlaksana Sesuai Rencana dan Tepat Waktu	%	
				Meningkatnya Ketersediaan, Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	%	
				Meningkatnya Digitalisasi Arsip	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip	%	
				Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	
				Meningkatnya kematangan Organisasi UKPBJ	Persentase Laporan Kematangan Organisasi UKPBJ	%	
				Terimplementasinya kebijakan Strategis Perekonomian dan Program Pembangunan Daerah	Persentase kebijakan strategis perekonomian dan pembangunan daerah yang terlaksana		
				Meningkatnya ketepatan standar layanan publik perangkat daerah	Persentase PD dengan standar pelayanan publik yang sesuai kebutuhan	%	
				Meningkatnya Penataan Kelembagaan berbasis kinerja	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	
				Meningkatnya Fasilitasi Pelaporan Kinerja PD	Persentase PD yang nilai SAKIP minimal A	%	
			Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Manajemen SDM Aparatur		Indeks Sistem Merit	Indeks	
				Meningkatnya ASN yang berkinerja baik	Persentase ASN yang bekinerja baik	%	Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Manajemen ASN
				Meningkatnya Ketepatan Penempatan ASN	Persentase penempatan Pegawai sesuai Kompetensi dan Potensinya	%	
				Meningkatnya ASN yang mengembangkan Kompetensi	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi	%	
			Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Pemerintah (Seluruh Perangkat Daerah)	Nilai	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Prima
			Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	
				Meningkatnya ketersediaan dan keandalan layanan teknologi informasi dan komunikasi pada perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menerima Layanan TIK sesuai standar	%	Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya pusat data terintegrasi	Persentase data yang terintegrasi	%	
				Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan publik yang terintegrasi	Persentase layanan publik yang terintegrasi	%	
				Meningkatnya keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat	Persentase informasi yang mudah diakses	%	
				Meningkatnya pemerataan akses data dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat	Persentase data yang mudah diakses	%	
				Meningkatnya ketahanan dan keandalan tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Nilai	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Berdasarkan Program Prioritas yang dicanangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, dilakukan sinkronisasi antara program prioritas dengan program nomenklatur yang ada pada Kepmendagri 3406, berikut merupakan hasil sinkronisasi pemetaan program prioritas pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 :

Tabel III-7 Sinkronisasi Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPENDAGRI 3406	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Penanaman Moodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Penanaman Moodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Penanaman Moodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Terpadu	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pertanian
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pertanian
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perindustrian
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perindustrian
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEPMENDAGRI 3406	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pariwisata
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian pada Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Bagian pada Sekretariat Daerah
Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perhubungan
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kemandirian Desa	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kepemudaan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEMENDAGRI 3406	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian pada Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian pada Sekretariat Daerah
Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Sosial
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pangan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perdagangan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian pada Sekretariat Daerah
Pembukaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Tenaga Kerja
Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan Berorientasi Pada Upaya Preventif	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kesehatan
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Untuk SDM Unggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pendidikan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pendidikan
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Perpustakaan
Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan, dan Kerukunan Warga	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kebudayaan
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kebudayaan
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEMENDAGRI 3406	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Keuangan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian pada Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian pada Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Seluruh Urusan
Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Manajemen ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kepegawaian
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Prima	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PRIORITAS DAERAH	SINKRONISASI PROGRAM KEMENDAGRI 3406	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Seluruh Perangkat Daerah
Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Statistik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Persandian

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

III.7 Keselarasan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

A. Keselarasan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045

Dalam rangka menjamin kesinambungan, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 telah dilakukan secara selaras dengan arah kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2045. Setiap misi RPJMD dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitannya terhadap misi-misi strategis dalam RPJPD, guna memastikan bahwa pembangunan lima tahunan berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah.

Misi pertama RPJMD, Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal, memiliki keselarasan yang kuat dengan visi jangka panjang. Misi ini secara langsung mendukung agenda transformasi ekonomi yang berdaya saing. Penekanan pada aspek "berkelanjutan" dan "berbasis potensi lokal" juga selaras dengan arah kebijakan jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata, penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta menjamin kesinambungan pembangunan. Misi ini menjadi payung bagi tujuan-tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan struktur ekonomi lokal, sekaligus penyiapan infrastruktur pendukungnya.

Misi kedua RPJMD, yakni Membangun Masyarakat yang Berdaya, Sejahtera, dan Inklusif, berfokus pada pembangunan aspek sosial dan kemanusiaan. Misi ini memiliki keterkaitan erat dengan agenda jangka panjang untuk mewujudkan transformasi sosial yang unggul dan berkeadilan. Penekanan pada aspek "berdaya", "sejahtera", dan "inklusif" dirumuskan untuk mendukung pencapaian ketahanan sosial budaya dan menjadi strategi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan.

Selanjutnya, misi ketiga RPJMD, Mewujudkan Pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter, menekankan pada peningkatan kualitas modal manusia sebagai pilar utama pembangunan. Misi ini secara spesifik menjabarkan dan memperkuat agenda transformasi sosial yang unggul dan

berkeadilan dalam RPJPD. Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berakhlak mulia, yang merupakan prasyarat mutlak bagi daya saing daerah di masa depan.

Adapun misi keempat RPJMD, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital, mendukung secara langsung agenda jangka panjang mengenai transformasi tata kelola yang berdampak. Melalui misi ini, Pemerintah Daerah menegaskan arah reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, keseluruhan misi dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 telah dirancang untuk secara strategis mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Keselarasan antara RPJMD dan RPJPD ini menjadi fondasi utama dalam memastikan pembangunan daerah yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

Tabel III-8 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan		RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
M.1	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal	M.1	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berkeadilan
		M.4	Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Daerah
		M.6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
		M.7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan)
		M.8	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan
M.2	Membangun Masyarakat yang Berdaya, Sejahtera, dan Inklusif	M.1	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berkeadilan
		M.2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing
M.3	Mewujudkan Pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter	M.1	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berkeadilan
		M.5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
M.4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital,	M.3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berdampak

Sumber : Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045, diolah Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

B. Keselarasan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Dalam menyusun arah pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan senantiasa memastikan bahwa tujuan pembangunan daerah selaras dengan arah pembangunan provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Keselarasan ini menjadi landasan penting dalam mendukung pencapaian pembangunan yang terintegrasi antara kabupaten dan provinsi, sekaligus

memperkuat efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lintas wilayah.

Tujuan pertama RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkelanjutan (T.1), dirumuskan secara komprehensif untuk mendukung pencapaian beberapa tujuan Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan ini selaras dengan upaya provinsi untuk menguatnya fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan (Tujuan 3.1). Selain itu, penekanan pada aspek "berkelanjutan" dalam tujuan kabupaten ini juga secara langsung mendukung terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan (Tujuan 2.1), meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan iklim (Tujuan 4.1), serta menurunnya risiko bencana daerah (Tujuan 4.2). Hal ini menunjukkan sinergi kuat dalam memadukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan infrastruktur dan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, tujuan kedua RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Sosial Masyarakat (T.2), sejalan dengan tujuan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menguatnya fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan (Tujuan 3.1) serta mewujudkan perekonomian daerah yang merata (Tujuan 3.2). Keselarasan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk menerjemahkan transformasi ekonomi ke dalam penguatan kemandirian masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan ketahanan sosial yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan.

Pada aspek pembangunan sumber daya manusia, tujuan ketiga RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (T.3), selaras dengan tujuan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menguatnya fondasi transformasi sosial (Tujuan 1.1). Tujuan ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kapasitas sosial masyarakat sebagai prasyarat utama pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Adapun tujuan keempat RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) (T.4), merupakan bagian integral dari upaya transformasi kelembagaan yang juga menjadi prioritas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tertuang dalam Tujuan 5.1 yaitu menguatnya fondasi

transformasi tata kelola pemerintahan. Tujuan ini mencerminkan orientasi Pemerintah Kabupaten terhadap penciptaan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, keempat tujuan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 telah disusun secara strategis dan terkoordinasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Keselarasan ini memperkuat posisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian yang aktif dan konstruktif dalam mendorong pembangunan daerah yang sinergis, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel III-9 Keselarasan Tujuan Provinsi Kalimantan Selatan dan Tujuan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan Provinsi Kalimantan Selatan		Tujuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
2.1	Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan	T.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkelanjutan
3.1	Menguatnya fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan		
4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim		
4.2	Menurunnya Risiko Bencana Daerah		
3.1	Menguatnya fondasi transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	T.2	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Sosial Masyarakat
3.2	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Merata		
1.1	Menguatnya Fondasi Transformasi Sosial	T.3	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5.1	Menguatnya Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	T.4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, diolah Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Dalam rangka menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, penyusunan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 telah diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Keselarasan ini mencerminkan upaya konkret untuk menciptakan sinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, lintas wilayah, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah provinsi.

Sasaran-sasaran pembangunan ekonomi dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mencakup Meningkatnya Efisiensi dan Produktivitas Investasi (1.1) dan Menguatnya Struktur dan Rantai Nilai Ekonomi Daerah (1.2), selaras dengan sasaran provinsi untuk Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah (3.1.1) dan Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik (3.1.2). Selanjutnya, sasaran Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Infrastruktur

Desa (1.3) secara langsung mendukung beberapa sasaran Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Meningkatnya Cakupan dan Mutu Layanan dan Sarana Prasarana (2.1.1), Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan (4.1.1), serta Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana (4.2.1). Hal ini menunjukkan kesamaan fokus dalam mendorong transformasi ekonomi yang didukung oleh infrastruktur adaptif dan kelestarian lingkungan.

Pada pilar pembangunan sosial-ekonomi, sasaran Akselerasi Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Kemandirian Desa (2.1) selaras dengan sasaran provinsi Meningkatnya Taraf Kehidupan dan Perekonomian dan Masyarakat Desa (3.2.2). Sasaran Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (2.2) berkontribusi langsung pada sasaran provinsi Menurunnya Kemiskinan (1.1.3). Sementara itu, sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Produktif (2.3) secara spesifik mendukung sasaran provinsi Menurunnya Pengangguran (3.2.1). Keselarasan ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di tingkat kabupaten diarahkan untuk mendukung inklusivitas pembangunan ekonomi provinsi.

Selanjutnya, sasaran pembangunan SDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfokus pada Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata (3.1) dan Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Merata (3.2), secara terpadu mendukung sasaran provinsi terkait Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (1.1.1). Adapun sasaran Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni, Setara dan Inklusif (3.3) sejalan dengan sasaran provinsi untuk Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia (1.1.2). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial di kabupaten diarahkan untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar dan penguatan modal sosial-budaya.

Sementara itu, sasaran-sasaran dalam pilar tata kelola pemerintahan, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah (4.1) dan Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Manajemen SDM Aparatur (4.2), bersesuaian dengan sasaran provinsi dalam Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan Profesionalitas ASN (5.1.1). Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima (4.3) dan Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif (4.4) mendukung penuh sasaran provinsi Meningkatnya Tata Kelola

Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital (5.1.2). Ini mencerminkan arah kebijakan kabupaten dalam mempercepat reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.

Dengan demikian, keseluruhan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dirumuskan untuk berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Keselarasan ini menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang harmonis, terpadu, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Tabel III-10 Keselarasan Sasaran Provinsi Kalimantan Selatan dan Sasaran Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD Prov. Kalimantan Selatan		Sasaran RPJMD Kab.Hulu Sungai Selatan	
1.1.1	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	3.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata
		3.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Merata
1.1.2	Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia	3.3	Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni, Setara dan Inklusif
1.1.3	Menurunnya Kemiskinan	2.2	Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
2.1.1	Meningkatnya Cakupan dan Mutu Layanan dan Sarana Prasarana	2.3	Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Desa
4.1.1	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan		
4.2.1	Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana		
3.1.1	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	1.1	Meningkatnya Efisiensi dan Produktivitas Investasi
3.1.2	Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik	1.2	Menguatnya Struktur dan Rantai Nilai Ekonomi Daerah
3.2.1	Menurunnya Pengangguran	2.3	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Produktif.
3.2.2	Meningkatnya Taraf Kehidupan dan Perekonomian dan Masyarakat Desa	2.1	Akselerasi Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Kemandirian Desa
5.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan Profesionalitas ASN	4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah
		4.2	Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Manajemen SDM Aparatur
5.1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital	4.3	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima
		4.4	Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, diolah Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

C. Keselarasan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merumuskan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dengan mengacu dan mengintegrasikan arah serta sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Keselarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat kabupaten dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target-

target pembangunan nasional, serta mendukung Indonesia dalam mewujudkan visi menuju negara maju yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Sasaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada aspek ekonomi, yang mencakup Meningkatnya Efisiensi dan Produktivitas Investasi (1.1) serta Menguatnya Struktur dan Rantai Nilai Ekonomi Daerah (1.2), selaras dengan sasaran nasional dalam Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju (Sasaran Nasional 1). Hal ini mencerminkan komitmen daerah dalam mengembangkan iklim investasi yang produktif dan memperkuat sektor unggulan berbasis potensi lokal, yang secara strategis diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan nasional.

Pada aspek pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, sasaran daerah yang dirumuskan secara terpadu, yaitu Akselerasi Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Kemandirian Desa (2.1), Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (2.2), dan Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Produktif (2.3), berkontribusi terhadap pencapaian sasaran nasional untuk Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang (Sasaran Nasional 3). Keselarasan ini menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan yang menitikberatkan pada inklusivitas pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam bidang pembangunan manusia, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata (3.1), Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Merata (3.2), serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni, Setara dan Inklusif (3.3). Ketiga sasaran ini secara kolektif mendukung sasaran nasional dalam Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat (Sasaran Nasional 4). Ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM unggul di daerah menjadi bagian integral dari transformasi kualitas manusia Indonesia secara nasional, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun karakter dan ketahanan sosial.

Di sisi lain, sasaran Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Desa (1.3) selaras dengan upaya nasional dalam Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission (Sasaran Nasional 5). Hal ini menegaskan kontribusi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam agenda pembangunan hijau dan penguatan ketahanan iklim melalui

penyediaan infrastruktur ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Adapun seluruh sasaran dalam pilar tata kelola pemerintahan, yang mencakup Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah (4.1), Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Manajemen SDM Aparatur (4.2), Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima (4.3), dan Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif (4.4), turut mendukung sasaran nasional Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Dunia Internasional Meningkat (Sasaran Nasional 2). Penguatan kapasitas institusi pemerintahan yang profesional, transparan, dan responsif di daerah menjadi fondasi penting dalam memperkuat citra dan kredibilitas Indonesia di tingkat global.

Dengan demikian, seluruh sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dirancang secara sistematis agar tidak hanya menjawab kebutuhan pembangunan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Sinergi ini merupakan wujud nyata dari prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara terintegrasi.

Tabel III-11 Keselarasan Sasaran RPJMN dan RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran Pembangunan Nasional		Sasaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
1	Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju	1.1	Meningkatnya Efisiensi dan Produktivitas Investasi
		1.2	Menguatnya Struktur dan Rantai Nilai Ekonomi Daerah
2	Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Dunia Internasional Meningkat	4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah
		4.2	Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Manajemen SDM Aparatur
		4.3	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima
		4.4	Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif
3	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	2.1	Akselerasi Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Kemandirian Desa
		2.2	Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
		2.3	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Produktif.
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	3.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata
		3.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Merata
		3.3	Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni, Setara dan Inklusif
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	1.3	Meningkatnya Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Desa

Sumber : Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, diolah Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Sasaran Pembangunan RPJMN tahun 2025-2029 berfokus pada : penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan serta diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. RPJMN 2025-2029 disusun

berlandaskan dengan RPJPN 2025-2045 dan Visi Misi Presiden yang kemudian diterjemahkan ke dalam strategi-strategi pembangunan :

- 1. Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan
- 2. Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3. Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan
- 4. Transformasi Sektor Publik Sebagai Pengungkit

Tabel III-12 Keselarasan Strategi RPJMN dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

No.	Strategi RPJMN 2025-2029	No.	Strategi RPJMD HSS 2025-2029
1	Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan	2.1	Akselerasi pengembangan ekonomi perdesaan yang berdaya saing melalui intervensi pada rantai nilai komoditas unggulan dan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal.
		2.2	Penyelenggaraan program perlindungan sosial dan pemberdayaan yang terintegrasi dan presisi dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama
		2.3	Peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta fasilitasi pasar kerja yang efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyedia kerja
2	Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	3.1	Penguatan sistem layanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif serta percepatan penurunan stunting dan Angka Kematian Ibu/Bayi
		3.2	Peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang, didukung oleh peningkatan kompetensi dan distribusi tenaga pendidik yang merata serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai
		3.3	Penguatan modal sosial dan kerukunan masyarakat melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan, peningkatan harmoni sosial, kesetaraan gender, dan pembangunan yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat
3	Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	1.1	Peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, promosi potensi daerah secara terarah, dan fasilitasi perizinan berusaha yang cepat dan transparan.
		1.2	Peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, promosi potensi daerah secara terarah, dan fasilitasi perizinan berusaha yang cepat dan transparan.
		1.3	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur dasar perdesaan yang terintegrasi serta penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk menopang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
4	Transformasi Sektor Publik Sebagai Pengungkit	4.1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
		4.2	Pengembangan manajemen talenta dan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan profesionalisme, peningkatan kompetensi, dan kinerja aparatur yang berintegritas
		4.3	Penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui penyederhanaan prosedur, inovasi layanan, dan penerapan standar pelayanan yang berkualitas

No.	Strategi RPJMN 2025-2029	No.	Strategi RPJMD HSS 2025-2029
		4.4	Percepatan pembangunan ekosistem digital pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang cerdas dan pelayanan publik yang inklusif.

Sumber : Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, diolah Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Penyusunan strategi pembangunan daerah tidak terlepas dari arah dan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional, menyelaraskan strategi pembangunan jangka menengahnya secara sistematis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dukungan Kabupaten HSS terhadap Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan nasional direalisasikan melalui pendekatan tiga pilar yang komprehensif. Pertama, melalui akselerasi pengembangan ekonomi perdesaan (Strategi 2.1) yang berfokus pada penguatan kapasitas pelaku usaha lokal. Kedua, melalui penyelenggaraan program perlindungan sosial yang terintegrasi dan presisi (Strategi 2.2) dengan memanfaatkan DTSEN untuk menjamin ketepatan sasaran. Ketiga, melalui peningkatan relevansi pendidikan vokasi dan fasilitasi pasar kerja (Strategi 2.3) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja produktif. Pendekatan terpadu ini sejalan dengan prinsip inklusivitas dalam strategi nasional.

Dalam hal Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kabupaten HSS merancang strategi yang holistik. Hal ini mencakup penguatan sistem layanan kesehatan dasar (Strategi 3.1), dengan fokus pada upaya promotif, preventif, dan percepatan penurunan stunting. Di sisi pendidikan, dilakukan peningkatan mutu dan pemerataan akses (Strategi 3.2), yang didukung oleh peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Rangkaian ini disempurnakan dengan penguatan modal sosial (Strategi 3.3) untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkarakter, yang esensial bagi pembangunan SDM unggul.

Untuk mendukung Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, Kabupaten HSS mengimplementasikan strategi ekonomi yang terintegrasi. Fondasinya adalah peningkatan iklim investasi (Strategi 1.1) melalui penyederhanaan regulasi dan fasilitasi perizinan. Hal ini didukung oleh pengembangan struktur dan rantai nilai ekonomi daerah (Strategi 1.2) yang berbasis sektor unggulan. Seluruh upaya pertumbuhan tersebut dibingkai dalam prinsip keberlanjutan melalui peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur dasar perdesaan (Strategi 1.3), yang secara eksplisit mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Transformasi Sektor Publik, Kabupaten HSS menetapkan strategi reformasi birokrasi yang komprehensif. Upaya ini mencakup pemantapan akuntabilitas kinerja (Strategi 4.1) melalui SAKIP dan SPIP, serta pengembangan manajemen talenta ASN berbasis sistem merit (Strategi 4.2). Pada sisi pelayanan, ditetapkan strategi penyelenggaraan pelayanan publik yang prima (Strategi 4.3). Seluruh transformasi ini diakselerasi melalui percepatan pembangunan ekosistem digital pemerintahan yang inklusif (Strategi 4.4), guna membentuk tata kelola yang dinamis dan adaptif.

Dengan strategi-strategi tersebut, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara langsung memperkuat dan mempercepat tercapainya sasaran strategis dalam RPJMN. Keselarasan ini mencerminkan komitmen daerah untuk menjadi bagian aktif dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

D. Keselarasan Program Prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Keselaran program prioritas pembangunan merupakan prinsip penting dalam memastikan keterpaduan arah kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. RPJMN sebagai pedoman pembangunan nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai acuan pembangunan regional, serta RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dokumen pembangunan daerah harus terintegrasi agar pelaksanaan pembangunan berjalan selaras, efektif, dan berkesinambungan. Melalui keselarasan ini, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan daerah, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional secara sinergis.

Gambar III-13 Program Prioritas Prabowo - Gibran



Sumber: Lampiran I, Perpres Nomor 12 Tahun 2025

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan delapan program prioritas Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran melalui penyesuaian arah kebijakan dan program daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, dukungan ditunjukkan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, antara lain berupa penyelenggaraan program gizi bagi balita, ibu hamil, dan peserta didik, pembangunan serta rehabilitasi sekolah, serta penguatan layanan kesehatan yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Dukungan tersebut juga diwujudkan dalam kesiapan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah unggul maupun sekolah rakyat, serta lahan operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pada bidang ekonomi, program peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan direspons melalui kebijakan daerah yang berfokus pada penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata, serta pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sejalan dengan agenda pemerintah pusat, penguatan daya beli masyarakat dan percepatan pengurangan kemiskinan dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

Dukungan pada bidang infrastruktur diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur desa, penyediaan rumah bersanitasi layak, serta peningkatan aksesibilitas transportasi di wilayah pelosok, yang selaras dengan kebijakan daerah mengenai pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan pelayanan dasar. Adapun agenda nasional yang berada di luar kewenangan langsung kabupaten, seperti peningkatan gaji aparatur negara serta pembentukan Badan Penerimaan Negara, didukung secara tidak langsung melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, transformasi digital, serta penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif di tingkat daerah. Dengan demikian, dukungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap program PHTC secara keseluruhan mencerminkan adanya keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Tabel III-13 Dukungan Program Prioritas Hulu Sungai Selatan terhadap PHTC Prabowo - Gibran

No.	8 PHTC Prabowo - Gibran	Dukungan Program Prioritas Hulu Sungai Selatan
1	Memberi Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil	• Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan Berorientasi Pada Upaya Preventif • Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Untuk SDM Unggul
2	Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah dan Nasional	• Peningkatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha • Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Terpadu
3	Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan gratis, menunjukkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS Lengkap berkualitas di Kabupaten	• Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan Berorientasi Pada Upaya Preventif
4	Membangun Sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	• Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Untuk SDM Unggul
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	• Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kemandirian Desa • Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial • Pembukaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
6	menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan) TNI/POLRI dan pejabat negara	• Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kemandirian Desa • Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Keuangan Daerah • Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Manajemen ASN
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur Desa, BLT dan menyediakan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan	• Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Daerah
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara terhadap Produk Domestik (PDB) ke 23%	• Pembukaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja • Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kemandirian Desa

Sumber: Lampiran I, Perpres Nomor 12 Tahun 2025

Dukungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap program prioritas dan janji Gubernur Kalimantan Selatan diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi kewenangan kabupaten sekaligus selaras dengan arah kebijakan RPJMD Hulu Sungai Selatan. Pada bidang pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendukung penguatan akses dan kualitas pendidikan melalui program peningkatan mutu SDM, yang sejalan dengan inisiatif provinsi seperti pengembangan pesantren terpadu dan program kesetaraan Paket A, B, dan C. Pada sektor kesehatan, dukungan diwujudkan melalui peningkatan layanan kesehatan dasar yang berorientasi preventif serta pembangunan infrastruktur penunjang kesehatan, sesuai dengan prioritas provinsi dalam peningkatan akses dan jaminan sosial masyarakat.

Di bidang infrastruktur, dukungan kabupaten difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, peningkatan transportasi lokal, serta penguatan jaringan irigasi, yang sejalan dengan prioritas provinsi dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi dan pelayanan publik di wilayah pelosok. Pada sektor ekonomi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan dukungan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata, yang sejalan dengan program provinsi dalam memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan ekonomi kreatif, serta meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan.

Sementara itu, untuk program berskala besar yang berada di luar kewenangan kabupaten, seperti pembangunan Jembatan Pulau Laut, Pelabuhan Internasional Mekar Putih, Bandara Internasional Syamsudin Noor, dan pembangunan stadion bertaraf internasional, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap mendukung secara tidak langsung melalui sinergi pembangunan daerah, terutama dengan memperkuat konektivitas wilayah, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyiapkan SDM yang mampu mengambil manfaat dari pembangunan tersebut.

Tabel III-14 Dukungan Program Prioritas Hulu Sungai Selatan terhadap Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Janji/Program Prioritas	Dukungan Program Prioritas Kabupaten
1	Pesantren Mode Terpadu	• Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Untuk SDM Unggul • Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga
2	Mendorong Program Paket A, B dan C	• Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Untuk SDM Unggul
3	Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan Kesehatan, serta Jaminan Sosial	• Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Daerah • Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan Berorientasi Pada Upaya Preventif

4	Peningkatan Transportasi Publik ke daerah Pelosok	• Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim Daerah • Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Untuk SDM Unggul
5	Pembangunan Jembatan Pulau Laut	<i>Lokus intervensi diluar kewenangan Kabupaten HSS</i>
6	Pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih	<i>Lokus intervensi diluar kewenangan Kabupaten HSS</i>
7	Mendorong Bandara Internasional Syamsudin Noor	<i>Lokus intervensi diluar kewenangan Kabupaten HSS</i>
8	Meningkatkan Olahraga dan Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional	<i>Lokus intervensi diluar kewenangan Kabupaten HSS</i>
9	Memperkuat Ketahanan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	• Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Terpadu • Pembukaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
10	Meningkatkan Pariwisata dan Kebudayaan	• Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Terpadu

Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, diolah

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

IV.1 Program Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, diperlukan berbagai program yang selain bertujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, juga untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah. Bab ini memuat rencana program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan program didukung oleh penganggaran yang memadai.

Pendanaan pembangunan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan rencana pembangunan guna mencapai visi dan misi RPJMD, serta target pembangunan nasional. Sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sumber pendanaan termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah. Dengan demikian, sub-sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah yang menggunakan APBD diharapkan menjadi stimulus bagi partisipasi aktif unsur non pemerintah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Penentuan program perangkat daerah oleh masing-masing perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, permasalahan pelayanan dan isu strategis perangkat daerah, visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, serta keselarasan dengan rencana pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 yang lebih lanjut akan dijabarkan ke kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel IV-1 Tabel Indikasi Program Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					376.184.254.450,00		399.366.181.280,00		430.128.554.250,00		463.566.841.900,00		500.683.602.600,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					329.886.859.395,00		347.633.488.500,00		375.444.168.100,00		405.479.702.300,00		437.918.078.300,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	329.886.859.395,00	100	347.633.488.500,00	100	375.444.168.100,00	100	405.479.702.300,00	100	437.918.078.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					46.297.395.055,00		51.532.692.780,00		53.784.386.150,00		58.087.139.600,00		62.765.524.300,00	
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan berkualitas	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkondisi Baik (%)	53,90	58,25	62,83	37.898.485.405,00	67,92	42.439.682.100,00	73,00	43.952.747.000,00	76,00	47.468.967.700,00	80,00	51.270.485.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kesempatan Peserta Didik Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan	Angka melanjutkan sekolah (%)	98,57	100	100	5.675.242.300,00	100	6.129.261.800,00	100	6.619.602.900,00	100	7.149.171.500,00	100	7.751.105.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya mutu kelembagaan satuan pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B (%)	68,26	73,58	78,90	353.746.900,00	84,21	382.046.880,00	89,53	390.157.950,00	94,85	421.371.100,00	100	455.081.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Kemampuan Literasi (Skor)	63,31	66	68,50	1.144.223.350,00	71,50	1.234.375.200,00	75	1.366.764.900,00	77,5	1.476.106.500,00	80	1.591.606.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai Kemampuan Numerasi (Skor)	56,39	58,5	61,5		65		67,5		71		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Peserta Didik yang Berprestasi (%)	8,68	8,8	9		9,3		9,5		9,8		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Rata-rata Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersertifikasi di Masing- Masing Sekolah (%)	56,63	60,85	66,75	1.225.697.100,00	71,00	1.347.326.800,00	75,00	1.455.113.400,00	80,00	1.571.522.800,00	85,00	1.697.244.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					0,00		200.000.000,00		900.000.000,00		0,00		0,00	
Meningkatnya kualitas pengembangan kurikulum muatan lokal	Persentase Kurikulum yang Dikembangkan (%)	100	100	100	0,00	100	200.000.000,00	100	900.000.000,00	100	0,00	100	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					485.924.242.115,00		521.182.259.344,00		562.664.369.977,00		607.478.402.806,00		655.880.236.820,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					230.869.928.291,00		249.376.394.038,00		269.326.535.461,00		290.872.658.541,00		314.142.470.458,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	212.834.788.411,00	100	229.898.443.038,00	100	248.290.348.561,00	100	268.153.576.941,00	100	289.605.862.658,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kesesuaian Pendapatan dengan layanan (Puskesmas, RSHB, RSDS)	Persentase kesesuaian klaim dengan layanan (%)	0	80	80	18.035.139.880,00	80	19.477.951.000,00	80	21.036.186.900,00	80	22.719.081.600,00	80	24.536.607.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					254.375.411.024,00		271.040.037.026,00		292.512.729.976,00		315.716.621.363,00		340.779.503.650,00	
Meningkatnya Kesehatan Keluarga dan pemenuhan Gizi	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (%)	96,8	100	100	2.972.103.000,00	100	5.058.810.760,00	100	5.456.907.477,00	100	5.886.880.904,00	100	6.351.223.232,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Balita Wasting (%)	6,4	6,3	6,2		6,10		6		5,9		5,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian penyakit	Persentase Penemuan dan penanganan Kasus Penyakit (%)	100	100	100	901.703.800,00	100	973.840.104,00	100	1.051.747.267,00	100	1.136.075.945,00	100	1.227.077.180,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Sarpras, Faskes yang Memenuhi Standar (Dinkes, RS, Hasan Basry, RS, Daha Sejahtera)	Persentase Ketersediaan Sarpras dan Alkes Sesuai Standar (%)	64,71	65	67,5	21.441.382.800,00	70	16.990.547.024,00	72,5	18.197.844.873,00	75	19.462.935.726,00	77,5	20.832.016.153,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan	Angka kunjungan (visit rate) (%)	100	100	100	58.978.560.200,00	100	64.328.645.016,00	100	69.422.980.707,00	100	74.976.819.164,00	100	80.974.964.691,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Anggaran Pembiayaan Kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa integrasi layanan primer (Desa ILP) (%)	6,75	14,18	14,86		15,54		16,21		16,89		17,57		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya patisipasi masyarakat dalam mengembangkan mutu pelayanan (RS, Hasan Basry dan RS, Daha Sejahtera)	Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat (%)	100	100	100	170.081.661.224,00	100	183.688.194.122,00	100	198.383.249.652,00	100	214.253.909.624,00	100	231.394.222.394,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					557.250.000,00		601.830.000,00		649.976.400,00		701.974.512,00		758.132.470,00	
Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Tingkat kepatuhan terhadap SOP (Compliance rate) (%)	80	100	100	557.250.000,00	100	601.830.000,00	100	649.976.400,00	100	701.974.512,00	100	758.132.470,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					0,00		28.862.500,00		29.181.500,00		29.526.020,00		29.898.102,00	
Meningkatnya Tingkat Kepatuhan keamanan	Persentase Apotek dan Usaha Mikro Obat	0	32	63	0,00	95	28.862.500,00	100	29.181.500,00	100	29.526.020,00	100	29.898.102,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pangan dan Apotek dan UMOT sesuai standar	Tradisional (UMOT) sesuai standar (%)													
	Persentase Tingkat Kepatuhan Keamanan Pangan (%)	0	20	40		60		80		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					121.652.800,00		135.135.780,00		145.946.640,00		157.622.370,00		170.232.140,00	
Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga berperilaku hidup bersih sehat (PHBS) (%)	68,3	65	66	121.652.800,00	67	135.135.780,00	68	145.946.640,00	69	157.622.370,00	70	170.232.140,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					293.724.376.900,00		316.021.932.034,00		348.803.686.225,00		368.934.173.138,00		398.448.906.989,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.000.736.428,00		15.120.795.342,00		16.330.458.597,00		17.636.895.687,00		19.047.847.342,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	80	100	100	14.000.736.428,00	100	15.120.795.342,00	100	16.330.458.597,00	100	17.636.895.687,00	100	19.047.847.342,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					13.677.298.841,00		14.502.531.133,00		23.162.733.624,00		17.241.943.929,00		18.621.299.442,00	
Meningkatnya ketersediaan dan akurasi data sumber daya air berbasis sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan irigasi yang efisien	Jumlah Data SDA yang telah didigitasi (Buah)	0	9	70	987.100.000,00	110	1.066.068.000,00	150	1.151.353.440,00	190	1.243.461.715,00	500	1.342.938.652,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kondisi wilayah yang terlindungi dari potensi daya rusak air melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu	Persentase Daerah Aman dari Daya Rusak Air (%)	15,08	15,75	18,25	7.118.977.840,00	22,15	7.688.496.067,00	26,55	15.803.575.752,00	31,35	8.967.861.813,00	33,15	9.685.290.757,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kinerja dan cakupan pelayanan jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas lahan pertanian	Persentase Daerah Irigasi yang terlayani (%)	70,79	71,3	71,62	5.472.172.251,00	72,12	5.640.994.416,00	72,54	6.092.273.970,00	72,96	6.905.847.502,00	73,38	7.458.315.302,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan	Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan SDA (%)	100	100	100	99.048.750,00	100	106.972.650,00	100	115.530.462,00	100	124.772.899,00	100	134.754.731,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					12.726.106.000,00		13.744.194.480,00		14.843.730.038,00		16.031.228.441,00		17.313.726.717,00	
Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas pasokan air bersih melalui jaringan	Jumlah debit air yang didistribusikan (Liter/Detik)	13	13	13	12.726.106.000,00	13	13.744.194.480,00	13	14.843.730.038,00	13	16.031.228.441,00	13	17.313.726.717,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
perpipaan dan non perpipaan														Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					7.250.854.000,00		7.830.922.320,00		8.457.396.106,00		9.133.987.794,00		9.864.706.818,00	
Meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	85	85,11	85,92	7.250.854.000,00	86,23	7.830.922.320,00	86,53	8.457.396.106,00	86,81	9.133.987.794,00	89	9.864.706.818,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.277.992.000,00		2.460.231.360,00		2.657.049.869,00		2.869.613.858,00		3.099.182.967,00	
Meningkatnya kelaikan dan keberfungsian drainase dan trotoar	Persentase prasarana dalam kondisi baik (%)	61,69	75,13	75,20	2.277.992.000,00	75,27	2.460.231.360,00	75,33	2.657.049.869,00	75,40	2.869.613.858,00	75,67	3.099.182.967,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					117.095.105.865,00		126.462.714.334,00		136.579.731.481,00		147.506.109.999,00		159.306.598.799,00	
Meningkatnya kondisi bangunan gedung pemerintah yang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi layanan publik	Persentase Kualitas bangunan gedung dalam kondisi baik (%)	100	100	100	117.095.105.865,00	100	126.462.714.334,00	100	136.579.731.481,00	100	147.506.109.999,00	100	159.306.598.799,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					124.244.800.000,00		133.454.254.630,00		144.130.595.000,00		155.661.042.600,00		168.113.926.008,00	
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan yang mantap dan berfungsi mendukung konektivitas wilayah	Persentase Jalan dan Jembatan dengan Kondisi Mantap (%)	65,03	61,38	62,33	124.244.800.000,00	63,29	133.454.254.630,00	64,24	144.130.595.000,00	65,20	155.661.042.600,00	66,15	168.113.926.008,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					792.955.702,00		856.392.158,00		924.903.531,00		998.895.813,00		1.078.807.478,00	
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi sesuai standar keahlian dan sertifikasi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (%)	38,49	50,80	63,09	792.955.702,00	75,40	856.392.158,00	87,70	924.903.531,00	100	998.895.813,00	100	1.078.807.478,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.658.528.064,00		1.589.896.277,00		1.717.087.979,00		1.854.455.017,00		2.002.811.418,00	
Meningkatnya ketersediaan rencana detail tata ruang sebagai acuan pengendalian dan pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan	Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR (%)	0	9	27,27	1.658.528.064,00	45,45	1.589.896.277,00	72,72	1.717.087.979,00	100	1.854.455.017,00	100	2.002.811.418,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					52.548.704.895,00		57.480.892.056,00		62.317.019.867,00		67.574.203.545,00		73.289.544.128,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.495.717.945,00		26.455.375.380,00		28.571.805.411,00		30.857.549.844,00		33.326.153.831,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	24.495.717.945,00	100	26.455.375.380,00	100	28.571.805.411,00	100	30.857.549.844,00	100	33.326.153.831,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					186.900.000,00		201.852.000,00		218.000.160,00		235.440.172,00		254.275.385,00	
Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Perumahan terhadap Ketentuan Perizinan	Persentase perumahan yang memiliki izin sesuai ketentuan (%)	54,29	57,14	60	19.300.000,00	62,86	20.844.000,00	65,71	22.511.520,00	68,57	24.312.441,00	71,42	26.257.436,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Pasca Bencana dan Terdampak Relokasi	Persentase Pemenuhan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Korban Bencana dan Relokasi (%)	100	100	100	167.600.000,00	100	181.008.000,00	100	195.488.640,00	100	211.127.731,00	100	228.017.949,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					10.701.098.500,00		11.557.186.380,00		12.481.761.290,00		13.480.302.193,00		14.558.726.369,00	
Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)	69,62	74,68	79,75	10.701.098.500,00	84,81	11.557.186.380,00	88,61	12.481.761.290,00	92,41	13.480.302.193,00	96,21	14.558.726.369,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.635.150.000,00		2.183.656.000,00		2.254.348.480,00		2.330.696.358,00		2.413.152.067,00	
Meningkatnya Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman di luar kawasan kumuh yang ditangani untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh (%)	58,57	64,00	70,00	1.635.150.000,00	75,71	2.183.656.000,00	81,43	2.254.348.480,00	87,14	2.330.696.358,00	92,86	2.413.152.067,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					15.529.838.450,00		17.082.822.296,00		18.791.104.526,00		20.670.214.978,00		22.737.236.476,00	
Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	51,43	54,29	57,14	7.764.919.225,00	60	8.541.411.148,00	62,86	9.395.552.263,00	65,71	10.335.107.489,00	68,57	11.368.618.238,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerangan Jalan Umum	Persentase ruas jalan yang memiliki LPJU sesuai standar (%)	76,87	79	81	7.764.919.225,00	83	8.541.411.148,00	85	9.395.552.263,00	87	10.335.107.489,00	89	11.368.618.238,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					28.819.126.131,00		31.124.652.196,00		33.614.369.523,00		36.303.519.073,00		39.207.800.584,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.265.474.631,00		20.806.712.576,00		22.470.990.424,00		24.268.669.649,00		26.210.163.216,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Satpol PP & Damkar)	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	15.264.348.134,00	100	16.485.495.961,00	100	17.804.076.484,00	100	19.228.402.600,00	100	20.766.674.810,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (BPBD)	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	4.001.126.497,00	100	4.321.216.615,00	100	4.666.913.940,00	100	5.040.267.049,00	100	5.443.488.406,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.301.396.950,00		4.645.508.706,00		5.017.149.401,00		5.418.521.351,00		5.852.003.057,00	
Terwujudnya kolaborasi yang harmonis antara Satpol PP dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Ormas Yang Berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Satpol PP (%)	100	100	100	935.852.000,00	100	1.010.720.160,00	100	1.091.577.772,00	100	1.178.903.994,00	100	1.273.216.313,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Teredukasi Perda (%)	100	100	100	241.700.000,00	100	261.036.000,00	100	281.918.880,00	100	304.472.390,00	100	328.830.180,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya efektivitas peran SATLINMAS dalam mendukung penegakan peraturan daerah	Persentase Keaktifan SATLINMAS (%)	100	100	100	1.977.694.950,00	100	2.135.910.546,00	100	2.306.783.389,00	100	2.491.326.060,00	100	2.690.632.145,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terwujudnya penegakan peraturan daerah yang lebih optimal	Persentase Pelanggaran Perda Yang Tertangani (%)	100	100	100	1.146.150.000,00	100	1.237.842.000,00	100	1.336.869.360,00	100	1.443.818.907,00	100	1.559.324.419,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.328.535.900,00		1.434.818.772,00		1.549.604.266,00		1.673.572.608,00		1.807.458.409,00	
Meningkatnya kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Wilayah Dengan Mitigasi Bencana Yang Baik (%)	100	100	100	817.365.900,00	100	882.755.172,00	100	953.375.578,00	100	1.029.645.626,00	100	1.112.017.268,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	352.300.000,00	100	380.484.000,00	100	410.922.720,00	100	443.796.537,00	100	479.300.260,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	158.870.000,00	100	171.579.600,00	100	185.305.968,00	100	200.130.445,00	100	216.140.881,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					3.923.718.650,00		4.237.612.142,00		4.576.625.432,00		4.942.755.465,00		5.338.175.902,00	
Meningkatnya kecukupan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan kebakaran dan penyelamatan	Rasio Jumlah SDM Dengan Jumlah Penduduk HSS (Rasio)	1:5000	1:5000	1:5000	230.080.000,00	1:5000	248.486.400,00	1:5000	268.365.312,00	1:5000	289.834.536,00	1:5000	313.021.299,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kesesuaian sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan standar teknis	Persentase Sarpras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sesuai standar (%)	100	100	100	1.630.228.050,00	100	1.760.646.294,00	100	1.901.497.997,00	100	2.053.617.837,00	100	2.217.907.264,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah masyarakat yang memiliki Pengetahuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	150	300	450	23.100.000,00	465	24.948.000,00	615	26.943.840,00	765	29.099.347,00	915	31.427.294,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terwujudnya bangunan dan gedung yang memenuhi standar proteksi kebakaran	Jumlah Gedung/Bangunan yang telah memiliki Standar Proteksi Kebakaran (Buah)	5	5	5	16.700.000,00	5	18.036.000,00	5	19.478.880,00	5	21.037.190,00	5	22.720.165,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terwujudnya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang tanggap dan siap siaga	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yang Siap Siaga (%)	100	100	100	1.273.810.600,00	100	1.375.715.448,00	100	1.485.772.683,00	100	1.604.634.498,00	100	1.733.005.258,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya ketersediaan relawan kebakaran di tingkat masyarakat	Jumlah REDKAR Yang Terbentuk (Orang)	1.004	1.144	1.284	749.800.000,00	1.424	809.780.000,00	1.564	874.566.720,00	1.704	944.532.057,00	1.844	1.020.094.622,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					36.350.941.179,00		39.259.016.477,00		42.399.737.800,00		45.791.716.833,00		49.455.054.191,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.826.526.250,00		9.532.648.350,00		10.295.260.218,00		11.118.881.036,00		12.008.391.519,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	8.826.526.250,00	100	9.532.648.350,00	100	10.295.260.218,00	100	11.118.881.036,00	100	12.008.391.519,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					2.039.850.410,00		2.203.038.443,00		2.379.281.519,00		2.569.624.041,00		2.775.193.965,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang diberdayakan (%)	88,73	100	100	2.039.850.410,00	100	2.203.038.443,00	100	2.379.281.519,00	100	2.569.624.041,00	100	2.775.193.965,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					10.975.829.249,00		11.853.895.590,00		12.802.207.240,00		13.826.383.824,00		14.932.494.536,00	
Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat	Persentase Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial yang tepat sasaran (%)	93,62	100	100	10.975.829.249,00	100	11.853.895.590,00	100	12.802.207.240,00	100	13.826.383.824,00	100	14.932.494.536,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					12.627.676.950,00		13.637.891.107,00		14.728.922.396,00		15.907.236.189,00		17.179.815.086,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat	Persentase Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilakukan sesuai standar (%)	97,34	100	100	12.627.676.950,00	100	13.637.891.107,00	100	14.728.922.396,00	100	15.907.236.189,00	100	17.179.815.086,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.451.950.925,00		1.568.107.000,00		1.693.555.561,00		1.829.040.007,00		1.975.363.210,00	
Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan (%)	100	100	100	1.451.950.925,00	100	1.568.107.000,00	100	1.693.555.561,00	100	1.829.040.007,00	100	1.975.363.210,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					429.107.395,00		463.435.987,00		500.510.866,00		540.551.736,00		583.795.875,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya (%)	100	100	100	429.107.395,00	100	463.435.987,00	100	500.510.866,00	100	540.551.736,00	100	583.795.875,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					9.612.000.000,00		10.380.959.995,00		11.211.436.794,00		12.108.351.736,00		13.077.019.874,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.203.100.262,00		6.699.348.280,00		7.235.296.141,00		7.814.119.832,00		8.439.249.417,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	6.203.100.262,00	100	6.699.348.280,00	100	7.235.296.141,00	100	7.814.119.832,00	100	8.439.249.417,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.209.080.603,00		1.305.807.051,00		1.410.271.615,00		1.523.093.344,00		1.644.940.812,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2,19	2,25	2,38	1.209.080.603,00	2,51	1.305.807.051,00	2,64	1.410.271.615,00	2,77	1.523.093.344,00	2,90	1.644.940.812,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					175.247.645,00		189.267.456,00		204.408.853,00		220.761.561,00		238.422.485,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan sesuai kompetensinya (%)	78	78,08	78,09	175.247.645,00	78,10	189.267.456,00	78,11	204.408.853,00	78,12	220.761.561,00	78,13	238.422.485,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.024.571.490,00		2.186.537.208,00		2.361.460.185,00		2.550.376.999,00		2.754.407.160,00	
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (%)	18,99	25,32	26,25	2.024.571.490,00	30	2.186.537.208,00	33,75	2.361.460.185,00	37,50	2.550.376.999,00	41,25	2.754.407.160,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					6.785.028.712,00		7.327.831.009,00		7.914.057.490,00		8.547.182.089,00		9.230.956.656,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.410.091.755,00		4.762.899.095,00		5.143.931.023,00		5.555.445.505,00		5.999.881.145,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	80	100	100	4.410.091.755,00	100	4.762.899.095,00	100	5.143.931.023,00	100	5.555.445.505,00	100	5.999.881.145,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.474.922.432,00		1.592.916.227,00		1.720.349.525,00		1.857.977.487,00		2.006.615.686,00	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	26,6	30	32	1.474.922.432,00	35	1.592.916.227,00	37	1.720.349.525,00	40	1.857.977.487,00	42	2.006.615.686,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					66.435.000,00		71.749.800,00		77.489.784,00		83.688.967,00		90.384.084,00	
Meningkatnya efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase penyelesaian kasus kekerasan perempuan (%)	100	100	100	66.435.000,00	100	71.749.800,00	100	77.489.784,00	100	83.688.967,00	100	90.384.084,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					433.779.525,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase desa/kelurahan layak anak (%)	100	100	100	433.779.525,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					399.800.000,00		900.265.887,00		972.287.158,00		1.050.070.130,00		1.134.075.741,00	
Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek kehidupan	Persentase penurunan kekerasan anak (%)	100	100	100	399.800.000,00	100	900.265.887,00	100	972.287.158,00	100	1.050.070.130,00	100	1.134.075.741,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.193.809.653,00		7.702.330.903,00		8.251.533.855,00		8.844.673.044,00		9.478.104.991,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.245.077.403,00		5.664.683.594,00		6.117.858.282,00		6.607.286.944,00		7.134.408.637,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	80	100	100	5.245.077.403,00	100	5.664.683.594,00	100	6.117.858.282,00	100	6.607.286.944,00	100	7.134.408.637,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					858.336.000,00		868.308.800,00		879.079.424,00		890.711.698,00		903.274.554,00	
Meningkatnya ketersediaan bahan pangan pokok unggulan secara berkelanjutan	Persentase Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Unggulan (%)	100	100	100	858.336.000,00	100	868.308.800,00	100	879.079.424,00	100	890.711.698,00	100	903.274.554,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					681.763.060,00		728.014.665,00		777.966.398,00		831.914.270,00		890.177.970,00	
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pangan lokal dalam pola konsumsi masyarakat	Jumlah aktivitas pemanfaatan sumber daya lokal (Kegiatan)	12	12	12	681.763.060,00	12	728.014.665,00	12	777.966.398,00	12	831.914.270,00	12	890.177.970,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					214.410.900,00		231.563.772,00		250.088.874,00		270.095.984,00		286.006.550,00	
Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12,84	12	11,5	214.410.900,00	11	231.563.772,00	10,5	250.088.874,00	10	270.095.984,00	9	286.006.550,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					194.222.290,00		209.760.072,00		226.540.877,00		244.664.148,00		264.237.280,00	
Meningkatnya jaminan keamanan pangan bagi masyarakat	Persentase Keamanan Pangan (%)	96	97	97,5	194.222.290,00	97,8	209.760.072,00	98	226.540.877,00	98,5	244.664.148,00	99	264.237.280,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					501.599.600,00		541.727.568,00		585.065.773,00		631.871.035,00		682.420.718,00	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH					501.599.600,00		541.727.568,00		585.065.773,00		631.871.035,00		682.420.718,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE														
Terselenggaranya fasilitasi permasalahan pertanian	Persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanian (%)	100	100	100	501.599.600,00	100	541.727.568,00	100	585.065.773,00	100	631.871.035,00	100	682.420.718,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					36.321.875.468,00		39.227.625.505,00		42.365.835.543,00		45.755.102.387,00		49.415.510.576,00	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					835.291.500,00		902.114.820,00		974.284.005,00		1.052.226.726,00		1.136.404.864,00	
Peningkatan efektivitas pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Lokasi Badan Air Yang Memenuhi Baku Mutu (%)	78	80	82	835.291.500,00	84	902.114.820,00	86	974.284.005,00	88	1.052.226.726,00	90	1.136.404.864,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu (%)	90	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					198.305.000,00		214.169.400,00		231.302.952,00		249.807.188,00		269.791.763,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH yang Tersedia (%)	6,67	7,02	7,05	198.305.000,00	7,10	214.169.400,00	7,17	231.302.952,00	7,23	249.807.188,00	7,30	269.791.763,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					395.906.000,00		427.578.480,00		461.784.758,00		498.727.539,00		538.625.742,00	
Peningkatan Tata Kelola Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Kegiatan Usaha Terhadap Izin Lingkungan (%)	100	100	100	395.906.000,00	100	427.578.480,00	100	461.784.758,00	100	498.727.539,00	100	538.625.742,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					1.193.082.850,00		1.288.529.478,00		1.391.611.836,00		1.502.940.783,00		1.623.176.045,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup (%)	40,54	51,35	62,16	1.193.082.850,00	72,97	1.288.529.478,00	86,49	1.391.611.836,00	100	1.502.940.783,00	100	1.623.176.045,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					33.699.290.118,00		36.395.233.327,00		39.306.851.992,00		42.451.400.151,00		45.847.512.162,00	
Menurunnya Volume Sampah Yang Masuk ke TPA	Persentase Rata-Rata Sampah Yang Masuk ke TPA (%)	46,11	45,06	44,02	23.425.136.318,00	42,98	25.299.147.223,00	41,94	27.323.079.000,00	40,9	29.508.925.320,00	39,94	31.869.639.345,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan sampah (Titik)	46	46	46	10.274.153.800,00	46	11.096.086.104,00	46	11.983.772.992,00	46	12.942.474.831,00	46	13.977.872.817,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.380.091.278,00		7.970.498.578,00		8.608.138.464,00		9.296.789.541,00		10.040.532.708,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.147.818.059,00		7.719.643.503,00		8.337.214.984,00		9.004.192.182,00		9.724.527.557,00	
Meningkatnya Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	7.147.818.059,00	100	7.719.643.503,00	100	8.337.214.984,00	100	9.004.192.182,00	100	9.724.527.557,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					90.750.000,00		98.010.000,00		105.850.800,00		114.318.864,00		123.464.373,00	
Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Petugas pelayanan publik	Persentase petugas pelayanan yang memiliki kinerja baik (%)	100	100	100	90.750.000,00	100	98.010.000,00	100	105.850.800,00	100	114.318.864,00	100	123.464.373,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					94.510.360,00		102.071.188,00		110.236.883,00		119.055.834,00		128.580.301,00	
Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen adminduk yang diterbitkan tepat waktu (%)	100	100	100	94.510.360,00	100	102.071.188,00	100	110.236.883,00	100	119.055.834,00	100	128.580.301,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					47.012.859,00		50.773.887,00		54.835.797,00		59.222.661,00		63.960.477,00	
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik (%)	100	100	100	15.670.953,00	100	16.924.629,00	100	18.278.599,00	100	19.740.887,00	100	21.320.159,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Valid dan Mutakhir (%)	95	100	100	15.670.953,00	100	16.924.629,00	100	18.278.599,00	100	19.740.887,00	100	21.320.159,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Mitra/Instansi yang mendapatkan hak akses kependudukan (OPD)	11	12	13	15.670.953,00	14	16.924.629,00	15	18.278.599,00	16	19.740.887,00	17	21.320.159,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.514.310.634,00		9.245.455.482,00		9.985.091.909,00		10.783.899.252,00		11.646.611.179,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.835.968.958,00		7.382.846.474,00		7.973.474.187,00		8.611.352.118,00		9.300.260.283,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	6.835.968.958,00	100	7.382.846.474,00	100	7.973.474.187,00	100	8.611.352.118,00	100	9.300.260.283,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					227.936.244,00		246.171.142,00		265.864.832,00		287.134.018,00		310.104.737,00	
Terwujudnya Penataan Desa yang baik	Persentase Desa dengan Penataan Desa sesuai ketentuan (%)	32,63	43,75	76,00	227.936.244,00	100	246.171.142,00	100	265.864.832,00	100	287.134.018,00	100	310.104.737,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					376.052.900,00		406.137.132,00		438.628.102,00		473.718.350,00		511.615.817,00	
Meningkatnya Pengembangan Produk Unggulan Desa melalui Program OVOP (One Village One Product)	Persentase desa yang memiliki minimal 1 produk unggulan yang dikembangkan (%)	-	2,67	6,67	323.365.400,00	10,67	349.234.632,00	14,67	377.173.402,00	18,67	407.347.274,00	22,67	439.935.055,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Usaha BUMDesa dalam Mendukung Perekonomian Desa	Persentase BUMDesa yang mencatatkan Laba bersih setiap tahun (%)	32,63	33,33	34,02	52.687.500,00	34,72	56.902.500,00	35,41	61.454.700,00	36,11	66.371.076,00	36,81	71.680.762,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					234.806.900,00		303.591.452,00		327.878.765,00		354.109.062,00		382.437.783,00	
Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pengelolaan keuangan desa yang baik (%)	9,03	50	60	99.672.600,00	70	157.646.408,00	80	170.258.119,00	80	183.878.767,00	80	198.589.067,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang prima berbasis Teknologi Informasi (Vgov)	Persentase Desa Yang Menggunakan Teknologi Informasi (%)	100	100	100	135.134.300,00	100	145.945.044,00	100	157.620.646,00	100	170.230.295,00	100	183.848.716,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					839.545.632,00		906.709.282,00		979.246.023,00		1.057.585.704,00		1.142.192.559,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Aktivitas Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Persentase Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi produktif (%)	100	100	100	17.980.882,00	100	19.419.352,00	100	20.972.900,00	100	22.650.732,00	100	24.462.790,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya kualitas layanan dasar desa	Persentase anggota lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang mendapatkan peningkatan kapasitas (%)	47,88	52,05	56,85	146.404.350,00	61,64	158.116.698,00	66,44	170.766.033,00	71,23	184.427.315,00	75	199.181.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi Layanan Kesehatan (%)	100	100	100	675.160.400,00	100	729.173.232,00	100	787.507.090,00	100	850.507.657,00	100	918.548.269,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi Layanan Pendidikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					1.157.547.971,00		1.253.712.848,00		1.356.154.917,00		1.465.376.351,00		1.581.919.497,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					526.908.528,00		569.061.210,00		614.586.107,00		663.752.996,00		716.853.235,00	
Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi berkelanjutan	Persentase pengendalian penduduk dan pendampingan keluarga yang dibina (%)	60	63	66,15	526.908.528,00	69,46	569.061.210,00	72,93	614.586.107,00	76,58	663.752.996,00	80,41	716.853.235,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					237.527.243,00		274.229.422,00		312.451.776,00		352.315.918,00		393.953.191,00	
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi keluarga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah pemanfaatan data Informasi Keluarga (Laporan)	12	12	12	62.221.893,00	12	67.199.644,00	12	72.575.616,00	12	78.381.665,00	12	84.652.198,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pelaksanaan program keluarga berencana	Persentase cakupan KB aktif (%)	73,10	73,47	74,20	175.305.350,00	74,94	207.029.778,00	75,69	239.876.160,00	76,45	273.934.253,00	77,21	309.300.993,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					393.112.200,00		410.422.216,00		429.117.034,00		449.307.437,00		471.113.071,00	
Meningkatnya pemberdayaan keluarga dalam memperkuat	Persentase Kelompok Terbina (%)	60	63	66,15	393.112.200,00	69,46	410.422.216,00	72,93	429.117.034,00	76,58	449.307.437,00	80,41	471.113.071,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
ketahanan dan meningkatkan kesejahteraan														Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					10.328.695.333,00		10.607.649.281,00		11.112.427.219,00		12.894.363.157,00		18.410.244.829,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.149.034.605,00		7.510.488.400,00		8.212.664.240,00		9.015.109.112,00		11.970.020.022,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	7.149.034.605,00	100	7.510.488.400,00	100	8.212.664.240,00	100	9.015.109.112,00	100	11.970.020.022,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					2.674.597.928,00		2.109.564.601,00		2.313.889.979,00		3.220.611.245,00		5.099.834.157,00	
Meningkatnya efektivitas penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam mendukung kelancaran dan keselamatan transportasi darat	Persentase jalan yang menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas sesuai Standar (%)	66,29	67,14	68,00	732.294.672,00	68,86	953.979.814,00	69,71	1.046.302.430,00	70,57	1.830.104.873,00	71,43	2.003.188.860,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas (%)	-2,8	0,8	1	598.708.170,00	1,2	658.578.987,00	1,4	724.436.885,00	1,6	796.880.574,00	1,8	891.568.631,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya kepatuhan dan kelayakan operasional kendaraan dalam mendukung keselamatan transportasi	Persentase kendaraan laik jalan (%)	43	100	100	183.858.000,00	100	151.885.800,00	100	164.036.664,00	100	177.159.598,00	100	191.332.364,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya kelayakan dan kenyamanan fasilitas terminal dalam mendukung pelayanan transportasi darat	Persentase terminal Tipe C yang layak (%)	40	40	60	838.945.086,00	60	25.900.000,00	60	27.972.000,00	60	30.210.000,00	80	587.062.482,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum yang aman dan nyaman	Persentase peningkatan pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang transportasi darat (%)	0,77	1,26	0,83	320.792.000,00	0,83	319.220.000,00	0,83	351.142.000,00	0,83	386.256.200,00	7	1.426.681.820,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					505.062.800,00		987.596.280,00		585.873.000,00		658.642.800,00		1.340.390.650,00	
Meningkatnya keamanan dan keselamatan penyelenggaraan transportasi bagi pengguna dan masyarakat	Rasio Kejadian kecelakaan Transportasi per 10 ribu keberangkatan (Rasio)	0	0,003	0,003	505.062.800,00	0,002	987.596.280,00	0,002	585.873.000,00	0,002	658.642.800,00	0,002	1.340.390.650,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.918.395.092,00		14.047.020.000,00		14.763.610.000,00		15.944.580.000,00		17.220.050.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					7.458.608.702,00		8.055.250.000,00		8.292.530.000,00		8.955.850.000,00		9.672.250.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	7.458.608.702,00	100	8.055.250.000,00	100	8.292.530.000,00	100	8.955.850.000,00	100	9.672.250.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.662.575.390,00		2.970.800.000,00		3.208.460.000,00		3.465.130.000,00		3.742.340.000,00	
Meningkatnya keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat	Persentase Informasi yang mudah diakses (%)	100	100	100	3.662.575.390,00	100	2.970.800.000,00	100	3.208.460.000,00	100	3.465.130.000,00	100	3.742.340.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.797.211.000,00		3.020.970.000,00		3.262.620.000,00		3.523.600.000,00		3.805.460.000,00	
Meningkatnya ketersediaan dan keandalan layanan teknologi informasi dan komunikasi pada perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menerima Layanan TIK sesuai standar (%)	71	74,35	79,48	171.672.000,00	87,17	185.400.000,00	94,87	200.230.000,00	100	216.240.000,00	100	233.530.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya pusat data terintegrasi	Persentase data yang terintegrasi (%)	51,57	53	54,44	31.800.000,00	55,44	34.340.000,00	57,3	37.080.000,00	58,73	40.040.000,00	60,16	43.240.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan publik yang terintegrasi	Persentase layanan publik yang terintegrasi (%)	21,87	23,12	23,75	2.593.739.000,00	25	2.801.230.000,00	26,25	3.025.310.000,00	27,5	3.267.320.000,00	28,75	3.528.690.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					1.518.339.687,00		1.639.806.862,00		1.770.991.410,00		1.912.670.723,00		2.065.684.201,00	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					75.000.000,00		81.000.000,00		87.480.000,00		94.478.400,00		102.036.672,00	
Meningkatnya kapasitas usaha koperasi	Persentase KSP/USP Sehat (%)	5,89	8,23	9,41	75.000.000,00	10,59	81.000.000,00	11,76	87.480.000,00	12,94	94.478.400,00	14,12	102.036.672,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase peningkatan volume usaha koperasi (%)	19,68	23,62	31,5		38,75		42,63		46,51		50,39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					105.000.000,00		113.400.000,00		122.472.000,00		132.269.760,00		142.851.341,00	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	74	75,44	76,04	105.000.000,00	77,24	113.400.000,00	77,84	122.472.000,00	79	132.269.760,00	80,24	142.851.341,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi (%)	12,9	13,44	15,44		15,9		16,11		19,32		20,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					161.999.784,00		174.959.767,00		188.956.548,00		204.073.072,00		220.398.738,00	
Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	100	100	100	161.999.784,00	100	174.959.767,00	100	188.956.548,00	100	204.073.072,00	100	220.398.738,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					311.339.903,00		336.247.095,00		363.146.862,00		392.198.611,00		423.574.500,00	
Meningkatnya Penjualan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Volume Omset Usaha Mikro (%)	96	96,5	97	311.339.903,00	97,5	336.247.095,00	98	363.146.862,00	98,5	392.198.611,00	99	423.574.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					865.000.000,00		934.200.000,00		1.008.936.000,00		1.089.650.880,00		1.176.822.950,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan UM	Persentase Usaha Mikro Formal (%)	90	90,5	91	865.000.000,00	92	934.200.000,00	93	1.008.936.000,00	94	1.089.650.880,00	95	1.176.822.950,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.235.972.669,00		6.734.850.477,00		7.273.638.511,00		7.855.529.583,00		8.481.849.326,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.610.319.019,00		4.979.144.535,00		5.377.476.094,00		5.807.674.172,00		6.272.288.097,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	4.610.319.019,00	100	4.979.144.535,00	100	5.377.476.094,00	100	5.807.674.172,00	100	6.272.288.097,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					413.368.000,00		446.437.440,00		482.152.435,00		520.724.630,00		562.382.600,00	
Meningkatnya iklim usaha dan investasi di daerah	Persentase Potensi Investasi Daerah yang Terealisasi (%)	75	83	91	413.368.000,00	100	446.437.440,00	100	482.152.435,00	100	520.724.630,00	100	562.382.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					67.428.000,00		72.822.240,00		78.648.019,00		84.939.861,00		91.735.050,00	
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal di Daerah	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal (%)	0	5,7	8,5	67.428.000,00	11,40	72.822.240,00	14,20	78.648.019,00	17,10	84.939.861,00	20,10	91.735.050,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					867.145.150,00		936.516.762,00		1.011.438.103,00		1.092.353.151,00		1.179.741.403,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	90,84	95	97	867.145.150,00	98	936.516.762,00	99	1.011.438.103,00	100	1.092.353.151,00	100	1.179.741.403,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					277.712.500,00		299.929.500,00		323.923.860,00		349.837.769,00		375.702.176,00	
Meningkatnya Kualitas Data dan Pelaporan Penanaman Modal di Daerah	Persentase Pelaku Usaha yang mempunyai LKPM sesuai standar (%)	97,14	100	100	277.712.500,00	100	299.929.500,00	100	323.923.860,00	100	349.837.769,00	100	375.702.176,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					17.778.463.886,00		19.200.740.997,00		20.736.800.276,00		22.374.685.645,00		24.169.925.161,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.618.504.586,00		8.227.984.953,00		8.886.223.749,00		9.576.062.996,00		10.347.412.699,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	7.618.504.586,00	100	8.227.984.953,00	100	8.886.223.749,00	100	9.576.062.996,00	100	10.347.412.699,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.570.894.700,00		1.696.566.276,00		1.832.291.578,00		1.978.874.904,00		2.137.184.897,00	
Meningkatnya Minat Pemuda dalam berwirausaha	Persentase pemuda wirausaha mandiri (%)	9,89	12,01	12,18	195.586.200,00	12,30	211.233.096,00	12,42	228.131.744,00	12,54	246.382.283,00	12,66	266.092.866,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%)	69,44	72,22	77,77	500.000.000,00	83,33	540.000.000,00	88,88	583.200.000,00	94,44	629.856.000,00	100	680.244.480,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Peran Aktif Pemuda Pelopor dalam berbagai bidang Pembangunan	Persentase pemuda pelopor yang berperan aktif (%)	66,67	75	80	875.308.500,00	83,33	945.333.180,00	85,71	1.020.959.834,00	87,50	1.102.636.621,00	88,89	1.190.847.551,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					8.589.064.600,00		9.276.189.768,00		10.018.284.949,00		10.819.747.745,00		11.685.327.565,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kelayakan Prasarana Pelatihan Olahraga	Persentase cabor yang memiliki prasarana pelatihan olahraga yang memadai (%)	63	78,94	81,57	1.990.899.400,00	84,21	2.150.171.352,00	86,84	2.322.185.060,00	89,47	2.507.959.865,00	92,10	2.708.596.654,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya kapasitas atlet pada berbagai cabang olahraga	Persentase atlet yang berpotensi meraih medali emas (%)	6	18,18	13,91	1.789.454.500,00	45,83	1.932.610.860,00	14,40	2.087.219.729,00	46,15	2.254.197.307,00	14,81	2.434.533.092,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga (Orang)	620	777	780	4.808.710.700,00	850	5.193.407.556,00	910	5.608.880.160,00	980	6.057.590.573,00	1.060	6.542.197.819,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					111.261.400,00		120.160.000,00		129.770.000,00		140.150.000,00		151.360.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					111.261.400,00		120.160.000,00		129.770.000,00		140.150.000,00		151.360.000,00	
Meningkatnya pemerataan akses data dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat	Persentase data yang mudah diakses (%)	100	100	100	111.261.400,00	100	120.160.000,00	100	129.770.000,00	100	140.150.000,00	100	151.360.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					239.961.000,00		408.620.000,00		441.300.000,00		476.600.000,00		514.720.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					239.961.000,00		408.620.000,00		441.300.000,00		476.600.000,00		514.720.000,00	
Meningkatnya ketahanan dan keandalan tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (Nilai)	390	461	475	239.961.000,00	500	408.620.000,00	515	441.300.000,00	530	476.600.000,00	545	514.720.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					4.123.228.900,00		4.453.087.200,00		4.809.334.400,00		5.195.026.400,00		5.610.628.800,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2.580.991.400,00		2.787.470.700,00		3.010.468.400,00		3.251.306.000,00		3.511.410.600,00	
Meningkatnya Pelestarian Budaya Lokal	Persentase Budaya Lokal yang Diikutsertakan Dalam Festival (%)	30	40	50	1.592.991.400,00	60	1.720.430.700,00	90	1.858.065.200,00	100	2.006.710.500,00	100	2.167.247.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya partisipasi pelaku seni dalam pelestarian kebudayaan daerah	Persentase Pelaku Seni yang Aktif Dalam Pelestarian Budaya (%)	0,56	0,75	1,25	988.000.000,00	1,40	1.067.040.000,00	1,54	1.152.403.200,00	1,63	1.244.595.500,00	1,75	1.344.163.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					98.200.000,00		106.056.000,00		114.540.500,00		123.703.800,00		133.600.000,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam kegiatan pembinaan dan pelestarian sejarah	Persentase kegiatan pembinaan sejarah yang terlaksana sesuai standar (%)	100	100	100	98.200.000,00	100	106.056.000,00	100	114.540.500,00	100	123.703.800,00	100	133.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.350.650.000,00		1.458.702.000,00		1.575.398.200,00		1.702.375.000,00		1.838.565.200,00	
Meningkatnya Pelestarian Obyek Warisan Budaya	Persentase Obyek Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	100	100	100	1.350.650.000,00	100	1.458.702.000,00	100	1.575.398.200,00	100	1.702.375.000,00	100	1.838.565.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					93.387.500,00		100.858.500,00		108.927.300,00		117.641.600,00		127.053.000,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Permuseuman	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Masyarakat Ke Museum (%)	27,97	30,89	35	93.387.500,00	40	100.858.500,00	45	108.927.300,00	50	117.641.600,00	55	127.053.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					7.108.365.498,00		7.801.835.288,00		8.860.989.005,00		9.179.947.690,00		9.836.423.506,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.486.184.498,00		7.578.429.340,00		8.619.710.583,00		8.919.366.993,00		9.554.996.354,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	6.486.184.498,00	100	7.578.429.340,00	100	8.619.710.583,00	100	8.919.366.993,00	100	9.554.996.354,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					622.181.000,00		223.405.948,00		241.278.422,00		260.580.697,00		281.427.152,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi (%)	0	1	2	622.181.000,00	3	223.405.948,00	4	241.278.422,00	5	260.580.697,00	5	281.427.152,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Jumlah partisipasi masyarakat dalam minat baca (Orang)	27.000	30.000	31.000	0,00	32.000	0,00	33.000	0,00	34.000	0,00	35.000	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					266.733.500,00		620.515.000,00		644.156.199,00		669.688.694,00		697.263.790,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					208.589.500,00		357.719.480,00		376.337.038,00		396.444.000,00		418.159.520,00	
Meningkatnya Digitalisasi Arsip	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip (Nilai)	87,27	88,27	89,27	208.589.500,00	90,27	357.719.480,00	91,27	376.337.038,00	92,27	396.444.000,00	93,27	418.159.520,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					58.144.000,00		262.795.520,00		267.819.161,00		273.244.694,00		279.104.270,00	
Meningkatnya Ketersediaan, Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	100	100	100	58.144.000,00	100	262.795.520,00	100	267.819.161,00	100	273.244.694,00	100	279.104.270,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.675.222.943,00		10.677.342.937,00		11.532.196.026,00		12.436.821.168,00		13.438.547.840,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.040.649.943,00		6.569.182.039,00		7.095.374.847,00		7.670.248.720,00		8.284.132.500,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	6.040.649.943,00	100	6.569.182.039,00	100	7.095.374.847,00	100	7.670.248.720,00	100	8.284.132.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.021.969.300,00		1.104.317.400,00		1.192.662.800,00		1.288.075.700,00		1.391.121.900,00	
Meningkatnya produktivitas usaha perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap nelayan kecil (Ton)	14.742	15.000	15.200	1.021.969.300,00	15.400	1.104.317.400,00	15.600	1.192.662.800,00	15.800	1.288.075.700,00	16.000	1.391.121.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.717.993.700,00		2.017.459.862,00		2.178.863.977,00		2.353.173.071,00		2.541.426.840,00	
Meningkatnya produktivitas usaha perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	7.300	7.350	7.400	2.717.993.700,00	7.450	2.017.459.862,00	7.545	2.178.863.977,00	7.645	2.353.173.071,00	7.750	2.541.426.840,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					625.739.200,00		675.798.336,00		729.862.202,00		763.056.977,00		829.898.400,00	
Meningkatnya kapasitas dan peran kelompok masyarakat dalam pengawasan kawasan perikanan umum daratan	Jumlah POKMASWAS yang dibina (Kelompok)	10	12	14	625.739.200,00	16	675.798.336,00	18	729.862.202,00	20	763.056.977,00	22	829.898.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					268.870.800,00		310.585.300,00		335.432.200,00		362.266.700,00		391.968.200,00	
Meningkatnya produktivitas usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil	Persentase Peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan skala usaha mikro kecil (%)	6,7	7,06	7,34	247.072.700,00	7,37	266.939.400,00	7,52	288.294.600,00	7,6	311.358.200,00	7,63	336.266.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya akses produk perikanan ke pasar	Persentase peningkatan produk perikanan yang terakses pasar (%)	5,26	5,52	5,58	21.798.100,00	5,76	43.645.900,00	6,35	47.137.600,00	6,67	50.908.500,00	6,95	55.701.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					6.299.405.566,00		6.803.358.011,00		7.347.626.653,00		7.881.372.241,00		8.525.398.197,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					5.044.914.866,00		5.448.508.055,00		5.884.388.700,00		6.301.075.302,00		6.818.677.450,00	
Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,75	1,80	1,81	5.044.914.866,00	1,82	5.448.508.055,00	1,83	5.884.388.700,00	1,84	6.301.075.302,00	1,85	6.818.677.450,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.047.781.700,00		1.131.604.236,00		1.222.132.575,00		1.319.903.181,00		1.425.495.435,00	
Popularitas Pariwisata Meningkat	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	20,43	22	23	1.047.781.700,00	24	1.131.604.236,00	25	1.222.132.575,00	26	1.319.903.181,00	27	1.425.495.435,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					206.709.000,00		223.245.720,00		241.105.378,00		260.393.758,00		281.225.312,00	
Daya Saing Pelaku Ekraf Meningkat	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	14	20	21	206.709.000,00	22	223.245.720,00	23	241.105.378,00	24	260.393.758,00	25	281.225.312,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					43.529.149.390,00		47.864.231.650,00		51.693.370.185,00		55.826.697.893,00		60.292.834.176,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.648.806.060,00		32.873.460.854,00		35.503.337.722,00		38.341.463.256,00		41.408.780.315,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	80	100	100	29.648.806.060,00	100	32.873.460.854,00	100	35.503.337.722,00	100	38.341.463.256,00	100	41.408.780.315,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.941.220.530,00		3.176.518.172,00		3.430.639.629,00		3.705.090.376,00		4.001.498.060,00	
Meningkatnya akses dan pemanfaatan sarana produksi oleh pelaku usaha pertanian	Persentase Kelompok tani yang memanfaatkan sarana produksi pertanian (%)	3,38	3,87	4,84	2.941.220.530,00	6,29	3.176.518.172,00	8,22	3.430.639.629,00	9,68	3.705.090.376,00	11,14	4.001.498.060,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					8.399.497.000,00		9.071.456.760,00		9.797.173.301,00		10.580.947.165,00		11.427.422.938,00	
Meningkatnya akses dan pemanfaatan prasarana produksi oleh pelaku usaha pertania	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi pertanian (%)	1,94	2,91	3,88	8.399.497.000,00	4,84	9.071.456.760,00	5,81	9.797.173.301,00	6,78	10.580.947.165,00	7,75	11.427.422.938,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					590.486.200,00		637.725.096,00		688.743.104,00		743.842.552,00		803.349.956,00	
Meningkatnya efektivitas pengelolaan usaha peternakan melalui sistem perlindungan dan pengendalian kesehatan ternak	Persentase Populasi ternak yang terlindungi (%)	70	70	75	590.486.200,00	80	637.725.096,00	85	688.743.104,00	90	743.842.552,00	95	803.349.956,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					813.259.400,00		878.320.152,00		948.585.764,00		1.024.472.625,00		1.106.430.435,00	
Meningkatnya penerapan sistem perlindungan usaha tani yang mendukung keberlanjutan produksi	Persentase luas areal pertanian yang terlindungi (%)	3,22	4,11	4,45	813.259.400,00	4,79	878.320.152,00	5,13	948.585.764,00	5,82	1.024.472.625,00	6,51	1.106.430.435,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					163.764.880,00		176.866.070,00		191.015.356,00		206.296.585,00		222.800.311,00	
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan produk hilir hasil pertanian untuk memperkuat nilai tambah ekonomi	Jumlah produk hilir unggulan (Buah)	10	2	2	163.764.880,00	2	176.866.070,00	2	191.015.356,00	2	206.296.585,00	2	222.800.311,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					972.115.320,00		1.049.884.546,00		1.133.875.309,00		1.224.585.334,00		1.322.552.161,00	
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia pertanian	Persentase Kelompok Tani Kelas Madya (%)	2	2	2	972.115.320,00	2	1.049.884.546,00	2	1.133.875.309,00	2	1.224.585.334,00	2	1.322.552.161,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					18.775.208.952,00		20.277.242.000,00		21.899.419.000,00		23.651.195.000,00		25.543.480.000,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.055.891.952,00		9.780.372.000,00		10.562.800.000,00		11.407.825.000,00		12.320.447.000,00	
Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	9.055.891.952,00	100	9.780.372.000,00	100	10.562.800.000,00	100	11.407.825.000,00	100	12.320.447.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					31.174.500,00		33.670.000,00		36.363.000,00		39.092.000,00		42.414.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar	Persentase cakupan pengawasan barang beredar (%)	100	100	100	31.174.500,00	100	33.670.000,00	100	36.363.000,00	100	39.092.000,00	100	42.414.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					8.599.156.860,00		9.287.092.000,00		10.030.059.000,00		10.832.463.000,00		11.699.060.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kepatuhan Sarana Distribusi Perdagangan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI)	Persentase Kesesuaian Sarana Distribusi Perdagangan dengan Standar SNI (%)	0	9	18	8.599.156.860,00	27	9.287.092.000,00	36	10.030.059.000,00	45	10.832.463.000,00	50	11.699.060.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					369.908.600,00		399.502.000,00		431.462.000,00		465.980.000,00		503.258.000,00	
Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase koefisien variasi harga antar waktu komoditas bahan pokok (%)	5,37	5,37	5,37	369.908.600,00	5,37	399.502.000,00	5,37	431.462.000,00	5,37	465.980.000,00	5,37	503.258.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					679.375.060,00		733.727.000,00		792.425.000,00		855.820.000,00		924.285.000,00	
Meningkatnya Jumlah dan Diversifikasi Daerah Tujuan Ekspor	Persentase peningkatan jumlah daerah tujuan ekspor (%)	10	30	40	679.375.060,00	50	733.727.000,00	60	792.425.000,00	70	855.820.000,00	80	924.285.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					39.701.980,00		42.879.000,00		46.310.000,00		50.015.000,00		54.016.000,00	
Meningkatnya Tertib Niaga	Persentase tertib niaga (%)	78,62	79,36	79,37	39.701.980,00	79,57	42.879.000,00	79,77	46.310.000,00	80,02	50.015.000,00	80,37	54.016.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.250.000.000,00		1.350.000.000,00		1.458.000.000,00		1.574.640.000,00		1.700.611.200,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.100.000.000,00		1.188.000.000,00		1.283.040.000,00		1.385.683.200,00		1.496.537.856,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi (%)	16,5	17	17,5	1.100.000.000,00	18,9	1.188.000.000,00	20	1.283.040.000,00	21,3	1.385.683.200,00	22,5	1.496.537.856,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					100.000.000,00		108.000.000,00		116.640.000,00		125.971.200,00		136.048.896,00	
Terlaksananya Hasil Pengawasan Terhadap Jumlah Ijin Usaha Industri yang dikeluarkan	Persentase Hasil Pengawasan Terhadap Jumlah Ijin Usaha Industri Yang dikeluarkan (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	108.000.000,00	100	116.640.000,00	100	125.971.200,00	100	136.048.896,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					50.000.000,00		54.000.000,00		58.320.000,00		62.985.600,00		68.024.448,00	
Meningkatnya Pengembangan dan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) Unggulan	Persentase Peningkatan IKM Naik Kelas (%)	40	50	55	50.000.000,00	60	54.000.000,00	65	58.320.000,00	70	62.985.600,00	75	68.024.448,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					85.609.435.786,00		94.108.322.644,00		101.636.988.448,00		109.767.947.520,00		118.549.383.320,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					63.267.991.830,00		69.979.563.175,00		75.577.928.225,00		81.624.162.479,00		88.154.095.477,00	
Meningkatnya ketepatan standar layanan publik perangkat daerah	Persentase PD dengan standar pelayanan publik yang sesuai kebutuhan (%)	100	100	100	761.095.000,00	100	821.982.600,00	100	887.741.208,00	100	958.760.504,00	100	1.035.461.343,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Fasilitasi Pelaporan Kinerja PD	Jumlah OPD yang nilai Sakipnya A keatas (OPD)	20	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Setda	Persentase Perencanaan kinerja Setda yang selaras (%)	100	100	100	8.170.800,00	100	8.824.464,00	100	9.530.420,00	100	10.292.853,00	100	11.116.281,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas dan pelaporan keuangan Setda	Persentase Laporan keuangan Setda yang disusun sesuai SAP (%)	100	100	100	31.595.125.430,00	100	34.122.735.464,00	100	36.852.554.300,00	100	39.800.758.643,00	100	42.984.819.336,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengendalian/ Monev dan Pelaporan Kinerja Setda	Persentase Capaian program/kegiatan dan pelaporan kinerja Setda (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya ketepatan/kecepatan pelayanan Setda	Persentase pelayanan Setda yang dilaksanakan sesuai SOP dan SP (%)	100	100	100	13.393.570.100,00	100	14.465.055.707,00	100	15.622.260.164,00	100	16.872.040.976,00	100	18.221.804.253,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkup Setda	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Setda (%)	100	100	100	3.780.720.000,00	100	4.083.177.600,00	100	4.409.831.808,00	100	4.762.618.353,00	100	5.143.627.821,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas manajemen penatausahaan BMD Setda	Persentase penatausahaan dan laporan BMD Setda (%)	100	100	100	9.245.130.000,00	100	11.634.872.400,00	100	12.565.662.191,00	100	13.570.915.166,00	100	14.656.588.379,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pimpinan	Persentase kualitas pelayanan terhadap pimpinan (%)	100	100	100	4.484.180.500,00	100	4.842.914.940,00	100	5.230.348.134,00	100	5.648.775.984,00	100	6.100.678.064,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Penataan Kelembagaan berbasis kinerja														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN					20.462.706.226,00		22.099.722.722,00		23.867.700.538,00		25.777.116.580,00		27.839.285.906,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya administrasi tata pemerintahan yang baik	Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik (%)	100	100	100	1.364.248.128,00	100	1.473.387.978,00	100	1.591.259.015,00	100	1.718.559.736,00	100	1.856.044.515,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kerjasama daerah	Persentase fasilitasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	140.839.782,00	100	152.106.964,00	100	164.275.521,00	100	177.417.563,00	100	191.610.968,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan rakyat	Persentase hasil kajian/evaluasi terkait kesejahteraan rakyat yang disusun (%)	100	100	100	17.505.050.896,00	100	18.905.454.967,00	100	20.417.891.364,00	100	22.051.322.673,00	100	23.815.428.486,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	98,62	100	100	1.452.567.420,00	100	1.568.772.813,00	100	1.694.274.638,00	100	1.829.816.608,00	100	1.976.201.937,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.878.737.730,00		2.029.036.747,00		2.191.359.685,00		2.366.668.461,00		2.556.001.937,00	
Terimplementasinya kebijakan strategis perekonomian dan program pembangunan daerah	Persentase kebijakan strategis perekonomian dan pembangunan daerah yang terlaksana (%)	100	100	100	454.800.130,00	100	491.184.139,00	100	530.478.869,00	100	572.917.180,00	100	618.750.554,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kematangan Organisasi UKPBJ	Nilai maturitas UKPBJ (%)	100	100	100	1.423.937.600,00	100	1.537.852.608,00	100	1.660.880.816,00	100	1.793.751.281,00	100	1.937.251.383,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					73.485.005.500,00		81.163.805.800,00		85.712.910.500,00		92.569.943.500,00		103.719.538.900,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.176.700.900,00		39.790.836.900,00		41.030.104.000,00		44.312.512.400,00		51.601.513.300,00	
Meningkatnya Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	10.159.410.800,00	100	12.772.163.600,00	100	11.849.936.800,00	100	12.797.931.800,00	100	17.565.766.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	25.017.290.100,00	100	27.018.673.300,00	100	29.180.167.200,00	100	31.514.580.600,00	100	34.035.747.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					38.308.304.600,00		41.372.968.900,00		44.682.806.500,00		48.257.431.100,00		52.118.025.600,00	
Meningkatnya efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen penganggaran yang difasilitasi dan disahkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	245.078.000,00	100	264.684.200,00	100	285.858.900,00	100	308.727.600,00	100	333.425.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya efektivitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi secara tepat waktu dan berkualitas	Persentase pengesahan perda yang tepat waktu (%)	100	100	100	556.738.500,00	100	601.277.600,00	100	649.379.800,00	100	701.330.200,00	100	757.436.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya tingkat pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan dukungan administratif untuk pelaksanaan tugas DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas DPRD (%)	100	100	100	37.506.488.100,00	100	40.507.007.100,00	100	43.747.567.800,00	100	47.247.373.300,00	100	51.027.163.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					8.182.377.353,00		8.836.967.532,00		9.543.924.934,00		10.307.438.927,00		11.132.034.044,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.056.194.013,00		6.540.689.529,00		7.063.944.691,00		7.629.060.266,00		8.239.385.087,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	6.056.194.013,00	100	6.540.689.529,00	100	7.063.944.691,00	100	7.629.060.266,00	100	8.239.385.087,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.943.981.100,00		2.099.499.585,00		2.267.459.552,00		2.448.856.315,00		2.644.764.822,00	
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan antara RKPD dengan RPJMD (sasaran, indikator, program dan kegiatan) (%)	100	100	100	793.520.280,00	100	857.001.902,00	100	925.562.054,00	100	999.607.018,00	100	1.079.575.580,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pokir dalam Perencanaan Daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat dan Pokir yang terakomodir pada APBD (%)	80	80	80	632.534.940,00	80	683.137.733,00	80	737.788.752,00	80	796.811.852,00	80	860.556.801,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya pencapaian pelaksanaan program pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan program yang tercapai (Program keseluruhan) (%)	100	100	100	517.925.880,00	100	559.359.950,00	100	604.108.746,00	100	652.437.445,00	100	704.632.441,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					182.202.240,00		196.778.418,00		212.520.691,00		229.522.346,00		247.884.135,00	
Meningkatnya pencapaian kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah yang kinerjanya tercapai (IKU Renstra PD) (%)	100	100	100	182.202.240,00	100	196.778.418,00	100	212.520.691,00	100	229.522.346,00	100	247.884.135,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					274.095.685.855,00		296.023.340.724,00		319.705.207.979,00		345.281.624.618,00		372.904.154.589,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.896.758.416,00		17.168.499.089,00		18.541.979.016,00		20.025.337.337,00		21.627.364.324,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	15.896.758.416,00	100	17.168.499.089,00	100	18.541.979.016,00	100	20.025.337.337,00	100	21.627.364.324,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					253.326.501.090,00		273.592.621.178,00		295.480.030.870,00		319.118.433.341,00		344.647.908.008,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Dokumen Penganggaran	Persentase kesalahan pembebanan rekening belanja (%)	0	0	0	252.216.533.170,00	0	272.393.855.824,00	0	294.185.364.289,00	0	317.720.193.433,00	0	343.137.808.907,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja (%)	89,22	100	100	343.353.500,00	100	370.821.780,00	100	400.487.522,00	100	432.526.524,00	100	467.128.646,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Dokumen Laporan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP (%)	100	100	100	766.614.420,00	100	827.943.574,00	100	894.179.059,00	100	965.713.384,00	100	1.042.970.455,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.123.003.290,00		2.292.843.553,00		2.476.271.037,00		2.674.372.720,00		2.888.322.538,00	
Penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persentase database BMD sesuai regulasi (%)	100	100	100	2.123.003.290,00	100	2.292.843.553,00	100	2.476.271.037,00	100	2.674.372.720,00	100	2.888.322.538,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.749.423.059,00		2.969.376.904,00		3.206.927.056,00		3.463.481.220,00		3.740.559.719,00	
Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat	Persentase Wajib Pajak yang taat Pajak (%)	100	100	100	1.173.881.296,00	100	1.267.791.800,00	100	1.369.215.144,00	100	1.478.752.355,00	100	1.597.052.544,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Objek Pendapatan Baru	Persentase Pertumbuhan Objek Pendapatan Baru (%)	1,03	1,25	1,30	1.575.541.763,00	1,50	1.701.585.104,00	1,60	1.837.711.912,00	1,75	1.984.728.865,00	1,90	2.143.507.175,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					11.457.715.474,00		13.108.421.889,00		14.307.095.631,00		15.451.663.269,00		16.687.796.318,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.017.635.734,00		9.393.135.772,00		10.294.586.626,00		11.118.153.548,00		12.007.605.823,00	
Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	8.017.635.734,00	100	9.393.135.772,00	100	10.294.586.626,00	100	11.118.153.548,00	100	12.007.605.823,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.440.079.740,00		3.715.286.117,00		4.012.509.005,00		4.333.509.721,00		4.680.190.495,00	
Meningkatnya ASN yang Berkinerja Baik	Persentase ASN yang berkinerja baik (%)	99,96	100	100	395.103.660,00	100	426.711.951,00	100	460.848.906,00	100	497.716.817,00	100	537.534.161,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Ketepatan Penempatan ASN	Persentase Penempatan pegawai sesuai kompetensi dan potensinya (%)	71	90	91	2.747.951.080,00	92	2.967.787.166,00	93	3.205.210.139,00	94	3.461.626.948,00	95	3.738.557.102,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (Indeks)	93,60	94	94,50	297.025.000,00	95	320.787.000,00	95,60	346.449.960,00	96	374.165.956,00	96,40	404.099.232,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.971.169.320,00		4.288.862.865,00		4.631.971.894,00		5.002.529.644,00		5.402.732.015,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.971.169.320,00		4.288.862.865,00		4.631.971.894,00		5.002.529.644,00		5.402.732.015,00	
Meningkatnya ASN yang Mengembangkan Kompetensi	Persentase ASN yang Mengembangkan Kompetensi (%)	43,16	43,82	44,38	3.971.169.320,00	44,97	4.288.862.865,00	45,78	4.631.971.894,00	47,14	5.002.529.644,00	47,56	5.402.732.015,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					978.507.100,00		1.056.787.666,00		1.141.330.678,00		1.232.637.134,00		1.331.248.104,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					858.837.300,00		927.544.282,00		1.001.747.824,00		1.081.887.651,00		1.168.438.663,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan ditindaklanjuti (%)	100	100	100	385.091.460,00	100	415.898.776,00	100	449.170.678,00	100	485.104.332,00	100	523.912.679,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya inovasi daerah	Persentase peningkatan inovasi daerah (%)	30	50	50	473.745.840,00	50	511.645.506,00	50	552.577.146,00	50	596.783.319,00	50	644.525.984,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					119.669.800,00		129.243.384,00		139.582.854,00		150.749.483,00		162.809.441,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil riset	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	119.669.800,00	100	129.243.384,00	100	139.582.854,00	100	150.749.483,00	100	162.809.441,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					27.286.323.594,00		28.770.038.825,00		30.844.841.931,00		33.912.429.286,00		35.977.423.628,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.250.000.224,00		17.930.809.586,00		19.138.474.353,00		21.269.552.301,00		22.323.116.485,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	17.250.000.224,00	100	17.930.809.586,00	100	19.138.474.353,00	100	21.269.552.301,00	100	22.323.116.485,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.793.275.190,00		3.016.737.205,00		3.258.076.181,00		3.518.722.276,00		3.800.220.058,00	
Meningkatnya Efektivitas Audit/Evaluasi/Reviu keuangan oleh APIP	Persentase Perangkat Daerah dengan Rekomendasi hasil Audit/Evaluasi/ Reviu keuangan yang ditindaklanjuti >90% (%)	90	90	91	2.019.701.840,00	92	2.181.277.987,00	93	2.355.780.226,00	94	2.544.242.644,00	95	2.747.782.056,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Auditor Eksternal	Persentase Temuan Auditor Eksternal (BPK/BPKP) yang ditindaklanjuti (%)	98	98,1	98,2	773.573.350,00	98,3	835.459.218,00	98,4	902.295.955,00	98,5	974.479.632,00	98,6	1.052.438.002,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					7.243.048.180,00		7.822.492.034,00		8.448.291.397,00		9.124.154.709,00		9.854.087.085,00	
Meningkatnya Komitmen Perangkat Daerah dalam pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang berhasil diusulkan ke penilaian ZI nasional (%)	40	50	51	2.929.533.180,00	52	3.163.895.834,00	53	3.417.007.501,00	54	3.690.368.101,00	55	3.985.597.549,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kualitas layanan pendampingan pengawasan dan QA	Persentase layanan konsultasi pengawasan yang sesuai standar (%)	100	100	100	4.313.515.000,00	100	4.658.596.200,00	100	5.031.283.896,00	100	5.433.786.608,00	100	5.868.489.536,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					53.148.034.877,00		56.420.716.439,00		60.667.482.100,00		65.240.219.881,00		70.224.405.684,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					48.313.112.015,00		51.947.186.090,00		55.789.168.955,00		59.912.320.889,00		64.365.169.531,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD (Kec. Angkinang)	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (%)	100	100	100	8.066.814,00	100	8.712.159,00	100	9.409.131,00	100	10.161.862,00	100	10.974.811,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD (Kec. Daha Barat)	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (%)	100	100	100	7.168.542,00	100	7.742.025,00	100	8.361.387,00	100	9.030.297,00	100	9.752.721,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD (Kec. Daha Selatan)	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (%)	100	100	100	9.499.862,00	100	9.499.862,00	100	9.499.862,00	100	9.499.862,00	100	9.499.862,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD (Kec. Daha Utara)	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (%)	100	100	100	7.167.330,00	100	7.740.716,00	100	8.359.974,00	100	9.028.772,00	100	9.751.073,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD (Kec. Kalumpang)	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (%)	100	100	100	9.499.098,00	100	10.259.026,00	100	11.079.748,00	100	11.966.127,00	100	12.923.418,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD (Kec. Kandangan)	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (%)	100	100	100	8.678.040,00	100	7.311.885,00	100	7.431.738,00	100	7.561.179,00	100	7.700.975,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD (Kec. Loksado)	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (%)	100	100	100	6.566.500,00	100	7.091.900,00	100	7.659.400,00	100	8.272.300,00	100	8.934.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD (Kec. Padang Batung)	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (%)	100	100	100	6.632.872,00	100	7.163.600,00	100	7.736.800,00	100	8.355.800,00	100	9.024.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD (Kec. Simpur)	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (%)	100	100	100	9.500.000,00	100	10.260.000,00	100	11.080.800,00	100	11.967.264,00	100	12.924.644,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD (Kec. Sungai Raya)	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (%)	100	100	100	3.286.500,00	100	3.549.500,00	100	3.833.500,00	100	4.140.300,00	100	4.471.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD (Kec. Telaga Langsat)	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi (%)	100	100	100	1.554.584,00	100	1.679.100,00	100	1.813.500,00	100	1.958.700,00	100	2.115.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD (Kec. Angkinang)	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan (%)	100	100	100	4.368.276.254,00	100	4.717.738.354,00	100	5.095.157.422,00	100	5.502.770.016,00	100	5.942.991.617,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD (Kec. Daha Barat)	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan (%)	100	100	100	2.547.061.981,00	100	2.750.826.939,00	100	2.970.893.094,00	100	3.208.564.542,00	100	3.465.249.703,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD (Kec. Daha Selatan)	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan (%)	100	100	100	2.859.371.851,00	100	3.259.371.851,00	100	3.259.371.851,00	100	3.259.371.851,00	100	3.259.371.851,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD (Kec. Daha Simpur)	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan (%)	100	100	100	3.357.132.663,00	100	3.625.703.276,00	100	3.915.759.538,00	100	4.229.020.301,00	100	4.567.341.923,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD (Kec. Daha Utara)	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan (%)	100	100	100	3.389.049.800,00	100	3.660.173.784,00	100	3.952.987.686,00	100	4.269.226.701,00	100	4.610.764.838,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD (Kec. Kalumpang)	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan (%)	100	100	100	3.487.712.176,00	100	3.766.729.150,00	100	4.068.067.482,00	100	4.393.512.881,00	100	4.744.993.911,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD (Kec. Kandangan)	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan (%)	100	100	100	9.744.375.731,00	100	10.109.213.621,00	100	10.945.241.318,00	100	11.820.860.623,00	100	12.766.529.474,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD (Kec. Loksado)	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan (%)	100	100	100	3.302.981.900,00	100	3.567.220.700,00	100	3.852.598.600,00	100	4.160.806.800,00	100	4.493.671.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD (Kec. Padang Batung)	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan (%)	100	100	100	4.100.436.640,00	100	4.428.471.800,00	100	4.782.749.800,00	100	5.165.369.900,00	100	5.578.599.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD (Kec. Sungai Raya)	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan (%)	100	100	100	3.339.307.656,00	100	3.606.452.500,00	100	3.894.968.900,00	100	4.206.566.600,00	100	4.543.092.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD (Kec. Telaga Langsat)	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan (%)	100	100	100	2.643.587.246,00	100	2.855.074.400,00	100	3.083.480.500,00	100	3.330.159.200,00	100	3.596.572.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (Kec. Angkinang)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)	100	100	100	419.787.735,00	100	453.371.834,00	100	489.641.579,00	100	528.812.905,00	100	571.117.936,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (Kec. Daha Barat)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)	100	100	100	537.816.315,00	100	580.840.920,00	100	627.308.947,00	100	677.493.661,00	100	731.693.154,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (Kec. Daha Selatan)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)	100	100	100	565.950.981,00	100	565.950.981,00	100	565.950.981,00	100	565.950.981,00	100	565.950.981,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (Kec. Daha Utara)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)	100	100	100	616.741.350,00	100	666.080.658,00	100	719.367.111,00	100	776.916.479,00	100	839.069.798,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (Kec. Kalumpang)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)	100	100	100	536.737.951,00	100	579.676.987,00	100	626.051.146,00	100	676.135.237,00	100	730.226.054,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (Kec. Kandangan)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)	100	100	100	417.667.500,00	100	511.661.562,00	100	518.759.564,00	100	527.527.113,00	100	537.019.946,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (Kec. Loksado)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)	100	100	100	426.392.577,00	100	460.504.300,00	100	497.345.000,00	100	537.133.000,00	100	580.104.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (Kec. Padang Batung)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)	100	100	100	450.266.757,00	100	486.288.400,00	100	525.191.800,00	100	567.207.700,00	100	612.584.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (Kec. Simpur)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)	100	100	100	473.140.000,00	100	510.991.200,00	100	551.870.496,00	100	596.020.135,00	100	643.701.741,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (Kec. Sungai Raya)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)	100	100	100	298.674.748,00	100	322.569.000,00	100	348.374.700,00	100	376.245.100,00	100	406.165.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (Kec. Telaga Langsat)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)	100	100	100	353.022.061,00	100	381.264.100,00	100	411.765.600,00	100	444.706.700,00	100	480.284.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					92.320.550,00		91.230.905,00		97.807.005,00		105.036.588,00		112.846.671,00	
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik (Kec. Angkinang)	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	6.070.400,00	100	6.556.032,00	100	7.080.515,00	100	7.646.955,00	100	8.258.712,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik (Kec. Daha Barat)	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	3.750.000,00	100	4.050.000,00	100	4.374.000,00	100	4.723.920,00	100	5.101.833,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik (Kec. Daha Selatan)	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	6.514.180,00	100	6.514.180,00	100	6.514.180,00	100	6.514.180,00	100	6.514.180,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik (Kec. Daha Utara)	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	11.204.600,00	100	12.100.968,00	100	13.069.045,00	100	14.114.569,00	100	15.243.735,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik (Kec. Kalumpang)	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	19.141.662,00	100	20.672.995,00	100	22.326.835,00	100	24.112.981,00	100	26.042.020,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik (Kec. Kandangan)	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	9.696.600,00	100	2.517.930,00	100	2.517.930,00	100	2.645.383,00	100	2.785.179,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik (Kec. Loksado)	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	7.109.550,00	100	7.678.400,00	100	8.292.700,00	100	8.956.200,00	100	9.672.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik (Kec. Padang Batung)	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	9.109.678,00	100	9.838.500,00	100	10.625.600,00	100	11.475.700,00	100	12.393.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik (Kec. Simpur)	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	12.500.000,00	100	13.500.000,00	100	14.580.000,00	100	15.746.400,00	100	17.006.112,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik (Kec. Sungai Raya)	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	4.799.880,00	100	5.183.900,00	100	5.598.700,00	100	6.046.600,00	100	6.530.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik (Kec. Telaga Langsat)	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik (%)	100	100	100	2.424.000,00	100	2.618.000,00	100	2.827.500,00	100	3.053.700,00	100	3.298.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.804.186.540,00		2.220.867.405,00		2.393.329.042,00		2.580.735.252,00		2.816.007.561,00	
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Kec. Angkinang)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	157.091.844,00	100	169.659.192,00	100	183.231.927,00	100	197.890.481,00	100	213.721.719,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Kec. Daha Barat)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	23.908.000,00	100	25.820.640,00	100	27.886.291,00	100	30.117.194,00	100	32.526.570,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Kec. Daha Selatan)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	28.255.480,00	100	28.255.480,00	100	28.255.480,00	100	28.255.480,00	100	28.255.480,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Kec. Daha Utara)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	33.069.800,00	100	35.715.384,00	100	38.572.615,00	100	41.658.424,00	100	44.991.098,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Kec. Kalumpang)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	26.529.450,00	100	28.651.806,00	100	30.943.950,00	100	33.419.467,00	100	36.093.024,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Kec. Kandangan)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	26.339.400,00	100	2.896.562,00	100	3.128.286,00	100	3.378.550,00	100	35.172.621,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Kec. Loksado)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	28.991.828,00	100	31.311.200,00	100	33.816.100,00	100	36.521.400,00	100	39.443.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Kec. Padang Batung)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	28.975.000,00	100	31.293.000,00	100	33.796.500,00	100	36.500.300,00	100	39.420.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Kec. Simpur)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	32.400.000,00	100	34.992.000,00	100	37.791.360,00	100	40.814.668,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan	100	100	100	19.199.504,00	100	20.735.500,00	100	22.394.400,00	100	24.186.000,00	100	26.120.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pemerintahan daerah (Kec. Sungai Raya)	Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)													
Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (Kec. Telaga Langsat)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	13.163.710,00	100	14.216.900,00	100	15.354.300,00	100	16.582.700,00	100	17.909.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan (Kec. Angkinang)	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	118.750.468,00	100	128.250.505,00	100	138.510.545,00	100	149.591.389,00	100	161.558.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan (Kec. Daha Barat)	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	636.145.810,00	100	147.037.074,00	100	158.800.472,00	100	171.504.510,00	100	185.224.870,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan (Kec. Daha Selatan)	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	115.289.590,00	100	115.289.590,00	100	115.289.590,00	100	115.289.590,00	100	115.289.590,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan (Kec. Daha Utara)	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	175.363.950,00	100	189.393.066,00	100	204.544.511,00	100	220.908.072,00	100	238.580.718,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan (Kec. Kalumpang)	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	172.630.135,00	100	186.440.546,00	100	201.355.790,00	100	217.464.251,00	100	234.861.392,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan (Kec. Kandangan)	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	247.681.060,00	100	36.875.160,00	100	46.099.985,00	100	57.211.100,00	100	70.560.774,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan (Kec. Loksado)	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	174.476.180,00	100	188.434.300,00	100	203.509.100,00	100	219.789.900,00	100	237.373.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan (Kec. Padang Batung)	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	202.937.881,00	100	219.173.000,00	100	236.707.000,00	100	255.643.600,00	100	276.095.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan (Kec. Simpur)	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	232.000.000,00	100	250.560.000,00	100	270.604.800,00	100	292.253.184,00	100	315.633.437,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan (Kec. Sungai Raya)	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	87.942.000,00	100	94.977.400,00	100	102.575.700,00	100	110.781.800,00	100	119.644.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan (Kec. Telaga Langsat)	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	225.445.450,00	100	243.481.100,00	100	262.959.700,00	100	283.996.500,00	100	306.716.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					785.928.760,00		878.216.140,00		944.159.070,00		1.016.083.785,00		1.094.525.975,00	
Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan (Kec. Angkinang)	Persentase pelanggaran perda dan perbup yang ditangani (%)	100	100	100	66.879.060,00	100	72.229.385,00	100	78.007.736,00	100	84.248.355,00	100	90.988.223,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan (Kec. Daha Barat)	Persentase urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	100	100	55.930.000,00	100	60.404.000,00	100	65.236.752,00	100	70.455.692,00	100	76.092.147,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan (Kec. Daha Selatan)	Persentase pelanggaran perda dan perbup yang ditangani (%)	100	100	100	38.150.000,00	100	38.150.000,00	100	38.150.000,00	100	38.150.000,00	100	38.150.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan (Kec. Daha Utara)	Persentase pelanggaran perda dan perbup yang ditangani (%)	100	100	100	94.308.800,00	100	101.853.504,00	100	110.001.784,00	100	118.801.927,00	100	128.306.081,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan (Kec. Kalumpang)	Persentase pelanggaran perda dan perbup yang ditangani (%)	100	100	100	102.257.400,00	100	141.331.551,00	100	157.456.082,00	100	175.577.378,00	100	195.911.725,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan (Kec. Kandangan)	Persentase pelanggaran perda dan perbup yang ditangani (%)	100	100	100	72.116.000,00	100	79.457.200,00	100	79.732.816,00	100	80.030.481,00	100	80.351.959,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan (Kec. Loksado)	Persentase pelanggaran perda dan perbup yang ditangani (%)	100	100	100	51.230.000,00	100	55.328.400,00	100	59.754.700,00	100	64.535.100,00	100	69.698.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan (Kec. Padang Batung)	Persentase pelanggaran perda dan perbup yang ditangani (%)	100	100	100	90.562.500,00	100	97.807.500,00	100	105.632.100,00	100	114.082.700,00	100	123.209.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan (Kec. Simpur)	Persentase pelanggaran perda dan perbup yang ditangani (%)	100	100	100	96.000.000,00	100	103.680.000,00	100	111.974.400,00	100	120.932.352,00	100	130.606.940,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan (Kec. Sungai Raya)	Persentase pelanggaran perda dan perbup yang ditangani (%)	100	100	100	37.595.000,00	100	40.602.600,00	100	43.850.900,00	100	47.359.000,00	100	51.147.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan (Kec. Telaga Langsat)	Persentase pelanggaran perda dan perbup yang ditangani (%)	100	100	100	80.900.000,00	100	87.372.000,00	100	94.361.800,00	100	101.910.800,00	100	110.063.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					747.719.324,00		828.362.929,00		927.821.662,00		1.038.354.575,00		1.161.108.474,00	
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tertib dan kondusif (Kec. Angkinang)	Persentase urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	100	100	65.110.800,00	100	70.319.664,00	100	75.945.237,00	100	82.020.856,00	100	88.582.525,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tertib dan kondusif (Kec. Daha Barat)	Persentase urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	100	100	83.022.300,00	100	94.138.484,00	100	106.855.914,00	100	121.012.079,00	100	136.767.157,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tertib dan kondusif (Kec. Daha Selatan)	Persentase urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	100	100	64.647.100,00	100	64.647.100,00	100	64.647.100,00	100	64.647.100,00	100	64.647.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tertib dan kondusif (Kec. Daha Utara)	Persentase urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	100	100	102.334.200,00	100	118.065.640,00	100	142.469.484,00	100	170.129.360,00	100	201.410.049,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tertib dan kondusif (Kec. Kalumpang)	Persentase urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	100	100	76.794.490,00	100	91.118.641,00	100	107.243.171,00	100	125.364.468,00	100	145.698.815,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tertib dan kondusif (Kec. Kandangan)	Persentase urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	100	100	27.000.000,00	100	27.278.000,00	100	30.547.056,00	100	34.099.684,00	100	37.960.338,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tertib dan kondusif (Kec. Loksado)	Persentase urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	100	100	68.253.000,00	100	73.713.300,00	100	79.610.400,00	100	85.979.300,00	100	92.857.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tertib dan kondusif (Kec. Padang Batung)	Persentase urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	100	100	49.437.500,00	100	53.392.500,00	100	57.664.000,00	100	62.277.200,00	100	67.259.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tertib dan kondusif (Kec. Simpur)	Persentase urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	100	100	62.250.000,00	100	74.910.000,00	100	89.197.200,00	100	105.290.928,00	100	123.388.790,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang	Persentase urusan pemerintahan umum yang	100	100	100	71.478.592,00	100	77.196.900,00	100	83.372.700,00	100	90.042.600,00	100	97.246.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
tertib dan kondusif (Kec. Sungai Raya)	terlaksana sesuai rencana (%)													
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang tertib dan kondusif (Kec. Telaga Langsat)	Persentase urusan pemerintahan umum yang terlaksana sesuai rencana (%)	100	100	100	77.391.342,00	100	83.582.700,00	100	90.269.400,00	100	97.491.000,00	100	105.290.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					404.767.688,00		454.852.970,00		515.196.366,00		587.688.792,00		674.747.472,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kec. Angkinang)	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	48.023.574,00	100	51.865.460,00	100	56.014.696,00	100	60.495.871,00	100	65.335.541,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kec. Daha Barat)	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	24.115.000,00	100	29.953.400,00	100	36.683.686,00	100	45.229.026,00	100	55.986.164,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kec. Daha Selatan)	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	59.144.480,00	100	59.144.480,00	100	59.144.480,00	100	59.144.480,00	100	59.144.480,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kec. Daha Utara)	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	69.352.130,00	100	82.428.470,00	100	98.251.965,00	100	117.907.663,00	100	142.217.051,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kec. Kalumpang)	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	49.226.190,00	100	59.082.380,00	100	71.007.046,00	100	85.422.816,00	100	102.831.468,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kec. Kandangan)	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	24.250.000,00	100	25.689.780,00	100	28.934.793,00	100	32.991.592,00	100	38.026.168,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kec. Loksado)	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	15.095.196,00	100	16.302.900,00	100	17.607.300,00	100	19.016.000,00	100	20.537.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kec. Padang Batung)	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	36.652.200,00	100	39.584.400,00	100	42.751.300,00	100	46.171.600,00	100	49.865.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kec. Simpur)	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	48.500.000,00	100	57.960.000,00	100	69.332.000,00	100	83.002.944,00	100	99.432.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kec. Telaga Langsat)	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu (%)	100	100	100	26.908.918,00	100	29.061.700,00	100	31.386.700,00	100	33.897.700,00	100	36.609.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Kel. Sungai Raya)					3.500.000,00		3.780.000,00		4.082.400,00		4.409.100,00		4.761.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.800.488.851,00		6.810.529.267,00		7.355.035.684,00		7.943.593.049,00		8.579.101.903,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.304.214.211,00		3.311.654.932,00		3.576.251.410,00		3.862.506.025,00		4.171.527.918,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan					3.304.214.211,00		3.311.654.932,00		3.576.251.410,00		3.862.506.025,00		4.171.527.918,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					969.702.290,00		970.222.229,00		1.047.840.000,00		1.131.667.208,00		1.222.200.584,00	
Meningkatnya wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM	Persentase masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila dan IPOLEKSOSBUDHANKAM yang baik (nilai post test lebih dari 70) (%)	100	100	100	969.702.290,00	100	970.222.229,00	100	1.047.840.000,00	100	1.131.667.208,00	100	1.222.200.584,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase peserta PASKIBRAKA yang kompeten (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.487.497.500,00		1.488.017.439,00		1.607.058.834,00		1.735.623.541,00		1.874.473.424,00	
Meningkatnya partisipasi politik di masyarakat	Persentase partai politik yang berkontribusi pada pendidikan politik di masyarakat (%)	100	100	100	1.487.497.500,00	100	1.488.017.439,00	100	1.607.058.834,00	100	1.735.623.541,00	100	1.874.473.424,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase partisipasi masyarakat dalam	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	mengikuti pemilu (5 tahunan) (%)													Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					53.650.000,00		54.169.939,00		58.503.534,00		63.183.817,00		68.238.522,00	
Meningkatnya Kapasitas dan kemandirian organisasi masyarakat	Persentase organisasi masyarakat yang aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan (%)	100	100	100	53.650.000,00	100	54.169.939,00	100	58.503.534,00	100	63.183.817,00	100	68.238.522,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					351.407.100,00		351.927.039,00		380.081.202,00		410.487.698,00		443.326.714,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan ketahanan ekososbud	Persentase penyelenggaraan kegiatan ketahanan ekososbud (%)	100	100	100	351.407.100,00	100	351.927.039,00	100	380.081.202,00	100	410.487.698,00	100	443.326.714,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					634.017.750,00		634.537.689,00		685.300.704,00		740.124.760,00		799.334.741,00	
Meningkatnya efektivitas deteksi dini potensi konflik di masyarakat	Persentase deteksi dini potensi konflik (%)	100	100	100	634.017.750,00	100	634.537.689,00	100	685.300.704,00	100	740.124.760,00	100	799.334.741,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber : SIPD RI Tahun 2025

IV.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve* (SMART-C).

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara kumulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perumusan indikator kinerja utama yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK),

Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program Perangkat Daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama dan pelayanan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah dan target capaian periode 2025-2029 sebagaimana tabel IV-2, tabel IV-3, tabel IV-4, dan Tabel IV-5 berikut:

Tabel IV-2 Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,6 – 5,7	5,9 – 6,8	6,08 – 7,15	6,25 – 7,55	6,45 – 7,85	6,6 – 8,7
2	Pendapatan Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	41,46	42,05-44,01	44,75 - 48,35	48,50 - 53,14	53,50 - 58,79	59,50 - 65,29	65,70 - 72,83
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,95	74,50	74,51-75,01	74,95-75,65	75,59 – 76,30	76,24 – 76,94	76,88 - 77,58
4	Persentase Penduduk Miskin	%	3,38	3,01 – 3,22	2,71 – 2,94	2,41 – 2,65	2,10 – 2,37	1,80 – 2,08	1,50 – 1,80
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,21	1,95 – 2,20	1,90-2,08	1,85 – 2,06	1,80 – 2,04	1,75 – 2,02	1,70 – 1,98
6	Gini Rasio	Indeks	0,288	0,282 – 0,286	0,280 - 0,284	0,278 – 0,282	0,276 – 0,280	0,274 – 0,278	0,272 -0,276
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,39	72,86	73,11	73,36	73,62	73,87	74,12
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N/A	1,38%	1,36%	1,27%	1,18%	1,09%	0,98%

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Tabel IV-3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
INDIKATOR TUJUAN										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,6 – 5,7	5,9 – 6,8	6,08 – 7,15	6,25 – 7,55	6,45 – 7,85	6,6 – 8,7	
2	Persentase Penduduk Miskin	%	3,38	3,01 – 3,22	2,71 – 2,94	2,41 – 2,65	2,10 – 2,37	1,80 – 2,08	1,50 – 1,80	
3	Gini Rasio	Indeks	0,288	0,282 – 0,286	0,280 - 0,284	0,278 – 0,282	0,276 – 0,280	0,274 – 0,278	0,272 -0,276	
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,95	74,50	74,51-75,01	74,95-75,65	75,59 – 76,30	76,24 – 76,94	76,88 - 77,58	
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	93,39	95,82	97,65	99,48	101,31	103,14	105,00	
INDIKATOR SASARAN										
1	ICOR	Indeks	5.78	5.35 - 5.26	5.11 - 4.47	4.98 - 4.28	4.87 - 4.08	4.74 - 3.95	4.65 - 3.61	
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,85	3,15	3,27	3,36	3,46	3,57	3,65	
3	Rasio PDRB Indusri Pengolahan	%	7,22	7,39	7,55	7,72	7,88	8,05	8,36	
4	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	%	4,51	4,9	5,17	5,32	5,47	5,65	5,78	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	% kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif	%	3,72	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,39	72,86	73,11	73,36	73,62	73,87	74,12	Terdapat perubahan formulasi perhitungan
7	Indeks Risiko Bencana	Indeks	119,36	115	113	110	107	105	100	
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,63	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	81,75	
9	Pendapatan Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	41,46	42,05-44,01	44,75 - 48,35	48,50 - 53,14	53,50 - 58,79	59,50 - 65,29	65,70 - 72,83	
10	Persentase Desa Mandiri	%	32.64	40.28	46.53	52.08	56.94	61.11	64.58	
11	Persentase PPKS yang Mandiri	%	87.78	87.90	88.10	88.25	88.40	88.65	88.90	
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,21	1,95 – 2,20	1,90-2,08	1,85 – 2,06	1,80 – 2,04	1,75 – 2,02	1,70 – 1,98	
13	Umur Harapan Hidup (SP2020)	Umur	72,82	73,10 – 73,30	73,40 – 73,60	73,65 – 73,85	73,85 – 74,05	74,05 – 74,25	74,30 – 74,60	
14	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,09	8,25 – 8,35	8,40 – 8,50	8,55 – 8,65	8,70 – 8,80	8,85 – 8,95	9,00 – 9,15	
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,48	12,65 – 12,75	12,80 – 12,95	12,95 – 13,10	13,10 – 13,25	13,25 – 13,40	13,35 – 13,50	
16	Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	Skor	59,86	62,25	65,00	68,25	71,25	74,25	78,00	
17	Indeks Harmoni	Indeks	N/A	> 5,5	> 5,5	> 5,5	> 5,5	> 5,5	> 5,5	
18	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,92	67,42	68,96	70,53	72,10	73,68	75,27	
19	Nilai SAKIP	Nilai	84,07	86,05	88,25	90,25	92,45	94,50	95,25	
20	Opini BPK terhadap LKPD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
21	SPIP Terintegrasi	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
22	Indeks Sistem Merit	Indeks	267.5	300	325	330	340	350	360	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	98,13	98,15	98,20	98,25	98,30	98,35	98,40	
24	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	N/A	1,40	1,56	1,84	1,98	2,23	2,45	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Tabel IV-4 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Aspek Geografi dan Demografi									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,18	83,80	84,20	85,65	86,30	87,15	88,00	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	4.9	4.68	4.42	4.36	4.21	4.16	4.09	
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	66.9	69	73	76	79	81	83	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	67,39	72,86	73,11	73,36	73,62	73,87	74,12	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	61,31	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00	
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	25	26,50	28	30	31,50	33	35	
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	N/A	81	83	85	87	89	91	
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N/A	1,38%	1,36%	1,27%	1,18%	1,09%	0,98%	
9	Indeks Risiko Bencana	Poin	119,36	115	113	110	107	105	100	
10	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.46	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
12	Rasio Penduduk	%	101	101	101	101	101	101	101	
13	Kepadatan Penduduk	Orang/M2	140	141	141	142	142	143	143	
14	Penurunan Emisi GRK Tahunan	CO ² eq	N/A	27.853,25	44.174,70	72.554,89	70.873,70	60.404,71	86.494,05	
15	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	CO ² eq	N/A	769.637,32	813.809,92	886.362,73	957.234,50	1.017.637,39	1.104.128,91	
16	Persentase Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	80.25	81.25	82.25	83.25	84.25	85.25	86.25	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,59 – 5,68	5,99 – 6,55	6,29 – 6,75	6,49 – 7,05	6,89 – 7,45	7,15 – 8,01	
2	Tingkat Kemiskinan	%	3,38	3,01 – 3,22	2,71 – 2,94	2,41 – 2,65	2,10 – 2,37	1,80 – 2,08	1,50 – 1,80	
3	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rp	41,46	42,05-44,01	44,75 - 48,35	48,50 - 53,14	53,50 - 58,79	59,50 - 65,29	65,70 - 72,83	
4	PDRB Per Kapita (ADHK)	Juta Rp	23,36	23,69 – 24,80	25,21 – 27,24	27,33 – 29,94	30,14 – 33,12	33,52 – 36,79	37,02 – 41,03	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,21	1,95 – 2,20	1,90-2,08	1,85 – 2,06	1,80 – 2,04	1,75 – 2,02	1,70 – 1,98	
6	Gini Rasio	Angka	0,288	0,282 – 0,286	0,280 - 0,284	0,278 – 0,282	0,276 – 0,280	0,274 – 0,278	0,272 -0,276	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,95	74,50	74,51-75,01	74,95-75,65	75,59 – 76,30	76,24 – 76,94	76,88 - 77,58	
8	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,82	73,10 – 73,30	73,40 – 73,60	73,65 – 73,85	73,85 – 74,05	74,05 – 74,25	74,30 – 74,60	
9	Prevalensi Stunting	%	19,8	17,8	15,8	13,8	11,8	9,8	9	
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,09	8,25	8,42	8,60	8,78	8,96	9,15	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,48	12,70	12,93	13,16	13,39	13,62	13,85	
12	Angka Literasi SD	Skor	58,17	62,00	65,00	68,00	72,00	75,00	78,00	
13	Angka Numerasi SD	Skor	52,43	55,00	58,00	62,00	65,00	70,00	75,00	
14	Angka Literasi SMP	Skor	68,46	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00	83,00	
15	Angka Numerasi SMP	Skor	60,37	62,00	65,00	68,00	70,00	72,00	75,00	
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	83,34	83.75	84	84.3	84.6	85	85.3	
17	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	44.44	44.66	44.88	50	50.22	50.44	50.66	
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	25,79	31,88	37,68	43,21	48,48	53,53	58,35	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Indeks Harmoni	Indeks	N/A	5.5	5.6	5.7	6.0	5.9	6.0	
20	Indeks Perlindungan Anak	Angka	56.68	57.89	58.56	58.91	59.6	60.19	60.72	
21	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	Angka	63.9	64.52	64.97	65.12	65.47	66.42	67.15	
22	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0.531	0.493	0.479	0.469	0.472	0.448	0.439	
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54.67	56.77	58.27	60.67	62.17	64.37	64.61	
24	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	N/A	36	37,01	38,01	39,02	40,01	41,02	
25	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	2	2	2	2	2	2	2	
26	Jumlah Kematian Balita	Jiwa	43	42	41	40	39	38	37	
27	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	90,1	91,1	92,1	93,2	94,2	95,1	95,5	
28	Cakupan Kepesertaan JKN	%	100	100	100	100	100	100	100	
29	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	%	90	90	90	90	90	90	90	
30	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	%	1,4	20	25	30	35	40	40	
31	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Cukup	%	66,3	67,90	69,70	72,90	79,20	80	82,10	
33	Nilai Asesmen Nasional Pendidikan (AKM [Asesmen Kompetensi Minimum])	Skor	59,86	62,25	65,00	68,25	71,25	74,25	78,00	
34	Total Fertility Rate (TFR)	angka	2.3	2.28	2.27	2.26	2.25	2.24	2.23	
35	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	angka	24.4	22.7	21.4	20.2	19.3	18.5	17.9	
36	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	93.8	93.9	94,0	94.2	94.3	94.4	94.5	
37	Indeks Lansia Berdaya	indeks	67.1	68.9	70.5	72.1	73.5	74.8	76,0	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
38	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	indeks	87.6	88.5	89.4	90.2	90.9	91.6	92.2	
39	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	44.6	45.3	46.1	46.8	47.5	48.1	48.8	
40	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pendaftaran	Persen	72.73	77.27	81.82	86.36	90.91	95.45	100	
41	Indeks Kewaspadaan Nasional	%	75,36	76,25	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	
III	Aspek Daya Saing Daerah									
1	Angka Ketergantungan	%	46,69	46,92	47,10	47,22	47,30	47,42	47,65	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	7,22	7,39	7,55	7,72	7,88	8,05	8,36	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3.71	3.75	3.79	3.82	3.86	3.90	3.96	
4	Rasio Kewirausahaan	%	0,57	0,78	0,88	0,97	1,07	1,16	1,25	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,77	75,79	76,88	77,97	79,06	80,15	81,24	
6	Indeks Inovasi Daerah	Skor	73,15	73.50	73,91	74,40	74,96	75,58	76.31	
7	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	5.88	6.00	6.20	6.40	6.60	6.80	7.00	
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	27,97	28,00	28,10	28,20	28,30	28,35	28,40	
9	Ekspor Barang dan Jasa	%	(14,46)	(14,00 – 11.00)	(14,00 – 11.00)	(14,00 – 11.00)	(14,00 – 11.00)	(14,00 – 11.00)	(14,00 – 11.00)	
10	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,63	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	81,75	
11	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	50.5	50.97	51.77	52.33	52.9	53.46	53.46	
12	Persentase Desa Mandiri	%	32.64	40.28	46.53	52.08	56.94	61.11	64.58	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3.66	3.73	3.76	3.80	3.83	3.87	3.89	
15	Indeks Rasa Aman	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	
16	Nilai Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	%	97.89	97.9	97.91	97.92	97.93	97.94	97.95	
18	Persentase Perlindungan Tenaga Kerja	%	12.72	41.28	48.27	55.02	61.54	67.84	73.94	
19	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Perekonomian	%	3	3.25	3.75	4	4.15	4.75	5	
20	Rasio Kewirausahaan	%	0.57	0.78	0.88	0.97	1.07	1.16	1.25	
21	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian	%	9.56	9.56	9.57	9.57	9.58	9.58	9.59	
22	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	11.80	12.67	13.02	13.38	13.74	14.10	14.15	
23	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,76	0,77	0,78	0,78	0,79	0,80	0,81	
IV	Aspek Pelayanan Umum									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	93,39	95,82	97,65	99,48	101,31	103,14	105,00	
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98.62	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks SPBE	Indeks	4,09	4,17	-	-	-	-	-	
4	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	1,40	1,56	1,84	1,98	2,23	2,45	
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.46	4.5	4.55	4.6	4.65	4.7	4.75	
6	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,53	3,54	3,56	3,60	3,62	3,66	3,70	
7	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	81,16	82,20	83,32	84,43	85,50	86,68	87,75	
8	Indeks Sistem Merit	Angka	267,5	300	325	330	340	350	360	
9	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	73,15	73,61	74,15	74,70	75,25	76,05	76,84	
10	Survei Penilaian Integritas	Angka	79	79.5	80	80,5	81,0	81,5	82	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	SPIP Terintegrasikan	Level	Level 3	Level	Level 3	Level	Level 3	Level	Level 3	
12	Nilai SAKIP	Nilai	84,07	86,05	88,25	90,25	92,45	94,50	95,25	
13	Opini BPK terhadap LKPD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	98,13	98,15	98,20	98,25	98,30	98,35	98,40	
15	Indeks RB General	Indeks	81,21	83,19	84,57	85,95	87,33	88,71	90,00	
16	Indeks RB Tematik	Indeks	12,18	12,63	13,08	13,53	13,98	14,43	15,00	
	Pelayanan Urusan Wajib									
IV.1	Terkait Pelayanan Dasar									
IV.1.1	Pendidikan									
IV.1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	103,4	100	100	100	100	100	100	
IV.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	104,3	100	100	100	100	100	100	
IV.1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	104,9	100	100	100	100	100	100	
IV.1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam kesetaraan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Pelayanan Urusan Wajib									
IV.1.2	Kesehatan									
IV.1.2.1	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Persen	1,84	1,85	1,90	1,95	2	2	2	
IV.1.2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	96,8	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IV.1.2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	99,7	100	100	100	100	100	100	
IV.1.2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98	100	100	100	100	100	100	
IV.1.2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	91,4	100	100	100	100	100	100	
IV.1.2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	96,89	100	100	100	100	100	100	
IV.1.2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	93,6	100	100	100	100	100	100	
IV.1.2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	99,36	100	100	100	100	100	100	
IV.1.2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	98	100	100	100	100	100	100	
IV.1.2.11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
IV.1.3.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Tidak memiliki WS kewenangan kabupaten

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IV.1.3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Persen	0	0	0	0	0	0	0	HSS tidak memiliki pantai
IV.1.3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	82,38	82,38	82,50	82,61	82,72	82,83	82,94	
IV.1.3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	83,46	90,46	90,62	90,78	90,93	91,09	91,25	
IV.1.3.5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	83,23	80,06	80,21	80,37	80,53	80,69	80,85	
IV.1.3.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.3.7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	67,46	64,56	66,06	67,56	69,06	70,56	72,06	
IV.1.3.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
IV.1.4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Pada 2024 tidak ada bencana
IV.1.4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Pada 2024 tidak ada relokasi
IV.1.4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persen	8,78	15,47	19,14	22,81	26,48	30,15	33,83	
IV.1.4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	6,31	5,39	5,23	5,07	4,91	4,76	4,6	
IV.1.4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IV.1.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
IV.1.5.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.5.3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.5.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.5.5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7	7	7	7	7	7	7	
IV.1.6	Sosial									
IV.1.6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.1.6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar									
IV.2.1	Tenaga Kerja									
IV.2.1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	50	60	70	80	90	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IV.2.1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	9,55	11,80	11,86	11,92	11,98	12,04	12,10	
IV.2.1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Tenaga Kerja	41.19	43.28	44.82	46.36	47.90	49.43	50.97	
IV.2.1.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	31,25	33,75	36,25	38,75	41,25	43,75	46,25	
IV.2.1.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Persen	32,87	37,09	38,98	40,64	42,11	43,43	44,61	
IV.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
IV.2.2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	26,58	30	32	35	37	40	42	
IV.2.2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.2.2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 Penduduk Perempuan	16,03	<15	<15	<15	<15	<15	<15	
IV.2.3	Pangan									
IV.2.3.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	104,79	100	100	100	100	100	100	
IV.2.4	Pertanahan									
IV.2.4.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.2.4.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.2.4.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IV.2.12.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	%	8,88	10,75	11,25	12,00	12,75	13,50	13,75	
IV.2.13	Kepemudaan dan Olahraga									
IV.2.13.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri	%	9,89	12,01	12,18	12,30	12,42	12,54	12,66%	
IV.2.13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	20,23	20,35	20,75	21	21,50	21,75	22,15	
IV.2.13.3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	16	18	20	22	24	26	28	
IV.2.14	Statistik									
IV.2.14.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.2.14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
IV.2.15	Persandian									
IV.2.15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	60,5	71,47	73,64	77,52	79,84	82,17	84,50	
IV.2.16	Kebudayaan									
IV.2.16.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
IV.2.17	Perpustakaan									
IV.2.17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	83,27	85	85,25	85,5	85,75	86	86	
IV.2.17.2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	83,34	83,75	84	84,3	84,6	85	85	
IV.2.18	Kearsipan									
IV.2.18.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	Persen	87,02	87.5	87.7	88	88.5	88.7	89	
IV.2.18.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

[illegible]

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IV.4.1.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
IV.4.1.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	58,5	60	61	62	63	64	65	
IV.4.1.6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
IV.4.2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)									
IV.4.2.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
IV.4.2.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	95,86	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	
IV.4.2.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	80,19	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	
IV.4.3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)									
IV.4.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	71,53	71,66	71,72	71,72	71,97	72,53	72,65	
IV.4.3.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	25,66	25,90	32,55	32,62	32,75	32,90	32,65	
IV.4.3.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	55,69	57,87	60,05	62,23	64,41	66,59	68,77	
IV.4.4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)									
IV.4.4.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	3,24	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
IV.4.4.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	12,91	13	13	13	13	13	13	
IV.4.4.3	Assets management 1. apakah ada daftar asset tetap?	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2. apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? 3. apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? 4. apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?									
IV.4.4.4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	32,10	32,2	32,3	32,4	32,5	32,6	32,7	
IV.4.5	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)									
IV.4.5.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	100,7	100	100	100	100	100	100	
IV.4.5.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Angka	83,3	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang meneguhkan arah pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berlandaskan Rancangan Teknokratik RPJMD, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, serta mengacu pada RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025–2029. Dengan kerangka tersebut, RPJMD hadir sebagai jembatan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.

RPJMD ini menjadi pijakan utama bagi perwujudan visi “*Membangun Desa, Menata Kota, Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (SEMANGAT)*”. Visi tersebut diwujudkan melalui fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi rakyat yang inklusif, pembangunan infrastruktur yang merata, serta tata kelola pemerintahan yang lebih melayani. Semangat pembangunan diarahkan untuk memperkuat desa sebagai basis pertumbuhan, sekaligus menata kota sebagai pusat kemajuan yang modern dan berdaya saing.

Tantangan utama yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan layanan dasar yang terus berkembang, serta perubahan sosial dan lingkungan, akan dihadapi dengan inovasi, kolaborasi, dan keberanian untuk melakukan terobosan. Pembangunan dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik yang lebih baik, hingga terciptanya ruang-ruang baru bagi tumbuhnya generasi muda yang produktif dan kreatif.

Lebih dari itu, RPJMD ini juga menegaskan keterkaitan erat dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai agenda pembangunan global. Fokus pembangunan daerah diarahkan untuk sejalan dengan tujuan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, hingga perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan Hulu Sungai Selatan tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dunia.

Melalui arah kebijakan yang berpihak pada masyarakat, visi yang jelas, serta sinergi lintas sektor, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 optimis menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata, keadilan sosial, serta kemajuan daerah yang berdaya saing tinggi.

V.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi dalam penyusunan RPJMD ini adalah :

1. RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran serta APBD masa transisi, yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. RPJMD sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMD sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPJMD masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3. RKPD masa transisi pada tahun pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih

V.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2026-2030;
2. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, yang

memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan kebutuhan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029;

3. Renstra Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 ini adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Program Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah. Sebagai pelaksana maka Perangkat Daerah wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut;
5. RPJMD menjadi pedoman Pemerintah Daerah adalah hal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 hingga Tahun 2030;
6. Program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional, dalam hal ini apabila pemerintah daerah tidak mampu untuk membiayainya, maka dapat dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, serta kerja sama kemitraan dengan lembaga non pemerintah lainnya baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional dengan tetap;
7. Bupati berkewajiban menyebarluaskan peraturan kepala daerah tentang RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
8. Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh Bappelitbangda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
11. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
12. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta disebarluaskan melalui kanal resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR